Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa 4

Psikologi dan Integrasi Bangsa



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA


HIMPSI

Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa **4**

Psikologi dan Integrasi Bangsa



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA

Psikologi dan Integrasi Bangsa
(Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa 4)

Editor:
- A Supratiknya
- Tjipto Susana
- Juneman Abraham
- Rahkman Ardi

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Psikologi dan Integrasi Bangsa / [Abd A'la ... [et al.]] ; editor, A Supratiknya ... [et al.].
– Jakarta : Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), 2020.
hlm.: xvi + 456; 17x25 cm. – (Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa 4)

ISBN 978-602-96634-9-5

1. Psikologi... I. A. Supratiknya. II. Seri.

Perwajahan sampul dan tata letak: Bivita Brata Prabawa Riko

Cetakan Pertama, Februari 2020.
Penerbit:



Himpunan Psikologi Indonesia
Jl. Kebayoran Baru No. 85 B
Kebayoran Lama, Velbak
Jakarta 12240 Indonesia
Telp./Fax. 021-72801625
Website: himpsi.or.id
Email: sekretariatpp_himpsi@yahoo.co.id, sekretariat.pp@himpsi.or.id

Sambutan Ketua Umum HIMPSI

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dari luasan wilayah, keberagaman suku bangsa, kehidupan sosial dan budaya, serta banyak hal lainnya. Luas wilayah terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Beragam suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat hidup di Indonesia. Keberagaman itu terjalin dalam satu ikatan, yaitu bangsa Indonesia di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalinan sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia didasarkan pada kesamaan pandangan, ideologi dan falsafah hidup, yang secara jelas diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu tertulis di lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila.

Bangsa yang besar dengan banyak perbedaan di dalamnya, tentu saja, mempunyai potensi untuk mengalami konflik dan perpecahan, baik yang disebabkan persoalan internal maupun yang didorongkan oleh pihak bangsa lainnya. Oleh karena itu, merawat kebangsaan, kesatuan dan persatuan bangsa harus terus menerus dilakukan untuk menjaga integrasi bangsa Indonesia. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sebagai salah satu komponen bangsa yang berisikan para ilmuwan dan praktisi bidang Psikologi serta para Psikolog merasa perlu untuk turut serta berperan dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Perwujudan peran HIMPSI untuk tujuan itu salah satunya diwujudkan dengan penerbitan buku ini, yang diberi judul "Psikologi dan Integrasi Bangsa'.

Integrasi Bangsa merupakan persoalan yang dihadapi sebuah bangsa, yang terus ada senyampang bangsa itu masih ada. Integrasi bangsa adalah konsep multidimensi yang tidak hanya kompleks, namun juga dinamis. Kompleks disebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi dan saling terkait satu faktor dengan faktor lainnya. Komplek juga bermakna satu faktor pada aspek tertentu menjadi perekat kesatuan, tetapi di aspek lainnya faktor yang sama dapat menjadi penyulut perpecahan. Dinamis menunjukkan tidak hanya bahwa tingkat kesatuan dan persatuan suatu bangsa dapat berubah sewaktu-waktu, namun juga menunjukkan bahwa faktor penyebab disintegrasi bangsa dapat berbeda di masa lalu dengan masa kini serta di masa mendatang. Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan disintegrasi lebih besar dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Oleh karena itulah buku ini hadir untuk memberikan sumbangan pemikirannya atas persoalan tersebut.

Buku ini merupakan buku ke-4 Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa. Buku Seri pertama berjudul "Revolusi Mental: Makna dan

Realisasi", Buku Seri ke-2 berjudul "Psikologi dan Teknologi Informasi", dan Buku Seri ke-3 berjudul "Psikologi dan Pendidikan dalam Konteks Kebangsaan'. Ketiga Buku Seri tersebut diterbitkan oleh Pengurus Pusat HIMPSI Periode 2014 -2018. Buku Seri ke-4 ini merupakan kelanjutan buku tersebut diterbitkan oleh Pengurus Pusat HIMPSI Periode 2018-2022. Tujuan penerbitan Buku Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa adalah memberikan pengetahuan, perspektif, dan pandangan Psikologi terhadap berbagai aspek kehidupan. Harapannya buku ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk proses Pendidikan di Indonesia serta untuk merespon persoalan yang dihadapi bangsa ini, khususnya untuk Buku Seri ke-4 adalah persoalan disintegrasi bangsa.

Apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada 38 penulis yang telah menulis 27 artikel untuk memberikan sumbangan pemikirannya atas persoalan yang terkait integrasi bangsa. Apresiasi dan ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim Editor yang terdiri dari A. Supratiknya, Tjipto Susana, Rahkman Ardi, dan Juneman Abraham yang telah bekerja keras tidak hanya melakukan editing artikel yang masuk, namun juga kegiatan yang terkait dengan pertemuan-pertemuan membahas tema, menetapkan penulis undangan, berkomunikasi dengan penulis, dan seluruh proses penerbitan buku ini.

Kami memohon kepada pimpinan penyelenggara pendidikan tinggi Psikologi di Indonesia, baik itu Dekan atau Ketua Program Studi, untuk dapat menggunakan Buku Seri terbitan HIMPSI ini sebagai salah satu buku referensi mata kuliah. Dengan demikian, pemikiran yang disampaikan dalam Buku Seri ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan suatu saat pemikirannya akan berkembang untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Kami juga berharap buku ini dapat menginspirasi para pemegang kekuasaan dan berbagai pihak manapun dalam mencari solusi serta merespon persoalan bangsa yang terkait dengan tema-tema dalam Buku Seri ini. Terakhir, kami menyampaikan selamat membaca buku ini dan Buku Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa yang telah terbit. Salam Berkarya untu Bangsa.

HIMPSI Berkarya untuk Bangsa
Jakarta, 22 Januari 2020

Dr. Seger Handoyo, Psikolog
Ketua Umum



MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

Executive Note

Buku Seri Keempat Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa

"Psikologi dan Integrasi Bangsa"

Bangsa yang terintegrasi dengan baik dalam persatuan dan kesatuan membutuhkan keterbukaan, di samping pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas.Keterbukaan dalam segala bidang tak pelak merupakan inspirasi yang kita - sebagai bangsa Indonesia - peroleh dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi terbuka yang secara dinamis memiliki kapasitas untuk bergerak bersama dengan perkembangan zaman. Keterbukaan merupakan penawar yang baik dari "me-*liyan*-kan pihak lain" (istilah saya ambil dari Pengantar Editor buku ini, yang artinya: menyangkal keberadaan orang lain) yang membahayakan integrasi bangsa.

Dalam bidang Pertahanan dan Keamanan - sebuah ranah dari Kementerian yang saya pimpin - memang telah terbit dua risalah penting, yakni (1) *Balancing Scientific Openness and National Security* (National Academy of Sciences, 1999), serta (2) *Balancing Scientific Publication and National Security Concerns* (Dana A. Sea, 2003). Kedua risalah tersebut mengajak kita untuk tidak anti-keterbukaan terhadap hal ihwal dan proses-proses ilmiah. Kendati, pada saat yang sama, kita perlu mengusahakan dengan bijak asesmen risiko keterbukaan dengan tetap berprinsip bahwa keterbukaan seyogianya menguntungkan hankam negara dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia.

Tidak kebetulan, saya mendengar rencana Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) meluncurkan buku ini bersamaan dengan *Psikologi Indonesia* yang mengangkat tema Sains Terbuka (*open science*) dalam sebuah Sarasehan Rancangan Undang Undang Profesi Psikologi dalam tahun ini. Buku yang diterbitkan oleh HIMPSI ini merupakan salah satu wujud konkret keterbukaan ilmiah dalam mendiskusikan peran psikologi untuk membangun serta merawatintegrasi bangsa yang patut kita banggakan.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penerbitan buku **"Psikologi dan Integrasi Bangsa"**. Kami berharap bahwa dapat dikembangkan sebuah cabang keilmuan psikologi Indonesia yang menaungi studi-studi yang tertulis dalam buku ini; entah dinamai sebagai Psikologi Kebangsaan, atau yang lain. Psikologi Kebangsaan itulah yang akan menjadi salah satu kontributor penting bagi manusia Indonesia untuk mengelola bahkan mampu - dengan regulasi diri dan kelompoknya - mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap hankam negara, sebagai syarat perlu masyarakat adil, makmur, berdaulat, dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita NKRI yang termuat dalam Mukadimah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia

Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto

Psikologi dan Integrasi Bangsa

Pengantar Editor

Dalam diskusi curah pendapat Kompartemen 5-6 di Yogyakarta antara lain membahas alternatif tema buku yang akan menjadi buku keempat Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa, tema yang spontan muncul adalah "Psikologi dan integrasi bangsa". Merespon tema itu, salah seorang peserta diskusi setengah berteriak menyeletuk "Itu tema abadi yang tak akan pernah lekang oleh zaman". Alhasil, tanpa banyak berdebat lagi keempat peserta diskusi pun segera menyetujuinya sebagai tema yang layak dan penting diangkat.

Kendati tidak pernah terucapkan, diduga ada beberapa alasan di balik pemilihan tema itu. Pertama, gejala polarisasi masyarakat ke setidaknya dua kutub mengikuti arus dukungan ke salah satu dari dua kontestan pasangan calon presiden-wakil presiden dalam Pemilu 2019. Demi keyakinan, persepsi, perasaan, atau sekadar ikut arus pendapat yang diperoleh dari entah mana dan yang isinya entah seperti apa, pilihan simpati pada salah satu kontestan itu kenyataannya telah mampu membuat satu pihak me-liyan-kan pihak lain sampai ke taraf yang mengusik harmoni kehidupan sehari-hari baik di lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, bahkan di lingkungan keluarga. Ibarat gangguan penyakit kulit, semoga gejala itu sekadar merupakan bisul akibat gigitan nyamuk yang akan hilang sesudah hiruk-pikuk *pilpres* ini berlalu, bukan eksim kronis yang terus mengganggu sampai entah kapan. Tetapi mungkin justru di situlah persoalannya sebagaimana tercermin dari penilaian sahabat tadi bahwa bagi kita semua integrasi bangsa merupakan tema yang bersifat abadi.

Mengikuti pendapat Anderson (1983, dalam Yogeswaran & Dasgupta, 2014) yang juga disitir oleh banyak pakar-peneliti lain, bangsa "hanyalah" komunitas politik yang terbayang. Pertama, kelompok bangsa apalagi bangsa Indonesia memiliki populasi yang begitu besar sehingga warga bangsa itu tidak saling kenal bahkan mungkin sampai seseorang mati pun. Sekalipun begitu, setiap warga rela mengidentifikasikan diri dengan bangsanya serta menghayati rasa terhubung dengan warga lain dalam bangsa itu, sekali lagi kendati pun tidak saling mengenal. Pada kasus kita bangsa Indonesia, kerelaan untuk mengidentifikasi diri dan membangun perasaan terhubung sebagai satu bangsa itu secara formal-resmi diwakili oleh para tokoh pemuda dan para bapak bangsa di sekitar peristiwa bersejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kedua, kendati ada banyak perbedaan bahkan ketimpangan antar warga dalam sebuah bangsa, komunitas terbayang itu tetap dijunjung tinggi sebagai bentuk persaudaraan horisontal antar warga. Persaudaraan inilah

yang memungkinkan jutaan orang merasakan kedekatan secara mendalam kepada bangsanya – konkret, kepada sesama warga - bahkan bersedia mati demi membela komunitasnya itu kendati hanya terbayang (Yogeswaran & Dasgupta, 2014). Dari dua pokok gagasan itu pun sudah tampak jelas bahwa integrasi bangsa atau nasionalisme-patriotisme dalam arti kerelaan untuk saling terbubung dalam persaudaraan sebagai satu bangsa bukanlah sebuah peristiwa yang sekali disepakati dan diucapkan akan berlaku selamanya, melainkan lebih merupakan proses yang harus selalu dikawal, dirawat, dan diperbaharui tanpa kenal lelah, tanpa kenal henti.

Apalagi di tengah berkembangnya jenis kewargaan baru yang disebut kewargaan budaya bersama saudari kembarnya berupa jenis nasionalisme baru yang disebut *deterritorialized nationalism* atau nasionalisme terdeteritorialisasi (Roudemetof, 2014), kebutuhan untuk mengawal-merawat-memperbaharui imajinasi sekaligus persaudaraan sebagai satu bangsa Indonesia itu terasa makin mendesak. Menurut konsep nasionalisme terdeteritoriallisasi, kemudahan mobilitas fisik dan virtual yang kita nikmati kini cepat atau lambat namun pasti akan memperluas cakupan imajinasi warga setiap negara bangsa dalam menarik garis-garis batas tentang komunitas terbayangnya, tidak sebatas sebangsa se-teritori melainkan juga mencakup sesama yang dipandang senasib di mana pun mereka berada. Uniknya, perluasan horizon imajinasi tentang komunitas terbayang tersebut sekaligus dibarengi dengan menguatnya rasa terikat pada yang lokal atau *glokalisasi* (Roudemetof, 2014). Begitulah, dalam kewargaan budaya kewargaan bukan lagi dimaknai sebagai sekadar keanggotaan dalam sebuah negara bangsa, melainkan sebagai pengalaman bersama, proses berpikir bersama, serta menemukan bersama bentuk-bentuk ungkapan dan wacana budaya pada tingkat lokal, nasional maupun global ke arah pemberdayaan diri (Delanty, dalam Pawley, 2008). Artinya, kewargaan budaya melahirkan fenomena nasionalisme terdeteritorialisasi yang dalam konteks Indonesia dan meminjam bahasa Mangunwijaya adalah 'manusia pasca-Indonesia'. Entah tinggal di negeri orang lain maupun di negeri sendiri, 'manusia pasca-Indonesia tidak berarti lalu dia kehilangan ke-Indonesia-annya … Cuma horizonnya, dimensinya, sudah lebih luas, sudah pascapulau..." (Mangunwijaya, 1999, h. 42).

Berdasarkan uraian di atas, baik pada dirinya maupun menghadapi tuntutan perkembangan kewargaan budaya, integrasi bangsa atau nasionalisme memang merupakan sebuah proses, yaitu proses belajar menjadi Indonesia yang senantiasa harus diperbaharui, disegarkan, dan dirawat secara terus-menerus. Psikologi sebagai disiplin ilmu maupun praktik berbasis disiplin ilmu yang berurusan dengan tingkah laku manusia, kiranya mampu memberikan kontribusi yang kaya dalam memperbincangkan upaya kita merawat dan mengawal proses

integrasi bangsa sebagai proyek yang sebagaimana disebut oleh seorang sahabat di awal catatan ini bersifat abadi, terlebih dalam era manakala kita tak bisa mengelak dari keniscayaan untuk masuk ke dalam pusaran arus glokalisasi.

Buku yang merupakan buku keempat Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa yang diberi judul "Psikologi dan Integrasi Bangsa ini" memuat 27 tulisan yang melibatkan 38 penulis. Untuk membantu membangun benang merah antar gagasan yang dilontarkan oleh para penulis, 27 artikel itu disajikan dalam lima bagian. Bagian pertama diberi subjudul "Integrasi Bangsa" dan terdiri dari 9 tulisan. Bagian ini dibuka dengan tulisan Abd A'la, seorang pakar sejarah perkembangan pemikiran Islam dari UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul "Integrasi bangsa dalam perspektif Islam: Konsep integrasi dan kebangsaan dari Islam di Timur Tengah hingga Indonesia" sebagai semacam prolog. Tulisan pembuka ini secara berturut-turut diikuti oleh tulisan Inge Hutagalung berjudul "Independensi berita dan integrasi bangsa", tulisan Rahmatsyam Lakoro dan Ike Herdiana berjudul "Belajar hidup dari masyarakat di wilayah "ring of fire": Telaah media edukasi, komunikasi dan budaya", tulisan Gita Widya Laksmini Soerjoatmodjo berjudul "Ruang kelas dan integrasi bangsa", tulisan Meike Kurniawati berjudul "'Meng-iklan-kan integrasi bangsa", tulisan Amy Mardhatillah dan Ahmad Naufalul Umam berjudul "Membangun mim pi bersama ke arah integrasi bangsa", tulisan Fitria Annisa dan Indah Andika Octavia berjudul "Pendidikan karakter sebagai pilar untuk membangun moral bangsa", tulisan Desni Yuniarni berjudul "Penanaman nilai-nilai kultural pada anak usia dini di PAUD melalui model pembelajaran berwawasan kebangsaan sebagai sarana integrasi bangsa", dan ditutup dengan tulisan Clara R.P. Ajisuksmo dan Lucia R.M. Royanto berjudul "Penguatan pendidikan karakter dan nilai utama bangsa Indonesia".

Bagian kedua diberi subjudul "Keberagaman" dan terdiri dari 4 tulisan, meliputi secara berturut-turut: tulisan Sumaryono berjudul "Mengelola keberagaman, melejitkan kejayaan berbangsa", tulisan Ira Puspitawati, Josefina Marike Watofa dan Wahyu Rahardjo berjudul "Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif *the psychology of diversity*", tulisan M. Arief Sumantri berjudul "Memancing kesadaran akan keberagaman", dan ditutup dengan tulisan Nisa Rachmah Nur Anganthi berjudul "Refleksi keragaman spiritual-indigenus dalam ranah akademis".

Bagian ketiga diberi subjudul "Pemilu dan korupsi". Bagian ini terdiri dari 5 tulisan, meliputi secara berturut-turut: tulisan Jony Eko Yulianto dan Jessie Janny Thenarianto berjudul "'Cebong dan kampret': Simbolisme politik dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 di Indonesia", tulisan Harijanto Tjahjono berjudul "*American Football* dan *MRI Scanner:* Belajar tentang fanatisme politik",

tulisan Imadduddin dan Yulia Hairina berjudul "Korupsi dan disintegrasi bangsa", tulisan Adi Heryadi berjudul "Polarisasi politik dalam Pemilu", dan ditutup dengan tulisan Bayu Jatmiko berjudul "'Rasa takut bukan bawaan dari lahir': Sebuah revolusi mental".

Bagian keempat diberi judul "Identitas kebangsaan" dan terdiri dari 5 tulisan. Bagian ini dibuka dengan tulisan Shahnaz Safitri berjudul "Menjadi 'kita' sebagai bangsa: Peran kerendahan hati intelektual dalam kognisi sosial", diikuti secara berturut-turut oleh tulisan Clara Moningka berjudul "Saya Tionghoa dan saya Indonesia. Identitas sosial dan kepuasan hidup", tulisan Rifqi Muhammad berjudul "Dari identitas nasional menjadi identitas diri", tulisan Livia Yuliawati berjudul "Menumbuhkan nasionalisme melalui identitas moral dan tujuan hidup pada generasi muda", serta ditutup dengan tulisan Rini Nurahayu berjudul "Hubungan antar suku bangsa dalam kampus".

Bagian kelima diberi subjudul "Generasi milenial dan Integrasi Bangsa". Bagian terakhir ini terdiri dari 4 tulisan, meliputi secara berturut-turut: tulisan Ermida Simanjuntak dan Ilham Nur Alfian berjudul "Integrasi bangsa lewat pendidikan literasi digital pada generasi muda", tulisan Ike Herdiana berjudul "Integrasi bangsa: Tantangan bagi generasi milenial", tulisan Nicolas Indra Nurpatria, Christiany Suwartono, Harini Tunjungsari, dan Penny Handayani berjudul "Dalam naungan Tuhan, bersama merajut jalinan persatuan: Membaca tafsir remaja milenial akan Pancasila", dan ditutup dengan tulisan Agus Suwignyo – seorang pakar sejarah pendidikan dari Universitas Gadjah Mada - berjudul "Mistifikasi generasi Y" yang sekaligus berfungsi sebagai sejenis epilog.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Pengurus Pusat HIMPSI yang memfasilitasi secara penuh pengerjaan buku ini sejak awal sampai kelahirannya sebagai buku, dan tentu saja juga kepada para penulis yang rela menyisihkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan masing-masing untuk berkontribusi menyumbangkan tulisan dalam buku ini. Selamat membaca.

Tim Editor

A. Supratiknya
Tjipto Susana
Rahkman Ardi
Juneman Abraham

Mangunwijaya, Y.B. (1999). *Pasca-Indonesia pasca-Einstein. Esei-esei tentang kebudayaan Indonesia abad ke-21.* Yogyakarta: Kanisius.

Pawley, L. (2008). Cultural citizenship. *Sociology Compass, 2*(2), 594-608. https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2008.00094.x

Roudemetof, V. (2014). Nationalism, globalization and glocalization. *Thesis Eleven, 122*(1), 18-33. https://doi.org/10.1177%2F0725513614535700

Yogeswaran, K., & Dasgupta, N. (2014). Conceptions of national identity in a globalized world: Antecedents and consequences. *European Review of Social Psychology, 25*(1), 189-227. https://doi.org/10.1080/10463283.2014.972081

Daftar Isi

Psikologi dan Integrasi Bangsa
(Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa 4)

Bagian 4 - Identitas Kebangsaan

Bagian 5 - Generasi Milenial dan Integrasi Bangsa

bagian 1

Integrasi Bangsa

Integrasi Bangsa dalam Perspektif Islam: Konsep Integrasi dan Kebangsaan dari Islam di Timur Tengah hingga Indonesia

Abd A'la*

Mendiskusikan integrasi bangsa dalam perspektif agama tidak bisa dilepaskan sama sekali selain dari dasar-dasar agama itu sendiri, juga dari tokoh dan atau kelompok agama dalam memandang dan menyikapi konsep tentang bangsa, integrasi bangsa, negara dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dalam menyikapi hal itu, sepanjang sejarah yang dilalui, para tokoh dan kelompok agama memiliki pandangan berbeda, antara yang satu dengan yang lain. Terjadinya perbedaan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama atau teks suci, orientasi politik, dan lain sebagainya.

Seperti itu pula hal yang terjadi dan berkembang dalam Islam. Tulisan ini akan menguak sejarah kemunculan dan perkembangan kebangsaan di negara-negara Muslim dari Timur Tengah dan sekitarnya, di anak benua India hingga di kepulauan Nusantara. Sejalan dengan itu, pandangan beberapa tokoh dan kelompok Islam dan dasar mereka dalam meneguhkan pandangan mereka mengenai kebangsaan dan integrasi bangsa juga diangkat ke permukaan.

Ulasan kemunculan kebangsaan di Nusantara dan pandangan tokoh dan organisasi Islam, terutama yang berada pada arus utama dan mayoritas mengenai hal tersebut akan diangkat agak luas. Bagaimanapun juga, hubungan Islam dan negara, termasuk persoalan kebangsaan di Indonesia, menarik sekali untuk dicermati. Sebab pada satu pihak, umat Islam Indonesia merupakan Muslim terbesar di dunia, dan pada pihak lain Indonesia bukan negara agama (Islam), tapi nilai dan substansi ajaran Islam dapat berkembang dan – sampai derajat tertentu – dapat dilabuhkan secara relatif maksimal bersama dengan ajaran agama yang lain. Lebih dari itu, Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim ini sepanjang sejarahnya merupakan negara yang relatif aman dan damai dibandingkan negara Muslim lain. Karena itu tidak mengherankan jika banyak tokoh dunia dan negara-negara Islam dan bahkan Barat berharap bahwa Indonesia di masa depan menjadi salah satu rujukan dunia dalam menciptakan hubungan yang sinergis antara negara bangsa dan agama, terutama Islam.

---

* Guru Besar Sejarah Pemikiran Politik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, dan abdi pada Pondok Pesantren Annuqayah daerah Latee, Sumenep

Munculnya Konsep Negara Bangsa dan Gerakan Kebangsaan pada Umat Islam

Banyak sejarawan berpendapat, awal mula keberadaan *nation-state* (negara bangsa) sebagaimana yang dikenal dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari Perjanjian Westphalia yang ditandatangani pada 24 Oktober 1648. Mereka menganggap perjanjian di bagian barat laut Jerman ini sebagai penanda dimulainya era modern dari negara. Sejak saat itu, di Eropa bermunculan negara-negara yang nantinya dikenal dan disebut sebagai negara bangsa.

Kendati di Eropa negara-bangsa yang bersifat teritorial sudah ada sejak abad ketujuh belas tersebut, di kawasan Timur Tengah, di mana Islam lahir dan berkembang pada masa-masa awal, konsep tersebut baru dikenal sejak masa-masa kemunduran Kerajaan Turki Usmani, pada akhir abad kedelapan belas Masehi. Pada masa kemunduran tersebut, tepatnya pada tahun 1789, Mesir sebagai salah satu wilayah kekuasaan Turki Usmani dikuasai dengan demikian mudah oleh Napoleon Bonaparte, penguasa Perancis saat itu. Bonaparte hanya sebentar menguasai Mesir. Pada tahun 1799 ia meninggalkan Mesir, dan pada tahun 1801 ekspedisi yang dibawanya juga hengkang dari negeri itu. Namun ia mewariskan sesuatu yang berpengaruh besar dan berdampak jauh bagi Mesir, bahkan dunia Islam dan umat Muslim pada masa-masa sesudahnya.

Salah satu dampaknya adalah keterbukaan mata umat Islam atas kemajuan Barat dan sekaligus kesadaran akan kemunduran yang dialami mereka. Penguasa lokal Mesir saat itu, Muhammad Ali Pasya dengan dinasti yang dibangunnya, yang menguasai Mesir sejak tahun 1805 sangat terkesan dengan modernitas yang dibawa Napoleon. Ia terdorong untuk mencapai kemajuan sebagaimana Perancis meraihnya. Ali Pasya dengan penuh semangat berupaya melakukan pembaharuan di berbagai bidang. Salah satu pembaruan yang nantinya berdampak pada muncul dan menguatnya nasionalisme adalah pengiriman pelajar ke Eropa. Salah satu di antara yang diutus untuk belajar adalah Rifa'ah Al-Tahtawi (1801-1873).

Sejatinya Al-Tahtawi ditugas-belajarkan untuk mempelajari teknik militer dari tahun 1826 sampai dengan tahun 1831. Namun selama di sana ia justru mempelajari dan menulis banyak hal tentang perkembangan Perancis dan masyarakatnya. Ia demikian kagum atas kemajuan dan modernitas yang dicapai Perancis. Pada saat yang sama, ia menganalisis bahwa kemunduran umat Islam saat itu berpulang kepada kurangnya kebebasan berpolitik, dan juga karena penguasanya yang bertindak sewenang-wenang di luar hukum. Untuk itu ia menyarankan tentang pengembangan demokrasi,[1] dan hal-hal yang berkaitan

1. Abba Iddris Adam, "The Impact of Tahtawi on the-19 and the-20 Centuries Reform Movement", Proseding the Social Sciences Research ICSSR 2014 (e-ISBN 978-967-11768-7-0). 9-10 June 2014,

dengan itu, termasuk pengembangan nasionalisme. Dalam buku *Manahij al-Albab al-Mishriyah fi Mabahij al-Adab al-Mishriyah*, al-Tahtawi menyebut kata *wathan* dalam pengertian tanah air. Bahkan lebih jauh lagi, ia menyatakan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Pandangannya ini didasarkan pada *khabar* atau hadis yang berasal dari Rasulullah (swa) dan Umar ibn Khattab (ra).[2]

Al-Tahtawi dianggap sebagai intelektual Muslim pertama yang memaknai *wathan* dengan arti tanah air sebagaimana orang Eropa menyebut *homeland* untuk tanah air mereka. Istilah ini digunakan bergantian dengan kata *ummah* yang artinya kemudian diperluas disesuaikan dengan konsep *nation* (bangsa), sedangkan istilah *wathan* kemudian maknanya dipersempit[3] (sekadar menunjukkan kepada tanah air, pen). Bahkan menurut Wendell –sebagaimana dikutip Muhammad Ali – Al-Tahtawi juga menggunakan istilah *millah* untuk mengalihkonsepkan *nation* sebagaimana ia menyebut *al-Millah al-Faransiyya* kepada bangsa Perancis. Namun istilah terakhir ini mengandung nuansa agama, sebagaimana Perancis mengakui keberadaan Paus sebagai Imam Agung orang Kristen (Katolik) dan menjadi kepala (imam) mereka[4] dalam urusan keagamaan mereka.

Nantinya konsep *ummah* yang digagas al-Tahtawi itu dipertegas oleh Mustafa Kamil (1874-1908) yang mengaitkan nasionalisme dengan teritorial. Ia menggambarkan tanah Mesir, dan bukan bahasa atau agama, sebagai identitas nasional yang harus diperjuangkan.[5] Bahkan lebih jauh lagi, dalam pandangan Taha Husayn (1889 –1973) dan Lutfi Sayyid (1872 – 1963), nasionalisme Mesir terkait dengan upaya untuk membangkitkan kembali warisan Mesir kuno mereka dan sejarah kejayaan Firaun.[6] Tentunya semua itu dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari identitas Mesir sejak kedatangan Islam.

Jika ditelusuri, muncul dan menguatnya rasa kebangsaan (kendati dalam pengertian yang masih kabur) di Mesir saat itu mengakar pada beragam aspek: politik, sosial, ekonomi, pendidikan, maupun keagamaan. Sejarah mencatat, pada akhir abad kedelapan belas, Mesir ditimpa berbagai bencana,

hlm. 600-601m

2. Lihat Rifa'ah Rafi' al-Tahtawi, Manahij al-Albab al-Mishriyah fi Mabahij al-Adab al-Mishriyah, (Kairo: Muassasah Hindawi, 2012), hlm. 11 ff.
3. Lihat Daniel Newman, "Myths and Realities in Muslim Alterist Discourse; Arab Travellers in Europe in the Age of Nahda (19th C)" dalam Chronos (6, 2002), hlm. 41.
4. Lihat Muhammad Ali, "Nationalism and Islam: Perspective of Egyptian and Syrian Muslim Intellectuals" dalam Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, (Volume 4, Number 1, June 2014), hlm. 58-59
5. Mansoor Moaddel. "Modalities of National Sovereignty: Territorial Nationalism versus Islamic Fundamentalism in Muslim-Majority Countries" dalam Population Studies Center Research Report 14-816 (University of Michigan, Febriari 2014) hlm. 13
6. Sayyid Ahmad Rahnamaei, "Islam and Nationalism: A Theoretical Point of View, Part 1" dalam Jurnal Message of Thaqalayn, (Musim Semi 2010, Vol. 11, No. 1), hlm. 122.

sosial politik dan ekonomi. Dinasti Turki Usmani – yang mengklaim sebagai representasi politik umat Islam – senyatanya saat itu sudah benar-benar lemah. Di Mesir, Dinasti Mamluk sebagai penguasa lokal berada dalam konflik yang berkepanjangan dengan gubernur dari Dinasti Usmani yang diangkat dari faksi Badui. Lebih dari itu, kekeringan yang menimpa sungai Nil mengakibatkan bencana ekonomi. Namun dalam kondisi yang memprihatinkan itu penguasa Mamluk justru melakukan pembebanan pajak di atas batas normal.[7] Akibat semua itu, rakyat atau masyarakat menjadi korban yang seutuhnya mengalami penderitaan.

Dalam kondisi seperti itu Napoleon datang dan dengan mudahnya menguasai Mesir. Ketika menguasai Mesir, semboyan yang dibawanya adalah bahwa ia datang bukan untuk melakukan invasi, tetapi untuk membebaskan mereka dari despotisme pemerintahan Turki Usmani. Demikian pula, ia mengenalkan kepada masyarakat Mesir konsep negara republik, demokrasi dan sejenisnya, selain juga memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat Mesir. Bahkan ia sangat mengapresiasi terhadap agama Islam dan tradisi-tradisi yang dikembangkan umatnya.[8] Selain itu ia juga mengenalkan teknologi modern dan sejenisnya.

Mudahnya Napoleon menguasai Mesir menunjukkan betapa lemahnya pemerintahan Turki Usmani saat itu. Demikian pula hal itu – implisit atau eksplisit – memperlihatkan ketertinggalan umat Islam dibandingkan pasukan Napoleon dan Eropa secara umum yang berpengaruh pada munculnya kesadaran di kalangan intelektual Muslim tentang keterbelakangan umat Islam secara umum, dan orang Mesir secara khusus. Pada saat yang sama, mereka terdorong untuk meraih kemajuan sebagaimana Perancis dan Barat telah merengkuhnya.

Dalam skala lebih luas, kemajuan Barat dan penjajahan yang mereka lakukan terhadap negara-negara Muslim bukan hanya menyadarkan masyarakat Mesir, tapi juga Muslim di berbagai belahan daerah lain, untuk lepas dari jajahan Barat. Di Tunisia pada tahun 1867 Khairuddin al-Tunisi, salah seorang pemimpin gerakan pembaruan Tunisia, menyatakan perlunya memperbaiki kondisi umat Islam dan membangun peradaban. Untuk itu ia menekankan pentingnya umat Islam bersatu. Ia menggunakan istilah *wathan* sebagai pemersatu umat. Namun berbeda dengan al-Tahtawi, Khairuddin menggunakan istilah *wathan* dalam pengertian komunal (*ummah*), mencakup seluruh komunitas yang diikat Islam. Dalam ungkapan lain, *wathan* yang dimaksud Khairuddin adalah nasionalisme Islam.[9]

7. Kathryn Louise James, Creating a Nation in Adversity: Advent of Egyptian Nationalism in British Occupation, Tesis Master, (Las Vegas: University of Nevada, 2012), hlm. 13.
8. Lihat Ibid, hlm. 17.
9. Lihat. Abba Iddris Adam, "The Impact of Tahtawi on the-19 and the-20 Centuries Reform Movement...", hlm. 602.

Gagasan Khairuddin ini sejatinya sebagai bentuk loyalitas politik untuk mendukung pemerintahan Turki Usmani pada satu pihak, dan pada pihak lain untuk menegaskan kepada Barat bahwa Tunisia yang saat itu hampir diinvasi Perancis merupakan bagian dari kekuasaan Turki Usmani yang tidak boleh dikuasai.[10] Karena itu berbeda dengan konsep nasionalisme yang berkembang di Mesir yang lebih bersifat teritorial dan etnis, konsep nasionalisme di Tunisia mengarah kepada pan-Islamisme yang nantinya dikembangkan lebih jauh oleh Sayyid Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh.

Di pusat kekuasaan Islam sendiri saat itu, di daerah Istambul, ide dan gerakan untuk mereformasi kerajaan Turki Usmani juga mulai muncul dan dari saat ke saat terus menguat. Kemunduran dan kelemahan Turki Usmani dan gagalnya Dinasti untuk memberlakukan konstitusi (sebagaimana dituntut kaum intelektual Turki) memicu kelompok yang disebut Turki Muda pada dekade 1870-an untuk mengembangkan nasionalisme turkistik, yang disebut turkisme. Menurut salah satu tokohnya, Yusuf Akçura, yang dimaksud dengan turkisme adalah membangun kebangsaan Turki yang dapat menyatukan seluruh orang Turki di seluruh dunia di bawah nasionalisme Turki.[11] Tentunya mereka menolak kehadiran Turki Usmani yang dalam anggapan mereka tidak merepresentasikan Turki yang sebenarnya dan untuk itu mereka mengembangkan pan-Turkisme.

Sebelum itu, nuansa nasionalisme dalam bentuk yang lain muncul di Semenanjung Arabia. Seorang pemimpin suku Arab Muhammad Ibn Saud yang didukung oleh Muhammad Abd al-Wahhab, pendiri aliran Wahhabisme yang fundamentalistik pada tahun 1773, melakukan perlawanan terhadap Turki Usmani, di mana saat itu tanah Hijaz dan sekitarnya di Arab merupakan bagian kekuasaan dinasti tersebut. Ibn Saud berhasil menguasai Riyadh dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Pada tahun 1905 kota Mekkah juga dikuasai. Namun tahun 1812, Muhammad Ali Pasya, penguasa Mesir berhasil menguasai dan merebut kembali kota Mekkah dan Medinah, dan pada tahun 1818 ia dapat menghancurkan negara bentukan Ibn Saud. Memasuki abad kedua puluh, tahun 1902, Abd al-Aziz, putra Ibn Saud berhasil merebut kembali dan menguasai Riyadh serta menegakkan kembali kerajaan Saudi yang beraliran Islam Wahhabi.[12] Melihat ideologi Wahhabisme yang diusung dan bentuk kerajaan monarki sebagai sistem negara yang dikembangkan, Ibnu Saud dan penerusnya tampaknya mengembangkan nasionalisme tribalistik yang bernuansa

10. Akhirnya pada tahun 1881 Tunisia benar-benar dikuasai Perancis. Ibid.,
11. Mehmet Işık dan Şakir Eşitt, “Extreme Nationalist Discourse in the Early Period of The Turkish Republic and Its Reflection In The Turkish Media:The Case of The Journal Gök-Börü” dalam SİYASAL: Journal of Political Sciences, (27(2) DOI: 10.26650/siyasal.2018.27.2.0008), hlm. 167
12. Ira M. Lapidus, 1993, A History of Islamic Societies, (Cambridge: Cambridge University Press), hlm. 673-674.

Islam fundamentalistik.

Di anak benua India, tokoh awal yang disebut memiliki peran dalam memunculkan rasa kebangsaan adalah Ahmad Sirhindi (w. 1624). Melalui pandangan dan gerakannya untuk menjaga ajaran Islam agar tidak berbaur dengan ajaran-ajaran yang tidak islami, ia dianggap sebagai bapak pendiri nasionalisme India. Ide dan gerakannya ini dikatakan berpengaruh besar pada tokoh dan umat Islam di anak benua India pada masa-masa sesudahnya. Syah Waliyullah (1703–1762) merupakan salah seorang tokoh yang terinspirasi dengan gerakan Ahmad Sirhindi. Ia berupaya untuk menjaga identitas nasional umat Islam India dan melindungi tradisi kebangsaan mereka dari umat Hindu dan juga dari Inggris yang sedang menjajah anak benua tersebut.[13] Konsep nasionalisme itu diperkuat dan dipertegas oleh Ahmad Khan (w. 1898), tokoh Muslim India yang lain, yang sering dijuluki sebagai neo-Mu'tazilah. Ia mendesak perlunya kebangsaan Muslim di anak benua India yang terpisah[14] dari umat Hindu. Pada sisi ini pula Muhammad Iqbal, filsuf Muslim terkemuka masa itu berada. Ia bahkan bukan hanya sebagai pendukung, tapi termasuk penggagas untuk berdirinya negara terpisah yang nantinya disebut Pakistan.

Namun tidak semua tokoh Muslim dan ulama India memiliki kesamaan pendapat tentang kebangsaan yang harus dibangun Muslim di anak benua India. Maulana Hussain Ahmad Madani dan Maulana Abul Kalam Azad justru menggagas nasionalisme yang berdasarkan satu tanah air dan menjadi satu bangsa dengan umat Hindu India. Pandangan ini didukung oleh ulama-ulama konservatif dari Darul Ulum Deoband dan kelompok-kelompok ulama yang lain.[15] Akhirnya kelompok Muslim yang ingin mendirikan negara terpisah dari umat Hindu berhasil membentuk negara Pakistan. Namun sejarah menunjukkan, berdirinya negara Pakistan ternyata tidak menyelesaikan persoalan mereka yang kemudian memunculkan berdirinya negara Bangladesh.

Di tanah Persia, bayang-bayang rasa kebangsaan muncul saat para ulama di daerah itu pada awal abad kedelapan belas mulai menentang kebijakan Dinasti Qajar, penerus Dinasti Safawi yang Syiah, yang mengadopsi model Barat dalam pemerintahan. Demikian pula mereka menentang dominasi Inggris dan Rusia yang demikian kuatnya di negeri Iran saat itu. Warna nasionalisme kian tampak nyata ketika terjadi Revolusi Konstitusi tahun 1906. Saat itu, rakyat Iran dengan dimotori para ulama, pedagang dan kaum intelektual melakukan aksi pemberontakan menuntut pemerintahan yang konstitusional dan menolak

13. Lihat Moinuddin Aqeel, 2008, Iqbal from Finite to Infinite: Evolution of the Concept of Islamic Nationalism in British India, (Lahore: Iqbal Academic Pakistan), hlm, 28-29.
14. Ibid, hlm, 44.
15. Ibid., hlm. 34 ff.

campur tangan asing. Amalgamasi pan-Islamisme dari al-Afghani dan konsep nasionalisme sekuler demikian tampak pada gerakan ini.[16] Ketika Dinasti Pahlevi menguasai Iran, nasionalisme yang dikembangkan lebih bersifat etnik dalam bayang-bayang warisan pra-Islam kuno, sekular dan *westernized*.[17] Nasionalisme sekuler ini menjadi terkikis saat terjadinya Revolusi Islam Iran pada tahun 1970. Dalam pandangan Khomeini sebagai tokoh Revolusi, Islam merupakan satu-satunya sumber legitimasi negara Republik Islam Iran dan satu-satunya sarana untuk mencapai identitas otentik. Kebangkitan rakyat Iran adalah untuk kebangkitan Islam dan hukum Islam. Sejalan dengan itu, Khomeini berulangkali juga menyatakan bahwa Islam bertentangan dengan nasionalisme.[18] Namun konsep yang digagas Khomeini ternyata belum final. Sepeninggal Khomeini, dialog sekaligus kontestasi antara Islam, bahkan Islamisme, nasionalisme dan warisan Persia masa lalu berlangsung terus hingga saat ini. Tarik menarik ini tampak nyata dari pergantian presiden yang satu ke presiden yang lain.

Berkembangnya Kebangsaan pada Umat Islam Indonesia

Hampir sama dengan negara-negara di Timur Tengah, muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan pada umat Islam di bumi Nusantara (dan nantinya menjadi Indonesia) sama sekali tidak bisa dilepaskan dari kolonialisasi Barat atas bumi Nusantara. Menyikapi hal itu, umat Islam di kepulauan Nusantara berpandangan bahwa penjajahan tidak bisa dibenarkan dan harus dilawan. Menurut mereka, kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan dan penindasan merupakan bagian dari ajaran agama yang harus dilabuhkan dalam kenyataan. Umat Islam –yang direpresentasikan oleh tokoh, kelompok, dan atau organisasi – dari saat ke saat melakukan segenap upaya berusaha untuk meraihnya.

Sejalan dengan upaya mereka untuk memerdekakan diri, nuansa kebangsaan mulai tampak pada perjuangan mereka, khususnya pada abad kesembilan belas dan masa-masa sesudahnya. Nuansa itu kian tampak ketika Pangeran Diponegoro dan kelompoknya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dari tahun1825 sampai 1830 yang terkenal dengan sebutan Perang Jawa. Saat melakukan perjanjian dengan Belanda yang berakhir dengan penangkapan Diponegoro oleh Belanda, ia menyebutkan dengan jelas dalam perjanjiannya agar ia diberi kebebasan untuk mendirikan negara sendiri yang

16. Lihat Ira M. Lapidus, 1993, A History of Islamic Societies... hlm. 73 ff.
17. Lihat Peter Avery (ed.), 2008, The Cambridge History of Iran, Vol. 7, (Cambridge: Cambridge University Press), hlm. 232.
18. Lihat Alam Saleh, "Iran's National Identity Problematic" Jurnal Sfera Politicii Nomor. 4 (170) / 2012, hlm. 53-54.

merdeka bersendikan agama Islam.[19] Pengaitan nasionalisme dengan Islam untuk saat itu sangat dimaklumi. Selain Diponegoro dan pasukannya terdiri dari orang-orang Islam, ideologi selain kapitalisme dan sosialisme belum berkembang ke permukaan.

Sebelum itu, bayang-bayang nasionalisme dapat dilacak pada gerakan kaum Paderi di Minangkabau. Melalui perlawanan dan perang terhadap Belanda dan penentangan mereka terhadap penjajahan, kaum Paderi menyatakan perlunya negara tersendiri yang lepas dari orang "kapir" (istilah yang digunakan kaum Padri untuk penjajah). Sejak sekitar 1803 pengaruh wahhabisme demikian kuat dalam pandangan, sikap dan tindakan mereka sehingga kebangsaan yang dianut mereka bersifat Islam fundamentalis dengan tujuan mendirikan negara Darul Islam yang meliputi kepulauan Indonesia, semenanjung Malaya dan kepulauan Filipina.[20] Islam Wahhabi diperjuangkan sebagai dasar Negara. Namun kemudian salah satu tokoh ternama kaum Paderi, Tuanku Imam Bonjol, di saat-saat akhir hidupnya menyadari kekeliruan kaum Paderi dalam mnegembangkan wahhabisme. Ia menyadari pengembangan wahhabisme ternyata tidak sesuai untuk alam Nusantara. Ia menyesal dan kembali ke mazhab Syafii. Bahkan lebih dari itu, ia menganggap betapa pentingnya adat dan tradisi. Ungkapannya yang terkenal adalah *adat bersendi syarak*.[21] Dari penyesalannya itu pada akhirnya Imam Bonjol tampaknya juga mengembangkan pandangan nasionalisme yang lebih berwarna Nusantara.

Di berbagai daerah lain di bumi Nusantara terjadi pula perlawanan terhadap penjajah, seperti di Banjarmasin yang salah satunya direpresentasikan oleh Pangeran Antasari dengan perlawanannya dalam Perang Banjarmasin (1859-1863). Demikian pula di Aceh, di mana masyarakat Aceh di bawah pimpinan ulama, semisal Teuku Cik di Tiro, melakukan perlawanan sengit terhadap penjajah sehingga terjadi Perang Aceh antara tahun 1873–1910.[22] Walau melalui perlawanan terhadap penjajahan ini rasa "kebangsaan" mulai muncul di kalangan suku-suku dan masyarakat di kepulauan Nusantara, namun perasaan identitas Indonesia, atau tujuan-tujuan bersama belum ada secara nyata.

Pada awal abad kedua puluh nasionalisme di kalangan umat Islam mulai berkembang dengan pesat. Muhammadiyah, misalnya, yang berdiri pada tahun 1912, didirikan dengan orientasi untuk memperkuat persatuan dan

19. H. Ahmad. Ardaby Darban, 1989-1990, Islam di Tengah Perjuangan Bangsa Indonesia, Laporan Penelitian, (Yogyakrta: Fakultaas Sastra Universitas Gajah Mada), hlm. 60-61.
20. Mangaraja Onggang Parlindungan, 2007, Pongkinangolngolan Sinambela Tuanko Rao: Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833, (Yogyakarta: LKiS), hlm. 129-130.
21. Lihat Basyral Hamidy Harahap, 2007, Greget Tuanko Rao, Cetakan I, (Depok: Komunitas Bambu), hlm. 94-95.
22. M. C. Ricklef, 2005, Sejarah Modern Indonesia 1200-2004, Cetakan II, (Jakarta: Penerbit Serambi), hlm. 315.

kekuatan Islam dalam menghadapi kolonialisme dan misionaris Kristen melalui strategi peniruan cara taktis.[23] Nuansa nasionalisme ini tampak dari upayanya untuk mempersatukan umat Islam melawan kolonialisme. Ide nasionalisme kian tampak nyata pada Sarekat Islam (SI). Sebagai salah satu organisasi Islam yang melakukan penentangan keras terhadap penjajah Belanda, dalam kongres-kongres yang diadakan antara tahun 1916 sampai dengan tahun 1921 disebutkan dengan jelas sebagai kongres nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa selain organisasi ini telah tersebar di seluruh persada Nusantara, juga pesertanya melibatkan utusan segenap daerah. Selain itu, hal yang lebih penting, ungkapan nasional menunjukkan adanya suatu usaha sadar dari para pemimpinnya untuk menyebarluaskan dan menegakkan cita-cita kebangsaan dengan Islam sebagai dasar negara. Bahkan HOS Tjokroaminoto, sebagai salah satu pemimpin SI, menegaskan bahwa kemerdekaan bisa dicapai dengan cepat hanya dengan melalui nasionalisme.[24]

Bayang-bayang nasionalisme dari saat ke saat menyebar terus dan kian menguat di kalangan umat Islam di wilayah Nusantara. Ketika para kiai dan pengasuh pesantren tahun 1926 mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), tampak alur orientasi yang jelas untuk menggalang persatuan dan solidaritas umat Islam. Sedangkan tujuannya untuk memperkokoh kualitas kehidupan sosial dan menegakkan keadilan sosial yang direpresentasikan melalui persatuan ulama dalam membela tradisi keagamaan yang telah hidup di tengah masyarakat.[25]

Masyarakat Muslim Nusantara yang ada di luar, khususnya di Timur Tengah, juga menyuarakan hal serupa. Pada akhir 1925, para mahasiswa Indonesia Universitas al-Zahar, Kairo, Mesir menerbitkan *Seruan Azhar*, jurnal yang sikapnya anti kolonial. Pada salah satu editorialnya disebutkan bahwa "kami (jamaah di Kairo, pen.) mengakui Indonesia dan Semenanjung [Malaya] sebagai satu masyarakat, satu bangsa, dengan satu adat, satu cara hidup, dan yang lebih penting satu agama ... demi kemaslahatan rakyat".[26]

Sejauh ini nasionalisme yang disuarakan atau bahkan diperjuangkan umat Islam Nusantara adalah nasionalisme yang tidak bisa dipisahkan dari Islam; dari yang substantif, puritan hingga ide pan-Islamisme. Gagasan pan-Islamisme yang sedang bergaung kuat di Timur Tengah bagaimanapun juga ikut mempengaruhi intelektual muslim dan umat Islam Nusantara. Namun sedikit

23. Yudi Latif, 2005, Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20, Cetakan pertama, (Bandung: Mizan(, hlm. 184-185
24. Deliar Noer, 1980, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Cetakan Pertama, (Jakarta: LP3ES), hlm. 126.
25. Ali Haidar, 2011, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Cetakan ke-IV, (Sidoarjo: Penerbit al Maktabah), hlm. 122-123.
26. R. E. Elson, 2009, The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan, Terjemahan, Cetakan I, (Jakarta: Serambi), hlm. 71.

demi sedikit warna pan-Islamisme kian memudar, walau Islam sebagai dasar perjuangan demikian kental masih membalut ide dan gerakan mereka.

Ketika Indonesia merdeka, lepas dari belenggu penjajahan, mayoritas umat Islam bukan hanya mengakui dan mendukung, tapi juga bersama unsur bangsa yang lain mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Pada akhir Agustus, Muhammad Syafei, salah satu tokoh Muslim Sumatera yang juga pernah menjadi ketua BPUPKI Sumatera, dengan mengatasnamakan rakyat Sumatera menyambut (dan mendukung, pen.) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di Aceh Daud Beureueh dan para ulama terkemuka menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan harus didukung oleh seluruh orang Aceh. Di NU pun terjadi hal yang serupa. Resolusi Jihad yang disampaikan tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya oleh KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa berjuang untuk kemerdekaan Indonesia termasuk jihad wajib.[27] Berdasar pada Resolusi Jihad yang sudah tersebar di masjid-masjid dan musholla-musholla, Bung Tomo melalui pidato yang disampaikan mengobarkan semangat masyarakat untuk melawan penjajah secara umum, atau pasukan Sekutu yang akan mendarat di Surabaya secara khusus. Masyarakat santri bersama-sama dengan unsur-unsur masyarakat lain sangat bersemangat menyambut seruan itu yang diaktualisasikan dalam pertempuran 10 November 1945, yang nantinya hari itu ditetapkan Pemerintah sebagai Hari Pahlawan.

Lebih dari itu, pada Muktamar yang ke-27 pada tahun 1984 M di Situbondo, Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Pancasila niscaya diterima sebagai asas organisasi dan dasar negara karena nilai-nilai Pancasila menurut ulama NU memang baik. Nilai-nilai dalam Pancasila memiliki signifikansi untuk mewujudkan nilai-nilai Islam. Di samping itu, Pancasila dalam konteks negara berfungsi sebagai *mu'ahadah* atau *mitsaq*, kesepakatan (dan perjanjian yang sah, pen) antara umat Islam (sebagai anak bangsa) dengan kelompok atau golongan lain di Indonesia untuk mendirikan negara Indonesia.[28] Karena itu, menurut KH Ahmad Siddiq (sebagaimana dikutip Haidar), NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal semata-mata karena motivasi agama, dan bukan politik. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia (yang berdasar Pancasila, pen.) adalah upaya final seluruh bangsa, terutama kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara.[29] Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa diganggu gugat karena bukan hanya tidak bertentangan dengan Islam, tapi

27. Ibid., hlm. 175-176.
28. Ali Haidar, 2011, Nahdlatul Ulama.., hlm. 344-345.
29. Ibid., hlm. 345.

sekaligus juga sesuai dengan nilai dan ajaran Islam.

Demikian pula pandangan Muhammadiyah. Organisasi ini melihat bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Karena itu, seluruh umat Islam (warga Negara Indonesia, pen.) harus berkomitmen menjadikan NKRI sebagai Dâr al-Syahâdah atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan.[30]

Penerimaan dan dukungan NU dan Muhammadiyah (bahkan mayoritas Muslim di Indonesis) kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sangat beralasan. Sebab nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 bukan saja tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam. Lebih dari itu, Pancasila dan UUD '45 sampai derajat tertentu merepresentasikan nilai dan ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad (saw) ini. Upaya Masdar Farid Mas'udi, salah satu tokoh NU, untuk membuat *syarah*, membuat penjelasan terhadap UUD 1945 dengan dasar dan dalil Islam[31] seutuhnya menunjukkan hal itu. Melalui uraian yang sangat argumentatif dan rujukan kepada teks suci, Masdar mampu bersikukuh bahwa sila-sila dalam Pancasila dan seluruh pasal dalam Konstitusi Indonesia tersebut memiliki dasar dalil Islam yang sangat kuat.

Memang harus diakui adanya perdebatan sengit di Majelis Konstituante antar kelompok Islam dan nasionalis mengenai dasar negara. Bersikukuhnya kelompok Islam saat itu untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara sejatinya berpulang kepada kekhawatiran mereka, jika tidak berdasar Islam Indonesia akan terperangkap ke sekularisme sebagaimana Turki terlebih dahulu telah terjerembab. Lebih dari itu, Pancasila yang ditawarkan oleh kelompok nasionalis belum mampu meyakinkan kelompok Muslim akan kehandalannya. Bagi sebagian tokoh muslim, Pancasila dikhawatirkan sekadar *pepesan* kosong. Namun ketika tokoh Muslim yakin bahwa sila-sila dari Pancasila sesuai dengan Islam dan merupakan dasar negara yang dapat merangkul semua, maka umat Islam dengan tulus menerimanya.

Negara, Kebangsaan, Integrasi Bangsa, dan Islam

Ulasan sebelum ini memperlihatkan keragaman dan tidak adanya kesamaan pandangan umat Islam di berbagai belahan dunia mengenai kebangsaan atau negara yang akan atau sedang dikembangkan. Kendati demikian, arus utama

30. Lihat Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 dalam Berita Resmi Muhammadiyah (Nomor 01/2015-2020/Dzulhijjah 1436 H/September 2015 M), hlm. 67-68.
31. Lihat Masdar Farid Mas'udi, 2011, Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, Cetakan 3, (Jakarta: Pustaka Alvabet).

umat Islam menerima kehadiran negara-bangsa dan konsep nasionalisme yang mengiringinya.

Adanya ketidaksamaan pandangan itu sangat wajar dan dapat dimaklumi. Sebab negara-bangsa merupakan konsep yang lahir dari modernitas, jauh setelah kelahiran Islam. Selain itu, hal yang lebih penting adalah bahwa konsep yang berkaitan dengan bentuk negara dan persoalan sejenis dalam perspektif Islam merupakan persoalan teknis dan hal praktis; bukan masalah pokok dan prinsip. Islam tidak menentukan secara rigid mengenai bentuk negara, dan turunannya, seperti bentuk kebangsaan, bentuk pemerintahan dan semacamnya. Alih-alih, agama yang dibawa Nabi Muhammad saw ini lebih mengedepankan aspek-aspek yang berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang harus menjadi dasar dan pijakan dalam negara dan pemerintah. Dalam konteks itu, Islam lebih dan sangat menekankan tentang keluhuran moralitas-etik atau akhlak al-karimah yang niscaya dijadikan rujukan dalam bernegara dan melaksanakan pemerintahan.

Menurut Muhammad Abid al-Jabiri (intelektual Muslim terkemuka asal Maroko yang wafat 2010), hubungan antara agama dan negara dibatasi oleh fakta historis yang tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa Islam lahir dalam satu masyarakat yang tak bernegara, dan bahwa negara Arab Islam tumbuh secara bertahap tapi dengan cara-cara yang cepat. Walau demikian, interpretasi terhadap fakta historis ini dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang absah dan tunggal bukanlah hal yang mudah. Sebab berbagai bukti yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan paradigma tertentu justru berjalan beriringan dengan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar untuk membangun paradigma lain yang berlawanan.[32] Konsekuensi logisnya adalah terjadinya banyak pandangan, ide, bahkan paradigma mengenai hubungan negara dan Islam. Sejarah juga memperlihatkan, dalam beragam pandangan itu, paradigma yang satu tidak mampu menunjukkan bahwa paradigma tersebut satu-satunya yang benar, dan paradigma-paradigma yang lain mesti salah.

Dalam perspektif itu, pandangan Mohamad Roem (w. 1983), anggota Pimpinan Pusat Masyumi dan pernah aktif di Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), menarik untuk diangkat. Bermula dari tulisan Amien Rais di Majalah *Panji Masyarakat* No. 376 tahun 1982 dengan judul "Tidak Ada Negara Islam", Roem di majalah yang sama nomor 386 tahun 1983, bukan saja membenarkan pernyataan Amien Rais tersebut, tapi juga menganggap pernyataan itu bijaksana. Lebih jauh, Roem menjelaskan bahwa di Anggaran Dasar Masyumi juga tidak

32. Muhammad Abid al-Jabiri, 2001, Agama, Negara dan Penerapan Syariah, Terjemahan, Cetakan I (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru), hlm. 63.

ada istilah Negara Islam.[33] Ia pun menjelaskan, apa yang dibangun Rasulullah (saw) di Madinah, kemudian dikembangkan meliputi juga Makkah adalah suatu negara yang tidak dinamakan Negara Islam, walaupun secara substansi merupakan Negara Islam. Dengan demikian, menurutnya, Indonesia yang berbentuk Republik lebih dekat kepada Sunnah Nabi tinimbang negara yang berbentuk kerajaan.[34]

Apa yang dinyatakan Roem senyatanya memiliki dasar yang sangat kuat. Sebab fakta yang nyaris tak terbantahkan menunjukkan bahwa memang tidak ada teks yang menentukan jenis pemerintahan yang harus diikuti oleh umat Muslim sebagaimana pula tidak ada teks yang melarang mereka untuk mengikuti jenis pemerintahan tertentu.[35] Namun pada saat yang sama, al-Qur-an mengandung hukum-hukum yang menuntut kaum Muslim untuk melaksanakannya yang sebagiannya memerlukan kekuasaan yang dapat mewakili komunitas Muslim untuk menegakkannya.[36] Dalam ungkapan yang lain, apa pun bentuk negara dan pemerintahan dalam perspektif ajaran Islam tidak menjadi persoalan sejauh prinsip-prinsip hukum-hukum dan nilai-nilai Islam universal dapat diimplementasikan dalam kehidupan.

Salah satu prinsip yang niscaya ditegakkan dalam politik Islam (dan juga dalam kehidupan lainnya) adalah kemaslahatan; mengedepankan kemanfaatan dan kepentingan umum serta menghindari kerusakan dan keburukan. Etik-moralitas atau akhlak luhur merupakan dasar yang menjadi bingkai pada negara dan pemerintahan "Islam". Pada sisi ini, tidak berlebihan jika al-Jabiri bersikukuh bahwa Kitab suci al-Quran merupakan kitab akhlak yang sangat penting. Demikian pula, tema-tema akhlak dalam Hadits nabawi nyaris tidak terhitung jumlahnya. Lebih dari itu, Islam mendorong umatnya untuk mengambil hikmah atau nilai-nilai luhur terlepas dari mana pun asal dan sumbernya.[37] Semua ini memperlihatkan tentang komitmen Islam dalam menegakkan etik moralitas luhur, termasuk dalam politik dan pemerintahan.

Dengan mengutip Ibn Taymiyah, al-Jabiri menyatakan bahwa prinsip kemaslahatan yang mutlak dalam politik dan pemerintahan Islam adalah keadilan dan amanah.[38] Selain itu, etik-moralitas luhur yang niscaya intrinsik dalam negara dan pemerintahan adalah musyawarah dan tanggung jawab. Sedangkan hal-hal

33. Lihat Laksmi Pamuntjak dkk. (ed.), 2000, Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid – Mohamad Roem, Cetakan II, (Jakarta: Penerbit Djambatan), hlm. 1-2.
34. Ibid., hlm. 7-9.
35. Muhammad Abid al-Jabiri, 2001, Agama, Negara dan Penerapan Syariah, hlm. 70.
36. Ibid., hlm. 64
37. Muhammad Abid al-Jabiri, 2001, al-'Aql al-Akhlaq al-'Araby, (Maroko: al-Markaz al-Tsaqafy al-'Araby), hlm. 535.
38. Ibid., hlm. 616.

yang tidak ada teksnya, sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam.[39] Konsep maslahah ini yang juga dikembangkan oleh NU sehingga organisasi terbesar di Indonesia (sebagaimana dijelaskan sebelum ini) menganggap NKRI sudah final untuk umat Islam di Indonesia.

Terkait dengan integrasi nasional, melalui al-Quran dan Sunnah Rasul kita dapat memahami bahwa Islam sangat menegaskan tentang signifikansi persatuan. Persatuan yang ditekankan bukan hanya sebatas persatuan antar umat Islam, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan politik. Sejarah memperlihatkan kepada kita kenyataan hal tersebut. Ketika mendirikan negara kota Madinah, yang awalnya bernama Yatsrib, Rasulullah (saw) membuat piagam perjanjian, semacam konstitusi (yang diberi nama *Shahifah* atau *Watsiqah al-Madinah*) untuk mengikat warga ke dalam suatu aturan politik kenegaraan dan kerakyatan untuk terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera. Di dalam piagam ini disebutkan bahwa kata *ummah* (warga, masyarakat, atau bahkan nanti disebut bangsa) meliputi seluruh warga yang tunduk ke dalam peraturan, terlepas dari suku dan agama yang dianut. Oleh karena itu, kaum Muslim Muhajirin yang hijrah dari Medinah, kaum Muslim Anshor yang merupakan penduduk asli Madinah, dan kaum Yahudi, semuanya adalah merupakan *ummah* yang satu.[40] Umat dalam Piagam Madinah bukan hanya merujuk kepada orang Islam semata, tapi semua warga yang patuh kepada peraturan yang dibuat Rasulullah (saw), baik kaum Muslim, Yahudi, maupun orang kafir. Di dalam piagam ini juga tidak ada sebutan Negara Islam.

Berdasar Piagam Madinah itu kita dapat memahami, membenarkan dan menyetujui pernyataan Ibnu Khaldun, intelektual Muslim abad pertengahan. Ia menyatakan bahwa suatu negara lahir dan berdiri, salah satunya karena adanya *ashabiyah*.[41] Teori ini kalau diartikan ke dalam pemahaman yang sederhana adalah dorongan untuk ingin bekerjasama untuk hidup dalam skala besar kelompok manusia. Dorongan itu tidak hanya karena ada ikatan klan atau suku, tapi dalam aspek politik bisa karena ada hubungan yang dekat dan telah berjalan lama sebagai anggota dan bagian dari suatu kelompok.[42] Jika dibawa ke konteks kekinian, *ashabiyah* ini sangat dekat dengan konsep integrasi nasional.

Dengan demikian, berdasar pada sejarah dan ajaran Islam, kebangsaan dan integrasi bangsa sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan sampai batas tertentu, integrasi bangsa merupakan keniscayaan yang

39. Lihat Muhammad Abid al-Jabiri, 2001, Agama, Negara...., hlm. 85-90.
40. Lihat naskah sebagaimana dikutip oleh Sulayman Sholeh alSulayman, 2015, Huquq al-Insan fi Watsiqah al-Madinah al-Munawwarah, (Riyadl: Dar Jami'ah Naif lil Nasyr), hlm. 66-70.
41. Lihat Abdur Rahman ibn Muhammad Ibn Khaldun, 2004, Muqaddimah Ibn Khaldun, Cetakan I (Damaskus: Dar Ya'rab), hlm. 308.
42. Lihat Ibid., hlm. 260

harus dilabuhkan dalam hidup bernegara. Sebab melalui integrasi nasional itu, anak bangsa dapat melaksanakan peran sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang bertugas mengembangkan peradaban dan memakmurkan kehidupan.

Namun satu hal yang perlu digarisbawahi, nasionalisme dalam perspektif Islam bukanlah nasionalisme chauvinistik. Konsep NU mengenai *ukhuwwah islamiyyah*, *ukhuwwah wathaniyyah*, dan *ukhuwah basyariyyah*[43] menjelaskan hal tersebut. Dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU ini, nasionalisme harus diletakkan berdampingan antara persaudaraan sesama muslim, sesama anak bangsa, dan bahkan sesama umat manusia. Nasionalisme yang harus dikembangkan adalah nasionalisme yang mengedepankan kesetaraan antar anak bangsa dan kesederajatan dengan bangsa-bangsa yang lain. Dengan demikian, penguatan integrasi bangsa dalam bingkai NKRI bukan sekadar tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi harus diperkuat terus dari waktu ke waktu. Melalui integrasi nasional yang kukuh, bangsa ini diharapkan dapat mengembangkan peradaban yang dapat memberikan sumbangsih nyata untuk terciptanya kehidupan yang adil, damai, makmur dan sejahtera bagi bangsa dan sesama umat manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan pada Teks Suci dan Sunnah Rasul, mayoritas ulama dan arus utama umat Islam sependepat bahwa Islam tidak mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan dan hal-hal sejenis. Yang menjadi perhatian agama ini adalah berlabuhnya nilai-nilai etika moral luhur dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk dalam aspek politik. Pada sisi ini, dalam rangka pencapaian tujuan yang ideal dan membangun peradaban, integrasi bangsa –kendati tidak diatur secara eksplisit dalam teks suci – perlu ditegakkan dalam negara di mana umat Islam hidup.

Dasar dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memperlihatkan bahwa senyatanya negara ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian seluruh anak bangsa, khususnya umat Islam Indonesia, wajib untuk mempertahankan kedaulatan negara ini, memperteguh integrasi nasional, dan mengembangkan peradaban yang dapat mencerahkan dan menyejahterakan umat Islam Indonesia, masyarakat, dan sesama©.

43. Lihat Endang Turmudi (ed.), 2003, Nahdlatul Ulama: Ideology, Politics, and the Formation of Khairu Ummah, (Jakarta: PP LP. Maarif NU), hlm. 118.

A'la, Abd. **National integrity in Islamic perspective: The Islamic conceptions of integration and nationhood in the Middle East through Indonesia.** *This article deals with nationalism and integration of nation in Islamic perspective and its people. The result shows that the majority of Muslim scholars and Muslim mainstream agree that Islam does not regulate the form of the state, the system of the government and such. Instead, the concern of this religion is to anchor noble ethic moral values and various aspect of human life, including in the political aspect. On this side, to achieve the ideal goal and develop civilization, the integration of the nation needs to be established in a country where Muslims live. Related to Indonesia, Pancasila as its state basis and the constitution of Unitary State of the Republic of Indonesia reveals that this country is following Islamic values. Thus, all the elements of this nation, especially Indonesian Muslims, are obliged to defend the sovereignty of this country, strengthen the integration and develop civilization being able to enlighten and prosper the Indonesian Muslim, the nation, and even all of the human beings.*

Independensi Berita dan Integrasi Bangsa

Inge Hutagalung

Sejak sistem politik Indonesia mengundangkan UU No. 40 tahun 1999, secara normatif media Indonesia telah menganut teori pers berorientasi tanggungjawab sosial, yaitu kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat/kepentingan umum. Namun dalam praktiknya hingga kini kebebasan pers belum berlangsung secara substansial, peningkatan kuantitas media belum disertai dengan perbaikan kualitas jurnalismenya. Banyak sekali terjadi pelanggaran etika dan profesionalisme. Kritik pedas masyarakat, khususnya pada tayangan media televisi kerap dilayangkan kepada pihak pengelola media.

Berdasarkan sumber data, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kerap mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait program acara yang tidak mendidik, seperti *infotainment*, tayangan sinetron berbau kekerasan, *talkshow*, tayangan program mistik, dan lainnya (Tribun-Bali.com, 10 Mei 2018). Sebelumnya, analisis hasil pengamatan KPI memperlihatkan bahwa pengaduan terhdap acara televisi yang mengandung kekerasan dan yang menempati *ranking* teratas, 44 persen di antaranya berasal dari sinetron, 31 persen dari *variety* dan *reality show*, dan 15 persen dari berita. Namun kritik dan pengaduan masyarakat ini ternyata tidak menyurutkan suguhan kekerasan di media massa, sebaliknya tayangan kekerasan justru memperlihatkan peningkatan (Kompas, 10 Nopember 2008).

Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 3 tahun 2007 tentang standar program siaran, khususnya pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar, hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00–03.00 WIB sesuai waktu stasiun televisi penyiaran yang menayangkan. Sedangkan pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan adegan rekonstruksi kejahatan pembunuhan secara rinci. Apa yang melatarbelakangi industri televisi Indonesia banyak mengumbar tayangan yang penuh adegan kekerasan, meskipun kerap mendapat kecaman masyarakat? Bagaimana relasi antara agensi dan struktur dalam penayangan kekerasan di layar televisi? Bagaimana dampak industri televisi termaksud dengan integrasi bangsa?

Relasi antara Agensi dan Struktur: Media dalam Perspektif Ekonomi Politik

Vincent Mosco (2009) menyatakan bahwa menurut perspektif sempit, ekonomi politik dapat diartikan sebagai kajian tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, ekonomi politik dapat diterjemahkan sebagai kajian tentang kontrol dan cara manusia bertahan dalam kehidupan sosial.

Dari definisi ini terlihat bahwa pendekatan ekonomi politik pada media berusaha menjelaskan hubungan antara struktur ekonomi politik, dinamika industri media, dan ideologi media itu sendiri. Organisasi media dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Media berperan menjadi alat legitimasi kepentingan kelas yang memiliki dan mengontrol media melalui produksi berita yang sudah bias karena ditumpangi oleh kepentingan baik secara politis maupun ekonomis.

Pendekatan ekonomi politik media lahir sebagai respon terhadap perkembangan mutakhir industri media massa dalam sistem ekonomi kapitalistik. Akibat wataknya yang komersial industri media massa telah melahirkan rangkaian kondisi yang dianggap mengancam demokrasi, seperti monopolisasi informasi, komodifikasi isi dan khalayak media, menguatnya kepentingan pemodal, tersingkirnya media alternatif dan oposisi, marjinalisasi media publik, serta terancamnya pluralitas informasi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Baran (2000), tinjauan ekonomi politik media diawali dengan kajian tentang sejarah teori-teori struktural kajian budaya makroskopik yang berfokus pada bagaimana elite sosial menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mengontrol dan mengeksploitasi institusi-institusi media. Teori-teori ini meyakini bahwa elite secara efektif menggunakan media untuk menyebarkan atau memperbanyak budaya hegemonik sebagai alat untuk memelihara posisi dominan mereka dalam tatanan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, teori-teori ini disebut teori ekonomi politik kritis karena memprioritaskan pemahaman tentang bagaimana kekuatan ekonomi memberi basis kekuatan ideologis dan politik. Berlawanan dengan pendekatan mikroskopik, perspektif makroskopik tidak melihat persoalan pada level individual secara detail, melainkan bagaimana tatanan sosial sebagai suatu keseluruhan dipengaruhi.

Keterikatan pada dimensi ekonomi dan politik menjadikan media tidak lepas dari berbagai kepentingan. Pada saat seluruh fenomena sosial – termasuk ekonomi dan politik berkelindan membentuk jalinan makna teks, maka samar-samar sisi ekonomi dan politik media tampak dibalik isi media.

Sebagaimana isinya, media sebagai lembaga ekonomi tidaklah hadir dalam ruang kosong. Media kerapkali menjadi ajang pertarungan bagi kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Teori kritis melihat bahwa media tidaklah lepas dari kepentingan, terutama kepentingan kaum pemilik modal, negara ataupun kelompok penindas lainnya. Dengan kata lain, media menjadi alat dominan dan hegemoni masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah bahwa realitas yang dihasilkan oleh media bersifat bias atau terdistorsi.

Proses produksi media merupakan *interplay* dimana proses ekonomi politik akan membentuk dan dibentuk melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi media. Ini juga berarti bahwa bahasa dapat dipandang sebagai alat politik dan ekonomi, yaitu bahwa apa yang nampak dari pemberitaan belum tentu mewakili kebenaran realitas yang sesungguhnya. Teori kritis pada akhirnya mempertanyakan realitas yang ditemui, termasuk di dalamnya teks media itu sendiri.

Bagaimana konstelasi media di tengah situasi ekonomi politik? Mosco (2009) menjelaskan relasi ini dengan memberikan tiga konsep utama, yaitu: *commodification* atau komodifikasi, *spatialization* atau spasialisasi dan *structuration* atau strukturasi. *Komodifikasi* berhubungan dengan proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Produk media adalah informasi dan hiburan. Nilai tukar produk media ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana ia memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat. Semakin digemari oleh khalayak, maka produk media akan semakin bernilai tukar tinggi.

Bentuk komodifikasi dalam komunikasi pada dasarnya ada tiga jenis, yaitu komodifikasi intrinsik, komodifikasi ekstrinsik, dan komodifikasi sibernatik. Komodifikasi intrinsik atau komodifikasi isi adalah proses pengubahan pesan dari sekumpulan data ke dalam sistem makna dalam wujud produk yang dapat dipasarkan. Misalnya, pendewasaan seorang gadis diubah menjadi komodifikasi perempuan ke dalam hal-hal seperti model rambut, pakaian, *make up* wajah, buku resep masakan, sepatu, asesoris, tas, dan lainnya.

Komodifikasi ekstrinsik atau komodifikasi khalayak adalah proses modifikasi peran pembaca oleh organisasi media dan pengiklan dari fungsi awal sebagai konsumen media menjadi konsumen khalayak bukan media, dimana organisasi media memproduksi khalayak dan kemudian menyerahkannya kepada pengiklan. Dengan kata lain, dalam kondisi ini terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan media dan pengiklan, dimana organisasi media digunakan sebagai sarana untuk menarik khalayak yang akan dijual kepada pengiklan yang selanjutnya akan membayar ke organisasi media bersangkutan.

Bentuk komodifikasi ketiga atau komodifikasi sibernetik pada dasarnya

terkait dengan proses mengatasi kendali dan ruang. Menurut Marx terdapat dua dimensi dalam hubungan antara komodifikasi dan media. Pertama, proses komunikasi dan teknologi memberikan sumbangan terhadap proses utama komodifikasi pada ekonomi secara umum. Kedua, proses komodifikasi yang berlangsung pada masyarakat secara keseluruhan memasuki proses komunikasi dan institusi, sehingga peningkatan dan kontradiksi didalam proses sosial dari komodifikasi berpengaruh terhadap media sebagai institusi sosial (Mosco, 2009).

Spasialisasi berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di depan khalayak (pembaca, pemirsa) dalam batasan ruang dan waktu. Spasialisasi berkaitan dengan bentuk organisasi media, apakah berbentuk korporasi berskala besar atau sebaliknya, apakah berjaringan atau tidak, apakah bersifat monopoli atau oligopoli, serta apakah berupa konglomerasi atau tidak. Pendekatan spasialisasi menjadi penting dalam analisis media karena dua hal. Pertama, proses komunikasi dan teknologi menjadi titik utama dari proses spasialisasi dalam pendekatan ekonomi politik. Kedua, faktor pertama tersebut menjadikan spasialisasi sebagai hal yang signifikan dalam pendekatan ekonomi politik. Contohnya adalah terbitnya UU Penyiaran no.32 tahun 2002 sebagai bentuk campur tangan politik untuk meniadakan monopoli informasi dan kepemilikan modal. Secara politis kebijakan ini bertujuan menjamin *diversity of content*, yaitu adanya keragaman konten siaran sesuai dengan realitas setempat. Secara ekonomis kebijakan ini bertujuan merangsang tumbuhnya media-media baru di tingkat lokal *(diversity of ownership)* sekaligus memperkecil kesempatan kepemilikan media yang terkonsentrasi pada sekelompok kecil pemilik modal yang berbasis di pusat politik tertentu.

Strukturasi merupakan proses penggabungan *human agency* (agensi manusia) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, sehingga bahkan setiap bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan yang diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Gagasan tentang strukturasi berkembang dari pemikiran sosiolog Anthony Giddens. Melalui teori strukturasi, Giddens ingin menjembatani pemisahan antara 'struktur' dan 'tindakan' dalam teori-teori sosial. Teori strukturasi pada dasarnya memberikan kekuatan pada perubahan sosial, dengan menggambarkan bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi oleh agen manusia yang bertindak melalui medium struktur (Mosco, 2009). Jika Mosco memberikan tiga perspektifnya dalam menempatkan media di antara dimensi ekonomi politik, maka Peter Golding

dan Graham Murdock (dalam James Curran & Michael Gurevitch, 2000) membagi perspektif ekonomi politik media ke dalam dua perspektif besar, yaitu perspektif liberal dan perspektif kritis.

Perspektif liberal bersifat *mainstream,* cenderung memfokuskan diri pada pertukaran pasar dimana konsumen akan secara bebas memilih komoditas yang saling bersaing di pasar. Konsumen mengonsumsi komoditas atas dasar kegunaan dan kepuasan yang didapat berdasarkan penawaran yang ada. Semakin besar kekuatan pasar, maka semakin besar pula kebebasan konsumen untuk memilih. Sebagai sebuah produk budaya, seharusnya media diberi kesempatan yang luas untuk dimiliki oleh siapapun secara bebas dan tanpa batasan. Pada intinya, ekonomi politik liberal mengharapkan adanya kompetisi yang bebas di pasar, karena kesejahteraan sosial akan diwujudkan oleh pasar. Lebih lanjut pendekatan liberal melihat media dari perspektif positivistik yang menempatkan media sebagai salah satu industri kapitalis untuk mendapatkan keuntungan finansial semata. Dampak sosial kultural politiknya tidak mendapatkan cukup perhatian seperti dalam pendekatan kritis.

Perspektif kritis merupakan kritik terhadap perspektif liberal. Jika perspektif liberal sangat *concern* pada isu-isu seperti *free market* demi kelangsungan kekebasan individu, maka perspektif kritis melihat relasi antara agensi (individu, dalam perspektif liberal) dan struktur (pasar dan negara) secara lebih dinamis. Menurut perspektif kritis, media harus dilihat secara holistik termasuk aspek kesejarahannya serta harus memperhatikan keseimbangan antara usaha yang sifatnya kapitalistik dengan intervensi publik sebab produksi, distribusi dan konsumsi media berada dalam sebuah lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang strukturnya saling memengaruhi (McQuail, 2005). Selain itu, perspektif kritis juga memperhatikan aspek keadilan, pemerataan dan *public good,* bukan sekadar persoalan efisiensi. Yaitu, bagaimana penciptaan dan pengambilan makna terjadi pada setiap tingkat dalam hubungan sosial asimetris yang terstruktur. Dalam perspektif Marxis, pemilik modal bisa menempatkan organisasi media sebagai penyebar kesadaran palsu *(false consciousness)* atau menggunakan media untuk melancarkan hegemoni dengan menutupi atau merepresentasikan kepentingan kelas berkuasa, dan dengan begitu pemilik modal bisa mengambil keuntungan atas preferensinya terhadap komodifikasi produk media.

Ada tiga varian utama dalam aliran kritis, yaitu instrumentalis, strukturalis, dan konstruktivis (Hidayat, 2000). Pendekatan *Instrumentalis* yang banyak dikembangkan oleh Herman dan Chomsky ini menyatakan bahwa terdapat superioritas agensi atas struktur. Sebaliknya, pendekatan *strukturalis*

yang dikembangkan oleh Schudson memandang bahwa terdapat superioritas struktur atas agensi. Sedangkan pendekatan *konstruktivis* sebagaimana digagas oleh Golding dan Murdock memandang bahwa terdapat *interplay* atau saling pengaruh antara struktur dan agensi.

Golding dan Murdock (2000) juga memaparkan pentingnya memperhatikan proses historis empat masalah berikut ini dalam kajian kritis ekonomi politik media, yaitu: (1) pertumbuhan media, (2) perluasan jangkauan perusahaan, (3) komodifikasi, serta (4) perubahan peran negara dan pemerintahan. Setiap proses historis itu pada dasarnya membuka peluang untuk mengkaji atau menganalisis lebih dalam permasalahan media, khususnya terkait komodifikasi, strukturasi, dan spasialisasi dalam kajian ekonomi politik media. Menurut Golding dan Murdock (2000) empat proses itu mengarah pada struktur kepemilikan media yang terkonsentrasi dan merupakan rangkaian yang mencerminkan perubahan basis ekonomi dari produksi skala kecil dan perorangan menjadi produksi budaya massa yang bercakupan luas.

Dengan kata lain, media berfungsi sebagai produsen komoditas informasi dan hiburan, sekaligus komoditas khalayak. Asumsinya, khalayak merupakan komoditas yang kemudian dijual kepada pengiklan. Dalam prakteknya, khalayak menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengonsumsi berbagai pesan iklan, yang pada gilirannya mempengaruhi dan mempersuasi untuk membelanjakan uang mereka guna mengonsumsi produk-produk iklan yang dilihat. Kondisi ini jelas menguntungkan tidak hanya bagi pengiklan, namun juga bagi organisasi media. Sebaliknya, khalayak menjadi korban dari konspirasi pengukuhan kapitalisme industri periklanan melalui industri media. Jika pendekatan ekonomi politik media memfokuskan pada kajian utama tentang hubungan antara struktur ekonomi politik, dinamika industri media, dan ideologi media, maka perspektif ekonomi politik kritis menganalisis secara penuh campur tangan publik sebagai proses delegitimasi melalui ketidaksepakatan publik terhadap bentuk-bentuk yang harus diambil sebagai usaha kaum kapitalis mempersempit ruang diskursus publik dan representasi.

Komodifikasi Tayangan Kekerasan di Televisi

Salah satu *entry point* untuk memahami proses kerja ekonomi politik media adalah melalui konsep komodifikasi. Proses komodifikasi menjelaskan cara kapitalisme mencapai tujuan mengakumulasi kapital atau merealisasikan nilai melalui transformasi atau perubahan nilai guna menjadi nilai tukar. Artinya, komodifikasi adalah proses pergeseran pemaknaan nilai guna alat dan produk

komunikasi menjadi nilai tukar yang bersifat komersial. Produk media menjadi barang tawaran untuk dikonsumsi oleh khalayak.

Terkait maraknya tayangan kekerasan di televisi, patut diduga hal itu merupakan bagian strategi untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat antar media televisi. Kekerasan, mistik, dan seks merupakan tiga tema yang mampu mendongkrak *rating* televisi. Posisi *rating* berujung pada rupiah yang mampu dikeruk melalui iklan. Boleh dikatakan, tiga tema tadi merupakan resep laris dagangan televisi. Kekerasan telah menjadi suatu komoditas. Kekerasan tak hanya dicari dan dieksploitasi, namun sengaja dibuat untuk kemudian diberitakan ataupun ditayangkan.

Industri televisi adalah industri dengan modal yang sangat besar, otomatis juga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Oleh sebab itu para pengelola stasiun televisi berusaha mendapatkan keuntungan dengan menjual program yang 'disukai' pemirsa. Mereka seperti 'dipaksa' berargumentasi bahwa selama pemirsa dan pengiklan menyukai tayangan bertema kriminalitas, maka para pengelola stasiun televisi pun akan memroduksi dan menayangkan atau mendistribusikannya ke layar kaca pemirsa.

Kekerasan kini memang telah menjadi sebuah komoditas. Bahkan telah menjadi semacam budaya industri ketika kekerasan atau kejahatan lainnya diekspos dan dieksploitasi dalam sebuah kemasan tontonan, khususnya oleh industri televisi. Kekerasan rumah tangga yang sesungguhnya merupakan pengalaman subjektif personal kini mendadak menjadi pengalaman publik. Pelaku tawuran antar pelajar pun bisa mengalami proses yang dalam studi media dinamakan 'mediatisasi' atau pemediaan sebagai realitas politik. Dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukan akan menarik perhatian media, maka tak jarang lokasi tawuran pun perlu dipilih supaya mudah didatangi reporter. Dengan begitu mereka bisa tampil sebagai artis atau aktor kekerasan. Ironisnya, siswa-siswa yang menjadi pelaku vandalisme dan brutalisme mendapat liputan luas, sementara mereka yang rajin dan berprestasi hanya memperoleh kolom kecil di media sedangkan kecerdasan pun disederhanakan menjadi sekadar tontonan kuis di televisi. Kekerasan juga bisa tampak dari tayangan perilaku para suporter kesebelasan yang terlalu fanatik dalam olah raga sepak bola. Manakala pertandingan dianggap tidak *fair*, kepemimpinan wasit dinilai tidak tegas, hal itu sudah cukup menjadi alasan para suporter untuk berbuat onar dan melakukan huru hara sambil merusak fasilitas umum di dalam maupun di luar stadion (baca Idu Subandy, 2004).

Dalam era reformasi saat ini masyarakat benar-benar telah disuguhi pementasan secara telanjang apa yang oleh pemikir pascastrukturalis Perancis, Jean Baudrillard (1983), disebut 'teater kebengisan'. Sebagai teater, kekerasan,

kekejaman, dan kebengisan telah menjadi semacam ritual yang dipentaskan ke dalam ruang publik. Kekerasan telah menjadi wacana di ruang publik yang digemari masyarakat pada umumnya.

Mekanisme Teoretis: Teori Pembelajaran Sosial

Untuk melihat lebih jauh hubungan antara menonton tayangan kekerasan di media dan dampak yang ditimbulkannya terkait perilaku manusia yang akan mempengaruhi integritas bangsa, penulis memilih teori pembelajaran sosial sebagai pendekatan teoretis untuk menjelaskan dampak media (Baran, 2000).

Teori pembelajaran sosial adalah sebuah teori dari bidang psikologi dalam perspektif *behavioristik* yang mempelajari dampak media massa, khususnya menganalisis kemungkinan dampak kekerasan yang ditayangkan di televisi. Teori ini menganggap media sebagai agen sosialisasi yang utama di samping keluarga, guru di sekolah, dan sahabat karib.Tokoh dalam teori ini adalah Albert Bandura. Teori ini menyatakan bahwa terjadi banyak pembelajaran melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Teori ini juga merupakan teori pembelajaran umum yang dapat diaplikasikan pada bidang-bidang dampak media massa yang lain.

Menurut teori pembelajaran sosial, manusia belajar melalui observasi, dalam hal ini observasi melalui media. Belajar melalui observasi terjadi melalui dua bentuk: (1) *imitasi*, reproduksi langsung terhadap perilaku yang diamati, (2) *identifikasi*, yaitu keinginan untuk menjadi seperti model yang diamati dengan memperhatikan sejumlah karakteristik dan kualitas yang lebih luas. Imitasi lebih dapat diamati daripada identifikasi, namun identifikasi merupakan efek media yang lebih bertahan lama dan signifikan. Teori pembelajaran sosial sekaligus melihat bagaimana imitasi dan identifikasi dapat menjelaskan bagaimana orang belajar melalui observasi terhadap perilaku orang lain di sekitarnya.

Teori penguatan, salah satu rumusan awal teori pembelajaran sosial, menyatakan bahwa pembelajaran terjadi manakala sebuah perilaku dikuatkan dengan sebuah penghargaan. Orang mempelajari perilaku tertentu melalui mekanisme stimulus-respon. Jika sebuah perilaku sebagai stimulus mendapatkan respon posistif (diberi imbalan/*reward*) dan bukan respon negatif (diberi hukuman/*punishment*), maka perilaku itu akan dikuatkan. Dengan cara ini, perilaku baru dipelajari atau ditambahkan pada *behavior repertoire*, yaitu khazanah perilaku yang sudah dimiliki seseorang. Dengan kata lain, teori pembelajaran sosial senantiasa berhubungan dengan *reward* dan *punishment.* Karakter buruk bila dihargai maka akan dicontoh. Sebaliknya, bila karakter buruk mendapat hukuman maka akan membuat penonton untuk tidak mencontoh hal yang

buruk tersebut. Jadi perilaku diatur secara eksternal oleh kondisi-kondisi yang memberikan penguatan *(reinforcement).*

Pada sisi lain, teori pembelajaran sosial mengakui bahwa orang bisa menghindari pendekatan pembelajaran sebagaimana diuraikan teori penguatan, dan memperoleh suatu perilaku baru melalui *modelling* dari media massa. Dalam hal ini orang mempelajari sebuah perilaku dengan hanya melalui pengamatan dan menyimpan hasil pengamatan tersebut sebagai petunjuk berperilaku di masa mendatang (Severin & Tankard, 2015).

Teori pembelajaran sosial mengakui bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menyadari atau memikirkan manfaat yang dapat diambil dari pengamatan dan pengalaman. Titik permulaan dari proses belajar adalah adanya peristiwa yang bisa diamati baik secara langsung maupun tidak langsung oleh seseorang. Peristiwa tersebut mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misal seorang murid balet mempelajari gerakan tertentu dengan menyaksikan sang instruktur mendemonstrasikan gerakan tersebut secara langsung. Peristiwa yang dimaksud dapat pula tersaji secara tidak langsung melalui televisi, buku, film maupun media massa lainnya, misal seseorang mengamati orang lain melakukan perilaku tertentu di televisi dan kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan pribadi. Banyak dampak media massa mempengaruhi perilaku orang melalui proses pembelajaran sosial, seperti belajar berpakaian dengan mode baru, belajar berhubungan dengan lawan jenis, dan sebagainya. Proposisi yang dibangun oleh teori pembelajaran sosial adalah bahwa manusia melakukan imitasi dan identifikasi dengan cara belajar melalui observasi terhadap perilaku orang lain di sekitarnya, termasuk melalui media massa.

Secara umum terdapat empat langkah dalam teori pembelajaran sosial: *attention process, retention process, motor reproduction process,* dan *motivational process.* Dalam *attention process* seseorang menaruh perhatian pada suatu peristiwa serta secara seksama mencerna hal-hal penting yang ada dalam peristiwa tersebut. Perhatian pada suatu peristiwa ditentukan oleh karakteristik peristiwa (stimulus yang dijadikan model) dan karakteristik si pengamat. Peristiwa yang jelas dan sederhana akan mudah menarik perhatian, dan karenanya mudah dijadikan model. Karakteristik pengamat meliputi antara lain kemampuan seseorang dalam memroses informasi, umur, inteligensi, daya persepsi, dan taraf emosionalitas. Orang yang emosional akan lebih mudah tertarik perhatiannya terhadap suatu rangsangan tertentu. Dalam *retention process* atau proses retensi, peristiwa yang menarik perhatian dimasukkan ke dalam pemikiran dalam bentuk lambang secara verbal atau imaginal sehingga membentuk sebuah *memory* atau ingatan. Dalam *motor reproduction process* hasil ingatan akan direproduksi menjadi perilaku. Kemampuan kognitif dan kemampuan motorik berperan penting dalam

langkah atau proses ini. Reproduksi yang seksama biasanya merupakan hasil *'trial and error'* yang dipengaruhi oleh umpan balik. Dalam *motivational process*, perilaku benar-benar terwujud apabila diikuti nilai peneguhan atau penguatan. Peneguhan dapat berbentuk imbalan atau hukuman (Bandura, 1977).

Proses pembelajaran sosial melalui media berlangsung melalui tiga cara: *observational learning, inhibitory effects,* dan *disinhibitory effects.* Dalam *observational learning* seseorang mempelajari perilaku tertentu dengan mengobservasi atau mengamati penyajian media. Dalam *inhibitory effects* seseorang mengurangi keinginannya melakukan perilaku sebagaimana ditampilkan oleh model karena melihat model mendapatkan hukuman sebagai konsekuensi perilakunya itu. Dalam *disinhibitory effects* seseorang mengalami peningkatan keinginan melakukan perilaku sebagaimana ditampilkan oleh model karena melihat sang model mendapatkan imbalan atas perilaku yang ditampilkannya. Lebih lanjut menurut Bandura (1994), sebuah variabel penting yang mempengaruhi terjadi-tidaknya pembelajaran sosial adalah persepsi seseorang atas *self-efficacy* atau kemampuan dirinya, yaitu penilaian orang yang bersangkutan mengenai kemampuannya mengontrol tingkat kinerjanya maupun kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupannya.

Dampak Industri Televisi bagi Integritas Bangsa

Kajian komunikasi massa tidak bisa dilepaskan dari kajian media massa, karena salah satu ciri komunikasi massa adalah adanya penggunaan media massa sebagai penyampai pesan kepada khalayak penerima. Komunikasi massa banyak memberi kontribusi bagi perkembangan masyarakat suatu bangsa, baik pada bidang ekonomi, sosial, budaya, terlebih politik. Di Indonesia, perkembangan komunikasi massa telah melewati beberapa babakan yang sangat signifikan. Pada masa Orde Baru, komunikasi massa atau dalam hal ini media massa dikuasai pemerintah sebagai salah satu alat ampuh untuk menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya, pada masa itu kebebasan media massa dalam menyampaikan berbagai realitas dan berekspresi terkekang karena adanya kebijakan pembreidelan terhadap media massa yang "berseberangan" dengan pemerintah.

Keadaan menjadi berbalik kontras bagi media massa di Indonesia ketika angin reformasi berhembus seiring tumbangnya kekuasaan Orde Baru. Kran kebebasan media massa untuk berekspresi, menyampaikan berbagai realitas yang terjadi dan sebagai sarana opini publik, terbuka sedemikian lebar sampai terjadi fenomena kebebasan yang kebablasan. Hal ini ditandai dengan dihapusnya kebijakan pembreidelan media massa, dihapusnya kebijakan pembuatan SIUPP

bagi organisasi yang akan menerbitkan media massa, sehingga bermunculanlah berbagai format media massa baik cetak maupun elektronik dengan sajian konten yang begitu variatif. Konten media massa pun memiliki kecenderungan besar memberi dampak negatif bagi konsumennya, karena banyak dipengaruhi oleh budaya populer dan *westernisasi*.

Di bidang pertelevisian, sepanjang sejarah pertelevisian keprihatinan utama adalah timbulnya dampak kekerasan dari tayangan televisi. Sejumlah hipotesis diajukan sehubungan dengan kemungkinan dampak tayangan kekerasan di televisi pada perilaku manusia. Salah satu hipotesis adalah *catharsis hypothesis* atau hipotesis katarsis yang menyatakan bahwa menyaksikan tayangan kekerasan di televisi menyebabkan pengurangan dorongan agresif melalui ekspresi perilaku bermusuhan yang dialami orang lain. Kekerasan yang ditonton akan membuat penonton marah dan frustrasi, kemudian mengeluarkan perasaan mereka sehingga mereka akan mengurangi keinginan berperilaku agresif (Feshbach, 1955).

Hipotesis ini disangkal oleh Siegel (1956) melalui penelitian terhadap murid penghuni asrama yang ditugaskan untuk menonton *Woody Woodpecker.* Hasilnya, mereka berperilaku lebih agresif setelah menonton tontonan kekerasan. Penelitian Siegel menimbulkan hipotesis rangsangan yang menyatakan bahwa tayangan kekerasan akan menyebabkan peningkatan perilaku agresif yang sesungguhnya. Ada dua hipotesis rangsangan yaitu *imitation hypothesis* atau hipotesis menirukan atau mencontoh dan *disinhibition hypothesis* atau hipotesis kehilangan kendali diri. Hipotesis menirukan menyatakan bahwa orang mempelajari perilaku agresif dari televisi dan kemudian mereproduksi perilaku tersebut. Sementara hipotesis kehilangan kendali diri menyatakan bahwa tayangan televisi menurunkan rasa segan orang untuk berperilaku agresif kendati tayangan kekerasan televisi itu mengajarkan norma umum bahwa kekerasan merupakan cara yang tidak dapat diterima untuk berhubungan dengan orang lain.

Dari kajian penelitian terdahulu tentang dampak tayangan kekerasan di televisi diperoleh hanya sedikit bukti yang mendukung hipotesis katarsis. Lebih banyak hasil penelitian yang mendukung dua hipotesis rangsangan, yaitu menirukan dan kehilangan kendali diri. Salah satu penelitian dilakukan oleh Liebert dan Baron (1972), berupa eksperimen menggunakan dua kelompok anak umur lima hingga sembilan tahun sebagai subjek. Mereka diminta menyaksikan *The Untouchable* dan tayangan olahraga. Hasilnya, kelompok anak yang menonton *The Untouchable* cenderung lebih 'senang' mempersulit temannya yang sedang berusaha menyelesaikan *game* (Bryant & Zillmann, 2002).

Sekitar tahun 2006 acara kekerasan *Smackdown* yang ditayangkan di

layar televisi *Lativi* (kini *TV One*) diminta dihentikan karena telah menimbulkan korban di kalangan pemirsa anak-anak. Selain ada yang meninggal, ada juga yang mengalami patah tulang. *Smackdown* yang ditayangkan pihak televisi setiap hari telah membuat anak-anak mengidolakan dan hafal tokoh-tokoh pelakunya serta mempraktekkan teknik bantingan para idola tersebut, tanpa menyadari bahwa acara kegemaran mereka itu hanyalah tipuan *reality show* yang sarat dengan trik kamera.

Tak kalah menarik adalah pengakuan para pelaku mutilasi yang terinspirasi untuk melakukan perbuatannya karena pengaruh pemberitaan media massa. Beberapa pelaku mutilasi yang diberitakan harian *Kompas* tanggal 10 Nopember 2002 memberikan penuturan sebagai berikut. Sri Rumiyati alias Yati (48) bertutur kepada wartawan, "saya memutilasi suami karena meniru Ryan (Jombang), terutama dari tayangan televisi selain dari koran yang saya beli di angkutan kota. Daripada repot, untuk menghilangkan jejak, saya potong-potong saja suami saya seperti yang dilakukan Ryan." Seorang pelaku mutilasi lain pada Desember tahun 1989 di depan sidang pengadilan mengaku memutilasi korbannya karena terinspirasi berita tentang penemuan mayat dalam keadaan terpotong menjadi 13 bagian di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, yang tak pernah terungkap kasusnya. Pada kasus kekerasan berupa pengeboman restoran cepat saji di Kramat Jati, Jakarta Timur, si pelaku juga mengakui meniru pembuatan bom dari televisi. "Lihat, ikuti; lihat, ikuti." Tayangan televisi kiranya mudah diterima oleh pemirsa dari segala umur. Sebaliknya dampak media cetak tidak seefektif media televisi sebab dipengaruhi oleh penggunaan dan pemahaman bahasa. "Bahasa cetak kadang kurang komunikatif bagi pembaca, apalagi yang berlatar belakang pendidikan kurang memadai," tutur pelaku pengeboman (Kompas, 10 Nopember 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Desti (2005), Widowati (2012), Rohani (2015), Astarini (2017), dan Indria (2017) menunjukkan hasil yang mendukung hasil-hasil penelitian terdahulu, yaitu bahwa tayangan televisi berpengaruh terhadap perilaku.

Dari beberapa eksperimen yang dilakukan baik secara laboratoris maupun lapangan, penulis menyimpulkan bahwa *"ada hubungan antara menonton tayangan kekerasan di televisi dengan perilaku agresif."* Pertanyaannya, bagaimana tanggungjawab sosial media televisi terhadap masyakarat? Pemikiran tentang hubungan antara media dan integrasi masyarakat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek negatif dan aspek positif. Terkait *aspek negatif*, ketika pola kehidupan masyarakat berubah dari masyarakat pertanian menuju masyarakat industrial maka terjadilah arus urbanisasi yang dikuti pula dengan pergeseran nilai-nilai sosial. Dalam proses perubahan ini surat kabar, film dan bentuk-bentuk budaya populer lainnya seperti musik, buku, majalah, komik berpeluang

menjadi penyumbang terbesar penyebarluasan perubahan nilai-nilai sosial tersebut. Karena itu media kerap dipandang sebagai alat disintegrasi sosial, sumber penyebab aneka penyakit/masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat seperti kriminalitas, kekerasaan, penyimpangan seksual berupa homoseksualitas, paedophilia, pelacuran, individualistisme, terbentuknya *virtual society* dan sebagainya.

Terkait *aspek positif*, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media massa berkontribusi sebagai alat pemersatu masyarakat dengan berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan serta norma-norma kehidupan dalam masyarakat dengan cara memberikan ruang untuk berbagi pengalaman pada tingkat pribadi, daerah, nasional maupun global. Media massa juga mampu menciptakan lingkungan simbolik yang positif melalui tema percakapan yang diangkat, penampilan tokoh masyarakat yang dapat menimbulkan efek kebersamaan dan menciptakan perekat ikatan sosial, penayangan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat yang bernilai positif baik pada taraf nasional maupun international, seperti kunjungan Paus, pesta pernikahan kenegaraan, dan pertandingan olah raga tingkat dunia.

Sepanjang awal abad ke-20 muncul semangat bahwa media massa harus mampu memberikan pencerahan publik. Media massa memandang dirinya sebagai penyeimbang, memberikan kontribusi demi kemajuan dengan cara menyebarkan informasi dan ide-ide, mengungkap korupsi politik, dan menyediakan hiburan yang sehat. Institusi penyiaran radio tahun 1920-an dan 1930-an di Eropa misalnya sering melaksanakan misi pendidikan, informasi dan budaya serta memberikan kontribusi dalam pembentukan identitas dan persatuan nasional. Potensi teknologi komunikasi untuk mendorong pencerahan kembali terangkat dengan munculnya teknologi komunikasi terbaru berbasis komputer dan telekomunikasi (Neuman, 1991). Namun saat ini kekhawatiran terhadap dampak negatif media massa jauh lebih besar. Iklim pasar yang semakin kompetitif membuat institusi media cenderung mengutamakan keuntungan. Hiburan lebih mengandung nilai pasar dibandingkan pendidikan dan seni.

Media televisi di Indonesia cenderung digunakan untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan negatif yang kurang sesuai dengan nilai luhur bangsa, nilai budaya Pancasila maupun nilai agama, melalui aneka tayangan yang cenderung negatif seperti cerita sinetron berbau mistis, perselingkuhan, 'cinta monyet', penggunaan bahasa Indonesia yang kasar dan tidak baku dalam sinetron, film ataupun *variety show*, pengeksposan adegan kekerasan maupun sadisme, pengidolaan peran kebanci-bancian, isi pemberitaan yang kurang berimbang, berita-berita tentang artis yang tidak lagi mempedulikan ruang privasi dan terlalu banyak gosip, dan sebagainya. Nilai-nilai yang tidak selaras dengan budaya bangsa

dan yang dikemas dalam berbagai ragam acara televisi ini cepat atau lambat akan membentuk budaya massa pada penerima pesan. Disadari atau tidak, pemirsa akan meniru perilaku dalam tayangan yang dilihat. Akibatnya, pergaulan bebas di kalangan generasi muda menjadi marak, praktik aborsi menjadi hal yang biasa, perselingkuhan di kalangan masyarakat merajalela tanpa memandang usia maupun status sosial (anggota DPR-pun terlibat kasus perselingkuhan), gaya hidup hedonisme dan konsumerisme meningkat, orientasi seksual *gay* ataupun lesbian dianggap wajar, tingkat pemerkosaan maupun kejahatan meningkat, dan sebagainya. Ironisnya, keadaan ini berlangsung merata di semua lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dalam kondisi ini, media televisi menjadi sumber penyebab penyakit/masalah sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan permusuhan, konflik dan disintegrasi sosial. Jika media televisi di Indonesia tidak segera dikelola secara bijak dan profesional berdasarkan nilai dan moral Pancasila serta agama, sebaliknya hanya mengejar keuntungan materi belaka, maka cepat atau lambat media televisi akan menjadi 'racun' bagi kehidupan masyarakat.

Perlu diingat, kaitan antara media dan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari *public sphere* atau ruang publik. Peran media sebagai ruang publik ini hanya akan tercapai jika ada kebebasan media di satu sisi dan kekuatan kelompok sipil yang kuat di sisi lain. Media tidak boleh menjadi organ penguasa atau kekuatan politik atau ekonomi tertentu. Media harus mengangkat isu yang benar-benar terjadi dalam masyarakat, bukan kepentingan kekuatan politik atau ekonomi tertentu. Gejala konglomerasi atau pemusatan kepemilikan media di tangan beberapa pemilik bisa menghalangi kemampuan media menjalankan fungsi sebagai ruang publik. Media harus mengangkat kepentingan publik, yaitu kepentingan yang menjadi masalah dan kepentingan bersama bukan yang hanya bertumpu pada kepentingan pemilik modal ataupun penguasa. Beberapa bentuk kepentingan publik yang harus mendapatkan dukungan dari media meliputi terciptanya keteraturan sosial, berlangsungnya proses demokrasi, terangkatnya budaya dan tanggungjawab terhadap dunia internasional.

Media massa, khususnya media televisi, perlu mengingat kembali perannya sebagai salah satu institusi masyarakat yang mempunyai tanggung jawab sosial pada masyarakat. Jangan terlalu berorientasi pada keuntungan bisnis semata. Pihak pengelola penyiaran televisi perlu menyadari bahwa menayangkan peristiwa kriminal bukanlah suatu kesalahan, tetapi cara penyajian dan pengemasan pemberitaannya kiranya perlu ditinjau ulang secara keseluruhan. Sekadar 'mengaburkan' wajah pelaku atau korban tidaklah cukup jika peristiwanya sendiri tetap disajikan lebih sebagai komoditas. Singkat kata, komodifikasi program kekerasan di televisi perlu dikaji lebih lanjut secara kritis

dan holistik dengan menyertakan dua *entry point* lainnya, yaitu spasialisasi dan strukturasi. Melihat kenyataan dan akibat yang ditimbulkan oleh media televisi sebagaimana diuraikan, model komunikasi media di Indonesia dapat dikategorikan mengikuti ***publicity model***, yaitu baru sebatas bertujuan menarik perhatian khalayak tanpa memperhatikan unsur kearifan budaya lokal, norma dan nilai susila, maupun nilai-nilai agama. Tujuan media televisi di Indonesia masih sebatas demi kepentingan keuntungan bisnis belaka, belum didasari rasa tanggung jawab untuk membangun generasi muda bangsa yang berakhlak dan bermoral untuk melanjutkan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia tercinta.

Penutup

Pada awal perkembangannya di awal abad ke-20 media massa mengacu pada peran sebagai alat berkomunikasi secara terbuka yang terorganisir, yang ditujukan kepada sejumlah khalayak dalam waktu yang singkat. Media massa lahir ke konteks dan konflik pada masa transisi, dan terus mempengaruhi perubahan sosial dan budaya dalam kehidupan manusia hingga saat ini, baik pada level individual, masyarakat, maupun sistem dunia.

Dewasa ini, dalam era keberlimpahan informasi sebagai akibat kemajuan dan kecanggihan teknologi dan informatika perbedaan antar media massa semakin tipis dibandingkan sebelumnya. Banyak koran dan sumber berita memiliki *website* yang digunakan untuk menyalurkan berita. Rangkaian komputer maupun telepon genggam telah dilengkapi televisi secara terpadu, sehingga perangkat elektronik dimaksud bersifat multifungsi.

Perkembangan media komunikasi elektronik ini juga mengubah pendekatan komunikasi. Media massa tradisional yang pada dasarnya menawarkan model komunikasi "satu-untuk-banyak" (misalnya surat kabar, televisi, radio) menjadi "banyak-untuk-satu" (penggunaan *email*, *website*) dan "banyak-untuk-banyak" (penggunaan milis, kelompok dalam telepon genggam ataupun diskusi via media elektronik).

Perubahan pendekatan komunikasi massa terkait dengan perkembangan teknologi dan informatika ini juga mengakibatkan perubahan peran media massa. Perbedaan terjadi karena masing-masing memiliki ukuran yang berbeda. Pada sisi masyarakat sebagai penerima, ukuran yang dipakai adalah demokratisasi sistem penyiaran yang ditandai dengan adanya desentralisasi sistem penyiaran, pembukaan seluas-luasnya akses publik terhadap dunia penyiaran, dan diversifikasi *output* tayangan demi pemberdayaan publik. Sementara pada sisi industri penyiaran, ukurannya adalah bagaimana investasi modal dapat cepat kembali disertai keuntungan yang sebesar-besarnya.

Peran mediasi sosial pada media massa dapat diartikan bahwa media massa berada antara masyarakat dengan realitas sosial, disamping menjadi penghubung antara masyarakat dengan institusi terkait. Berdasarkan UU Pokok Pers No.40 Tahun 1999 media massa di Indonesia cenderung dikuasai oleh kelas kapitalis sebagai akibat sistem liberalisme pasar. Jika pun ada peran mediasi sosial yang dilakukan, bentuknya semu dan tebang pilih pada penyampaian informasi yang tidak mendiskreditkan kelas elit tertentu yang memegang kontrol *policy* maupun modal pada industri media.Terkesan tidak ada dominasi dari kelas tertentu, namun pada kenyataannya tetap saja ada '*invisible hand'* yang mengatur dan mengontrol media, tetapi tidak seketat pada zaman Orde Baru.

Dalam pemberitaannya, media cenderung kehilangan independensinya karena campur tangan pemilik modal melalui jaringan media. Akibatnya, segala bentuk produksi pesan tidak terlepas dari kepentingan pemilik media. Informasi yang disampaikan kepada khalayak adalah realitas yang sudah diseleksi dan disusun menurut pertimbangan ideologi institusi media. Kondisi ini menggambarkan *bargaining power* atau kekuatan tawar yang lemah dari wartawan ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik media. Relasi yang tidak seimbang ini juga menjadikan wartawan dipahami sebagai pekerja dan bukan profesional media.

Sistem pers Indonesia telah mengalami dinamika seiring perubahan sistem politik negara. Pada masa pergerakan media dilihat sebagai alat perjuangan. Pada masa kemerdekaan pers sempat menjadi alat perjuangan partai politik. Setelah stabilitas politik tercapai dan pembangunan berjalan, media menjalankan peran dalam konteks komunikasi pembangunan dan komoditas (pers kapitalis). Dewasa ini, media berada dalam konteks kebebasan dan komersial. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sistem pers liberal di Indonesia dewasa ini yang telah menciptakan pluralisme media pada hakikatnya merupakan kelanjutan *Tata Komunikasi dan Informasi Dunia Baru* yang sejak tahun 1980-an tidak mencerminkan upaya media untuk membangun *public sphere* sebagai bagian tanggung jawab sosialnya untuk benar-benar membebaskan masyarakat dari cengkeraman kekuasaan politik maupun ekonomi.

Dalam pembangunan bangsa, media seperti pisau bermata dua, yaitu memiliki fungsi dan disfungsi sekaligus. Fungsi media memberikan informasi tentang realitas pada akhirnya dapat berdampak sampingan yang negatif sebagai disfungsi. Manakala media terus-menerus mencekokkan nilai-nilai kekerasan, pornografi, ketidakjujuran, hedonisme melalui pemberitaan yang tidak netral dan mutu jurnalisme yang kurang baik, maka ada risiko bahwa lama-kelamaan bisa terbentuk persepsi di dalam masyarakat bahwa hal-hal tersebut adalah lumrah. Hal ini akan menyebabkan masyarakat cenderung menjadi tidak sensitif

terhadap masalah sosial yang ada. Akibatnya akan terjadi kekacauan dalam nilai dan norma sosial masyarakat secara luas, dimana nilai baik dan buruk menjadi rancu. Kondisi ini jelas kurang menguntungkan bagi integrasi bangsa yang membutuhkan fungsi media sebagai pewarta kejadian yang sesungguhnya.

Pada akhirnya hal yang perlu diingat dan diperhatikan dalam kehidupan media televisi di Indonesia adalah kenyataan bahwa pengelolaan bisnis industri televisi tidaklah terlepas dari pengaruh dan campur tangan pihak asing baik langsung maupun tidak langsung. Dominasi segelintir pemilik modal dalam industri televisi Indonesia merupakan bagian dari penetrasi dan ekspansi kapitalisme dan kekuatan politik secara global.

Daftar Acuan

Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs N.J: Prentice Hall.

Bandura, A. (1994). Social cognitive theory of mass communication. Dalam J. Bryant & Zillmann (Eds.), *Media effects: Advances in theory and research.* Hillsdale, N.J: Erlbaum.

Baran, S., & Davis, D. (2000). *Mass communication*. Canada: Wadsworth Thomson.

Baudrillard, J. (1983). *Simulations.* New York: Semiotext(e), Inc.

Curran, J. (2000). Mass media and democracy: A reappraisal. Dalam J. Curran dan M. Gurevitch (Eds.), *Mass media and society* (3rd ed.). London: Arnold Publications.

Desti, Sri. (2005). Dampak tayangan film di televisi terhadap perilaku anak. *Jurnal Komunikologi, 2*(1), 1-7.

Feshbach, S. (1955). The drive reducing function of phantasy behavior. *Journal of Abnormal and Social Psychology, 50*(1), 3-11.

Hidayat, Dedy Nur. (2000). *Pers dalam revolusi Mei: Runtuhnya sebuah hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ibrahim, Idu Subandy. (2004). *Komunikasi empatik*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy.

Indria, Rizky R., & Prasetyo, Iwan D. (2017). Pengaruh tayangan sinetron anak jalanan terhadap perilaku agresif murid SMP Muhammadiyah 6 Surabaya. *Jurnal Kajian Media, 1*(2), 157-165.

Bryant, J., & Zillmann. (2002). *Media effects: Advances in theory and research.* Hillsdale, N.J: Erlbaum.

McQuail, D. (2005). *Media performance: Mass communication and public interest.* London: Sage Publications.

McQuail, D. (2005). *Mass communication theory*. London: Sage.

Mosco, V. (2009). *The political economy of communication* (2nd ed.). London: Sage.

Murdoch, G., & Golding, P. (2000). *Political economy of the media*. London: Routledge.

Neuman, R.W. (1991). *The future of the mass audience*. USA: Cambridge University Press.

Novita, A., Hamid, S.I., & Rustini, T. (2017). Studi dampak tayangan televisi terhadap perkembangan perilaku sosial anak. *Jurnal Cakrawala*, *8*(1), 2-11.

Rohani, G.A.. (2015). Pengaruh televisi terhadap aspek perkembangan anak usia 3-4 tahun. *Jurnal Pendidikan*, *4*(2), 631-639.

Severin, T., & Tankard, J.W. (2001). *Communication theories: Origins, methods and uses in the mass media*. New York: Longman.

Siegel, S. (1956). *Nonparametric statistics for the behavioral sciences*. New York: McGraw Hill.

Widowati, D. (2012). Efek media massa terhadap khalayak. *Jurnal Adzikra*, *3*(1), 75-98

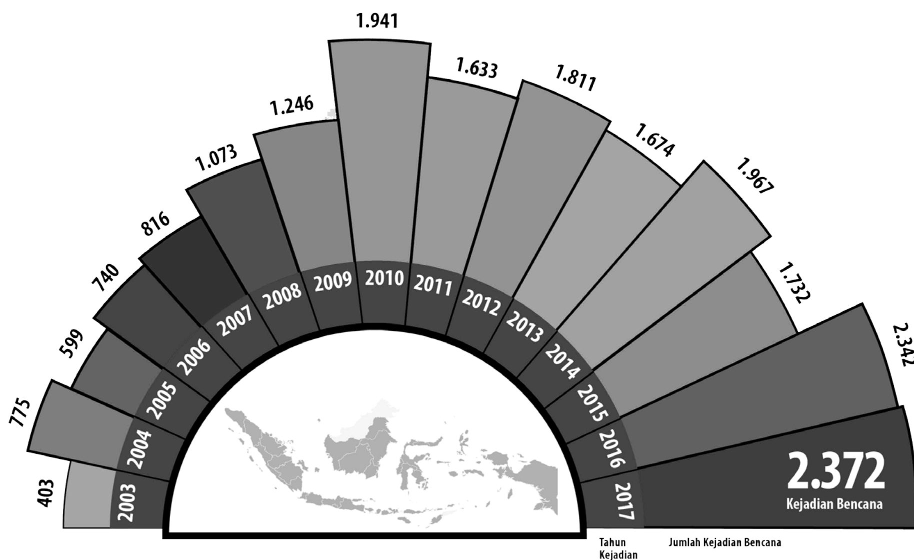
Hutagalung, Inge. ***News independence and national integration.*** *The Indonesian television industry is part of the penetration and expansion of capitalism and political power globally. In its development, television media in Indonesia has a tendency to be used to transfer negative life values that are not in accordance with the nation's noble values, Pancasila cultural values, and religious values. When the media constantly attacks the values of violence, pornography, dishonesty, hedonism through non-neutral reporting and poor quality journalism, it will eventually form perceptions in the community that these things are commonplace. This will make people tend to be insensitive to existing social problems. As a result broadly, there will be chaos in the social values and norms of society, where good and true values become ambiguous. This condition is not favorable for the integrity of the nation which requires the function of the media as the true reporter of events.*

Belajar Hidup dari Masyarakat di Wilayah *Ring of Fire*: Telaah Media Edukasi, Komunikasi, dan Budaya

Rahmatsyam Lakoro & Ike Herdiana

Indonesia sebagai Zona *Ring of Fire*

Letak Indonesia secara geografis berada di daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Samudera Pasifik dan Indo-Australia yang rawan terhadap bencana atau dikenal dengan daerah Cincin Api (*the ring of fire*). Kondisi tersebut menyebabkan beberapa wilayah berpotensi mengalami bencana alam gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik serta potensi tsunami secara periodik. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sembilan puluh dua persen (92%) bencana di Indonesia yang tercatat dari tahun 1815 hingga 2017 adalah bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut berdampak pada kerusakan infrastruktur, hambatan transportasi di darat dan laut, ketidakamanan energi, fluktuasi produksi pangan, dan kemunduran stabilitas ekonomi (BNPB, 2019)



Gambar 1. Kejadian bencana di Indonesia antara tahun 2003-2017 didominasi bencana hidrometeorologi (sumber: (BNPB, 2019))

Bagaimana selama ini penanganan bencana yang ada? Indonesia merupakan negara multikultural. Variasi kultural membuat pendekatan dalam perencanaan penanganan bencana berbeda di setiap budaya. Mereka yang secara geografis hidup di daerah bencana umumnya memiliki perencanaan menghadapi bencana yang dijalankan secara tradisional. Pola dalam sebuah komunitas dan kelompok sosial dapat memengaruhi pola-pola pemberian bantuan. Kelompok budaya yang berbeda memiliki kepercayaan yang berbeda-beda pula tentang konsep kematian dan kehidupan, sehingga seringkali merespon sebuah fenomena bencana dengan cara yang tidak diduga oleh orang modern (Ehrenreich, 2001)

Selain problem kultural, penting juga bagi kita untuk memperhatikan dampak bencana ini bagi kelompok masyarakat nonproduktif, seperti anak-anak. Dalam kaitannya dengan target yang disasar dalam edukasi mitigasi bencana, belum ditemui konsep perancangan yang komprehensif untuk menghadapi problem-problem komunikasi terkait target di kelompok usia dini. Narasi besar terkait prinsip kebenaran dan kesejahteraan yang dianggap universal kurang mampu mengakomodasi keragaman kultural dan masyarakat di wilayah bencana sehingga diperlukan sistem dan teknik komunikasi untuk setiap karakteristik yang berbeda. Desain pada media yang dikonsumsi publik belum mempertimbangkan peruntukan dari pesan tersebut sehingga sifatnya sebatas informasi dan belum melakukan persuasi lebih jauh. Desain yang ditemukan dalam penelusuran awal kebanyakan bersifat generik dengan konten yang juga kurang spesifik. Hal ini tidak mendukung proses penanaman informasi yang bersifat kedaruratan menjadi kebiasaan dan membentuk budaya keselamatan sejak usia dini di mana kemandirian secara fisik dan psikis belum terbentuk.

Media edukasi mitigasi bencana seringkali tidak sejalan dengan konsep-konsep tradisional yang telah dihayati masyarakat di wilayah bencana. Kesadaran akan ruang hidup bagi masyarakat Indonesia menjadi penting. Kendala edukasi bencana modern selama ini—di antaranya keyakinan dan kepatuhan tradisional pada figur-figur tertentu—menjadikan proses evakuasi, pengungsian, dan relokasi yang berbasis pengetahuan modern mengalami hambatan budaya. Oleh sebab itu, kesadaran ruang hidup seharusnya bisa dilakukan berdampingan untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang bahaya bencana tersebut.

Masyarakat Kepulauan Nias dan Pulau Simeulue memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi bencana. Bencana memang bukan persoalan statistik, namun jika merujuk pada peristiwa tsunami tahun 2004 di bagian barat pulau Sumatera,Aceh mencatat sekitar 230.000 korban jiwa, sebaliknya di Pulau Simeleue terdapat 6 warga yang menjadi korban jiwa. Masyarakat Simeleue yang tinggal di pantai mendapati air laut yang tiba-tiba surut segera membacanya sebagai gejala awal *smong* (tsunami dalam bahasa masyarakat Simeleue (Karokaro,

2014). Merekalah yang segera memberi peringatan warga lain untuk menjauh dari pantai dan mencapai tempat tinggi.

Kesadaran terhadap ruang hidup mereka yang rentan tsunami mendorong beberapa pemimpin adat menginisiasi sendiri edukasi mitigasi bencana lewat budaya tutur. Salah satunya yang dikemas dalam syair gubahan Moh. Riswan R, tokoh adat Simeulue. Syair itu digubah sejak Pulau Simeleue diterpa tsunami pada 1907 yang memakan banyak korban jiwa (Karokaro, 2014). Dalam rentang waktu 1907-2004, edukasi mitigasi bencana ditanamkan pada warga untuk dapat memiliki pengetahuan yang tersimpan di wilayah batin dan kebiasaan (*tacit knowledge*) dalam menghadapi krisis seperti tsunami. Bahasa visual yang digunakan dalam komunikasi edukasi kebencanaan memiliki aspek-aspek pesan yang bisa dikaji lebih jauh sehingga dapat menyediakan kerangka kerja semiotik bagi aplikasinya di ranah praksis. Media pendidikan untuk mitigasi bencana yang biasa digunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat telah disebarluaskan, baik oleh pemerintah maupun lembaga terkait bencana. Beberapa area di lingkaran api memiliki pola mitigasi tradisional dan vernakular yang diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak selalu sejalan dengan manajemen bencana modern (Lakoro, Sachari, Waspodo, 2019).

Media Edukasi Kebencanaan

Media memungkinkan manusia menjadi satu-satunya makhluk di bumi yang dapat mengakumulasikan pengetahuan dan meneruskannya pada generasi berikutnya. Akumulasi pengetahuan tersebut seringkali membentuk dasar kebudayaan dan peradaban manusia (Westera, 2015). Media dipandang sebagai material yang memberikan pengalaman baik langsung maupun tidak langsung, konkret maupun abstrak. Ia dapat disebut sebagai perangkat bergambar. Kerucut pengalaman belajar yang dibuat oleh Dale (1946) tidak menawarkan kesempurnaan gambar sebagai sebuah alat, tetapi bagaimana wahana visual menjelaskan hubungan antar material dan posisi individu dalam sebuah proses belajar. Dalam hal ini, bukan berarti belajar dengan metode membaca adalah yang paling lemah, tetapi metode tersebut membuat pengetahuan sulit diingat dalam jangka waktu tertentu.



Gambar 2. Kerucut Pengalaman Edgar Dale yang memperlihatkan dampak belajar yang lebih menetap dengan pengalaman langsung yang bertujuan (Dale, 1946:39)

Mengapa media edukasi ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan? Bagi masyarakat yang sudah pernah mengalami bencana alam, media edukasi ini dapat memperkuat pengetahuan atas pengalaman selama terkena bencana. Bagi masyarakat yang belum pernah mengalami bencana, maka ia dapat meningkatkan *awareness* terhadap tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Kita tidak pernah bisa membayangkan jika bencana sudah terjadi dan bagaimana dampaknya secara keseluruhan. Selain berdampak secara fisik, dampak psikologis jauh lebih membutuhkan waktu pemulihan yang lama. Banyak studi mengungkapkan bahwa *Post Traumatic Stress Disorders* (PTSD) merupakan dampak yang paling umum terjadi pada korban bencana alam, baik pada orang dewasa, remaja maupun anak-anak (Mirzamani & Mohammadi, 2012). Masalah psikologis anak-anak yang menjadi korban bencana akan muncul setelah ia mengalami langsung bencana tersebut, atau masalah dapat terjadi pada mereka yang tidak mengalami namun melihat bagaimana anggota keluarga, teman sekolah, atau tetangga mereka mengalaminya (Mirzamani & Mohammadi, 2012).

Edukasi kebencanaan berbeda dengan edukasi umum karena produk komunikasinya perlu memenuhi fungsi kognitif tertentu untuk dipahami. Edukasi tersebut perlu memperoleh perhatian karena terkait erat dengan situasi kedaruratan dan informasi yang terkait keselamatan. Dampak dari perancangan media edukasi bencana diharapkan dapat memberi kebaruan sesuai dengan

karakteristik masyarakat Indonesia dalam membangun kultur keselamatan. Kelayakan pengujian dan reproduksi dalam penelitian desain sifatnya tidak lebih penting dibandingkan sensitifitasnya terhadap konteks sosial dan momen kultural yang membuat hasil penelitian desain tersebut beresonansi dengan publik atau pasar. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Laurel (2003; dalam Lunenfeld, 2003) yang menyatakan bahwa penelitian desain yang berpusat pada manusia dapat memperkuat kemampuan desainer untuk membentuk budaya populer dan secara halus mentransmisikan nilai-nilai melalui desain.

Media edukasi ini terkait dengan perangkat yang berhubungan langsung dengan kemampuan manusia, berupa kemampuan kognitif, kapasitas berpikir, dan kecerdasan. Secara esensial, media edukasi yang dimaksud adalah media yang bertujuan untuk berkomunikasi, memfasilitasi ekspresi dan pertukaran ide antar individu. Media edukasi diidentifikasi sebagai berbagai alat yang digunakan untuk mendukung komunikasi antar manusia, termasuk di dalamnya segala teknologi media edukasi cetak maupun yang diterapkan sebagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui penggunaan perangkat dan aplikasi secara luas seperti telepon cerdas, sistem manajemen pembelajaran dan permainan elektronik (Fiske, 2004).

Tinjauan Perancangan Media Edukasi Kebencanaan untuk Anak

Bencana juga terkait dengan keyakinan kelompok tertentu dalam menghadapinya, baik dengan cara-cara yang bersifat tradisional maupun yang dipengaruhi penanganan bencana modern. Dalam konteks edukasi bencana, riset mengenai elemen visual suatu kelompok masyarakat dapat diujikan sebagai perangkat edukasi yang bersifat visual. Motivasi ini memperjelas tujuan dari setiap media edukasi bencana yang diciptakan agar meninggalkan pemahaman yang membekas dalam jangka panjang. Salah satu contoh keberhasilan pengajaran bencana yang cukup terkenal adalah kisah Tilly Smith, seorang anak kecil asal Inggris berusia 10 tahun saat terjadi tsunami 2004 di Pantai Maihkao, Phuket. Tilly Smith belajar mengenai tsunami di kelas geografi di sekolahnya Danes Hill School dari sang guru Andrew Kearney, dua minggu sebelum dia dan keluarganya pergi berlibur ke Thailand. Tilly menyelamatkan banyak orang saat dia menemukan gejala tsunami seperti yang dijelaskan gurunya di kelas. Saat laut mendadak surut dan keluar gelembung di pantai, Tilly berlari ke hotel dan memperingatkan orang tuanya dan tamu-tamu hotel, yang kemudian segera melakukan tindakan evakuasi untuk menjauh dari pantai (Khoirul, 2019)

Tabel 1.
Tinjauan media komik daring

Media	Variabel Desain	Konten
Komik online edukasi bencana di portal KemenESDM (www.portal.vsi.esdm.go.id/ joomla) Media daring laman internet	**Komposisi** menggunakan kaidah komposisi dalam panel komik dengan penekanan pada beberapa panel yang diperbesar dengan teknik *establishment shot.* **Warna** menggunakan teknik pewarnaan manual dan cenderung menyerupai gaya mewarna anak-anak untuk menyesuaikan kelompok pembaca. **Tipografi** teks mendukung narasi cerita dengan balon dialog yang sangat sedikit. **Ilustrasi** menggunakan gaya gambar anak-anak dengan proporsi anatomi *chibi* juga diperkuat dengan lanskap bencana yang disederhanakan.	**Desain karakter** ditujukan pada anak SD usia dini di mana kemampuan membaca belum terlalu baik sehingga pesan dirancang dengan memakai karakter sebagai pembawa pesan, dimunculkan karakter anak-anak yang penuh rasa ingin tahu pada fenomena alam. **Diagram proses** ditampilkan dalam beberapa panel untuk memudahkan pembaca memahami pesan, seperti diagram lapisan bumi atau proses terjadinya suatu bencana.

Tabel 2.
Tinjauan media aplikasi permainan

Media	Variabel Desain	Konten
Game AksiSARbini *(web game)* Aplikasi permainan unduhan laman pengembang (Lakoro, 2011)	**Komposisi** berbentuk *grid* yang terdiri dari ikon-ikon berupa objek-objek terkait keselamatan pada situasi darurat. **Warna** menggunakan palet warna tropikal sesuai dengan area distribusi permainan. **Tipografi** *headline* berupa judul permainan dan informasi terkait permainan dalam palet huruf tanpa kait. **Ilustrasi** menggunakan gaya gambar ikonik dengan pewarnaan *opaque.* **Kode bunyi** respon pada ikon, suara latar dan komentar/ respon atas performa pemain.	**Interaktifitas** dalam konten memberi kesempatan pengguna untuk mengumpulkan *item* terkait situasi kedaruratan bencana (memahami item ini merupakan *lifeskill* hidup di daerah bencana). **Ikon** dalam aplikasi dirancang dalam tata letak *grid* 4X3 yang teranimasi serta penunjuk berupa tangan yang berasosiasi dengan aktifitas mengambil dan mengumpulkan. **Permainan** pengguna diharuskan mengisi tas siaga sesuai item yang diminta dan kapasitas tas berbeda.

Tilly Smith ini dikisahkan sebagai pembelajar dengan pengetahuan yang menetap dan diperkuat oleh pengalaman yang nyata. Beberapa waktu kemudian, berkat jasanya, hotel dan area tempat Tilly Smith dan keluarganya menginap dilaporkan tidak ada korban jiwa saat tsunami menghantam Phuket. Kisah Tilly Smith dapat dikatakan sebagai suatu pengalaman yang kaya. Pengalaman tersebut menjadi sangat bermakna ketika indera terlibat dalam proses pembelajaran.

Anak merupakan kelompok paling rentan terkena dampak bencana dalam struktur masyarakat kita. Selain itu, proses pembelajaran tentang bencana juga akan lebih efektif ketika dimulai di masa kanak-kanak. Itu sebabnya mengapa perancangan media untuk edukasi bencana bagi anak penting pula untuk dibahas. Berikut merupakan beberapa tinjauan media untuk anak dari aspek visual dan konten:

Dalam tinjauan psikoanalisis dan budaya visual, media edukasi mitigasi bencana juga dapat dianalisis melalui model yang sesuai dengan struktur budaya terkait yang membentuk sistem keyakinan masyarakat setempat, baik yang nampak di permukaan maupun yang tersembunyi di dalam. Namun demikian, hal ini tidak terlalu mudah dilakukan ketika perancangan pesan dalam media tersebut bersifat generik.

Tabel 3.
Tinjauan media komik sains serial

Media	Variabel Desain	Konten
Komik Max Axiom (Agniezka Biskup, Chyntia Martin dan Bill Anderson Komik sains serial (*Graphic Science*)	**Komposisi** menggunakan kaidah komposisi dalam panel komik dengan penekanan pada beberapa panel yang diperbesar dengan teknik *establishment shot.* **Warna** menggunakan teknik pewarnaan digital dengan warna-warna yang kontras, cahaya dengan intensitas tertinggi dan bayangan nampak saling menguatkan bentuk. **Tipografi** teks mendukung narasi cerita dengan balon dialog dan narasi sesuai kepadatan cerita **Ilustrasi** menggunakan gaya gambar komik Amerika pada umumnya dengan *outline* tebal dan pewarnaan yang didramatisasi sesuai tuntutan naskah, banyak pula digambarkan lanskap dengan pewarnaan yang dramatis.	**Desain karakter** utama adalah seorang ilmuwan yang memiliki kekuatan super, digambarkan dalam proporsi yang heroik khas karakter komik *super hero* Amerika. Toko ini yang menjelaskan proses-proses alami dari suatu bencana dengan bahasa yang sederhana dan mengambil contoh di sekeliling target pembaca (anak-anak usia madya). **Naskah** dirancang berdasar pengalaman karakter utama sebagai ilmuwan yang mendeskripsikan setiap fenomena alam. **Diagram proses** ditampilkan dalam beberapa panel untuk memudahkan pembaca memahami pesan, seperti diagram lapisan bumi atau proses terjadinya suatu bencana.

Berbeda dengan persuasi pada iklan komersial, persuasi dalam kebencanaan merupakan kondisi kritis terkait kehidupan, kematian, dan kesadaran ruang hidup. Memahami bagaimana sebuah ideologi visual yang terkait dengan kebencanaan membantu menentukan pendekatan yang lebih kritis tentang edukasi bencana yang sesuai pada suatu kultur tertentu. Hasil tinjauan dari media informasi dan edukasi mitigasi bencana diambil secara acak. Objek kajian merupakan media yang dikembangkan badan pemerintah maupun lembaga masyarakat terkait kebencanaan di Indonesia. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia sehingga kelompok yang diharapkan mengonsumsi informasi dan edukasi mitigasi bencana itu adalah masyarakat yang berbahasa Indonesia.

Sebagai pembanding, beberapa sampel merupakan media edukasi mitigasi bencana dari luar Indonesia yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Peristiwa dan fenomena alam dalam serial tersebut tidak selalu mengacu pada yang terjadi di negara dengan ciri geografis seperti Indonesia. Sampel juga diambil dari kanal *youtube* terkait edukasi mitigasi bencana anak milik organisasi di luar Indonesia dan disebarluaskan dalam Bahasa Inggris.

Tabel 4.
Tinjauan media animasi berbasis web

Media	Variabel Desain	Konten
Animasi **oleh FEMA USA** Animasi Siaga Bencana 2D di akun *Youtube* FEMA USA	**Komposisi** menggunakan kaidah komposisi dalam animasi yang mengacu pada sinematografi di mana layar sebagai ruang ungkap. Umumnya objek diberi penekanan seperti lampu sorot atau penekanan pada gerak tertentu, serta permainan *longshot-close up.* **Warna** menggunakan palet warna biru sebagai warna dominan hampir disetiap seri juga sebagai warna identitas kampanye ini. Warna lain hadir sebagai aksen pada tampilan keseluruhan. **Tipografi** teks digunakan pada judul (semua judulnya terkait gejala akan terjadinya suatu bencana alam) dan digunakan pula untuk menekankan suatu informasi (misal: *hotline* bantuan). **Ilustrasi** menggunakan gaya gambar vektor dengan penggambaran objek yang disederhanakan, minimalis tetapi informatif. **Kode bunyi** narator membacakan naskah dan penekanan efek suara (alam/buatan *foley*) pada bagian tertentu.	**Desain karakter** yang disederhanakan (kepala, badan, tangan dan kaki) dengan gestur yang mudah dipahami juga memiliki gaya khas di setiap seri yang muncul. Detil pada wajah dan tangan dihilangkan sehingga dapat menjadi representasi siapapun. **Pesan Verbal** ditampilkan sebagai gejala-gejala yang ditunjukkan oleh alam sebelum terjadinya suatu bencana, apa yang harus disiapkan, apa tindakan yang perlu diprioritaskan dan bagaimana cara meminta bantuan.

Beberapa media dapat efektif untuk anak tertentu, namun tidak untuk anak lainnya. Dalam psikologi, membangun suatu media belajar dapat dilakukan dengan memperhatikan tahapan perkembangan kognisi anak. Bagaimana anak bisa menangkap stimulus, memaknainya dengan baik, lalu mengarahkan tindakannya dengan cara yang sesuai dengan yang ia pelajari, tidak terlepas dari kesiapan berpikir si anak.

Piaget (1983; dalam Lefa, 2014) menjelaskan sebuah istilah bernama skema (*schemas*). Skema merupakan peta motor indera yang dibuat oleh anak tentang dunia mereka untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Secara bertahap, jika anak mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan pikiran di luar dirinya maka anak akan mulai mengembangkan pemikiran logis yang diikuti dengan melakukan apa yang dipikirkan. Skema pada anak dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi. Sebuah skema menggambarkan tindakan mental dan fisik yang terlibat dalam memahami dan mengetahui. Skema inilah yang akan membantu anak untuk menafsirkan dan memahami dunia. Dalam pandangan Piaget, suatu skema mencakup kategori pengetahuan dan proses untuk memperoleh pengetahuan itu. Ketika pengalaman terjadi maka informasi baru digunakan untuk memodifikasi, menambah, atau mengubah informasi atau skema yang ada sebelumnya (Lefa, 2014).

Komunikasi tentang Kebencanaan

Dalam masyarakat tradisional, semisal di Jawa, ada beberapa cara yang dikembangkan untuk menjadi bagian dari mitigasi dalam konteks kultural dalam mengomunikasikan kebencanaan. Beberapa yang masih dilestarikan hingga saat ini seperti *kentongan titir.* Hal tersebut menunjukkan telah ada upaya pada masyarakat tersebut untuk melangsungkan komunikasi dengan berbagai derajat kedaruratannya untuk memberi peringatan pada lingkungannya.

Tentu saja tidak semua metode tersebut relevan dan efektif di kehidupan masyarakat saat ini. (Indah, 2009). Kentongan belum bisa menjangkau dan menarik perhatian masyarakat dalam skala yang luas.

Namun demikian, kemudahan teknologi informasi kebencanaan yang ada belum sepenuhnya diakusisi. Beberapa aplikasi kebencanaan yang tersedia dan dapat berfungsi sebagai *early warning system,* pada kenyataannya belum terpasang di setiap perangkat telepon cerdas masyarakat kita. Info BMKG, yang merupakan media aplikasi informasi cuaca dan geospasial yang juga sekaligus informasi terkait kebencanaan, hanya memiliki 1 juta penginstal. Bandingkan dengan penginstal aplikasi permainan atau transportasi daring yang jumlahnya 50 kali lipat. Hal ini sekiranya menggambarkan bahwa budaya keselamatan dan

kebutuhan masyarakat untuk memperoleh peringatan dini terkait bencana masih belum memadai, apalagi jika dikaitkan kerentanan terhadap potensi bencana sebagai negeri cincin api.

Komunikasi tradisional sebagaimana digambarkan sebelumnya memang masih terkesan tergantung pada kultur tertentu. Ia bahkan menjadi pembelajaran perlunya memikirkan pendekatan kultural yang efektif untuk mengkomunikasikan bencana. Hal ini mendorong perlunya memikirkan cara yang efektif dan serentak di tempat-tempat yang lain untuk mengintegrasikan pemahaman masyarakat tentang bencana (Lakoro, Sachari, Waspodo, 2019).

Dalam observasi penulis ke beberapa museum kebencanaan, ditemui fakta menarik tentang konsep isi museum yang berbeda. Pemahaman tentang bencana dikomunikasikan melalui pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu melalui media audiovisual. Museum sebagai pusat pengetahuan, edukasi, konservasi, dan penyebarluasan informasi dapat dikemas tidak hanya dengan pendekatan kognitif, tetapi juga dapat diatur sehingga membawa pengunjungpada memori kolektif yang memberi imbauan emosional yang kuat.

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial Museum memberi inspirasi tentang bagaimana teknologi media dan konten yang baik dapat menghantarkan suatu informasi secara emosional dan reflektif pada pengunjungnya. Meskipun museum juga menyajikan konten-konten tentang pengetahuan tradisional terkait bencana, tetapi sifatnya lebih sebagai wawasan yang sekaligus memelihara kearifan lokal.

Sementara Kobe memiliki *The Great Hanshin Awaji Earthquake Memorial Museum*. Gempa besar Hanshin-Awaji pada tahun 1995 yang berskala 7,3 SR di kedalaman 16 km melumpuhkan Kobe di Prefektur Hyogo kala itu (WHO, 2013). Sebagai pengingat kejadian tersebut maka dibangunlah museum ini untuk mengenang sekaligus mendidik generasi berikutnya. Berbeda dari konten museum yang umumnya cenderung mengedepankan aspek kognitif, museum ini menyampaikan pesan bencana menggunakan pandangan orang pertama. Penonton diarahkan untuk terlibat dengan pengalaman pencerita ketika gempa bumi melanda Kobe di tahun 1995. Narator perempuan yang menceritakan kisah itu membawa penonton ke memori yang emosional ketika gempa bumi Hanshin-Awaji terjadi. Museum itu menggambarkan kedahsyatan gempa melalui teknologi pemetaan video (*video mapping*) dan efek pencahayaan. Diorama dibuat di antara dua bioskop yang menjalankan konten dan sudut pandang berbeda tentang apa yang terjadi di beberapa sudut kota Kobe saat itu. Penonton juga akan digiring memasuki ruangan dengan film monolog tentang kepanikan seorang gadis yang kehilangan saudara perempuannya disaat menghadapi hantaman gempa. Konten museum tersebut juga menggambarkan

proses pemulihan dan bagaimana ketahanan masyarakat terhadap bencana. Museum ini menggunakan media dalam pendekatan yang berbeda. Media tersebut mengantarkan pengunjung untuk membaca dan memvisualisasikan kejadian secara interaktif sehingga mendorong pengunjung untuk menggali lebih banyak informasi (Disaster Reduction and Human Renovation institution, 2017)

Di Indonesia, Museum Gunung Merapi misalnya, dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan tentang vulkanologi. Museum tersebut dapat dijadikan medium untuk penyebarluasan informasi kegunungapian dan kebencanaan geologi lainnya yang rekreatif dan edukatif untuk masyarakat luas dengan tujuan memberikan wawasan dan pemahaman tentang aspek ilmiah, maupun sosial-budaya. Museum Gunung Merapi berpotensi menjadi pusat layanan informasi kegunungapian dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ia dapat difungsikan sebagai media untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat tentang manfaat dan ancaman bahaya letusan vulkanik serta bencana geologi lainnya. Konsep dan desain alat pendidikan dalam museum tersebbut ditujukan untuk menyampaikan konten melalui media yang membangun pengetahuan. Di saat yang sama, ia menyajikan informasi yang bersifat artefaktual, di mana beberapa koleksi museum yang diambil dari situs kebencanaan memiliki aspek historis terkait waktu dan tempat tertentu. Ia mencerminkan kandungan budaya, sistem kepercayaan, dan mitos pada masyarakat. Bisa dikatakan strategi penuturan dalam museum ini mengakomodasi aspek-aspek ilmiah dalam kebencanaan gunung api tetapi juga tidak mengabaikan kepercayaan tradisional masyarakat seputar peristiwa erupsi. Perlu digarisbawahi bahwa kita bisa berkaca pada museum kebencanaan yang tidak sekadar berisi informasi pengetahuan, tetapi juga mampu membangkitkan kesadaran akan kebencanaan dan konservasi alam.

Faktor Budaya dalam Mengeratkan Masyarakat Menghadapi Bencana

Faktor budaya harus diperhatikan untuk membuat strategi manajemen, pembelajaran, penanganan, dan komunikasi risiko bencana. Pada wilayah rentan bencana, masyarakat telah bertahun-tahun melakukan hal yang sama ketika merespon lingkungan dan menyesuaikan perubahan baik menggunakan pengetahuan modern maupun lokal (Agrawal, 1995). Seringkali pengetahuan lokal ini kurang diperhatikan dalam aktivitas pengurangan risiko bencana maupun penanganan bencana setelah terjadi.

Tidak dapat dipungkiri, cara-cara tradisional berbasis kultural yang selama ini dilakukan masyarakat tidak selalu berhasil dengan baik. Namun,

mereka lagi-lagi dipulihkan secara kultural dengan keyakinan-keyakinan yang dibangun atas dasar pemahaman tentang bencana, seperti menganggap bencana adalah hal biasa dan tidak perlu disikapi dengan relokasi atau cara-cara lain yang direkomendasikan pemerintah. Integrasi antara pengetahuan lokal dan modern selalu menjadi tantangan. Masing-masing memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Dengan mengidentifikasi kekuatan dari pengetahuan tersebut maka integrasi dari keduanya diharapkan akan memperkuat masyarakat dalam mempersiapkan upaya mitigasi menghadapi ancaman bencana (Maarif, Rudy, Rilus, & Euis, 2012).

Dalam kasus Gunung Merapi, *local coping mechanism* terhadap kondisi alam, termasuk bencana meletusnya gunung tersebut, telah berlangsung selama bertahun-tahun di kalangan masyarakat Jawa yang berada di sekitarnya (Singgih, 2006 dalam Maarif, Rudy, Rilus, & Euis, 2012). Penduduk lereng Merapi memahami dan merespon aktivitas Merapi dengan keyakinan kultural yang ada. Masyarakat menyebutnya sebagai 'Mbah Merapi' yang dipandang menampakan dua sisi kontradiktif. Pada satu sisi dimaknai sebagai ancaman yang mematikan atau meminta korban, di sisi lain dipandang memberikan kesuburan dan kehidupan bagi manusia di sekitarnya. Letusan gunung Merapi pada tahun 1994 mendorong terjadinya revitalisasi terhadap pengaruh kepercayaan mistik tersebut dan mendorong pemerintah untuk melakukan upaya pemindahan penduduk ke tempat yang lebih aman. Namun, upaya pemerintah tersebut tidaklah mudah diterima masyarakat yang memandang letusan gunung Merapi bukanlah bencana, namun sebagai peringatan yang diyakini harus ditindaklanjuti oleh sikap dan perilaku yang lebih baik di masa mendatang. Kegiatan rutin gunung berapi ini telah benar-benar terintegrasi dalam kehidupan sehari-haridan telah menjadi bagian informal bagi rakyat yang tinggal disitu (Maarifdkk., 2012).

Gunung Merapi telah dipersonifikasikan sebagai "Mbah Merapi". Mbah berarti kakek atau nenek, milik dunia manusia. Hal ini menunjukkan bahwa gunung berapi dianggap sebagai milik umum yang dihormati oleh semua penduduk desa daripada sebagai sumber bencana. Istilah Jawa *wedhus gembel* (aliran piroklastik) dianggap sebagai kurang sopan bagi sebagian orang. Mereka memperbaikinya dengan mengatakan bahwa Merapi sedang *buang hajat* (membuang kotoran). Di lereng Gunung Merapi, masyarakat lokal menaruh kepercayaan mereka pada tokoh informal yang menjadi juru kunci lokal. Juru kunci merapi pada saat letusan 2006 adalah Mbah Marijan. Saat letusan Merapi di tahun 2006, Mbah Marijan menolak untuk mengungsi meski ia mendukung evakuasi untuk orang lain. Ia berhubungan dengan roh leluhur sembilan (*pepundhen*) setelah 3 hari meditasi untuk meminta agar gunung Merapi membatasi tingkat kerusakan. Juru kunci ini hampir 80 tahun terus menerus

menerima pengunjung yang mencari informasi tentang gunung di rumahnya yang berada di dusun Kinahrejo, desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan (Maarif dkk., 2012).

Penerapan nilai-nilai lokal/kultur ikut bekerja pada tahap pemulihan. Pemulihan kehidupan masyarakat di desa lereng Merapi berlangsung cepat karena didorong oleh falsafah Jawa: (1) *Nrima Ing Pandum*, yang berarti dalam hidup manusia segala sesuatunya sudah digariskan oleh Tuhan. Meskipun mengalami bencana, namun kondisi mereka masih baik selama masih diberi kesempatan hidup. Bencana merupakan bagian dari hidup; (2) *Mangan ora mangan sing penting ngumpul*. Pepatah ini mencerminkan rasa gotong royong. Pada mereka yang terkena bencana, mereka tetap saling menjaga dan berkumpul saling bantu membantu; (3) Hidup tidak boleh larut dalam kesedihan; (4) Masyarakat sudah terikat dengan gunung, dan karena keterikatannya itu maka mereka tidak takut (Maarif dkk, 2012). Hal ini menjadi bukti bahwa pengetahuan lokal bisa memberikan dampak positif dalam konteks kebencanaan.

Pendidikan Kebencanaan dan Manajemen Integrasi Bangsa

Menelaah karakteristik masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana dan upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengurangi risiko dampak negatif dari bencana yang sudah dilakukan pemerintah, penting kiranya membuat langkah strategis yang lebih terintegrasi tentang pendidikan kebencanaan. Jika Pendidikan menyasar pada kelompok sasaran yang beragam maka titik tolaknya adalah pada pendidikan bagi anak usia dini dalam memahami isu-isu kebencanaan agar ia menjadi orang dewasa yang lebih siap dengan risiko tersebut. Meskipun Indonesia memiliki kultur yang berbeda-beda, namun diperlukan sebuah langkah integratif yang dapat diberlakukan di seluruh wilayah agar masyarakat mendapatkan porsi pendidikan yang sama, meskipun secara teknis dan operasional nanti akan sangat menyesuaikan dengan kulturnya masing-masing. Hal-hal berikut merupakan upaya integrasi yang bisa dilakukan:

1. **Pembuatan kurikulum nasional kebencanaan**

Perlu dipikirkan kurikulum kebencanaan secara nasional untuk menanamkan konsep bahwa meskipun bumi memiliki kemampuan memperbaiki diri, namun bila dieksploitasi dan dicemari secara masif dan terus menerus maka kapasitas tersebut menjadi tidak valid lagi. Apa yang selama ini digaungkan oleh BNPB "Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita" dalam kampanye literasi kebencanaan sudah sesuai. Pesan tersebut perlu dirancang menjadi pesan yang menjembatani konsep abstrak menjadi lebih konkret kepada masyarakat luas. Kurikulum

kebencanaan dapat dibuat di seluruh tingkatan sekolah/pendidikan. Pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, upaya meminimalisasi efek bahaya bencana menjadi informasi yang penting untuk masyarakat. Kurikulum kebencanaan secara nasional pada pelaksanaannya dapat memuat konten-konten kearifan budaya lokal untuk lebih mudah dipahami oleh masyarakat dengan kultur tertentu.

2. **Perencanaan edukasi bencana spesifik tempat**

Diperlukan suatu perencanaan desain komunikasi yang terkait kebencanaan mengingat bencana datang secara tak terduga dan memerlukan respon cepat. Desain edukasi bencana yang bersifat geladi (simulasi) mampu mendekatkan komunikator dengan masyarakat yang sedang dilatih. Selain itu pesannya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal. Dalam jumlah yang masif, diperlukan media sebagai sarana mengedukasi secara luas dan serempak. Pesan-pesan kebencanaan yang terkait gejala dan respon yang sebaiknya diberikan memang ada di tataran kognitif masyarakat. Akan tetapi, perlu pula dibangun kemandirian untuk menyadari ruang hidup di wilayah rawan bencana dengan belajar pada kejadian-kejadian bencana sebelumnya. Karakter tempat dan jenis bencana yang dihadapi tentu memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda-beda pula.

3. **Membangun mental masyarakat tangguh bencana**

Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas masyarakat di seluruh wilayah akan membangun sikap proaktif masyarakat untuk lebih sadar akan bencana. Lebih jauh, masyarakat akan mengerti bagaimana melakukan langkah preventif, meminimalisasi risiko (mitigasi), melakukan pemulihan jika mereka mengalami bencana secara langsung. Selain badan-badan yang dibentuk pemerintah, banyak pula kelompok relawan yang bekerja sepanjang tahun mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk lebih waspada pada kemungkinan bencana. Kelompok semacam ini seringkali bekerja atas inisiatif sendiri. Model dari kelompok semacam ini seharusnya bisa diadaptasi dan direplikasi untuk masyarakat luas. Berkaca dari penanganan bencana di Jepang, setiap sekolah selalu menempatkan penanggungjawab (biasanya seorang guru) yang mewajibkan muridnya absen bila terjadi kejadian bencana di jam sekolah. Jejaring informasi ini menjadi prosedur baku tentang pihak yang harus dihubungi ketika menghadapi kondisi darurat. Informasi tentang penyelamatan diri yang dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum juga dilakukan geladi (simulasi) secara reguler. Hal ini termasuk bagaimana menangani bencana skala kecil di sekelilingnya, seperti penggunaan

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada anak-anak usia SD-SMP. Salah satu model yang dikembangkan Jepang setelah peristiwa gempa Kobe adalah *Sendai Framework* (Assembly, 2015) yang menjadi kerangka kerja penanganan bencana — baik sebelum, saat, dan sesudahnya — yang diadaptasi seluruh dunia melalui UNISDR (*United Nation Office for Disaster Risk Reduction*).

4. **Meningkatkan peran media sosial dalam mengintegrasikan informasi bencana**

Bentang wilayah yang dilalui oleh *ring of fire* mencakup budaya yang beragam di Nusantara, termasuk budaya yang terkait dengan sikap dalam menghadapi bencana. Media edukasi mitigasi bencana harus bisa menjangkau kelompok sosial seluas mungkin. Manajemen bencana memiliki siklus yang dapat digambarkan sebagai tahapan prabencana, saat bencana dan sesudah bencana. Carter(2008) membagi tahapan-tahapan tersebut dalam siklus kesiapsiagaan, bencana, tanggap darurat, pemulihan, pembangunan, pencegahan dan mitigasi. Tahap pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan termasuk dalam tahapan prabencana (*pre-disaster*). Tahap tanggap darurat, pemulihan, pembangunan termasuk dalam tahapan pascabencana (*post-disaster*).



Gambar 3. Siklus Manajemen Bencana (diadaptasi dari Carter, 2008)

Edukasi bencana yang berada di tahap prabencana mengajarkan tahap kesiapsiagaan yang berkaitan dengan kondisi saat indikator-indikator terjadinya bencana teramati. Dalam hal ini, pemerintah melalui badan yang ditunjuk seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyediakan seperangkat informasi yang terpercaya dan layak diacu oleh seluruh lapisan masyarakat terkait perubahan cuaca, indikator kebencanaan, dan peringatan dini pada bahaya bencana alam. Ini berarti peran untuk menjadi penyedia informasi iklim dan klimatologi telah terpenuhi. Perlu upaya terus menerus menanamkan pengetahuan dan informasi yang benar pada masyarakat sehingga pengetahuan tersebut dapat menetap dalam kognisi dan termanifestasikan dalam perilaku.

Peran media sosial menjadi penting karena ia dapat menyediakan informasi manajemen bencana di Indonesia secara lebih terintegrasi. Sejauh ini, elemen-elemen pemerintah dan masyarakat peduli bencana memberikan informasi tentang potensi dan risiko bencana melalui web resmi atau media sosial yang sangat dekat dengan berbagai kalangan masyarakat. Mauroner & Heudorfer (2016) menjelaskan bahwa teknologi komunikasi seperti media sosial menjadi semakin signifikan untuk menginformasikan hal-hal terkait dengan siklus manajemen bencana. Bahkan menurut Velev & Zlateva, (2012), layanan jejaring sosial daring dan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Google+*, dan lain-lain dapat berperan dalam menyelesaikan banyak masalah selama bencana alam. Pada keadaan bencana semua komunikasi konvensionalumumnya berhenti berfungsi pada interval waktu tertentu, sementara media sosial atau layanan jaringan tetap aktif. Jejaring sosial secara daring memungkinkan pembentukan hubungan global yang terkait dengan domain atau dapat didasarkan beberapa kebutuhan yang diperlukan korban. Namun demikian, tantangannya adalah bagaimana pemberi informasi dapat memberikan pemberitaan yang jelas, baik dan mudah dipahami oleh masyarakat dengan berbagai kondisi dan keterbatasannya masing-masing.

Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi melalui media sosial dengan baik, cerdas dan bijak dalam mengkonsumsi informasi dari media sosial, sehingga tidak mudah terpengaruh pemberitaan yang sifatnya *hoax* yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat saat terjadi bencana.

5. **Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat terkait dengan bencana**

Bagaimanapun perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan atau antisipasi bencana baik itu di tempat yang pernah terjadi bencana atau yang diprediksikan akan terjadi bencana. Upaya yang besar dilakukan oleh Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membangun kewaspadaan pada masyarakat di selatan pulau Jawa. Dengan cakupan area yang luas dan keterbatasan sumberdaya manusia, pemerintah perlu merancang sistem edukasi yang lebih efisien. Lebih jauh, diperlukan pertimbangan kebijaksanaan lokal apabila proses edukasi tersebut harus berhadapan atau berbenturan dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat setempat. Pada titik ini, semua upaya dan peran perlu diintegrasikan dan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Kita beruntung karena memiliki banyak elemen masyarakat yang menjadi relawan kebencanaan yang turun melakukan edukasi saat bencana masih menjadi potensi. Sejauh ini, tampaknya elemen masyarakat masih terkesan bekerja secara sporadis dan kurang terintegrasi antar organisasinya. Pemerintah melalu BNPB merespon bencana sejauh yang diamanatkan Undang-undang No.24/2007 (Republik Indonesia, 2007) tetapi peran serta masyarakat secara mandiri dalam merespon bencana akan sangat vital. Pembagian peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang baik perlu dikoordinasikan sehingga setiap lembaga bisa merespon bencana secara dinamis.

6. **Menanamkan nilai-nilai positif sebagai bangsa yang plural/multikultural**

Mengaktifkan peran serta masyarakat tanpa melihat perbedaan latar belakang. Sebagai sebuah bangsa yang besar, tentu kita tidak lahir dari masyarakat yang tidak bisa menerima perbedaan. Nilai-nilai positif yang menjadi karakter bangsa kita seperti kebersamaan, gotong royong, tolong menolong, tepa salira, loyalitas, dan lain-lain merupakan pondasi kita untuk bersama-sama melalui potensi dan risiko bencana alam ini dengan baik. Dalam memberikan pendidikan kebencanaan, kita perlu membiasakan nilai-nilai luhur tersebut melebur dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada anak-anak atau generasi muda yang saat ini lebih banyak menunjukkan nilai-nilai individualistik sebagai referensi hidupnya.

Daftar Acuan

Agrawal, A. (1995). Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge. *Development and Change*, *26*(3), 413–439.

Assembly, U. N. G. (2015). The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. *Resolution A/Res/69/283.*

BNPB, P. (2019). *Trend Bencana 2013-2017.* Diambil 23 Januari 2019, dari https://bnpb.go.id/trend-bencana-2013-2017

Carter, W. N. (2008). *Disaster Management* (2nd ed.). Mandaluyong City: Asian Development Bank.

Dale, E. (1946). *Audio-Visual Methods in Teaching*. New York: Dryden Press.

Disaster Reduction and Human Renovation institution. (2017). Floor map. https://doi.org/10.23919/vlsit.2017.7998129

Ehrenreich, J. H. (2001). *Coping with disasters - A Guidebook to Psychosocial Intervention* (Revised Ed, Vol. 11568). Diambil dari www.mhwwb.org

Fiske, J. (2004). *Cultural and Communication Studies*. Bandung: Jalasutra.

Indah, L. K. (2009). Evaluasi Sistem Mitigasi Penanganan Bencana Gempabumi Di Kecamatan Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Civil Engineering Forum Teknik Sipil*, *18*(3), 959–971.

Karokaro, A. (2014). *Kearifan lokal selamatkan warga Simeulue dari amukan tsunami (bagian 1).* Diambil 20 Desember 2014, dari www.mongabay.co.id/2014/12/20/kearifan-lokal-selamatkan-warga-simeulue-dari-amukan-tsunami-bagian-1/

Khoirul M, A. (2019). *Berkat Pelajaran Geografi, Gadis 10 Tahun Ini Selamatkan 100 Nyawa Lebih dari Tsunami.* Diambil 28 Juli 2019, dari https://intisari.grid.id/read/031672077/berkat-pelajaran-geografi-gadis-10-tahun-ini-selamatkan-100-nyawa-lebih-dari-tsunami?page=all

Lakoro, R. (2011). Icon Recognition for Graphical User Interface of Disaster Life Skill Game through Pattern Recognition with Fault Tolerance. *International Conference of Revisited Asian Society*. Yogyakarta.

Lakoro, R., Sachari, A., Waspodo, A. E. B., & Sabana, S. (2019). Eksplorasi Media Sebagai Edukasi Kesadaran Ruang Hidup di Daerah Bencana. *Jurnal Idea*, *18*(1), 6–10. Diambil dari http://iptek.its.ac.id/index.php/idea/article/view/5082

Lefa, B. (2014). The Piaget Theory of Cognitive Development: An Educational Implications. *Educational Psychology*, *1*(9), 1–9. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/252532772_Constructing_a_theory_of_learner_autonomy_Some_steps_along_the_way

Lunenfeld, P. (2003). The Design Cluster. Dalam B. Laurel (Ed.), *Design Research, Methods and Perspective*. Massachusetts: The MIT Press.

Maarif, S., Rudy, P., Rilus, A. K., & Euis, S. (2012). Kontestasi Pengetahuan dan Pemaknaan tentang Ancaman Bencana Alam. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, *3*(1), 1–13.

Mauroner, O., & Heudorfer, A. (2016). Social media in disaster management: How social media impact the work of volunteer groups and aid organisations in disaster preparation and response. *International Journal of Emergency Management*, *12*(2), 196. DOI: 10.1504/ijem.2016.076625

Mirzamani, S. M., & Mohammadi, M. R. (2012). Psychological Aspects of Disaster. *American Journal of Public Health and the Nation's Health*, (May). DOI: 10.2105/AJPH.54.4.638

Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. Diundangkan pada 10 Maret 2007 (2007).

Velev, D., & Zlateva, P. (2012). *Use of Social Media in Natural Disaster Management.* Diambil dari International Proceedings of Economics Development and Research https://www.researchgate.net/publication/271585520_Use_of_Social_Media_in_Natural_Disaster_Management

Westera, W. (2015). Reframing the Role of Educational Media Technologies. *Quarterly Review of Distance Education*, *16*(2), 19–32.

WHO. (2013). *Technical Report Older Persons in Emergency Situations : A case study of the Great Hanshin-Awaji Earthquake*. Diambil dari https://www.recoveryplatform.org/outfile.php?id=736&href=https://www.recoveryplatform.org/assets/publication/1.3_hyogo.pdf

----

Lakoro, Rahmatsyam. & Herdiana, Ike. *Learning to live from people in the zone of ring of fire: A look into the education, communication and cultural media.* *Indonesia many experiences many earthquake and tsunami. Disaster education and disaster risk reduction are necessary for Indonesians. Education and mitigation in the context of disasters must be well integrated. The purpose of this article is to describe the important elements that must be considered to create disaster education media and to relate its association with the management of national integration. Examining existing educational media, communication and cultural aspects are the important elements in designing disaster education media in Indonesia. Some integrative steps that can be implemented for all communities to receive comprehensive education are: (1) national disaster curriculum development; (2) site-specific disaster education planning; (3) building mental disaster resilient communities; (4) increasing the role of social media in integrating disaster information; (5) increasing the participation of all elements of society related to disasters; and (6) continue to instill positive values as a plural/multicultural nation.*

Ruang Kelas dan Integrasi Bangsa

Gita Widya Laksmini Soerjoatmodjo

SEMUA individu, termasuk kita semua, menjadi anggota kelompok tertentu. Contohnya, saya adalah anggota kelompok perempuan, kelompok usia paruh baya, kelompok warga Bintaro, kelompok penglaju menggunakan sepeda, kelompok penggemar *heavy metal* dan kelompok-kelompok lainnya. Ketika saya mengategorikan diri sebagai perempuan, maka saya dan sesama rekan yang beridentitas gender sama yakni perempuan masuk dalam satu kelompok. Dengan demikian, kawan-kawan saya yang laki-laki otomatis menjadi kelompok 'yang lain.' Dengan berpegang pada kategorisasi itu, maka semua perempuan masuk ke dalam *in-group* bersama saya, mereka yang beratribut gender selain perempuan masuk dalam golongan *out-group.* Sebelum melangkah lebih lanjut, untuk menyegarkan ingatan tentang definisi *in-group* dan *out-group*, berikut uraian Matsumoto dan Juang (2008). *In-group* atau "kelompok-kita" memiliki karakteristik adanya sejarah yang dialami bersama serta masa depan yang diantisipasi juga secara bersama-sama, sehingga hal-hal tersebut memunculkan rasa kedekatan, keakraban dan saling percaya. *Out-group* atau "kelompok-yang-lain" tak punya semua karakteristik tersebut, oleh karenanya kelompok ini menjadi sarat dengan ambiguitas dan ketidakpastian. Kembali ke contoh sebelumnya, di satu kesempatan, kategori gender berlaku. Di lain waktu, boleh jadi kategori lainlah diterapkan. Kali ini bukan gender, tetapi kelompok usia, tepatnya usia paruh baya. Maka komposisi anggota dalam *in-group* saya menjadi ikut berubah. Mereka yang bergender lain, yang tadinya *out-group*, kini ikut masuk sekelompok *in-group* dengan saya. Laki-laki, perempuan, transgender, interseks dan lain-lain menjadi sesama rekan sekelompok dengan penentu adalah faktor U alias usia. Jika kategori kemudian diganti sebagai penggemar *heavy metal*, maka anggota-anggotanya pun berubah variasinya.

Apa arti uraian di atas? Kadang-kadang saya jadi *in-group* di kelompok yang satu, kadang-kadang saya jadi *out-group* di kelompok yang lain. Kadang-kadang antar kelompok pun bisa saling beririsan. Proses keluar-masuk kelompok sangatlah dinamis dan cair. Ketika seseorang memasang *Guns N Roses* lewat *speaker* desktop kantor, maka saya seketika bisa masuk ke sini bersama rekan-rekan lain. Ketika jam pulang kantor, saya masuk dalam kelompok penglaju pengguna sepeda. Mereka yang tadinya sama-sama menyanyikan *Sweet Child O'Mine* keras-keras di ruang kerja, terpisah-pisah menjadi kelompok pengguna

mobil, motor dan sepeda. Sesekali saya ada di luar kelompok, kali lain saya ada di dalam kelompok. Seperti status *Facebook*, status keanggotaan kelompok sosial seperti ini temporer belaka sifatnya. Akan tetapi sesuatu yang sealamiah uraian di atas berubah menjadi serba kaku, begitu rigid bahkan permanen. Status *out-group* di satu kelompok menjadi tak pernah berubah, bahkan tidak diperkenankan untuk berubah - baik oleh masyarakat maupun si individu tersebut. Kategorisasi pun berlaku sangat simplistis, dengan pengandaian akan identitas tunggal, yang dijelaskan Soerjoatmodjo (2019) sebagai ilusi bahwa satu individu memiliki satu identitas – tak hanya tunggal tetapi juga bahkan permanen. Seolah-olah saya hanya bisa mengemban satu atribut saja – yaitu, misalnya, perempuan. Kategori lain – seperti usia, domisili, hobi, makanan kegemaran dan lain sebagainya – menjadi kalah penting karena hanya satu atribut saja yang diakui.

Penanaman kategorisasi ini terjadi dalam keseharian. Tak jauh-jauh, semuanya tumbuh subur di ruang kelas, tepatnya di mata pelajaran Agama. Baidhawy (2007) menyoroti temuannya berdasarkan kajian yang ia lakukan sejak pemerintah Soeharto dimulai tahun 1966 yang ditandai dengan era Orde Baru. Harmoni, menurutnya, adalah artifisial belaka karena kondisi yang terjadi dalam keseharian di Indonesia tidak mencerminkan dinamika dialektik maupun kerjasama antar kelompok umat beragama. Dirinya menemukan bahwa benih-benih konflik antar kelompok justru ditanamkan di ruang kelas dalam mata pelajaran Agama. Hal ini karena di kelas-kelas tersebut, pandangan yang ditanamkan lebih bertumpu pada indoktrinasi dogmatis yang secara sistematis melemahkan rasa saling menghormati dan mengabaikan kontribusi kelompok minoritas Indonesia dalam budaya kita bersama.

Bukannya bertambah baik, potret masyarakat kita hari ini justru tetap bahkan semakin buram. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Endang Turmudi, menunjukkan temuan berikut. Terdapat 21 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila sudah tidak lagi relevan sebagai Dasar Negara bangsa Indonesia karena 84.8 persen siswa dan 76.2 persen guru lebih setuju dengan penerapan syariat Islam. Lebih ironis lagi bahwa 52.3 persen siswa setuju kekerasan untuk solidaritas agama dan 14.2 persen membenarkan aksi pemboman yang dilakukan kalangan radikal (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016).

Deutsche Welle (2017) menurunkan berita tentang penelitian yang dilakukan bersama-sama oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dirilis tahun 2017. Sebagai pendalaman dari survei Setara Institute for Democracy and Peace yang dilakukan sebelumnya di 2015, penelitian kali ini menunjukkan potret berikut: masih ada siswa maupun guru

yang menganggap Ketua OSIS seharusnya berasal dari kalangan beragama mayoritas, pemimpin harus yang seagama, memilih teman harus satu agama ataupun etnis, dan masih ada yang memilih tidak mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang beda agama.

***

Bagaimana uraian di atas dikaitkan dengan integrasi – isu yang diangkat sebagai tema sentral dalam publikasi bersama HIMPSI kali ini? Salah satu terminologi yang dikenal dalam Psikologi untuk memaknai integrasi adalah relasi antar kelompok (*intergroup relations*). Relasi seperti ini terjadi manakala individu yang menjadi anggota suatu kelompok berinteraksi baik secara kolektif atau individual dengan anggota kelompok lain dalam kaitannya dengan identifikasi kelompok (*group identification*) yang dimiliki. Tajfel (1982) pernah menyusun sebuah tulisan yang ia awali dengan kalimat berikut: *"Intergroup relations represent in their enormous scope one of the most difficult and complex knots of problems which we confront in our time."* Dengan kata lain, di antara sebegitu banyak simpul permasalahan yang kita sama-sama hadapi dalam hidup, salah satu yang paling sulit dan pelik ternyata adalah urusan yang satu ini - relasi antar kelompok, yang memiliki cakupan luar biasa luas.

Mengapa relasi antar kelompok disebut paling sulit dan pelik? Salah satunya karena kemungkinan terjadinya bias. Mari kembali sejenak ke soal *in-group* dan *out-group* yang sudah dibahas di atas. Dalam relasi antar kelompok, terdapat apa yang disebut *out-group homogeneity effect.* Brauer (2001) menjelaskan hal ini sebagai kecenderungan untuk memandang anggota dari *out-group* secara homogen dibandingkan dengan anggota *in-group*. Jadi manakala diminta untuk menyebutkan atribut positif maupun negatif, kita cenderung lebih condong berpihak pada *in-group*. Hal serupa berlaku juga apabila diminta mendistribusikan sumber daya, maupun mengindikasikan rasa suka pada kelompok tertentu – *in-group* cenderung kita menangkan dibandingkan *out-group*. Intinya, apapun urusannya, nyaris bisa dipastikan *in-group* kita pandang lebih superior dibandingkan dengan kelompok lain (Leyens et. al., 2001).

Satu bias ini saja sudah bisa membuat interaksi menjadi pelik. Katakanlah ada satu orang beratribut X dan bertugas untuk melayani kelompok X, Y maupun Z. Bias ini berpotensi membuat apapun yang ia lakukan menjadi berat sebelah – karena dianggap berpihak pada kelompok sendiri. Hal ini disebabkan, mengutip Ackerman (2006), sumber daya kognitif kita semua memang serba terbatas. Alhasil kita tidak akan sanggup mengingat seluruh informasi yang tersedia di lingkungan sosial. Keterbatasan inilah yang membuat

kita hanya cenderung memperhatikan orang-orang tertentu, dan salah satu bias kita adalah kecondongan kita memberikan penilaian yang lebih positif bagi sesama anggota *in-group*. Akibatnya semesta kita pun terkotak-kotakkan antara 'kita' dan 'mereka'.

Mengetahui hal ini, untuk konteks interaksi siswa di sekolah, Psikologi menyodorkan sebuah tawaran yang disebut dengan istilah kelas *jigsaw* (*jigsaw classroom*). Aronson, Wilson dan Akert (2010) menjelaskan bahwa di kelas semacam ini, pengalaman belajar mengajar dikelola sedemikian rupa di dalam kelompok-kelompok kecil, dimana setiap partisipan saling bergantung satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan bersama yang sama-sama dipandang penting secara konsensus. Proses belajar mengajar seperti ini membuat setiap anggota perlu melakukan kontak berulang-ulang kali dengan anggota lain.

Apakah semua bentuk kontak lantas sudah pasti efektif melenyapkan kotak-kotak *in-group* dan *out-group*? Ternyata tidak – Aronson, Wilson dan Akert (2010) menyodorkan kondisi-kondisi berikut sebagai prasyarat. Di dalam kelompok, haruslah terjadi rasa saling tergantung (*mutual interdependence*) dimana setiap orang punya kebutuhan untuk bergantung pada orang lain. Kontak yang terjadi juga bersifat personal dan informal serta dilakukan berulang kali. Relasi ini memiliki tujuan bersama yang dipandang penting oleh setiap anggota kelompok. Selain itu, semua anggota berada dalam posisi setara dan terdapat norma penerimaan dan toleransi yang ditegakkan. Hal ini yang disebut sebagai hipotesis kontak (*contact hypothesis*), yang oleh Brown (2010) disebut sebagai salah satu gagasan paling langgeng dan berhasil di sepanjang sejarah psikologi sosial.

Mengapa pengkotak-kotakkan *in-group/out-group* bisa disulap lenyap melalui kontak seperti ini? Sederhananya begini, kita semua punya gambar kecil yang kita bawa-bawa di dalam kepala. Psikologi mengenalnya sebagai stereotip, yaitu generalisasi yang kita lakukan untuk memahami kelompok lain – dimana sejumlah sifat kita lekatkan pada seluruh anggota kelompok tersebut tanpa memandang variasi antar individu. Kornblum dan Julian (2009) menjelaskan bahwa stereotip menjadi alat pembenaran melakukan penolakan atau penerimaan terhadap kelompok lain. Mengutip ke uraian sebelumnya, mekanisme ini memang timbul karena benak kita tak sanggup mempertimbangkan seluruh informasi yang ada di lingkungan sosial sehingga kita perlu untuk memilah dan memilih. Sayangnya, stereotip ini tak hanya berfungsi untuk menghemat tenaga. Acapkali stereotip ini menggelinding lebih lanjut menjadi prasangka (*prejudice*). Kelompok dan para anggotanya yang dilabel menggunakan stereotip kemudian dibubuhi lagi dengan sikap negatif bahkan sarat permusuhan (*hostile*) (Hogg & Vaughan, 2011).

Lalu bagaimana membongkar stereotip dan prasangka? Pemaparan fakta dan informasi saja tidak memadai, demikian Aronson, Wilson dan Akert (2010) berargumentasi. Bombardir data, angka maupun grafik tak akan membuahkan harapan. Salah satu sumber daya untuk berubah justru berada di tatanan emosi yakni melalui empati. Artinya, kemampuan kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Empati dapat dicapai dengan cara mengambil perspektif (*perspective-taking*) yaitu kemampuan mengadopsi sudut pandang orang lain, kemampuan berganti-ganti sudut pandang dari diri sendiri ke orang lain atau melangkah keluar melampaui 'cangkang' diri sendiri. Empati ini dapat dibangun melalui hipotesis kontak yang bisa diaplikasikan di sekolah. Dengan cara itu integrasi yang menjadi tema publikasi HIMPSI kali ini, akan dapat ditanamkan pada siswa di ruang-ruang kelas.

***

Inisiatif yang dipaparkan di bagian berikut ini menjelaskan bagaimana hipotesis kontak diterapkan dalam mata kuliah Agama yang menggunakan pengelolaan kelas *jigsaw*. Uraian ini ini dikutip dari penelitian yang dilakukan Soerjoatmodjo (2013) dan tulisan yang disajikan oleh Laksmini (2015). Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) berkolaborasi dengan *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) terkait pelaksanaan mata kuliah Agama melalui sebuah kemitraan. Perencanaan perkuliahan dilakukan secara bersama-sama dengan memperhatikan rambu-rambu pemerintah, arahan dari pimpinan universitas di UPJ dan pengalaman yang menjadi portofolio ICRP. Pada tahun 2012, untuk pertama kalinya perkuliahan Agama hasil kolaborasi ini dimulai. Mata kuliah 2 SKS ini diikuti 47 mahasiswa semester 3 dari 10 Program Studi yaitu Akuntansi, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Ilmu Komunikasi, Informatika, Manajemen, Psikologi, Sistem Informasi dan Teknik Sipil. Keseluruhan perkuliahan diampu oleh 3 fasilitator dari ICRP dan 3 dosen UPJ yang berfungsi sebagai asisten fasilitator. Perkuliahan diawali dengan pendekatan reflektif dimana mahasiswa menuliskan biodata. Di dalam biodata tersebut, mahasiswa diminta untuk menguraikan pengalaman masing-masing mengenai agama yang ia anut dan yang dianut oleh orang lain. Biodata ini kemudian mereka ungkapkan dalam diskusi kelompok. Selanjutnya adalah ekskursi – mahasiswa melakukan kunjungan ke berbagai rumah ibadah di Jakarta yaitu Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Gereja Immanuel, Gurdwara Sikh, Pura Aditya Jaya, Vihara Buddha Dharmacakka Jaya dan Vihara Konghucu Dharma Jaya Toasebio. Di sana mahasiswa berdiskusi dengan para pemuka agama yang menjadi tuan rumah. Setelah diskusi, mahasiswa mendapatkan kesempatan

waktu bebas untuk mengeksplorasi rumah ibadah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa boleh mengambil foto dari berbagai obyek yang mereka anggap menarik. Kunjungan ini mereka tuliskan dalam sebuah narasi yang dilengkapi ilustrasi foto, termasuk alasan mengapa mereka memilih obyek tersebut untuk mereka ulas. Setelah itu, mahasiswa mendapatkan serangkaian kuliah dari berbagai narasumber. Narasumber yang hadir antara lain dari perwakilan aliran kepercayaan seperti Kapribaden dan Sunda Wiwitan. Keseluruhan pengalaman ini dituangkan dalam bentuk tulisan opini. Di dalam opini ini, mahasiswa mengasah kemampuan menulis karya yang ditujukan untuk masyarakat luas dimana mereka menguraikan argumen dan memberikan rekomendasi untuk para pembaca. Terakhir, mahasiswa bekerja sama dalam kelompok yang heterogen – satu kelompok terdiri dari mahasiswa yang berasal dari program studi, gender maupun agama yang berbeda. Setiap kelompok mendapatkan tugas untuk membuat kampanye mempromosikan toleransi dalam berbagai bentuk, contohnya poster, kaos, iklan layanan masyarakat maupun film dokumenter – semuanya dipamerkan di selasar, perpustakaan sampai ruang rapat sebagai bagian dari pembentukan atmosfir akademik. Keseluruhan proses pembelajaran ini dihadirkan dalam Seminar Nasional Merajut Damai dengan Pendidikan Humanis yang dilangsungkan di Perpustakaan Nasional 12 Desember 2012. Seperti apakah hasil dari proses pembelajaran ini? Apakah proses pembelajaran seperti ini berdampak pada integrasi antar kelompok? Paparan berikut ini berisi hasil-hasil yang diperoleh dari inisiatif tersebut, sebagaimana dipetik dalam bentuk nukilan dari Bagasworo (2015), Laksmini (2015) serta Soerjoatmodjo (2013).

Bagasworo. Sebagai konteks, narasi Bagasworo (2015) merupakan bagian dari narasi pasca ekskursi yang ia kumpulkan sebagai bagian dari tugas, yang terpilih untuk dipublikasikan oleh ICRP melalui situs resmi organisasi. Sedikit catatan, Bagasworo (2015) menuliskan identitas agama sesuai yang ada di KTP yaitu Islam, tetapi ia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang agnostik. Menggunakan kata-katanya sendiri, Bagasworo (2015) menjelaskan dirinya sebagai berikut: “Saya tidak percaya dengan agama tetapi saya ingin percaya kepada Tuhan.” Bagasworo, lengkapnya Dimas Wahyu Bagasworo, adalah mahasiswa Program Studi Psikologi. Menanggapi pengalaman mengikuti mata kuliah Agama, berikut uraian dari Bagasworo (2015).

> *Di kelas, tidak ada perbedaan agama, tidak ada segregasi. Semuanya sama, mempelajari agama-agama yang berbeda tetapi*

mempunyai tujuan yang sama, to promote love and care. *Saya tidak keberatan dengan kelas yang dicampur, justru saya malah senang.*

Membaca nukilan pendapat Bagasworo (2015) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kontak dan kelas *jigsaw* terkonfirmasi. Nukilan pendapat Bagasworo (2015) itu meresonansikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar itu setara karena berbasis tujuan yang dianggap penting oleh seluruh anggota kelompok.

Bagi Bagasworo, pengalaman paling bermakna bagi dirinya adalah ekskursi selama 2 hari ke berbagai rumah ibadah yang ada di Jakarta. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, mahasiswa melakukan kunjungan ke berbagai rumah ibadah di Jakarta yaitu Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Gereja Immanuel, Gurdwara Sikh, Pura Aditya Jaya, Vihara Buddha Dharmacakka Jaya dan Vihara Konghucu Dharma Jaya Toasebio dimana mereka berdiskusi dengan para pemuka agama yang menjadi tuan rumah. Makna tersebut dihayati oleh Bagasworo (2015) kemudian ia uraikan sebagai berikut:

Setelah dua hari Sabtu yang telah saya pakai dengan rekan-rekan saya untuk mengunjungi rumah ibadah yang berbeda, saya merasa sangat dihargai sebagai seorang manusia dan juga sebagai stranger *pada agama-agama tersebut. Dihargai, karena saya belum pernah sedekat itu dengan ajaran-ajaran agama yang berbeda. Mungkin saya bisa mendapatkan ilmu mereka dari internet, tetapi perasaan* welcome *dan* intimacy *yang saya dapat dari para pemuka agama adalah suatu pengalaman yang belum pernah saya dapatkan dalam kehidupan saya sebagai seorang manusia.*

Dari nukilan di atas tercermin bagaimana empati menjadi pintu masuk emosional yang kemudian berjalin-berkelindan dengan pengambilan perspektif sudut pandang dari kacamata orang lain. Tampak bahwa setidaknya pada Bagasworo (2015), interaksi intim semacam ini lebih efektif untuk membongkar stereotip dan prasangka yang ia miliki ketimbang mencari data dan fakta. Baginya bukan fakta dan data yang membuat ia berubah persepsi, tetapi interaksi personal yang memungkinkan dirinya merasa diterima secara intim sebagai seorang manusia. Kedekatan yang ia rasakanlah yang memungkinkan dirinya merasa dihargai, sekalipun ia datang sebagai orang asing. Terkait dengan pengalaman

ini, Bagasworo (2015) lebih jauh lagi menuangkan pengalamannya secara lebih terperinci di bagian berikut. Bagian di bawah ini menguraikan bagaimana dirinya menghayati pengalaman perjumpaan yang ia rasakan.

> *Salah satu rumah ibadah yang mengguncang hati dan otak saya, adalah Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Pertama kali saya menginjakkan kaki ke dalam gereja dengan kamera di tangan saya, entah kenapa saya tidak ingin mengambil gambar. Tak hanya itu, di sesi tanya jawab pun saya sama sekali tidak ingin bertanya-tanya secara kritis tentang agama Katolik, malah saya mendekati beberapa rekan saya yang sedang berdoa di depan altar. Saya tergerak untuk mencoba untuk belajar berdoa, belajar untuk berserah diri kepada Tuhan. Malah, saya langsung meminta tolong teman, Grim, untuk mengajari saya cara berdoa. Tak lama kemudian, saya memisahkan diri dari kelompok. Saya memasukkan kamera ke dalam tas, saya duduk di dalam Katedral, dan saya merenung. Mencoba untuk mencari Tuhan, untuk diberi penjelasan, untuk diberi sebuah tanda bahwa Kau memang ada. Bila saya punya kesempatan untuk ke Katedral, saya mungkin akan ke sana lagi. Bukan gaya arsitekturnya, tetapi kedamaian yang ada di dalam gereja itu sendiri. Saya pun tidak mengerti, apa yang terjadi dengan diri saya.* Needless to say, I think I found God.

Tulisan yang disajikan Bagasworo (2015) ini menunjukkan bagaimana pengalaman kunjungan tersebut memicunya untuk belajar hal yang ia anggap bermakna. Pengalaman perjumpaan ini berdampak pada dirinya, sebagaimana digambarkan dalam pernyataan bahwa dirinya menemukan Tuhan – hal yang diungkapkan dari seseorang yang sebelumnya menyatakan bahwa, “Saya tidak percaya dengan agama tetapi saya ingin percaya kepada Tuhan.” Makna tersebut tidak ia temukan melalui ‘bertanya-tanya secara kritis.’ Bagasworo (2015) memetik makna tersebut justru pada saat dirinya menempatkan diri menjadi ‘yang lain’ melalui perilaku – dengan cara berdoa, merenung dan menghayati. Selain dengan agama Katolik, pengalaman yang Bagasworo (2015) hayati adalah dengan agama Buddha. Ia menuliskan pengalaman penghayatannya sebagai berikut.

> *Seorang Buddhist harus dan bisa berpikir kritis untuk*

> *menuju nirvana. Saya sangat terkesima saat salah satu dari biksu berkata bahwa ada mata kuliah debat pada waktu ia kuliah untuk menjadi seorang biksu. Hal ini merupakan sesuatu yang mungkin jarang ditemukan di agama lain.*

Dapat dilihat bahwa penghayatan yang diawali sebagai pengalaman emosional, membuat Bagasworo (2015) menimbang ulang hal-hal yang selama ini ia pahami tentang 'yang lain' – dalam hal ini agama lain dan para anggota kelompok dari agama tersebut. Membongkar stereotip dan prasangka yang ada pada dirinya juga terjadi dalam interaksi Bagasworo (2015) dengan agama Hindu dan Konghucu. Hal tersebut ternyata juga memberikan dampak pada bagaimana Bagasworo (2015) menghayati kepercayaannya sendiri selama ini. Dengan kata lain, pada saat mencoba memahami yang lain, maka pemahaman terhadap diri sendiri pun ikut meningkat. Hal ini berlaku juga ketika yang dihayati adalah agama dan kepercayaan. Hal ini muncul pada kutipan di bawah ini, terutama pada apa yang dinyatakan oleh Bagasworo dalam kalimat terakhirnya pada nukilan di bawah ini.

> *Beberapa dugaan saya untungnya salah dan berubah. Seperti, paham bahwa agama Tao, Konghucu, Buddha, dan Hindu, menyembah berhala atau dewa. Ternyata saya yang bodoh. Semua agama menyembah Tuhan. Mereka percaya kepada sebuah* higher being *yang mengontrol dan menciptakan dunia ini. Kepercayaan mereka tersebut menambahkan kepercayaan saya terhadap Tuhan,* for some reason.

Anick & Soerjoatmodjo (2015). Lalu bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya selain Bagasworo (2015)? Apakah mereka juga mengalami hal yang serupa? Apakah penghayatan seperti yang dialami Bagasworo juga terjadi pada mahasiswa-mahasiswa lain? Hal tersebut dipaparkan di bagian berikut ini, dimana berbagai nukilan tentang pendapat mahasiswa-mahasiswa lain dipetik dari Anick dan Soerjoatmodjo (2015). Tulisan para mahasiswa ini merupakan hasil tugas penulisan opini, yang kemudian dikompilasi ke dalam bentuk buku. Di dalam opini ini, mereka mengasah kemampuan menulis karya yang ditujukan untuk masyarakat luas. Melalui tulisan opini tersebut, mereka menguraikan argumen dan memberikan rekomendasi untuk para pembaca. Tulisan ini kemudian dikompilasikan dalam sebuah buku dimana setiap karya berdiri sebagai bab tersendiri. Di dalam tiap bab, setiap mahasiswa mencantumkan profil biodata dan foto pribadinya.

Desi Rigamayana, mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual yang menyebut dirinya sebagai pemeluk agama Islam dan sehari-hari mengenakan hijab, mengungkapkan opini berikut:

> *Yang menarik perhatian saya dalam ekskursi ini adalah agama Sikh, karena baru pertama kali dalam hidup saya mendengar agama tersebut dan melihat bagaimana tempat ibadahnya. Ternyata masih ada agama lain di luar enam agama yang saya ketahui. Satu hal yang membuat saya kaget ialah ketika memasuki tempat ibadah umat Sikh. Kami disambut dengan nyanyian rohani lalu diberi kue yang dibuat dari gula, tepung dan minyak. Sejujurnya rasa kue tersebut asing di lidah, tetapi karena saya ingin menghormati, maka saya pun ikut menghabiskan kue tersebut.*

Dari nukilan Desi Rigamayana dapat dilihat bahwa pengalaman ekskursi yang bersifat intim dan personal, termasuk kesempatan mencicipi kudapan yang dibuat oleh umat Sikh, membuat dirinya belajar hal baru. Dari uraian tersebut tersirat bahwa perjumpaan pertama kali dengan agama Sikh serba diwarnai dengan ketidakpastian – terbaca pada bagaimana ia menghadapi nyanyian rohani dan mencecap kudapan yang diberikan. Tetapi sebagaimana dapat dilihat dari kalimat yang ia tuliskan 'karena saya ingin menghormati, maka saya pun ikut menghabiskan kue tersebut.' Dapat dilihat bahwa interaksi dengan kelompok yang berbeda dengan dirinya telah ditandai dengan adanya sikap menghormati perbedaan.

Nadira Zatira Hekanisa adalah mahasiswa Program Studi Arsitektur. Dirinya menuturkan pengalaman di bawah ini. Di dalam tulisan tersebut, dirinya mengakui bahwa ia sendiri memeluk agama Islam dan menurut pernyataannya 'kebanyakan keluarga inti saya mengikuti ajaran agama Islam Muhammadiyah.'

> *Dengan turun ke lapangan langsung saya dapat mengetahui tentang agama-agama lain dari sumber pertama secara lebih mendalam. Misalnya, siapa yang mereka anggap Tuhan, bagaimana cara mereka beribadah, apa saja yang mereka lakukan sebagai umat beragama, dan hal-hal apa saja yang penting yang harus ada dalam rumah ibadah mereka. Selama ini saya mengetahui tentang agama lain dari mulut ke mulut, dan selama ini saya takut untuk bertanya tentang hal-hal yang agak mendalam tentang agama mereka, karena takut menyinggung perasaan orang tersebut dan dianggap menghina agama mereka. Setelah ekskursi, saya jadi*

> *menyadari banyak hal. Banyak hal yang tadinya tidak saya ketahui dan yang saya pertanyakan selama ini menjadi terjawab. Namun ada juga pertanyaan yang tidak sempat saya tanyakan karena baru terpikir setelah kembai melihat foto-foto setibanya saya di rumah. Saya jadi tahu apa dan bagaimana bentuk Tuhan mereka menurut agama masing-masing. Ternyata banyak persepsi yang salah selama ini yang ada dalam benak saya. Contohnya sesajen dalam agama Hindu adalah bentuk simbol ungkapan terima kasih. Agama Kristen Protestan dan Kristen Katholik selama ini bukan menyembah berhala, salib tersebut merupakan simbol Tuhan mereka.*

Dari nukilan opini Nadira Zatira Hekanisa di atas dapat dilihat bahwa kesempatan interaksi dengan kelompok memberikan peluang bagi dirinya untuk mengoreksi persepsi yang selama ini ia pahami. Hal ini serupa dengan pengalaman Dimas Wahyu Bagasworo sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Tersirat juga di dalam opini tersebut, interaksi antar kelompok yang ia jalani dalam kesehariannya belum memungkinkan baginya untuk saling berbagi informasi untuk menjawab rasa ingin tahunya. Interaksi antar kelompok diwarnai dengan sikap takut-takut, sarat akan perasaan kuatir menyinggung perasaan sampai enggan menghina kelompok lain. Dapat dibayangkan bahwa masih ada banyak sekali Nadira dan Dimas di luar sana yang juga merasakan hal yang sama saat berinteraksi dengan kelompok lain.

Dari temuan ini dapat dilhat bahwa interaksi yang minim dengan kelompok yang lain membuahkan persepsi yang keliru. Dapat dilihat bahwa dari satu kali kunjungan yang memakan waktu kurang lebih 2 jam, baik Nadira Zatira Hekanisa dan Dimas Wahyu Bagasworo mendapatkan informasi dasar yang langsung mereka gunakan untuk merevisi persepsi mereka. Maka jika sejenak berandai-andai, apabila interaksi-interaksi seperti ini dilakukan berulang kali dalam waktu yang panjang dengan suasana yang intim dan personal, dapat dibayangkan banyaknya persepsi-persepsi yang bisa diklarifikasi.

Zianara Firera. Interaksi selama ekskursi ini memberikan kesempatan pada para mahasiswa untuk memperhatikan hal-hal 'kecil' yang kemudian mereka maknai. Berikut nukilan pengamatan Zianara Firera yang beragama Islam dan dibesarkan dalam keluarga yang memeluk agama Islam dan belajar di Program Studi Manajemen (Anick & Soerjoatmodjo (2015).

Banyak hal baru yang saya temukan di gereja, yaitu pada saat saya duduk di kursi. Di depan saya, saya menemukan dua buah bantal dan selembar kain lap. Awalnya saya tidak tahu apa fungsi kedua benda tersebut. Tetapi setelah saya bertanya, alat tersebut tidak sembarang diletakkan. Bantal digunakan sebagai alat penadah dengkul apabila orang-orang ingin berdoa dan lap digunakan ketika meja/bangku tersebut kotor. Hal itu berarti hal-hal kecil dipikirkan demi kenyamanan umat.

***Soerjoatmodjo* (2013).** Uraian di bawah ini diambil dari penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Soerjoatmodjo (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis tekstual dari hasil-hasil pengerjaan tugas oleh mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana mahasiswa mengambil perspektif atau sudut pandang orang lain.

Saya mengamati bahwa ketika pemeluk agama Katholik masuk Kathedral, mereka mencelupkan jari-jari mereka ke dalam mangkuk berisi air suci untuk membuat tanda salib. Bagi saya hal ini menarik karena ternyata ritual ini sama seperti kaum Muslim yang berwudhu sebelum sholat.

Sekarang saya paham bahwa umat Hindu meyakini 'Om' bukan pada patung dan dewa-dewa yang merupakan personifikasi dari Yang Kuasa. Saya melihat gagasan ini kurang lebih sama dengan pandangan Katholik yang menggunakan figur untuk melambangkan Yesus Kristus.

Saya mendengar guru Sikh menyebutkan 'kita memetik apa yang kita tanam.' Hal ini ternyata sejalan dengan paham tabur tuai dalam Kristen.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa interaksi seperti ini memungkinkan mahasiswa keluar dari 'cangkang' diri sendiri. Dengan keluar dari sudut pandang dirinya sendiri, mereka menjadi mampu melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Dari proses ini, tampak bahwa mereka menemukan berbagai titik persamaan. Menemukan persamaan-persamaan antar kelompok yang berbeda seperti ini merupakan tanda-tanda bahwa tembok-tembok yang memisahkan kelompok yang satu dengan yang lain mulai runtuh.

Lebih jauh lagi, kutipan di bawah mencerminkan tak hanya kemampuan

melihat dari sudut pandang orang lain, tetapi sampai pada keberpihakan. Kutipan di bawah ini masih diambil dari Soerjoatmodjo (2013).

> *Ketika menyadari bahwa Sikh bukanlah agama yang diakui di Indonesia sehingga para penganutnya harus mengaku sebagai pemeluk agama Hindu, Islam, Kristen atau yang lainnya, saya merasa hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Apabila saya berada pada posisi mereka, saya pun sulit menerima kenyataan bahwa saya harus mencantumkan agama lain agar seolah-olah menjadi agama saya.*

Proses belajar mengajar untuk mata kuliah Agama di Universitas Pembangunan Jaya sampai hari ini masih dilakukan dengan pendekatan yang sama. Beberapa perkembangan yang kini berbeda adalah sebagai berikut. Karena pertimbangan teknis beban kerja, maka keseluruhan perkuliahan dilakukan oleh tim ICRP di bawah koordinasi dari UPJ. Pertimbangan teknis lainnya adalah ekskursi, karena keterbatasan teknis termasuk dari segi rumah ibadah yang dikunjungi dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Agama, maka format tersebut menjadi harus dimodifikasi. Kini para pemuka agamalah yang diundang untuk memberikan kuliah sebagai dosen tamu, diikuti dengan format tanya jawab yang sama seperti pola sebelumnya. Untuk ekskursi, mahasiswa melakukannya sebagai tugas kelompok dengan memanfaatkan sarana rumah ibadah yang dapat ditemui di lokasi dekat rumah dan/atau kampus. Dari segi materi ajar, pengenalan terhadap aliran kepercayaan juga diperbanyak dengan menambah jam pemberian materi.

***

Dari pengalaman ini, ada dua rekomendasi yang dapat dipetik untuk dikaitkan dengan tema integrasi bangsa yang diangkat oleh HIMPSI, yaitu untuk institusi pendidikan dan keluarga. Rekomendasi ini dipetik dari pengalaman, hikmah ajar dan praktik baik yang telah disarikan oleh UPJ dan ICRP dari pengalaman menjalani mata kuliah Agama dengan pendekatan kelas *jigsaw* berbasis pada hipotesis kontak.

Untuk institusi pendidikan: (1) Kelas *jigsaw* menarik untuk dipraktikkan dalam proses belajar-mengajar karena tidak perlu logistik tambahan, tetapi manfaat yang diperoleh baik bagi peserta didik maupun guru juga penting untuk dipertimbangkan; (2) Prasyarat hipotesis kontak juga bisa dikembangkan di dalam proses belajar mengajar, antara lain dengan membuatnya sebagai bagian dari kontrak belajar; (3) Kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain

diikuti dengan empati merupakan cara efektif untuk meleburkan pengkotak-kotakan yang terjadi di masyarakat; dan (4) Mengenal 'yang lain' bisa diaplikasikan secara luas. UPJ dan ICRP mengenalkan 'yang lain' dari konteks agama, tetapi ada banyak kategorisasi kelompok lain yang bisa diperkenalkan di ruang-ruang kelas di sekolah.

Untuk keluarga: (1) Keluarga menjadi tempat pertama untuk mengenal konsep identitas. Relasi antar kelompok dengan identitas yang berbeda pun dimulai dari keluarga. Menyadari bahwa mengenal 'yang lain' diwarnai ketidakyakinan dan kekuatiran, keluarga bisa memupuk rasa aman untuk terus punya rasa ingin tahu; (2) Ada baiknya keluarga membangun ruang bahwa mengenal 'yang lain' adalah hal yang bisa diterima bahkan didorong untuk terus tumbuh; dan (3) Kemampuan mengambil perspektif orang lain diikuti dengan empati dapat dibangun oleh keluarga melalui berbagai aktivitas bersama yang bisa secara sederhana dilakukan dalam keseharian.

Daftar Acuan

Ackerman, J., et al. (2006). They all look the same to me (unless they're angry): From out-group homogeneity to out-group heterogeneity. *Psychological Science, 17*(10), 836-840.

Anick, H.T., & Soerjoatmodjo, G.W.L. (2015). *Perjalanan menjumpai Tuhan: Bunga rampai refleksi agama Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) & Universitas Pembangunan Jaya (UPJ).* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Aronson, E., Wilson, T.D. & Akert, R.M. (2010). *Social Psychology.* Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall

Baidhawy, Z. (2007). Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education: An alternative for contemporary Indonesia. *British Journal of Religious Education, 29*(1), 15-30.

Bagasworo, D.W. (2015, 1 Juli). I think I found God. Diakses dari https://icrp-online.com/i-think-i-found-god/

Brauer, M. (2001). Intergroup perception in the social context: The effects of social status and group membership on the perceived out-group homogeneity and ethnocentrism. *Journal of Experimental Social Psychology, 3*(1), 15-31.

Brown, R. (2010). *Prejudice: Its social psychology* (2nd ed.). West Sussex: Blackwell.

Deutsche Welle (2017, 4 Mei). *Riset Kemendikbud: Masih ada benih-benih intoleransi di sekolah*. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019 dari https://www.dw.com/id/riset-kemendikbud-masih-ada-benih-benih-intoleransi-di-sekolah/a-38687522

Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2011). *Social psychology* (6th ed.). Essex: Pearson Education Limited.

Kornblum, W. & Julian, J. (2009). *Social problems* (13th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Laksmini, G.W. (2015, 12 Januari). *Opini Anda: Belajar agama, belajar toleransi.* https://kbr.id/01-2015/belajar_agama__belajar_toleransi/68388.html

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (2017, 1 Maret). *Intoleransi dari ruang kelas*. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019 dari http://lipi.go.id/lipimedia/intoleransi-dari-ruang-kelas/17741

Leyens, J.P. et al (2001). The emotional side of prejudice: The attribution of secondary emotions to ingroup and outgroups. *Personality and Social Psychology Review, 4*(2), 186-197.

Matsumoto, D., & Juang, L. (2008). *Culture and psychology* (4th ed.). Belmont: Wardsworth.

Soerjoatmodjo, G.W.L. (2013). A small key opens big doors: A case study of textual analysis on perspective taking in a contact-hypothesis-based religion course in Pembangunan Jaya University. *Proceedings of the 10th Asian Association of Social Psychology Biennial Conference.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Soerjoatmodjo, G.W.L. (2019). Dilema identitas pada jurnalis lokal saat meliput konflik: Studi kasus konflik antaragama di Ambon. El Hafiz, S. & Meinarno, E. (editor). *Psikologi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations. *Annual Review Psychology, 33,* 1-39.

Soerjoatmodjo, Gita Widya Laksmini. *Classroom and national integration.*
Bhinneka Tunggal Ika or Unity in Diversity has been Indonesia's motto since its independence in 1945. Yet nowadays, appreciation for Indonesia's diversity seems to deteriorate - as marked by conflicts and disputes detrimental to national integration. Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) in partnership with Indonesian Conference of Religion and Peace (ICRP) developed a syllabus for Religion - one of the subjects compulsory for university students in the country - with a twist: inter-faith approach in jigsaw classrom. Third semester students from 10 departments underwent a learning process comprised of: individual reflections on their experience related to religion, 2-day excursions to a number of religious facilities in Jakarta, lectures and question-and-answer sessions on formal and non formal religions, film discussions also group works on collaborative creative expressions. Based on this experience, this article recommends jigsaw classroom to be adopted in schools as it allows perspective-taking and empathy to develop. Besides supporting children to learn perspective-taking of 'the others', parents can also develop empathy in daily routines.

“Meng-iklan-kan” Integrasi Bangsa

Meike Kurniawati

Pasca Orde Baru: Antara Harapan dan Masalah Baru

Bergantinya era Orde Baru menjadi era Reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Dengan bergantinya era Orde Baru menjadi Era Reformasi sejumlah harapan baru muncul.

Bagi warga Indonesia etnis Tionghoa. Bergantinya era membawa angin segar bagi perkembangan kebudayaan mereka. Seperti diketahui bersama, perkembangan budaya etnis Tionghoa sempat terhambat dengan dikeluarkannya Inpres nomor 14/1967 mengenai ”Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina” yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto. Inpres tersebut melarang etnis Tionghoa merayakan pesta keagamaan dan adat-istiadat di ruang publik. Pesta keagamaan dan adat istiadat hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga. Inpres tersebut dijalankan dan diberlakukan sampai kepemimpinan Presiden Abdurahaman Wahid menyatakan Inpres tersebut tidak berlaku lagi sejak mulai diterbitkannya Keppres nomor 6 tahun 2000 mengenai ”Pencabutan Inpres no 14 tahun 1967 mengenai Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina” yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 2000. Pencabutan Inpres tersebut membawa perubahan besar dalam perkembangan budaya etnis Tionghoa. Saat ini, etnis Tionghoa dapat mengekspresikan kebudayaannya dengan bebas.

Bagi pers nasional. Pada masa Orde Baru, fungsi pers bisa dikatakan hanya sebagai alat me-langgeng-kan kekuasaan dan kepentingan penguasa, corong komunikasi dari pemerintah ke rakyat. Keberadaan pers diawasi dan dikontrol ketat oleh pemerintah di bawah Departemen Penerangan dengan tujuan untuk mengantisipasi agar hal-hal buruk di dalam pemerintahan tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi tidak mengherankan apabila pemberitaan yang muncul adalah berita-berita yang menjunjung tinggi keberhasilan pemerintah. Apabila suatu media nekat menerbitkan pemberitaan-pemberitaan miring soal pemerintah, bisa dipastikan akan “dibredel”.

Pers masa reformasi menjadi lembaga yang independen. Pers menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan tuntutan maupun dukungan pada pemerintah. Pers juga menjadi sarana pemerintah mensosialisasikan kebijakan-kebijakan, sekaligus menjadi wadah pemerintah untuk mengetahui apakah

kebijakan-kebijakan tersebut disetujui rakyat atau tidak. Pers juga berfungsi sebagai pengawal dan pengontrol kebijakan pemerintah. Harapan baru dalam dunia pemberitaan muncul seiring lahirnya reformasi.

Namun di sisi lain, era reformasi yang selalu dihubungkan dengan kebebasan, membuat kebebasan pers sama dengan kebebasan sebebas-bebasnya. Pers masa reformasi bebas menuliskan apa pun kritik mereka terhadap pemerintah. Tidak ada pembungkaman, apalagi pembredelan. Kebebasan tanpa batas tentunya menimbulkan masalah baru. Kebebasan pers tanpa batas membuat pers terkadang terkesan terlewat batas. Norma kesopanan, kesusilaan, privasi, dan keseimbangan pemberitaan seringkali diabaikan demi *rating* acara.

Kebebasan Mengemukakan Pendapat dan Berbicara. Reformasi identik dengan demokrasi, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Pada masa Orde Baru apabila seseorang atau sekelompok orang berani berbicara mengenai kejelekan atau mengkritik penguasa, konsekuensinya adalah mendapat hukuman penjara atau bahkan "dihilangkan". Maka tidak mengherankan hanya segelintir orang yang berani melakukannya. Ketika reformasi, kebebasan diartikan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya. Pada masa reformasi hingga saat ini, masyarakat seolah-olah bebas berkomentar atau berbicara apa saja, tentang siapa saja tidak terkecuali penguasa. Kebebasan ini makin menjadi-jadi karena adanya ruang di media televisi, radio, dan juga media sosial yang dengan mudah diakses oleh siapa saja, dan digunakan sebagai wadah berkomentar dan "berbicara" secara bebas. Semua orang seolah bebas berbicara tanpa berpikir benar atau salah, pantas atau tidak, sopan atau tidak. Ujaran kebencian, *body shaming*, *bullying*, dengan mudah dapat kita temukan. Kejadian ini bisa menimpa siapa saja tidak terkecuali pimpinan/penguasa. Tentunya ini adalah masalah besar yang harus ditanggulangi dengan segera. Jangan sampai bangsa Indonesia yang dikenal santun dalam perkataan dan perbuatan menjadi bangsa yang agresif, beringas, menyerang, dan tidak santun dalam menyampaikan pendapat.

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul. Tidak lama setelah jatuhnya Soeharto, organisasi-organisasi yang dulunya "tidak muncul di permukaan" kini unjuk gigi. Sejak tahun 1985, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Sejak saat itu semua bentuk organisasi hanya boleh menggunakan azas Pancasila. Menolak Pancasila sebagai azas tunggal berarti merupakan pengkianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi kehadiran organisasi-organisasi ini menambah kaya keberagaman di Indonesia. Namun disisi lain juga mengancam keberagaman. Sejumlah organisasi hadir dengan membawa wajah Islam yang radikal. Organisasi-organisasi dengan wajah Islam radikal tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang menyudutkan

kelompok atau tertentu, bahkan ada yang berupaya mengubah dasar negara. Hal ini tentunya menimbulkan masalah yang sangat mengancam integrasi atau kesatuan bangsa Indonesia.

Pembelajaran Integrasi Bangsa Melalui Pemahaman Nilai-nilai Pancasila

Bagi generasi yang tumbuh besar di era Orde Baru atau generasi 90-an tentunya tidak asing dengan istilah wawasan nusantara, dan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pada masa itu, setiap siswa dari mulai jenjang SD, SMP dan SMA wajib mengikuti penataran. Penataran P4 menjadi bagian kurikulum pendidikan yang wajib diikuti para pelajar sampai mahasiswa. Bahkan pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru lulus pun harus masuk kelas Penataran P4 terlebih dahulu sebelum bertugas. Penataran P4 ini biasanya dilakukan selama satu minggu, di awal mulai masuk sekolah. Selama penataran materi yang diberikan adalah Pancasila, wawasan nusantara. Pemahaman mengenai Pancasila sangat ditekankan tentang bagaimana Indonesia adalah negara dengan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Bagaimana Pancasila dirumuskan dengan sangat luar biasa oleh para pendiri Bangsa.

Dalam kaitannya dengan wasasan nusantara, dalam *wikipedia* dikatakan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara mempersatukan seluruh suku, agama dan golongan yang tinggal di berbagai pulau, dari Sabang sampai Merauke. Wawasan yang mempersatukan kesamaan pandang terhadap Nusantara Indonesia dan kesamaan dalam hidup bernegara.

Dalam Tap MPR no. I/MPR/2003 disebutkan bahwa sila Pancasila dijabarkan menjadi 45 butir sebagai berikut:

Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga (Persatuan Indonesia)

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan)

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan mela ksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Penulis sengaja mengutip Tap MPR no. I/MPR/2003 berisi penjabaran sila-sila Pancasila (dari sila pertama sampai sila kelima) secara detil dengan tujuan untuk mengingatkan, bahkan mengenalkan kepada para pembaca tulisan ini mengenai nilai-nilai luar biasa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Beberapa pandangan negatif berpendapat bahwa tujuan kegiatan penataran P4 adalah sebagai alat penguasa untuk mendoktrin generasi muda Indonesia agar tunduk dan patuh pada pemerintah. Namun di sisi lain, dengan adanya pembelajaran ini generasi muda menjadi paham bahwa Indonesia adalah nusantara yang begitu besar, kaya akan sumber daya alam dan manusia. Negara dengan begitu banyak suku, bangsa, dan budaya yang harus sama-sama dijaga keutuhannya. Generasi muda menjadi paham bahwa Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun pada kenyataannya masih terjadi diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan sebagainya.

Setelah Orde Baru berganti menjadi Orde Reformasi, semua hal yang berbau Orde Baru dihilangkan. Semua warisan Orde Baru dianggap tidak baik, tidak perlu, dan bahkan mungkin bisa memunculkan "trauma" tertentu. Padahal tidak semua warisan Orde Baru adalah buruk. Di era reformasi, kegiatan penataran P4, pemahaman wawasan nusantara dan sebagainya dihilangkan. Anak-anak sekolah sudah tidak lagi belajar dan mungkin tidak lagi mengenal Pancasila sebaik dulu. Bahkan jamak ditemukan kasus anak-anak maupun orang dewasa yang sudah tidak lagi hapal Pancasila, termasuk kasus seorang artis yang tidak hapal Pancasila namun secara ironis justru dijadikan duta Pancasila.

Fungsi dan kedudukan Pancasila mulai terancam di era reformasi (Kristiono, 2017). Kepercayaan terhadap Pancasila mulai pudar. Era reformasi telah banyak melahirkan perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan dalam dunia pendidikan. Pancasila seolah hanya menjadi penghias buku sejarah. Burung Garuda hanya sebatas lambang yang harus ada di setiap ruang kelas, ruang pertemuan berdampingan dengan foto Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Pancasila dan Burung Garuda sarat akan makna. Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki fungsi yang sangat fundamental (Adi, 2016). Bagaimana generasi muda akan paham dan mengamalkan Pancasila bila mengenalnya pun tidak. Untuk bisa memahami, mengamalkan sesuatu dengan baik, tentunya kita harus terlebih dahulu mengenalnya. "Kalau tidak kenal mustahil bisa sayang". Pancasila harus dikenalkan pada generasi muda. Pancasila harus "diiklankan" bukan "ditenggelamkan", "dikalahkan" oleh iklan partai politik.

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dengan jelas menggambarkan integrasi bangsa. Bagaimana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila-sila dalam Pancasila dengan jelas mengatur bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kaitannya dengan agama, hubungan dengan sesama, persatuan Indonesia, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dan bagaimana perilaku mengutamakan kesejahteraan bersama. Singkatnya, setiap isi Pancasila menggambarkan dengan jelas bagaimana kehidupan bernegara dan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila maka cita-cita luhur bangsa akan tercapai, bangsa kita akan terintegrasi menjadi satu kesatuan yang kuat.

Meng-iklan-kan Integrasi Bangsa

Untuk bisa mengiklankan integrasi bangsa hal pertama yang harus dilakukan tentunya adalah mengiklankan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, melalui upaya-upaya strategis sebagai berikut:

- Kurikulum Pancasila hendaknya ditanamkan dalam diri generasi muda sejak di pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Bentuk program bisa dalam bentuk mata pelajaran atau dimasukkan dalam kegiatan orientasi siswa.
- Melakukan program Reorientasi Pancasila untuk masyarakat umum.
- Melakukan kegiatan-kegiatan kekinian dengan tema Pancasila, misal: Pancasila Run, kegiatan Pancasila di *mall*, dan sebagainya.
- Membuat *merchandise* Pancasila yang keren dan membanggakan sehingga generasi muda familiar dengan Pancasila. Masih teringat dengan jelas bagaimana ketika timnas sepakbola Indonesia berhasil mencapai final dan menjadi juara, bagaimana orang sampai antri untuk membeli demi bisa mengenakan pakaian timnas. Lambang Garuda di dadaku menjadi sangat membanggakan. Timnas sepakbola menjadi terkenal, tertanam dalam benak, dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat.

Lantas bagaimana mengiklankan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan integrasi bangsa? Berikut adalah langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan:

- Elite politik, tokoh ternama harus memberikan contoh perilaku. Sayangnya, selama ini banyak elite politik, tokoh ternama justru mengobarkan semangat perpecahan. Mereka justru menjadi provokator.
- Pemberian hukuman yang tegas bagi para oknum pelaku yang menyebarkan fitnah, *hoax*, atau apa pun yang dapat mengancam integrasi bangsa

- Stop mengangkat tokoh-tokoh provokator perpecahan bangsa di ruang publik, ruang media massa
- Gunting sensor pemerintah harus tajam terutama untuk kegiatan atau acara yang dianggap mempromosikan perpecahan atau mengancam persatuan

Peran Psikologi dalam "Mengiklankan" Integrasi Bangsa

Tugas mengiklankan integrasi bangsa harus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk para ilmuwan/praktisi psikologi. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku harus turut berperan serta membantu pemerintah untuk mengiklankan integrasi bangsa. Apa yang bisa disumbangkan oleh psikologi dalam mengiklankan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda? Ilmuwan/praktisi psikologi khususnya Psikologi Pendidikan dan Psikologi Sosial perlu:

- Bekerja sama dengan pemerintah untuk menyusun program pendidikan Pancasila yang tidak terkesan bersifat indoktrinasi. Program pendidikan Pancasila yang menyenangkan, tidak membosankan namun tetap sarat dengan penanaman nilai.
- Menyusun program pendidikan Pancasila yang sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik per jenjang pendidikan. Psikolog pendidikan berperan menyususn program pendidikan Pancasila yang sesuai tahapan perkembangan, tugas perkembangan, sehingga program yang ditawarkan sesuai dengan pemahaman dan kemampuan peserta didik.
- Bersama pihak terkait mengembangkan program di media massa tentang Pancasila dalam format yang menghibur, menyenangkan bukan yang bersifat monoton. Peran media massa dalam menciptakan budaya di masyarakat kini tidak dapat dihindari lagi. Kemajuan media komunikasi saat ini sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat baik terhadap pemikiran maupun pola hidup (Fitriyansah, 2018). Psikolog berperan aktif terutama dalam mengontrol isi dari materi yang beredar di media massa. Psikolog memiliki kemampuan dalam menilai bagaimana respon dan penerimaan masyarakat terhadap suatu keadaan. Sehingga diharapkan program yang dikembangkan dapat diterima dengan baik di masyarakat.
- Menyusun program reorientasi Pancasila untuk khalayak umum, melalui seminar-seminar nilai Pancasila dengan tema dan judul kekinian sehingga menarik minat khalayak.
- Membantu pemerintah mengedukasi masyarakat (melalui poster, aksi-aksi

di media sosial, dan sebagainya) sehingga menjadi masyarakat yang cerdas dan tidak mudah termakan *hoaks* dan isu-isu yang membahayakan persatuan kesatuan bangsa.

- Berperan aktif mengontrol media, pemerintah, lembaga negara, organisasi, dan sebagainya ketika pihak tersebut "mentolerir" atau "meloloskan" atau "membiarkan" atau "mempromosikan" kelompok acuan atau kegiatan yang mengancam persatuan-kesatuan bangsa. Di dalam psikologi dikenal istilah kelompok acuan, yaitu kelompok yang berperan sebagai titik acuan bagi individu dalam pembentukan kepercayaan, sikap dan perilaku mereka (Assael, 2001); atau kekelompok orang yang dianggap memiliki aspirasi, opini, preferensi, sikap, perilaku dan nilai-nilai yang digunakan oleh orang lain sebagai dasar dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung (Budiman, 2013); yang pandangan, sikap, dan perilakunya digunakan sebagai dasar pembentukan pandangan, sikap, dan perilaku orang lain (Arnould, Price, Linda & George (2002). Kelompok acuan berperan sangat besar dalam menginspirasi, merubah perilaku dan pemikiran seseorang. Pemilihan kelompok acuan dengan pandangan yang positif tentang Pancasila diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat untuk setia pada Pancasila. Sebaliknya, ketika terjadi kesalahan dalam memilih kelompok acuan (misal kasus artis tidak tahu Pancasila, malah menjadi duta Pancasila) tentu saja efek negatif yang akan didapat.

Dengan sinergi dan usaha semua komponen bangsa, upaya untuk mengiklankan dan menjaga persatuan kesatuan bangsa bukanlah hal yang mustahil. Seluruh komponen bangsa termasuk para ilmuwan psikologi harus segera bergerak sebelum integrasi bangsa Indonesia berubah menjadi disintegrasi. Para ilmuwan dan praktisi Psikologi, HIMPSI, mampu berperan besar dalam upaya untuk tetap menyatukan bangsa Indonesia. HIMPSI sebagai satu-satunya asosiasi profesi Psikologi harus berperan aktif sejajar dengan organisasi profesi lainnya dalam membantu pemerintah mengupayakan tetap kokohnya persatuan Indonesia, sesuai dengan porsi dan fungsi profesinya. Pola pikir, pandangan, dan pemahaman masyarakat akan Pancasila dan integrasi bangsa perlu diubah ke arah yang positif. Ketika pola pikir berubah maka perilaku akan mengikuti. Tugas Psikologi adalah membantu pemerintah mengubah pola pikir masyarakat dan pada akhirnya mengubah perilaku ke arah tercipta dan terjaminnya integrasi bangsa.

Daftar Acuan

Adi, P. (2016). Pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan nasional NKRI. *Jurnal Moral Kemasyrakatan*, *1*(1), 37-50.

Arnould, J.E., Price, Linda. L., & Zinkhan, G. M. (2002), *Consumers* (International Edition). New York: McGraw-Hill.

Assael, H. (2001). *Consumer behaviour and marketing action*. New York: Thompson.

Belch & Belch. (2009). *Advertising & promotion*. New York: Mc. Graw-Hill.

Budiman, A. (2014, 30 Juli). Kelompok acuan dalam *political marketing*. *Banjarmasin Pos*.

Fitriansyah, F. (2018). Efek komunikasi massa pada khalayak (Studi deskriptif penggunaan media sosial dalam membentuk perilaku remaja). *Cakrawala*, *18*(2), 171–178.

Kristiono, N. (2017). Penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Harmony*, *2*(2), 193-204.

Kurniawati, Meike. 'Advertising' national integration. *Shortly after the fall of Suharto, organizations that used to "not appear on the surface" were now showing off. On the one hand, the presence of these organizations adds to the diversity in Indonesia. But on the other hand it also threatens diversity. Some of these organizations come out with a radical face of Islam. They massively conduct activities that corner certain groups or individuals and even attempt to change the country's ideological foundation. This certainly creates a problem that seriously threatens the integration or unity of the Indonesian people. Pancasila, Bhineka Tunggal Ika clearly illustrates the integration of the nation. Although different but but it is still one thing. The precepts in Pancasila clearly regulate the life of the nation and state, in relation to religion, social relation, Indonesian unity, in prioritizing consensus and shared welfare. In short, each of the contents of the Pancasila illustrates clearly how to live a state and religion in the Unitary State of the Republic of Indonesia. By understanding and practicing Pancasila, the noble ideals of the nation will be achieved, our nation will be integrated into a strong unity.*

Membangun Mimpi Bersama ke Arah Integrasi Bangsa

Amy Mardhatillah & Ahmad Naufalul Umam

"Sejak gubernur terpilih, yang ada kota ini semakin mundur!"
"Kalau saja presiden pilihan saya yang menang, pasti hal seperti ini tak akan terjadi!"
"Anda bukan dari golongan kami, tidak akan mengerti urusan kami!"

Keluhan-keluhan tersebut lumrah kita dengarkan di *jagad* media sosial saat ini. Banyak orang mengeluh akan keadaan atau menolak kebijakan hanya karena merasa bahwa pembuat kebijakan tersebut bukanlah orang yang mereka suka atau orang yang mereka pilih. Seakan-akan masyarakat sulit untuk *move on* dari pemilu dan tetap hidup dalam suasana pemilu. Sedangkan dunia terus berjalan dan sinergi masyarakat dibutuhkan untuk bergerak maju bersama. Kemajuan akan sulit dicapai jika tantangan integrasi bangsa tak kunjung bisa dikuasai.

Integrasi bangsa dapat dipahami melalui pendekatan konsep *imagined community* yang disampaikan oleh Anderson (2006), bahwa kebersamaan suatu bangsa atau rasa nasionalisme yang dimiliki setiap warga negara yang berbeda-beda itu dirajut oleh sebuah bayangan akan satu komunitas utuh milik bersama, dengan beragam persamaan dan ikatan emosinya. Bayangan ini berisi rangkaian sejarah yang tersaring secara selektif dan menimbulkan emosi positif, seperti emosi pada perjuangan kemerdekaan dan bagaimana sebuah bangsa berkembang dari masa ke masa.

Dalam komunitas yang dibayangkan tersebut, penyatu bayangan tidak hanya sejarah dan artefak budaya saja. Bayangan ini juga tersusun oleh konstelasi ideologi dan politik yang berada di dalamnya, yaitu bayangan mengenai kesepahaman tentang bagaimana seharusnya sebuah bangsa bertindak dan bersikap (Anderson, 2006). Bagian bayangan ini lah yang kemudian menjadi tantangan sekaligus solusi untuk menjawab permasalahan integrasi bangsa dari segi integrasi ide-ide kebijakan publik. Jika sejarah dan budaya sudah dapat dipahami bersama dan cenderung tidak berubah, permainan adu pengaruh dalam masyarakat demokratis membutuhkan sebuah kesiapan terhadap perubahan untuk dapat tetap berjalan beriringan. Singkat kata, akan sulit bagi masyarakat demokratis modern untuk tetap mempertahankan integrasinya jika tidak

memiliki kepribadian yang siap menghadapi perubahan dan hanya bertumpu pada kebersamaan sejarah dan budaya saja. Dalam tulisan ini, kami menawarkan sebuah gagasan tentang pentingnya kesiapan individu untuk menghadapi perubahan dalam merawat kebersamaan dan keutuhan bangsa.

Teori Perubahan Perilaku

Sebelum membahas mengenai faktor psikologis maupun fator sosial yang dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi perubahan, kami akan menguraikan terlebih dahulu teori tentang perubahan perilaku. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menghadirkaan konteks dan garis besar pembahasan tentang bagaimana perubahan perilaku dapat terjadi.

Kecepatan globalisasi, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi membuat perubahan tak terelakkan dalam pembangunan suatu bangsa. Perubahan yang terjadi ini dapat dibedakan sebagai perubahan yang direncanakan oleh anggota dan perubahan yang tidak direncanakan oleh anggotanya (Cumming & Worley, 2005). Biasanya perubahan yang direncanakan lebih mudah untuk dihadapi, sedangkan perubahan radikal yang terjadi tanpa perencanaan, lebih rentan untuk menimbulkan resistensi. Perubahan yang didiskusikan dalam artikel ini adalah perubahan yang direncanakan. Khususnya tentang bagaimana masyarakat dapat menikmati perubahan dalam konteks kebijakan baru dari pemerintah.

Konsepsi perubahan yang direncanakan berfokus pada bagaimana perubahan dapat diimplementasikan. Beberapa teori perubahan telah dibahas dalam literatur. Beberapa teori perubahan adalah model perubahan Lewin (1951), model penelitian tindakan, model *appreciative inquiry* dan model perubahan oleh Prochaska dan Di Clemente (1994).

Model perubahan Lewin (1951) adalah perencanaan perubahan sebagai proses tiga langkah yang disebut *unfreezing, movement*, dan *refreezing*. Model ini menganggap perubahan sebagai modifikasi dari dua kekuatan perilaku. Kedua kekuatan adalah kekuatan untuk mempertahankan *status quo* dan kekuatan untuk berubah. Ketika kedua gaya ini sama, maka perilaku saat ini cenderung dipertahankan. Untuk menyebabkan perubahan terjadi, seseorang dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan itu. Sementara itu, jika ingin mempertahankan keadaan saat ini, maka seseorang bisa menurunkan kekuatan-kekuatan tersebut (Lewin, 1951). Lewin menunjukkan bahwa penurunan kekuatan untuk mempertahankan keadaan saat ini menghasilkan lebih sedikit resistensi terhadap perubahan. Model Lewin menjelaskan bahwa perubahan

gaya yang menyebabkan terjadinya perubahan terjadi di tahap *unfreezing*, perubahan perilaku dan kegiatan berlangsung dalam tahap gerakan, dan tahap mempertahankan perubahan perilaku dan budaya baru terjadi di tahap *refreezing.*

Model penelitian tindakan seperti yang diusulkan oleh Cumming dan Worley (2005) melihat perubahan yang direncanakan sebagai proses yang melibatkan kegiatan gabungan antara anggota masyarakat dan pejabat pelaksana perubahan. Menurut model ini, ada delapan langkah perubahan yang direncanakan, termasuk identifikasi masalah, konsultasi dengan ahli, pengumpulan data dan diagnosis awal, umpan balik untuk klien dan kelompok utama, diagnosis masalah, perencanaan aksi bersama, aksi dan pengumpulan data. Model penelitian aksi menekankan pada pengumpulan data dan diagnosis, sebelum perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Selain itu, model ini juga berkaitan dengan penilaian hasil setelah tindakan diambil (Cumming & Worley, 2005).

Model perubahan terencana berikutnya yang dibahas dalam bagian ini adalah model positif. Ini sebenarnya berbasis defisit, yang berfokus pada masalah dalam suatu organisasi dan bagaimana masalah itu dapat diselesaikan. Model positif diterapkan untuk perubahan terencana, terutama melalui proses yang disebut *appreciative inquiry* (AI). AI mendorong orientasi positif tentang bagaimana perubahan direncanakan dan dikelola. Ini mempromosikan kepada anggota masyarakat untuk terlibat dalam menciptakan visi bersama tentang potensi positif sebuah bangsa. Penghargaan yang dibagikan dapat menjadi gambaran yang membimbing apa yang bisa dilakukan oleh pemangku tata pamong yang akan melaksanakan perubahan. Berdasarkan pada pertanyaan yang apresiatif ini, model positif dari perubahan yang direncanakan melibatkan lima tahap, yaitu: memulai penyelidikan, menyelidiki praktik terbaik, menemukan tema, membayangkan masa depan yang disukai dan desain serta dilaksana (Cumming & Worley, 2005).

Teori perubahan terakhir yang dibahas dalam bagian ini adalah tahapan perubahan Prochaska dan Di Clemente (1994). Menurut teori ini, ada enam tahap perubahan. Tahap pertama adalah tahap pra-kontemplasi. Pada tahap ini seseorang tidak punya niat untuk berubah. Tahap kedua adalah tahap kontemplasi. Pada tahap ini, seseorang sedang mempertimbangkan untuk melakukan perubahan dalam bulan depan. Tahap ketiga adalah tahap persiapan, yaitu ketika seseorang berencana untuk bertindak dalam satu bulan ke depan. Tahap keempat adalah tahap aksi, yaitu ketika seseorang berlatih perubahan baru dalam waktu tiga hingga enam bulan. Tahap kelima adalah pemeliharaan di mana orang melanjutkan komitmen mereka untuk mempertahankan perubahan. Tahap kelima adalah pemeliharaan, yaitu melanjutkan komitmen

untuk mempertahankan perubahan. Tahap terakhir adalah kekambuhan, yaitu ketika seseorang dapat kembali ke kepercayaan dan perilaku lama. Berdasarkan model ini, kesiapan untuk berubah sangat penting pada tahap kontemplasi dan pra-kontemplasi, karena pada tahap ini dibahas tentang pro-kontra inisiatif perubahan dan hasil positif dari perubahan.

Faktor yang Meningkatkan Kesiapan untuk Berubah

Holt (2002) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketepatan dari perubahan, dukungan dari manajemen, efikasi diri dari agen perubahan merupakan faktor-faktor yang penting dalam meningkatkan kesiapan pegawai untuk melakukan perubahan perilaku. Disamping itu, penelitian juga menemukan bahwa karakteristik dari agen perubahan menentukan kesuksesan dari implementasi perubahan. Selain dari efikasi diri, faktor kepribadian yang terbuka terhadap pengalaman baru dan juga spiritualitas dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi perubahan.

Faktor yang pertama dibahas adalah, *appropriateness* atau ketepatan dari isi perubahan. Penelitian terdahulu menemukan bahwa apabila perubahan dipersepsikan sesuai dengan kebutuhan, maka kesiapan untuk melakukan perubahan akan meningkat. Hasil ini sejalan dengan temuan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Holt (2002), Clark (2003), Bouchenooghee, Devos, dan Broeck (2008), Cole, Harris, dan Bernerth (2006), yang mencatat bahwa persepsi seseorang tentang pentingnya perubahan, manfaat perubahan dan pembenaran atas perubahan tertentu dapat meningkatkan kesiapan mereka untuk berubah.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Szamosi dan Duxbury (2002) serta Holt, Armenakis, Field, dan Harris (2007). Menurut studi ini, karakteristik perubahan dan isi perubahan harus tepat untuk membuat implementasi berhasil. Pesan perubahan harus mudah ditransfer, untuk membuat anggota masyarakat berpikir bahwa sifat perubahan relevan dengan kebutuhan bangsa (Holt, 2002). Selanjutnya, Armenakis dan Bedian (1999) menyatakan bahwa jika khalayak ramai menyadari perlunya perubahan, tahu alasan mengapa perubahan terjadi, dengan kata lain, masyarakat percaya bahwa perubahan diperlukan dan tepat untuk dilaksanakan, kesiapan untuk berubah pasti akan meningkat di antara mereka. Memahami kesesuaian perubahan juga membantu seseorang untuk percaya bahwa inisiatif perubahan tertentu akan memberikan dampak yang baik pada kehidupan individu (Piderit, 2000). Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini, sangat penting untuk memastikan anggota masyarakat percaya bahwa ide perubahan adalah tepat,

Dalam konteks merawat integrasi bangsa melalui komunitas yang

dibayangkan, masyarakat perlu untuk sama-sama merasakan perlunya dilakukan perubahan spesifik untuk isu-isu tertentu. Misalnya dengan beralih menggunakan transportasi umum ketika fasilitas baru telah disediakan untuk mengurangi kemacetan, mengurangi penggunaan kantong plastik ketika pemerintah juga membatasi penggunaannya, dan lain sebagainya. Sesuai dengan salah satu metode menciptakan kesiapan untuk berubah yang digagas Cumming dan Worley (2005), sebuah perubahan harus betul-betul ditekankan manfaat serta urgensinya sebelum ia diberlakukan. Pada akhirnya integrasi masyarakat akan terjaga jika mereka mampu untuk sama-sama membayangkan perlunya sebuah perubahan dilakukan.

Beberapa kegiatan dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perubahan termasuk komunikasi pasif dan aktif seperti yang disarankan oleh Armenakis dan Harris (2002). Contoh komunikasi aktif adalah melalui dialog bersama masyarakat dan diskusi tentang agenda perubahan. Dalam kesempatan ini anggota masyarakat dapat merasa terlibat dalam proses perubahan. Lebih lanjut, memiliki kebijakan pintu terbuka di mana masyarakat dapat berbicara dengan perwakilan pemerintah tentang perubahan setiap saat, membantu mereka untuk memahami bagaimana perubahan akan menguntungkan individu dan masyarakat. Berkenaan dengan komunikasi pasif, masyarakat dapat menerima informasi tentang perubahan melalui berbagai media seperti email, situs web layanan masyarakat, dan ilkan elekronik maupun menggunakan media cetak.

Faktor yang kedua adalah faktor efikasi. Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara efikasi perubahan individu dengan kesiapan untuk berubah (Devos & Buelens, 2003; Holt et al., 2007; Wanberg & Banas, 2000). Amiot, Terry, Jimmieson, dan Callan (2006) menyatakan bahwa keefektifan perubahan individu sangat penting dalam menentukan kinerja individu selama perubahan terjadi. Dalam penelitian mereka, individu dengan efikasi perubahan rendah merasa lebih tertekan dengan perubahan yang terjadi dibandingkan dengan individu dengan efikasi perubahan tinggi. Hal ini karena efikasi perubahan yang rendah membuat individu meragukan kemampuan mereka dalam menanggapi tuntutan selama perubahan terjadi. Anggota masyarakat ini cenderung fokus pada perasaan tidak kompeten dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu, mereka cenderung merasa tertekan dan kurang siap untuk berubah.

Kenyataan bahwa efikasi dalam menghadapi perubahan mampu meningkatkan kesiapan individu untuk berubah, maka perubahan individu harus difasilitasi melalui program pelatihan dan pengembangan, yaitu peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang penting bagi keberhasilan program perubahan (Richard, 2004). Kegagalan memberikan pengetahuan

yang relevan dengan perubahan dan keterampilan inisiatif perubahan dapat menyebabkan efikasi perubahan rendah. Hal ini dapat menyebabkan kesiapan rendah dan kegagalan dalam pelaksanaan inisiatif perubahan (Cuningham et al., 2000). Bandura (1977) menyarankan beberapa cara untuk meningkatkan efikasi perubahan termasuk meningkatkan paparan berbagai pengalaman, salah satunya adalah melalui permodelan. Pengulangan perilaku model dan persuasi verbal untuk meyakinkan individu tentang kemampuannya dalam melakukan tugas akan meningkatkan penguasaan dalam melakukan tugas.

Meyakinkan masyarakat akan kemampuan dan potensinya untuk menyambut perubahan adalah langkah yang strategis untuk merawat integrasi. Dengan menghargai masing-masing individu dan mengundang partisipasi aktif mereka, masyarakat dapat tetap merasa dan membayangkan diri mereka sebagai satu komunitas yang utuh, tidak terpisah oleh pilihan politik karena seusai pemilu tidak ada lagi kubu yang beradu pengaruh. Dalam pendekatan efikasi ini, masyarakat didorong untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi dengan saling memberikan kritik konstruktif dan apresiasi pendapat.

Faktor yang ketiga adalah dukungan dari pemangku tata pamong yang akan megimplementasikan perubahan. Penelitian terdahulu sudah menemukan hubungan antara dukungan manajemen dengan kesiapan untuk berubah. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Holt et al., 2007; Naimatullah dan Syed Ghulam (2010) serta Rafferty dan Simon (2005). Dukungan ini dapat berupa dukungan masyarakat sekitar, pemerintah dan pejabat negara serta sistem manajemen, tujuan, visi dan misi sebuah bangsa.. Szamosi dan Duxbury (2000) menyebutkan bahwa program perubahan yang berhasil dapat dicapai jika organisasi dan anggotanya percaya bahwa mereka harus kompetitif agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat; bukan hanya itu, organisasi dan anggotanya harus setuju untuk memajukan bangsa.

Vollman (1996) menyatakan jika orang kunci dalam suatu orgnasisasi tidak mendukung inisiatif perubahan, organisasi harus menunggu untuk menerapkan perubahan sampai ada orang kunci yang akan mendukung agenda perubahan. Ide ini didukung oleh Cole et al., 2006 yang menyatakan bahwa persepsi pimpinan tentang perubahan dapat berdampak langsung pada persepsi bawahan dan angoota masyarakat. Oleh karena itu, jika pimpinan negara, dan tokoh masyarakat memberikan dukungannya pada perubahan, maka kesiapan anggota masyarakat untuk berubah akan meningkat. Setelah anggota masyarakat percaya bahwa sistem sebuah bangsa, masyarakat, dan nilai mereka secara keseluruhan mendukung inisiatif perubahan, kesiapan seluruh elemen dan lapisan maysrakat untuk berubah akan meningkat (Holt, 2002). Selain itu masyarakat akan saling bekerja sama dan memberikan dukungan positif

terhadap perubahan positif yang direncanakan oleh pemerintahan walaupun mereka berasal dari kubu yang berbeda.

Dalam hal menjaga kekokohan integritas bangsa, pemerintah hendaklah memberikan dukungan dengan membuat kebijakan dan sistem yang menunjang perubahan tersebut. Harus dipastikan bahwa siapapun dari kalangan manapun yang berkontribusi dalam perubahan akan mendapatkan penghargaan yang layak. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif kepada anggota masyarakat yang berperilaku dengan tepat dalam mendukung perubahan.

Faktor selanjutnya adalah kepribadian yang terbuka terhadap perubahan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh McDaniel (1992) menemukan bahwa domain kepribadian yang terbuka terhadap pengalaman (*openness to experience domain*), yaitu salah satu aspek kepribadian dari lima besar domain kepribadian (*the Big Five Personality*) memiliki hubungan yang signifikan dengan kesiapan untuk berubah. Smollan, Matheny, dan Sayers (2010) juga mendukung temuan ini. Dalam penelitian mereka, keterbukaan terhadap pengalaman ditemukan sebagai prediktor paling penting dari kesiapan untuk berubah dibandingkan dengan empat dimensi lainnya. Keterbukaan terhadap pengalaman menciptakan reaksi kognitif positif terhadap perubahan yang dapat mengarah pada emosi positif yang dapat meningkatkan kesiapan berubah.

Temuan serupa juga dapat dilihat dari penelitian Vakola, Nikolau dan Tsauosis (2003) yang mempelajari peran kecerdasan emosional dan kepribadian besar lima sebagai prediktor kesiapan individu untuk berubah. Dalam studi ini, mereka menemukan bahwa keterbukaan terhadap pengalaman domain secara signifikan memprediksi kesiapan untuk berubah. Hal ini sejalan dengan Walker, Armenakis, dan Bernerth (2007) yang berpendapat bahwa individu yang tidak kaku dan terbuka terhadap cara-cara baru dalam melakukan sesuatu lebih cenderung menerima inisiatif perubahan.

McDaniel (1992) menyebutkan bahwa idividu yang memiliki kepribadian terbuka terhadap pengalam baru dan seorang inovator akan merespon lebih baik perubahan yang radikal. Teori diferensiasi sosial menunjukkan bahwa individu yang berbeda akan merespon secara berbeda terhadap fenomena tertentu (Burnes, 2005). Oleh karena itu, individu dengan disposisi kepribadian keterbukaan terhadap pengalaman, dapat mempertimbangkan inisiatif perubahan lebih positif dibandingkan dengan karyawan yang kurang memiliki disposisi keterbukaan terhadap pengalaman (Vakola et al., 2003). Dengan demikian, mereka yang memiliki kepribadian terbuka terhadap perubahan dapat diberikan peran lebih, dan mereka yang ditengarai enggan berubah dapat memperoleh perhatian lebih dalam target persuasi.

Faktor yang terakhir adalah, spiritualitas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki spiritualitas tinggi cenderung menerima perubahan lebih positif (Olievera, 2011).. Thomas dan Solucis (2011) juga menyatakan bahwa spiritualitas seseorang akan menentukan kesiapan untuk berubah.. Individu yang merasa hidupnya bermakna, percaya bahwa mereka mendapatkan kekuatan pribadi dari Tuhan. Dengan demikian, mereka akan lebih banyak bertindak dan puas dengan kehidupan mereka (Asmos & Dunchon, 2000).

Menurut Benefield (2003), perasaan kesejahteraan spiritual membuat seseorang lebih siap untuk menerima perubahan. Demikian pula, Olievera (2011) menemukan spiritualitas individual memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan yang sukses. Hal ini karena spiritualitas individual dapat meningkatkan performa dan membantu transformasi organisasi dan sebuah bangsa. Neal dan Biberman (2003) serta Mitrof dan Denton (1999) berpendapat bahwa dengan spiritualitas, karyawan dapat memiliki tujuan akhir dalam hidup, mengembangkan koneksi yang baik dengan rekan kerja, dan memiliki nilai-nilai pribadi yang konsisten dengan nilai-nilai organisasi. Oleh karena itu, individu yang sangat spiritual akan menghargai pekerjaan mereka dan teman-teman mereka yang mungkin membantu mereka untuk lebih siap dalam menerima inisiatif perubahan (Milliman, Czaplewki & Ferguson, 2003).

Dalam konteks integrasi bangsa, meningkatkan spiritualitas individu sangat penting. Serangkaian program peningkatan spiritualitas dapat dilakukan untuk menciptakan individu yang lebih *mindful* sehingga mereka mampu melakukan refleksi kebersamaan dalam kemanusiaan dalam berbagai situasi. Semua agama mendukung perdamaian, oleh karena itu, spiritualitas yang tinggi akan tercerminkan untuk menjunjung tinggi perdamaian, sikap saling menghormati dan tidak mencaci maki. Dengan menjadi penganut agama yang taat dengan tingkat kebernaknaan hidup yang tinggi, individu akan lebih baik dalam memaknai perubahan dan menyikapi perbedaan.

Saran dan Kesimpulan

Dengan mengetahui faktor-faktor psikologis maupun faktor sosial yang dapat meningkatkan kesiapan terhadap perubahan perilaku, pemerintah maupun individu dapat fokus dalam melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi perubahan yang mungkin tidak diinginkan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, ataupun perubahan yang disampaikan oleh pemerintahaan yang bukan menjadi pilihan individu. Sebagai anggota

masyarakat dan warga negara yang baik, kita perlu untuk mengumpulkan alasan mengapa harus mendukung perubahan dan menghindari tindakan yang negatif dalam rangka mendukung integrasi bangsa. Disamping itu, dari sisi pemerintah, mengkomunikasikan perubahan dengan cara yang baik dan efektif sangat diperlukan. Pemerintah harus menyampaikan bagaimana perubahan ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun tahapan yang dapat dilakukan dalam mendukung perubahan dan menjaga integrasi bangsa antara lain : 1) Tahap yang paling utama adalah adanya kesadaraan akan pentingnya untuk menghormati perbedaan, tidak fanatik dan rasional dalam menilai sesuatu, menggunakan berbagai sudut pandang dalam membuat kesimpulan, dan kesadaran akan pentingnya untuk terus meningkatkankan kemampuan diri, mengembangkan sikap yang terbuka terhadap pengalaman baru serta menjadi individu yang lebih spiritual yang selalu berusaha mencari kebermaknaan dalam kehidupan. 2) Tahap selanjutya adalah dengan belajar menentukan prioritas perubahan perilaku yang harus dilakukan. Perubahan akan sukses dilakukan apabila, individu fokus dalam melakukan perubahan, terukur dan tidak melakukan banyak perubahan perilaku dalam satu waktu. 3) Tahap selanjutnya dalah dengan merncanakan perubahan perilaku. Perancanaan dapat dilakukan berdasarkan Teori Prochaka dan DI Clemente yang sudah dibahas pada sesi terdahulu. 4) Tahap yang teakhir adalah, memastikan perubahan terjadi secara berkelanjutan, dengan sistem yang mendukung dan imbalan yang tersedia untuk setiap perubahan yang terjadi.

Setelah menyadari pentingnya untuk menerima perubahan, dan melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan perubahan perilaku. Individu kemudian dapat berusaha untuk mulai melatih diri menikmati perubahan tersebut. Tiga hal yang dapat dilakukan dalam menikmati perubahan antara lain:

1. Mengedepankan partisipasi aktif dan pengembangan diri secara menyeluruh di semua kalangan, dengan mengesampingkan sementara perbedaan yang ada.
2. Mencari dukungan dalam melakukan perubahan tersebut. Melakukan perubahan bersama-sama dengan orang lain, bergabung dengan komunitas, agar perubahan dapat dijalani dengan lebih menyenangkan. Memastikan diri Anda berada di ligkungan yang positif dan bersama dengan kelompok masyarakat yang juga positif dan seimbang dalam melihat sesuatu serta menggunakan berbagai sudut pandang.
3. Meningkatkan spiritualitas. Dengan memiliki makna dalam hidup, individu lebih mudah untuk menerima perubahan, beradapatasi dengan perubahan yang terjadi dan dapat berfikir positif dalam menghadapi dinamika perubahan.

Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya, berbagai perubahan terjadi, dan selalu meningkakan kapasitas diri dalam menghadapi perubahan serta mengembangkan kepribadian yang terbuka akan pengalaman baru, individu akan lebih mudah beradaptasi terhadap berbagai perubahan kebijakan dan dapat mendukung integasi bangsa dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

Amiot, C. E., Terry, D. J., Jimmieson, N. L. & Callan, V. J. (2006). A longitudinal investigation of coping processes during a merger: implications for job satisfaction and organizational identification.

Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of ationalism*. London: Verso

Armenakis, A. A. & Bedeian, A. G. (1999). Organizational change: A review of theory and research in 1990s. *Journal of Management*, *25*(3), 293-325.

Armenakis, A. A. & Harris, S. G. (2002). Crafting a change message to create transformational readiness. *Journal of Organizational Change Management*, *15*(2), 169-83.

Ashmos, P. D. & Duchon, D. (2000). Spirituality at Work: Conceptualization and measure. Submitted to the *Journal of Management Inquiry*: section on Nontraditional Research.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unified theory of behavioral change. *Psychological Review,* 84, 191-215

Benefield, M. (2003). Mapping the terrain of spirituality in organizations research. *Journal of Organizational change Management, 16*(4), 367-377.

Bouckenooghe, D., Devos, G. & Broeck, H., V. (2008). Working paper: the change climate questionnaire: a scale development.

Burnes, B. (2005). Complexities theories and organizational change. *International Journal of management Reviews, 7*(2), 73-90.

Clark, S. W. (2003). Development of integrated measure of readiness for change instrument and its application on ASC/PK. Thesis submitted to Department of Systems and Engineering Management Graduate School of Engineering and Management Air Force Institute of Technology Air University Air Education and Training Command.

Cole, M. S., Harris, S. G. & Bernerth, J. B. (2006). Exploring the implications of visions, appropriateness and execution of organizational change. *Leadership and Organizational Development Journal, 27*(5), 352-367.

Cummings, T. G. & Worley, C. G. (2005). *Organization Development and Change. Madison,* WI: Thompson South-western.

Cunnigham, C. E., Woodward, C. A., Shannon. H. S., Maclntos, J., Lendrum, B., Rosenbloom & Brown, J. (2002). Readiness for organizational change: A longitudinal study of workplace, psychological and behavioral correlates. *Journal of occupational and Organizational Psychology*, *75,* 377-392.

Devos, G. & Buelens, M. (2003). Openess to organizational change: the contribution of content, context, and process. Vlerick Leuven Gen Working paper Series 2003/06.

Holt, D. T. (2002). Readiness for change: development of scale. PhD thesis submitted to Auburn University.

Holt, D.T., Armenakis, A. A., Feild, H. S. & Harris, S. G. (2007). Readiness for organizational change: the systematic development of a scale. *The Journal of Applied Behavioral Science*, *43* (2), 232-51.

Lewin, K. (1951). *Field theory in social sciences- selected theoretical papers*. New York: Harper & Row.

McDaniel, R. N. (1992). The relationship between personality and perceived success of organizational change. PhD thesis submitted to The Fielding Institute.

Milliman, J., Czaplewski, S. V. & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: an exploratory empirical assessment. *Journal of Organizational Change Management,* 16(4),426-447.

Mitrof, I. & Denton, E. A. (1999). *A spiritual audit of corporate America*. San Fransizco: Josey-Bass Publisher.

Naimatullah, S. & Ghulam, S. S. (2010). Relationship between employee readiness for organisational change, supervisor and peer relations and demography. *Journal of Enterprise Information Management, 23*(5), 640-652.

Neal, J & Biberman, J. (2003). Introduction: the leading edge in research on spirituality and organization. *Journal of Organization Change and Management, 16* (4), 363-366.

Olievera, A. (2011) The place of spirituality in organizational theory. *Electronic Journal of Business ethics and Organiztaional studies.* 9 (2).

Piderit (2000). Rethinking resistance and recognizing ambivalence: a multidimensional view of attitudes toward organizational change. *Academy of Management Review, 25*(4),783–794.

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C (1994). *The transteoretical approach: toward s a systematic eclectic framework.* Dow Jones Irwin, Homewood, IL, USA.

Rafferty, A. E. & Simmons, R. H. (2006). An examination of the antecedents of readiness for the fine-tuning and corporate transformation changes. *Journal of Business and Psychology*, *20*(3), 325-350.

Richards, K. H (2004). Assessment of organizational readiness to change and intervention program. PhD thesis submitted to University of South Florida.

Smollan, R. K, Matheny, J. A. & Sayers, J. G. (2010). Personality, affect and organizational change: a qualitative study In W. F. Zerbe, N. M. Ashkanasy & C. E. J. Hartel, *Research on emotions in organizations, Vol. 6, Emotions and organizational dynamism* (pp. 85-112). Emerald Insight: Bingley, UK.

Szamosi. L. T. & Duxbury. L. (2002). Development of measure to asses' organizational change. *Journal of Organizational Change management*, *15*(2), 184-201.

Thomas, O.W. & Solucis, S. (2011). Organization transformation: what matter most is leaders action. *International Journal Emerg Sci, 1*(3), 211-230.

Vakola. M., Nikolau. I. & Tsauosis. I (2003).Attitude towards organizational change: what is the role of employee stress and commitment. *Employee Relation, 27* (2), 160-174.

Vollman, T. (1996). *The transformation imperative*. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Walker, H. J., Armenakis, A. A. & Bernerth, J. B. (2007). Factors influencing organizational change efforts: an integrative investigation of change content, context, process and individual differences. *Journal of Organizational Change Management, 20* (*6*), 761-773.

Wanberg, C. R. & Banas, J. T. (2000). Predictors and outcomes of openness to change in reorganizing workplace. *Journal of Applied Psychology*, *85*(1), 132-42.

Mardhatillah, Amy, **& Umam**, **Ahmad Naufalul**. ***Forming a common dream toward national integration.*** *This article aims to elaborate on the psychology and social predictors of individual readiness to change in order to attain a better national integrity. Prochaska and DiClemente stages of change as well as Lewin model of change are used as the theoretical framework. Several factors that enhance individual readiness toward change including the feeling of appropriateness toward change of content, support that individual get from the authority as well as the surroundings where the individual leave, feeling of competent in handling changing situation, individual openness to experience personality and the last one is individual spirituality. Promoting the psychology and social factors of readiness to change will enhance individual willingness to change toward a better national integrity. There are four steps in promoting individual readiness to change; 1) Increasing awareness toward the important to change in attaining a better national integrity, 2) Selecting the priority on the behavior to change, 3) Plan and conduct the behavior change, 4) Maintain and do the continues improvement on the behavior change. In addition, several ways can be done to promote enjoying change in enhancing national integrity, including always improving the necessary skills to embrace change, find the meaning for behavior change and do it together with the support system.*

Pendidikan Karakter Sebagai Pilar untuk Membangun Moral Bangsa

Fitria Eka Annisa & Indah Andika Octavia

Pengantar

Indonesia sebagai Negara berkembang, tentu tidak akan terlepas dari berbagai macam perubahan-perubahan sosial yang dapat terjadi begitu cepat. Hal merupakan konsekuensi dari Negara yang masih berkembang yang pada umumnya sangat terbuka dengan berbagai informasi atau hal-hal baru yang dimiliki oleh Negara lain. Sehingga tidaklah mengherankan jika dijumpai banyak perubahan di lingkungan sosial. Nilai-nilai religius dan sosial kemasyarakatan yang dulu sangat dijunjung tinggi, kini cenderung dikesampingkan oleh masyarakat. Contohnya, kebersamaan dan gotong royong sudah jarang dijumpai dalam hidup bermasyarakat. Perubahan-perubahan tersebut sangat menuntut kesiapan dari anggota masyarakat. Ketika masyarakat tidak memiliki nilai-nilai sebagai patokan ataupun pedoman maka mereka akan cenderung mengikuti arus perubahan tanpa melakukan filterisasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi (Effendi, 2013).

Perkembangan yang terjadi pada suatu negara pada hakikatnya baik, karena hal ini mengindikasikan masyarakat selalu berkembang secara dinamis untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Contohnya saja penciptaan berbagai macam alat teknologi seperti telepon seluler, internet, maupun media-media lainnya, tentunya sangat bermanfaat bagi manusia jika dalam penggunaannya tetap didasarkan pada pertimbangan nilai dan moral. Nilai-nilai kegunaan dari suatu perubahan tentunya sangat ditentukan oleh manusia itu sendiri. Jika manusia tidak memiliki pegangan nilai, maka mereka akan terjebak dalam perubahan tersebut dan kehilangan nurani dalam tindakannya. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika ada masyarakat yang cenderung memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kepentingan-kepentingan yang dapat merusak moral bangsa.

Oleh karena itu sebenarnya pokok permasalahan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang tetap memiliki pemahaman diri serta nilai-nilai moral yang kuat ditengah-tengah perkembangan dan perubahan yang terjadi. Masyarakat Indonesia saat ini nampaknya masih belum memiliki karakter yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus disintegrasi bangsa, diskriminasi terhadap kelompok tertentu,

meningkatnya kekerasan yang bersumber dari ketidakmampuan masyarakat memilah informasi yang akurat dan yang menyesatkan. Jika ditelusuri lebih jauh, ketidakmampuan memilah ini bersumber dari lemahnya pendidikan dalam membentuk masyarakat atau bangsa yang berkarakter, yaitu yang mampu memilah informasi dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moralitas baik dan buruk.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi merupakan suatu keadaan yang tidak bersatu padu atau keadaan terpecah, hilangnya keutuhan atau persatuan. Gejala terjadinya disintegrasi pada bangsa ini dapat dilihat dari kerusuhan-kerusuhan yang marak terjadi, seperti konflik antar etnis, tawuran pelajar, dan meningkatnya prasangka antar kelompok.

Fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan indikator bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami krisis nilai atau moralitas. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membangun karakter masyarakat, terutama anak-anak, melalui pendidikan karakter. Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dunia pendidikan bukanlah perkara mudah, karena tidak bisa dilakukan secara parsial saja, akan tetapi menghendaki upaya yang komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan semua kalangan yang berkepentingan, terutama institusi sekolah dan keluarga.

Upaya-upaya membangun karakter bangsa melalui pendidikan karakter sudah lama dilakukan di negara-negara maju dan menjadi prioritas utama sejak di pendidikan dasar (Pala, 2011). Ketika pengembangan karakter maupun moralitas berhasil, maka pengembangan aspek-aspek lain dalam diri seseorang akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya ketika pendidikan gagal membentuk anak-anak yang cerdas dan berkarakter, yang mengesampingkan pertimbangan nilai dalam mencapai tujuan, maka dalam hidup bermasyarakat mereka akan cenderung didorong oleh pemenuhan kepentingannya saja dan mengabaikan kepentingan bersama (Mutaqqin, Raharjo, & Masturi, 2018).

Mengingat pentingnya pendidikan karakter sebagai pilar kekuatan suatu bangsa, maka tulisan ini bertujuan memberikan gambaran tentang konsep pendidikan karakter, hambatan-hambatan dalam pendidikan karakter, dan solusinya. Paper ini diharapkan dapat membuka membuka mata masyarakat Indonesia bahwa pendidikan karakter sejak dini sangatlah penting untuk dilakukan, karena generasi berkarakter merupakan pilar dari bangsa yang berkarakter.

Apakah yang dimaksud dengan pendidikan karakter

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar mereka memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia (Pranowo, 2009). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter. Pendidikan diharapkan dapat melahirkan generasi bangsa yang memiliki karakter yang kuat dan selalu memegang nilai-nilai luhur agama dan budaya Indonesia.

Karakter secara umum dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang khas yang terpatri dalam diri seseorang dan terwujud dalam perilaku (Setiawati, 2017). Selain itu, Bekowitz dan Bier (2005) juga mendefinisikan karakter sebagai suatu bentuk watak, tabiat, perilaku yang melekat pada pribadi seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi yang digunakan sebagai landasan untuk berpikir dan berperilaku sehingga menimbulkan suatu ciri khas pada individu tersebut. Karakter individu akan berkembang dengan baik, apabila memperoleh penguatan yang tepat, yaitu berupa pendidikan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, karakter kemudian juga diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus, dan karenanya melahirkan suatu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual, dan dapat mempengaruhi keadaan moral seseorang. Selain itu karakter seseorang akan sangat berkaitan dengan perilaku yang ada di lingkungan sekitar dirinya (Ryan, 1999). Tidak hanya itu, Ryan (1999) juga menambakan bahwa karakter yang baik pada diri seseorang berkaitan dengan pengetahuan mereka akan sesuatu hal yang bersifat baik (*knowing the good*), mencintai hal-hal yang positif (*loving the good*), dan melakukan berbagai kebaikan (*acting the good*). Ketiga ciri ideal ini satu sama lain sangat berkaitan. Hal ini kemudian juga diilustrasikan dengan bagaimana seseorang yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui satu halpun, kemudian melalui dorongan-dorongan primitif yang ada dalam dirinya akan menguasai akal sehat mereka dan memberikan efek dalam bentuk perilaku. Pembentukan perilaku ini akan diiringi dengan pola pengasuhan dan pendidikan seseorang yang dapat mengarahkan kecenderungan, perasaan, dan pikiran menjadi beriringan secara harmoni atas bimbingan pendidikan dan juga ajaran agama (Papalia & Feldman, 2015).

Mengetahui yang baik berarti dapat memahami dan membedakan antara hal-hal yang mengandung unsur kebaikan dan yang mengandung keburukan. Selain itu, mengetahui yang baik juga berarti mampu mengembangkan

kemampuan untuk menyimpulkan atau meringkaskan suatu keadaan, Aristoteles (dalam Ryan, 1999) menyebut hal ini dengan *practical wisdom* (kebijaksanaan praktis). Memiliki kebijaksanaan praktis berarti mengetahui keadaan apa yang diperlukan. Sebagai contoh, siswa dapat merencanakan kegiatan mereka, seperti bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan rumah mereka, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman mereka. Tetapi kebijaksanaan praktis tidak semata-mata tentang manajemen waktu, melainkan berkaitan pula dengan prioritas dan pemilihan sesuatu yang baik dalam semua suasana kehidupan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk membuat komitmen yang bijak dan mempertahankannya (Ryan, 1999). Selanjutnya Aristoteles (dalam Ryan, 1999) juga mendefiniskan karakter yang baik sebagai tingkah laku yang benar dalam hubungannya dengan orang lain dan juga dengan diri sendiri.

Dalam hubungannya dengan pendidikan, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan yang dapat membangun nilai-nilai dalam diri individu, seperti budi pekerti, moral, watak, dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam memberikan keputusan baik atau buruk, memelihara kebaikan, mewujudkan dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Setiawati, 2017). Selain itu, konsep dari pendidikan karakter ini bersumber dari karakter dasar yang dimiliki oleh manusia, yang berlandaskan kepada nilai moral universal (bersifat absolut) sebagai perwujudan nilai-nilai agama yang juga dikenal dengan istilah *the golden rule*. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Adapun beberapa bentuk dari nilai karakter dasar ini menurut ahli psikologi adalah nilai akan kecintaan kepada Allah dan ciptaan-Nya (alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah, keadilan kepemimpinan, baik, rendah hati, toleransi, cinta damai dan cinta persatuan (Setiawati, 2017).

Terminologi pendidikan karakter ini sudah mulai dikenal semenjak tahun 1900. Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku yang berudul *The Retrun of Character Education*. Kemudian disusul dengan buku lainnya, *Education for Character: How Our School Can Teach Respect and Respondsibility*. Melalui buku-buku tersebut, Lickona menyadarkan dunia khususnya dunia barat akan pendidikan karakter. Lickona (1991) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya.

Frye (2002) kemudian juga memaparkan bahwa pendidikan karakter

harus menjadi gerakan nasional yang menjadikan sekolah sebagai agen untuk membangun karakter siswa melalui pembelajaran dan pemodelan. Melalui pendidikan karakter, sekolah harus berpotensi untuk membawa peserta didik memiliki nilai-nilai karakter mulia seperti hormat dan peduli pada orang lain, tanggung jawab, memiliki integritas, dan disiplin. Di sisi lain pendidikan karakter juga harus mampu menjauhkan peserta didik dari sikap dan perilaku yang tercela. Pendidikan karakter tidak sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik, sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Jika demikian, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan norma atau pendidikan moral. Pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, menjaga, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia (Frye, 2002).

Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter perlu untuk dipupuk sedari awal untuk membantu perkembangan jiwa anak-anak, dari sifat alaminya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Penekanan dan pemberdayaan penerapan pendidikan karakter di berbagai lembaga pendidikan, baik informal, formal maupun nonformal diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan serta permasalahan kompleks yang dialami bangsa Indonesia. Sehingga, pendidikan karakter sendiri harus diberikan kepada generasi muda agar dapat menghasilkan generasi yang kuat dan tidak melanggar norma-norma sosial yang telah diterapkan.

Pentingnya pendidikan karakter

Saat ini merupakan era global dan untuk menghadapi era tersebut, sangat diperlukan insan yang berkarakter, berkompeten, dan unggul. Dalam hal ini, pendidikan merupakan salah satu upaya yang paling strategis untuk dapat mewujudkannya. Sistem pendidikan nasional dalam batas tertentu telah menghasilkan insan yang berkualitas, misalnya sejumlah orang yang dipercaya untuk menduduki posisi strategis di tiap-tiap sektor dan di tengah-tengah masyarakat. Namun, patut diakui bahwa masih banyak pernyataan yang mengindikasikan sistem pendidikan kita ikut andil akan rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan masih merebaknya dekadensi moral yang berdampak terhadap perpecahan bangsa.

Di sinilah akan dijelaskan bagaimana pentingnya peran pendidikan karakter sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki kondisi moral bangsa ini. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter

yang meliputi pembentukan perilaku, pengayaan nilai keteladanan, membentuk komponen pengetahuan, kesadaran serta kemauan bagi individu untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut bagi dirinya sendiri, lingkungan sekitar maupun bagi bangsanya. Selain itu, pendidikan karakter juga berperan untuk membentuk kecerdasan emosional dan juga membangun etika sosial yang nantinya berperan dalam pengimplementasian pada kehidupan sosial di masyarakat (Siswinarti, 2017).

Selain itu, menurut Rosyada (2014), kehadiran pendidikan karakter dengan mengusung nilai-nilai kebhinekaan bangsa Indonesia juga dapat menjadi titik balik dalam memperbaiki moral bangsa. Menanamkan kepada para peserta didik akan karakter kebersatuan dalam bangsa dapat menjadi solusi terbaik saat ini untuk mencegah terjadinya disintegrasi yang tentu saja hal tersebut menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat mencoreng moral bangsa Indonesia. Proses pendidikan karakter ini diharapkan dapat berlangsung sepanjang hayat dan terus dikembangkan secara terpadu sesuai dengan latar belakang sosial budaya dengan menempatkan nilai moral sebagai bagian utamanya.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan saat ini adalah pendidikan di Indonesia cenderung lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan peserta didik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Suyitno (2012) bahwa jika peserta didik sudah mencapai nilai atau lulus dengan nilai akademik memadai/di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), pendidikan dianggap sudah berhasil. Sedangkan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral bangsa di dalam diri peserta didik semakin terpinggirkan. Rapuhnya karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa inilah yang kemudian dikhawatirkan dapat membawa kemunduran moral bangsa dan mengusung terjadinya disintegrasi bangsa. Padahal, kehidupan masyarakat yang memiliki karakter yang kuat akan semakin memperkuat eksistensi kebersatuan suatu bangsa dan negara.

Pengembangan pendidikan karakter berbasis keutuhan bangsa perlu menjadi program nasional. Pembentukan karakter bangsa sejatinya memang tidak diharuskan untuk menjadi bagian dari kurikulum pendidikan pada peserta didik, akan tetapi diharapkan kesadaran dari para pendidik untuk dapat menanamkan nilai-nilai yang membentuk karakter tersebut selama proses pembelajaran berlangsung (Suyitno, 2012). Nilai-nilai yang ditumbuh-kembangkan dalam diri peserta didik dapat berupa nilai-nilai pluralisme, para peserta didik diajarkan bahwa perbedaan kultur bukan merupakan musuh yang harus ditentang, akan tetapi merupakan kekuatan untuk dapat membangun bangsa ini menjadi bangsa yang terintegrasi dengan baik. Selain itu, menanamkan nilai-nilai moral dasar seperti kejujuran, kebersamaan, toleransi, tanggung jawab, dan peduli kepada orang lain juga tidak boleh luput dari pengembangan pendidikan karakter ini

(Tan, 2006).

Lebih lanjut, Franz Magnis-Suseno, dalam acara Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (dalam Suyitno, 2012) mengatakan bahwa pada era sekarang ini yang dibutuhkan bukan hanya generasi muda yang berkarakter kuat,tetapi juga benar, positif, dan konstruktif. Namun, untuk membentuk peserta didik yang berkarakter kuat, tidak boleh ada feodalisme para pendidik. Jika pendidik membuat peserta didik menjadi "manutan" (*obedient*) dengan nilai-nilai sosial, tenggang rasa, dan tidak dibenarkan untuk mengeluarkan opini mereka, maka karakter peserta didik tidak akan berkembang (Suyitno, 2012). Oleh sebab itu, dalam proses pendidikan, sebaiknya peserta didik dipandang sebagai individu yang memang memiliki potensi moral, mental, fisik, sosial, dan emosional di dalam diri mereka masing-masing. Hal ini bertujuan agar pembentukan karakter di dalam diri peserta didik dapat muncul tanpa adanya rasa takut ataupun keterpaksaan untuk memenuhi keinginan dari orang lain, melainkan karakter tersebut memang muncul atas dasar kesadaran dari diri mereka sendiri. Sehingga, pembentukan kurikulum pendidikan sebaiknya tidak hanya berupa kurikulum yang berorientasi pada peserta didik, masyarakat, atau pengetahuan dan teknologi, tetapi merupakan kurikulum yang dapat bersifat komprehensif dengan tetap mengimbangi nilai kemanusiaan, sosial, pengetahuan atau teknologi dan moral (*student, society, technology, and spiritual oriented curriculum*) (Suyitno, 2012).

Dari berbagai penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bagaimana pentingnya pendidikan karakter tersebut untuk ditanamkan kepada masyarakat terutama generasi muda bangsa sebagai pedoman dalam membangun bangsa yang bermoral dan bermartabat. Pendidikan karakter diharapkan dapat menciptakan integrasi sosial yang nantinya berimplikasi terhadap masa depan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera.

Proses pembentukan karakter berdasarkan sudut pandang psikologi

Konsep perkembangan moral yang dikemukakan Piaget dan Kohlberg tentunya menjadi penjelasan yang relevan terkait proses pembentukan karakter. Terlepas dari berbagai catatan atas teori dari keduanya, teori ini menyatakan bahwa terdapat tahapan-tahapan tertentu yang dialami seseorang dalam pembentukan karakter. Dari kedua teori tersebut, dapat diketahui bahwa figur otoritas (seperti orang tua dan guru), menduduki peran penting dalam pembentukan pemahaman moral seseorang. Seiring dengan terbentuknya pemahaman moral ini, maka secara tidak langsung di dalam diri seseorang tersebut akan terbentuk suatu karakter yang dapat mempengaruhi cara berpikir serta pemahaman mereka

dalam menjalani kehidupan sehari-harinya (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). Sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan karakter dapat terjadi jika pemahaman moral telah ditanamkan terlebih dahulu kepada anak.

Membahas mengenai pembentukan pemahaman moral, tentu tidak akan terlepas dari berbagai tahapan perkembangan moral tersebut. Tahapan perkembangan moral memang dapat membantu untuk menjelaskan metode serta figur penting yang berpengaruh dalam pembentukan karakter. Kohlberg jauh-jauh hari telah menyatakan bahwa perkembangan moral seseorang akan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahapan moralitas pra-konvensional. Pada tahapan ini anak bertindak di bawah kontrol eksternal. Mereka akan mematuhi suatu aturan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah, atau bertindak karena kepentingan sendiri. Tingkatan ini biasanya terjadi pada usia 4-10 tahun. Kedua, tahapan moralitas konvensional yaitu anak telah mampu menginternalisasi figur otoritas. Biasanya anak menerapkan standar-standar tertentu, namun standar-standar tersebut ditetapkan oleh pihak lain misalnya orangtua, pemerintah. Mereka akan dapat memelihara keteraturan sosial, menyenangkan orang lain dan sebagainya. Ketiga, tahapan moralitas pasca-konvensional yaitu anak mengenali konflik antara standar moral dan membuat penilaian mereka sendiri yang berdasarkan prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan (Papalia & Feldman, 2015; Santrock, 2012). Semua tahapan-tahapan ini bersifat universal. Perkembangan dari satu tahap ke tahap berikutnya didorong oleh kesempatan anak untuk melihat perspektif orang lain serta konflik yang dialami antara tahap pemikiran moralnya yang telah dicapai saat ini dengan penalaran di tahap yang lebih tinggi. Sehingga, perkembangan moral ini akan sangat berkolerasi dengan bagaimana anak menyeimbangkan dan membangun kehidupan mereka dalam suatu kelompok tertentu.

Terkait dengan penjelasan sebelumnya, apabila perkembangan moral dikaitkan dengan pembentukan karakter bangsa, konsekuensi dalam pembentukan karakter tersebut adalah diperlukannya *role model* yang dapat dijadikan sebagai acuan standar nilai-nilai moral tertentu yang jelas. Selain itu, *role model* yang diperkenalkan pada individu terutama generasi penerus bangsa tersebut harus bersifat konkret agar menjadi titik acuan yang lebih jelas. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah *role model* yang digunakan haruslah sesuai dengan preferensi perkembangan generasi pada suatu jaman tertentu (Adi, Dwiatmoko , Istono, & Maryarsanto, 2010).

Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, orangtua dan guru merupakan *role model* utama bagi anak. Meskipun demikian, *role model* juga dapat bersumber dari teman sebaya, orang dewasa lainnya, bahkan tokoh idola (terutama bagi kalangan remaja). Pemilihan lingkungan bergaul, bahan bacaan

dan paparan pada hal-hal baru menjadi faktor penting dari proses pembentukan karakter ini.

Kemampuan orang tua membentuk lingkungan yang menghargai seseorang apa adanya merupakan faktor penting. Anak yang tumbuh dalam pengasuhan keluarga yang menekankan pada karakter yang baik, akan menjadi pribadi yang berkarakter. Keluarga merupakan lingkungan awal dalam proses pembentukan karakter seseorang. Pembelajaran pertama anak mengenai dunia dan lingkungan sekitar bersumber dari orangtuanya. Bagaimana perilaku serta sikap yang ditunjukkan oleh orang tua, terutama ibu di awal usianya sangat penting bagi perkembangan seseorang. Jika perlakuan yang ditunjukkan oleh ibu bersifat positif maka kesan anak terhadap dunia dan lingkungan sekitarnya tentu akan menjadi positif juga. Jika anak mempunyai sikap serta pandangan yang positif terhadap dunia, maka anak akan mampu mengeksplorasi lingkungan secara optimal, sehingga perkembangan perilaku, emosi, sosial, kognitif dan kepribadian anak akan optimal pula. (Stams, Juffer, & Lizendoorn, 2002).

Prinsip yang sama berlaku pula pada lingkungan sosial lainnya seperti sekolah, komunitas atau *peer group*, dan masyarakat. Misalnya, di sekolah guru dapat mengembangkan karakter anak dengan cara memberikan ruang lingkup yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran agar karakter anak tersebut dapat terbangun melalui kegiatan pembelajaran. Guru dapat memberikan bimbingan dan pemahaman tentang nilai-nilai moral yang baik atau nilai-nilai moral yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat kepada anak sehingga anak dapat menerapkan prinsip-prinsip karakter yang sesuai dengan etika moral yang berlaku dalam masyarakat.

Lebih lanjut, apa yang dikatakan sebagai ciri pribadi bangsa tidak terlalu jauh berbeda dengan "the person of tomorrow" yang disampaikan oleh Carl Rogers yakni, mudah beradaptasi, menerima diri apa adanya, hidup di masa sekarang, percaya pada kemampuan berelasi, sadar akan arti dan tujuan tindakan, berpikir positif terhadap orang lain, dan menikmati hidup (Feist & Feist, 2009). Pendidikan karakter perlu proses, contoh teladan, pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta didik baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Akhwan, 2014).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan karakter bangsa adalah suatu proses yang integratif dan berlangsung terus-menerus, yang dimulai sejak usia dini sampai akhir hayat seseorang. Pendidikan karakter mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia dan dapat tercapai dengan baik apabila ada kerjasama yang berkesinambungan antara keluarga dengan lingkungan sekitar seperti guru dan masyarakat.

Kesimpulan

Pendidikan karakter adalah salah satu jalan atau upaya yang penting untuk dilakukan dalam sistem pendidikan kita, dalam rangka mencetak generasi penerus bangsa, yang tidak hanya cakap serta unggul dalam keilmuannya, melainkan juga memiliki karakter/watak yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan moral bangsa Indonesia. Pembentukan karakter pada generasi penerus bangsa ini dilakukan dengan harapan terbentuknya bangsa yang bermoral dan bermartabat serta meminimalisir berbagai permasalahan seperti perpecahan atau disintegrasi bangsa yang seringkali terjadi hingga saat ini.

Pendidikan karakter di Indonesia dalam tinjauan psikologis dapat diartikan sebagai pendidikan karakter yang didasarkan atau bertolak dari keadaan psikologis manusia yang hidup di era globalisasi dan kehidupan masyarakat yang demokratis. Untuk mendukung terlaksananya paradigma baru pendidikan karakter tersebut perlu dirumuskan juga visi, misi, tujuan, arahan, kurikulum, proses belajar mengajar, kriteria guru, sarana dan prasarana serta berbagai komponen pendidikan karakter lainnya agar sesuai dengan berbagai tantangan yang terjadi di era globalisasi yang sedang kita hadapi saat ini.

Tidak hanya sekolah yang berfungsi sebagai tempat atau sarana untuk menanamkan nilai-nilai karakter bagi anak, melainkan semua pihak, termasuk keluarga dan masyarakat tempat di mana seorang anak lebih banyak menghabiskan waktunya. Apabila ketiga pusat pendidikan tersebut telah mampu menjalankan perannya masing-masing, maka tidak mustahil akan terlahir seorang generasi muda yang cerdas dan berkarakter, yang akhirnya dapat membangun moral bangsa Indonesia.

Berdasarkan paparan sebelumnya, penulis mengajukan beberapa saran praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Saran praktis
   a. Orangtua dituntut menjadi peran utama dalam mendidik anak-anaknya, karena keluarga merupakan dasar dari pembentukan karakter anak. Orangtua adalah orang dewasa terdekat, yang pertama kali mengajarkan segala sesuatu, termasuk mengenalkan nilai-nilai moral kepada anak.
   b. Institusi sekolah termasuk guru diharapkan menyadari peran dan fungsinya yang sangat strategis dalam proses pembentukan karakter. Guru harus mampu menerapkan 4 peran dalam mendidik siswa, yaitu: pengajar, pengasuh, pendidik dan pembimbing bagi para peserta didik.

2. Saran teoritis

   Bagi peneliti yang tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait pendidikan karakter untuk membangun bangsa ini, diharapkan dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan mengaitkan pendidikan karakter tersebut dengan variabel-variabel terkait agar dapat diketahui secara lebih konkret pengaruh dari pendidikan karakter ini teradap pembangunan bangsa yang tidak hanya dapat terlihat secara teoritis namun juga dapat dibuktikan secara empiris.

Daftar Pustaka

Adi, K., Dwiatmoko, A., Istono, M., Nugraha, S.T., & Maryarsanto, E. (2010). *Model pendidikan karakter di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*. Yogyakarta: USD.

Akhwan, M. (2014). Pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya dalam pembelajaran di sekolah/madrasah. *Jurnal El-Tarbawi*, 7(1), 61-67.

Berkowitz, M., & Bier, Melinda. (2005). *What works in character education : A research driven guide for educators*. Washington: CEP.

Effendi, T.,N. (2013). Keterkaitan nilai budaya masyarakat dengan perubahan sosial saat ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 1-18.

Feist, J., & Feist, G. (2009). *Teori kepribadian*. Jilid 1. Jakarta: Salemba Humanika

Frye, M. (2002).*Character education: Informational handbook and guide for support and implementation of the Student Citizent Act of 2001*. North Carolina: Public Schools of North Carolina.

Lickona, T. (1991). *Educating for character: how our school can teach respect and responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.

Mutaqqin, M.F., Raharjo, T.J., & Masturi, M. (2018). The implementation main values of character education reinforcement in elementary school. *Journal of primary education*, 7(1), 1-10.

Pala, A. (2011). The need for character education. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, 3(2), 23-31.

Papalia, D.E., & Feldman, R.D. (2015). *Menyelami perkembangan manusia: Experience human development* (Edisi Keduabelas). Buku 2. (F. Herarti, Trans.). Jakarta: Salemba Humanika.

Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). *Human development: Perkembangan manusia* (Edisi 10). Buku 1. (B. Marswendy, Trans.). Jakarta: Salemba Humanika

Pranowo, D. (2009). Implementasi pendidikan karakter kepedulian dan kerjasama dengan metode bermain peran. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1-19.

Rosyada, D. (2014). Pendidikan multikultural di Indonesia sebuah pandangan konsepsional. *Jurnal Sosio Didaktika*, 1(1), 1-12.

Ryan, B. (1999). Building character in school. *Journal of Character Education*, 4(3), 1-12.

Santrock, J.W. (2012). *Life-span development: Perkembangan masa-hidup* (Edisi Ketigabelas). Jilid 1. (B. Widyasinta, Trans.). Jakarta: Erlangga.

Setiawati, N.A. (2017). Pendidikan karakter sebagai pilar pembentukan karakter bangsa. *Proseding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 1(1), 348-352.

Siswinarti, P.R. (2017). Pentingnya pendidikan karakter untuk membangun bangsa beradab. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1): 1-11.

Stams, G. J., Juffer, F., Ijzendoorn, M. H. (2002). Maternal sensitivity, infant attachment, and temperament in early childhood predict adjustment in middle childhood: The case of adopted children and their biologically unrelated parents. *Developmental Psychology*, 38(5), 806-821.

Suyitno, I. (2012). Pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa berwawasan kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1),1-10.

Tan, S. (2006). Pendidikan multikulturalisme: Solusi ancaman disintegrasi bangsa. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, 2(1), 32-34.

Fitria Eka Annisa & Indah Andika Octavia. ***Character education as a pillar to build the nation's moral.*** *As a developing country, Indonesia is showing an alarming indication of character crisis. Demoralization has begun to penetrate into the education that has not given room to behave honestly. The learning process tends to teach character and morality as knowledge and does not prepare young people to respond and face life contradictions. The various problems currently being faced by the Indonesian people may indicate how weak education in carrying out its function as an institution that is also responsible for improving the morality. The young people seem less competence in discernment process so they often involved in bad actions or conflicts due to many misleading messages in social media. Therefore, this paper aims to provide a conceptual description of character education by revitalizing parents' and teachers' role.*

Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan di PAUD dan Integrasi Bangsa

Desni Yuniarni

Pengantar

Anak usia dini, berada pada fase penting dalam tumbuh kembang dan pembentukan kepribadiannya. Pada fase ini, proses pembentukan karakter dan identitas sudah dimulai. Oleh karena itu, sejak usia dini anak perlu dikenalkan dan diajari untuk mencintai identitas budayanya dan menghormati budaya orang lain. Hal ini sangat penting, karena anak bertumbuh dan berkembang di lingkungan yang penuh dengan keragaman budaya.

Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan kekayaan yang tak ternilai yang perlu dijaga kelestariannya. Namun di sisi lain, hal tersebut dapat memicu konflik antar suku. Oleh karena itu sejak dini perlu ditananamkan pada anak, nilai-nilai multikultural dalam bentuk model pembelajaran berwawasan kebangsaan. Melalui lembaga PAUD, anak-anak dapat distimulasi agar dapat berkembang secara optimal dan sekaligus menanamkan nilai-nilai menghargai dan menghormati kemajemukan. Mereka dapat diajarkan bahwa meskipun mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, namun mereka semua adalah rakyat Indonesia. Anak dapat belajar konsep-konsep menghargai kemajemukan dan cinta tanah air yang terintegrasi dalam metode-metode pembelajaran di PAUD yang menyenangkan, dimana anak dapat bermain seraya belajar, tanpa adanya unsur paksaan atau indoktrinasi yang tidak sesuai dengan usia anak.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Peran PAUD sangat penting bagi perkembangan anak usia dini. Pentingnya PAUD diperkuat oleh berbagai penelitian terbaru tentang otak. Pada saat bayi dilahirkan ia sudah dibekali struktur otak yang lengkap, namun baru mencapai kematangannya setelah berada di luar kandungan. Bayi yang baru lahir memiliki lebih dari 100 milyar neuron dan sekitar satu trilyun sel *glia* yang berfungsi sebagai perekat serta *synapse* (cabang-cabang neuron) yang akan membentuk bertrilyun-trilyun sambungan antar neuron yang jumlahnya melebihi kebutuhan. *Synapse* ini akan bekerja sampai usia 5-6 tahun. Banyaknya jumlah sambungan tersebut mempengaruhi pembentukan kemampuan otak sepanjang hidupnya. Pertumbuhan jumlah jaringan otak dipengaruhi oleh

pengalaman yang didapat anak pada awal-awal tahun kehidupannya, terutama pengalaman yang menyenangkan. Pada fase perkembangan ini seorang anak memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan berbagai aspek dirinya yang menjadi landasan untuk masuk ke jenjang Pendidikan dasar nantinya.

PAUD adalah investasi yang sangat besar bagi keluarga dan juga bangsa Indonesia. Dengan adanya PAUD diharapkan anak-anak usia dini yang masih dalam fase *golden age* ini dapat tampil sebagai tunas-tunas bangsa terbaik, cerdas dan dapat menjadi generasi emas yang produktif dan kompetitif secara global sekaligus berakhlak mulia, berkarakter dan dapat menjaga keutuhan dan integrasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Keberadaan PAUD didasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini, pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi "Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar." Selanjutnya pada Bab I pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, USPN, 2004).

Yuliani Nurani Sujiono (2013) menyebutkan bahwa secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus kegiatan pendidikan bertujuan agar:

1. Anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. Anak usia dini dikenalkan kepada Tuhannya, melalui kegiatan ibadah dan mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Tujuan ini sangat selaras dengan harapan untuk menanamkan nilai-nilai multicultural pada anak sejak dini. Melalui PAUD, anak akan mengenal teman-temannya yang berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Melalui PAUD, anak diajarkan untuk menyayangi semua teman-temannya meskipun berasal dari budaya yang berbeda dengannya. Anak juga diajari bahwa menyayangi semua teman meskipun berbeda budaya juga merupakan wujud kegiatan beribadah kepada Tuhannya, karena Tuhan menyuruh kita untuk menyayangi sesama manusia.
2. Anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya termasuk mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus dan gerakan kasar, serta menerima rangsangan sensorik. Di PAUD anak dapat diajari berbagai tarian khas daerah tertentu,

sehingga anak mengenal berbagai jenis tarian khas yang ada dan mencintai keanekaragaman budayanya. Melalui tarian daerah, anak dapat distimulasi gerak tubuhnya dan juga mencintai keanekaragaman budaya bangsanya.

3. Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif, yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Melalui PAUD anak akan belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya meskipun mereka berbeda latar belakang budayanya. Anak akan belajar menghargai dan menghormati temannya yang memiliki dialek bahasa yang berbeda dengannya. Anak menyadari bahwa dialek bahasa berbeda-beda sesuai dengan latar belakang etnik dan lingkungan tempat tinggal. Anak juga belajar bahwa perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Anak diajari untuk merasa bangga dengan keanekaragaman bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
4. Anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab akibat. Guru di PAUD dapat memberikan penjelasan bahwa meskipun mereka berbeda-beda latar belakang budaya dan sukunya, tetapi mereka adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Anak bisa diajarkan untuk berpikir logis dan kritis ketika terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi sebagai akibat dari perbedaan latar belakang budaya.
5. Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat dan menghargai keragaman sosial dan budaya serta mampu mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri dan rasa memiliki. Anak mengerti dimana ia tinggal dan bagaimana harus berperilaku dalam lingkungan sosialnya, contohnya dalam perilakunya sehari-hari, anak memahami perbedaan latar belakang budaya yang dimiliki oleh teman-temannya dan menghargai perbedaan tersebut. Anak juga dapat berperilaku sopan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di lingkungannya. Para guru di PAUD dapat mengenalkan anak berbagai adat istiadat dan budaya di Indonesia. Contohnya, pada saat merayakan hari jadi Kota Pontianak, maka seluruh guru PAUD dan anak-anak muridnya mengenakan baju khas suku Melayu, yaitu baju kurung untuk perempuan dan baju telok belanga untuk laki-laki. Meskipun terdapat anak PAUD yang bukan berasal dari suku Melayu, namun ia turut mengenakan pakaian khas suku Melayu tersebut. Dengan begitu, anak mengenal salah satu budaya suku Melayu melalui pakaian khasnya dan menghargai budaya tersebut.
6. Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasil karya yang kreatif. Anak dapat

diajak bernyanyi, menari dan berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengenalan anak terhadap musik dan kreativitasnya. Di PAUD, anak juga dapat dikenalkan dengan berbagai lagu daerah, sehingga menambah kebanggaan mereka terhadap keragaman seni dan budaya bangsanya.

Penanaman Nilai-nilai Multikultural pada Anak Usia Dini melalui Metode Pembelajaran di PAUD

Indonesia merupakan negara multikultural. Multikulturalisme merupakan konsep dalam komunitas yang mengandung konteks kebangsaan yang dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, ras, suku, etnis, dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam (multikultural). Bangsa yang multikultural adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*)-nya dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip ko-eksistensi yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain (Mahfud, 2006).

Penanaman nilai-nilai mengenai multikultural tersebut diberikan melalui model pembelajaran berwawasan kebangsaan kepada anak usia di PAUD. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah wawasan nusantara. Wawasan nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, cara bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis, sosiokultural, dengan aspek astagatra (kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan serta ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam) (Sunarso, Sartono, Dwikusrahmadi, & Sutarini, 2008).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai multikultural melalui model pembelajaran berwawasan kebangsaan pada anak usia dini di PAUD adalah penanaman nilai-nilai penghargaan dan penghormatan terhadap keberagaman melalui suatu model pembelajaran yang berlandaskan pada cara pandang dan cara bersikap sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman dalam bentuk satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Dengan adanya model pembelajaran ini diharapkan generasi muda penerus bangsa dapat tetap menjaga integrasi bangsa Indonesia di masa yang mendatang.

Beberapa pertimbangan dalam memberikan model pembelajaran Wawasan Kebangsaan pada anak usia dini di PAUD menurut Purwastuti dan Efiananingrum (2010) adalah:

1. Usia dini merupakan "masa keemasan" dalam pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seorang anak. Dalam usia emas perkembangannya tersebut, anak akan dapat dengan mudah diajari konsep-konsep mengenai wawasan

kebangsaan, seperti nilai-nilai persatuan-kesatuan, toleransi, menghargai perbedaan, penghargaan terhadap hak azasi manusia, tolong-menolong, cinta tanah air, bela negara, gotong-royong, musyawarah, mencintai lingkungan, yang diberikan dalam bentuk pembelajaran sambil bermain sesuai dengan usia anak.

2. Dunia anak adalah dunia bermain. Bermain untuk anak sesungguhnya sebuah proses belajar. Pembelajaran yang diberikan dalam suasana bermain yang menyenangkan akan memberikan pembelajaran yang positif bagi anak dalam memahami konsep mengenai wawasan kebangsaan, tanpa adanya paksaan dan indoktrinisasi. Sambil bermain dapat ditanamkan konsep pada anak tentang toleransi dan menghargai perbedaan demi kesatuan dan persatuan bangsa.
3. Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 3) menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional ini seharusnya diarahkan sejak dini melalui pendidikan anak usia dini, yang dapat menjadikannya generasi muda yang nantinya siap bersaing dengan negara lain, namun tetap memegang prinsip untuk memegang kedaulatan bangsa Indonesia.
4. Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III, Pasal 50 (LPA, 2006) menegaskan bahwa pendidikan diarahkan pada hal-hal berikut ini: a) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; b) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; c) Pengembangan rasa hormat terhadap orang, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri; d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan e) Pengembangan rasa hormat dan cinta lingkungan hidupnya.

Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai multikultural melalui model pembelajaran berwawasan kebangsaan sangat penting diberikan kepada anak usia dini melalui PAUD di Indonesia, agar anak terbiasa dengan perbedaan, menghargai perbedaan, bertenggang rasa dan memiliki rasa kebersamaan sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai positif tersebut dapat diintegrasikan dalam metode-metode yang digunakan dalam pengajaran di PAUD yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini.

Metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran anak usia dini, diantaranya adalah metode bermain. Berkembangnya berbagai kemampuan

pada anak adalah sebuah proses. Hal ini dapat didorong melalui rangsangan/ stimulasi yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini, yaitu melalui kegiatan bermain. Bermain adalah pekerjaan anak (Shoba Dewey Chugani, 2009). Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati (dengan menggunakan alat-alat tertentu maupun tanpa alat apapun). Sementara yang dimaksud dengan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu (Suyadi: 2009). Hal ini sejalan dengan pendapat Irawati (dalam Y.N. Sujiono & B. Sujiono, 2010) bahwa bermain adalah kebutuhan semua anak, terlebih lagi bagi anak-anak di rentang usia 3-6 tahun. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan atau tanpa menggunakan alat yang menghasilkan pengertian dan memberikan informasi, memberi kesenangan dan mengembangkan imajinasi anak secara spontan dan tanpa beban.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondrat anak adalah bermain, setiap anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan bermain. Bermain sangat penting bagi anak usia dini, karena dalam bermain, semua aspek perkembangannya terstimulasi dengan baik. Anak dapat mengembangkan seluruh aspek dirinya melalui berbagai macam kegiatan bermain. Oleh karena itu, dalam konsep pembelajaran anak usia dini, dikenal istilah bermain seraya belajar.

Dalam bukunya, *Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak*, Moeslichatoen (2004), menyebutkan terdapat beberapa nilai bermain bagi anak yang terkait dengan penanaman nilai-nilai multikultural bagi anak usia dini, yaitu:

1. Bermain memberi kebebasan anak untuk bertindak. Kemampuan berpikir anak terstimulasi pada saat bermain. Contohnya ketika bermain, peran guru yang memiliki siswa dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, adalah melatih anak untuk menghargai perbedaan budaya yang ada tersebut dengan cara bekerjasama dalam melalukan kegiatan tertentu dalam satu kelompok, misalnya saling berbagi pensil warna ketika menggambar.
2. Bermain memberikan dunia khayal yang dapat dikuasai. Bermain dalam dunia khayal untuk anak usia dini, juga membutuhkan kemampuan berpikir. Ketika seorang anak berkhayal menjadi seorang dokter, ia bisa diminta untuk mengobati semua orang, tanpa membedakan latar belakang budaya atau suku bangsanya.
3. Bermain merupakan cara anak untuk menyelidiki sesuatu. Bermain dapat bermanfaat bagi anak untuk menyelidiki sesuatu. Anak dapat diajari untuk mencari tahu mengenai adat istiadat budaya tertentu di setiap buku cerita yang berbeda-beda. Dengan melihat buku cerita tersebut, anak akan mencari

tahu tentang adat istiadat tersebut dan dapat menceritakannya di kelas secara bergantian, sehingga teman-teman lainnya dapat mengetahui mengenai adat istiadat yang berbeda-beda dari setiap buku yang dilihatnya tersebut.

4. Bermain merupakan cara dinamis untuk belajar. Sesuai dengan konsep pembelajaran anak usia dini, belajar seraya bermain, maka pada saat bermain anak akan belajar berbagai jenis budaya yang ada di daerahnya. Dengan begitu, anak bisa mengenal berbagai budaya dan memahaminya sebagai kekayaan budaya yang membanggakan dan dijaga kelestariannya.
5. Bermain menjernihkan pertimbangan anak. Misalnya, ketika anak bermain dengan temannya yang berbeda logat bahasanya, kemudian terjadi perselisihan, guru akan mengajari anak bahwa perselisihan tersebut dikarenakan perbedaan dalam memahami bahasa tertentu, dan hal tersebut harus dapat dimaklumi karena meskipun berbeda namun sebenarnya mereka memiliki maksud yang sama.

Selain bermain, metode kedua adalah metode karyawisata. Karyawisata adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, sehingga anak dapat melihat langsung berbagai hal, baik itu yang berkaitan dengan mahkluk hidup seperti tanaman maupun binatang ataupun mengujungi situs budaya tertentu secara langsung dan menyenangkan. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak karena dapat membangkitkan keingintahuan anak mengenai berbagai objek yang ada di sekitarnya. Melalui karyawisata, minat anak untuk mengetahui banyak hal akan bertambah. Disinilah guru atau orang tua berperan untuk memfasilitasi rasa ingin tahu anak menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya adalah kegiatan karyawisata di museum budaya. Di museum tersebut, anak bisa belajar adat istiadat dan budaya dari berbagai daerah. Guru atau orangtua dapat mengenalkan berbagai adat dan budaya tersebut, sehingga selain dapat menambah pengetahuan, bisa juga menumbuhkan rasa cinta anak terhadap keanekaragaman budaya.

Metode selanjutnya adalah metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap artinya berbicara dengan orang lain mengenai topik tertentu. Dengan bercakap-cakap, anak mengembangkan kemampuannya dalam berbahasa, baik kemampuan reseptif maupun ekspresifnya. Pemberian metode bercakap-cakap akan menambah pengetahuan anak. Misalnya, guru bisa mengajak anak bercakap-cakap tentang salah satu jenis makanan tradisional di suatu daerah. Selain memberikan pengenalan terhadap jenis makanan tradisional, guru juga dapat memberikan pengetahuan pada anak mengenai bahan makanan apa saja yang terkandung di dalamnya, bagaimana cara membuatnya, apa khasiatnya, dan lain-lain. Pengenalan makanan tradisional, akan membentuk pengetahuan tentang aneka budaya melalui makanan dan akan menumbuhkan sikap

menyayangi budayanya.

Metode berikutnya adalah metode bercerita. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman anak dapat dilakukan melalui metode cerita. Pemberian metode bercerita pada anak usia dini harus dibarengi dengan pengetahuan guru atau orang tua mengenai teknik bercerita yang baik, sehingga anak tertarik dan menyukai cerita tersebut. Menurut Yonny dan Yunus (2011), teknik bercerita memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat menanamkan nilai-nilai akhlak dan kepribadian, memotivasi untuk tangguh dan berprestasi baik, serta merangsang imajinasi anak. Misalnya ketika guru bercerita mengenai raja di kerajaan Pontianak, ia dapat merangsang imajinasi anak dengan meminta anak membayangkan seperti apa bentuk istana di kerajaannya, pakaian yang dikenakan, kegiatan yang dilakukan raja dan lainnya, yang kesemuanya itu dapat menambah pengetahuan anak mengenai budaya di Kalimantan. Nilai-nilai multikultural juga dapat ditanamkan kepada anak melalui cerita tentang perilaku para tokoh utama yang menghargai keragaman budaya di daerahnya. Metode bercerita ini dirasa efektik, karena anak usia dini masih berada pada tahap meniru, sehingga diharapkan mereka akan meniru kisah atau tokoh utama yang menjadi topik cerita. Apalagi jika tokoh yang diceritakan merupakan tokoh yang diidolakan atau menjadi panutan anak. Melalui cerita yang mengasyikkan dari guru, yang menggambarkan kehebatan sang raja, akan membuat anak tertarik dan menyukai tokoh raja sehingga diharapkan akan meniru perilaku raja yang baik, yang menghargai perbedaan budaya yang dimiliki rakyatnya.

Metode kelima adalah metode demonstrasi. Metode ini memilik banyak manfaat yang berkaitan dengan kemampuan berpikir anak. Manfaat metode demonstrasi yang pertama adalah dapat dipergunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak, sedangkan manfaat kedua adalah dapat membantu meningkatkan daya pikir anak terutama dalam hal peningkatan kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen dan berpikir evaluatif (Moeslichatoen, 2004). Misalnya, metode demonstrasi bisa digunakan guru dalam membuat perahu dari kertas atau media lainnya yang tujuannya mengenalkan keragaman jenis transportasi di berbagai budaya. Perahu adalah salah satu alat transportasi yang digunakan masyarakat melayu Indonesia pada jaman dulu. Penjelasan mengenai perahu sebagai alat transportasi tradisional masyarakat di Indonesia dapat menambah pengetahuan anak mengenai alat transportasi. Selain itu guru dapat mendemonstrasikan cara membuat perahu dari bahan alam, misalnya pelepah pisang. Demontrasi membuat perahu akan membuat anak memahami letak geografis daerahnya, dimana Indonesia dikenal dengan istilah seribu sungai, dikarenakan banyaknya sungai yang ada di daerah ini. Pembuatan perahu dapat dilakukan di luar kelas, contohnya ketika anak

berkaryawisata di danau atau sungai. Kegiatan belajar di luar kelas dapat memberi semangat kepada anak dalam proses pembelajarannya. Menurut Vera (2012), kegiatan belajar di luar kelas memiliki arti penting, yaitu dapat beradaptasi dengan lingkungan, alam sekitar serta kehidupan masyarakat, dapat mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitar, serta memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam sekitar.

Metode selanjutnya adalah metode proyek. Metode proyek sangat tepat untuk menstimulasi kemampuan berpikir anak. Guru haruslah inovatif dan kreatif dalam memilih jenis proyek yang akan dikerjakan anak. Pembelajaran yang inovatif adalah pembelajaran dengan memperkenalkan sesuatu yang berbeda yang belum dialami sebelumnya. Sedangkan pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang mengajak untuk mampu mengeluarkan daya pikir dan daya karsa guna menciptakan sesuatu di luar pemikiran orang kebanyakan (Faidi, 2013). Salah satu contoh metode proyek adalah pembuatan makanan tradisional, misalnya membuat makanan bingke. Guru bersama-sama anak akan mempersiapkan bahan makanan, menimbang untuk menetapkan porsi bahan makanan, membuat makanan, sampai akhirnya menyajikan makanan yang sudah siap untuk disantap. Melalui proyek pembuatan makanan tradisional, guru bisa membentuk karakter anak untuk sabar, teliti dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Melalui metode ini juga, guru dapat mengajarkan anak tentang beragam kekayaan budaya yang ada di masyarakat Indonesia.

Metode terakhir adalah metode pemberian tugas. Metode ini memiliki banyak manfaat yang bersifat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Misalnya pemberian tugas membatik sederhana dengan menggunakan corak khas daerah tertentu, bisa membantu anak mengenal aneka corak yang khas dari berbagai daerah. Melalui metode ini anak mengetahui corak khas pakaian di berbagai daerah dan guru dapat juga menjaga kelestarian budaya tersebut dengan cara meminta orang tua untuk membuat pakaian untuk anaknya dengan corak tersebut, sehingga anak menjadi terbiasa dan menyenangi salah satu ciri khas daerahnya.

Penanaman Nilai-nilai Multikultural pada Anak Usia Dini di PAUD melalui Model Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan sebagai Sarana Integrasi Bangsa

Model pembelajaran, menurut Isjoni (2012) adalah strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar, kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih baik. Model pembelajaran didefinisikan sebagai gambaran keseluruhan

pembelajaran yang kompleks dengan berbagai teknik dan prosedur yang menjadi bagian pentingnya. Di dalam kompleksitas model pembelajaran, terdapat metode, teknik, dan prosedur yang saling bersinggungan satu dengan lainnya (Huda, 2014). Joyce dan Weil (1972) membagi model pembelajaran menjadi empat kelompok besar, yakni: model pemrosesan informasi, model interaksi sosial, model personal, dan model modifikasi perilaku. Model pembelajaran yang dimaksud disini adalah Model Pembelajaran Personal.

Model pembelajaran personal berpusat pada individu sebagai sumber gagasan belajar. Kerangka acuan ini menyoroti perkembangan personal dan proses bagaimana individu membangun dan menyusun realita. Kerangka ini juga menekankan pada psikologi personal dan kehidupan emosional individu. Model ini berorientasi pada teori-teori humanistik, teori-teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, Carl Rogers, Buhler dan Arthur Comb.

Beberapa implikasi teori humanistik dalam pendidikan, antara lain: bertingkah laku dan belajar merupakan hasil pengamatan; belajar untuk melakukan (*learning to do*); aktualisasi diri adalah dorongan dasar individu; sebagian tingkah laku individu merupakan hasil konsepsi sendiri; mempelajari cara belajar (*learning how to learn*), dan mengajar sebagai sarana membantu individu mengembangkan suatu hubungan yang produktif dengan lingkungan (Rusman, 2014).

Model pembelajaran berwawasan kebangsaan untuk anak usia dini yang dimaksud disini adalah model pembelajaran yang metode, teknik, dan prosedur yang terdapat di dalam pembelajarannya mengandung wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah wawasan nusantara. Wawasan nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, cara bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis, sosiokultural, dengan aspek astagatra (kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan serta ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam) (Sunarso dkk, 2008). Hakikat wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang *Bhineka Tunggal Ika*. *Bhineka Tungal Ika* artinya meskipun negara Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku dan budaya, namun tetap satu dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Paham kebangsaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu paham yang menyatukan pelbagai suku bangsa dalam wadah kesatuan Negara Republik Indonesia. Di dalam konsep penyatuan berbagai perbedaan tersebut, mengandung arti adanya toleransi, kerjasama, saling menghormati, saling menghargai dan saling mengenal antara satu budaya dengan budaya lainnya (multikultural).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berwawasan kebangsaan adalah model pembelajaran yang di dalamnya

terdapat metode, teknik, prosedur pembelajaran yang mengandung nilai-nilai toleransi, kerjasama, saling menghormati, saling menghargai perbedaan budaya (multikultural) dalam bentuk metode pembelajaran anak usia dini seperti kegiatan bermain, bercerita, karyawisata, demonstrasi dan metode lainnya. Contohnya ketika bermain peran, anak dibagi dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok memainkan peran sebagai anggota kerajaan suku tertentu. Misalnya kelompok 1 memainkan peran anggota kerajaan suku melayu yang mengenakan pakaian khas melayu, memainkan alat musik khas melayu dan permainan anak-anak khas Melayu Kalimantan Barat. Kelompok selanjutnya memainkan peran sebagai anggota kerajaan suku Batak dan selanjutnya. Pada saat bermain peran tersebut anak akan mempelajari budaya khas masing-masing suku tersebut.

Pada model pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses belajar sehingga anak bisa melihat sendiri perbedaan berbagai suku bangsa yang ada di negaranya. Guru memfasilitasi anak agar belajar menghargai perbedaan yang ada dan memahami bahwa meskipun mereka berbeda-beda suku dan budayanya namun tetap satu dalam ikatan negara Republik Indonesia.

Melalui berbagai metode, teknik dan prosedur pembelajaran di PAUD yang berwawasan kebangsaan tersebut, anak usia dini mengenal nilai-nilai multikultural yang ada di sekelilingnya dan memahami bahwa perbedaan yang ada bukanlah penghalang dalam kebersamaan, melainkan suatu potensi kekuatan besar yang menyatukan berbagai budaya tersebut dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saran

Penanaman nilai-nilai multikultural melalui model pembelajaran berwawasan kebangsaan sangat penting diterapkan di PAUD, karena sejak dini anak harus diajari untuk mencintai budayanya, menghargai budaya orang lain, dan memahami bahwa meskipun mereka berbeda-beda tapi tetap satu dalam ikatan negara Republik Indonesia. Sikap tersebut dapat ditanamkan melalui berbagai metode pengajaran di PAUD yang disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak.

Oleh karena itu, disarankan kepada pihak-pihak terkait khususnya Dinas Pendidikan Nasional, untuk memasukkan nilai-nilai multikultural dalam model pembelajaran berwawasan kebangsaan dalam kurikulum PAUD yang terintegrasi dalam setiap pembelajarannya. Diharapkan dengan demikian, akan terbentuk generasi muda bangsa Indonesia yang tidak saja beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, namun juga menghargai perbedaan budaya bangsanya dan memegang teguh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Daftar Acuan

Faidi,A. (2013). Tutorial mengajar untuk melejitkan otak kanan dan otak kiri anak. Yogyakarta: Diva Press.

Huda, M. (2014). Model-model pengajaran dan pembelajaran: Isu-isu metodis dan paradigmatis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Isjoni, & Ismail, M. A. (2012). Model-model pembelajaran mutakhir: Perpaduan Indonesia-Malaysia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Joyce, B., & Weil, M. (1972). Conceptual complexity, teaching style and models of teaching. Annual Meeting of National Council for the Social Studies (pp. 1-14). Boston: Education Resources Information Center (ERIC).

Mahfud, C. (2006). Pendidikan multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moeslichatoen, R. (2004). Metode pengajaran di taman kanak-kanak. Jakarta: Rineka Cipta.

Pedersen, P. (1999). Multiculturalism as a fourth force. New York: Taylor & Francis.

Purwastuti, L.A., & Efianingrum, A.. (2010). Model pembelajaran berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini sebagai sarana integrasi bangsa. Jurnal Kependidikan. Volume 40 No. 1. https://journal.uny.ac.id/index.php/jk/article/view/516. Diunduh pada tanggal 29 Mei 2019.

Rusman. (2014). Model-model pembelajaran: Mengembangkan profesionalisme guru (Edisi kedua). Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.

Shoba Dewey Chugani. (2009). Anak Yang Bermain, Anak Yang Cerdas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sunarso, Sartono, K.E., Dwikusrahmadi, S., & Sutarini, Y.Ch.N. (2008). Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Yogyakarta: UNY Press.

Suyadi. (2009). Ternyata, anakku bisa kubuat genius. Yogyakarta: Power Books.

Suyadi. (2009). Permainan edukatif yang mencerdaskan. Yogyakarta: Power Books.

Sujiono,Y.N., & Sujiono, B. (2010). Bermain kreatif berbasis kecerdasan jamak. Jakarta: PT. Indeks

Sujiono,Y.N. (2013). Konsep dasar pendidikan anak usia dini. Jakarta: PT. Indeks

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Vera, A. (2012). Metode mengajar anak di luar kelas. Yogyakarta: Diva Press

Yonny, A., & Yunus, S.R. (2011). Begini cara menjadi guru inspiratif dan disenangi siswa. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Yuniarni, Desni. *Education based on nationalistic insight and national integration at preschools*. *Indonesia demographically and sociologically is a pluralistic nation. The characteristic that marks this pluralism is the existence of cultural diversity which can be seen from differences in language, ethnicity and religious beliefs and other cultural habits. On the one hand, this cultural plurality is a very valuable wealth of the nation, but on the other hand cultural diversity has the potential for disintegration or division of the nation. Therefore, it is very importance of maintaining national integration continuously. One of the efforts that can be done to maintain the integration of this nation is to instill multicultural values since early childhood in PAUD (the institution of Early Childhood Education) through a national-minded education model to realize national integration. Through this education model, it is expected that early childhood who are the next generation of the nation will inherit civilization in Indonesia and understand the multicultural values and can maintain the integrity and integration of their nation in the future.*

Penguatan Pendidikan Karakter dan Nilai Utama Bangsa Indonesia

Clara R. P. Ajisuksmo & Lucia R. M. Royanto

Pendahuluan

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa fungsi dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas tersebut, terkandung makna bahwa sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual saja, tetapi juga manusia yang memiliki karakter yang baik. Pasal 3 UU Sisdiknas tersebut juga menunjukkan bahwa karakter yang baik dari setiap warga negara Republik Indonesia merupakan cerminan dari jati diri, peradaban dan martabat bangsa Indonesia. Karakter yang baik dari setiap warga negara Indonesia juga akan menentukan tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, pendidikan karakter ditempatkan sebagai program prioritas untuk mewujudkan pembangunan nasional. Hal ini didasari oleh suatu keyakinan bahwa bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang memunculkan akhlak yang baik serta sifat mulia kemanusiaannya. Hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang akan dipandang oleh bangsa lain sebagai bangsa yang besar. Keberadaan UU No 20/2003 dan RPJPN 2005-2025 ini merupakan dasar yang kuat untuk melaksanakan pendidikan karakter dan pembangunan nilai-nilai utama serta akhlak mulia di seluruh jenjang pendidikan. Pada peringatan Hardiknas tanggal 11 Mei tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengamanatkan dilaksanakannya pendidikan karakter mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Amanat presiden tersebut dikukuhkan dengan mengimplementasikan Kurikulum 2013. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh lembaga penyelenggara pendidikan merupakan penggerak utama untuk memfasilitasi pembangunan karakter yang mengarah pada kesadaran untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tetap menjaga keharmonisan dan

kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla mengeluarkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 yang merupakan implementsi Nawacita ke dalam sistem pendidikan nasional dengan mengintegrasikan ke dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak lebih baik. Menurut Peraturan Presiden No 87/Th 2017, PPK bertujuan untuk: (1) membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; (2) mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan (3) merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK (https://setkab.go.id/inilah-materi-perpres-no-87-tahun-2017-tentang-penguatan-pendidikan-karakter/). Pendek kata, penguatan pendidikan karakter, yang mulai digulirkan pada tahun 2016, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan moral dan akhlak dalam situasi yang semakin kompleks dan sulit diantisipasi perkembangannya. PPK juga dimaksudkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter baik dan mampu berdaya saing

Akhir-akhir ini, semua pihak mempertanyakan kembali tujuan dan fungsi pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai keutamaan dan mengembangkan karakter yang baik dari peserta didik di seluruh jenjang pendidikan. Hal tersebut dipicu oleh berbagai kenyataan di masyarakat oleh maraknya kejadian dan perilaku yang tidak menunjukkan karakter dan akhlak yang baik. Sebagai contoh, tawuran pelajar, ajang duel gladiator, kebrutalan remaja geng motor, perundungan (*bullying*), penyalahgunaan Narkoba, pembunuhan, pencurian, korupsi, dan lainnya. Situasi menjadi lebih parah ketika media sosial ikut berperanan dalam mengembangkan perilaku yang tidak bertanggungjawab dan berakhlak, misalnya penyebaran hoax, penyebaran pornografi, ujaran kebencian, *cyberbullying*, *cybercrime*, dsb. Perilaku yang tidak bertanggung jawab dan berakhlak tersebut, dilakukan dari tingkat anak dan remaja sampai dengan para tokoh politik di masyarakat. Kejadian tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung dan Surabaya, tetapi juga di kota-kota kecil seperti Magelang, Bogor, Bekasi, Sukabumi, Kendari, dsb. Dari kenyataan yang dipaparkan tersebut, seluruh penyelenggara pendidikan digugat untuk

meninjau kembali pelaksanaan pembangunan karakter para peserta didik.

Artikel ini bertujuan untuk meninjau kembali pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di sekolah yang selama ini telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan memberikan saran dan masukan bagi pelaksanaannya.

Penguatan Pendidikan Karakter: Lima Nilai Utama

Pusat Kurikulum Balitbang Kemdikbud (2010) mendefinisikan karakter sebagai watak, tabiat akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Pusat Kurikulum (2009) mengidentifikasi 18 nilai yang harus diintegrasikan ke dalam proses pendidikan di sekolah dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ke delapan belas nilai tersebut adalah 1) religius, 2) kejujuran, 3) toleransi, 4) kedisiplinan, 5) kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis, 9) rasa ingin tahu, 10) semangat kebangsaan, 11) cinta tanah air, 12) menghargai prestasi, 13) bersahabat, 13) cinta damai, 14) gemar membaca, 15) peduli lingkungan, 16) peduli sosial, 17) peduli lingkungan, dan 18) tanggung jawab.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetis), olah pikir (literasi) dan olah raga (kinestetik), yang dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama sekolah, keluarga dan masyarakat. Jadi, dalam PPK ada empat dimensi pengolahan karakter, yaitu pertama olah hati yang berarti setiap peserta didik memiliki keimanan dan ketakwaaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai ujud dari kerohanian yang mendalam. Kedua, dimensi olah rasa yang berarti setiap peserta didik memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Ketiga, dimensi olah pikir yang berarti setiap peserta didik memiliki keunggulan akademik sebagai hasil proses belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Keempat, dimensi olah raga yang berarti setiap peserta didik merupakan individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang ikut membangun bangsa dan negara (kemdikbud.go.id/main/files/download/7bdf2592741007e).

Dalam PPK ada lima nilai utama karakter yang menjadi prioritas yang diharapkan diketahui, dipahami dan diimplementasikan dalam setiap kehidupan baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat luas. Kelima nilai tersebut bersumber dari Pancasila, dan berinteraksi satu sama lain. Kelima nilai utama tersebut adalah religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong.

Pertama, nilai religius menunjukkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama yang dianut, menghargai perbedaan agama, toleran terhadap agama lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain, Nilai religius berhubungan erat dengan perilaku mengontrol diri dan regulasi diri. Selain itu, nilai religius juga mempengaruhi bagaimana tujuan hidup ditetapkan, dicapai dan diorganisasikan dalam kehidupan individu (McCullough dan Willoughby, 2009). Syaiful dan Bahar (2016) melaporkan bahwa sipritualitas dan kepuasan hidup mempengaruhi kualitas hidup seseorang

Kedua, nilai nasionalis menunjukkan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang mencerminkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Penelitian Dimitrova, Buzea, Ljulic dan Jordanov (2013) menunjukkan ada kaitan antara nilai nasionalisme dan identitas nasional terhadap kesejahteraan (*well-being*), kepuasan hidup, sikap positif dan negatif, serta kecemasan individu. Nilai nasionalis yang kuat akan mempengaruhi identitas nasional yang kuat pula. Nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan hal penting bagi kelanjutan sebuah bangsa yang harus diperjuangkan bersama. Banyak bukti disintegrasi negara menjadi pelajaran berharga untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia (Kusumawardani, A. & Faturochman, 2004)

Ketiga, nilai integritas menunjukkan upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan, mempunyai komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Nilai integritas seringkali dikaitkan dengan perilaku korupsi dan pemerintahan yang bersih dan baik. Dengan memiliki integritas maka semua akan menaruh kepercayaan kepada kita, sehingga kita dapat menjadi andalan. Dalam konteks sekolah, integritas dapat dimaknai sebagai kejujuran akan proses dan hasil belajar yang dilakukan. Tidak menyontek, melakukan tugas sekolah secara mandiri, dan mencantumkan sumber yang digunakan ketika membuat tugas. Dalam integritas yang juga penting adalah melaporkan teman yang dicurigai mencontek hasil kerja orang lain ketika menyelesaikan tugas atau ulangan atau ujian. Dengan memiliki integritas akademik, peserta didik akan merasa damai dan tidak mengalami kecemasan, karena telah melakukan hal baik. Dengan melakukan integritas setiap peserta didik menjadi lebih bahagia dan sehat mental, sehingga menjadi lebih produktif.

Keempat, nilai mandiri menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak

tergantung pada orang lain. Dalam nilai mandiri juga tercakup kemauan untuk menggunakan seluruh tenaga, pikiran dan waktu untuk mewujudkan harapan, dan cita-cita. Nilai kemandirian yang dimiliki setiap individu akan juga menunjukkan etos kerja yang tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan kemauan belajar sepanjang hayat. Manurut Sa'diyah (2017), peserta didik yang memilki kemandirian akan menunjukkan kegiatan belajar aktif, tekun, berinisiatif, bertanggung jawab dan keyakinan diri. Menurut Luther (dalam Sa'diyah 2017) kemandirian diawali oleh adanya efikasi diri (*self-efficay)* pada diri seseorang. Sa'diyah (2017) juga menunjukkan bahwa ada tiga aspek kemandirian yang harus dikembangkan oleh setiap individu, yaitu kemandirian fisik – termasuk di dalamnya kemampuan merawat diri, kemandirian emosional - termasuk di dalamnya mengatasi perasaannya sendiri, dan merasa nyaman dengan diri sendiri, dan kemandirian sosial – termasuk di dalamnya kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Kelima, nilai gotong royong menunjukkan tindakan menghargai kerjasama dan saling membantu dalam menyelesaikan persoalan, menjalin komunikasi dan persahabatan, dan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan Tradisi gotong royong merupakan warisan masa lalu yang ditransformasikan secara turun menurun dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Gotong royong merupakan bentuk kecerdasan dan kearifan sosial masyarakat Indonesia (Subagyo, 2012). Nilai gotong royong masih sangat relevan sampai saat ini karena dengan nilai gotong royong akan memeihara persatuan bangsa (Subagyo, 2012). Menurut Nesfiyanti (2010) ada tiga faktor penting yang mempengaruhi dipertahankannya nilai gotong royong, ketiga faktor tersebut adalah kesamaan jenis pekerjaan, kesamaan wilayah tempat tinggal dan kesamaan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Thomas Lickona (1991), dalam buku "*Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*", menunjukkan bahwa ada tiga komponen penting dalam karakter yang baik, yaitu mengetahui dan berpikir tentang hal yang baik (*knowing the good*), menginginkan hal yang baik (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan atau tindakan yang baik (*doing the good*). Semua hal yang baik dalam pikiran, keinginan dan tindakan tersebut akan ditunjukkan dalam berhubungan dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Ketiga komponen pokok dari karakter yang baik tersebut dapat dikembangkan melalui penanaman kebiasaan ketika berinteraksi dengan lingkungan di sekitar. Jadi, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai segala usaha yang dengan sengaja dilakukan untuk membantu anak atau peserta didik agar dapat mengetahui,

berkehendak, dan menunjukkan tindakan nyata yang berujud perilaku yang baik.

Raka, dkk. (2011) dalam buku "*Pendidikan Karakter di Sekolah: Dari Gagasan ke Tindakan*", menyatakan bahwa kompetensi membuat seseorang bisa melakukan tugasnya dengan baik, namun karakterlah yang membuatnya bertekad mencapai yang terbaik dan selalu ingin lebih baik. Orang-orang dengan kompetensi tinggi tanpa disertai karakter yang baik dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungannya. Penelitian dari Benninga, Berkowitz, Kuehn, dan Smith (2003) melaporkan bahwa prestasi akademis siswa meningkat pada sekolah yang mengimplementasikan pendidikan karakter. Selain itu, penelitian Park, Peterson dan Seligman (dalam Hidayat dkk., 2018) menunjukkan bahwa individu yang memiliki kompetensi rendah tetapi optimis akan menunjukkan keberhasilan di bidang pekerjaannya, dibandingkan individu yang mempunyai kompetensi tinggi tetapi pesimis. Demikian pula penelitian dari Bevel dan Mitchell (dalam Hidayat, dkk. 2018) melaporkan bahwa pencapaian belajar peserta didik akan dipengaruhi oleh sikap optimis peserta didik.

Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter: Pembiasaan, Peneladanan, Pemotivasian, Konsistensi dan Refleksi

Dalam penerapannya, penanaman pendidikan karakter seharusnya dilaksanakan secara terintegrasi, dari keluarga di rumah, guru dan lingkungan pertemanan di sekolah sampai di masyarakat. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari cara-caranya, maka dapat dilakukan dengan melakukan pembiasaan, peneladanan, pemotivasian, konsistensi serta refleksi. Apabila hal ini ditinjau dari teori psikologi, maka semuanya mengacu pada teori behaviorisme sampai konstruktivisme.

Kebiasaan, atau *habit*, dibentuk melalui pengenalan perilaku yang baik dan buruk, perilaku yang diterima oleh lingkungan dan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan, dan hal ini dimulai sedari anak berusia muda di rumah. Sebagai contoh, ketika anak berusia 3 tahun bersalaman dengan orang yang baru dikenalnya dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan anak diambil oleh orangtuanya dan diulurkan ke arah tamu, sambil dijelaskan oleh orangtua, bahwa bersalaman dengan tangan kanan dan bukan tangan kiri. Dengan cara demikian, anak tahu bahwa ketika bersalaman, ia harus menggunakan tangan kanan. Contoh lain di situasi sekolah, peserta didik kelas 1 SD ketika mendengar bel berbunyi, di awalnya berjalan-jalan di dalam dan di luar kelas, kemudian guru memberitahu peserta didik tersebut untuk berdiri dan berbaris di depan kelas. Dari dua contoh tersebut, anak berada dalam tahap *acquiring* atau pembelajaran, yaitu keadaan ketika anak belum memahami dan belajar mengenai perilaku yang

harus dikuasainya. Dari hari kehari, hal yang telah diajarkan tersebut dikuatkan melalui pemberian *reinforcement* positif dan cara-cara modifikasi perilaku lain yang sesuai. Sanksi dapat diberikan ketika anak tidak melaksanakan perilaku yang diajarkan. Sanksi negatif itu dapat berupa hukuman, denda, *time out*, ataupun cara-cara lain yang disesuaikan dengan perilaku anak dan tahapan usianya (Martin & Pear, 2019). Guru sebaiknya mencari kesempatan yang tepat untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu kejadian, sehingga anak memiliki pemahaman yang holistik mengenai perilakunya sendiri.

Peneladanan merupakan langkah yang kerap dilakukan di lingkungan rumah dan sekolah. Perilaku orangtua yang positif merupakan contoh yang baik bagi anak. Anak akan meniru perilaku yang dapat mencerminkan pribadi yang baik dan berkarakter. Ketika orangtua menunjukkan perilaku jujur, dapat dipercaya, adil dan berbelarasa, maka anak akan dapat menirunya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak dapat mengadopsinya? Anak mempelajarinya dengan cara mengamati perilaku orangtua dalam kegiatan sehari-hari. Jika orangtua memiliki pikiran, perkataan dan perbuatannya selaras, maka anak akan dengan mudah mendapatkan contoh-contoh yang baik. Sebaliknya, ketika orangtua mencuri-curi kesempatan dan melakukan tindakan melanggar hukum, misalnya tetap menjalankan kendaraan padahal lampu lalu lintas sudah berubah menjadi merah, maka anak akan dengan mudah menirunya di kemudian hari.

Di sekolah, peneladanan merupakan bentuk pembelajaran yang sangat sering dilakukan, terutama pada peserta didik kelas rendah. Guru di kelas merupakan model yang signifikan bagi anak, bahkan melebihi orangtuanya di rumah. Aturan berperilaku yang disepakati di awal tahun ajaran akan membantu peserta didik mengatur perilakunya sendiri, baik di dalam kelas dan di luar kelas. Pihak sekolah secara sistemik juga dapat membuat aturan yang dapat memberikan teladan bagi seluruh insan sekolah. Sebagai contoh, sebuah sekolah di Bali menanamkan kebiasaan bagi guru dan peserta didik untuk menangkupkan dan menyilangkan tangan kanannya ke dada, sebagai bentuk sapaan dan salam hormat kepada siapapun yang ditemuinya di sekolah. Hal ini selain bentuk penghormatan juga untuk mengingatkan semua individu di sekolah bahwa Pancasila ada di hati masing-masing. Dari awalnya guru yang memberikan teladan, akhirnya peserta didik semua melakukannya, dan bahkan orangtua peserta didik pun melakukan hal yang sama. Perlu diingat bahwa guru dan orangtua merupakan *role model* bagi anak.

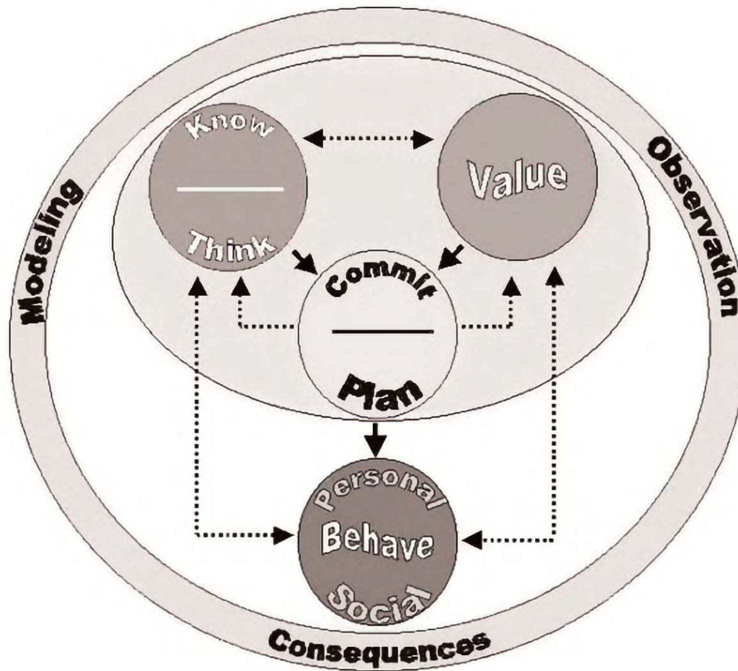
Selain peneladanan, tindakan pemotivasian juga merupakan bentuk penguatan pendidikan karakter yang sangat penting untuk dilakukan. Pemotivasian bisa dilakukan dengan memberikan apresiasi atau umpan balik

positif terhadap anak, namun dengan cara yang spesifik. Misalnya ketika guru mengatakan, “Waah, kamu anak pintar”, maka hal itu kurang berarti karena terlalu umum dan tidak mengacu pada perilaku tertentu. Anak akan lebih termotivasi dan lebih paham apabila apresiasi ditunjukkan pada perilaku tertentu, sebagai contoh, “Ibu sangat bangga karena kamu sudah membantu temanmu yang terjatuh”. Pemotivasian diberikan secara secukupnya dan tidak untuk semua perilaku yang dilakukan anak, sehingga anak menghargai usahanya. Umpan balik sebaiknya diberikan secara positif, sehingga meningkatkan harga diri anak dan membantunya untuk memahami dirinya dengan baik. Sebagai contoh, akan lebih baik mengatakan pada anak dengan kalimat,”Ayo coba kamu berusaha lebih baik lagi”, daripada, “Kamu begitu saja tidak bisa”.

Semua pihak, baik pihak sekolah maupun orangtua dan orang-orang di rumah perlu menerapkan perilaku secara konsisten, sehingga anak memiliki panduan berperilaku yang jelas dan mengacu pada aturan yang sama. Sebagai contoh, ketika di rumah orangtua mengajarkan anak untuk berbicara sopan, maka hal yang sama juga diterapkan di sekolah. Ketika di sekolah anak dituntut untuk tepat waktu, maka di rumah juga menerapkan hal yang sama, sehingga anak memiliki patokan berperilaku yang sama dimana saja dan kapan saja.

Langkah yang tak kalah penting dalam menanamkan dan menguatkan pendidikan karakter adalah refleksi. Refleksi ini dapat dilakukan dalam bentuk diskusi serta pembicaraan ringan berkaitan dengan perilaku dan nilai-nilai. Keterlibatan anak dalam percakapan mengenai perilaku atau karakter tertentu akan membantu proses internalisasi nilai-nilai. Guru atau orangtua dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan pemicu yang dapat membantu anak mengembangkan berpikirnya. Misalnya setelah menonton film, orangtua dapat menanyakan apa nilai yang bisa ditarik dari tokoh di film tersebut. Ketika tokoh X memutuskan untuk meninggalkan temannya, kira-kira apa yang dirasakan oleh X dan apa yang dirasakan oleh temannya, dan nilai apa yang kira-kira dianut oleh tokoh X sehingga ia rela meninggalkan temannya? Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi X? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat pula diajukan setelah anak membaca buku atau setelah peristiwa tertentu.

Refleksi dapat membantu anak mengenali nilai-nilainya dan dapat membuka wawasannya dan mengembangkan berpikirnya. Meskipun demikian pendampingan dari orang lain dibutuhkan pula agar anak memperoleh masukan yang bermakna bagi dirinya. Perlu diingat bahwa karakter dibentuk, dibangun sepanjang waktu dan mengikuti perkembangan seorang anak. Oleh karenanya upaya berkesinambungan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah secara konsisten perlu terus diupayakan.

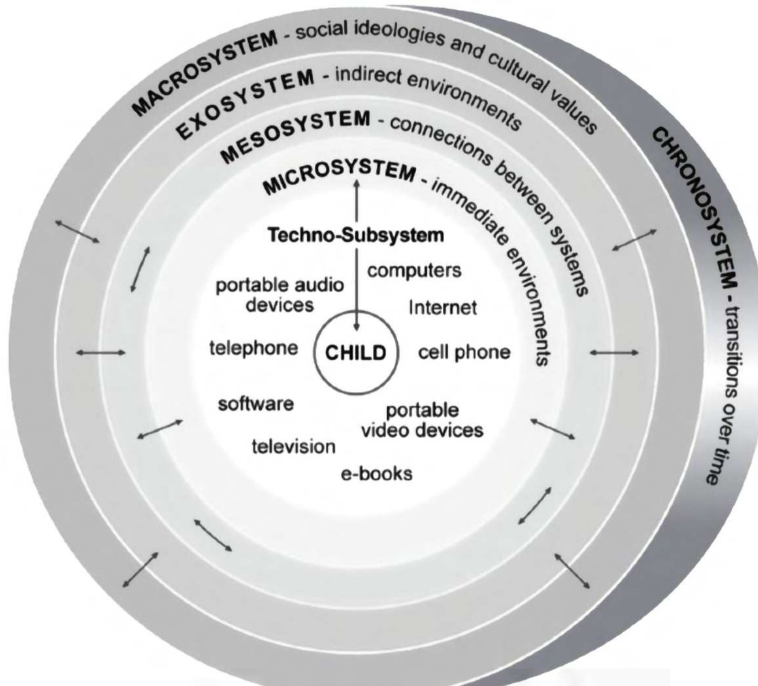


Gambar 1. Model Perkembangan Karakter (Huitt, 2004)

Apabila diringkas, maka perkembangan karakter (Gambar 1) perlu dipelajari melalui observasi, peniruan atau *modeling* dan pemahaman akan konsekuensi tindakan. Perlu ditumbuhkan keyakinan pada peserta didik bahwa berpikir, berperasaan, dan berperilaku berdasarkan akhlak mulia akan memberikan manfaat dan kebahagiaan dalam berinteraksi dengan teman-teman maupun lingkungan sekitarnya. Guru dan orangtua menghargai peserta didik tanpa membedakan latar belakang agama, suku, jenis kelamin maupun tingkat sosial ekonomi. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakannya merupakan hal yang juga perlu dipertahankan. Peran lingkungan sangat penting dalam pembelajarannya dan hal ini akan dibahas pada bagian berikut.

Peran Lingkungan dalam Penguatan Pendidikan Karakter

Bronfenbrenner (dalam Miller, 2016; Gambar 2) mengajukan teori ekologis yang dapat dengan mudah membantu pemahaman akan peran lingkungan terhadap anak. Ketika dilahirkan, anak berada dalam lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Sampai usia balita, kehidupan anak berkisar di sekitar keluarga. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, kemudian sekolah dasar, anak mulai memperluas lingkungannya.



Gambar 2. Teori Ekologis dari Bronfenbrenner

Ditinjau dari teori Bronfenbrenner (Santrock, 2014), keluarga dan sekolah merupakan mikrosistem bagi anak karena keluarga dan sekolah merupakan lingkungan terdekat yang secara langsung bersentuhan dengan anak. Lingkungan mesosistem mengintegrasikan dan membentuk interaksi antar mikrosistem anak, misalnya relasi orangtua dengan guru. Eksosistem adalah lingkungan dimana anak tidak menjadi bagian langsung dari sistema tersebut namun dapat mempengaruhi dirinya, misalnya tempat kerja orangtuanya. Makrosistem anak adalah konteks budaya dimana mikrosistem, mesosistem serta eksosistem berada. Aturan dan konteks dimana anak itu hidup merupakan makrosistem anak, dan dalam hal ini anak tidak dapat mengendalikan, namun perlu mematuhinya. Ideologi negara dan pemerintah, nilai dan aturan masyarakat serta tradisi agama serta etnis merupakan contoh makrosistem. Kronosistem merupakan kondisi sosiohistoris anak yang mempengaruhi kehidupannya secara luas dan mendalam. Sebagai contoh, anak-anak jaman sekarang tergolong generasi milenial atau posmilenial yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi orangtuanya, karena pengaruh perkembangan teknologi yang kemudian mempengaruhi cara berpikir, berperilaku dan bertindak.

Teori ekologis dari Bronfenbrenner ini berfokus pada kualitas dan konteks lingkungan anak dan menentukan cara interaksi anak dengan

lingkungannya. Teori ini dapat menjelaskan kompleksitas kehidupan anak sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam pengembangan dan penguatan karakter, keluarga dan sekolah sebagai mikrosistem berperan besar dalam pembentukan karakter. Ketika usia anak beranjak remaja atau dewasa, maka lingkungan yang lebih luas turut mempengaruhi anak. Untuk itu, keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga media perlu berperan agar anak dapat mengembangkan karakter yang positif.

Peran Keluarga: Setiap individu dilahirkan di dalam keluarga dan keluarga menjadi agen sosialiasaso pertama bagi anak. Melalui keluarga anak belajar mengenai kebiasaan dan budaya dalam keluarga. Pada dasarnya, keluarga menyediakan pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, psikologis dan sosial. Interaksi di dalam keluarga akan membantu anak belajar mengenai bagaimana ia harus berperilaku sesuai atuan dan norma, melalui lingkungan yang penuh cinta dan perhatian.

Peran Kepala Sekolah: Banyak penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dari kepala sekolah. Untuk itu kepala sekolah perlu menyampaikan visi dan misi dari sekolah serta memberikan arahan agar visi misi tersebut dapat dipahami oleh semua unsur yang ada di sekolah. Kepala sekolah perlu menampilkan contoh perilaku yang baik sehingga menjadi panutan guru dan peserta didik. Kerjasama dan kesediaan untuk berdiskusi dengan guru, tenaga administrasi, peserta didik, orangtua dan masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan akhlak mulia di sekolah.

Peran guru: Dalam proses pembelajaran, guru harus dapat menjadi contoh atau model positif dalam berperilaku. Guru harus dapat menjadi orang yang dapat menerima peserta didik apa adanya dan menjadi 'teman' bagi mereka. Meskipun dekat dengan peserta didik, namun sikap profesional perlu ditegakkan sehingga guru dapat menebarkan nilai karakter pada diri peserta didik, dan guru dapat menjalankan peran yang sesuai dengan situasi di kelas.

Peran Warga Masyarakat: Lingkungan masyarakat seperti RT, RW dan organisasi di sekitar sekolah dapat mendukung sekolah dalam hal misalnya melalui *school watch program*, dalam hal ini masyarakat memberikan perhatian terhadap berbagai program sekolah, di antaranya pendidikan karakter.

Peran Media: Kehidupan anak sekarang dikelilingi oleh penggunaan teknologi informasi yang tentunya akan berdampak pada cara berpikir dan gaya hidup. Anak perlu diajarkan untuk menggunakan gawainya dengan bijaksana

sehingga ia tidak terjerumus pada perilaku negatif seperti adiksi internet atau *games*, kecenderungan membuka situs porno, disibukkan oleh *chatting* dengan teman-temannya serta *cyberbullying*. Peran orangtua dan guru cukup besar dalam mengatur penggunaan gawai.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa penanaman dan penguatan pendidikan karakter tidak dapat hanya dilakukan oleh salah satu pihak yang berada di sekitar anak. Anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang baik dan positif, ketika bergaul dengan teman-teman yang memberikan dampak yang negatif akan dapat berkembang secara negatif. Demikian pula sebaliknya, anak-anak yang memperoleh pendidikan yang baik, tidak akan dapat berkembang optimal apabila tidak didukung oleh faktor keluarga. Masyarakat juga sangat berpengaruh, terutama dalam menanamkan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan. *Local wisdom* atau kearifan lokal yang telah berkembang di dalam masyarakat perlu digali dan ditanamkan kepada anak, tentu saja dengan memperhatikan konteks perkembangan terkini. Untuk itu keterlibatan para tetua dan tokoh-tokoh masyarakat dan agama perlu diperhitungkan pula.

Sekolah sebagai sistem perlu melakukan kerjasama dengan pihak orangtua dan keluarga agar anak dapat memperoleh keuntungan maksimal. Upaya ini perlu dilakukan secara terstruktur, mulai dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam kelas, yaitu dengan memasukkan unsur pendidikan karakter melalui kurikulum, kegiatan di luar kelas ketika beristirahat, ketika melakukan kegiatan ekstrakurikuler, maupun ketika anak sudah berada di luar sekolah bersama teman-temannya.

Perkembangan internet dan media komunikasi yang begitu pesat selain memberikan keuntungan namun juga dapat memberikan dampak-dampak negatif juga perlu diwaspadai. Anak perlu dibekali dengan cara-cara menolak dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi. Diskusi dan refleksi bersama orang dewasa diharapkan dapat mengembangkan kekuatan pada anak untuk dapat berpikir secara jernih dan kritis sehingga anak dapat menangkis *hoax* yang beredar melalui internet, atau anak dapat bereaksi secara positif dan rasional terhadap berita maupun percakapan-percakapan yang tidak sesuai.

Penutup

Para pemimpin negara Indonesia telah memberikan penegasan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan hal ini perlu diejawantahkan dalam langkah-langkah strategis. Upaya-upaya terstruktur telah dilakukan melalui sekolah dengan cara pembiasaan, peneladanan, pemotivasian, konsistensi

serta refleksi. Kelima strategi tersebut diintegrasikan ke dalam tiga kegiatan yaitu intra kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Di samping itu, kelima strategi tersebut harus dijadikan dasar dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah baik secara formal, non-formal, maupun informal. Terkait dengan hal-hal tersebut, dapat diartikan bahwa sekolah harus menciptakan suasana kondusif di berbagai kegiatan sehingga karakter yang baik dapat terus dibentuk untuk menjamin bahwa akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing.

Keragaman budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia bukan merupakan kendala dalam menanamkan nilai-nilai dan karakter yang baik. Lebih daripada itu, keragaman budaya dan adat istiadat harus dipandang sebagai kelebihan yang dapat menjadi inspirasi dalam menanamkan dan menguatkan pendidikan karakter. Kearifan lokal yang ada harus dijadikan konteks yang menjadi ciri khas masing-masing daerah dalam menanamkan dan memperkuat pengembangan pendidikan karakter. Untuk itu, guru dan kepala sekolah dituntut untuk menjadi kreatif dalam mengintegraikan berbagai kegiatan belajar-mengajar baik di sekolah maupun di luar sekolah, dalam konteks intra kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler dengan kearifan lokal yang hidup di masyarakat setempat.

Dunia pendidikan tidak dapat mengabaikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kemajuannya begitu cepat dan sulit untuk diantisipasi. Oleh karena itu, TIK dapat dijadikan sarana dalam menanamkan nilai-nilai yang baik. Peserta didik juga dapat dilatih bagaimana menggunakan TIK dengan lebih arif tanpa harus diperbudak oleh kemajuan TIK.

Dalam melaksanakan penguatan pendidikan karakter, sekolah harus bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama orang tua dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa semua pihak harus mempunyai visi yang sama terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Tidak boleh terjadi bahwa ada perbedaan visi antara keluarga, sekolah dan masyarakat sehubungan dengan penanaman nilai-niai dan karakter yang baik. Demikian halnya, bahwa penguatan pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Pendidikan Karakter merupakan tanggung jawab banyak pihak seperti, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPAI), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan lainnya. Kerjasama seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan dari pelaksanaan penguatan pendidikan karakter.

Daftar Acuan

Benninga, J. S., Berkowitz, M. W., Kuehn, P., & Smith, K. (2003). The relationship of character education implementation and academic achievement in elementary schools. *Journal of Research in Character Education, 1*(1), 19–32.

Dimitrova, R., Buzea, C., Ljujic, V., & Jordanov, V. (2013). The influence of nationalism and national identity on well-being of Bulgarian and Romanian youth. *Studia Ubb Sociologia, 58*(1), 69-86.

Hidayat, W., Ahmad, J., & Hamzah, M. I. (2018). Nilai keutamaan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam konteks pendidikan karakter bangsa. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 22*(1), 83-91. http://dx.doi.org/10.21831/pep.v22i1.18103

Huitt, W. (2004). Moral and character development. Dalam *Educational Psychology Interactive*. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved from.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tth). Gerakan Penguatan Pendidikan karakter (PPK). https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/7bdf2592741007e

Kusumawardani, A., & Faturochman. (2004) Nasionalisme. *Buletin Psikologi, 12*(2), 61-72.

Lickona, T. (1991). *Educating for Character. How Our Schools can Teach Respect and Responsibility.* New York: Bantam Books.

Martin, G., & Pear, J. (2019). *Behavior Modification: What It Is and How to Do It*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

McCullough, M. E., & Willoughby, B. L. B. (2009). Religion, self-regulation, and self-control: Associations, explanations, and implications. *Psychological Bulletin, 135*(1), 69–93.

Miller, P. H. (2016). *Theories of Developmental Psychology*. New York: Worth Publishers.

Nisfiyanti, Y. (2010). Tradisi gotong royong di desa Juntikebon Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. *Patanjala, 2*(1), 95-110.

Pusat Kurikulum. (2009). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa.* Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional.

Pusat Kurikulum. (2010). *Bahan Pelatihan: Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa.* Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang, Kementrian Pendidikan

Nasional.

Raka, G., Mulyana, Y., Markam, S. S., Semiawan, C. R., Hasan, S. H., Bastamana, H. D., & Nurachman, N. (2011). *Pendidikan Karakter di Sekolah: Dari Gagasan ke Tindakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sa'diyah, R. (2017). Pentingnya melatih kemandirian anak. *Kordinat, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 14*(1), 31-46.

Santrock, J. W. (2016). *Essentials of Life Span Development*. New York: McGraw Hill Education.

Subagyo. (2012). Pengembangan nilai dan tradisi gotong royong dalam bingkai konservasi nilai budaya. *Indonesian Journal of Conservation, 1*(1), 61-68.

Syaiful, I. A., & Bahar, R. N. A. (2016) Peran spiritualitas dan kepuasan hidup terhadap kualitas hidup pada wirausahawan muda. *Humanitas, 13*, 122-134.

Ajisuksmo, Clara R.P., & Royanto, Lucia R.M. *Strengthening character education and the core values of the Indonesian nation.* *The current situation in Indonesia shows a variety of irresponsible and immoral behavior, carried out by individuals and groups from the level of children and adolescents to adults of political and community leaders. This immoral behavior occurs not only in big cities, but also in small cities. Students' brawl, pre-marital sex, drug abuse, theft, bribery, corruption are some examples of irresponsible and immoral behavior. The situation became worse when social media participated in the spread of hoaxes, hate speech, cyber bullying, the spread of pornography, etc. The world of education which is regarded as the main motor in mobilizing and facilitating the development of character is sued to review the implementation of character education at all levels of education in schools. Since it was mandated in 2010 by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, which was confirmed in Kurikulum 2013, character education has been held massively, but in reality what is expected has not yet become a reality. In these past several years, the government systematically tried to implement character education in schools through some approaches, by imposing it in intra-curricular activities, co-curricular and extracurricular activities.*

----

bagian 2

Keberagaman

Mengelola Keberagaman, Melejitkan Kejayaan Berbangsa

Sumaryono

Pendahuluan

Diskusi tentang keberagaman dalam konteks ke-Indonesiaan, merupakan hal yang menarik. Secara konsep, keberagaman sudah melekat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan sudah diperkenalkan sejak lama dengan konsep "Bhinneka Tunggal Ika", berbeda-beda tetapi tetap satu jua yaitu Indonesia. Dalam taraf keyakinan atau *belief system,* semua warga Indonesia sadar betul bahwa dalam diri bangsa Indonesia memiliki berbagai keragaman, baik dari suku, bahasa, wilayah, warna kulit dan berbagai cara pandang. Ibarat orang berpakaian, keberagaman merupakan pakaiannya orang Indonesia sejak merdeka.

Pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah, apakah pakaian yang berwujud keberagaman tersebut sudah benar-benar menjadi pakaian yang nyaman atau terkadang nyaman dan terkadang menjadi tidak nyaman. Pertanyaan tersebut memang sering mencuat seiring dengan munculnya berbagai masalah terkait dengan dampak dari berbagai perbedaan dalam keberagaman. Seringkali, perbedaan dalam keberagaman menjadi panyebab adanya polarisasi antara dua kelompok masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah perang yang tidak berkesudahan di dunia maya antar pengikut dalam pilkades, pilkada, atau pilpres sekali pun. Gesekan hingga bentrokan antar kelompok yang berbeda atas dasar suku, daerah, agama atau kepentingan masih terlalu sering menghiasi media massa. Hanya gara-gara perbedaan cara memandang terhadap suatu permasalahan, konsep "Bhinneka Tunggal Ika" sering terlupakan bahwa hal itu sudah menjadi sebuah *belief system* yang mengakar lama.

Keterlupaan tersebut bukanlah permasalahan yang sederhana. Ketika kondisi tersebut berlangsung, maka potensi untuk tidak terjadinya perilaku yang selaras akan sangat mungkin. Hal ini selaras dengan skema yang dikemukakan oleh Fisbhen & Ajzen (2005) dengan teori perilaku beralasan atau *Theory of Reasoned Action / Theory of Planned Behavior*.

Teori tersebut menjelaskan bahwa *belief system* yang sudah ada akan mempengaruhi sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku individu. Ketiga hal inilah yang akan memperkuat intensi atau niat seseorang untuk melakukan hal yang diyakini dan dirasakan benar. Ketika keterlupaan terhadap *belief system*

terjadi maka perilaku akan menjadi tidak selaras. Padahal keberagaman adalah sebuah keniscayaan.

Berdasarkan penjelasan teoritis tersebut di atas, muncullah suatu pertanyaan "Apakah gesekan atau perbedaan dalam keberagaman lebih disebabkan oleh keterlupaan semata atau pemahaman keberagaman belum menjadi sebuah *belief system* yang sesungguhnya pada diri setiap insan Indonesia?". Permasalahan ini penting untuk dikupas, ditelaah, dan dicari solusinya sehingga tujuan kehidupan berbangsa tidak terhambat gegara perbedaan dalam memaknai keberagaman dengan cara yang tidak konstruktif.

Esensi Keberagaman

Dunia itu beragam dan hal itu merupakan *sunatullah*, sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapa pun. Pertanyaan dasarnya, sebenarnya apakah esensi dari keberagaman? Keberapaman berarti ada keberbedaan dalam diri individu, kelompok, komunitas maupun masyarakat. Keberbedaan ini dapat dimaknai positif atau negatif tergantung pada perspektif yang digunakan. Dalam perspektif *psikologi humanistik*, setiap pribadi memiliki potensi yang berbeda. Modal potensi individu itulah yang semestinya dikembangkan sehingga optimalisasi dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Dengan demikian esensi pertama yang tampak dalam keberbedaan atau keberagaman adalah adanya potensi positif pada diri setiap individu. Hal ini juga mengandung makna bahwa setiap kelompok, baik komunitas maupun masyarakat, juga memiliki potensi positif. Selalu ada nilai atau modal positif yang berguna dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Pemaknaan secara esensial tentang keberagaman juga dapat dipandang dari sisi kekayaan sumber daya pada setiap pribadi. Pandangan ini sejalan dengan pengembangan tim berdasarkan konsep *Belbin Management* (1996). Dalam pandangan Belbin, tokoh sentral yang mengajukan konsep tersebut, pengembangan tim akan menghasilkan lebih banyak ide, pemikiran dan cara pandang baru manakala diisi oleh komposisi tim yang beragam secara kepribadian. Keberagaman karakteristik pribadi akan mampu memunculkan situasi saling kontrol dan saling melengkapi atau menyempurnakan.

Penjelasan dari konsep teori Belbin tersebut semakin menambah hal esensial dari makna keberagaman yaitu kekayaan akan solusi dan keluasan akan perspektif dalam memandang permasalahan.

Berpijak dari penjelasan keberagaman secara esensial, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara esensi keberagaman mengandung makna potensi positif yang dapat digunakan sebagai sumber daya yang akan dapat digunakan

dalam mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan kelompok, masyarakat maupun kehidupan berangsa dan bernegara. Hal ini menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan dan ketercapaian cita-cita berbangsa dan bernegara.

Kerangka Pikir Psikologis Keberagaman

Kajian psikologi dalam melihat keberagaman selalu mempertimbangkan bagaimana cara individu berpikir, bersikap dan berperilaku dalam menghadapi lingkungan sosial yang beragam. Ada dua prinsip dalam hal ini. Prinsip pertama keberagaman adalah konstruksi kehidupan secara sosial dan prinsip yang kedua, keberagaman adalah ketergantungan secara sosial (Blaine, 2007).

Prinsip pertama mengindikasikan bahwa dalam keberagaman yang sudah terkonstruksi secara sosial, individu mempunyai peran sebagai penerima atau perseptor sosial. Hal ini memiliki makna bahwa secara individual, keberagaman dapat dipersepsi sebagai sumber perbedaan yang mungkin dapat diterima dan bisa jadi tidak mudah diterima. Kemudahan dan ketidakmudahan dalam menerima keberagaman akan sangat tergantung pada persepsi dan otomatis akan berkaitan dengan pengetahuan yang mampu memberikan keyakinan pada diri individu. Ketika pengetahuan sang individu semakin luas dan terbuka, maka penerimaan terhadap keberagaman menjadi lebih mudah. Keluasan dan keterbukaan pengetahuan menjadi kata kunci atas pemahaman keberagaman dan membuatnya lebih bersikap menerima secara positif. Hal ini sejalan dengan paparan teori perilaku beralasan atau perilaku terencana dari Ajzen (2002).

Dalam prinsip pertama ini, individu juga sekaligus menjadi aktor dalam ruang lingkup kehidupan keberagaman. Keyakinan dan harapan akan keberagaman yang ada pada diri individu akan dibawanya dalam kehidupan sosial. Hal-hal yang diyakini dalam memahami keberagaman akan dibawa yang bersangkutan dalam menjalankan interaksi sosial dan berpengaruh pada cara bersikap saat orang lain beraksi terhadap diri yang bersangkutan. Dengan demikian, hal yang difahami dan diyakini akan mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap dan cara berperilaku dalam konteks berhadapan dengan situasi penuh keberagaman.

Prinsip kedua, keberagaman merupakan bagian dari pengaruh sosial. Dalam konteks ini, keberagaman tidak dapat muncul pada pemahaman secara individual semata. Variasi tekanan sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya pemahaman akan keberagaman atau keberbedaan antar individu dalam suatu komunitas. Pengaruh keberagaman inilah yang akan berimbas pada keberagaman identitas

dan perilaku. Hal yang paling pokok dan penting dalam konteks ini adalah penerimaan terhadap identitas serta perilaku yang berbeda.

Mengelola Keberagaman, Melesatkan Kejayaan Berbangsa

Kesadaran akan potensi dan sumber daya dari sebuah keberagaman merupakan awal positif bagi sebuah bangsa atau masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Tidak sekedar sebuah awal yang positif, karena kesadaran tersebut menjadi modal dasar unruk mengatasi masalah yang terjadi dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Ketika keberagaman dianggap sebagai sumber daya potensial, maka keberagaman dalam suatu masyarakat dipandang sebagai sumber ide, pemikiran kreatif, pengalaman baik, dan sekumpulan solusi terbaik.

Dalam perspektif ini, keberagaman lebih diartikan sebagai kekayaan cara menghadapi masalah dan tidak difokuskan pada keberbedaan cara yang harus dipertentangkan. Kekayaan solusi yang beragam bukan dipertentangkan tetapi dikritisi secara rasional dan disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Dalam konteks ini mengandung maksud ada pertimbangan rasional, sosial dan norma yang berlaku. Itulah prinsip utama dalam mengelola keberagaman.

Pengelolaan penerimaan akan keberagaman sebagai sebuah kekuatan penting dalam kehidupan berbangsa tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pendekatan saja. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memaknai keberagaman sebagai sebuai kekayaan postif dalam mengatasi permasalahan berbangsa, antara lain:

Pendekatan Kognitif. Disadari atau tidak, dalam kognisi atau cara berpkir dalam diri setiap individu selalu ada kategorisasi sosial atau stereotip terhadap orang lain atau kelompok lain. Hal tersebut wajar terjadi karena ada penilaian atau interpretasi atas apa yang sering terjadi pada kelompok tersebut. Hanya saja, dampak dari kategorisasi dan stereotip bisa bernuansa positif dan bisa juga bias sehingga memungkinkan terjadinya penilaian negatif. Hal yang terakhir ini yang sering terjadi, sehingga keberagaman justru menjadi sumber permasalahan baru.

Salah satu teori psikologi mampu menjawab permasalahan ini secara kognitif, sehingga dampak negatif diharapkan tidak terjadi. Teori ini dihasilkan dari sebuah riset yang dilakukan oleh Rosenthal dan Lawson pada tahun 1964 (Blaine, 2007) yang diberi nama *The Self-Fulfilling Prophecy*. Inti dari riset ini adalah bahwa seseorang akan mendapatkan hal yang diperkirakan, tergantung pada harapan yang dibangun dalam benaknya. Konsep ini memang dapat

mengandung dua konsekuensi, seseorang dapat membangun kegagalan atau sebaliknya membangun kesuksesan. Dalam kaitan keberagaman, tentu akan lebih berfokus bagaimana cara membangun harapan positif menghadapi permasalahan. Salah satu contohnya dengan mengganti sebuah kata yang mengandung harapan positif sehingga akan mempermudah cara menyelesaikan masalah, misal "strategi mengatasi orang sulit" diganti menjadi "strategi menghadapi orang yang berbeda". Pernyataan pertama mengandung makna kesulitan dalam pemenuhan harapan sedangkan pernyataan kedua mengandung potensi adanya harapan untuk mengatasi masalah yang ada dengan mencari perspektif yang berbeda antara diri individu dan pihak lain.

Dalam konteks pemahaman akan keberagaman, harapan dapat dilekatkan dengan keyakinan bahwa dengan keberagaman akan memunculkan berbagai pandangan serta cara berpikir beragam. Langkah berikutnya lebih difokuskan pada proses evaluasi cara perpikir yang ada dan dipadukan dengan kriteria penting dalam pencapaian solusi yang paling tepat sesuai situasi yang ada.

Pendekatan Kultural. Inti dari pemahaman kultural adalah pemahaman budaya, yang secara esensial berkaitan dengan tata nilai yang diserap oleh individu. Tata nilai yang diinternalisasi oleh seorang individu akan terkait dengan pengalaman hidup yang dikenalkan oleh lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, masalah keluasan ruang lingkup dalam kehidupan akan memberikan makna yang berbeda bagi setiap individu. Semakin luas pengalaman kehidupannya, maka semakin banyak yang bersangkutan akan mengenal tata nilai yang ada dalam kehidupannya. Perluasan dan variasi tata nilai yang dikenalnya akan mematangkan diri yang bersangkutan dalam beradaptasi tanpa harus meleburkan diri dengan tata nilai baru. Paling tidak, pengenalan tata nilai baru akan memperluas cakrawala pemaham tentang keberadaannya dan sekaligus mengantisipasi cara menghadapi.

Dalam pandangan seorang ilmuwan psikologi pendidikan, Thorndike, dikenal sebuah rumus sederhana dalam memahami perilaku individu. Menurut ahli tersebut Perilaku = fungsi dari Individu + Lingkungan (Feldman & Arnold, 1986). Hal ini berarti bahwa perilaku seseorang merupakan gabungan fungsi individu dengan segala atributnya dan lingkungan dengan segala normanya. Konsep teori tersebut tidak jauh dengan konsep yang dikedepankan oleh Ki Hajar Dewantara yang menekankan perilaku merupakan perpaduan antara *Dasar* dan *Ajar*.

Terkait dengan aspek keberagaman, ketika pendekatan kultural diajarkan, maka potensi dasar akan dapat menerima dan memformulasi cara

mengatasi masalah manakala terkait dengan kehidupan bersama.

Salah satu penerapan yang perlu dipikirkan ulang adalah budaya membangun asrama daerah di setiap kota pelajar. Pendirian asrama pelajar berbasis daerah justru dapat menyebabkan proses internalisasi keberagaman budaya menjadi kurang leluasa dan tak jarang justru memunculkan sentimen budaya daerah.

Pendekatan Psikologi Kepemimpinan. Keberagaman merupakan keniscayaan dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dalam prinsip ilmu perilaku, setiap individu memiliki perbedaan individu, walau dua insan lahir dalam kondisi kembar. Hal penting dalam pendekatan psikologi kepemimpinan: seorang pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan atau organisasi yang saling percaya, respek dan mencari keunggulan antar anggota tim (Manning & Curtis, 2007). Proses kepemimpinan seperti ini akan berdampak besar dalam mempengaruhi anggota organisasi. Ketiga sikap tersebut akan mendorong sebuah proses optimalisasi kinerja anggota tim dan sekaligus kinerja organisasi. Pola kepemimpinan ini akan membantu para pimpinan organisasi publik untuk mendapatkan komitmen serta partisipasi aktif dari masyarakat yang dipimpinnya.

Penutup

Dalam pandangan Islam, sebuah ayat Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Hujurat 49: 13 yang artinya *"Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*. Hal ini mengindikasikan bahwa keberagaman adalah sebuah cara untuk mengenal dan memberikan kasih sayang pada sesama. Ini penting dan memiliki makna besar dalam kehidupan.

Daftar Acuan

Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005) Theory-based Behavior Change Interventions: Comments on Hobbis and Sutton. *Journal of Health Psychology, 10*(1), 27–31.

Belbin, R. M. (1996). *Management Teams: Why They Succeed or Fail*. Singapore: Butterworth Heinnemann.

Blaine, B. (2007). *Understanding the Psychology of Diversity*. London: SAGE Publisher.

Feldman. D. C., & Arnold, H. J. (1986). *Organizational Behavior*. San Fransisco: Mc.Graw Hill.

Manning, G., & Curtis, K. (2007). *The Art of Leadership* (Second edition). Boston: McGraw-Hill -Irwin.

Sumaryono. *Managing diversity, fleeting the glory of the nation?* *In an orchestra's performance, beauty emerges from the variety of sounds produced by each instrument played by the artists. The beauty of the sounds is the product of a harmonious integration of the different pitches of the various instruments. This harmony serves to pacify the soul, make happy and inspire the listeners. Diversity which is well integrated is indeed meaningful. Why is so? Teamwork does involve synergy and a goal. Each instrument in an orchestra has its uniqueness. When these uniquenesses appear freely by themselves they would only produce chaos. When beauty is the goal the role of a director in harmonizing the sounds and the rhythm of all the instruments is a key in creating beauty and happiness of the listeners. That is precisely the meaning of a management borrowed from the world of an orchestra. The question is thus, could harmony be the pillar in managing the Indonesian nation characterized by diversity into a unity which we call Bhinneka Tunggal Ika?*

Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif *the Psychology of Diversity*

Ira Puspitawati, Yosefina Marijke Watofa, & Wahyu Rahardjo

Sejak abad ke 14 Masehi dan selama 74 tahun merdeka, bumi Indonesia sudah diperkenalkan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kendati demikian, kebhinekaan untuk mewujudkan ketunggalan bukan semata suatu tujuan, melainkan suatu perjuangan yang harus senantiasa dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia. Perjuangan ini tidak ringan karena Indonesia adalah negara ke lima di dunia dengan pulau terbanyak (Otieno, 2018), suku, etnis dan budaya yang beragam sehingga menduduki peringkat ke 24 di dunia (Wee, 2018) serta keragaman agama yang menduduki peringkat 112 dari 233 negara (Pew Research Center, 2018).

Keragaman (*diversity)* yang ada di Indonesia mengajak bangsa ini untuk memahami bahwa keragaman dikonstruksi secara sosial dan konstruksi tersebut mempengaruhi identitas dan perilaku individu (Blaine, 2012)*, s*eperti yang diuraikan dalam Psikologi Keberanekaragaman (*The Psychology of Diversity*). Oleh karena itu, bila terjadi konflik SARA yang muncul dari keberanekaragaman, maka sudah saatnya bukan perbedaan atau kesenjangan yang dijadikan dasar menelaah konflik tersebut. Yang penting untuk ditelaah adalah bagaimana masyarakat Indonesia mengkonstruksi secara sosial keragaman itu sehingga sampai menimbulkan kondisi berbeda dan menimbulkan kontra dari kelompok yang merasa dibedakan.

Psikologi Keanekaragaman berangkat dari konsep bahwa karakteristik dasar dari berbagai bentuk kehidupan adalah aneka ragam (Sánchez-López, 2017). Hal tersebut terbukti dari kenyataan bahwa setiap makhluk hidup akan mengikuti distribusi normal. Meskipun sebagian besar berada pada taraf rerata, namun selalu ada yang melampaui deviasi standar dan masuk dalam golongan penyimpangan di daerah positif maupun di daerah negatif.

Keanekaragaman sebagai Konstruksi Sosial

Psikologi sendiri sudah mengenal konsep keanekaragaman sejak *individual differences* diperkenalkan oleh para ahli psikologi. *Individual differences* ini bisa bersifat intraindividual (dalam diri individu sendiri, seperti keanekaragaman dalam minat, *trait,* kemampuan kognitif, dan sebagainya), interindividual (interaksi individu dengan lingkungan di luar dirinya, seperti kemampuan verbal, kecenderungan introvert-ekstrovert, dan sebagainya) maupun *intergroup* (ditandai dengan adanya satu atau lebih dimensi perbedaan

dalam sekelompok individu dibandingkan kelompok individu yang lain), baik yang terlihat secara nyata seperti warna kulit atau pekerjaan, maupun dalam kondisi yang tidak terlihat nyata seperti pandangan politik, keyakinan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, konstruksi sosial memiliki peran dalam membuat keanekaragaman menjadi sesuatu yang positif atau negatif. Konstruksi sosial terjadi ketika perbedaan antar kelompok memang ada dan berakar pada adaptasi sosial budaya yang dilakukan anggota kelompok melalui konteks dan lingkungan yang juga berbeda (Jones, Dovidio, & Vietze, 2014). Lebih lanjut, dipaparkan oleh Jones, Dovidio, dan Vietze (2014) bahwa konstruksi sosial ini tergambarkan melalui topik-topik yang diperbincangkan sehari-hari, yang terlukiskan di media massa, terwakili dalam bentuk stereotip, dan kerap terformulasikan dalam aturan serta terefleksikan dalam kegiatan hidup di keseharian.

Individu mempersepsikan perbedaan secara subjektif. Usia, jenis kelamin, dan etnis merupakan beberapa perbedaan yang secara visual tampak jelas dan mendorong pengkategorisasian secara demografi dan sosial (Guillaume, Dawson, Priola, Sacramento, Woods, Higson, Budhwar, & West, 2014; Jones, Dovidio, & Vietze, 2014). Perbedaan ini terkadang disebut cukup *fair* karena tidak terlalu mempergunakan kognitif dan berada di tingkat permukaan (*surface-level identity*) (Jaiswal & Dyaram, 2018).

Perbedaan ini kemudian juga memiliki konsekuensi secara sosial. Tajfel (1982) menyodorkan teori kategorisasi sosial (*social categorization*) dengan menjelaskan bahwa individu yang terpapar perbedaan akan menciptakan karakteristik sendiri untuk mengkategorisasikan dirinya dan orang lain melalui klasifikasi sosial. Konsekuensi hal ini adalah individu akan mengembangkan konsep "kami" dan "mereka" berangkat dari perbedaan-perbedaan tersebut hingga memberikan label untuk setiap kelompok yang ada (Jones, Dovidio, & Vietze, 2014).

Kategorisasi ini menempatkan diri individu dan memainkan peranan yang berbeda pada kelompok-kelompok sosial yang bersifat cair. Hal ini menandakan bahwa peran sosial yang dimainkan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks di mana individu sedang berada. Aronson, Wilson, Akert, dan Sommers (2016) menjelaskan bahwa peran sosial memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk identitas individu. Identitas ini dapat bermacam-macam, dan salah satu yang terkuat dalam struktur masyarakat adalah identitas etnis dan bahkan identitas agama.

Identitas etnis dan bahkan identitas agama dapat dipersepsikan sebagai potensi positif untuk kemajemukan masyarakat, terciptanya kohesivitas, hingga terbentuknya identitas nasional yang utuh dan kuat (Bilali, Iqbal, & Celik, 2018;

Bisin, Patacchini, Verdier, & Zenou, 2016). Konsekuensi positif dari perbedaan dan keberagaman ini muncul karena individu dalam masyarakat mampu melihat keunikan dari perbedaan yang ada. Keunikan ini akan memunculkan benang merah pada beberapa hal yang menjadi titik tolak kesamaan dalam keberagaman. Hal ini membantu menggagalkan kemungkinan individu melebur terlalu jauh dalam kelompoknya sehingga kehilangan identitas pribadi serta menjadi rentan dalam menghadapi orang lain dari kelompok yang berbeda (Hogg & Reid, 2006; Hogg, Terry, & White, 1995).

Terkait perihal identitas etnis, temuan Ketab, Sharif, Mehrabi, dan Rahman (2019) menyebutkan bahwa identitas yang dibawa etnisitas memengaruhi perspektif etnosentrisme dan cara individu berinteraksi dengan orang lain yang berasal dari etnis yang berbeda. Masalah klasik muncul karena persepsi yang dikembangkan oleh individu dari proses atribusi terbentur dengan konsistensi kognisi (Jones, Dovidio, & Vietze, 2014). Hal ini cukup diperparah dengan generalisasi yang dilakukan individu sebagai upaya menyintas pemaknaan terhadap apa yang dilihat atau didengarnya. Pada titik ini, persoalan salah paham dan prasangka seringkali terjadi pada diri individu.

Individu menjadi sangat rentan untuk terjebak dalam persepsi *in-group bias* atau perasaan positif terhadap orang lain yang dianggap menjadi bagian dari kelompok yang sama dengan dirinya, sehingga memberikan perlakuan yang istimewa kepadanya. Di saat yang bersamaan, individu justru memberi perlakuan yang berbeda yang penuh dengan prasangka kepada orang lain yang dianggap bukan berasal dari kelompoknya (Aronson, Wilson, Akert, & Sommers, 2015). Persoalan *in-group bias* ini bahkan dapat terjadi di level permukaan saat individu melihat perbedaan yang ada secara visual dari segi fisik dan tanda-tanda tubuh tertentu (Koenig, Nauroth, Lucke, Lachnit, Gollwitzer, & Uengoer, 2017).

Lebih lanjut, bias ini juga dapat terjadi pada level institusional dan juga pada level masyarakat (Jones, Dovidio, & Vietze, 2014). Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa bias pada level individu memiliki peran lebih krusial dalam memicu terjadinya konflik karena bersifat sangat subjektif dan terjadi dalam interaksi langsung dalam masyarakat.

Persoalan kelompok minoritas dan mayoritas merupakan masalah klasik yang ditemui di banyak negara dan masyarakat. Tarikan berseberangan ini merupakan salah satu hal yang dianggap memicu konflik di masyarakat. Perihal persepsi tentang keadilan, dominasi kelompok yang merasa lebih kuat (karena berposisi sebagai mayoritas) adalah hal-hal yang kerap ditemui dalam konflik karena perbedaan dan keberagaman (Jones, Dovidio, & Vietze, 2014).

Salah satu kunci yang dianggap dapat mereduksi kemungkinan terjadinya pergesekan dalam masyarakat karena persoalan perbedaan dan keberagaman

adalah persepsi yang positif tentang multikulturalisme. Ada beberapa hal yang dapat dikedepankan agar individu di masyarakat mengembangkan persepsi yang positif mengenai multikulturalisme.

Pertama adalah melalui pendidikan di institusi pendidikan dan di dalam keluarga yang menekankan pada keberagaman. Pendidikan berbasis prinsip interkultural ditengarai mampu secara efektif mendorong diskusi yang lebih sehat antar individu mengenai keberagaman (Arphattananon, 2018; Kusa, Sladova, & Kopecky, 2014; Novianti & Tripambudi, 2014; Omar, Noh, Hamzah, & Majid, 2015). Pendidikan berbasis keberagaman ini dapat dilakukan sedari dini pada anak, dilakukan dengan disertai konten dan contoh aktual yang menunjang dalam proses belajar mengajar (Iqbal, 2014; Logvinova, 2016; Omar, Noh, Hamzah, & Majid, 2015).

Hal ini dapat terjadi saat staf pengajar dan juga orang tua meningkatkan pemahaman terkininya terkait multikulturalitas sehingga kemudian memengaruhi opini dan cara penyampaian materi pendidikan yang lebih positif mengenai keberagaman sehingga siswa akan mengembangkan perilaku yang sama (de la Mare, 2014; Iqbal, 2014; Kusa, Sladova, & Kopecky, 2014; Tonbuloglu, Aslan, & Aydin, 2016). Pengajar dan orang tua yang seperti ini dianggap memiliki peran yang besar dalam mengarahkan siswa dan anak terutama yang berasal dari akar budaya keluarga monokultur untuk memiliki sikap yang lebih positif terhadap keberagaman (Elmeroth, 2009; Iqbal, 2014).

Konsekuensi positif dari pendidikan yang ramah terhadap perbedaan dan keberagaman ini adalah mendorong individu untuk terlibat dan berinteraksi langsung dengan orang lain yang bukan berasal dari kelompoknya. Pengalaman langsung yang didapatkan individu dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda merupakan hal kedua yang dianggap penting untuk mendapatkan persepsi yang lebih positif mengenai keberagaman (Aytug, Kern, & Dilchert, 2018; Aytug, Rua, Brazeal, Almaraz, & Gonzalez, 2018). Studi Finseraas, Hanson, Johsen, Kotsadam, dan Torsvik (2019) menegaskan pentingnya kontak antar etnis untuk meningkatkan rasa percaya di antara kelompok yang berbeda.

Kesan baik yang diperoleh saat mendapatkan pengalaman positif ini akan membantu mereduksi prasangka yang dimiliki melalui justifikasi yang tepat dan inteligensi kultural yang lebih baik (Forthmann, Regehr, Seidel, Holling, Celik, Storme, & Lubart, 2018; Nguyen, Jefferies, & Rojas, 2018). Individu akan belajar memahami bahwa di dalam keberagaman terdapat nilai-nilai dasar yang sifatnya universal terkait prinsip maupun berbagai aktivitas yang dapat dibagi satu sama lain (Jones, Dovidio, & Vietze, 2014).

Persoalan *in-group favoritism* bukan hanya membawa pada etnosentrisme, melainkan juga pada stereotip yang kerap kali berujung pada pergesekan

hingga konflik dalam masyarakat. Hal ini rentan terjadi karena prasangka antar etnis dapat terjadi pada kelompok yang bahkan memiliki tingkat pendidikan cukup baik seperti mahasiswa (Abidin, Fitriana, & Trirahardjo, 2001; Adelina, Hanurawan, & Suhanti, 2017; Ali, Indrawati, & Masykur, 2010; Ulaan, Herani, & Rahmawati, 2016).

Fenomena Konstruksi Sosial yang Negatif terhadap Keanekaragaman

Keanekaragaman budaya, bahasa, etnis dan agama yang ada di Indonesia, sangat rentan terhadap munculnya berbagai konflik. Konflik tersebut muncul karena terjadi konstruksi sosial yang negatif terhadap keanekaragaman. Kasusnya dapat ditelaah dari fenomena putra daerah dan pendatang di bumi Papua.

Beberapa tahun lalu, pernah ada pencanangan program Papua sebagai tujuan transmigrasi. Hal ini sangat ditolak olah para Tetua Adat di Papua karena berdasarkan pengalaman program transmigrasi pada masa Orde Baru, lahan hutan banyak yang dibuka dan lapangan kerja para putra daerah makin terbatas karena para transmigran memiliki kompetensi yang lebih dan seolah merebut lapangan pekerjaan putra daerah. Konstruksi sosial telah menyebabkan pendatang dianggap sebagai “penjajah”.

Seandainya para pejabat saat itu bisa memberikan bimbingan dan informasi bahwa para transmigran datang sebagai saudara yang akan mengajarkan *skill* maupun *knowledge* serta memperhatikan hak ulayat, maka konstruksi social terhadap pendatang akan jadi berbeda.

Fenomena Konstruksi Sosial yang Positif terhadap Keanekaragaman

Persepsi terhadap kelompok lain dapat dibangun berdasarkan empati. Kelompok difabel, misalnya, kerap dihargai sebagai kelompok yang mungkin tidak sempurna secara fisik, namun tetap dihargai dan diusahakan diberikan banyak kemudahan dalam menjalani aktivitas dan kehidupan sehari-harinya. Studi milik Tran (2014) menyebutkan bahwa masyarakat mengkonstruksikan kelompok difabel dengan empati, yaitu sebagai kelompok yang karena kekurangan fisiknya harus diperlakukan secara baik. Pengetahuan yang baik mengenai kelompok difabel dibangun sedemikian rupa oleh dan di dalam masyarakat agar sikap yang muncul juga positif dan perlakukan yang diperlihatkan kepada mereka juga bersifat menghargai.

Di dalam perspektif yang lain, konstruksi sosial akan identitas kelompok juga menyajikan cerita berbeda. Temuan Zuo, Chen, dan Zhao (2018) menyatakan bahwa *in-group favoritism* seringkali terkait dengan kompetisi antar

kelompok yang juga rentan pergesakan dan konflik. Namun jika kompetisi ini dilakukan dengan tujuan yang sama, sportivitas dalam olahraga, misalnya, maka hasilnya bisa berbeda. *In-group favoritism* terkait dengan identitas sosial, sementara itu keberpihakan individu dengan kelompoknya dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan identitas sosial yang positif (Everett, Faber, & Crockett, 2015).

Dalam dunia olahraga, *in-group favoritism* dapat meningkatkan motivasi berprestasi bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya karena mengakomodasi determinasi yang bersifat kolektif (Rees, Haslam, Coffee, & Lavallee, 2015). Dalam olahraga, keragaman dapat menjadi sesuatu yang kohesif ketika ada tujuan bersama yang dipercaya dapat memengaruhi rasa memiliki, kebermaknaan dan kontinuitas sebagai anggota kelompok (Balliet, Wu, & De Dreu, 2014; Thomas, Brown, Easterbrook, & Vignoles, 2017).

Kesimpulan dan Saran

Kesenjangan tidak akan jadi masalah karena dalam *psychology of diversity* tetap mengutamakan keanekaragaman dan bukan kesamaan; sedangkan kesenjangan hanya akan terjadi bila merasa terjadi ketidakadilan atau ketidaksamaan.

Keanekaragaman merupakan suatu konstruksi sosial, sehingga sangat tergantung dari individu pelaku dan masyarakat sebagai penerima hasil konstruksi sosial tersebut. Bila konstruksi sosial dari suatu keanekaragaman dibuat positif, maka masyarakat penerima hasil konstruksi tersebut akan positif pula dan berimbas pada identitasnya yang positif dan perilakunya yang positif. Demikian pula sebaliknya, bila konstruksi sosial yang diciptakan negatif, maka identitas dan perilakunya akan menjadi negatif.

Keanekaragaman dari sudut pandang *psychology of diversity* seharusnya akan berdampak pada berbagai kebijakan yang menelaah segala aspek kehidupan berdasarkan keunikan masing-masing daerah. Misalnya, sistem pendidikan yang dikawinkan dengan kondisi budaya setempat. Di Papua, bila diterapkan standar nasional bidang akademik untuk kondisi setempat maka banyak "harta karun" sumberdaya manusia yang terabaikan. Contoh lain; Papua adalah "pabrik" untuk atlet karena masyarakat Papua sebagian besar dikaruniai kekuatan fisik yang lebih dibandingkan penduduk Indonesia dari pulau-pulau yang lain. Dengan menerapkan keberanekaragaman maka bakat fisik siswa Papua akan mendapat perhatian khusus dalam sistem sekolah yang ujungnya akan sampai pada tujuan bersama, yakni tercapainya cita-cita nasional berupa tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Daftar Acuan

Abidin, Z., Fitriana, E., & Trirahardjo, S. (2001). Prasangka etnis mahasiswa Aceh dan Papua Barat yang tinggal di Bandung terhadap suku Jawa. *Jurnal Sosiohumaniora, 3*(2), 113-126.

Adelina, F., Hanurawan, F., & Suhanti, I. Y. (2017). Hubungan antara prasangka sosial dan intensi melakukan diskriminasi mahasiswa etnis Jawa terhadap mahasiswa yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sains Psikologi, 6*(1), 1-8.

Ali, R., Indrawati, E. S., & Masykur, A. M. (2010). Hubungan antara identitas etnik dengan prasangka terhadap etnik Tolaki pada mahasiswa Muna di Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara. *Jurnal Psikologi Undip, 7*(1), 18-26.

Arphattananon, T. (2018). Multicultural education in Thailand. *Intercultural Education, 29*(2), 149-162. doi:10.1080/14675986.2018.1430020

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M., & Sommers, S. R. (2016). *Social psychology (ninth edition)*. New York: Pearson.

Aytug, Z. G., Kern, M. C., & Dilchert, S. (2018). Multicultural experience: Development and validation of a multidimensional scale. *International Journal of Intercultural Relations, 65,* 1-16. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018. 04.004

Aytug, Z. G., Rua, T., Brazeal, D. V., Almaraz, J. A., & Gonzalez, C. B. (2018). A socio-cultural approach to multicultural experience: Why interaction matter for creative thinking but exposures don't. *International Journal of Intercultural Relations, 64,* 29-42. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.03.004

Balliet, D., Wu, J., & De Dreu, C. K. W. (2014). Ingroup favoritism in cooperation: A meta-analysis. *Psychological Bulletin, 140*(6), 1556-1581. http://dx.doi.org/10.1037/a0037737

Bilali, R., Iqbal, Y., & Celik, A. B. (2018). The role of national identity, religious identity, and intergroup contact on social distance across multiple social devides in Turkey. *International Journal of Intercultural Relations, 65*, 73-85. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.04.007

Bisin, A., Patacchini, E., Verdier, T., & Zenou, Y. (2016). Bend it like Beckham: Ethnic identity and integration. *European Economic Review, 90*, 146-164. http://dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.01.006

Blaine, B. E. (2012). *Understanding the psychology of diversity*. New York: Sage.

de la Mare, D. M. (2014). Communicating for diversity: Using teacher discussion groups to transform multicultural education. *The Social Studies, 105*(3), 138-144. doi: 10.1080/00377996.2013.859118

Elmeroth, E. (2009). Student attitudes toward diversity in Sweden. *Intercultural Education, 20*(4), 333-344. doi: 10.1080/14675980903351961

Everett, J. A. C., Faber, N. S., & Crockett, M. (2015). Preferences and beliefs in ingroup favoritism. *Frontiers in Behavioral Neuroscience, 9.* doi: 10.3389/fnbeh.2015.00015

Finseraas, H., Hanson, T., Johnsen, A. A., Kotsadam, A., & Torsvik, G. (2019). Trust, ethnic diversity, and personal contact: A field experiment. *Journal of Public Economics, 173*, 72-84. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.02.002

Forthmann, B., Regehr, S., Seidel, J., Holling, H., Celik, P., Storme, M., & Lubart, T. (2018). Revisiting the interactive effect of multicultural experience and openness to experience on divergent thinking. *International Journal of Intercultural Relations, 63,* 135-143. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017. 10.002

Guillaume, Y., R. F., Dawson, J. F., Priola, P., Sacramento, C. A., Woods, S. A., Higson, H. E., Budhwar, P. W., & West, M. A. (2014) Managing diversity in organizations: An integrative model and agenda for future research, *European Journal of Work and Organizational Psychology, 23*(5), 783-802. doi: 10.1080/1359432X.2013.805485

Hogg, M. A., & Reid, S. A. (2006). Social identity, self-categorization, and the communication of group norms. *Communication Theory, 16*, 7-30. doi: 10.1111/j.1468-2885.2006.00003.x

Hogg, M. A., Terry, D. J., & White, K. M. (1995). A tale of two theories: A critical comparison of identity theory with social identity theory. *Social Psychology Quarterly, 58*(4), 255-269.

Iqbal, H. (2014). Multicultural parenting: Preparation for bias sosialisation in British South Asian and White families in the UK. *International Journal of Intercultural Relations, 43,* 215-226. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel. 2014.08.017

Jaiswal, A., & Dyaram, L. (2018). Diversity: A matter of reality or perception? *International Journal of Organizational Analysis, 26*(5), 798-811. https://doi.org/10.1108/IJOA-01-2018-1324

Jones, J. M., Dovidio, J. F., & Vietze, D. L. (2014). *The psychology of diversity: Beyond prejudice and racism*. Chichester: Blackwell.

Ketab, S. M. G., Sharif, S. P., Mehrabi, D., & Rahman, N. A. B. A. (2019). Effects of ethnocentrism and online interethnic interactions on interethnic bridging social capital among university students: The moderating role of ethnicity. *International Journal of Intercultural Relations, 71*, 48-59. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2019.04.004

Koenig, S., Nauroth, P., Lucke, S., Lachnit, H., Gollwitzer, M., & Uengoer, M.

(2017). Fear acquisition and liking of out-group and in-goup members: Learning bias or attention? *Biological Psychology, 129*, 195-206.

Kusa, J., Sladova, J., & Kopecky, J. (2014). Literary education as a place for multicultural dialogue. *Procedia Social and Behavioral Sciences, 149*, 479-483. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.08.294

Logvinova, O. K. (2016). Socio-pedagogical approach to multicultural education at preschool. *Procedia Social and Behavioral Sciences, 233,* 206-210. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.10.203

Nguyen, A. M. T. D., Jefferies, J., & Rojas, B. (2018). Short term, big impact? Changes in self-efficacy and cultural intelligence, and the adjustment of multicultural and monocultural students abroad. *International Journal of Intercultural Relations, 66*, 119-129. https://doi.org/10.1016/j. ijintrel. 2018.08.001

Novianti, D., & Tripambudi, S. (2014). Studi fenomenologi: Tumbuhnya prasangka etnis di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 12*(2), 119-135.

Omar, N., Noh, M. A. C., Hamzah, M. I., & Majid, L. A. (2015). Multicultural education practices in Malaysia. *Procedia Social and Behavioral Sciences, 174*, 1941-1948. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.859

Otieno, M. O. (2017). Which country has the most islands? https://www. worldatlas.com/articles/which-country-has-the-most-islands. html

Pew Research Center. (2014). *Table religious diversity index score by country*. https://www.pewforum.org/2014/04/04/religious-diversity-index-scores-by-country/

Rees, T., Haslam, S. A., Coffee, P., & Lavallee, D. (2015). A social identity approach to sport psychology: Principles, practice, and prospects. *Sport Medicine, 45*(8), 1083-1096.doi: 10.1007/s40279-015-0345-4

Sanchez-Lopez, M. P. (2017). *The psychology of gender and health, 1st edition conceptual and applied global concern*. New York: Academic Press.

Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations. *Annual Review of Psychology*, *33*(1), 1-39. https://doi.org/10.1146/annurev. ps.33.020182. 000245

Thomas, W. E., Brown, R., Eaterbrook, M. J., & Vignoles, V. L. (2017). Social identification in sport teams: The role of personal, social and collective identity motives. *Personality and Social Psychology Bulletin, 43*(4), 508-523.

Tonbuloglu, B., Aslan, D., & Aydin, H. (2014). Teachers' awareness of multicultural education and diversity in school settings. *Eurasian Journal of Educational Research, 64*, 1-28. http://dx.doi.org/10.14689/ ejer.2016.64.1

Tran, K. V. (2014). Social construction of disability and its potential impacts to

welfare practice in Vietnamese contexts. *SpringerPlus, 3(1),* 325. doi: 10.1186/2193-1801-3-325

Ulaan, K., Herani, I., & Rahmawati, I. (2016). Prasangka mahasiswa Papua pada etnis Jawa di kota Malang. *Jurnal Mediapsi, 2*(1), 11-18.

Wee, R. Y. (2018). *Most ethnically diverse countries in the world*. https://www.worldatlas.com/articles/most-ethnically-diverse-countries-in-the-world.html

Zuo, Y., Chen, B., & Zhao, Y. (2018). The destructive effect of ingroup competition on ingroup favoritism. *Frontiers in Psychology, 9*, 2207. doi: 10.3389/ fpsyg.2018.02207

Puspitawati, Ira, Watofa, Yosefina Marike, & Rahardjo, Wahyu. *Bhinneka tunggal ika in the psychology of diversity perspective.* *Differences and diversity are classic problems in many countries, including in Indonesia. The existing problems related to diversity can basically be explained through psychology. Friction and conflict in the society often occur because the meaning of individuals and society towards diversity is built in the perspective of how the majority group sees it. This unique and contextual social construction coloring many stories related to the issue of difference and diversity. Because social construction is very flexible, a more friendly and positive perspective on differences will make social construction more friendly to diversity. This is certainly in accordance with the breath of Bhinneka Tunggal Ika.*

Memancing Kesadaran akan Keberagaman

M. Arief Sumantri

"Segala sesuatu akan berbeda jika dilihat dari segi perbedaannya, dan segala sesuatu akan menjadi sama, jika dilihat dari kesamaannya"

Psikologi lintas budaya dan psikologi multikultural menjadi istilah yang kerap terlihat dipertukarkan dalam sepanjang literatur psikologi, kendati kedua istilah tersebut secara geografis memiliki penekanan wilayah studi yang berbeda baik pada budaya maupun perilaku. Psikologi lintas budaya lebih menekankan pada perbedaan ataupun persamaan dari pengaruh budaya dalam *range* antarnegara atau antarwilayah, sedangkan psikologi multikultural lebih berfokus pada ras, etnis, ataupun kelompok budaya yang berada didalam suatu negara atau suatu wilayah/komunitas (Segal, Lonner, & Berry, 1998 dalam Organista, Marin & Chun, 2018). Penekanan wilayah studi semacam ini diperlukan untuk menghindari proses generalisasi yang tidak sesuai. Temuan-temuan studi lintas budaya perlu untuk diperiksa secara cermat sebelum digeneralisasikan pada populasi etnis tertentu, dan demikian pula sebaliknya. Misalnya, sebuah studi mengenai pengembangan struktur nilai anak-anak di Beijing (dalam Organista *dkk*., 2018) yang tidak dapat digeneralisasikan pada anak-anak Cina-Amerika di San Francisco. Hal ini dikarenakan keduanya terpapar sejumlah perbedaan penting terkait pola asuh anak, termasuk perihal sekolah (sekolah di Beijing biasanya disubsidi oleh publik ataupun pemerintah), beserta keanekaragaman ras dan etnis di lingkungan sosialnya (keanekaragaman di San Francisco jauh lebih besar).

Selain itu ada istilah psikologi etnis dan psikologi budaya. Dilansir dari halaman APA Dictionary, psikologi etnis lebih mengkaji bagaimana budaya, bahasa, beserta fenomena terkait lainnya dari berbagai kelompok etnis yang ada didalam suatu negara/wilayah - mempengaruhi sikap, pengalaman, dan perilaku anggota kelompoknya. Psikologi budaya sendiri lebih merujuk pada proses-proses psikologis yang secara inheren diatur oleh budaya; sifatnya interdisipliner. Meskipun psikologi etnis juga dipengaruhi oleh ilmu sosiologi tetapi perspektif psikologi budaya dapat dikatakan lebih heterogen; fokusnya adalah menjelaskan bagaimana fungsi psikologis manusia terbentuk oleh budaya melalui berbagai hubungan antar individu didalam konteks sosial masyarakatnya. Psikologi budaya dan lintas budaya juga memiliki karakteristik yang berbeda (Heine &

Ruby, 2010). Pada umumnya psikologi lintas budaya menggunakan budaya sebagai instrumen untuk menguji universalitas dari sebuah proses psikologis. Ambil contoh sebuah teori tahap perkembangan; psikologi lintas budaya akan lebih mempertanyakan apakah teori tahap perkembangan tersebut dapat bersifat universal di berbagai budaya lainnya, sedangkan psikologi budaya akan lebih cenderung mengkaji bagaimana praktik budaya lokal mempengaruhi tahap perkembangan. Perihal psikologi multikultural, Organista *dkk*., (2018) juga menemukan bahwa istilah tersebut terkadang disebut sebagai psikologi etnis atau psikologi etnis minoritas.

Melalui perspektif sebaliknya, baik psikologi lintas budaya (*cross-sectional psychology*) maupun psikologi multikultural (*multicultural psychology*) nampaknya memiliki keyakinan yang sama. Bahwa agar psikologi dapat valid dan berguna, maka pengaruh timbal balik antara budaya dan perilaku individu haruslah dipertimbangkan (Segall *dkk*., 1998 dalam Organista *dkk*., 2018). Persamaan kepentingan dari semua istilah yang telah diurai sebelumnya tidak lain adalah untuk memperkaya, mengembangkan dan menyuburkan kemajuan teoritis serta penemuan-penemuan empiris dalam keilmuan psikologi. Realitasnya, segala sesuatu akan berbeda jika dilihat dari segi perbedaannya, sebaliknya segala sesuatu akan bisa menjadi sama jika dilihat dari kesamaannya. Apapun perspektifnya, semuanya adalah bagian dari keberagaman (*diversity*). Multikulturalisme hingga saat ini masih diyakini sebagai payung dari pluralisme dan keberagaman, menjadi wadah bagi setiap individu dan kelompok untuk saling mengakui serta menghormati setiap perbedaan yang ada; perbedaan ras, etnis, agama, gender, golongan maupun kelas sosial lainnya, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Penting untuk ditekankan, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, menjunjung tinggi keberagaman manusia sama halnya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"
(Pasal 28i Ayat 3 UUD 1945)

Perusakan properti pada salah satu acara tradisi masyarakat daerah Bantul akhir tahun 2018 (Edi, 2018), perusakan Bangunan Cagar Budaya (BCB) di Yogyakarta yang berakibat pada hilangnya nilai historis milik bangsa (Detiknews, 2015), hanyalah segelintir contoh dari sederet antrian bentuk ketidakhormatan terhadap nilai-nilai tradisional budaya. Hal-hal tersebut secara terang dan jelas melanggar apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi, mencoreng terminologi "*budaya*" sebagai unsur dari akal dan budi. Perusakan

terhadap nilai-nilai kebudayaan, secara sadar ataupun tidak, ikhlas ataupun terpaksa, terlebih dengan maksud dan tujuan tertentu (*intoleransi*), adalah ciri otentik individu dengan tingkat kesadaran budaya (*cultural awareness*) yang mengalami defisit. Terlebih dalam tingkat kesadaran terhadap keberagaman *(cultural diversity awareness*), sangat memungkinkan nilainya dibawah 0.

Sekedar informasi, kesadaran budaya justu akan memberikan individu suatu kemampuan untuk mengenali serta memahami bagaimana efek budaya terhadap perilaku, nilai-nilai, serta kepercayaan. Kesadaran budaya menjadi titik sentral sebelum interaksi dengan individu atau kelompok dari budaya yang berbeda mulai dilakukan (Deardorff, 2009). Kesadaran budaya juga akan menavigasi individu pada pemahaman bagaimana budaya (termasuk budaya pada etnisnya sendiri) mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kepribadian masyarakat dalam etnis tersebut. Dari pemahaman itulah, individu dapat menilai apakah hal-hal yang terdapat dalam budaya itu normal atau tidak. Wunderle (2006) menyebut kesadaran budaya sebagai kemampuan dari individu untuk mengakui serta memahami pengaruh budaya terhadap nilai-nilai dan perilaku. Oleh karena itulah, sekiranya individu perlu untuk memahami budaya yang berbeda dengan kebudayaannya, agar dapat menyadari kepercayaan serta adat istiadatnya sendiri, dan mampu menghormati hal-hal tersebut**.** Selain itu juga diharapkan dapat menyadari serta menghormati kepercayaan dan adat istiadat dari individu ataupun kelompok yang lain.

Perihal Emosi; tentu menjadi salah satu faktor penting di dalam proses interaksi semenjak Adam pindah ke Bumi. Kultur berbeda akan melahirkan pemahaman berbeda, ihwal emosi mana yang bisa diterima, diekspresikan, dan diizinkan untuk dipertontonkan di depan publik. Sebuah hasil studi (dalam Kertamuda, 2011) telah menunjukkan bahwa latar belakang etnis berpengaruh terhadap terjadinya kesalahan persepsi. Oleh karna itu sangatlah diperlukan pula pemahaman akan emosi, agar individu dapat terhindar dari konflik ataupun kesalahan persepsi; sehingga hubungan baik antar individu dengan budaya yang berbeda juga dapat terbina dengan mulus.

Melalui buku *Through the Lens of Cultural Awareness* (2006), Wunderle menampilkan tiga komponen utama yang wajib untuk dipahami dalam upaya mengembangkan kesadaran budaya, yakni pengaruh budaya (*cultural influences*), variasi budaya (*cultural variations*) dan manifestasi budaya (*cultural manifestations).* Ketiga komponen ini berfungsi untuk memberikan pemahaman pada individu mengapa kebudayaan di suatu etnis (termasuk etnisnya sendiri) bisa seperti itu adanya, dan juga hal-hal apa saja yang dapat ditemui individu didalam kebudayaan tersebut. Komponen ini diadopsi Wunderle dari Carl Arthur Solberg (2002). Meski digunakan dalam konteks militer, tetapi sangat

kental menyangkut pemahaman akan kebudayaan, sehingga tetap relevan untuk ditampilkan (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Taksonomi Budaya (Wunderle, 2006, hal. 12)

Why		*What*
Pengaruh Budaya	**Variasi Budaya**	**Manifestasi Budaya**
• Sejarah dan Warisan Asing • Organisasi Sosial • Tradisi • Bahasa	Perilaku • Kepekaan Konteks Nilai-nilai (*Values*) • Individualis vs Kolektivitas • Jarak Kekuasaan • Formalitas vs Informalitas • Penghindaran Ketidakpastian • Fokus Hubungan vs Fokus Kesepakatan • Orientasi Jangka Panjang vs Orientasi Jangka Pendek • Orientasi Waktu Kognisi • Gaya Penalaran	• Gaya Perencanaan • Pandangan Otoritas • Gaya Negosiasi • Kesediaan untuk Berkompromi • Penghindaran Risiko • Waktu dalam Pengambilan Keputusan

Pengaruh budaya dalam hal ini menjadi institusional utama, menyangkut warisan budaya, agama, tradisi, maupun bahasa yang mengikat masyarakat. Sejarah serta warisan budaya menjadi rujukan penting dalam mendefinisikan identitas suatu etnis dan ras, termasuk identitas nasional. Tetapi hal kritis biasanya bukanlah mengenai sejarah faktual itu sendiri, melainkan bagaimana memori kolektif serta interpretasi kelompok terhadap kejadian di masa lalu, yang kemudian dijadikan sebagai peringatan untuk diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah serta warisan budaya asing di suatu wilayah juga dapat memberikan panduan akan nilai-nilai yang cenderung menjadi ciri budaya ditempat tersebut, entah pada bidang sosial, politik, ataupun ekonomi. Agama serta spritualitas dalam suatu kebudayaan juga tidak sekedar hanya membahas struktur formasinya, tetapi lebih pada perannya di wilayah tersebut. Sekiranya perlu ditekankan bahwa karakteristik budaya dalam suatu wilayah tidaklah berlaku absolut, namun mencerminkan kecenderungan budaya yang terdapat didalamnya. Misalnya, beberapa individu mungkin begitu nasionalistis, sementara yang lainnya justru bersikap sebaliknya. Meski hal ini tidaklah berlaku bagi seluruh anggota masyarakat yang berada didalam suatu

sistem kebudayaan yang berlaku, tetapi tetap akan mempengaruhi cara individu berpikir dan berperilaku, sebab telah tertanam dalam skala besar di dalam struktur sosial maupun sejarah kebudayaan itu sendiri.

Para peneliti ilmu sosial (dalam Wunderle, 2006) membagi variasi budaya kedalam tiga kategori besar, yaitu perilaku, nilai (*value*) dan kognisi. Perilaku sebagai artefak budaya yang terlihat dan teramati; terdiri dari bahasa, aturan sosial, adat istiadat, struktur, ataupun lembaga budaya tertentu. Sensitivitas konteks (*context sensitivity*) meliputi gaya bahasa (*language style*), menunjukkan sejauh mana bahasa menekankan keadaan atau konteksnya. Antropolog linguistik Benjamin Whorf berpendapat bahwa isi dalam suatu bahasa terkoneksi langsung dengan isi dari suatu budaya, sehingga struktur bahasa secara langsung akan berkaitan dengan struktur budaya. Pada titik pointnya; bahasa tidak sekedar menyuarakan ide, tetapi juga sebagai pembentuk dari ide-ide itu sendiri. Oleh karnanya, individu tidak dapat berpikir di luar batas-batas bahasanya.

Bahasa yang dipergunakan juga bisa mempengaruhi cara individu mempersepsikan dunia *High* dan *low context* menjadi dua jenis budaya komunikasi yang sering dijadikan acuan. Dalam budaya komunikasi *low context*, kata-kata ditafsirkan lebih secara eksplisit. Kata-kata mewakili sebagian besar makna yang diucapkan, gerakan tubuh kurang memberikan sumbangsih. Tetapi dalam budaya komunikasi *high context,* makna lebih banyak tersirat ketimbang terwakili oleh kata-kata; sehingga dalam konteks ini bahasa *non-verbal*, termasuk penggunaan gerakan anggota tubuh semisal tangan dan sebagainya, menjadi cukup penting untuk diperhatikan. Penggunaan bahasa tubuh (*body language*) yang bervariasi dalam budaya juga berkaitan dengan jarak ketika berinteraksi (*personal space).* Sebuah studi sosial menyimpulkan bahwa makna emosional dari sebuah pesan hanya sebanyak 7% yang dikomunikasikan melalui kata-kata yang terucap, dimana 38% nya melalui paralinguistik (cara kata-kata diucapkan), kemudian 55% disampaikan dengan penggunaan gerakan, postur, dan ekspresi wajah. Pada budaya di mana bahasa tubuh memainkan peran kunci, perasaan serta respon emosional pada umumnya tidak didasarkan pada apa yang dikatakan, tetapi pada apa yang dilakukan saat komunikasi tengah berlangsung.

Nilai (*value*) menjadi dasar penilaian pada apa yang dianggap baik dan buruk; hal ini juga berlaku didalam sistem kebudayaan. Nilai-nilai juga menjadi prinsip untuk melakukan evaluasi, serta sebagai alternatif atau konsekuensi pada saat pengambilan keputusan. Bagi individu yang berada dalam sistem suatu budaya, nilai-nilai dapat menjadi lensa ketika mempersepsikan dunia. Selain memasukkan tiga variasi budaya tambahan (orientasi waktu, formalitas, dan sensitivitas konteks), Wunderlee (2006) juga menggunakan lima dimensi budaya dari Geert Hofstede untuk memahami *value* didalam kebudayaan yang berlaku:

Individualisme vs kolektivisme (*individualism vs collectivism*); mengacu pada hubungan antarindividu dalam setting budaya. Individualisme cenderung memprioritaskan kepentingan diri sendiri, sedangkan kolektivisme lebih memprioritaskan kepentingan kelompok (kelompok dalam hal ini bisa pula merujuk pada suku atau etnis).

Jarak kekuasaan (*power distance*) menjadi ukuran kesetaraan individu dalam kelompok. Jarak kekuasaan yang tinggi (*high power distance*) menunjukkan dukungan baik dari pengikut ataupun pemimpin; terhadap ketimpangan. Cenderung lebih memperdulikan status, menerima ketidaksetaraan sebagai bagian dari kekuasaan otoritas. Sedangkan jarak kekuasaan rendah (*low power distance*) menunjukkan kondisi sebaliknya: cenderung lebih menghargai dan memandang semua individu secara sama (*egalitarianism*). Di negara-negara *high power distance,* bawahan cenderung dianggap takut sehingga lebih sering mengikuti keputusan pemimpin tanpa adanya pertanyaan. Di negara-negara *low power distance,* individu cenderung lebih menyukai pemimpin yang konsultatif, mempertimbangkan saran dari bawahan saat pengambilan keputusan.

Formalitas vs Informalitas (*formality vs informality*); berkaitan dengan konsep jarak kekuasaan. Budaya formal sangat mementingkan tradisi, upacara, aturan sosial, maupun pangkat. Terstruktur secara hierarkis, dimana individu sangat sadar dengan status dirinya didalam hierarki tersebut (paling kental di sistem feodal). Sedangkan pada wilayah yang didominasi oleh budaya informal berlaku hal sebaliknya, individu lebih dipandang sama atau sederajat.

Penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidance*) memberi ukuran tentang bagaimana toleransi budaya terhadap ambiguitas. Sejauh mana budaya akan mendorong anggotanya dalam situasi asing yang tidak terstruktur, tidak diketahui, mengejutkan, bahkan terkesan berbeda. Pada budaya yang lebih didominasi oleh *uncertainty avoidance,* cenderung untuk menghindari risiko. Meminimalkan terjadinya situasi yang tidak diinginkan melalui pendekatan undang-undang dan pemberlakuan aturan yang ketat. Sedangkan pada budaya yang lebih mentolerir ketidakpastian (*uncertainty avoidance* rendah), cenderung toleran terhadap ambiguitas, lebih menerima risiko, serta lebih toleran pada pandangan yang berbeda.

Fokus pada hubungan vs fokus pada kesepakatan (*relationship focus vs deal focus*); mengacu pada pentingnya hubungan pribadi dalam bisnis, terutama saat bernegosiasi. Budaya yang fokusnya lebih kepada hubungan, memperlihatkan individu yang lebih senang berurusan dengan teman, keluarga, atau orang yang sebelumnya memang telah dikenal; individu selalu ingin mengenal mitranya dengan baik sebelum pada akhirnya memulai percakapan perihal bisnis. Pada budaya yang fokusnya lebih pada kesepakatan, individu relatif terbuka berbisnis

dengan orang asing; hubungan bisnis dan pribadi sepenuhnya dilihat sebagai hal yang terpisah. Budaya *deal fokus* biasanya menyatu pada wilayah dengan budaya individualis yang tinggi (Wunderlee, 2006); menilai berdasarkan kesepakatan yang ditawarkan, bukan berdasar pada orang ataupun organisasi yang menawarkannya.

Terkait orientasi jangka panjang (*long-term*); lebih bertumpu pada hal-hal apa yang dapat diraih di masa akan datang, semisal pelestarian budaya yang kedepannya bisa menjadi objek wisata, atau penghormatan terhadap tradisi budaya sedari dini yang kelak akan menjadi warisan untuk generasi selanjutnya. Hal sebaliknya, orientasi jangka pendek (*short-term*) condong hanya melihat sesuatu berdasarkan masa lalu dan masa kini, hingga akhirnya cenderung "*masa bodoh*" pada hal-hal yang dapat diraih dimasa depan. Seperti kasus perusakan Bangunan Cagar Budaya (BCB) di Yogyakarta, berakibat pada hilangnya nilai historis milik bangsa (Detiknews, 2015).

Budaya orientasi waktu (*time orientation*); mengacu pada fokus waktu yang digunakan tiap anggotanya dalam pengambilan keputusan. Beberapa budaya sangat sadar akan pentingnya waktu serta pentingnya pemenuhan janji, sementara yang lain lebih santai. Beberapa budaya juga cenderung mempertimbangkan sesuatu dengan lebih lama/ lebih lambat, sedangkan di beberapa wilayah/ tempat lainnya berlaku hal sebaliknya.

Perihal kognisi dalam variasi budaya (*cultural variations*); mengacu pada berbagai proses yang digunakan di dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, persepsi, serta ketika merepresentasi pengetahuan yang terdapat didalam suatu budaya. Selain itu juga merujuk pada mode penalaran dan argumentasi yang menjadi ciri kebudayaan di wilayah tersebut. Nisbett dan Norenzayan (dalam Wunderle, 2006) mengklasifikasi gaya penalaran (*reasoning style*) menjadi tiga, yaitu *dialectical reasoning* (opsi digambarkan untuk menunjukkan perbedaan *atau* opsi digabung untuk mempertahankan perspektif yang mungkin kontradiktif), *hypothetical reasoning* (individu menggunakan suatu keadaan yang dapat dibayangkan untuk menunjukkan implikasi dari tindakan *atau* individu mendasari analisisnya berdasarkan konteks dan pengalaman), serta *counterfactual reasoning* (memakai kontrafaktual untuk menunjukkan implikasi dari tindakan).

Komponen ketiga (tabel 1) menampilkan secara konkret pemikiran dan perilaku didalam budaya. Apa yang terdapat pada pengaruh dan variasi budaya, juga ditampilkan secara spesifik di dalam manifestasi budaya, baik melalui pandangan anggota kelompok perihal wewenang (*view of authority*), gaya negosiasi (*negotiation style*), kesediaan untuk berkompromi (*willingness to compromise*), merangkul/menerima risiko (*embracing of risk*), ataupun dalam

bentuk lainnya. Secara sederhana, pengaruh budaya (*cultural influences*) dan variasi budaya (*cultural variations*) menjelaskan perihal mengapa (*Why*) suatu budaya bisa seperti itu. Sedangkan manifestasi budaya (*cultural manifestations*) merujuk pada apa (*What*) yang dapat ditemui dalam budaya tersebut.

Budaya tidak bisa, bahkan tidak boleh dipisahkan dari identitas individu, terlebih budaya dibentuk oleh beragam jenis faktor. Satu hal yang perlu diinternalisasikan dan ditanamkan dalam kognisi; bahwa penghormatan terhadap keberagaman budaya, selain menjaga dan melaksanakan perintah konstitusi, juga menunjukkan kapasitas akan kesadaran budaya (*culture awareness*). Kesadaran budaya selain menjadi pengingat akan perlunya menghormati nilai-nilai kebudayaan, juga mencerminkan kepedulian serta kepekaan terhadap perbedaan yang ada, menghindarkan individu dari hal-hal yang tidak tepat untuk diucapkan atau dilakukan dalam proses interaksi antarbudaya berbeda (dalam Constantin, 2015). Salah satu dalang kesalapahaman dalam interaksi budaya ialah tidak menyadari bahwa sistem budaya yang berlaku disatu tempat bisa saja justru dianggap tidak pantas di sistem kebudayaan yang lain. Oleh karenanya, kesadaran budaya juga menjadi dasar komunikasi didalam interaksi antarbudaya.

"Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia"
(Pasal 1 Ayat 2 UU No/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)

Proses interaksi antarbudaya tentu tidak selalu sepakat akan berjalan dengan baik. Setiap budaya menampilkan ciri khas yang berbeda dari kebudayaan lainnya. Hal yang berlaku dalam satu sistem kebudayaan di suatu negara ataupun wilayah belum tentu juga berlaku sama di kebudayaan lainnya. Satu contoh studi kasus dari halaman situs web (commisceo, 2018) yang menarik untuk dicermati, perihal Mr. Rossi yang baru saja dipindahtugaskan dari perusahaan tempat dia bekerja. Rossi dipilih untuk mengelola anak perusahaan yang berada di Belanda, sedang Rossi sendiri berasal dari Italia. Pengalaman Rossi saat pertama kali masuk kantor bukanlah ajang perkenalan ataupun pesta penyambutan kepala cabang baru, melainkan tumpukan kecemasan, karena mendapati meja kerja yang akan ditempatinya tidak berada didalam ruangan pribadi, seperti layaknya seorang pimpinan. Meja kerja Rossi justru berada di tengah suasana ruangan terbuka, berbaur dengan meja staf-staf junior, termasuk meja para staf magang. Hal ini membuat batinnya seakan ditusuk-tusuk ribuan jarum kecil. Namun Rossi berhasil keluar dari zona tak nyaman yang dialaminya, setelah memindahkan meja kerjanya kedalam ruangan pribadi (*private),* memisahkan

diri dari kumpulan staf lainnya. Setelah kejadian itu, kehadiran Rossi di tempat kerja berbanding lurus dengan penolakan secara instan terhadap dirinya. Para staf seperti memendam setumpuk permusuhan pada dirinya. Bahkan para staf magang juga mengindikasikan insinuasi yang sama. Jika kita mendengar kesaksian dari dua sisi berlawanan, maka apa yang telah dialami Rossi dari perspektif para staf (termasuk staf magang) merupakan hal yang wajar, mengingat situasi awal dimana meja kerja Rossi yang berada ditengah-tengah mereka, tiba-tiba dipindahkan begitu saja tanpa adanya penjelasan. Membuat para staf merasa tidak dihargai dan pada akhirnya menimbulkan ketersinggungan yang menyebar dengan begitu cepat.

Sebaliknya dari sudut pandang Rossi, kita juga mendapati bahwa hal yang dilakukannya merupakan sesuatu yang harusnya diwajari. Seorang pimpinan pada umumnya memang memiliki ruang pribadi sendiri. Yang mejanya menjelajah kemana-mana itu biasanya staf magang. Lantas, bagaimana sudut pandang budaya menyikapi persoalan ini?, Perspektif dan pola penyelidikannya tentu jauh berbeda dengan dua perspektif sebelumnya, namun merupakan jawaban dari penyebab kejadian tersebut. Setelah diselidiki, budaya kerja di tempat Rossi berasal (Italia) ternyata sangat menghormati hierarki dan status. Seorang bos memang harus memiliki ruangan kerja sendiri. Sedangkan di Belanda, pekerja lebih memprioritaskan kesetaraan di mana semua orang dianggap sama. Oleh sebab itu, ketika Rossi memutuskan untuk menempati ruangan sendiri, terlebih tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu; secara tidak langsung ia memberi isyarat pada stafnya bahwa ia jauh lebih baik dari mereka. Rossi tentu punya cukup alasan mengapa kepindahannya tidak di sampaikan. Hal itu menjadi cukup sulit dilakukan karna sedari awal kejadian itu telah didukung oleh duet maut "*mis*", yakni *misperception*, *misunderstanding*, dan *miscommunication.*

Pengalaman Rossi hanya contoh kecil bagaimana kesadaran budaya (*culture awareness*) dapat sangat mempengaruhi individu, bahkan sampai dititik harus memahami dan mempersepsi individu lain, serta bagaimana seharusnya pengambilan keputusan yang tepat, beserta cara efektif untuk mengkomunikasikan keputusan tersebut. Hal yang dialami Rossi tidak hanya terjadi dalam bidang kerja, tetapi juga bisa terjadi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Oleh karna itu, kesadaran budaya memang sangat diperlukan. Penting untuk selalu diingat, bahwa tiap individu sangat mungkin memiliki lingkar kebudayaannya sendiri, sehingga kesadaran akan keberagaman budaya (*cultural diversity awareness*) kiranya juga perlu ditingkatkan dengan mulai menerapkan beberapa sikap (Quappe & Cantatore, 2005), seperti:

(1) Mengakui hal-hal yang tidak diketahui (*admit that you don't know*): dalam hal

ini memahami bahwa individu tidak mungkin mengetahui segala-galanya juga cukup penting, bahwa asumsi terhadap suatu budaya sangat mungkin menjadi sebuah kekeliruan. Sehingga mengasumsikan adanya perbedaan akan jauh lebih baik ketimbang persamaan;

(2) Menangguhkan penilaian (*suspend judgments*): mengumpulkan informasi sebanyak mungkin agar dapat menggambarkan suatu situasi dan kondisi dengan lebih akurat, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan evaluasi;

(3) Memiliki empati (*empathy*): diperlukan untuk dapat belajar memahami seperti apa individu lain ingin diperlakukan, memberi pertimbangan pada pikirkan tentang gambaran diri (*self*) bila berada di posisi orang lain;

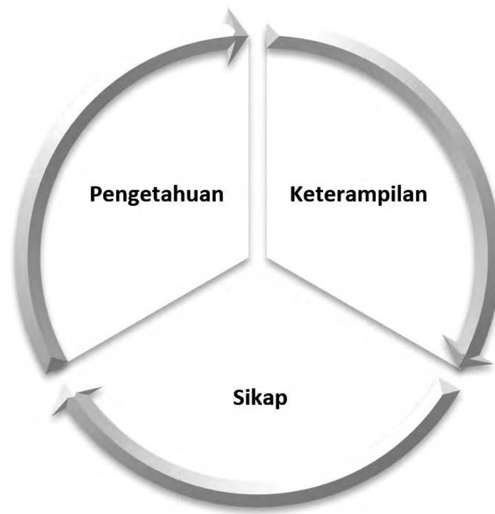
(4) Mengecek asumsi secara sistematis (*systematically check your assumptions*): meminta umpan balik secara terus menerus untuk memastikan bahwa situasi telah benar-benar dipahami dengan jelas. Menanyakan pada kolega dan teman-teman lainnya yang mengetahui lebih banyak perihal karakteristik budaya tersebut, agar selanjutnya dapat dtinjau secara sistematis untuk memastikan bahwa hal itu benar;

(5) Merasa nyaman dengan ambiguitas (*become comfortable with ambiguity*): mulai menganggap bahwa individu lain juga pasti memiliki banyak pengetahuan, seperti halnya diri sendiri, sehingga pengetahuan dari mereka akan menambah pengetahuan yang dimiliki;

(6) Merayakan keberagaman (*celebrate diversity*); mulai mengadakan diskusi-diskusi mengenai keberagaman atau keunikan yang berada di tiap-tiap daerah. Mendorong kegiatan-kegiatan untuk menyelenggarakan pertemuan dengan berbagai tema kreatif, semisal tema-tema terkait toleransi.

Selain kesadaran budaya, juga diperlukan satu istilah yang disebut kesadaran antarbudaya (*intercultural awareness*). Kesadaran antarbudaya terutama dapat berfungsi dengan baik didalam interaksi antar budaya (*intercultural interactions*), menunjukkan kapasitas individu yang selain memahami budayanya sendiri, juga memahami budaya yang dimiliki individu maupun kelompok berbeda (etnis, ras dan lain-lain) dari wilayah lainnya, terutama pemahaman pada persamaan atau perbedaan, baik antara nilai-nilai, kepercayaan dan perilaku. Kesadaran antarbudaya memberikan keuntungan bagi banyak individu, diantaranya (1) bagi mereka yang tengah belajar/bekerja di negara atau wilayah lainnya dan untuk sementara harus menetap; (2) untuk mereka yang bekerja dengan orang-orang yang berasal dari negara ataupun kebudayaan lainnya, atau bekerja didalam suasana multikultural baik di dalam ataupun luar negeri, dan yang paling dapat diuntungkan; (3) untuk turis yang hobby melancong kebanyak tempat (dalam Rata, 2016). Guo-Ming Chen (dalam

Zhan & Steele, 2012), berpendapat bahwa kesadaran antarbudaya diperlukan untuk mencapai kompetensi didalam hubungan antarbudaya (*intercultural competence*). Kompetensi antarbudaya merupakan kemampuan individu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan agar memiliki perilaku dan komunikasi yang efektif serta sesuai dalam *setting* interaksi antar budaya; sehingga kompetensi antar budaya juga pasti mengarah pada komunikasi antarbudaya (*intercultural communication*). Deardorff (dalam McKinnon, 2017) menyusun kompetensi antarbudaya menggunakan tiga faktor, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Bagan 1).



Bagan 1. Elemen Penyusun Kompetensi Budaya (McKinnon, 2017, hal. 2)

Ketiga komponen terdiri atas beberapa bagian: Pengetahuan (*knowledge*) terdiri atas, *pertama,* kesadaran diri pada budaya (*cultural self-awareness),* agar mampu mengartikulasikan bagaimana budaya dari suatu individu telah membentuk identitas dan cara pandangnya dalam melihat segala sesuatu. *Kedua*, pengetahuan khusus pada budaya (*culture specific knowledge*), untuk menganalisis dan menjelaskan informasi dasar mengenai budaya tersebut (sejarah, nilai-nilai, politik, ekonomi, gaya komunikasi, nilai-nilai, kepercayaan, praktik). *Ketiga*, pemahaman isu dan tren global (*grasp of global issues and trends*), agar mampu menjelaskan makna dan implikasi globalisasi sehingga dapat mengaitkan masalah lokal dengan kekuatan global.

Keterampilan (*skill*) terdiri atas, *pertama*, kemampuan untuk mendengarkan, mengamati, dan mengevaluasi. Ketiga hal tersebut perlu

menggunakan kesabaran dan ketekunan agar mampu mengidentifikasi serta meminimalisir etnosentrisme, ketiganya juga dapat dipergunakan untuk mencari petunjuk serta makna yang *exist* pada suatu budaya. *Kedua*, menganalisis, menafsirkan dan menghubungkan. Ketiga hal ini digunakan untuk mencari suatu hubungan, baik hubungan sebab akibat maupun hubungan yang menggunakan teknik komparatif. *Ketiga*, keterampilan untuk berpikir kritis, agar dapat melihat dan menafsirkan dunia dari sudut pandang budaya lain, serta dapat mengidentifikasi atribut budaya yang melekat pada individu lain.

Sikap terdiri atas (1) rasa hormat; salah satunya untuk menghindarkan *self* dari prasangka terhadap perbedaan budaya, menemukan atribut dan nilai keanekaragaman dari budaya lain, juga dapat mendorong *self* berpikir secara komparatif; (2) keterbukaan; agar dapat menangguhkan kritik terhadap budaya lain; (3) keingintahuan; agar melihat perbedaan sebagai kesempatan untuk belajar, selain dari menyadari ketidaktahuan yang ada pada sendiri; (4) deteksi; yang diharapkan dapat mentoleransi ambiguitas dan kemudian melihatnya sebagai satu pengalaman yang positif.

Output dari faktor pembentuk kompetensi budaya (bagan 1), secara internal menunjukkan individu yang mulai belajar menjadi lebih fleksibel, mudah beradaptasi, berempati, dan mulai mengadopsi perspektif etno-relatif. Kualitasnya akan terlihat secara eksternal, pada perilaku serta gaya komunikasinya. Mulai mempelajari, bahkan mungkin sampai pada tahap menguasai ketiga komponen tersebut menunjukkan ciri dari individu yang memiliki atau sedang menjadi individu yang memiliki kompetensi dalam interaksi antarbudaya (McKinnon, 2017). Selain fleksibilitas dan manajemen perilaku, interaksi antarbudaya juga dipengaruhi oleh kemampuan individu pada penyampaian pesan secara jelas, kemahiran dengan bahasa luar/asing, serta keterampilan sosial (dalam Liu, 2014).

"Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan: pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional"
(Pasal 5 huruf c UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)

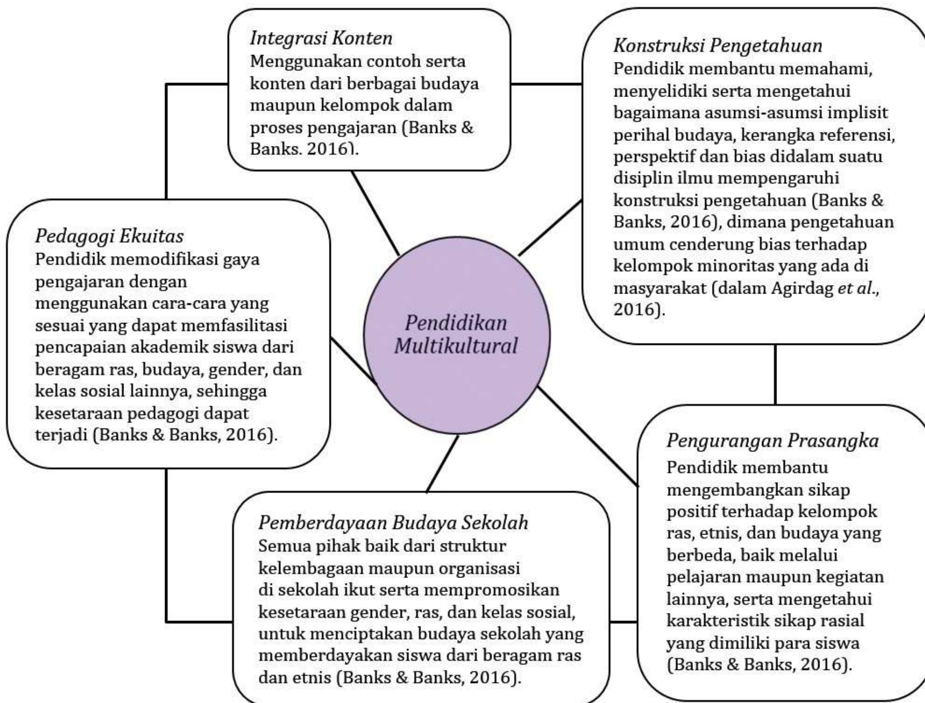
Gugatan *class action* (mewakili kepentingan orang banyak) oleh Brown *dkk*., terhadap Dewan Pendidikan Kota Topeka, Kansas, pada akhirnya membuat Hakim Mahkamah Agung AS menetapkan bahwa pemisahan sekolah berdasarkan ras adalah inkonstitusional (1954). Oleh karena itu, *desegregasi* (mengakhiri pemisahan ras) harus segera diberlakukan; sekolah siswa berkulit kulit hitam digabung bersama sekolah siswa kulit putih. Sayangnya, didalam

lampiran keputusan MA tidak menyebutkan satu metode *preventif* apapun yang dapat digunakan untuk mengakhiri *segregasi* di sekolah-sekolah. Akhirnya, penggabungan yang sedari awal mendapat penolakan dari berbagai pihak itu justru memicu konflik rasis luar biasa. Para siswa kulit putih dengan penuh kebencian meneror siswa baru (berkulit hitam), bahkan presiden Amerika waktu itu (Dwight D. Eisenhower) sampai harus mengirimkan pasukan tentara untuk melindungi siswa kulit hitam. Kisah Elizbeth Eckford mewakili sederet pengalaman hari pertama siswa kulit hitam memasuki sekolah-sekolah siswa kulit putih. Masalah diskriminasi yang terus terjadi tidak hanya menyulitkan pendidik, tetapi juga menyulitkan orang tua, masyarakat, bahkan negara. Dampak terbesarnya justru dialami para siswa, teralihkan dari pembelajaran karena sibuk bergulat dengan kebencian yang menyebar.

Sebuah sekolah kemudian meminta salah seorang psikolog sosial bernama Elliot Aronson untuk mencoba mereduksi krisis kekerasan antar ras yang terus menegang. Bersama mahasiswa pascasarjana, ia mengembangkan model praktik pengajaran, dengan tujuan membangun budaya saling mendukung dan saling menyemangati diantara para siswa. Hasil eksperimen dari model pembelajaran, yang hari ini lebih dikenal dengan sebutan "*Jigsaw Classroom*", terbukti mampu menurunkan prasangka (*prejudice*) dan stereotip. Siswa terlihat lebih menyukai setiap anggota kelompok, baik ketika siswa berada di kelompok asal maupun di kelompok ahli. Perbandingan dengan kelas tradisional (*traditional classroom*) juga menunjukkan bahwa metode kelas jigsaw lebih memberikan efek positif pada kinerja akademik, harga diri (*self-esteem*) dan sikap terhadap etnis lain (Aronson & Bridgeman, 1979). Hingga saat ini, model *Jigsaw* banyak diterapkan di berbagai sekolah dan di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Satu model praktik pengajaran selain *jigsaw* yang terus diupayakan pengembangannya, terlepas dari kekurangan serta tantangan didalam penerapannya, adalah pendidikan multikultural (*multicultural education*). Suatu model pembelajaran yang dapat mempromosikan prinsip-prinsip inklusi, keanekaragaman, demokrasi, peningkatan keterampilan, serta refleksi diri (O'Donnell, 2005); suatu pedagogi untuk membantu siswa berpikir lebih kritis, mendorong terbentuknya pola pikir yang lebih terbuka (Levinson, 2010). Melalui pendidikan multikultural, pendidik maupun terdidik diharapkan dapat memahami serta menerima keberagaman budaya (*cultural diversity*) sebagai satu rangkaian kepercayaan didalam kehidupan bersosial (Banks, 2001). Howard (dalam Hanum, 2013) berpendapat bahwa kompetensi multikultural (*cultural competence*) dapat dicapai melalui pendidikan multikultural. Terkait hal itu, Banks (Banks & Banks, 2016) telah memberi anjuran untuk para pendidik agar menggunakan beberapa dimensi yang dirumuskannya, sebagai panduan ketika

mencoba menerapkan pendidikan multikultural di sekolah. Kelima dimensi tersebut (Bagan 2) terdiri atas integrasi konten (*content integration*), konstruksi pengetahuan (*knowledge construction),* pengurangan prasangka (*prejudice reduction)*, pedagogi ekuitas (a*n equity pedagogy)*, pemberdayaan budaya sekolah dan tatanan sosial (*empowering school culture & social culture*).



Bagan 2. Dimensi Pendidikan Multikultural (Banks & Banks, 2016, hal. 18)

Banks (1989, dalam Agirdag, Merry & Van Houtte, 2016) juga mengidentifikasi empat macam pendekatan yang berkaitan dengan dimensi integrasi konten: (1) Pendekatan kontribusi (*contributions approach*), sebagai cara paling umum dan mudah, dimasukkan dalam kurikulum tanpa merubah strukturnya, seperti peringatan hari pahlawan dan hari libur, ataupun hari khusus lainnya yang dianggap penting bagi suatu kelompok etnis minoritas; (2) Pendekatan aditif, mulai mengintegrasikan tema & contoh perihal kelompok etnis minoritas kedalam kurikulum sekolah; (3) Pendekatan transformatif, mulai mengubah struktur kurikulum, dimana guru merangsang siswa untuk merefleksikan berbagai konsep dan tema dari sudut pandang budaya yang berbeda; (4) Pendekatan aksi sosial, memungkinkan siswa untuk secara aktif terlibat dalam mengatasi permasalahan sosial (misalnya rasisme dan ketidaksetaraan etnis) yang

terjadi di sekolah ataupun dikomunitas/ lingkungan mereka.

Hal yang juga perlu ditekankan, selain para siswa, pendidik juga perlu untuk terpapar lebih familiar dengan dimensi-dimensi yang terkandung di dalam pendidikan multikultural, agar lebih mempermudah pelaksanaan tugas pengajaran. Bahkan mungkin, di samping itu, pendidik dapat sampai ketahap merevolusi sikap siswa terhadap perbedaan etnis budaya, oleh karna itu pemahaman pendidik perihal pendidikan multikultural juga perlu untuk ditingkatkan. Hasil wawancara mendalam semi terstruktur dari Agirdag *dkk*.,(2016) pada 26 guru dari 5 sekolah, serta survey yang melibatkan 706 guru dan 2.845 murid dari 68 sekolah di 3 kota berbeda di Flanders (wilayah Belgia yang menggunakan bahasa Belanda) menunjukkan bahwa pemahaman guru, saat ditanya perihal pendidikan multikultural, lebih terfokus pada agama dan keberagaman agama. Dari keempat pendekatan integrasi konten multikultural (kontribusi, aditif, transformatif, dan aksi sosial), pemahaman mereka sebagian besar terbatas hanya pada pendekatan kontribusi (*contributions approach*) dan pendekatan aditif (*additive approach*). Hasil survey menunjukkan Guru yang berasal dari etnis minoritas memiliki tingkat *integrasi konten multikultural* lebih tinggi ketimbang guru yang berasal dari etnis asli setempat (kulit putih).

Di tingkat sekolah, komposisi etnis siswa menjadi prediktor kuat dalam integrasi konten multicultural. Artinya, guru cenderung memasukkan lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan multikultural di sekolah-sekolah yang jumlah siswa etnis minoritas-nya lebih tinggi. Selain itu, guru yang bekerja di sekolah negeri dan di sekolah dengan proporsi etnis minoritas lebih tinggi, memasukkan lebih banyak hal-hal terkait pendidikan multikultural ketimbang guru yang bekerja di sekolah elit (khusus kulit putih) atau di sekolah keagamaan (agama mayoritas). Seperti halnya di Amerika, pemahaman sebagian besar guru-guru di Belgia mengenai pendidikan multikultural dalam dimensi integrasi konten (*content integration*) masih begitu terbatas, hanya berfokus pada pendekatan kontribusi dan aditif (Agirdag *dkk*., 2016). Selain memvalidasi tulisan teoritis James Bank, penelitian tersebut juga mengantarkan pada argumentasi bahwa pemahaman guru perihal pendidikan multikultural bersifat kontekstual. Hal ini karena pemahaman mengenai *multicultural* juga memang tergantung pada konteks nasional. Misalnya perbedaan yang terdapat diantara guru di Amerika Serikat dan Belgia. Guru-guru di Belgia lebih berfokus pada isu agama ketimbang etnis. Konteks regional (misal politik regional) dan konteks sekolah (misal komposisi etnis) kemungkinan akan mempengaruhi bagaimana guru-guru menerapkan konten multikultural di dalam ruang kelas masing-masing (Agirdag *dkk*., 2016). Penelitian mereka juga menunjukkan pentingnya untuk mengeksplorasi dan mempelajari pendidikan multikultural dari konteks

yang berbeda dari negara pencetusnya; hal yang seharusnya juga coba dilakukan oleh peneliti-peneliti Indonesia.

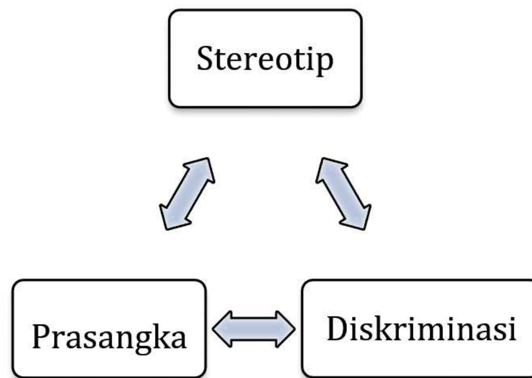
Untuk membantu pendidik dalam upaya mengaktifkan pendidikan multikultural di ruang kelas, Andrew Miller (2011), menawarkan beberapa saran praktis untuk membantu penerapan pendidikan multikultural dalam ruang kelas. Hal *pertama* mulai dengan membangun hubungan dengan para siswa; mempelajari latar belakang serta budaya yang mereka miliki. Hal *kedua*, mempergunakan seni sebagai titik awal dalam diskusi-diskusi terkait permasalahan budaya dan ras. *Ketiga*, menanamkan ide dan materi pelajaran multikultural dalam kurikulum berkelanjutan agar lebih efektif. Hal *Keempat*, menghadirkan diskusi mengenai ras, budaya serta perbedaan-perbedaan lainnya. *Kelima,* dan yang paling terpenting, adalah mengumpulkan serta melibatkan pemangku kepentingan, yang dapat mendukung terlaksananya program.

Pendidikan multikultural sedari dini akan membantu siswa untuk dapat mulai menerima, memahami, serta menghormati ragamnya perbedaan budaya. Hal ini akan berdampak pada *usage* (cara individu bertingkah laku), *folkways* (kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat), *mores* (tata kelakuan di masyarakat), dan *customs* (adat istiadat suatu komunitas). Para peserta didik akan mulai bisa menerima perbedaan ataupun kritik, memiliki rasa empati dan toleransi, tanpa perlu memandang golongan, status, jender, kemampuan akademik, atau kelas sosial lainnya (Hanum, 2013). Pendidikan multikultural merupakan satu upaya untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang pro pada pluralisme, benteng untuk menghadapi diskriminasi dan rasisme; serta sebagi bentuk usaha untuk menghadirkan kesempatan pendidikan yang sama bagi setiap peserta didik, tanpa adanya pembedaan etnis, ras, agama, golongan, jender maupun kelas sosial lainnya.

"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"
(Pasal 28i Ayat 2 UUD 1945)

Sejalan dengan hal-hal yang tercantum dalam bagian penjelasan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, kondisi masyarakat Indonesia yang berdimensi majemuk memang berpotensi menimbulkan konflik, baik secara interpersonal maupun inter-kelompok. Tidak sebatas pada perbedaan ras dan etnis, tetapi juga perbedaan agama, kelompok, golongan, status sosial, tingkat pendapatan, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, kondisi fisik, bahasa, pandangan ideologi, maupun keyakinan politik yang

menjadi *causa* konflik di berbagai sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu, *intoleransi* yang dicap sebagai antipluralis *juncto* kontra-multikultural, kerap menjadi variabel langganan di tengah-tengah kehidupan warga negara. Kepercayaan berlebih akan superioritas dari perspektif satu kelompok (*ethnocentrism*) terhadap kelompok lainnya, menjadi satu dari banyaknya jenis bibit diskriminasi; diawali oleh prasangka (*prejudice*) dan dipekokoh oleh stereotip. Hal ini terjadi tidak hanya secara langsung, tetapi juga bekerja secara tersembunyi dibalik kebijakan-kebijakan objektif yang pada praktiknya ternyata justru menighasilkan diskriminasi. Ketiga komponen yang diistilahkan oleh Taylor *dkk.,* (2006) dengan sebutan antagonisme kelompok *(group antagonism)*, melibatkan persepsi dari suatu kelompok terhadap kelompok lain; ketiga komponen yang saling berkaitan tetapi berbeda.



Bagan 3. Hubungan antara stereotip, prasangka dan diskriminasi (Suryanto, Putra, Herdiana, & Alfian, 2012, hal. 86).

Pandangan tripartit (Bagan 3) mengidentifikasi stereotip lebih mewakili kognitif dalam proses terbentuknya sikap antarkelompok (*intergroup*), sebagai ekspektasi serta keyakinan akan karakteristik anggota kelompok lain yang dianggap berbeda. Sedangkan prasangka (*prejudice*) lebih kepada komponen afektif dari stereotip yang mewakili respon emosional. Kemudian diskriminasi mengacu pada tindakan (*behavior*) atas reaksi terhadap prasangka (Denmark, 2010). *Social categorization* dan *ingroup-outgroup* menjadi penjelas sederhana terbentuknya stereotip, kecenderungan alami dari individu untuk mengklasifikasikan individu-individu lainnya kedalam suatu kelompok berdasarkan karakteristik, baik itu atribut umum maupun khusus yang dimiliki. Gunakan contoh termudah yaitu etnis. Ketika individu secara sadar atau mungkin juga secara adaptif memisahkan

individu-individu lain berdasarkan identitas etnis, maka proses kategorisasi sosial telah bekerja. Setelah individu itu kemudian mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai salah satu anggota dari etnis tertentu, maka semua individu didalam etnisnya itu disebut dengan *ingroup*, sedangkan individu yang berasal dari luar etnisnya disebut *outgroup*. Dari sinilah, pelan tapi pasti, stereotip akan mulai terbentuk, bagaimana individu (*subjek*) lebih cenderung mempersepsi individu lainnya hanya berdasarkan pengetahuan dan keyakinan tentang karakter etnis (*objek*) yang melekat pada dirinya; bukan berdasarkan pada sifat dan karakteristik yang melekat pada individu itu sendiri. Stereotip di Indonesia mengenai suku dan etnis berkembang dengan sangat pesat. Ambil contoh di bidang pekerjaan. Suku X, karena identik dengan berlayar dan sering berada di mana-mana, dianggap lebih cocok menjadi pedagang atau pelaut ketimbang pekerjaan lainnya; atau suku Y, yang terkenal dengan sifatnya yang halus dan tenang, membuat setiap individu yang berasal dari suku Y dianggap sebagai pribadi yang halus dan tenang.

Stereotip tidak sepenuhnya buruk, kendati kerap menyesatkan persepsi. Bagaimanapun, tugas dan upaya dari stereotip ialah menghadirkan informasi secara cepat dan mudah. Individu tidak perlu lagi berpikir panjang karena informasi telah tersedia. Sayangnya, informasi tersebut bukan tidak akurat, melainkan belum tentu akurat dan memang tidak akan selalu akurat. Inilah problemnya. Alasannya sederhana, stereotip membuat individu lebih cenderung "*pukul rata*", memandang individu dari etnis lain tidak lagi spesifik dan objektif. Individu tidak lagi secara murni (*pure*) menilai berdasarkan atribut individu itu sendiri, tetapi mengambil jalur kompas; menilai berdasarkan atribut *etnis*nya bukan berdasarkan atribut *person*. Oleh sebab itu, stereotip memberi kritik pedas pada budaya. Karakteristik budaya mengaburkan karakteristik individu dan justru menjadi pemicu aktif terjadinya stereotip. Lebih dari itu, stereotip menggiring individu menjadi terkesan lebih malas melakukan verifikasi mengenai karakteristik etnis tertentu, apakah *karakteristik etnis* itu memang valid juga melekat erat di *karakteristik individu* yang dimaksud?. Stereotip negatif terhadap satu etnis akan disusuli pula oleh persepsi negatif, yang pada akhirnya akan menghadirkan kecurigaan, menimbulkan prasangka (*prejudice*) pada satu etnis. Prasangka-prasangka negatif inilah yang memancing diskriminasi terjadi. Prasangka negatif yang terbangun dan telah menyebar (*contagion*) di dalam internal kelompok suatu etnis akan mempengaruhi cara anggota kelompoknya mempersepsi (*groupthink)* individu dari etnis/ kelompok lain. Seperti telah diingatkan pula oleh Wunderle (2006) perihal pengaruh budaya, karakteristik suatu budaya hanya mencerminkan kecenderungan yang terdapat di dalamnya, tidak berlaku untuk semua anggota masyarakat yang berada di dalam sistem kebudayaan tersebut, meski memang akan tetap mempengaruhi cara mereka

berpikir dan berperilaku. Hal ini karena karakteristik tersebut telah tertanam dalam skala besar di dalam struktur sosialnya. Keduanya menjadi hal yang sama-sama penting (*karakteristik etnis & individu*), tetapi karakteristik etnis memicu stereotip lebih cepat, sehingga satu upaya sederhana yang diyakini dapat memberi dampak besar adalah melakukan verifikasi. Pengecekan karakteristik individu berdasarkan karakteristik *etnis*/ kelompok, apakah karakteristik *etnis* memang telah valid berlaku pada karakteristik *individu*, atau justru mungkin tidak berlaku sama sekali. Hal ini guna untuk menghindari terjadinya stereotip yang berujung pada diskriminasi. Jika ditelisik melalui perspektif Kahneman (2011), pengecekan karakteristik ini akan mengaktifkan sistem 2 (pemrosesan terkontrol) pada kognitif, yang lebih kritis terhadap suatu informasi; sekaligus menguji sistem 1 (pemrosesan otomatis) yang di dominasi heuristik/ memakai jalan pintas. Selain itu, dengan peningkatan kompetensi budaya (*cultural competence*) juga diharapkan mampu meminimalisirnya, termasuk mencegat bias konfirmasi (*confirmation bias*).

Seperti halnya kategorisasi sosial, stereotip juga berproses secara implisit dan eksplisit, sehingga kemungkinan melakukan kontrol masih terbuka lebar. Beberapa hasil penelitian (dalam Suryanto, Putra, Herdiana, & Alfian 2012) menyumbangkan faktor pembuka kemungkinan untuk mengimbangi stereotip: (1) *Informasi personal;* dengan memperbanyak informasi personal mengenai individu, maka tingkat relevansi dan pre-konsepsi dari stereotip akan menurun; (2) *Kemampuan kognitif*; dalam proses pengumpulan informasi, berfokus pada individunya bukan kelompok atau etnisnya; (3) *Motivasi*; tidak perlu mengesampingkan anggapan yang sudah ada; yang perlu ialah mengecek keabsahan dari anggapan tersebut.

Selain ketiga hal di atas, kesadaran hukum perlu ditegakkan sebagai pengingat diri (*self-reminder*) pada masing-masing individu. Pada Pasal 16 UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; telah jelas dicantumkan, “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Kemudian ada pula Undang-Undang ITE yang trend penggunannya terus meningkat; dalam Pasal 45b UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2018 tentang ITE, dengan jelas dicantumkan, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Beberapa pasal yang mengatur perihal etnis dan ras juga dapat anda temukan di dalam KUHP.

Penutup

Setiap individu tidak bisa memilih untuk dilahirkan menjadi bagian dari ras ataupun etnis tertentu sekehendak hatinya, sehingga perbedaan seharusnya menjadi hal yang lumrah dan dapat disadari oleh siapapun. Multikulturalisme tidak sekedar membangun pengakuan, penghargaan, serta penghormatan terhadap budaya sendiri (*intra*), tetapi juga membangun sikap untuk dapat mengakui, menghargai, serta menghormati kebudayaan lainnya, sehingga tercipta kondisi timbal balik diantara keduanya (*inter*). Kesadaran budaya dan kesadaran antarbudaya diharapkan akan menumbuhkan sikap multikultural. Sikap multikultural menunjukkan satu sikap terbuka terhadap perbedaan, persamaan dan keberagamaan dalam upaya menciptakan satu kehidupan bersama yang harmonis serta dinamis. Harapan selalu disematkan di pundak berbagai pihak untuk turut serta menerapkan dan mengembangkan teori maupun praktik dari multikultural ke dalam aliran sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, baik melalui kebijakan pemerintah, psikoedukasi, ataupun penelitian-penelitian pada setiap bidang ilmu yang menaruh perhatian besar terhadap budaya; yang sampai hari ini definisinya juga sangat beranekaragam. Multikulturalisme memang masih menjadi hal dilematis di negeri ini. Kemajemukan memang sering menimbulkan konflik, tetapi diskriminasi dan rasisme bukanlah ciri khas dari Bhinneka Tunggal Ika. Penyelesaian konflik tidak dilakukan dengan penghakiman sepihak, tetapi haruslah melalui koridor hukum yang telah ditetapkan; sebagai suatu mekanisme penyelesaian konflik yang aman, damai, dan bermartabat. Sebagaimana telah terurai di dalam sebuah literatur, secara estetis keragaman itu menyenangkan sekaligus menggairahkan.

Akhir kata, *Salam Pluralisme*!

Daftar Acuan

Agirdag, O., Merry, M. S., & Van Houtte, M. (2016). Teachers' understanding of multicultural education and the correlates of multicultural content integration in Flanders. *Education and Urban Society*, *48*(6), 556-582.

Aronson, E., & Bridgeman, D. (1979). Jigsaw groups and the desegregated classroom: In pursuit of common goals. *Personality and social psychology bulletin*, *5*(4), 438-446.

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2016). *Multicultural education: issues and perspectives: Ninth edition.* Hoboken, New Jersey, United States: John Wiley & Sons, Inc.

Constantin, E. C., Cohen-Vida, M. I., & Popescu, A. V. (2015). Developing cultural awareness. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *191*, 696-699.

Deardorff, D. K. (2009). *The SAGE handbook of intercultural competence*. Thousand Oaks, California, United States: SAGE Publishing.

Denmark, F. L. (2010). Prejudice and discrimination. Dalam I. B. Weiner, & W. E. Craighead (Eds.), *The corsini encyclopedia of psychology*. Hoboken, New Jersey, United States: John Wiley & Sons, Inc.

Detiknews. (2015, 3 Februari). 2 Terdakwa Perusakan Cagar Budaya di Yogyakarta Didenda Rp 500 Juta. Diakses 15 Mei 2019 dari: https://news.detik.com/berita/2822349/2-terdakwa-perusakan-cagar-budaya-di-yogyakarta-didenda-rp-500-juta

Hanum, F. (2013). Pendidikan multikultural dalam pluralisme bangsa. *Eprints Universitas Negeri Yogyakarta*, 1-24. Diunduh 18 Mei 2019 dari: http://eprints.uny.ac.id/307/1/ pendidikan_ multikultural_dalam_ pluralisme_bangsa.pdf

Heine, S. J. (2010). Cultural psychology. Dalam S. T. Fiske, D. T. Gilbert, & G. Lindzey (Eds.), *Handbook of social psychology* (hlm. 1423-1464). Hoboken, New Jersey, United State: John Wiley & Sons, Inc.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York, United State: Farrar, Straus and Giroux.

Kertamuda, F. (2011). Konselor dan kesadaran budaya (culture awareness), 1-16. Diunduh 18 Mei 2019 dari: https://bkpemula.files.wordpress.com/2011/12/07 fatchiah_kertamuda_ prosiding_konselor_ dan_ ulture_awareness.pdf

Levinson, M. (2010). Mapping multicultural education. Dalam H. Siegel (Eds.), *The oxford handbook of philosophy of education* (hlm. 428-450). Oxford, NewYork, United States: Oxford University Press.

McKinnon, S. (2017). What is intercultural competence. *Global Perspectives*

Project. Diunduh 20 Mei 2019 dari: https://welcomm-europe.eu/media/11-Material_11_Definition_of_ Intercultural_ competence.pdf

Edi, P. (2018, 26 Oktober). Polisi diminta segera ungkap kasus perusakan sedekah laut di bantul. Diakses 15 Mei 2019 dari: https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-diminta-segera-ungkap-kasus-perusakan-sedekah-laut-di-bantul.html

Miller, A. (2011, November). Seven ideas for revitalizing multicultural education. *George Lucas Educational Foundation*. Diakses 20 Mei 2019 dari: http://www.edutopia.org/blog/ multicultural-education-strategy-tips-andrew-miller

O'Donnel, C. (2005). Engagement and dialogue. *Annenberg Learner*. Diakses 19 Mei 2019 dari: http://www.learner.org/workshops/tml/workshop1/commentary.html

Organista, P. B., Marín, G., & Chun, K. M. (2018). *Multicultural psychology*. Lanham, Maryland, United States: Rowman & Littlefield Publishing.

Rata, G. (2016). Intercultural development through intercultural awareness and cultural briefing. *Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies*, *49*(1), 284-288.

Suryanto., Putra, M. G. B. A., Herdiana, I., & Alfian, I. N. (2012). *Pengantar psikologi sosial*. Surabaya, Indonesia: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR.

Wunderle, W. D. (2006). *Through the lens of cultural awareness: A primer for united states armed forces deploying in arab and middle eastern countries*. Washington, DC, United States: Government Printing Office.

Quappe, S., & Cantatore, G. (2005). What is cultural awareness, anyway? How do i build it. Diunduh 18 Mei 2019 dari: http://www.culturosity.com/pdfs/What%20is%20Cultural% 20Awareness.pdf

Zhang, R., & Steele, D. (2012). Improving intercultural awareness: a challenging task for Japan. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *47*, 52-63.

Sumantri, M. Arief. Provoking the awareness of diversity. This article is a *theoretical study intended to invite each individual and each group to strengthen* awareness of diversity. It contains things that can be applied easily and practically, wrapped in multiculturalism that seeks to strive to create a harmonious and dynamic shared life, and a legal approach as a reminder for every individual or group in order to be spared from acts of discrimination or racism. For the start, this paper reviews a little about multicultural psychology, which focuses on cultural awareness, intercultural awareness, cultural competence, multicultural education and stereotypes in culture. Some examples refer to certain situations, but in practice, they could be applied in the community both in school, family, and other social situations.

Refleksi Keragaman Spiritual-Indigenus dalam Ranah Akademis

Nisa Rachmah Nur Anganthi

Nilai-nilai spiritual keagamaaan seharusnya berfungsi menjadikan manusia berjiwa luhur dan memiliki mental budi yang sehat dan mulia. Ironisnya, keyakinan spiritual keagamaan dalam masyarakat belum mampu mencerminkan tercapainya tugas mulia tersebut. Bukti-bukti menunjukkan bahwa nilai-nilai keyakinan spiritual keagamaan di Indonesia menempati posisi strategis dalam masyarakat Indonesia. Kendati demikian, hasil ini tidak berbanding lurus dengan pengembangan sumber daya insani yang dimiliki oleh bangsa. Artinya, nilai-nilai keyakinan spiritual keagamaan belum mampu mewarnai pengembangan potensi kejiwaan masyarakat Indonesia.

Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa telah terjadi polarisasi yang berbasis spiritual-keagamaan yang mengkhawatirkan bukan mencerahkan. Hal ini terjadi umumnya karena dipicu oleh persoalan-persoalan yang mana seorang pemeluk agama tertentu memasuki wilayah terlarang atau ranah keyakinan spiritual keagamaan yang berbeda tanpa pengetahuan yang cukup dan akurat. Keyakinan spiritual-keagamaan idealnya meningkatkan martabat dan marwah kemanusiaan seseorang atau pemeluknya. Artinya, orang yang matang beragama seharusnya adalah orang yang memiliki karaktersitik atau sifat-sifat yang positif dan terpuji, seperti jujur, toleran, dapat dipercaya, optimis, maupun ciri-ciri positif lainnya. Namun demikian, realita menunjukkan bahwa sedikit orang yang memiliki profil kepribadian sebagaimana yang diidealkan dalam konteks keagamaan yang diyakininya.

Realita Sosial

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai keyakinan spiritual keagamaan di Indonesia sangat beragam. Potensi konflik dan ketegangan sangat besar. Sejarah telah membuktikan bahwa beberapa tragedi kemanusiaan seperti peperangan dan konflik sosial pernah terjadi. Namun demikian, kearifan lokal mampu meredam dan memberikan solusi terciptanya perdamaian. Kearifan lokal merupakan elemen budaya yang harus digali, dikaji, dan direvitalisasi karena esensinya begitu penting dalam penguatan fondasi jatidiri bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi (Brata, 2016).

Pertanyaannya adalah apakah nilai-nilai budaya lokal sebagai perekat

identitas bangsa masih relevan untuk ditawarkan sebagai alternatif dalam menghadapi berbagai permasalahan di era global ini? nilai-nilai budaya lokal seperti apa yang dipilih warga untuk menjadi jembatan dalam mengintegrasikan keragaman? apakah nilai-nilai spiritual keagamaan yang menjadi keunikan bangsa, mampu menjadi tali simpul perekat identitas sosial masyarakat?

Perbedaan entitas di dalam bangsa Indonesia, seperti suku, agama, ras, bahasa, dan adat harus di pahami secara positif dan diarahkan sebagai sebuah sinergi yang saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, dan menjadi daya tarik kearah kerja sama atau resultan yang lebih harmonis sebagai sebuah bangsa yang beradab (Sudharto, 2012). Hal ini perlu dilakukan apabila kita menginginkan masyarakat dapat terhindar dari konflik sosial baik yang bersifat struktural maupun horizontal.

Menurut Rahman, penyebab berbagai konflik struktural dan horizontal di berbagai daerah di Indonesia adalah praktik keagamaan yang mengandung rasa emosional keagamaan yang melampaui batas, serta meningkatnya pengagungan terhadap suku dan etnik (2017). Tantangan yang harus dipikirkan bersama adalah merumuskan secara sadar dan tulus mengenai peran nilai-nilai keagamaan, serta moral dan etik dalam membina kerukunan, persatuan, kohesi sosial, integrasi nasional, mauppun ketahanan nasional dalam era globalisasi. Kemitraan umat beragama perlu dibina dalam kerangka membina ketahanan regional, sebab dengan terciptanya ketahanan nasional dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan dan perkembangan prakarsa antaragama telah mendapat perhatian akademisi di seluruh dunia (Griera & Nagel, 2018). Meskipun demikian, penelitian empiris di bidang ini masih terbatas. Literatur menunjukkan bahwa pemahaman tentang pluralisme dan toleransi harus dilihat secara positif dan ditempatkan pada proporsi aktual yang dilengkapi dengan langkah-langkah konkret dalam dialog dan kerjasama antaragama agar tidak merusak kesatuan bangsa dan akhirnya merusak kehidupan (Siregar, 2016).

Ikhtiar Psikologi

Sulit untuk dibantah bahwa spiritualitas yang mencakup banyak definisi dan beragam memainkan peran penting dalam kehidupan klien (Morgan, Berwick, & Walsh, 2008). Walsh menyampaikan bahwa selama berabad-abad dan lintas budaya, kepercayaan dan praktik spiritual telah mampu memelihara keluarga dan komunitas. Kendati demikian, karena pemisahan historis antara paradigma empiris, ilmiah, dan rasionalistik dan paradigma yang lebih subyektif,

menjadikan pandangan tentang realitas, spiritualitas, dan aspek keagamaan klien telah lama diabaikan dalam psikoterapi.

Penulis sebagai psikolog akademisi berusaha memahami mengapa masyarakat Indonesia yang memiliki nilai-nilai spiritual keagamaan yang tinggi mudah diprovokasi dalam isu isu spiritual keagamaan. Bagaimana psikologi memahami dan menjelaskan fenomena "kewaspadaan kolektif-sosial dalam beragama" di masyarakat? Selanjutnya penulis melalui pendekatan positif transendensi berupaya untuk menggali potensi keyakinan spiritual individu dalam proses intervensi psikologis berbasis spiritual keagamaan. Berpijak dari pengalaman riset tentang keragaman spiritual, penulis memiliki optimisme bahwa kerjasama dan kolaborasi di antara penganut agama yang berbeda dalam menginisiasi penanganan gangguan psikospiritual masyarakat modern dapat dilakukan dengan bersumber dari keyakinan masing-masing agama.

Sebagai upaya untuk memahami perbedaan, hal yang perlu dilakukan adalah mempertimbangkan keyakinan spiritual keagamaan individu sebagai cara memperlakukan klien secara holistik dengan memasukkan kepercayaan dan nilai-nilai paling mendasar dari mereka. Suatu contoh adanya temuan historis yang diperoleh dengan menggunakan studi literatur dan penelitian lapangan menunjukkan bahwa sistem keagamaan lokal di Bali dapat mengintegrasikan penganut agama Hindu dan Islam (Pageh, 2018). Integrasi terjadi sebagai konsekuensi dari kekuatan hubungan yang dipraktikkan dalam mengintegrasikan etnis nasional di Bali yang mencakup kepentingan ekonomi (perdagangan), dan dakwah (penyebarluasan informasi keagamaan). Keyakinan terhadap pengalaman mistis dan penghormatan leluhur dapat saling mendekati dalam ritual keagamaan. Hubungan manusia, manusia dan lingkungan, manusia dan leluhur terjadi secara harmonis, tidak mendominasi dan hegemonik.

Artikel ini berupaya memaparkan sekaligus merefleksikan pengalaman penulis dalam menemukan nilai-nilai substansi dari partisipan penelitian yang berbeda keyakinan untuk meniti kehidupan, meningkatkan kesejahteraan, dan kesehatan psikologis mereka. Melalui persamaan nilai-nilai fundamental ini, diperoleh modal sosial yang ditawarkan sebagai alternatif solusi bagi terciptanya integrasi bangsa untuk mewujudkan bangsa yang memiliki kebersamaan dan kesatuan yang kokoh.

Tujuan artikel ini ditulis dalam rangka menginformasikan pengalaman penulis saat melakukan riset dan mengambil data penelitian tentang keragaman spiritual keagamaan di Indonesia sebagai modal integrasi bangsa. Artikel ini juga menawarkan suatu bentuk percontohan kerjasama riset lintas keyakinan dalam rangka memajukan keilmuan. Di samping itu, artikel ini membuktikan bahwa kebersamaan dalam hal kebaikan di bidang keilmuan dapat dilakukan di antara

keyakinan spiritual keagamaan yang berbeda.

Artikel ini juga dimaksudkan untuk memaparkan pengalaman penulis dalam melakukan kerjasama yang bersifat keilmuan dan mencoba merefleksikan pengalaman tersebut dengan harapan dapat menginspirasi maupun menggugah kesadaran kita sesama warga masyarakat untuk mensinergikan potensi-potensi positif yang dimiliki meskipun berbeda keyakinan spiritual keagamaan.

Penelitian ini bermanfaat untuk menginisiasi kerjasama lintas keyakinan sehingga mampu mengokohkan dan mengukuhkan jalinan silaturahim di antara pemeluk agama atau keyakinan spiritual. Silaturahmi ini dapat berupa kerjasama yang bersifat relasi sosial dalam kegiatan kemasyarakatan maupun dalam hal kerjasama keilmuan. Kerjasama dalam relasi sosial sudah banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik yang bersifat alamiah, seperti gotong royong kepanitiaan maupun yang bersifat kesengajaan, seperti perkumpulan lintas iman.

Urgensi penelitian adalah memunculkan riset-riset berikutnya yang berbasis kerjasama intelektual dari perspektif keragaman keyakinan spiritual tanpa adanya kekawatiran terjadi provokasi atau konflik horizontal. Berpijak dari kerjasama ini akan semakin mengukuhkan keyakinan diri dari masing-masing pemeluk agama untuk menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Dengan kukuhnya keyakinan spiritual-keagamaan yang dimiliki, akan meminimalisasi konflik sosial, sehingga mampu mengokohkan bangunan sosial masyarakat yang berbineka. Hal ini diyakini dapat terwujud karena semua keyakinan spiritual-keagamaan selalu menyampaikan pesan-pesan kebaikan, kedamaian, dan kebenaran.

Sebagai seorang akademisi sekaligus klinisi, penulis mencoba menawarkan ide atau gagasan terkait dengan persoalan integrasi bangsa yang didasarkan atas pengalaman dan refleksi hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis melakukan penelitian pada lembaga pendidikan tinggi berbasis agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan tema dimensi kualitas hidup keluarga berbasis keragaman spiritual-keagamaan dalam nuansa keindonesiaan.

Partisipasi Akademisi

Pelaku akademik yang terlibat dalam penelitian adalah dosen dan tenaga kependidikan laki-laki yang berusia 23-58 tahun, dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Usia informan yang berpartisipasi dalam penelitian paling muda 23 tahun dan paling tua 58 tahun, dengan proporsi usia kurang dari 30 tahun sebesar 6% (2 orang), 30-39 tahun sebesar 27% (9 orang), 40-49 tahun sebesar 27% (9 orang), dan 50-59 tahun sebesar 13% (13 orang). Dengan demikian, proporsi

terbesar berturut-turut adalah usia produktif dewasa madya dan akhir, kemudian lanjut usia, dan terakhir dewasa awal.

Pendidikan informan paling rendah adalah Sarjana Muda, dengan proporsi 8% (1 orang), Sarjana 42% (14 orang), Master atau Magister 33% (11 orang), dan Doktor 21% (7 orang). Dengan demikian, proporsi terbesar berturut-turut ada pada pendidikan master atau magister, kemudian sarjana, doktor, dan terakhir sarjana muda. Adapun status kekaryaan informan adalah tenaga pengajar tetap (dosen) dengan proporsi sebanyak 55% (18 orang), dan tenaga kependidikan tetap (karyawan) sebanyak 45% (15 orang). Status pernikahan informan terdata menikah 85% (28 orang), dan lajang 15 % (5 orang).

Selanjutnya, keragaman keyakinan spiritual secara berturut-turut paling banyak adalah Islam sebesar 27% (9 orang), kemudian Hindu 21% (7 orang), Kristen dan Katolik 18% (6 orang), dan Budha 15% (5 orang). Masa kerja informan dikelompokkan menjadi: kurang dari 10 tahun terdapat 33% (11 orang), antara 11-19 tahun sebesar 30% (10 orang), antara 20-29 tahun sebesar 27% (9 orang), dan terakhir di atas 30 tahun sebesar 9% (3 orang).

Hasil temuan tentang dimensi kualitas hidup berbasis spiritual-keagamaan menunjukkan terdapat persamaan dan perbedaan yang dirangkum dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Persamaan di antara Keragaman Spiritual-Keagamaan

No	Spiritualitas Keagamaan	Dimensi	Indikator	Keterangan
1 2 3 4	Islam Nasrani Hindu Budha	Ketuhanan	Ibadah	Istilah berbeda-beda, namun terkandung makna yang sama, yaitu sarana menjalin relasi dengan Tuhan
1 2 3	Nasrani Hindu Budha	Ketuhanan	Kepastoran atau Kependetaan	Istilah berbeda, namun terkandung makna yang mirip, yaitu adanya mediator antara hamba dan Tuhan melalui wakil Tuhan
1 2	Hindu Budha	Ketuhanan	Yoga dan Meditasi	Istilah berbeda tetapi pemanfaatannya mirip, merupakan sarana konsentrasi dan memusatkan diri untuk mendekat pada Tuhan

No	Spiritualitas Keagamaan	Dimensi	Indikator	Keterangan
1	Islam	Kemanusiaan	Budaya	Istilah sama, suatu pengakuan adanya pengaruh indegenus (kearifan lokal) terhadap keyakinan spiritual-keagamaan
2	Nasrani			
3	Hindu			
4	Budha			
1	Islam	Kemanusiaan	Pelayanan dan Keteladanan	Istilah sama, dimanfaatkan untuk menunjuk relasi layanan publik (masyarakat) dan interpersonal
2	Nasrani			
1	Hindu	Leluhur	Reinkarnasi dan Karma	Istilah sama, pemanfaatannya mirip. Suatu bentuk pengakuan adanya sikus hidup yang bersifat hubungan kausal atau sebab akibat
2	Budha			

Sumber: wawancara (2015-2016)

Spiritualitas Islam memiliki dua dimensi, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Indikator dimensi ketuhanan meliputi Iman (keyakinan), Islam (kepasrahan), Ihsan (kebaikan), Syariat (peraturan), Tarekat (metode), Hakekat (pemaknaan), dan Marifat (kedekatan). Sedangkan indikator dimensi kemanusiaan meliputi Budaya (warisan leluhur), Kemanfaatan (kegunaan), Toleransi (tenggang rasa), Pelayanan (kesediaan), Keterlibatan (partisipasi), Keteladanan (contoh), dan Kedisiplinan (target waktu).

Spiritualitas Nasrani (Kristen dan Katolik) memiliki dua dimensi, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Indikator dimensi ketuhanan meliputi Ibadah, Ketaatan, Kepastoran, Keajaiban, Kesucian, Keruhaniahan, dan Penebusan dosa. Sedangkan indikator dimensi kemanusiaan meliputi Budaya, Kekeluargaan, Ketulusan, Pelayanan, Penghargaan, Keteladanan, dan Penderitaan.

Spiritualitas Hindu memiliki tiga dimensi, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan leluhur. Indikator dimensi ketuhanan meliputi Persembahan, Yoga, Moksa, dan Kependetaan. Sedangkan indikator dimensi kemanusiaan meliputi. Budaya, Kesakralan, Upacara, dan Kerukunan. Selanjutnya indikator dimensi leluhur meliputi Reinkarnasi, Karma, Ziarah, dan Selamatan.

Spiritualitas Budha memiliki tiga dimensi, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan leluhur. Indikator dimensi ketuhanan meliputi Kependetaan,

Parita, Meditasi, Berdoa, dan Ritual. Sedangkan indikator dimensi kemanusiaan meliputi Budaya, Kebaktian, Moralitas, dan Dharma. Selanjutnya indikator dimensi leluhur meliputi Sadranan, Reinkarnasi, dan Karma.

Elaborasi dimensi kualitas hidup keluarga berbasis spiritual indigenus menunjukkan bahwa semua keyakinan agama memiliki keterhubungan di antara salah satu atau lebih dimensi-dimensinya. Bahkan pada dimensi ketuhanan yang dikaitkan dengan ibadah, semua agama meyakini dan melaksanakan secara mandiri (pribadi) maupun berkelompok (berkeluarga) meskipun melalui metode yang beragam, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Metode yang dikenal untuk semua agama adalah berdoa untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Berdoa ini juga memperoleh pengaruh dari budaya lokal melalui permohonan dengan menggunakan bahasa daerah di tempat mereka tinggal.

Dimensi kemanusiaan yang dikaitkan dengan budaya, semua agama mengakui adanya pengaruh kearifan lokal atau tradisi lingkungan sosial terhadap nilai-nilai keyakinan yang mereka anut. Sebagai contoh adalah tradisi menghormati orang yang sudah meninggal. Meskipun metode menghargai orang yang meninggal berbeda-beda, namun semua agama memiliki tradisi penghormatan terhadap leluhur yang sudah meninggal. Misalnya, Islam melakukan penghormatan terhadap orang yang meninggal dengan cara mengaji atau pengajian. Agama Hindu melaksanakan tradisi penghormatan berdasarkan waktu-waktu tertentu dimana arwah orang yang meninggal dianggap masih berhubungan dengan orang yang ditinggalkan di dunia, yaitu harian, bulanan, dan tahunan.

Adapun dimensi-dimensi yang cukup berbeda atau hanya terdapat pada beberapa agama adalah dimensi ketuhanan yang dikaitkan dengan kepastoran atau kependetaan, hanya dimiliki oleh agama Kristen, Katolik, dan Budha; dimensi ketuhanan yang dikaitkan dengan sarana mendekat pada Tuhan yang disebut yoga dan meditasi, hal ini hanya terdapat dalam agama Hindu dan budha; dimensi kemanusiaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai pelayanan dan keteladanan hanya dimiliki oleh Islam, Kristen, dan Katolik; terakhir dimensi leluhur (nenek moyang keluarga) yang dikaitkan dengan istilah reinkarnasi dan karma hanya dimiliki oleh agama hIndu dan budha.

Selanjutnya penulis bermaksud mendeskripsikan temuan penelitian, yang terkait dengan pengalaman-pengalaman positif dalam mengumpulkan data pada partisipan yang berbeda keyakinan spiritual-keagamaan, kemudian merefleksikan pengalaman tersebut. Dengan harapan dapat memicu kesadaran diri dan orang lain untuk menginisiasi suatu aktivitas bersama dalam mewujudkan proses integrasi intelektual untuk Indonesia yang lebih positif, maju, dan sehat.

Refleksi Pengalaman Keberagamaaan

Refleksi merupakan aktivitas dalam ranah kesadaran berpikir untuk merenungkan secara lebih personal dan transendensi atas pengalaman-pengalaman yang dialami. Refleksi pengalaman keberagamaan merupakan refleksi atas pengalaman dalam beragama, baik yang terkait dengan pengalaman pribadi maupun orang lain.

Pertama, saat persiapan penelitian. Pengalaman yang diperoleh berupa **nilai-nilai keutamaan** akan kemudahan, keramahan, dan penerimaan.

Pengalaman penulis saat mencari ijin penelitian cukup menarik karena perlu melakukan observasi lokasi lebih dahulu. Lembaga pendidikan berbasis keagamaan Kristen dan Katolik cukup mudah karena merupakan lembaga pendidikan tinggi yang cukup terkenal di masyarakat. Dengan kejelasan alamat dan popularitas di masyarakat, hampir setiap orang yang ditanya alamatnya cukup mudah menunjukkan lokasi dan tempatnya. Namun hal tersebut kurang berlaku pada lembaga pendidikan Hindu dan Budha, karena disamping namanya yang terdengar asing (bahasa Sansekerta), lokasi dan tempatnya juga masuk ke tengah kampung (dusun). Melalui beberapa kali observasi dan bertanya-tanya pada penduduk setempat, baru sampai di tempat lokasi penelitian. Untuk lembaga pendidikan tinggi berbasis agama Islam, peneliti memilih dua perguruan tinggi swasta dengan latar belakang organisasi kemasyarakatan yang berbeda agar kebinekaan dapat terwadahi. Meskipun memiliki kondisi, latar belakang, dan properti yang berbeda, satu kesamaan yang dapat disimpulkan yaitu penerimaan yang ramah (*friendly*), terbuka (*openness*), dan penuh pertolongan (*helpful*).

Kedua, saat pelaksanaan penelitian. Pengalaman yang diperoleh berupa **nilai-nilai keutamaan** adanya dinamika psikologis partisipan dalam memperoleh keyakinan keagamaan.

Penelitian kualitas hidup keluarga memanfaatkan pendekatan kualitatif fenomenologi yang mana dimaksudkan untuk menggali pengalaman-pengalaman personal dari partisipan. Pengalaman ini perlu digali dan dielaborasi agar jejak-jejak peristiwa yang dialami dapat diingat, diceritakan, dan dimaknai secara jelas, tepat, dan benar. Hasil temuan menunjukkan bahwa informan dalam beragama dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) beragama karena keturunan (dari orang tua), (2) beragama karena perpindahan agama (kesulitan beradaptasi), dan (3) beragama karena adaptasi terhadap budaya (dari pergaulan budaya).

Beragama karena keturunan dari orang tua: Beberapa informan menyatakan bahwa mereka beragama tidak pernah mempertanyakan keberagamaannya. Dengan kata lain, mereka beragama karena warisan dari orang tua maupun generasi sebelum orang tua mereka. Mereka taat, setia, dan

menjalankan dengan sungguh-sungguh setiap apa yang telah diwariskan dan dilestarikan oleh generasi sebelumnya.

Beragama karena perpindahan agama (konversi agama): Beberapa informan menyatakan bahwa mereka beragama bukan karena keturunan atau warisan dari orang tua mereka. Namun karena kesulitan beradaptasi dengan tata cara beragama dari agama semula. Mereka mengatakan bahwa agama yang sekarang mereka yakini jauh lebih mudah dan sederhana. Selain itu mereka juga memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dengan agama sebelumnya, seperti kesulitan melafalkan doa yang diajarkan, kurang tertarik dengan guru yang mengajarkan, atau kesulitan dengan teman sepermainan (*peer-group*) mereka. Oleh karena itu, mereka dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan mencari alternatif dengan keyakinan yang lain dan akhirnya berpindah keyakinan dan agama.

Beragama karena pergaulan atau adaptasi budaya: Beberapa informan termasuk orang yang luwes, komunikatif, dan pro-sosial. Mereka sangat menyukai pergaulan dan menjalin relasi dengan orang lain melalui aktivitas sosial. Terutama menjalin relasi dengan orang-orang baru dari berbagai budaya lokal, regional, maupun global. Banyak orang-orang dari manca Negara yang datang ke Indonesia dengan berbagai tujuan. Ada yang bertujuan dagang, menjalankan misi sosial-keagamaan, maupun misi-misi lainnya yang diakui dan dibutuhkan dalam kancah pergaulan dunia.Pergaulan dalam misi-misi ini menarik bagi informan karena memperkaya wawasan, pergaulan, maupun keilmuan karena umumnya pembawa misi merupakan orang-orang terdidik yang mampu, terampil, ahli, dan berwawasan. Oleh karena itu informan sangat tertarik dan menerima dengan tangan terbuka semua ajakan, tawaran, dan bantuan yang datang dari pendatang. Setelah lama bergaul dan berinteraksi menjalin aktivitas kebersamaan dalam jangka panjang, akhirnya mereka dengan suka rela mengikuti apa yang disarankan dan ditawarkan oleh pendatang karena informan menyatakan sudah berhutang budi dengan mereka, sehingga informan tidak nyaman apabila mereka menolak tawaran untuk bergabung dengan mereka.

Ketiga, saat tindak lanjut penelitian, **nilai keutamaan** yang diperoleh adalah masing-masing keyakinan spiritual-keagamaan memiliki kata kunci untuk memberdayakan dan menyehatkan penganutnya.

Saat tindak lanjut penelitian atau selesainya pengambilan data penelitian, peneliti memperoleh pengalaman yang menarik, terutama saat informan menyatakan bahwa nilai-nilai keyakinan spiritualitas-keagamaan yang bersumber dari kitab suci mereka mengandung nilai-nilai penyembuhan diri. Semua informan menyatakan bahwa dalam kitab suci mereka (masing-masing) memiliki nilai-nilai pengobatan, terutama adalah pengobatan psikologis. Mereka menceritakan tentang model-model pengobatan (perawatan) mental atau kejiwaan

yang bersumber dari kitab suci mereka. Hal inilah yang sebenarnya memicu dan memacu peneliti untuk selanjutnya melakukan penelitian berikutnya. Penelitian yang bertema penyembuhan kesehatan mental melalui sumber-sumber dari kitab suci atau keyakinan spiritual-keagamaan. Menariknya, metode penyembuhan yang berasal dari kitab suci masing-masing agama tersebut dapat dimanfaatkan bagi penyembuhan diri sendiri. Dengan kata lain, penyembuhan dan perawatan tersebut tidak memerlukan bantuan orang lain atau profesional. Namun perlu melakukan dengan pembelajaran yang kontinu, pembiasaan, dan ketekunan. Agar metode penyembuhan tersebut dapat berjalan sempurna tidak memiliki efek sampingan.

Setiap bangsa atau kelompok yang benar-benar hidup sesuai dengan spirit masing-masing agama yang diyakini dengan sendirinya akan memanifestasikan keharmonisan, persaudaraan, kedamaian, dan kenyamanan dalam kehidupan bermayarakat (Bauto, 2014). Hal ini karena agama merupakan ajaran tentang kebenaran dan kebaikan, serta anjuran untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan, perselisihan, maupun diskriminasi. Kehidupan keagamaan seseorang nampak dari pola pikir, perilaku, atau sikap dan cara hidupnya sebagai perwujudan atas sikap religius seseorang yang dapat menerima perbedaan agama apa pun sebagai hamba Sang Pencipta. Selama ini, penafsiran doktrin agama yang berlebihan atau sarat emosi oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai pemicu lahirnya sejumlah konflik horizontal berbasis agama (Baidi, 2010). Selain itu, disinyalir terdapat beberapa daerah di Indonesia dikenal sebagai basis regional untuk penganut fanatik agama tertentu.

Akhir-akhir ini, pertumbuhan dan perluasan prakarsa antaragama untuk menemukan kesadaran dan mencari titik temu berbasis persamaan bukan perbedaan telah mendapat perhatian kalangan akademis di seluruh dunia (Nagel, 2018). Hal ini berdampak pada munculnya kebijakan yang terkait dengan tata kelola keragaman agama di Eropa dan sekitarnya. Meskipun demikian, penelitian empiris di ranah ini masih terbatas, karena masih adanya kewaspadaan yang tinggi di antara masing-masing agama dalam merespon keyakinan agama yang berbeda.

Siregar meyakini bahwa pemahaman tentang pluralitas dan toleransi antar agama harus dilihat secara positif dan ditempatkan pada proporsi yang aktual (2016). Namun demikian, selanjutnya perlu dilengkapi dengan langkah-langkah konkret dari dialog dan kerjasama antaragama ini, agar tidak merusak kesatuan bangsa dan akhirnya merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Soderholm & Kriger menganggap agama sebagai elemen intrinsik dari pola pikir budaya yang secara implisit berdampak pada bagaimana seseorang berkomunikasi tidak hanya di tempat kerja tetapi juga di kelas (2014). Ada konsensus umum dalam literatur manajemen bahwa dimensi agama dalam berbagai konteks pekerjaan

dan pembelajaran adalah variabel penting yang berdampak pada komunikasi dan kepemimpinan. Hasilnya menunjukkan bagaimana norma-norma berbasis agama dan budaya yang berbeda secara khusus dapat mempengaruhi interaksi siswa-guru maupun siswa-siswa dalam pengaturan pendidikan tinggi.

Pluralitas agama adalah fakta dan salah satu fenomena sosial, sebagaimana masyarakat Indonesia yang meyakini berbagai agama. Hal ini kadang dapat menimbulkan konflik sosial apabila tidak terkelola secara proporsional. Konflik dapat dihindari saat semua penganut agama toleran terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari mereka (Karwadi, 2004). Toleran disini dimaksudkan sebagai kesanggupan dan kemauaun untuk menerima perbedaan secara rasional dan realistis tanpa melibatkan emosi yang berlebihan.

Penutup

Sebagai insan akademisi, kita perlu menumbuhkan keterampilan dan kemauan untuk menjaga, merawat, dan memelihara kebangsaan melalui penelitian kolaboratif di antara penganut keyakinan spiritual yang berbeda. Adapun tema yang memungkinkan untuk diangkat antara lain berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, maupun pengembangan sosial. Namun demikian, perlu adanya tindak lanjut penelitian secara kumulatif, serentak, dan berkesinambungan dalam melakukan riset keragaman spiritual-keagamaan agar hasil temuan dapat lebih bermanfaat bagi kekukuhan dan kekokohan bangsa. Serta agar penelitian tidak hanya sebatas riset, namun kemanfaatannya lebih terasa bagi pemberdayaan masyarakat melalui nilai-nilai yang dimiliki.

Adapun rekomendasi yang ditawarkan adalah kolaborasi untuk mengeksplorasi nilai-nilai universal dalam tiap-tiap agama agar dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dalam konteks budaya yang berbeda. Hal ini meliputi perlunya pengenalan diri atau nilai-nilai keyakinan-keagamaan yang dimiliki, bertindak empati terhadap nilai-nilai keyakinan-keagamaan orang lain, aktif berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial yang berbeda, mempraktikkan ibadah yang diyakini masing-masing, serta memperhatikan orang lain secara lebih pribadi.

Daftar Acuan

Baidi. (2010). Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan dan Kerukunan Masyarakat melalui Pendekatan Agama. Millah, 1-29.

Bauto, L.M. (2014). Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 23(2), 11-25.

Brata, I.B. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. Jurnal Bakti Saraswati, 5(1), 9-16. ISSN: 2088-2149.

Griera, M., & Nagel, K. (2018). Interreligious Relations and Givernance of Religion in Europe: Introduction. Social Compass, 1-10. Doi: 10.1177/0037768618788274.

Karwadi. (2004). Motivasi Beragama secara Toleran Masyarakat Dusun Sorowajan Banguntapan Bantul Yogyakarta. APLIKASIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama, 5(1), 1-16.

Morgan, V.J, Berwick, H.E, & Walsh, C. A. (2008). Social Work Education and Spirituality: An Undergraduate Perspective. Transformative Dialogues: Teaching and Learning Journal, 2(2), 1-15.

Pageh, I.M. (2018). Kearifan Sistem Religi Lokal dalam Mengintegrasikan Umat Hindu-Islam di Bali. Jurnal Sejarah Citra Lekha, 3(2), 88-98.

Rahman, A.R. (2017). Peran Agama dalam Memperkuat Integrasi Nasional (dalam Perspektif Sejarah). Lensa Budaya, 12(1), 101-109. ISSN: 0126-351X.

Siregar, C. (2016). Pluralism and Religious Tolerance in Indonesia: An Ethical-Theological Review based on Christian Faith Perspectives. HUMANIORA, 7(3), 349-358.

Sudharto. (2012). Multikulturalisme dalam Perspektif Empat Pilar Kebangsaan. Jurnal Ilmiah CIVIS, 2(1), 121-142.

Warner-Søderholm, G., & Kriger, M. (2014). The Art of Dealing with Religious and Cultural Diversity in the Classroom. International Journal of Business and Management, 9(10), 149-160. Doi: 10.5539/ijbm.v9n10p149.

Nisa Rachmah Nur Anganthi. *Reflections on spiritual-indigenous diversity in the academic field.* *This article aims to show that the values of spiritual beliefs as social capital have a great potential for tension and conflict, but on the other hand are able to integrate society when treated wisely. Through qualitative-phenomenological research it is proven that in the academic field there is "mutual greeting and mutual stalling" about "how spiritual-religious diversity has been fostered between generations in cultural wrap" able to realize trust, openness, and honesty in expressing religious spiritual values that are believed. These three values are an able to bring up 'ukhuwah ... brotherhood' among different adherents of spiritual beliefs, because they underlie the findings of quality of life dimension based on universal spiritual-religious, namely divinity and humanity.*

----

bagian 3

Pemilu dan Korupsi

"Cebong dan Kampret": Simbolisme Politik dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 di Indonesia

Jony Eko Yulianto & Jessie Janny Thenarianto

Pendahuluan

Hafiz, 22 tahun, adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas negeri di Jakarta. Sebagai anak muda, ia tergolong aktif menggunakan media sosialnya untuk mencari tahu fenomena sosial terkini. Selain itu, ia berpikir bahwa media sosial adalah salah satu teknologi yang memungkinkannya terhubung dengan keluarga besar, teman-teman, serta sebagai sarana untuk menikmati tulisan tokoh-tokoh nasional dan internasional yang ia kagumi. Suatu hari, seusai kuliah, seperti seperti biasa ia membuka Facebook-nya. Ada tiga notifikasi di Facebook yang memicu hasratnya untuk membuka media sosial favoritnya itu. Seingatnya, sejam yang lalu ia baru saja mengunggah sebuah video yang menunjukkan calon presiden dukungannya, Prabowo Subianto, yang sedang berpidato di hadapan ribuan pendukung fanatiknya di Stadion Gelora Bung Karno. "Cebong mana punya calon presiden yang tegas begini", tulisnya menerangkan video tersebut. Notifikasi yang ia terima rupanya muncul karena Rudi, seorang teman SMP Hafiz, mengomentari video itu. "Dasar kampret dan capresnya, sama-sama megalomania!", tulis Rudi. Hafiz sangat marah dengan komentar tersebut. Ia mempersiapkan jawaban balasan yang tidak kalah pedas untuk menanggapi komentar tersebut.

Di tempat yang lain, Bayu, 25 tahun, tampak sedang menikmati makan siangnya sambil membuka Facebook-nya. Ia adalah teman lama Hafiz dan Rudi. Bayu adalah anak muda yang tidak terlalu tertarik dengan politik. Baginya politik adalah sebuah dunia yang amat asing. Akan tetapi, di sisi lain, tahun politik kali ini mau tak mau telah membuatnya terseret ke dalam pusaran ketegangan. Ia sebenarnya merasa kurang nyaman dengan situasi tersebut, tetapi kebutuhannya untuk selalu terhubung dengan teman-temannya di media sosial, membuatnya aktif mengikuti perdebatan politik di media sosial. Sembari membaca status-status di lini masa yang ditulis oleh teman-teman dekatnya, secara tak disengaja ia membaca postingan Hafiz. Oleh karena postingan tersebut terlihat mendapatkan banyak komentar, Bayu tertarik untuk membaca isinya. Ketika membaca komentar-komentar tersebut, Bayu tampak mengernyitkan dahi karena perdebatan antara Hafiz dan Rudi terasa sangat kasar baginya. Ia yang sejak awal tidak terlalu tertarik dengan politik semakin merasa muak

dengan kondisi perpolitikan di tanah air. Bayu yang tadinya sempat memikirkan calon mana yang akan ia pilih spontan berpikir untuk menjadi golongan putih. Ia menutup Facebook dan beralih ke Twitter, tetapi ternyata sama saja. Kini ia sedang berpikir untuk menutup akun media sosialnya setidaknya sampai ketegangan politik di tanah air mereda.

Dua cerita di atas adalah gambaran tentang situasi sehari-hari yang dialami oleh pengguna media sosial di Indonesia selama masa pemilihan umum presiden tahun 2019. Bagi masyarakat yang partisan seperti Hafiz dan Rudi, pemilu ini dipersepsikan sebagai sebuah medan pertempuran untuk menegaskan pilihannya kepada orang lain, baik yang memiliki pilihan yang sama maupun berbeda. Dengan kata lain, pemilu 2019 menghadirkan ketegangan dan energi yang membuat individu perlu tampil dan menunjukkan pilihan politiknya. Orang-orang yang memiliki pandangan politik berbeda, baik dari golongan elite maupun akar rumput, dipersepsikan sebagai ancaman. Sedangkan, bagi masyarakat non-partisan seperti Bayu, suasana menjelang pemilu merupakan momen yang amat menghabiskan energi dan menimbulkan sikap apatis. Ia melihat perseteruan dua kubu sebagai sebuah ancaman bagi dirinya sendiri yang sebenarnya lebih ingin menggunakan media sosial untuk mewadahi kebutuhan interaksi sosialnya. Singkatnya, baik Hafiz dan Rudi maupun Bayu sama-sama merasakan ancaman. Ancaman yang dirasakan oleh Hafiz dan Rudi (masyarakat partisan) berasal dari masyarakat politik yang memiliki pilihan berbeda dengan mereka, sedangkan ancaman yang dirasakan oleh Bayu (masyarakat non-partisan), berasal dari ketegangan yang ditimbulkan oleh perseteruan antar kelompok masyarakat partisan.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa meskipun kita hidup dalam sebuah kosmologi politik yang sama (Flache & Macy, 2011), pemaknaan yang dirasakan setiap orang sangat mungkin berbeda (Jenkins, 2007; Singer, 2018). Oleh karena itu, sebenarnya kita tidak pernah dapat menganggap bahwa polarisasi yang terjadi di masyarakat adalah sebuah fenomena tunggal yang akan menghasilkan reaksi psikologis yang tunggal pula (Erlingsson & Brysiewicz, 2013). Sebaliknya, ada keragaman emosi dan penghayatan yang perlu dipahami.

Meskipun demikian jika kita perhatikan lebih seksama, ada narasi tunggal dominan yang sedang berserakan di mana-mana. Ada narasi tunggal yang digunakan pihak tertentu untuk memobilisasi massa sesaat setelah pemilihan presiden 2019 usai. Beberapa politikus menyatakan bahwa mereka sedang berjuang atas nama rakyat, atas nama umat Islam, atas nama bangsa. Tetapi rakyat yang mana? Umat Islam yang mana? Bangsa yang mana? Miskonsepsi ini semakin kentara saat kita melihat ada narasi tandingan yang menolak melalui tagar "#TidakAtasNamaSaya", yang menyatakan bahwa mereka tidak

merasa sebagai rakyat yang dimaksud, bukan sebagai umat Islam yang sedang diperjuangkan, dan berbagai narasi penolakan sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pun dalam titik tertentu tidak sepakat dengan eksistensi narasi tunggal yang sedang diajukan.

Menariknya, studi empiris yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial mengakui bahwa rumusan definisi, upaya pengukuran, dan kemampuan insani kita dalam memahami struktur dan fitur polarisasi sosial memang amat terbatas (Bramson et al., 2016). Padahal pemahaman atas struktur dan fitur polarisasi sosial, akan sangat menentukan strategi konkret dalam mengupayakan reintegrasi sosial. Meskipun selama ini topik reintegrasi dan rekategorisasi sosial merupakan wacana ideal yang dipercayai banyak kalangan perlu dilakukan bangsa ini untuk bersatu kembali (Dovidio, Love, Schellhaas, & Hewstone, 2017), tetapi pada praktiknya kita tidak pernah secara detail merumuskan bagian mana yang harus kita garap dan berikan perhatian saat kita mulai bicara tentang integrasi sosial. Singkatnya, kita sebenarnya memahami bahwa kita perlu bersatu setelah periode polarisasi sosial yang melelahkan ini, tetapi kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana cara mengawalinya, bagian mana yang harus dipersatukan, dan pertanyaan-pertanyaan teknis lainnya.

Tulisan ini akan membahas situasi polarisasi sosial dalam masyarakat politik kita dengan menggunakan lensa Teori Representasi Sosial (Moscovici & Marková, 1998). Kami akan membahas berbagai representasi sosial tentang polarisasi sosial untuk menunjukkan bahwa ketegangan yang terjadi di akar rumput memiliki berbagai dimensi. Tulisan ini secara khusus membahas tentang bagaimana simbolisasi politik dipakai oleh masyarakat politik untuk menegaskan identitasnya dan menghasilkan polarisasi sosial. Pembahasan ini akan relevan untuk menolong kita memahami fenomena global dalam kacamata aktivitas keseharian. Dengan memahami struktur dan fitur representasi secara detail, kita akan memahami bagian-bagian apa saja yang dapat digarap untuk mengupayakan integrasi sosial. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas tentang narasi polarisasi sosial melalui narasi cebong dan kampret dengan lebih mendalam, kita akan mundur sedikit ke belakang untuk mengingat bagaimana latar belakang munculnya narasi cebong dan kampret ini serta dampaknya dalam kehidupan sosial dalam masyarakat politik kita.

Situasi Politik Indonesia Tahun 2014-2019

Polarisasi sosial dalam situasi perpolitikan di Indonesia diawali dari pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014. Jika kita memperhatikan rekam jejak perjalanan politik kita sebagai sebuah bangsa, pilpres tahun 2014 merupakan

pilpres pasca-demokrasi pertama yang hanya diikuti oleh dua kandidat calon presiden dan wakil presiden. Saat itu, Joko Widodo-Jusuf Kalla tampil dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan beberapa partai lainnya, dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maju dengan dukungan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) dan dukungan dari beberapa partai lainnya. Media massa menggambarkan kedua calon presiden sebagai dua sosok kontras dengan latar belakang dan sifat yang amat berbeda. Joko Widodo adalah representasi politisi dari kalangan sipil, seorang pengusaha mebel yang berhasil menjadi walikota Surakarta dan kemudian gubernur DKI Jakarta. Sedangkan Prabowo Subianto adalah seorang mantan perwira tinggi militer di masa Orde Baru. Survei yang dilakukan oleh lembaga survei Populi Center (Ihsanuddin, 2014), misalnya, menunjukkan bahwa rakyat menilai Joko Widodo sebagai sosok yang merakyat dan menilai Prabowo Subianto sebagai sosok yang tegas.

Eksistensi dua kubu yang sama-sama memiliki figur kuat yang ditopang dengan dukungan militan dari publik menstimulasi terbentuknya polarisasi sosial di panggung pilpres 2014. Joko Widodo cenderung didukung oleh berbagai partai politik maupun sosok-sosok yang nasionalis. Sedangkan Prabowo Subianto, meskipun berasal dari Partai Gerindra yang memiliki *platform* sebagai partai nasionalis, cenderung didukung oleh berbagai partai politik beraliran agamis. Para peneliti sosial menilai bahwa pemilu 2014 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang secara kental menggunakan politik identitas dalam menggalang simpati massa dan meraup dukungan publik (Budiharto & Meiliana, 2018). Kedua kubu menggunakan beragam *platform* untuk menunjukkan kekuatan masing-masing kandidat sembari melancarkan serangan-serangan kepada kubu lawan. Pemilu 2014 juga merupakan momen politik pertama yang membawa publik menyoroti penggunaan media sebagai alat kampanye, hingga membuat beberapa stasiun televisi mendapatkan evaluasi karena dianggap tidak lagi menyediakan berita yang netral dan proporsional dalam membahas kedua calon presiden dan wakil presiden (Rossini, Hemsley, Tanupabrungsun, Zhang, & Stromer-Galley, 2018).

Pada masa pilpres 2014, masyarakat politik telah menggunakan media sosial sebagai media pertukaran informasi politik mulai dari perbincangan tentang kampanye hingga perbincangan pelaksanaan dan evaluasi kontestasi politik terbesar tahun itu. Facebook dan Twitter, dua media sosial terbesar di dunia yang juga dikenal memiliki jutaan pengguna dari Indonesia merekam percakapan politik yang amat masif melalui dua media sosial ini. Sejak awal tahun 2014 hingga hari pelaksanaan pilpes, Facebook mencatat 200 juta percakapan seputar pilpres (Noviandari, 2014), sedangkan Twitter menemukan 95 juta *twee*t (Lukman, 2014) yang membahas tentang konstestasi politik

nasional tersebut. Masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai panggung untuk menunjukkan keunggulan kandidat yang dijagokan. Tahun 2014, pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggunakan *twibbon* berjudul *"I stand on the right side"*, sedangkan pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajassa menggunakan *twibbon* "Pilih satu karena saya cinta Indonesia". Perilaku-perilaku di media sosial ini merepresentasikan bagaimana percakapan tentang politik di tataran akar rumput berkembang dengan sangat kompleks di Twitter dan Facebook sebagai dua media digital yang populer di kalangan masyarakat akar rumput.

Gejala polarisasi sosial yang terjadi pada pemilihan umum 2014 pada titik tertentu telah mempengaruhi peta perpolitikan di daerah pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu yang amat kentara terasa adalah menguatnya kembali polarisasi sosial saat pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta pada tahun 2017. Politik identitas kembali dimainkan oleh kedua pendukung calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta saat itu. Kali ini pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat maju dengan dukungan PDI Perjuangan serta koalisi dengan beberapa partai lainnya dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tampil dengan dukungan Partai Gerindra dan beberapa partai lainnya. Situasi politik di DKI Jakarta kembali memanas dan mencapai puncaknya saat Ahok dianggap menista agama dan membuat sekelompok umat Islam yang tersinggung bergerak melawan dan menuntut agar Ahok diadili (Mietzner & Muhtadi, 2018). Saat itu, masyarakat politik di DKI Jakarta dan di kota-kota lainnya, terbelah menjadi pro-Ahok dan anti-Ahok. Polarisasi sosial menjadi topik yang semakin mengemuka dan menjadi salah satu fitur utama dalam peta perpolitikan nasional.

Usai perhelatan pilgub DKI Jakarta 2017, tak lama kemudian perhatian masyarakat pun beralih ke persiapan pemilihan presiden 2019. Mengulang pilpres yang sebelumnya, pilpres 2019 kembali mempertemukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Joko Widodo kali ini maju bersama Ma'ruf Amin, seorang ulama yang dipercayai mampu untuk mengatasi serangan-serangan berbasis politik identitas yang dialamatkan kepada Joko Widodo. Sedangkan Prabowo Subianto kali ini menggandeng Sandiaga Uno yang dipercayai mampu menarik simpati kalangan milenial yang menyukai tokoh politik muda dan kreatif. Sebagaimana diprediksi banyak pihak, lanskap perpolitikan nasional kembali memanas oleh karena pengaruh kontestasi pada tahun-tahun sebelumnya. Satu hal yang menarik pada pemilihan presiden 2019 dan tidak muncul pada pemilihan presiden pada tahun-tahun sebelumnya adalah munculnya narasi cebong dan kampret dari kelompok pendukung masing-masing. Penjelasan mendalam tentang hal ini akan dibahas pada bagian tulisan selanjutnya.

Hiruk-pikuk situasi perpolitikan nasional selama masa persiapan pemilihan presiden 2019 juga sampai ke media sosial. Para aktivis digital masyarakat di media sosial sebenarnya juga turut berkontribusi mendukung terbentuknya polarisasi sosial (Hatherell, 2019). Halaman Facebook dipersonalisasi berdasarkan riwayat akses dan pemberian *likes* kita, sehingga konten yang pro-pandangan kita akan terus bermunculan. Selain itu, kita juga cenderung lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kesukaan maupun pandangan yang sama dengan kita daripada orang-orang lain yang berbeda. Pengguna media sosial seolah sedang hidup dalam sebuah ruang gema yang memantulkan kembali informasi yang sedang diberikan kepada publik. Fenomena ini dikenal sebagai *Echo Chamber Effect* (Dubois & Blank, 2018). Eksposur yang terbatas ini membuat pandangan pengguna menjadi sempit, membentuk sikap partisan dan mulai menyerang lawan politik secara brutal, ataupun sebaliknya, menghindari politik sepenuhnya.

Serangkaian ulasan di atas merupakan fenomena perilaku partisan yang terjadi di Indonesia. Meskipun fenomena perilaku partisan sedemikian kental mewarnai konstelasi politik nasional di Indonesia, namun fenomena partisan sendiri telah banyak terjadi di berbagai belahan negara lain. Pada bagian selanjutnya, kita akan menengok berbagai penelitian ilmiah yang pernah membahas tentang kondisi masyarakat partisan yang terjadi di negara lainnya. Selain itu, kita akan mencoba merumuskan apa benang merah dari berbagai literatur tersebut sebelum menentukan posisi dan keunikan tulisan ini.

Perilaku Partisan dan Polarisasi Sosial

Studi tentang polarisasi sosial yang disebabkan karena kondisi perpolitikan nasional sebenarnya telah lama menjadi sumber ketertarikan dari banyak peneliti dunia (Bafumi & Shapiro, 2009; Ezrow, 2010). Di Amerika Serikat misalnya, perseteruan antara pendukung ideologi politik Demokrat dan Republik telah sejak lama mewarnai kontestasi perpolitikan nasional di negara adidaya ini (Han, 2011; Lee, 2010). Pertanyaannya kemudian, mengapa perilaku partisan dapat terjadi? Perspektif teori isolasi ideologi *(ideological enclavement theory)* (Freeden, 2006) memberikan penjelasan ilmiah bahwa perilaku partisan muncul karena dua sebab utama. Pertama, karena adanya persepsi yang dibentuk dari individu tentang ideologi-ideologi yang tersedia dalam kontestasi politik nasional. Ketika individu menyaksikan tokoh-tokoh politik berkampanye lewat beragam media, individu akan cenderung mulai melakukan evaluasi tentang ideologi mana yang sesuai dengan karakteristik dirinya. Semakin seorang individu merasa cocok dengan sebuah ideologi, semakin ia akan menganggap

ideologi lain tidak terlalu relevan dan tidak menarik baginya.

Alasan berikutnya tentang mengapa seorang mengembangkan perilaku partisan adalah migrasi ideologi (Freeden, 2006). Frase migrasi ideologi di sini artinya individu tersebut merasakan bahwa dengan bergabung menjadi anggota dari ideologi politik tertentu, maka kebutuhan psikologisnya akan terpenuhi. Dengan bergabung ke salah satu ideologi tertentu, ia akan dapat menegaskan identitas sosialnya, yang pada akhirnya membuatnya puas sebagai insan politik. Kepuasan di sini dapat memiliki bagian-bagian yang berlapis, yakni level intrapersonal, level intra-kelompok, dan level antar-kelompok. Pada level intrapersonal, seorang insan politik yang puas akan cenderung merasakan kesejahteraan psikologis karena ia memiliki ruang afirmasi untuk pemikiran maupun sikap politiknya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ada orang-orang yang menerima dan menghargai sikap politiknya. Pada level intra-kelompok, ia merasa mendapatkan dukungan sosial dari rekan-rekan lain yang memiliki kepercayaan politik yang sama. Ia juga mendapatkan kepercayaan yang membuat harga diri dan nilai dirinya menguat. Pada level antar-kelompok, ia seperti menemukan sebuah rumah bagi perilaku-perilaku dehumanisasi (merendahkan) kepada kelompok lain yang memegang ideologi yang berbeda.

Penjelasan dari perspektif teori isolasi sosial ini menunjukkan bahwa perilaku partisan sebenarnya merupakan perilaku yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga bersifat sosial. Proses-proses keperilakuan yang ditunjukkan oleh seorang individu partisan merupakan hasil dari proses internalisasi identitas sosial dan situasi perpolitikan nasional. Sebaliknya, suasana perpolitikan nasional yang dirasakan sedemikian panas di kalangan masyarakat akar rumput, sebenarnya merupakan akumulasi dan reproduksi perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Studi empiris menunjukkan bahwa polarisasi sosial menyebabkan pendukung kedua kubu, dari tingkat elite hingga ke akar rumput, terjebak dalam nuansa partisan yang sangat panas, penuh bias, dan penuh prasangka politik (DeVault & Hammersley, 2001; Ellefsen, 2017; Lumsden & Winter, 2010; Lumsden, 2014; Mason, 2014). Studi terkini bahkan menunjukkan bahwa perseteruan ini telah merusak sendi-sendi relasi sosial dengan keluarga (Zuckerman, Dasovic, & Fitzgerald, 2007), khususnya yang memiliki pilihan politik berbeda (Chen & Rohla, 2018). Berbagai literatur tentang polarisasi sosial di Amerika Serikat ini menunjukkan kepada kita bahwa polarisasi sosial yang disebabkan oleh isu politik nasional sebenarnya tidak lagi dapat dibaca murni sebagai fenomena politik di tingkat nasional, tetapi juga merupakan sebuah bentangan yang menjadi pertemuan antara domain relasi interpersonal dengan domain relasi antar-kelompok.

Walaupun perilaku partisan merupakan perilaku yang merepresentasikan

hal mikro *(particular)* dan makro *(societal)* secara bersamaan, mayoritas studi tentang polarisasi sosial kerap dibahas dalam kacamata fenomena politik nasional *(larger social phenomenon)* (Großer & Palfrey, 2013; Mason, 2014; McCarty, 2015; Schlozman, Verba, & Brady, 2012) dan menafikan aspek-aspek relasi dan interaksi sosial dalam perspektif yang lebih mikro. Memang ada pula beberapa pembahasan tentang aspek mikro dalam politik. Namun terminologi mikro yang digunakan sebenarnya lebih banyak membahas tentang elemen-elemen intra-individual seperti peranan tipologi kepribadian masyarakat politik yang partisan (Bittner, 2011; Bittner, 2014; Ehret, Boven, & Sherman, 2018; Harrison, 2015; Luttig, 2018; Schoen & Schumann, 2007). Pada tulisan ini, kami akan berfokus pada dialektika penggunaan ungkapan derogasi di kalangan pendukung akar rumput *(grassroot)* kepada kubu politik yang berbeda dalam narasi cebong dan kampret.

Fokus Tulisan

Ada beberapa alasan fundamental mengapa kami memilih mengambil fokus tulisan pada penggunaan simbol-simbol populisme dalam narasi politik sehari-hari. Konteks keseharian dalam perspektif ilmu psikologi sosial merupakan konteks yang penting untuk dikaji dengan lebih komprehensif karena konteks hidup keseharian adalah ruang yang memungkinkan kita untuk memotret produksi dan reproduksi aktivitas sekaligus lokasi tempat manusia memproduksi dan mereproduksi makna hidupnya (Emiliani & Passini, 2016; Hodgetts et al., 2010). Selain itu, potret kehidupan sehari-hari adalah lokus pertemuan antara situasi khusus *(particular live events)* dan situasi sosial global (Brinkmann, 2012). Apa yang terepresentasi dalam kehidupan sehari-hari adalah potret dari fenomena sosial dan sebaliknya, fenomena sosial kerap dibentuk dari akumulasi aktivitas sehari-hari. Filsuf sosial seperti Simmel (1976) sebenarnya telah sejak lama menulis bahwa untuk memahami fenomena secara utuh, sangat penting untuk tidak memisahkan kedua aspek ini sebagai dua entitas yang berbeda, sebab keduanya berkelindan satu sama lain. Ada representasi global di dalam fenomena lokal, dan ada akumulasi lokal di dalam fenomena global.

Kami memilih untuk membahas tentang narasi politik keseharian yang terepresentasi dalam penggunaaan istilah cebong dan kampret karena beberapa pertimbangan. Pertama, narasi cebong dan kampret merupakan narasi polarisasi yang paling menggambarkan ketegangan di tingkat akar rumput selama kampanye pemilihan presiden 2019 di Indonesia. Analisis-analisis yang telah beredar luas dalam kajian ilmu politik, sosiologi politik, dan ilmu sosial lainnya lebih banyak membahas fenomena polarisasi ini melalui kacamata struktur kuasa, relasi kuasa,

dan elemen-elemen politik praktis lainnya. Meskipun pembahasan-pembahasan dengan menggunakan perspektif ilmu sosial tersebut sangat relevan dan memiliki kontribusi penting dalam menjelaskan kondisi perpolitikan di tingkat nasional, kajian-kajian ini masih amat terbatas dalam menjelaskan ketegangan interpersonal yang terjadi di tingkat kehidupan keseharian. Kedua, pembahasan tentang narasi cebong dan kampret merupakan jenis narasi yang bukan hanya menunjukkan representasi olokan dari lawan politik, tetapi juga berbagai tingkat representasi sosial lain yang belum banyak dikaji secara komprehensif. Tulisan ini akan berupaya untuk menjelaskan hal-hal yang belum tergali tersebut melalui kacamata psikologi sosial, yakni Teori Representasi Sosial.

Plalform media sosial Twitter (www.twitter.com) dipilih karena Twitter merupakan media sosial tipe *micro-blogging* yang mengakomodasi percakapan dalam waktu riil *(real time)*. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna Twitter terbanyak di dunia. Jumlah pengguna yang besar ini memungkinkan Indonesia menjadi salah satu negara yang kerap berkontribusi dalam memproduksi narasi-narasi yang kuat hingga menjadi topik pilihan terpopuler *(worldwide trending topic)*. Beberapa contoh tagar *(hashtag)* yang sempat merajai trending topik dunia diantaranya adalah (1) #01TheChampion, yakni saat pemilihan presiden di luar negeri yang berlangsung di bulan Mei, (2) tagar #UninstallJokowi yang merepresentasikan reaksi kubu pendukung Prabowo-Sandi saat CEO Buka Lapak mendapatkan sorotan tajam dari netizen karena membuat cuitan *(tweet)* yang seolah-olah menunjukkan bahwa ia menginginkan presiden baru, dan (3) tagar #JokowiMenangTotalDebat, yakni saat Joko Widodo dianggap dapat menunjukkan performa yang baik selama debat calon presiden. Alasan-alasan tersebut menjadikan Twitter sebagai bagian penting dalam merepresentasikan situasi politik nasional di akar rumput, termasuk dalam memotret fenomena pemilihan presiden 2019.

Sebelum kita membahas bagaimana narasi cebong dan kampret berdasarkan teori representasi sosial, kita akan lebih dahulu memahami bagaimana sejarah kemunculan narasi cebong dan kampret dalam konstelasi politik nasional di Indonesia. Selain itu, kita juga akan menelusuri dalam setting apa saja narasi cebong dan kampret digunakan dalam percakapan sehari-hari di media sosial.

Narasi Cebong dan Kampret

Penggunaan istilah cebong dan kampret menghangat saat pilpres 2019. Istilah cebong digunakan untuk menyebut pendukung Joko Widodo, sedangkan istilah kampret digunakan untuk menyebut pendukung Prabowo. Akan tetapi, apabila ditelusuri, istilah cebong telah muncul di awal Joko Widodo menjabat

sebagai presiden. Terminologi cebong diambil dari kata kecebong, yaitu larva binatang amfibi (seperti katak) yang hidup di air dan bernapas dengan insang serta berekor. Istilah cebong diduga terinspirasi dari hobi Joko Widodo memelihara kodok ketika masih menjabat sebagai walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Fakta ini menjadi viral saat Kaesang Pangarep, anak bungsu Joko Widodo, meledek foto ayahnya yang sedang mengunjungi Raja Ampat dengan menyinggungnya soal kecebong (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Cuitan Kaesang kepada Joko Widodo mengenai Kecebong (@kaesangp, 2015)

Sedangkan, kata kampret memiliki arti kelelawar kecil pemakan serangga dan sering digunakan sebagai kata umpatan dalam sehari-hari. Istilah kampret dalam konstelasi politik Indonesia diduga merupakan hasil plesetan dari singkatan koalisi partai politik yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajassa pada pilpres 2014, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi KMPret.

Istilah cebong dan kampret yang merepresentasikan dua kelompok yang berbeda secara umum digunakan satu kelompok untuk menderogasi kelompok lainnya. Namun dalam keseharian, kedua istilah ini ramai digunakan dalam berbagai macam setting di media sosial. Pertama, narasi cebong ataupun kampret muncul saat lawan politik mengkritik program petahana, Joko Widodo. Sebagai contoh, Gambar 2 menunjukkan cuitan pengguna Twitter dalam utas *(thread)*, sebutan untuk rangkaian cuitan, yang membalas unggahan Joko Widodo mengenai Tol Trans Jawa. Para pendukung Joko Widodo disebut dungu karena menganggap pembangunan infrastruktur sebagai prestasi padahal negara memiliki banyak hutang. Sedangkan, Gambar 3 menggambarkan pengguna Twitter yang mengejek pendukung Prabowo Subianto karena menganggap pemerintah hanya membangun tol.



Gambar 2. Penggunaan istilah "Cebong" dalam cuitan kritik terhadap program pemerintah (@gove83310003, 2018)



Gambar 3. Penggunaan istilah "Kampret" dalam cuitan mengenai program pemerintah (@BBKingOfKpop, 2019)

Kedua, label nama hewan ini juga digunakan untuk menunjukkan dan membanggakan identitas sebagai pendukung salah satu capres. Gambar 4 menggambarkan cuitan seorang pengguna Twitter yang merasa bangga menjadi cebong.



Gambar 4. Cuitan rasa bangga menjadi cebong (@Baroindra, 2019)

Ketiga, istilah nama hewan ini juga digunakan untuk menyebut lembaga pemerintah yang dianggap pro salah satu pasangan calon. Gambar 5 menunjukkan cuitan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan cebong atau pendukung Joko Widodo.



Gambar 5. Cuitan yang menyebut MK, KPU, dan Bawaslu sebagai cebong (@bintangku206, 2019)

Keempat, penggunaan istilah cebong dan kampret juga dipakai saat mengungkapkan rasa muak terhadap kondisi perpecahan akibat politik di Indonesia. Gambar 6 menunjukkan cuitan pengguna Twitter yang merasa lelah melihat perselisihan di antara kubu pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Gambar 7 menunjukkan rasa senang seorang pengguna Twitter karena media sosial beristirahat sejenak dari perseteruan dua kelompok pendukung pasangan calon presiden. Cuitan semacam ini banyak muncul dari individu yang mengaku non-partisan.



Gambar 6. Cuitan yang menyatakan kelelahan terhadap kondisi masyarakat (@cahyawahyuni, 2018)



Gambar 7. Cuitan mengenai Hari Kemenangan Timnas Indonesia (@wokosetiawn, 2019)

Kelima, narasi cebong dan kampret juga digunakan untuk menggambarkan perseteruan antara dua kelompok di luar konteks politik. Sebagai contoh, gambar 8 menunjukkan sebuah cuitan yang menggambarkan pendukung klub sepakbola Manchester United dan Liverpool seperti cebong dan kampret.



Gambar 8. Cuitan mengenai perseteruan Manchester United dan Liverpool (@himalayaaa__, 2018)

Keenam, julukan yang berkonotasi negatif ini bahkan muncul saat suatu musibah terjadi. Gambar 9 menunjukkan cuitan yang muncul dalam utas *(thread)* yang mengatakan bahwa bencana alam merupakan azab karena kecurangan yang dilakukan salah satu pasangan calon. Gambar 10 menggambarkan penggunaan kata cebong dalam mengkomentari foto bencana alam.



Gambar 9. Cuitan mengenai bencana alam yang melibatkan istilah "Cebong" (@ajientrepreneur, 2018)



Gambar 10. Cuitan mengenai pencitraan yang dilakukan oleh cebong (@anonLokal, 2018)

Dari beberapa contoh di atas, kita dapat melihat bahwa istilah cebong dan kampret digunakan dalam setting yang beragam, mulai dari diskursus yang spesifik tentang pembahasan terkait penyelenggaraan pilpres hingga meluas sampai ke isu sosial lainnya.

Narasi Cebong dan Kampret sebagai Representasi Sosial

Teori Representasi Sosial memotret berbagai tata nilai, metafor dan kepercayaan yang digunakan dalam percakapan maupun perilaku keseharian (Markova, 1990). Teori ini diperkenalkan oleh Serge Moscovici, seorang psikolog sosial dari Prancis pada tahun 1961. Melalui percakapan dan perilaku keseharian, masyarakat berupaya untuk memahami dunia yang abstrak dengan lebih konkret. Percakapan dan perilaku tersebut merupakan hasil produksi dari nalar, intuisi, dan pemaknaan dari tiap individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Melalui perilaku-perilaku ini, masyarakat menunjukkan bagaimana mereka berupaya memahami dunia di mana mereka tinggal. Representasi sosial merupakan kerangka teoretik yang relevan dalam menjelaskan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya berhenti di sana, kerangka teoretik ini merupakan salah satu pisau analisis yang memungkinkan para pengambil kebijakan memahami fenomena dan mengaitkannya dengan pengambilan kebijakan (Markova, 1998).

Berdasarkan berbagai paparan tentang bentangan dialektika cebong dan kampret pada bagian sebelumnya, kita dapat mengkategorikan representasi cebong dan kampret dalam tiga bagian besar. Pertama, representasi sosial yang menunjukkan bahwa narasi cebong dan kampret digunakan sebagai upaya untuk menderogasi lawan politik. Kedua, adanya internalisasi yang terjadi di kalangan pendukung yang menerima narasi ini dan mengembangkannya sebagai bagian dari identitas. Ketiga, munculnya kejengahan dari masyarakat digital non-partisan terhadap dialektika cebong dan kampret. Pada bagian selanjutnya, kita akan menelusuri ketiga representasi ini secara lebih mendalam.

Representasi Sosial 1: Derogasi citra pendukung calon presiden

Bagian pertama dari representasi sosial yang muncul dari dialektika cebong dan kampret adalah fungsi narasi cebong dan kampret yang digunakan untuk menderogasi pendukung dari lawan politik. Bagian derogasi ini merupakan representasi yang paling kentara dan kental mewarnai kehidupan politik keseharian di tingkat akar rumput daripada representasi-representasi lainnya. Derogasi artinya membuat pernyataan-pernyataan yang bersifat merendahkan, menghina, serta tujuan-tujuan dominasi lainnya. Biasanya, perilaku derogatif muncul bersamaan dengan perilaku favoritisme terhadap kelompok sendiri, yakni menganggap bahwa kelompok sendiri adalah kelompok yang benar, baik, mulia, dan terhormat (Vanhoomissen & Overwalle, 2010). Pada praktiknya, narasi derogasi yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 memiliki karakteristik khas yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya.

Karakteristik derogasi yang ditunjukkan oleh masyarakat partisan pada pemilihan presiden 2019 di Indonesia amat mengandung unsur dehumanisasi yang sangat kental. Ungkapan-ungkapan kasar seperti goblok, tidak memiliki otak, biadab, otak yang terletak di pantat, dan narasi-narasi dehumanisasi lainnya sangat mudah ditemui dalam *tweet-tweet* yang digunakan dalam keseharian di Twitter (lihat Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa polarisasi sosial tidak hanya sekedar membelah masyarakat politik menjadi dua kubu yang sama-sama militan, tetapi juga sampai pada tingkat dimana polarisasi sosial telah membuat narasi tentang lawan politik tidak lagi dilihat dalam kerangka dialektika perbedaan ideologis dalam menggagas Indonesia yang lebih baik. Dalam konteks ini, polarisasi sosial yang terjadi di Indonesia telah sampai pada titik dimana lawan politik adalah lawan yang tidak lagi memiliki martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga seolah dapat diberi label-label yang merendahkan dengan ungkapan dan karakteristik kebinatangan.

Tabel 1. Contoh Cuitan Derogatif

Cuitan
"Itulah ciri2 kampret, otaknya di pantat!" (IdamanDunia, 2018)
"Laknak kau cebong, kalian memfitnah uas, menjijikan kalian." (JafarFebrian, 2019)
"Skrg pun gempa di lombok dan tsunami di palu, kok cebong adem ayem gak merasa tersindir? Cebong mmg goblok!!" (ajientrepreneur, 2018)
"Bagi kampret, prabocor ibarat Tuhan bagi mereka. Segala kejelekan harus ditutup2i krn mereka hidup dalam ilusi otak udang! Percuma ngomong sama si otak kebalik bin otak udang." (CebongKafir, 2018)
"bertobatlah kau kampret idiot.kasihan Tuhan yg sudah menciptakanmu." (Yannes44618769, 2018)

Penggunaan isu dehumanisasi dalam konteks polarisasi sosial sebenarnya bukanlah isu pertama dalam percaturan politik dunia. Di Amerika Serikat, Donald Trump pernah disebut sebagai monster Frankenstein oleh pendukung lawan politiknya (Kteily & Bruneau, 2016). Dalam narasi ini, Donald Trump digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakteristik negatif non-manusia. Sikap politik dalam menggunakan dehumanisasi membuat polarisasi sosial di Amerika Serikat saat itu tidak lagi terisi dengan pandangan-pandangan ideologi yang jernih, melainkan penuh dengan nuansa kebencian semata. Para peneliti psikologi politik sepakat bahwa hal ini disebabkan karena kuatnya perilaku partisan dari para kandidat yang maju mencalonkan diri sebagai calon presiden Amerika Serikat saat itu.

Representasi Sosial 2: Penerimaan diri pendukung terhadap identitas cebong dan kampret

Sekalipun ungkapan derogasi merupakan narasi yang paling kental mewarnai dialektika sehari-hari, namun kita juga dapat menemukan bahwa pada titik tertentu, label yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan derogasi ini juga diterima oleh pendukung lawan politik. Fenomena ini relatif menarik dan *counter-intuitive* karena derogasi dan dehumanisasi seharusnya membuat para pendukung menunjukkan emosi-emosi negatif sebagai reaksi wajar. Akan tetapi, fenomena penerimaan julukan cebong dan kampret dari para pendukung ini menunjukkan bahwa polarisasi sosial yang amat kental juga dapat menempatkan narasi cebong dan kampret sebagai identitas yang mau tidak mau diterima oleh pendukung pasangan calon presiden satu sama lain. Para pendukung Joko

Widodo dan Ma'ruf Amin menunjukkan dalam beberapa kesempatan tentang bagaimana rasa bangga sebagai cebong terbentuk (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Contoh Cuitan Penerimaan Julukan Cebong di Kalangan Pendukung Joko Widodo

Cuitan
"Bangga menjadi CEBONG" (Baroindra, 2019)
"Ini yg bikin gw bangga di panggil CEBONG" (VespaHideung07, 2019)
"Lucu lucu meme #PutihkanGBK Kreatif dan bikin bahagia keren deh pendukung #01JokowiAmin, bangga jadi cebong Ga bisa ke #GBK support dari jauh aja, semoga acara nya sukses" (TitacantikTr, 2019)
"Bukti suami istri cebong sdh nyoblos di sarang cebongers smp putih TPS,salam 1 jari jempol" (Ken2steve, 2019)
"Terima kasih, Cebong! Kalian luar biasa!" (AdityaSani, 2019)

Penerimaan terhadap julukan cebong ini kami tengarai karena adanya internalisasi terhadap identitas sosial yang amat kuat. Para pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memiliki rasa bangga yang amat tinggi dengan profil tokoh politik ini sehingga pelabelan yang tadinya bersifat derogatif dirasionalisasi sedemikian rupa sehingga dapat diterima sebagai bagian dari identitas sosial. Selanjutnya, para pendukung fanatik Joko Widodo-Ma'ruf Amin berupaya menunjukkan strategi-strategi dalam percakapan sehari-hari yang bertujuan untuk membangun citra positif sebagai seorang cebong. Perilaku ini merupakan salah satu keunikan fanatisme yang tidak ditemukan dalam periode pemilihan presiden di era sebelumnya.

Pemberian julukan-julukan yang dehumanis sebenarnya dalam titik tertentu merupakan sebuah praktik perilaku budaya yang juga terjadi di Indonesia dalam kehidupan keseharian. Anak-anak yang terlibat permainan dengan rekan sebaya di Indonesia kerap memiliki julukan satu sama lain, yang tidak jarang juga merupakan bentuk keakraban. Dalam konteks relasi interpersonal, pemberian julukan merupakan salah satu media untuk membuat relasi persahabatan menjadi mengental *(giving a nickname as social lubricants in interpersonal relationship building)*. Namun demikian, kajian bagaimana sebuah julukan yang derogatif diterima dalam tingkat relasi antar-kelompok masih belum banyak menjadi perhatian para ilmuwan psikologi sosial.

Representasi Sosial 3: Antipati masyarakat digital non-partisan terhadap dialektika cebong dan kampret

Representasi sosial berikutnya adalah tentang kejenuhan-kejenuhan yang ditunjukkan oleh netizen yang tidak terlibat dalam polarisasi sosial. Selama ini, diskursus yang memotret tentang polarisasi sosial hanya terfokus pada pertarungan narasi antara cebong dan kampret. Padahal sebenarnya di luar kedua kubu ini, ada sebuah kelompok masyarakat lain yang non-partisan yang juga sangat terpengaruh dengan dialektika cebong dan kampret. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya cuitan di Twitter yang menggambarkan tentang bagaimana kejengahan masyarakat non-partisan dengan segala hiruk-pikuk persaingan antara kedua kubu (lihat Tabel 3). Masyarakat non-partisan ini kerap kali tidak banyak dimasukkan dalam pembahasan tentang polarisasi sosial. Padahal, sebenarnya dalam kosmologi politik nasional, wacana tentang politik bukan hanya hak milik masyarakat partisan yang mendukung kedua kubu politik secara eksplisit, tetapi juga merupakan hak milik masyarakat non-partisan yang selama ini diam dan mengamati.

Tabel 3. Contoh Cuitan Kejenuhan dari Non-Partisan

Cuitan
"Saya baru saja meng-unfollow dua akun. Satunya Kampret lainnya Cebong. Kedua akun ini sering saling serang. Buat malas baca saja. Saya tidak anti politik. Tak apa mendukung salah satu calon, tapi sebarkan saja kelebihannya. Jangan menyebar kekurangan lawan." (wilingga, 2018)
"Senang nya hatiku trending topik hari ini gak di isi isu cebong kampret INDONESIA JUARA #TimnasU22 #AFF2019U22 #TimnasDay" (wokosetiawn, 2019)
"Dulu kita semua sodara sebelum lahir kampret cebong." (dafihusna, 2019)
"Btw w udah capek maksimal liat orang2 debatin capres 1 capres 2, cebong-kampret, hoax sana hoax sini dari masing2 kubu. Dan tes baca alquran ini bikin gak habis pikir sih" (cahyawahyuni, 2018)
"Au ah, capek. Terserahlah kalian cebong sm kampret mo gimana, aku dr sini doain kalian aja cepet damai cepet baikan." (chubbycheekkss, 2019)

Baik masyarakat non-partisan yang menyatakan kejengahannya maupun memilih sepenuhnya diam, berhak mendapatkan suasana politik nasional yang lebih kondusif melalui upaya rekategorisasi yang juga melibatkan eksistensi mereka. Dalam dialektika polarisasi sosial, kerap kali masyarakat yang diam saja juga mendapatkan sorotan tajam dari kedua belah kubu karena

memilih diam di saat seharusnya bersuara. Masyarakat non-partisan ini bahkan tidak jarang juga pada akhirnya terlibat dalam perdebatan sengit di media sosial karena memilih untuk tidak memilih sebagai reaksi atas kelelahan psikologis yang dirasakan akibat kuatnya narasi cebong dan kampret. Sebagian masyarakat non-partisan yang memilih untuk diam memang tidak selalu menunjukkan rasa tidak suka terhadap polarisasi sosial itu sendiri, tetapi langsung melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kejengahan dengan situasi politik seperti deaktivasi akun media sosial, pembersihan akun-akun partisan, dan berbagai bentuk perilaku yang menggambarkan kejengahan tersebut.

Selain itu, kalangan ini juga berisi masyarakat yang sangat kritis dalam menilai pertarungan politik dari kedua kubu melalui lemparan-lemparan wacana yang menunjukkan mosi tidak percaya atau bentuk unggahan lain yang menjadi diskusi hangat di kalangan masyarakat. Dalam titik tertentu, munculnya wacana-wacana kritis yang melihat pertarungan kedua kubu politik secara jernih merupakan bagian yang sangat baik dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, bagian ini menjadi batu ganjalan ketika narasi yang diunggah selalu bernuansa ketidakpercayaan terhadap semua mekanisme hukum dan politik yang sedang terjadi di Indonesia. Lemparan tentang mosi tidak percaya terhadap semua mekanisme hukum dan politik yang diajukan oleh pemilik akun media sosial yang tergolong *influencer*, dapat membuat masa depan demokrasi menjadi terancam oleh karena menguatnya mosi tidak percaya di kalangan masyarakat di akar rumput.

Re-humanisasi dan Upaya Integrasi Sosial

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat dua hal penting yang layak mendapatkan perhatian dari masyarakat pembaca, baik masyarakat politik, para pengambil kebijakan, serta pihak-pihak lain yang terkait. Pertama, polarisasi sosial yang terjadi di Indonesia tidak banyak berbicara tentang polarisasi ideologi politik, tetapi lebih banyak berbicara tentang polarisasi afeksi. Dengan kata lain, dukungan dan fanatisme yang terjadi selama ini lebih didasarkan pada politik identitas ketimbang perbedaan politik yang fundamental. Maka dari itu, upaya untuk mengupayakan rekategorisasi sebaiknya tidak hanya menyangkut isu tentang bagaimana menyatukan pandangan-pandangan ideologi politik yang berbeda yang dimiliki oleh pendukung kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tetapi juga bagaimana polarisasi afeksi dapat direduksi dengan baik. Upaya integrasi sosial dan rekategorisasi sosial sebenarnya tidak cukup hanya dilaksanakan pada tingkat kepentingan politik praktis di tingkat elite, tetapi juga polarisasi afektif dari para pendukung partisan yang satu

kepada pendukung partisan kelompok politik lainnya.

Kami percaya bahwa saat ini kita membutuhkan upaya untuk memunculkan narasi baru yang menekankan pentingnya re-humanisasi pada kedua kelompok pendukung tokoh politik nasional. Masyarakat politik yang partisan perlu mulai diingatkan kembali pada fitrah kita sebagai masyarakat dari sebuah bangsa besar yang sedang menghidupi nilai-nilai demokrasi. Narasi yang kental dengan nuansa re-humanisasi diharapkan dapat membangkitkan ingatan kolektif kita sebagai sebuah bangsa yang telah mengupayakan kemerdekaan dengan peluh dan darah. Narasi-narasi tentang persatuan, bagaimana kemerdekaan bangsa ini direbut, dan bagaimana bangsa ini berevolusi menjadi negara yang semakin kuat dari zaman ke zaman, perlu mulai lebih banyak diekspos untuk menumbuhkan kembali rasa kebangsaan. Pihak-pihak terkait perlu merancang dengan sengaja aktivitas-aktivitas bersama yang memungkinkan kedua kelompok partisan dapat bertemu dalam sebuah momen yang bertujuan untuk mengingat identitas sosial yang lebih besar, yakni sebagai Indonesia.

Kedua, polarisasi sosial yang sedang kita bahas ternyata tidak hanya terbatas pada polarisasi yang terjadi di kalangan pendukung fanatik kedua kubu, melainkan juga antara kelompok partisan dengan masyarakat yang memilih berjarak dan menampilkan perilaku-perilaku muak dengan politik praktis. Selama ini, pembahasan tentang polarisasi sosial lebih banyak terfokus pada polarisasi sosial di antara pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Masih sedikit sekali upaya-upaya rekonsiliasi untuk menciptakan sebuah iklim politik nasional yang juga dapat kembali dinikmati oleh masyarakat politik yang selama ini terganggu dengan tensi masyarakat politik yang partisan. Maka, kami juga mengusulkan adanya mekanisme untuk mulai mereduksi polarisasi sosial dan mengupayakan kembali integrasi sosial yang menyentuh isu bagaimana cara mengatasi apatisme politik yang ditunjukkan oleh masyarakat non-partisan terhadap sikap politik partisan yang sangat kental dan kentara.

Pada titik tertentu, kita harus mengakui bahwa sebagian kelompok masyarakat yang dengan sadar memilih menjadi golongan putih dan menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintah merupakan kelompok masyarakat yang sangat terpelajar. Pemikiran-pemikiran mereka dibutuhkan sebagai penyeimbang narasi utama yang kerap bias dan berisi kepentingan. Meskipun demikian, kita juga perlu memastikan supaya relasi antar narasi ini berada dalam *framework* yang sama, yakni untuk kepentingan bangsa. Integrasi sosial yang ideal memungkinkan pemerintah dan kelompok oposisi untuk memerankan peran masing-masing dengan baik. Dialektika narasi yang sehat dari pemerintah dan oposisi niscaya akan menghasilkan sebuah tatanan nasional yang lebih baik untuk kemajuan Indonesia kita tercinta.

Penutup

Integrasi sosial bukanlah sebuah hadiah, melainkan sebuah upaya yang perlu diperjuangkan dan dipelihara secara terus menerus oleh semua pihak. Integrasi sosial bukanlah tanggung jawab pemerintah terpilih semata, tetapi juga tanggung jawab oposisi dan segenap masyarakat tanpa memandang pilihan politiknya. Tulisan ini telah berupaya memotret bahwa untuk mengupayakan integrasi sosial, kita perlu memahami struktur dan fitur polarisasi sosial itu sendiri. Melalui produksi dan reproduksi narasi cebong dan kampret di media sosial, kita telah memahami bahwa polarisasi sosial bersifat multidimensional, sehingga isu integrasi sosial pun juga perlu didekati dengan memperhatikan struktur dan fitur polarisasi sosial tersebut. Kini pemilihan umum 2019 telah selesai. Waktunya kita bersatu kembali sebagai sebuah bangsa dan dengan rendah hati menempatkan dukungan dan kritik kita dalam sebuah kerangka membangun negara yang semakin maju dan kompetitif dalam percaturan global. Lebih dari itu, sebuah negara yang mengayomi semua kelompok dan keanekaragaman kultural yang dimiliki oleh Indonesia.

Daftar Acuan

ajientrepreneur. (2018). Skrg pun gempa di lombok dan tsunami di palu, kok cebong adem ayem gak merasa tersindir? Cebong mmg goblok!!. [Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/ajientrepreneur/status/1053666284225712134

anonLokal. (2018). Foto Jokowi tetap rapih walau sudah diterpa gempa dan tertimpa reruntuhan, anak kecilpun dieksploitasi demi sebuah pencitraan dilokasi bencana:)) CEBONG BIADAB!!! #2019GantiPresiden #2019PrabowoSandi. [Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/anonLokal/status/1029559947279790082

BBKingOfKpop. (2019). Hasilnya cuman tol?? Jadi lu selama ini jadi kampret beneran mendekam di goa bertahun-tahun? KIP, KKS, KIS, program mekar, dana desa, bendungan, bandara, pelabuhan, MRT/lrt, ambil alih Freeport, Chevron, 8 blok migas dll. Masih banyak lagi. [Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/BBKingOfKpop/status/1116638348586541057

Bafumi, J., & Shapiro, R. Y. (2009). A new partisan voter. *The Journal of Politics*, *71*(1), 1–24.

bintangku206. (2019). bawa ke MK sama aja dengan menyerah kalah? Bukan MK nya yg tidak bagus, tapi OKnum2 MK itu cebong semua, mereka sekolam dgn @KPU_ID @bawaslu_RI tolong dengar juga suara rakyat jgn bawa ke MK!. [Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/bintangku206/status/1131420408597508096

Bittner, A. (2011). The impact of the partisan stereotype. In *Platform or Personality?* (pp. 73–90). Oxford University Press.

Bittner, A. (2014). Leader evaluations and partisan stereotypes: A comparative analysis. In *Personality Politics?* (pp. 17–37). Oxford University Press.

Bramson, A., Grim, P., Singer, D. J., Fisher, S., Berger, W., Sack, G., & Flocken, C. (2016). Disambiguation of social polarization concepts and measures. *The Journal of Mathematical Sociology*, *40*(2), 80–111.

Brinkmann, S. (2012). *Qualitative inquiry in everyday life: Working with everyday life materials*. SAGE Publications Ltd.

Budiharto, W., & Meiliana, M. (2018). Prediction and analysis of Indonesia Presidential election from Twitter using sentiment analysis. *Journal of Big Data*, *5*(1).

cahyawahyuni. (2018). Btw w udah capek maksimal liat orang2 debatin capres 1 capres 2, cebong-kampret, hoax sana hoax sini dari masing2 kubu. Dan tes baca alquran ini bikin gak habis pikir sih. [Tweet]. Retrieved from

https://twitter.com/cahyawahyuni/status/1079520145956003842

Chen, M. K., & Rohla, R. (2018). The effect of partisanship and political advertising on close family ties. *Science*, *360*(6392), 1020–1024.

DeVault, M. L., & Hammersley, M. (2001). Taking sides in social research: Essays on partisanship and bias. *Contemporary Sociology*, *30*(5), 539.

Dovidio, J. F., Love, A., Schellhaas, F. M. H., & Hewstone, M. (2017). Reducing intergroup bias through intergroup contact: Twenty years of progress and future directions. *Group Processes & Intergroup Relations*, *20*(5), 606–620.

Dubois, E., & Blank, G. (2018). The echo chamber is overstated: the moderating effect of political interest and diverse media. *Information Communication & Society*, *21*(5), 729–745.

Ehret, P. J., Boven, L. V., & Sherman, D. K. (2018). Partisan barriers to bipartisanship. *Social Psychological and Personality Science*, *9*(3), 308–318.

Ellefsen, R. (2017). Taking sides? Issues of bias and partisanship when researching socio-political conflict. *Critical Criminology*, *25*(2), 231–244.

Emiliani, F., & Passini, S. (2016). Everyday life in social psychology. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, *47*(1), 83–97.

Erlingsson, C., & Brysiewicz, P. (2013). Orientation among multiple truths: An introduction to qualitative research. *African Journal of Emergency Medicine*, *3*(2), 92–99.

Ezrow, L. (2010). Mean voter representation versus partisan constituency representation: do parties respond to the mean voter position or to their supporters?. In *Linking Citizens and Parties* (pp. 94–117). Oxford University Press.

Flache, A., & Macy, M. W. (2011). Small worlds and cultural polarization. *The Journal of Mathematical Sociology*, *35*(1-3), 146–176.

Freeden, M. (2006). Ideology and political theory. *Journal of Political Ideologies*, *11*(1), 3–22.

gove83310003. (2018). sekarang saya rasa proyek tol sedang mangkrak... banyak rumah warga.. pasilitas umum yang belum dibayar penggusuran jalan tol.. cebong dungu..melihat infrastruktur adalah satu prestasi..tidak mengapa walau hutang seleher.dan negri ini dijual. [Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/gove83310003/status/1079525713273745408Großer, J., & Palfrey, T. R. (2013). Candidate entry and political polarization: An antimedian voter theorem. *American Journal of Political Science*, *58*(1), 127–143.

Han, H. (2011). The disappearing center: Engaged citizens polarization, and

american democracy. *Public Opinion Quarterly*, *75*(4), 812–813.

Harrison, B. F. (2015). Bully partisan or partisan bully?: Partisanship elite polarization, and U.S. presidential communication. *Social Science Quarterly*, *97*(2), 418–438.

Hatherell, M. (2019). *Political representation in Indonesia*. London: Routledge.

himalayaaa__. (2018). Dari dulu wkwk skrg tambah emosi lg, mereka peringkat 1 😂 lo kalo punya temen fans MU tp ga benci Liverpool, berarti doi fans asal. MU & Liverpool kek cebong sama kampret sher haha. [Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/himalayaaa__/status/1079428074301579265

Hodgetts, D., Drew, N., Sonn, C., Stolte, O., Nikora, L. W., & Curtis, C. (2010). Indigenous psychologies and the social psychology of everyday life. In *Social Psychology and Everyday Life* (pp. 113–147). Macmillan Education UK.

Ihsanuddin. (2014). Survei Populi: Publik suka Jokowi karena merakyat, Prabowo tegas. Retrieved-from: https://nasional.kompas.com/read/2014/06/04/1458479/Survei.Populi.Publik.Suka.Jokowi.karena.Merakyat.Prabowo.Tegas

Jenkins, R. (2007). The meaning of policy/policy as meaning. In *Policy reconsidered: Meanings politics and practices* (pp. 21–35). Policy Press.

Kteily, N., & Bruneau, E. (2016). Backlash. *Personality and Social Psychology Bulletin*, *43*(1), 87–104.

Lee, F. E. (2010). The Disappearing Center: Engaged Citizens Polarization, and American Democracy. By Alan I. Abramowitz. New Haven: Yale University Press.

Lukman, E. (2014). *Indonesia kirimkan 95 juta tweet seputar pemilu tahun ini!.* Retrieved from https://id.techinasia.com/indonesia-kirimkan-95-juta-tweet-seputar-pemilu-tahun-ini

Lumsden, K. (2014). 'You are what you research': Bias and partisanship in an ethnography of boy racers. In *Reflexivity in Criminological Research* (pp. 275–286). Palgrave Macmillan UK.

Lumsden, K., & Winter (2010). A. Power partisanship and bias. In *Reflexivity in Criminological Research*. Palgrave: Macmillan.

Luttig, M. D. (2018). The prejudiced personality and the origins of partisan strength affective polarization, and partisan sorting. *Political Psychology*, *39*, 239–256.

Markova, I. (1990). Dialogical perspectives of democracy as social representation. In *Language Meaning Social Construction* (pp. 125–139). Brill.

Markova, S. M. I. (1998). Presenting Social Representations: A Conversation, *Culture & Psychology*, *4*. 12-45.

Mason, L. (2014). I disrespectfully agree: The differential effects of partisan sorting on social and issue polarization. *American Journal of Political Science*, *59*(1), 128–145.

McCarty, N. (2015). *Polarization and American political development*. (R. Valelly, S. Mettler, & R. Lieberman, Eds.). Oxford University Press.

Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: religious intolerance militant groups and the politics of accommodation. *Asian Studies Review*, *42*(3), 479–497.

Moscovici, S., & Marková, I. (1998). Presenting social representations: A conversation. *Culture & Psychology*, *4*(3), 371–410.

Noviandari, L. (2014). *Facebook temukan 200 juta perbincangan seputar pemilu presiden 2014 di Indonesia.* Retrieved from https://id.techinasia.com/facebook-temukan-200-juta-perbincangan-seputarpemilu-2014-indonesia

Pangarep, K. (2015). Pak, bukan bermaksud untuk tidak sopan tapi kalo cari kecebong bukan disitu tempatnya [Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/kaesangp/status/682792886216167424

Rossini, P., Hemsley, J., Tanupabrungsun, S., Zhang, F., & Stromer-Galley, J. (2018). Social media opinion polls, and the use of persuasive messages during the 2016 US election primaries. *Social Media + Society*, *4*(3), 205630511878477.

Schoen, H., & Schumann, S. (2007). Personality traits partisan attitudes, and voting behavior: Evidence from germany. *Political Psychology*, *28*(4), 471–498

Schlozman, K. L., Verba, S., & Brady, H. E. (2012). Political activism and electoral democracy: Perspectives on economic inequality and political polarization. In *The Unheavenly Chorus*. Princeton:University Press.

Simmel, G. (1976). *Philosophy of money.* London: Rouledge.

Singer, M. (2018). *The meaning origin, and consequences of populist politics*. Oxford: University Press.

Vanhoomissen, T., & Overwalle, F. V. (2010). Me or not me as source of ingroup favoritism and outgroup derogation: A connectionist perspective. *Social Cognition*, *28*(1), 84–109.

wokosetiawn. (2019). Senang nya hatiku trending topik hari ini gak di isi isu cebong kampret 😄 INDONESIA JUARA #TimnasU22 #AFF2019U22 #TimnasDay. [Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/wokosetiawn/status/1100433544076115968

Zuckerman, A. S., Dasovic, J., & Fitzgerald, J. (2007). Conclusion: Family ties bounded partisanship, and party politics in established democracies. In *Partisan Families* (pp. 142–160). Cambridge University Press.

Yulianto, Jony Eko & Thenarianto, Jessie Janny. "Cebong and Kampret": political symbolism in the 2019 presidential election in Indonesia. One unique feature in the 2019 Indonesian presidential election is the use of Cebong and Kampret narratives to address Joko Widodo and Prabowo Subianto's militant supporters respectively. We are interested in this particular issue since the narratives stands at the crossroad between the global phenomenon and the local phenomenon of political discourse in Indonesia. This framework is important to use as the literature on societal-level politics have often neglected interpersonal features. Conversely, studies on everyday life political discourse pay only little attention to societal-level politics. This article exposes the use of Cebong-Kampret narratives as political symbolism in the 2019 presidential election in Indonesia. Using Social Representation Theory as the theoretical lens, we aimed to understand how societal-level politics is produced and reproduced in everyday digital interactions between individuals on social media. By analyzing a considerable number of tweets on Twitter, this article portrays the structure dan the feature of social polarization as a multidimensional phenomenon in nature. For instance, we found that the term of social polarization does not only refer to the relationship between two partisan groups but also to the relationship between partisan groups and non-partisan people. We emphasize that what we currently face is not an ideological social polarization but rather an affective social polarization. Based on our analysis in this article, we propose some ideas on how to build social integration in this socially polarized society.

American Football dan *MRI Scanner:* Belajar tentang Fanatisme Politik

Harijanto Tjahjono

We do not see first, then define.
We define first, then see.
(Walter Lipmann)

Jika Anda adalah penggemar kuliner (sepertinya kita semua ya?), coba sekali-kali diskusikan pilihan makanan favorit antara Anda dengan teman. Misalkan Anda berlokasi di Surabaya dan meyakini soto ayam Pak Sadi memiliki rasa terbaik, cobalah diskusikan pilihan itu dengan teman yang meyakini bahwa soto ayam Cak Har adalah yang terenak. Dugaan saya, diskusi Anda dengan teman akan berlangsung dalam suasana menyenangkan. Dia akan mendengarkan penjelasan Anda dengan baik dan tenang; suasana diskusi mungkin penuh dengan canda dan gurau. Di akhir diskusi, Anda bahkan mungkin pergi bersama untuk makan Soto Ayam (entah yang mana).

Sekarang cobalah melakukan proses diskusi yang sama dengan teman tetapi berkaitan dengan pilihan politik, khususnya dengan mereka yang memiliki pilihan politik—terutama presiden—berbeda. Saya hampir yakin bahwa proses diskusi tidak akan berlangsung baik dan menyenangkan. Jika beruntung, maka teman Anda hanya akan diam saja tanpa banyak menanggapi, meskipun bisa jadi ia tetap tidak menyetujui apa yang Anda jelaskan. Jika Anda sedang sial, maka akan terjadi debat berkepanjangan yang emosional dan panas. Selanjutnya, hubungan pertemanan pun mungkin terancam rusak.

Mengapa demikian? Mengapa diskusi tentang suatu topik seperti pilihan makanan yang berbeda bisa berlangsung dengan damai dan menyenangkan? Mengapa diskusi tentang pilihan politik cenderung berlangsung dengan emosional dan tegang? Apa yang bisa dijelaskan oleh Psikologi? Mari kita belajar dari dua hal, yaitu *american football* dan MRI.

Pertandingan *American football* dan *selective perception*

Ingatan saya melayang ke sebuah pertandingan *american football*. Tepatnya pertandingan pada tahun 1954 antara Universitas Dartmouth dan Universitas Princeton. Pertandingan tersebut memang sudah cukup lama, tapi apa yang terjadi saat itu masih sangat relevan jika dianalogikan dengan

pemilu kita karena berkaitan dengan persepsi pada pihak-pihak yang menonton pertandingan.

Pertandingan tersebut berlangsung keras dan penuh pelanggaran. Seminggu setelah pertandingan usai, para mahasiswa yang menjadi penonton dari Universitas Dartmouth maupun Universitas Princeton diminta menjawab beberapa pertanyaan oleh dua orang peneliti, yaitu Albert Hastorf dan Hadley Cantrill (1954). Beberapa pertanyaan tentang pertandingan tersebut, antara lain:

- Apakah terjadi pelanggaran/kecurangan dalam pertandingan tersebut?
- Pihak mana yang lebih banyak melakukan pelanggaran/kecurangan dan kekerasan?
- Apakah pertandingan tersebut berlangsung adil ataukah penuh kecurangan?

Saya harap Anda bisa melihat paralelnya dengan proses pemilu kita karena pada dasarnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan yang ditanyakan orang mengenai pemilu. Tinggal ganti saja kata "pertandingan" dengan "pemilu".

Hastorf dan Cantrill (1954) menemukan bahwa sekalipun yang dilihat adalah satu pertandingan yang sama, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas sangatlah berbeda, tergantung dari universitas asal mahasiswa tersebut. Mahasiswa dari Universitas Dartmouth melihat bahwa kecurangan banyak dilakukan oleh tim dari Universitas Princeton, sebaliknya mahasiswa Universitas Princeton melihat bahwa kecurangan banyak dilakukan oleh tim dari Universitas Dartmouth. Seolah-olah mereka melihat dua pertandingan yang berbeda, bukan pertandingan yang sama.

Hastorf dan Cantrill (1954) menyimpulkan bahwa keanggotaan kita dalam grup tertentu akan sangat mempengaruhi penilaian kita akan munculnya kecurangan. Jadi jika Anda adalah mahasiswa Universitas Dartmouth Anda akan cenderung melihat Universitas Dartmouth dicurangi. Sebaliknya, jika Anda adalah mahasiswa Universitas Princeton Anda juga cenderung melihat pihak Universitas Princeton dicurangi. Mengapa? Suatu objek yang sama, misalnya *tackle* yang dilakukan pemain *football*, bisa dipersepsi atau dinilai sangat berbeda, tergantung dari pihak mana yang melakukan dan siapa yang di-*tackle*. Jika yang melakukan adalah pihak lawan, Anda cenderung melihatnya sebagai *tackle* yang kotor. Sebaliknya jika pihak Anda yang melakukan, Anda cenderung mempersepsi *tackle* yang sama sebagai *tackle* yang *fair*. Keputusan wasit yang membenarkan pihak lawan cenderung terlihat memihak dibanding bila ia membenarkan tim kita. Kecurangan pihak lawan terlihat banyak, sebaliknya kecurangan pihak sendiri terlihat sedikit.

Inilah yang disebut dengan *selective perception*. Kelihatannya Anda mempersepsi dengan jelas, tapi proses persepsi Anda sebenarnya selektif. Otak Anda memproses hanya hal-hal yang mendukung posisi Anda dan membuang fakta-fakta yang mendukung pihak lawan Anda. Yang membuat proses *selective perception* ini semakin berbahaya adalah bahwa ia berlangsung tanpa disadari. Para mahasiswa tersebut, misalnya, merasa bahwa mereka sedang bersikap objektif, padahal kenyataannya tidak.

Selective perception ini sebetulnya berlaku pada apapun, akan tetapi objek yang jelas terjadi pada tahun politik ini adalah pada pilihan politik. Semua orang merasa yakin bahwa mereka bersikap objektif sewaktu mempersepsi hal-hal yang terjadi dalam pemilu tahun ini. Dengan demikian, bahasan kita mengenai *selective perception* menunjukkan bahwa semua orang (termasuk Anda dan saya) rentan terhadap bias dan *selective perception*. Jangankan pilihan politik, pilihan sepakbola saja sudah bisa mempengaruhi kita sedemikian rupa.

Eksperimen otak dan kuatnya pilihan politik

Selain itu, ingatan saya melayang pada sebuah eksperimen gelombang otak yang dilakukan oleh Jonas Kaplan, Sarah Gimbel, dan Sam Harris (2016) dari *Department of Psychology*, UCLA. Dalam percobaan tersebut Kaplan dkk memasangkan *MRI scanner* pada otak 40 partisipan yang sangat kuat memiliki preferensi politik liberal. Empat puluh orang partisipan ini diberikan serangkaian pernyataan. Yang pertama, mereka ditunjukkan sebuah pernyataan yang sesuai dengan selera pilihan politik mereka, misalnya "*The US should reduce its military budget*" (negara Amerika seharusnya mengurangi anggaran militer mereka). Isu terkait pengurangan anggaran militer ini biasanya sangat disetujui pada semua orang yang berhaluan liberal di Amerika. Selanjutnya pada eksperimen tersebut, partisipan ditunjukkan pernyataan kedua yang dianggap melemahkan argumen pada pernyataan pertama, misalnya "*Russia has nearly twice as many active nuclear weapons as the United States*" (negara Rusia memiliki senjata nuklir dua kali lipat yang dimiliki Amerika). Melalui mesin MRI dilihat bagian-bagian otak mana yang aktif ketika pernyataan-pernyataan politik itu diberikan.

Sebagai perbandingan, para partisipan juga ditunjukkan beberapa pernyataan yang netral atau tidak berkaitan dengan politik, misalnya "*Taking a daily multivitamin improves one's health*" (Minum multivitamin setiap hari meningkatkan kesehatan kita). Seperti halnya pernyataan-pernyataan politik, para partisipan kemudian ditunjukkan pernyataan kedua yang menantang pernyataan pertama. Sebagaimana pada eksperimen sebelumnya, melalui MRI dipantau juga bagian-bagian otak mana yang aktif ketika pernyataan tersebut

diberikan. Selanjutnya, hasil rekaman MRI otak sewaktu pernyataan-pernyataan politik tersebut ditantang akan dibandingkan dengan rekaman MRI sewaktu pernyataan-pernyataan nonpolitik ditantang.

Perbandingan hasil MRI otak antara pernyataan-pernyataan politik dan nonpolitik menunjukkan perbedaan signifikan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sebagaimana dipaparkan di latar belakang. Terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil dari hasil tersebut. Yang pertama, kepercayaan seseorang terhadap pernyataan-pernyataan politik lebih susah diubah atau resistan dibanding pernyataan-pernyataan nonpolitik. Sekalipun tingkat kepercayaan (*belief strength*) pada pernyataan-pernyataan politik maupun nonpolitik sama-sama menurun setelah eksperimen, namun tingkat perubahan pada kepercayaan (*belief*) politik jauh lebih kecil dibanding pada kepercayaan nonpolitik. Survei lanjutan yang dilakukan seminggu setelah eksperimen menunjukkan hasil yang sama di mana kepercayaan nonpolitik lebih mudah diubah daripada kepercayaan politik. Yang kedua, kepercayaan-kepercayaan politik sifatnya lebih preskriptif dan lebih susah dipatahkan bahkan dengan bukti-bukti empiris.

Hasil yang lebih menarik terkait penelitian tersebut adalah bahwa ketika kepercayaan-kepercayaan politik ditantang maka bagian otak yang teraktifkan adalah bagian-bagian yang berhubungan dengan identitas diri dan emosi. Apa artinya? Hal ini mengindikasikan bahwa kita mempersepsi serangan/tantangan terhadap keyakinan politik yang kita percaya sebagai serangan terhadap identitas dan diri kita. Pada orang-orang yang memiliki tingkat kepercayaan politik yang sangat kuat dan mendalam (fanatik pada satu spektrum politik tertentu) maka kepercayaan politik telah menjadi bagian dari identitas mereka. Menyerang atau menantang kepercayaan politik adalah sama dengan menyerang identitas diri seseorang.

Kesimpulan

Dari kedua penelitian di atas dan juga mempertimbangkan relasinya dengan pertikaian politik yang terjadi akhir-akhir ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kita perlu merefleksikan seberapa kuat dukungan kita pada salah satu capres dan bagaimana kita memposisikan dukungan politik kita saat ini. Semakin kuat dukungan politik berarti semakin besar potensi bias dan *selective perception* pada diri kita masing-masing. Semua orang pada dasarnya rentan terhadap bias dan *selective perception*. Jika kita BUKAN pendukung capres yang kita yakini saat ini, apakah kira-kira kita akan tetap mempersepsi hal yang sama? Perlu kita ketahui bahwa otak kita cenderung hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang mendukung posisi kita

dan membantah fakta-fakta yang menentang posisi kita. Oleh karenanya, kita perlu memperluas perspektif dengan cara mencari dan membaca fakta-fakta yang bertentangan dengan posisi politik kita untuk kemudian mempertimbangkan perspektif tersebut secara objektif.

Yang kedua, kita perlu mempertanyakan motivasi kita dalam mendukung kandidat atau partai tertentu dan pengaruhnya terhadap realitas keseharian. Apakah motivasi kita sebagai pendukung telah mempengaruhi penilaian atas realitas secara keseluruhan, termasuk dalam melihat mereka dari kubu yang berbeda? Seberapa kuat dukungan kita pada capres/partai telah mempengaruhi penilaian kita akan situasi perpolitikan yang ada?

Yang ketiga, kita seharusnya menyadari ketika berdiskusi mengenai masalah politik maka otak kita secara otomatis akan mempersepsi setiap fakta yang bertentangan dengan posisi kita sebagai serangan terhadap identitas. Kita semestinya secara sadar dan sengaja mengambil jarak dengan pilihan politik kita, lalu mencoba mengarahkan pikiran kita untuk meninjau setiap fakta dengan seobjektif mungkin, tanpa melibatkan emosi.

Menimbang semua hal di atas, kita perlu berhati-hati dengan hoaks, informasi yang keliru, dan informasi yang tidak lengkap terkait kubu politik yang berseberangan. Otak kita seringkali sudah terkondisikan untuk lebih mudah percaya pada berita-berita yang negatif tentang capres/partai yang berseberangan dengan kita. Jadi kita perlu menekankan untuk secara sengaja selalu mengecek lagi dan lagi semua berita negatif tentang capres/partai yang berseberangan dengan posisi kita.

Tentunya tidak berarti bahwa jika kita sudah merefleksikan semua hal di atas maka semua masalah politik bangsa ini akan terpecahkan. Namun demikian, diharapkan dengan merefleksikan pertanyaan-pertanyaan dapat mengurangi bias yang kita punyai dalam menilai masalah-masalah terkait polarisasi politik. Akhirnya, kita bisa kembali makan soto ayam bersama-sama dengan orang yang memiliki pilihan politik berbeda dengan kita.

Daftar Acuan

Hastorf, A. H., & Cantril, H. (1954). They saw a game; a case study. *The Journal of Abnormal and Social Psychology, 49*(1), 129-134. Retrieved from https://www.romolocapuano.com/wp-content/uploads/2013/06/TheySawAGame.pdf

Kaplan, J.T., Gimbel, S.I., & Harris, S. (2016). Neural correlates of maintaining one's political beliefs in the face of counterevidence. *Scientific Reports*. 6, 39589; doi: 10.1038/srep39589

Tjahjono, Harijanto. *American football and the MRI scanner: learning political fanatism.* *In this year of national election, it is common to find friendships and even family ties severed because of heated political debates. This article attempts to review two psychological studies conducted by Hastorf and Cantrill and Kaplan et al (1954) to explain this experience. The first study by Hastorf and Cantrill suggests that selective perception and group identification play a very important role in our judgment of political debates. The second study, an experiment by Kaplan et al. shows that political beliefs are resistant to change and inter-connected to our sense of self and identity.*

Korupsi dan Disintegrasi Bangsa

Imadduddin & Yulia Hairina

Pengantar

Rasanya tidak ada topik yang selalu hangat dibicarakan sejak orde reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang di Indonesia selain topik tentang korupsi. Apabila kita lihat di media massa sekarang ini, nyaris setiap hari selalu dihiasi dengan berita-berita tentang korupsi. Semua pemirsa televisi, radio, pembaca koran, majalah dan media *online* selalu menunggu-nunggu berita tentang penangkapan atau pemeriksaan terhadap pejabat, politisi, petinggi polisi, maupun pengusaha yang dijadikan sebagai terperiksa atau tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut, didukung oleh hasil survei penilaian integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa dari 36 instansi pemerintah yang disurvei ternyata 20,11% respoenden internal pernah mendengar praktik nepotisme dalam rekruitmen pegawai, sebanyak 82% instansi yang disurvei ada suap atau gratifikasi dalam kebijakan karirnya dan sebanyak 88% instansi peserta survei masih meminta uang ke masyarakat dalam pemberian layanan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018).

Menurut survei partisipasi publik yang juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dua besar pelaku korupsi di masyarakat adalah kepala daerah dengan prosentase lebih dari 97% dan anggota DPR/DPRD dengan prosentase lebih dari 77%. Persepsi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut sejalan dengan hasil penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama tahun 2018 saja total tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebanyak 121 orang dengan komposisi Kepala Daerah sebanyak 21 orang, swasta sebanyak 46 orang, DPR 2 orang, DPRD sebanyak 5 orang, Hakim sebanyak 4 orang, Eselon I sebanyak 16 orang, Eselon 2 sebanyak 2 orang, Eselon 3 sebanyak 1orang, Advokat sebanyak 3 orang, dan lainnya sebanyak 11 orang. Khusus untuk pengembangan operasi tangkap tangan, sebanyak 107 ditetapkan sebagai tersangka dan 90 di antaranya berprofesi sebagai anggota DPRD dari provinsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018).

Penilaian pemberantasan korupsi secara internasional yang di keluarkan oleh *Transpararency International*, Indonesia mendapatkan nilai Indeks Persepsi

Korupsi di angka skor 38. Angka skor ini naik satu poin dari tahun 2017, yaitu menduduki skor 37 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018). Pencapaian skor 37 untuk tahun 2018 ini jauh lebih baik daripada pencapaian sekiar tahun 2010 yang hanya berada pada posisi skor 2,4 dan menempati posisi 130 dari 163 dari negara yang disurvei (Hakim, 2012).

Korupsi yang dilakukan secara berjamaah ini tentunya dapat membahayakan keutuhan negara dan bangsa. Meskipun tidak ada hubungan secara langsung antara korupsi dan disintegrasi bangsa. Namun, korupsi yang terus-menerus dilakukan baik di tingkat nasional maupun daerah pada akhirnya dapat menjadi pemicu munculnya bibit-bibit disintegrasi bangsa karena adanya ketidakpuasan dan ketidakadilan.

Atas dasar tersebut, penulis melakukan kajian korupsi dan disintegrasi dari perspektif psikologi. Sepengetahuan penulis, kajian tentang korupsi dan disintegrasi lebih banyak ditulis dalam perspektif hukum, ekonomi, sosiologi dan antropologi. Sedangkan dalam perspektif psikologi masih jarang ditemukan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan ini. Ada 4 aspek yang akan didalami oleh penulis, yaitu aspek korupsi, aspek disintegrasi, aspek keterkaitan antara korupsi dan disintegrasi bangsa dan aspek kejujuran.

Anatomi Korupsi

Definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* atau *corrumpere* yang berarti menyalahgunakan, menyimpang, mengahancurkan atau mematahkan (Abidin & Siswandi, 2015, hlm. 11). Terkesan sangat mudah untuk mendefinisikan korupsi dari asal katanya, namun apabila kita coba mendefinisikan secara substansi, maka ditemukan sejumlah keragaman definisi dari berbagai ahli, tergantung sudut pandang si ahli dalam melihat masalah korupsi.

Robert Klitgaard mendefinisikan *"corruption is the abuse of public power for private benefit"*, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah (Siregar, 2017). Subekti dan Tjitrosoedibio secara singkat mengartikan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan curang dan dapat merugikan keuangan Negara (Pujangga & Langit, t.t.). Syed Hussein Alatas juga menyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian orang, waktu dan tenaga dari pihak lain, baik berupa penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme (Mu'allifin, 2015).

Menurut Baharuddin Lopa pengertian umum mengenai tindak pidana

korupsi adalah suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat (Prasetyo, 2013). Sedangkan menurut *Transparancy* Indonesia, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Pope & Transparency International Indonesia, 2008). Terakhir, menurut Acham (dalam Brunner, 1981) korupsi diartikan sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum (Salama, 2014).

Definisi-definisi yang dikemukan oleh sejumlah ahli tersebut setidaknya memilik benang merah yaitu (Abidin & Siswandi, 2015, hlm. 12–13):

1. Korupsi adalah sebuah perilaku
2. Perilaku itu terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan
3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok
4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral
5. Terjadi atau dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun korporasi-korporasi swasta.

Ciri Korupsi. Syed Husein Alatas mengemukakan ada banyak ciri-ciri korupsi, beberapa di antaranya adalah: *pertama,* korupsi melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian ataupun penipuan maupun penggelapan (*frand*). Misalnya suatu pernyataan palsu tentang belanja perjalanan atau rekening hotel; penggunaan keuangan secara tidak sah oleh seorang bendaharawan dan lain-lain. *Kedua,* korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan; kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan telah berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya dan tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka. Namun, sekalipun demikian bahkan di sini pun motif korupsi tetap juga dirahasiakan. *Ketiga,* korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selamanya dalam bentuk uang. *Keempat,* mereka yang terlibat dalam korupsi selalu berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. *Kelima,* mereka yang terlibat dalam korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu. *Keenam,* setiap tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan terhadap badan publik

ataupun masyarakat umum. *Ketujuh,* setiap bentuk korupsi adalah penghianatan kepercayaan. *Kedelapan,* setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. Misalnya: ketika seorang pejabat disuap untuk mengeluarkan lisensi bisnis oleh pihak yang menawarkan pemberian, perbuatan mengeluarkan lisensi itu merupakan fungsi kepentingan bisnisnya yang sesuai dengan hukum namun perlindungannya pada penyuapan jelas tidak. *Kesembilan,* suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus (Mu'allifin, 2015)

Jenis korupsi. Menurut Baharuddin Loppa, korupsi jika dilihat dari bentuknya setidaknya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *material corruption* (korupsi material) dan *political corruption* (korupsi politik). *Material corruption* adalah perbuatan memanipulasi keuangan Negara atau merugikan keuangan negara. Sedangkan yang termasuk korupsi politik menurut David M. Chalmers adalah korupsi pada pemilihan termasuk memperoleh suara dengan uang, janji-janji jabatan atau hadiah-hadiah khusus, paksaan intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan meliputi penjualan suara dalam legislatif, keputusan administratif atau keputusan pengadilan atau pengangkatan/penunjukkan oleh pemerintah (Prasetyo, 2013).

Menurut Undang-Undang 31/1999jo UU No 20 tahun 2001 setidaknya ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Apabila ke 30 jenis tindak pidana tersebut dikelompokkan maka ada 7 kelompok jenis korupsi yang lazimnya ditemukan, yaitu:

Tabel 1. Jenis dan Deskripsi Korupsi

No	Jenis Korupsi	Deskripsi
1	Kerugian Keuangan Negara	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia, 2004)
2	Suap Menyuap	Menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya (Hidayah, 2016). Perilaku suap-menyuap antara lain: menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pejabat karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006),

No	Jenis Korupsi	Deskripsi
3	Penggelapan dalam Jabatan	Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan, atau membiarkan uang atau surat berharga dibiarkan atau digelapkan oleh orang lain atau membantu orang lain melakukan perbuatan itu (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
4	Pemerasan	Terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern dan ekstern. Perekrutan perwira menengah TNI atau polisi menjadi manajer *human resources department* atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan merupakan contoh korupsi pemerasan. Termasuk pula dalam korupsi jenis ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindarkan akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan.
5	Perbuatan curang	Melaporkan pembayaran atau pengeluaran suatu proyek tidak secaa sebenarnya, tepai dilebih-lebihkan, dan kelebihannya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Namun membiarkan orang lain melakukan perbuatan curang pun termasuk dalam kategori perbuatan curang (Abidin & Siswandi, 2015, hlm. 16) Yang termasuk dalam kategori perbuatan curang adalah tipu muslihat dalam penyerahan barang, membuat utang atau menghapuskan utang, memakai nama atau kedudukan palsu, penipuan dalam jual beli, penipuan dalam karya ilmiah, penipuan dalam asuransi, penipuan dalam persaingan curang, penipuan dalam permasalahan tanah, penipuan dalam pemborongan, penyiaran kabar bohong, penipuan dalam penggambaran yang tidak benar tentang surat berharga, penipuan tentang neraca palsu (Dictio, 2018)
6	Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006)
7	Gratifikasi	Pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasiltas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya

Selain dari jenis korupsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, masih ada tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang tertuang

dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo No 20 tahun 2001 (Ismail, 2012), yaitu :

1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara (pasal 3)
3. Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11)
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
6. Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
7. Delik gratifikasi (Pasal 12 B dan 12C)

Ada dua bentuk atau tipe korupsi yaitu korupsi dengan tipe sistemik dan sistematik. Korupsi sistemik merupakan kombinasi antara politik dan korupsi yang dilaksanakan secara teratur, tersistem dan terstruktur. Sementara, pada korupsi sistematik adalah para pelaku korupsi membeli loyalitas dengan cara membagikan sejumlah uang kepada para pemilihnya (konstituen). Para konstituen harus disuap terus-menerus karena jika jumlah suapan yang diberikan pihak kompetitor lebih besar, maka konstituen kemungkinan akan menyeberang dan berpindah untuk memilih pihak lawan pada pemilu periode yang akan datang (Salama, 2014).

Sebab munculnya korupsi. Apabila dimasukkan dalam sebuah rumus, maka menurut Klitgaard (1998), korupsi dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan:

$$C = M + D - A$$

C = *Corruption* (Korupsi)
M = *Monopoly* (Monopoli)
D = *Discretionary power* (kewenangan)
A = *Accountability* (Akuntabilitas)

Atau apabila dideskripsikan persamaan tersebut menjadi demikian: seseorang melakukan korupsi karena besarnya monopoli (ekonomi, politik, hukum) dan kewenangan yang dimilikinya, dan pada sisi lainnya semakin kecil akuntabilitas yang dimiliki oleh orang tersebut karena rendahnya integritas moral pemegang monopoli dan kekuasaan).

Dalam kenyataannya, rumus yang dikemukan oleh .Klitgaard tersebut masih sederhana. Banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang

melakukan korupsi. Menurut Lambsdorff ada 11 faktor yang membuka peluang seseorang melakukan korupsi, yaitu: ukuran sektor publik, kualitas regulasi, kurangnya persaingan ekonomi, struktur pemerintahan, bentuk demokrasi, sistem pemilu, desentralisasi, budaya, nilai-nilai, jender, geografi dan sejarah

Dampak korupsi. Dampak korupsi yang dapat dirasakan oleh individu, masyarakat dan bangsa antara lain sebagai berikut (Abidin & Siswandi, 2015):

1. Dampak pada sistem politik dan hukum.

   Terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau partai politik mengakibatkan munculnya pemimpin yang korup, menguatnya plutokrasi (sistem politik yang dikuasai pemegang modal), hancurnya kedaulatan rakyat, dan hilangnya kedaulan rakyat terhadap demokrasi (KPK ACLC, 2019b)

2. Dampak pada kondisi ekonomi.

   Terjadinya tindak pidana korupsi dapat menyebabkan penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas jasa dan barang untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara.

3. Dampak pada lingkungan.

   Dampak korupsi terhadap lingkungan antara lain menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus ilegal loging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun (KPK ACLC, 2019a).

4. Dampak pada bidang kesehatan.

   Dampak korupsi pada sektor kesehatan dapat mengakibatkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat yang berimbas pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Indikator IPM seperti angka kematian bayi dan angka harapan hidup sangat terkait dengan pendanaan sektor kesehatan. Apabila terjadi korupsi pada sektor kesehatan, maka akan berimbas penurunan angka harapan hidup dan menaikkan angka kematian bayi. Dampak korupsi lebih jauh adalah naik dan tingginya harga obat-obatan dan rendahnya kualitas alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas serta sarana kesehatan masyarakat lainnya (Gobel, 2015).

5. Dampak pada bidang pendidikan.

   Korupsi menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan karena penggunaan anggaran yang besar untuk peningkatan kualitas pendidikan

digunakan dengan tidak tepat sasaran, tidak sasaran, dan menjadi ladang untuk melakukan korupsi.

6. Dampak pada rasa keadilan.

   Korupsi menyebabkan hilangnya rasa keadilan. Korupsi berarti menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan keuantungan yang sebetulnya bukan menjadi haknya. Hak orang lain, hak rakyat, atau negara, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dan masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan apa-apa yang seharusnya diterima (Abidin & Siswandi, 2015, hlm. 23)

7. Dampak psikologis pada masyarakat.

   Korupsi memberikan dampak pada pola berpikir masyarakat. Setidaknya ada dua hal yang terjadi yaitu belajar sosial. Dalam suatu masyarakat di mana para pelaku korupsi tidak mendapatkan hukuman yang pantas atas apa yang dilakukannya atau bahkan mendapatkan pujian, maka anggota masyarakat akan meniru apa yang koruptor itu lakukan. Dampak yang kedua adalah adanya desensitisasi yaitu hilangnya atau berkurangnya kepekaan moral atau sosial. Anggota masyarakat tidak lagi menjadi prihatin atau marah terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di sekitarnya (Abidin & Siswandi, 2015, hlm. 23–24)

Korupsi sebagai Penyebab Disintegrasi Bangsa

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah negara yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi berisiko memiliki ancaman disintegrasi yang lebih kompleks dan lebih besar bila dibandingkan dengan negara yang memiliki komposisi kelompok homogen (Damayanti, 2013). Ancaman disintegrasi itu juga terjadi di Indonesia, mengingat masyarakatnya terbagi menjadi berbagai suku, agama, ras, geografi, dan adat istiadat.

Disintegrasi itu sendiri diartikan sebagai perpecahan atau pemisahan. Menurut *Webster New Encylopedia Dictionary*, yang dimaksud dengan disintegrasi adalah perpecahan suatu bangsa menjadi sejumlah bagian-bagian yang saling terpisahkan (*Merriam Webmaster,* 2019). Lawan dari disintegrasi adalah integrasi atau persatuan.

Secara umum gejala dari munculnya disintegrasi di tengah masyarakat adalah seperti semakin banyak masyarakat yang tidak mengindahkan atau mematuhi peraturan atau norma yang berlaku, semakin sering munculnya perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat, pemimpin yang tidak memiliki wibawa dan karisma, dan penegakan hukum yang tebang pilih, tidak

sesuai aturan dan tidak konsisten (Miyarso, 2011). Sedangkan bentuk-bentuk disintegrasi yang sering muncul di tengah masyarakat antara lain pemberontakan darah, demontrasi, kriminalitas yang meningkat, dan kenakalan remaja (Suparlan, 2000)

Beberapa faktor yang mendukung terjadinya disintegrasi bangsa adalah: kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Intinya adalah rasa tidak puas dan rasa ketidakadilan terhadap pemerintahan.

Saat ini korupsi di Indonesia seolah-olah merupakan suatu hal yang lumrah dan bahkan menjadi tradisi, terutama bagi para pejabat pemerintah, bahkan korupsi sudah menjadi sebuah *extraordinary crime* yang perlu diwaspadai. Salah satu indikasinya adalah lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia yang sampai saat ini belum bisa menuntaskan tindak pidana korupsi secara maksimal. Oleh karena itu, masyarakat kecil di Indonesia dan di pedesaan pada khususnya menjadi terlantar karena sibuknya pemerintah dalam menuntaskan korupsi yang tak kunjung selesai. Indonesia sendiri bahkan menjadi negara terkorup peringkat ketiga di dunia. Bahkan Indonesia termasuk sepuluh besar negara yang tingkat korupsinya tinggi di dunia. Permasalahan korupsi di Indonesia tidak dapat ditangani secara mudah. Budaya korupsi sudah mendarah daging di segala kehidupan ekonomi. Birokrasi yang berbelit-belit serta peraturan yang tidak jelas telah menyuburkan korupsi. Hukuman yang terlalu ringan bagi para koruptor juga tidak mengurangi efek jera bagi para pelakunya. Korupsi di Indonesia memang harus ditangani secara serius dan memberikan hukuman yang paling berat kepada pelakunya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat.

Korupsi yang berdampak pada munculnya krisis ekonomi birokrasi yang parah akan memunculkan ketidakpuasan kelompok masyarakat di beberapa daerah di Indonesia terhadap kesatuan Republik Indonesia. Dalam situasi ini, disintegrasi menjadi hal yang sentral. Pertanyaan sederhananya adalah apakah korupsi tersebut berbanding lurus dengan disintegrasi?



Selama ini, faktor-faktor yang dapat memunculkan disintegrasi bangsa adalah faktor kepemimpinan dan pemerintahan yang lemah. Di tengah masyarakat yang lemah, memang faktor ini menyumbang secara signifikan terhadap terjadinya disintegrasi. Gerakan disintegratif seperti separatisme Aceh, Papua, Timor-Timur merupakan contoh dari faktor kepemipinan dan pemerintahan yang lemah. Faktor yang kedua yang dapat memicu disintegrasi adalah peran TNI yang lemah, tidak solid dan terjadinya pemborosan dalam penggunaan anggaran. Faktor ketiga dari terjadinya disintegrasi adalah pembangunan ekonomi yang tidak berkeadilan sosial. Ketika ekonomi bangsa ini mengalami kebangkrutan dan pembangunan ekonominya tidak merata maka dapat dipastikan bibit-bibit disintegrasi akan tumbuh. Pada saat ketiga faktor perekat ini bertemu dalam satu titik, maka disintegrasi bangsa akan muncul diambang pintu.

Lalu timbul pertanyaan, dimana hubungannya antara korupsi dengan disintegrasi bangsa seperti yang disampaikan sebelumnya? Memang hubungan secara langsung tidak ada. Namun korupsi yang terus-menerus dilakukan secara massif akan memunculkan dampak-dampak korupsi yang apabila tidak di tanggulangi dengan baik akan menjadi faktor-faktor yang dapat memunculkan distegrasi. Semua bibit-bibit disintegrasi selalu dimulai dari dampak-dampak korupsi yang tidak ditemukan dan tidak ditangani dengan baik sehingga memunculkan rasa tidak puas, rasa iri hati, rasa sakit hati dan rasa diperlakukan tidak adil pada rakyat, terutama di daerah-daerah yang kurang tersentuh oleh pembangunan.

Dr. Hidayat Nur Wahid dalam Jurnal Hukum dan HAM dengan judul "Bahaya Korupsi bagi Perkembangan Peradaban Bangsa", menyatakan bahwa korupsi akan menimbulkan biaya tinggi dalam proses produksi, membengkaknya tingkat kemiskinan, membumbungnya harga-harga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penguasa, dan terganggunya sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara (La Sina, 2008).

Apabila diuraikan satu persatu maka dampak-dampak korupsi yang dapat memunculkan bibit-bibit disintegrasi antara lain:

1. Geografi.

   Jika tidak dikelola dengan baik, keadaan Indonesia yang memiliki banyak pulau merupakan salah satu penyebab terjadinya disintegrasi. Korupsi yang dilakukan akan menyebkan pemerataan pembangunan masing-masing daerah atau pulau menjadi berbeda-beda sehingga memunculkan bibit-bibit disintegrasi bangsa.

2. Demografi.

   Meledaknya jumlah penduduk di Indonesia dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menjadi faktor munculnya kemiskinan. Masyarakat yang miskin karena sumber daya manusia yang rendah tersebut akan sangat mudah untuk diprovokasi atau dipengaruhi oleh isu-isu ketidakadilan. Rendahnya sumber daya manusia tersebut salah satunya juga disebabkan oleh banyaknya dana atau anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendidik masyarakat dikorupsi oleh sejumlah pihak.

3. Kekayaan alam.

   Pengelolaan kekayaan alam yang tidak profesional, tidak bertanggung-jawab dan koruptif membuat pembangunan di tiap daerah menjadi tidak merata dan adil, alhasil muncul perbedaan pembangunan antara satu daerah dengan daerah yang lain.

4. Politik.

   Politik di Indonesia semakin bermasalah. Saat ini sejumlah orang di negara Indonesia hanya memikirkan kepentingan kelompok politiknya saja. Rusaknya tatanan demokrasi berkehidupan bernegara, salah satunya disebabkan oleh para koruptor. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilihat dari rusaknya tatanan demokrasi berkehidupan negara tersebut, yaitu pertama prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak terjadi karena kekuasaan dan pembangunan dikuasai oleh segelintir koruptor. Kedua, posisi dan jabatan diplih melalui proses yang tidak benar sehingga sejumlah posisi diduduki oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak amanah, dan tidak bertanggungjawab. Ketiga, pembangunan dan sarana prasarana fasilitas umum memiliki kualitas yang rendah dan tidak sesuai standar kebutuhan masyarakat karena sebagian anggaran yang digunakan untuk itu dikorupsi oleh koruptor.

5. Ekonomi.

   Korupsi yang dilakukan secara massif dan sistematis akan menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak dapat lagi bekerja dengan efektif dan efisen karena terhambatnya pembangunan ekonomi rakyat, harga-harga barang yang semakin mahal, peredaran uang yang hanya berputar di antara segelintir elite ekonomi dan politik, dan produk-produk rakyat yang tidak bisa mampu bersaing. Korupsi yang dilakukan oleh koruptor tersebut akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan yang dapat menjadi bibit-bibit disintegrasi

6. Sosial budaya.

   Dari aspek sosial budaya, dampak korupsi dapat menyebabkan sejumlah masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek-aspek profesionalisme, kejujuran, dan toleransi. Hal ini muncul karena semua persolan dapat diselesaikan dengan uang sogokan. Ada istilah yang terkenal untuk itu, yaitu ADUL atau "Ada Duit Urusan Lancar". Selain itu korupsi akan memberikan pelajaran jelek kepada masyarakat untuk menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dan jauh dari budaya ketimuran dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Termasuk memainkan sentiman SARA (suku, agama, ras dan adat istiadat) untuk memuluskan korupsinya. Selain itu, korupsi yang dilakukan tersebut memunculkan kelompok-kelompok atau etnis-etnis yang terpinggirkan karena ketidakmerataan pembangunan. Korupsi juga memunculkan jurang yang sangat lebar antara yang kaya dan yang miskin.

7. Pertahanan dan keamanan.

   Ancaman ketahanan dan keamanan dapat datang dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman tersebut tidak akan menjadi kenyataan apabila aparat penegak hukum memiliki sarana dan prasarana yang berkualitas dan kuat untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk ancaman. Sebaliknya, ancaman tersebut akan menjadi nyata apabila aparat penegak hukum tidak memiliki sarana dan prasarana yang berkualitas dan kuat. Lemahnya sarana dan prasarana tersebut dimungkinkan karena banyaknya korupsi dalam proses pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana tersebut.

Upaya Melawan Korupsi di Indonesia: Dulu dan Sekarang

Dari paparan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa dampak korupsi semakin mencemaskan, karena sudah mengancam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain kejahatan korupsi dewasa ini semakin menjadi ancaman nyata di Indonesia, sehingga perlu diatasi secara serius dan komprehensif. Apabila ditelusuri, sebenarnya sejak dulu sampai sekarang, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memberikan tindak pidana korupsi secara serentak di semua bagian di Indonesia. Apabila disusun secara kronologis dari masa Sukarno hingga Jokowi, upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masa Pemerintahan Sukarno tahun 1960-an diterbitkan Undang-Undang Keadaan Bahaya dan membentuk Panitia *Retooling* Aparatur

Negara (PARAN) untuk memberantas korupsi. Upaya ini gagal karena koruptor berlindung di bawah kekuasaan Sukarno. Upaya lain dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 yaitu pembentukan Operasi BUDHI. Tugas mereka membabat korupsi di BUMN terutama di Pertamina. Namun tidak seorang koruptor pun dapat diseret ke pengadilan, dalam perjalannya Operasi BUDHI berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 11 milyar rupiah selama 3 bulan operasi BUDHI ini dilaksanakan sebelum akhirnya dibubarkan.

2. Masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Suharto mengumumkan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967. Pernyataan ini ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) namun TPK dianggap gagal bekerja. Presiden Suharto kemudian membentuk KOMITE EMPAT namun gagal juga dan dibentuklah Operasi Tertib (OPSTIB) yang saat itu banyak menemukan kasus korupsi dan berusaha menangkap para koruptor, namun terhenti ketika terbentur pada korupsi yang dilakukan kroni-kroni Suharto. Belum lagi terlihat hasil kerjanya, tim ini dibubarkan oleh Mahkamah Agung karena keberadaan dan struktur lembaga tersebut dinilai tidak sesuai peraturan yang berlaku.

3. Masa pemerintahan Presiden Megawati, beliau melakukan sejumlah hal selama memimpin antara lain: 1) Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perangkat pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); 2) Mengikuti Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Menentang Korupsi Tahun 2003 *(United Nation Convention Against Corruption)* dan Konvensi PBB tentang Kejahatan Lintas Batas Negara *(United Nation on Transnational Organized Crime)* untuk memajukan kerjasama internasional pemberantasan korupsi.

4. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau melakukan berbagai kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan pemberantasan korupsi, yaitu: 1) diterbitkannya Inpres tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) pembentukan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RANPK). Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono nampak sekali ingin berupaya memberantas korupsi, setelah beberapa pemerintahan sebelumnya mengalami kegagalan. Akan tetapi masih sama dengan pemerintahan sebelumnya, upaya ini juga mengalami kegagalan. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun merasa tidak cukup mampu menangani korupsi di Indonesia yang telah menggurita. SBY-pun menambah upaya dengan diterbitkannya Keppres

tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Masa pemerintahan Jokowi, beliau melakukan berbagai kebijakan berupa: 1) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, kemudian Inpres harus diimplementasikan dalam tujuh sektor, yakni industri ekstraktif/pertambangan, infrastruktur, sektor privat, penerimaan negara, tata niaga, BUMN, serta pengadaan barang dan jasa; 2) Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 3) Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lewat aturan ini, masyarakat akan memperoleh imbalan hingga 200 juta rupiah apabila memberikan informasi yang akurat kepada penegak hukum tentang dugaan korupsi; 4) jumlah penyidik KPK ditambah. Dari semula sekitar 50-an orang, kini mencapai 200-an orang. Dengan begitu, jumlah tindak pidana korupsi dapat ditangani lebih signifikan.

Dari kronologis tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemerintah dari masa ke masa selalu dan terus memiliki keinginan luhur untuk memberantas korupsi. Oleh sebab itu sebenarnya negara kita sudah cukup banyak memiliki perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai upaya memberantas korupsi. Tidak hanya itu, upaya ini juga didukung dengan pembentukan badan atau komisi yang secara khusus bertugas menyelidiki dugaan-dugaan korupsi yang telah dilakukan. Namun, pada kenyataanya korupsi sekali lagi bukanlah kejahatan yang mudah dipecahkan dan diselesaikan, maka wajar jika muncul kata-kata sindiran tentang korupsi di negeri ini, yaitu *"mati satu, lahir seribu"* yang dapat diartikan sekalipun pelaku korupsi banyak yang tertangkap dan dihukum, tetapi pada saat yang bersamaan, praktik korupsi juga bertambah banyak,menjamur dan menguat. Bila kita merujuk *Transparency International* yang sudah di sampaikan sebelumnya, peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia memang ada peningkatan dari peringkat nilai IPK 32 pada 2013, menjadi peringkat nilai IPK 37 pada 2017 dan terakhir pada 2018 Indonesia dengan skor 38 (Indonesia, 2019) namun dengan kenaikkan satu poin dapat dikatakan tidak menunjukkan skor yang signifikan artinya Indonesia tidak lebih baik maupun lebih buruk dalam hal korupsi bahkan bisa di katakan stagnan.

Nilai Kejujuran sebagai Kunci Integrasi Bangsa

Korupsi sejatinya bukanlah kejahatan biasa dan tidak bisa dilawan dengan hanya satu senjata atau perangkat (misalnya hukum) karena pada praktiknya hukum di negeri ini terlalu tumpul untuk membuat jera para pelaku korupsi. Perlawanan yang sesungguhnya selain sifatnya represif - yaitu lebih menekankan pada pembalasan, pemberantasan dan penghukuman terhadap pelaku korupsi setelah kejahatannya dilakukan dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya – perlu dilakukan juga upaya-upaya preventif. Upaya preventif lebih berorientasi pada upaya pengendalian, penangkalan dan pencegahan serta memiliki dampak jangka panjang dan bisa dilakukan oleh semua kalangan. Kedua strategi itu memang idealnya harus dilaksanakan secara beriringan dan bersamaan. Penanganan terhadap kejahatan korupsi saat ini, menurut hemat penulis memang tampaknya lebih banyak terfokus pada upaya penindakan. Selain itu, upaya ini hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penanganan korupsi selama ini juga masih belum menyentuh akar permasalahan, yaitu masalah integritas.

Integritas umumnya dihubungkan dengan suatu keutamaan/ kebajikan (*virtue*) atau karakter yang baik (Audi & Murphy, 2006). Secara etimologis, menurut Skeak (1888) dan Black (1825) kata integritas (*integrity*), integrasi (*integration*) dan integral (integral) memiliki akar kata Latin yang sama, yaitu "*integer*" yang berarti "seluruh" ("*whole or entire*") atau "suatu bilangan bulat" ("*a whole number*"), bilangan yang bukan bilangan pecahan (Gufroni, 2018). Jadi, sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, sehingga nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan.

Integritas dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh . Integritas juga seringkali diidentikkan dengan **"kejujuran".** Lalu pertanyaannya sekarang bagaimana caranya agar integritas itu ada dalam diri individu? Jawabannya sederhana yaitu dimulai dengan kejujuran, sebagai modal dasar membangun integritas.

Apabila disederhanakan, penyebab korupsi dapat meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Niat

adalah faktor internal yang ada di dalam hati atau diri seseorang. Faktor tersebut disebabkan oleh lemahnya mental seseorang dan terkait dengan lemahnya tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai anti korupsi yang utama yang perlu dimiliki tiap individu adalah kejujuran. Perilaku korupsi menyangkut bagaimana nilai kejujuran yang dimiliki seseorang tertanam dalam dirinya secara konsisten. Kejujuran perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi.

Kejujuran bukanlah sebuah benda yang biasa yang sering kita lihat dan sentuh, ia tak yang mudah digenggam erat sepanjang hidup. Karena memang kita sering menganggapnya sebagai sesuatu yang penuh risiko. Banyak orang menggunakan berbagai cara untuk mencapai apa yang diinginkannya meski harus melepaskan kejujuran dari genggamannya. Kejujuran tetaplah kejujuran yang tidak dapat disejajarkan dengan nilai material, karena memang kejujuran tidak mengenal untung-rugi. Ia bagaikan mutiara yang bersinar meski terlindas kejamnya peradapan manusia (Schiller & Bryant, 2002).

Pengertian kejujuran yang akar katanya jujur, berarti lurus hati; tidak berbohong; tidak curang; tulus; ikhlas sehingga kejujuran diartikan sebagai sifat (keadaan) jujur; ketulusan hati atau kelurusan hati (Kemendikbud RI, 2019). Kejujuran sendiri dapat dilihat dari apa yang disampaikan dan diperbuat sesuai dengan hati nurani. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki kekuatan hati berjalan pada aturan dan prinsip hidup yang benar. Gea, Wulandari, dan Babari (Wulandari, 2012) menyimpulkan bahwa kalau orang memiliki kejujuran sebagai keutamaan, orang itu tidak akan berbohong atau menipu walau sebenarnya dia memiliki kesempatan untuk melakukannya.

Orang yang jujur adalah orang yang memiliki integritas. Integritas adalah suatu sifat dasar yang dimiliki seseorang yang utuh dalam arti bahwa kepribadiannya tidak berkotak-kotak. Orang dengan integritas tinggi bersikap dan bertindak sebagai dirinya sendiri, konsekuen dan konsisten dari perbagai dimensi kehidupa dan tidak berupaya untuk terus menerus menyembunyikan wajahnya yang sebenarnya. Jadi seseorang yang memiliki integrasi batin yang kuat, akan satu dalam sikap hati dan tindakan. Orang tersebut tidak akan berbohong, janjinya dapat dipercaya (Wulandari, 2012)

Kejujuran adalah karakter. Santrock (2008) menyebutkan karakter bukan sekedar hasil dari sebuah tindakan melainkan secara simultan merupakan hasil dan proses (Wulandari, 2012). Seseorang terangsang untuk melakukan korupsi, karena ada sifat atau karakter tidak jujur pada diri sendiri. Rangsangan untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya tersebut, disebabkan oleh ketidakmampuan mengendalikan diri, baik secara individu maupun kelompok dalam satu komunitas yang sama-sama tidak jujur. Ketika seseorang memiliki

kejujuran maka ia akan terhindar dari perilaku korupsi. Internalisasi karakter jujur menjadi hal yang sangat krusial untuk dilakukan. Kejujuran inilah nantinya yang akan menjadi kunci dari integrasi sebuah bangsa. Bagaimana menjelaskan kejujuran dalam kaitannya dengan kekompakan/ keutuhan bangsa?

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, korupsi yang dilakukan secara terus- menerus dan massif akan memunculkan dampak-dampak korupsi yang apabila tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi faktor-faktor yang dapat memunculkan disintegrasi, yang akan banyak menimbulkan kekacauan di negeri ini. Oleh karena itu integrasi perlu dipertahankan dan dilestarikan demi berlangsungnya stabilitas dan kedamaian Indonesia,yaitu dengan cara mengantisipasi tindak kejahatan korupsi oleh generasi di masa depan. Salah satu cara adalah menanamkan nilai kejujuran yang bisa diibaratkan sebagai mata uang yang berlaku dimana-mana, dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejujuran adalah dasar pembangunan Bangsa Indonesia. Integrasi bangsa akan dapat dipertahankan jika rakyat dan pejabatnya mempunyai kejujuran.

Integrasi Tri Pusat Pendidikan dalam Internalisasi Nilai Kejujuran

Pendidikan merupakan pondasi dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada individu sebagai bagian dari proses kehidupan. Lingkungan yang berpengaruh dalam pendidikan digolongkan menjadi tiga yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut dinamakan tri pusat pendidikan. Ketiga lingkungan tersebut sangat penting bagi individu dan memiliki andil yang besar terhadap pembentukan karakter dan kepribadian walaupun sangat bervariasi pengaruhnya.

Lingkungan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Keluarga secara garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. Lebih luas lagi pengertian keluarga adalah kekerabatan yang dibentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah. Kekerabatan yang berasal dari satu keturunan atau hubungan darah merupakan penelusuran leluhur sesorang, baik melalui garis ayah, ibu, ataupun keduanya. Hubungan kekerabatan seperti ini dikenal dalam satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu dan sebagainya. keluarga sebagai kesatuan hidup bersama yang pertama dikenal oleh anak, karena itu disebut *Primary Community.*

Keluarga merupakan sumber pendidikan moral yang paling utama bagi anak-anak oleh karena itu ia memiliki peran signifikan dalam menanamkan nilai kejujuran pada anak. Anak terlahir tanpa kecenderungan apapun. Anak

akan mempelajari nilai-nilai hidup dalam kehidupannya dari keluarga. Nilai kejujuran yang ditanamkan sejak kanak-kanak akan terbawa selama hidupnya. Sehingga kelak ketika seseorang menjadi dewasa, ia akan terhindar dari perilaku korupsi. Keluarga, terutama orang tua perlu duduk bersama dengan anak dan meluangkan waktu khusus untuk membantu anak menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan anak. Orang tua tidak hanya menyampaikan nilai-nilai melalui kata-kata, tetapi juga memberi teladan dalam tingkah laku. Dalam jurnalnya Nuraeni (Nuareni, 2014) mengatakan, pendekatan sosial yang dilakukan lewat percontohan dan penguatan digunakan untuk membiasakan anak melakukan perbuatan jujur. Melalui peniruan dan pembiasaan, seorang anak akan belajar untuk meneladani orang tuanya. Dengan model peran yang baik, akan terjadi identifikasi positif, yaitu penyamaan diri dengan orang yang akan ditiru. Orangtua adalah teladan kejujuran yang paling dekat dengan anak sehingga transformasi nilai yaitu kejujuran bisa tersampaikan dengan baik. Perkataan dan perbuatan jujur orang tua dapat menjadikan contoh dan modal utama anak untuk bisa berbuat jujur dalam hidupnya sampai ia dewasa kelak.

Lingkungan sekolah. Jika di lingkungan rumah atau keluarga, anak dapat dikatakan "menerima apa adanya" dalam menerapkan sesuatu perbuatan, maka di lingkungan sekolah sesuatu hal menjadi "mutlak" adanya. Pengaruh sekolah sangat besar dalam membentuk pola pikir dan karakter anak. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur dan terencana. Guru yang melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran tersebut adalah orang-orang yang dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik, dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas kependidikan (Juwariyah, 2010).

Sekolah, pada hakikatnya bukanlah sekedar tempat *"transfer of knowledge"* Sekolah tidaklah semata-mata tempat guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran. Sekolah adalah lembaga yang mengusahakan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (*value-oriented enterprise*). Pendidikan di sekolah perlu diorientasikan pada tataran *moral action*, tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Lickona (Arliman S., 2016) yang menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran tindakan moral diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing, moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Menanamkan nilai kejujuran bagi para peserta didik dilakukan saat mereka masih duduk di bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sekolah merupakan induk dari semua profesi pengelola bangsa dan dinilai menjadi wadah utama dalam pembentukan

karakter. Dengan mengintegrasikan nilai kejujuran kedalam kehidupan dan proses belajar diharapkan individu kelak akan mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti korupsi. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan dalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra-kurikuler maupun ekstra-kurikuler di setiap jenjang sekolah (Subianto, 2013).

Masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah kesamaan dan sadar akan persatuan dan kesatuan, serta bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Dengan kata lain masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk, dan tempat manusia saling berhubungan dan bertindak (Indrakusuma, 1973).

Peran masyarakat tidak kalah pentingnya dalam upaya sosialisasi nilai-nilai kejujuran. Masyarakat sebagai pusat pendidikan yang ketiga sesudah keluarga dan sekolah, mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda karena batasan ruang lingkupnya yang tidak jelas dan adanya keaneka-ragaman bentuk kehidpan sosial dan budaya. Di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (misalnya pemuka agama) dan para pemimpin merupakan bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dalam proses sosialisasi nilai-nilai kejujuran. Mereka berfungsi sebagai *public figure* yang biasanya menjadi *role model* bagi anggota masyarakat lainnya.

Untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran sehingga terkristalisasi dalam diri indvidu bukan perkara mudah dan bisa cepat dilakukan. Tentu saja proses ini memerlukan waktu dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Keberhasilan upaya ini juga membutuhkan kerja sama yang solid antara ketiga pusat pendidikan tersebut.

Penutup

Korupsi masih menjadi tantangan terbesar untuk dituntaskan di Indonesia, sekian banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi pada kenyataannya belum mampu mengurangi tindak korupsi secara signifikan. Korupsi dapat menjadi sebuah ancaman disintegrasi bangsa. Oleh karena itu harus segera ditangani. Selain tindakan represif yang merupakan tindakan langsung dari aparat hukum, upaya-upaya preventif yang ditujukan pada akar dari permasalahan korupsi, juga tidak kalah penting.

Salah satu yang menjadi krusial yaitu terkait dengan sosialisasi nilai-nilai kejujuran pada setiap aspek kehidupan. Melalui penanaman nilai-nilai kejujuran yang kuat sejak dini, diharapkan seseorang akan menginternalisasi

nilai-nilai tersebut sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan dan cara hidup sampai ia dewasa. Tri pusat pendidikan diharapkan dapat menjalani masing masing peran dengan baik. Keluarga, sekolah maupun masyarakat harus yang saling memperkuat dan saling melengkapi, sehingga bisa menjadi benteng maraknya perilaku korupsi di masyarakat Indonesia.

Daftar Acuan

Abidin, Z., & Siswandi, A. G. P. (2015). *Psikologi korupsi memahami aspek-Aspek psikologis pelaku korupsi, pola-pola perilaku korupsi, dan pola-pola penanganan korupsi di Indonesia.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Arliman S., L. (2016). Konsep dan gagasan pengenalan pendidikan anti korupsi bagi anak dalam rangka mewujudkan generasi yang bebas korupsi. *Jurnal Lex Librum*, 3(1).

Audi, R., & Murphy, P. E. (2006). The many faces of integrity. *Business Ethics Quarterly*, 16(1), 3–21.

Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Damayanti, R. (2013). Konflik bahasa di Belgia: Upaya pengelolaan potensi disintegrasi bangsa. *Jurnal Universitas Paramadina*, 10(3), 813–823.

Dictio. (2018). *Apa yang dimaksud dengan perbuatan curang?* Diambil 3 Mei 2019, dari https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perbuatan-curang/3533

Gobel, F. A. (2015). *Korupsi pada sektor kesehatan.* Diambil dari Kompasiana website: https://www.kompasiana.com/yantigobel/550acf2fa33311226a2e3e46/korupsi-pada-sektor-kesehatan

Gufroni, G. (2018). Integritas moral dan korelasinya dengan perilaku korupsi. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendenta*l.

Hakim, L. (2012). Model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama islam-Ta'lim*, 10(2), 141–156.

Hidayah, A. K. (2016). Tindak pidana suap menurut ketentuan hukum pidana nasional dan hukum pidana islam (suatu studi perbandingan) (*Skripsi*). Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, Makasar.

Indonesia, T. I. (2019, Februari 11). Corruption Perception Index 2018. Diambil 31 Mei 2019, dari *Transparency International Indonesia website*: https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/

Indrakusuma, A. D. (1973). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Ismail, R. (2012). Keberagamaan koruptor menurut psikologi (tinjauan orientasi keagamaan dan psikografi agama). *ESSENSIA,* XIII(2), 289–304.

Juwariyah,. (2010). *Dasar-dasar pendidikan anak dalam Al Qur'an.* Yogyakarta: Teras.

Kemendikbud RI. (2019). *Pencarian—KBBI Daring*. Diambil 31 Mei 2019,

dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Laporan Tahunan KPK 2018.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK ACLC. (2019a). *Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan.* Diambil 4 Mei 2019, dari https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-kerusakan-lingkungan

KPK ACLC. (2019b). *Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi*. Diambil 4 Mei 2019, dari https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-politik-dan-demokrasi

La Sina. (2008). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia,* 26(1), 39–51.

Merriam Webmaster. (2019). D*efinition of DISINTEGRATION*. Diambil 12 Mei 2019, dari https://www.merriam-webster.com/dictionary/disintegration

Miyarso, E. (2011). Pengembangan model internalisasi nilai-nilai pendidikan agama sebagai upaya untuk menangkal potensi terorisme dan gejala disintegrasi bangsa. *Jurnal Penelitian Humaniora,* 16(1), 76–93.

Mu'allifin, M. D. A. (2015). Problematika dan pemberantasan korupsi di Indonesia. *Ahkam, 3(2), 311–325.*

Nuareni. (2014). Pendidikan karakter pada anak usia dini. J*urnal Paedagogy,* 1(2).

Pope, J., & Transparency International Indonesia. (2008). *Strategi memberantas korupsi (Edisi Ringkas)*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

Prasetyo, T. (2013). Membangun sistem hukum Pancasila yang merdeka dari korupsi dan menjunjung HAM. *Refleksi Hukum,* 8(1), 19–26.

Pujangga, J. S., & Langit, D. A. S. (t.t.). *Efektifitas film "Kita vs Korupsi" sebagai media untuk merubah sikap remaja terhadap korupsi.* Dipresentasikan pada Proceding Seminar Nasional"Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal."

Salama, N. (2014). Motif dan proses psikologis korupsi. Jurnal Psikologi, 41(2), 149–164.

Schiller, P., & Bryant, T. (2002). *The values book for children.*

Siregar, A. B. A. (2017). Korupsi (melacak term-term korupsi dalam Al-Qur'an). *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 3(2), 98–115.

Subianto, J. (2013). Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembentukan

karakter berkualitas. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam,* 8(2), 331–354.

Suparlan, P. (2000). Masyarakat majemuk dan perawatannya. *Antropologi Indonesia,* 63(1), 1–13.

Wulandari, A. P. J. (2012). Gambaran kejujuran sebagai landasan keutamaan moral mahasiswa yang sudah pernah mengambil Mata Kuliah Character Building. *Humaniora*, 3(2), 566–572.

Imadduddin & Hairina, Yulia. Corruption and national disintegration. *The problem of corruption is a topic that continues to be discussed endlessly and is now increasingly concerned, even becoming one of the most crucial issues to be solved. The crime that has an impact on the emergence of a severe bureaucratic economic crisis will bring dissatisfaction among community groups in several regions in Indonesia. In this situation, disintegration is a central thing that can occur if corruption is continuously carried out. The emergence of the seeds of social decay because of dissatisfaction, jealousy, hurt, and injustice that happens is a threat to our nation. The government has made various efforts to crack down on corruption in all parts of Indonesia simultaneously. However, corruption is not a crime that is easily solved and resolved. The real resistance in addition to its repressive nature is more emphasis on punishment, but no less critical also requires preventive efforts that are more oriented towards controlling, and preventing and having a long-term impact and can be carried out by all national forces. One of the defensive struggles and is the root of the problem of corruption concerns the issue of integrity, namely the value of honesty because of the internal factors of corruption behavior concerns how the honesty value of a person is embedded in him consistently. The importance of honesty is fundamental to the development of the Indonesian nation because, with that, the integration of the country will be maintained if the people and officials have reliability. Internalization of the value of honesty starts from families, schools, and communities where all three must work together.*

Polarisasi Politik dalam Pemilu

Adi Heryadi

Pendahuluan

Pertarungan dua pendukung pasangan capres dan cawapres dalam Pemilu 2019 berlangsung seru di media sosial dan aplikasi percakapan *online*, seperti *WhatsApp Grup*, *Instagram,* maupun *Facebook*. Berbagai berita dan opini yang kontroversial terkait keberpihakan dan dukungan, serta perdebatan terkait perhitungan suara *real count* maupun *quick count,* semakin menajam dan membabi buta pada medium-medium tersebut. Usaha KPU dan Bawaslu yang telah bekerja secara akuntabel dan transparan belum cukup memuaskan pikiran dan keinginan sebagian partisan yang menginginkan kemenangan kandidat yang didukungnya. Fakta, data, permintaaan maaf, serta koreksi dari KPU tidak cukup membuat masyarakat menerima begitu saja klarifikasi dari KPU. Berbagai bentuk *meme*, status, video, dan konten lain yang di-*update* di media sosial ataupun aplikasi percakapan menunjukkan bahwa situasi pertarungan masih belum usai, terlepas pemungutan suara sudah dilaksanakan serentak di seluruh nusantara pada 17 April 2019 dan hasil resmi diumumkan 22 Mei 2019.

Pada saat yang sama, beberapa elit politik justru memanaskan suasana. Hoaks beredar di mana-mana merasuki relung-relung pikiran para partisan, bahkan juga mempengaruhi sebagian kaum terpelajar yang ragu dengan metode ilmiah.

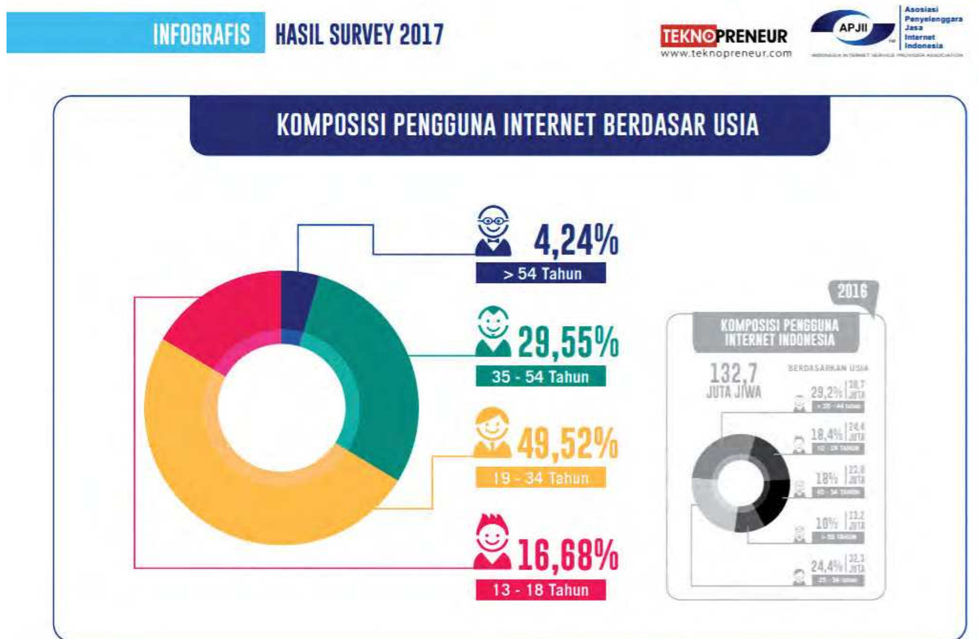
Jika menelisik ke belakang, saat gerakan reformasi 1998 yang menuntut turunnya rezim Soeharto karena dianggap sudah terlalu lama berkuasa dan tidak berhasil membuat ekonomi Indonesia bertahan ditengah krisis moneter, terlihat bagaimana saat itu elit politik dan rakyat bersatu padu. Setelah Soeharto mengumumkan mundur, elit politik yang lain mampu mengendalikan situasi sehingga suhu panas politik 1998 berhasil diturunkan sehingga pada akhirnya membawa Indonesia pada era demokrasi seperti sekarang ini.

Orde Reformasi lahir ditandai dengan Presiden BJ Habibie yang membuka keran kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, hingga mempersiapkan pemilu demokratis di tahun 1999. Kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berpendapat adalah buah manis dari reformasi 1998. Elit politik adalah kunci dari semua proses, jika mereka mampu mengajak pendukungnya untuk menggunakan akal sehat dan nurani maka dipercaya pendukung mereka

akan mengikuti. Elit dan juga media massa sebagai medium untuk membentuk opini publik adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.

Polarisasi akibat Internet

Pemilihan Umum 2019 yang merupakan pemilu ke-5 di era reformasi ditandai dengan semakin meluasnya penggunaan *internet* oleh masyarakat dari kelas bawah hingga atas. Era media sosial telah menjadikan konten-kontennya menjadi sumber referensi masyarakat. Lebih lanjut, viralitas informasi dari konten di media sosial menjadi fenomena yang tak terbantahkan.



Gambar 1. Komposisi Pengguna Internet Berdasar Usia
(APJII, 2017 dalam Kominfo, 2017)

Hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sebagaimana dimuat dalam situs Kominfo (2017) menunjukkan 143 juta masyarakat telah tersambung dengan internet. Jika dilihat dari sisi usia, pengguna internet dengan usia lebih dari 54 tahun mempunyai proporsi sebanyak 4,24%, sementara usia 35 sampai 54 tahun sejumlah 29,55%, usia 19 – 34 tahun atau batas usia di mana seseorang bisa memberikan suara di pemilu adalah sebesar 49,52%, dan sisanya 16,68% adalah pengguna internet dengan usia 13-18 tahun yaitu batas usia di mana sebagian besar dari mereka sudah boleh memilih.

Tidak bisa dipungkiri, salah satu faktor meruncingnya polarisasi yang terjadi pascapemilu ini disumbang oleh faktor medium, yaitu internet dan media sosial. Partisan masing-masing calon yang berjumlah lebih dari 120 juta—jika mengacu data di atas—dengan mudah menyampaikan apa yang dipikirkan tentang informasi yang ia dapat melalui *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan media sosial lainnya. Konten-konten yang diproduksi para partisan tersebut dapat dengan mudah direspon, dikomentari, didiskusikan dan diperdebatkan oleh semua orang dari belahan dunia manapun yang berjejaring dengannya.

Tajamnya polarisasi sebenarnya sudah dirasakan sejak awal musim kampanye. Selanjutnya, ketika hasil sementara *Real Count* KPU mulai tersiar dan *Quick Count* di berbagai lembaga *survey* telah dipublikasikan, suhu dalam grup-grup aplikasi percakapan dan media sosial menjadi semakin panas. Fenomena dihapusnya pertemanan di media sosial atau individu yang berinisiatif keluar atau dikeluarkan dari grup aplikasi percakapan seperti *whatsapp* adalah hal yang jamak sebagai akibat dari runcingnya polarisasi. Selanjutnya, hanya beberapa hari pascapemilihan publik juga makin dikejutkan dengan pernyataan-pernyataan kubu yang justru tidak mendinginkan suasana. Jika hal ini dibiarkan, maka akan dapat berdampak pada ancaman disintegrasi.

Robert Wright (2003; dalam Myers, 2012) menerangkan bagaimana teknologi *broadband* internet mampu membuat Osama Bin Laden merekrut ribuan anggota dengan mudah dengan jaringan sangat luas. Tidak hanya itu, bahkan *website* yang mengandung unsur terorisme telah mencapai kurang lebih 4.700 situs pada akhir tahun 2005 atau tumbuh empat kali lebih cepat sebelum teknologi *broadband* internet ada. Fenomena ini menurut Robert Wright merupakan polarisasi sebagai dampak dari teknologi internet.

Myers (2012) menjelaskan bahwa polarisasi kelompok bisa terjadi karena dua pengaruh, yaitu pengaruh informasional dan pengaruh normatif. Pengaruh informasional merupakan hasil dari bagaimana seseorang individu melihat bukti berdasarkan kenyataan. Pengaruh normatif didasarkan pada hasrat seseorang untuk diterima atau dikagumi orang lain. Di sisi lain, ketika individu cenderung memiliki pendapat yang tidak sepakat maka derajat ketidaksepakatan individu menjadi semakin meningkat ketika ia berada di dalam kelompok atau komunitas yang memiliki satu pendapat dengannya. Dampaknya adalah informasi apapun yang disampaikan oleh pihak–pihak yang memiliki legitimasi akan dianggap tidak benar. Bagi kelompok ini terjadi fenomena yang disebut sebagai *primacy effect. Primacy effect* menunjukkan bagaimana informasi awal yang diterima dari jaringan kelompoknya akan dianggap yang paling benar. Keputusan pemerintah membatasi penggunaan media sosial pada saat terjadi aksi anarkisme pasca

pengumuman pilpres menunjukkan bagaimana kerentanan masyarakat terhadap penyebaran berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pemilu dan Disintegrasi Bangsa

Integrasi nasional menurut Suraji (2002) adalah proses bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi nasional meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pada integrasi sosial budaya, berbagai suku dan lapisan masyarakat akan bersatu padu. Anderson (1983 dalam Suraji, 2002) mengatakan bahwa suku-suku yang membentuk suatu negara, yang lahir dengan harapan menjadi masyarakat politik yang dibayangkan *(imagined political community),* akan memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan. Namun demikian, situasi yang berkembang saat ini justru menunjukkan pergeseran identitas kebangsaan yang pernah dikenal bercirikan kesantunan dan mengutamakan kebersamaan serta gotong royong. Alih alih bersatu padu, dampak dari pemilu malah mengancam disintegrasi bangsa. Dalam tataran integrasi politik, Sjamsuddin (1989) mengatakan bahwa terdapat dimensi yang bersifat vertikal yang menyangkut hubungan massa pengikut dengan elit. Hubungan tersebut sebenarnya bertujuan menjembatani celah perbedaan untuk mengembangkan proses politik yang partisipatif di masyarakat.

Hadirnya internet dan media sosial telah menjadikan hubungan vertikal antara massa dengan elit menjadi semakin kohesif dan tanpa batas. Opini dan instruksi elit dalam sekejap dapat diakses oleh masyarakat bawah secara masif melalui grup *Whatsapp*, *Facebook* dan *Instagram.* Atas hal tersebut, kesalahan persepsi masyarakat atas opini yang disampaikan elit politik dimungkinkan terjadi, apalagi jika informasi tersebut diplintir dan mengandung kebohongan yang dapat menyesatkan publik. Bila hal tersebut terjadi maka akan dapat berdampak besar di masyarakat, terutama mereka yang di level bawah. Oleh karenanya, penggunaan medium internet untuk mengakses berita-berita politik yang tidak diselingi dengan refleksi diri dapat berpotensi menjadi ancaman terhadap integrasi nasional.

Ancaman disintegrasi yang terlihat melalui benih kebencian dan permusuhan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Wawasan nusantara yang selama ini telah menjadi doktrin pendiri bangsa untuk menanggulangi segala perbedaan dalam keberagaman guna mendukung pertahanan dan keamanan negara hendaknya tidak dilupakan begitu saja. Azmir (2013) mengingatkan jangan sampai pemilu yang merupakan bagian dari demokratisasi justru mengacak-ngacak negara atas nama kebebasan dan demokrasi.

Penutup

Polarisasi sikap adalah kecenderungan untuk mengevaluasi berbagai bukti atau informasi dengan cara memperkuat dan membuat pandangan individu menjadi lebih ekstrem (Miller dalam Baron & Byrne, 2003). Polarisasi sikap terjadi pada dua kubu pendukung pasangan calon presiden yang sedang berlaga. Segala upaya persuasi pihak-pihak yang semestinya mendapatkan legitimasi sebagai juri dalam pemilu tidak mampu membendung bias asimilasi dari pendukung kontestan pilpres. Semua informasi yang berbeda dengan pandangan atau sikap politik partisan akan otomatis dibantah. Para partisan tersebut bersikap konsisten dengan pandangan yang selama ini mereka yakini.

Fenomena tersebut mempengaruhi diri, keluarga, hingga masyarakat kita. Hoaks-hoaks yang tersebar di masyarakat berhasil membangun persepsi sebagian publik, menciptakan polarisasi kelompok, hingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang menjadi pertanyaan paling mendasar adalah adalah bagaimana cara menghadapi semua ini? Myers (2012) mengatakan bahwa individu cenderung memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri, mengevaluasi seberapa akurat penilaian tersebut, dan menjelaskan serta memprediksi dirinya sendiri dan diri sosial. Berangkat dari hal tersebut, terdapat beberapa hal yang sedianya dapat dilakukan individu. Beberapa hal yang mesti dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Refleksi diri
   Situasi yang terjadi pada negara ini semestinya didialogkan dengan diri sendiri. Dalam dialog tersebut, individu mesti meletakkan nilai kebersamaan serta mau mempercayakan mekanisme keadilan berdasarkan konstitusi.

2. Melawan kesalahan persepsi
   Jika refleksi diri berhasil menyadarkan diri tentang pentingnya nilai dan mekanisme hukum maka individu perlu mempertegas komitmen pribadi di wilayah publik (Myers, 2002). Hal tersebut diperlukan untuk mencairkan suasana dengan memanfaatkan penggunaan medium internet dan media sosial untuk mencegah disintegrasi. Diskusi terbuka di ruang publik adalah cara yang bisa dilakukan untuk meluruskan pihak-pihak yang memiliki keyakinan dan persepsi yang salah. Mengembangkan argumen yang logis adalah cara untuk melawan kesalahan persepsi akibat persuasi yang menyesatkan. Selain itu, dibutuhkan ketegasan dari pihak otoritas untuk menunjukkan mana-mana yang menjadi konten hoaks dan bukan. Masyarakat harus diajak untuk melihat fakta yang sesungguhnya untuk melawan kesalahan persepsi tersebut.

3. Mewaspadai provokasi selama masa kampanye

   Proses kampanye yang hampir 9 bulan telah menyebabkan tajamnya polarisasi kedua belah kubu. Baron dan Byrne (2003) mengatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil provokasi fisik atau verbal dari orang lain. Apa yang terjadi di media sosial selama hampir sembilan bulan di masa kampanye, pada beberapa kasus, dapat disebut sebagai upaya provokasi untuk memancing kebencian dari suatu kelompok pada kelompok yang lain. Ketika hasil pemilu tidak sesuai dengan harapan salah satu kubu, para pendukungnya akan mudah terpicu perilaku agresif karena panjangnya provokasi pada rentang waktu kampanye.

Daftar Acuan

Suraji, A.M.D. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia: Sebuah Proses Yang Belum Selesai*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Azmir, T. H. (2013). *Untaian Kata Hati untuk Sebuah Semangat Kebangsaan*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI.

Baron,R. A. & Byrne, D. (2003). *Psikologi sosial Jilid 1*. Jakarta: Erlangga

Kominfo (2017). *Komposisi Penggunaan Internet Berdasarkan Usia* [infografik]. Diakses dari https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf

Myers, D.G. (2012). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sjamsuddin, N. (1989). *Integrasi Politik Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia

----

Heryadi, Adi. *Political polarization in general election.* *This paper is purposed to disclose the author's concern considering the phenomenon and impact of the Indonesian 2019 general election. Internet and social media have been used as a medium to divide the nation, instead of the other positive benefit that we can get from it. It is necessary to conduct self-reflective and fighting against misperception to avoid the threat of disintegration.*

“Rasa Takut Bukan Bawaan dari Lahir”: Sebuah Revolusi Mental

Bayu Jatmiko

Peradaban Manusia

Masalah disintegrasi bangsa merupakan masalah klasik dalam sejarah peradaban manusia. Mulai dari zaman kerajaan sampai zaman negara-negara selalu terjadi masalah ancaman disintegrasi bangsa. Di negara tercinta Indonesia serta negara-negara lainnya kehidupan politik menjadi salah satu penyebab disintegrasi bangsa karena sangat berkaitan erat dengan kekuasaan. Perebutan kekuasaan menjadi sumber masalah dalam sebuah peradaban, mulai dari kehidupan lingkungan sosial terkecil dalam keluarga yang sering menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga sampai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Manakala bangsa dan negara Indonesia tercinta ini mengalami ancaman terhadap integrasi dan persatuan bangsa dalam tahun politik yang lalu, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi dalam iklim demokrasi pada era reformasi seperti ini dimana pemerintah dan militer tidak lagi mempunyai kekuasaan seperti di zaman Orde Baru ataupun Orde Lama. Peradaban manusia saat ini masih rentan mengalami disintegrasi bangsa terutama peradaban pada negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar atau negara berkembang dan tertinggal yang masih mengalami masalah perebutan sumber daya alam seperti yang terjadi di Timur Tengah maupun di benua Afrika. Hanya negara-negara maju dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar memiliki risiko integrasi bangsa yang rendah karena keseragaman pandangan politik dalam berbangsa dan bernegara serta rendahnya keragaman demografi yang dimiliki oleh negara-negara maju tersebut.

Persepsi manusia terhadap politik dan kekuasaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi risiko disintegrasi bangsa. Sayangnya tidak ada perubahan dan kemajuan yang cukup signifikan terkait persepsi manusia bukan hanya terhadap politik dan kekuasaan namun juga terhadap pola kehidupan manusia sendiri dari zaman kerajaan pada awal mula peradaban hingga zaman negara-negara. Pola kehidupan manusia masih sama dengan tingkat agresivitas yang juga tidak mengalami perubahan secara signifikan. Perang dan kekerasan masih terus berlangsung menghiasi sejarah peradaban manusia. Dorongan dan perilaku agresivitas tersebut juga digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.

Padahal kekuasaan berkaitan dengan **ketakutan.** Orang yang berkuasa akan ditakuti. Hal itu berlaku mulai dari dalam kelompok masyarakat terkecil seperti keluarga di mana figur ayah atau ibu ditakuti karena suka marah-marah atau agresif sebagai bentuk kekuasaan sampai dalam sebuah pemerintahan terutama dalam kepemimpinan yang bersifat ditaktor.

Pada zaman kerajaan raja ditakuti oleh rakyatnya. Bahkan terhadap seorang raja yang bijaksana sekalipun pasti tetap ada rasa takut di kalangan rakyatnya, sebab raja memiliki kekuasaan absolut terutama dalam bidang militer yang bisa digunakan untuk menekan rakyat. Namun seiring berevolusinya sistem pemerintahan maka pemimpin tidak lagi ditakuti oleh rakyatnya karena adanya pembagian kekuasaan. Pemimpin tidak lagi memiliki kekuasaan absolut terhadap sumber daya baik manusia maupun alam, karena ada proses-proses politik lain untuk bisa menggerakan kekuasaan. Selain itu sistem pemerintahan yang bersifat diktator terbukti kurang efektif dalam membuat masyarakat sejahtera karena tingginya rasa takut di kalangan rakyat serta sumber kekayaan yang hanya dikuasai oleh pemimpin.

Di negara Indonesia yang sudah memasuki era reformasi pemimpin negara tidak lagi ditakuti seperti pada zaman Orde Baru ketika kebebasan berbicara masih sangat terbatas. Namun dalam tahun politik ketika berlangsung pemilihan presiden dan kepala daerah, sangat wajar di negara Indonesia muncul potensi atau risiko disintegrasi bangsa sebab negara Indonesia memiliki keberagaman demografis yang tinggi, sistem demokrasi yang menyebabkan kebebasan bersuara menjadi tinggi, dan derasnya arus informasi yang masuk. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian kelompok atau golongan masyarakat yang menggunakan rasa takut serta perilaku agresif untuk menekan kelompok masyarakat lainnya agar tidak memiliki perasaan bebas dalam bersuara sehingga hanya kelompok yang memiliki perilaku agresif bisa bersuara untuk tujuan kampanye. Selain itu *hoax* atau berita-berita palsu yang bersifat menakut-nakuti juga banyak beredar di berbagai media sosial terutama berisi pembenturan ideologi bangsa dengan berbagai ideologi lain seperti ideologi komunis dan khilafah yang bisa membuat disintegrasi bangsa. Pengalaman kelam bangsa Indonesia dengan ideologi komunis terus dimanfaatkan untuk menakut-nakuti. Sentimen anti Cina termasuk masa kelam tahun 1998 yang mendorong Presiden Ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengubah nama China menjadi Tiongkok (Kompas, 2014), juga terus dihembuskan.

Penggunaan rasa takut dan bentrokan ideologi memang mampu memberikan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa namun itulah harga yang harus dibayar mahal oleh demokrasi dalam berpendapat. Dalam demikorasi ada ruang bagi kelompok masyarakat tertentu untuk menyebarkan

ketakutan melalui opini atau pendapat dan bahkan *hoax* atau berita palsu. Setidaknya ada dua manfaat menggunakan penyebaran rasa takut dalam kampanye pemilihan umum. Pertama, perasaan takut bisa membuat sebagian rakyat yang masih ragu-ragu atau bimbang bergabung dengan kelompok yang menakut-nakuti untuk memperoleh rasa aman dengan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kedua, membuat lawan tidak berani besuara karena takut ditekan ketika mencoba bersuara atau berpendapat. Akibatnya, usaha kampanye kelompok yang ditekan akan berkurang bahkan mungkin sampai takut memberikan pilihan dalam pemilu.

Kampanye bermodal rasa takut tetap digunakan karena masyarakat sudah terbiasa hidup dengan rasa takut di samping juga terbiasa mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan rasa takut. Tekanan di zaman Orde Baru terekam sangat jelas dalam benak masyarakat, terutama tekanan dalam kebebasan berpendapat dan sentimen anti Cina. Dalam lingkup kehidupan sehari-hari, masyarakat baik miskin maupun kaya terbiasa dihadapkan pada berbagai rasa takut, seperti anak takut terhadap orang tua, guru atau tenaga pendidik, takut ujian, takut gagal, takut terhadap atasan, takut karena masalah ekonomi, takut miskin dan sebagainya. Peradaban manusia sudah terbiasa dengan rasa takut termasuk pemanfaatannya untuk meraih kekuasaan atau untuk mengendalikan masyarakat. Kita sudah begitu terbiasa dan menerima kondisi bahwa rasa takut selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari, namun apakah memang harus demikian? Peradaban manusia kini sudah sangat maju dibandingkan peradaban manusia zaman batu atau kerajaan sekalipun. Teknologi dan industri telah berkembang sangat pesat begitu juga bidang layanan kesehatan sudah sangat maju sehingga risiko kematian karena penyakit menjadi semakin kecil. Namun di bidang psikologi hampir tidak ada kemajuan yang berarti sejak awal peradaban hingga saat ini. Kekerasan, perang dan terorisme masih menghiasi peradaban manusia hingga kini.

Berbicara tentang ancaman terhadap integrasi bangsa harus juga berbicara tentang peradaban bangsa tersebut. Berbicara tentang peradaban bangsa harus juga berbicara tentang masyarakat. Berbicara tentang masyarakat maka harus berbicara tentang perilaku manusianya secara umum. Berbicara tentang perilaku manusia maka kita harus berbicara tentang psikologinya. Tanpa memahami psikologi manusia maka **rasa takut akan terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab** untuk kepentingan kelompoknya. Pemahaman akan rasa takut merupakan kunci untuk mengendalikan masyarakat namun juga bisa digunakan untuk mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Telah banyak teori psikologi yang berusaha menjelaskan rasa takut.

Hampir seluruh teori psikologi saat ini menjelaskan bahwa rasa takut merupakan emosi dasar bawaan dari lahir. Rasa takut akan muncul apabila manusia sedang tertekan atau menghadapi ancaman yang membahayakan. Namun kajian penulis yang tertuang dalam buku berjudul "Mortido" menunjukkan bahwa ternyata **rasa takut bukan bawaan dari lahir dan manusia yang baru lahir sebetulnya tidak memiliki emosi rasa takut** (Jatmiko, 2018, h. 54). Lantas, apa sebetulnya rasa takut? Berdasarkan kajian teoretis penulis, rasa takut termasuk **gangguan psikologis yang paling awal** (Jatmiko, 2018, h. 51). Sebagaimana sakit flu atau pusing merupakan gejala awal gangguan fisik pada hidung dan kepala demikian juga rasa takut merupakan gejala awal dari **terganggunya naluri dasar manusia**.

Naluri Dasar

Ada banyak teori mengenai naluri dasar namun hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai teori yang paling tepat dan sesuai. Semua teori mengenai naluri dasar terkesan berbeda-beda karena melihatnya dari sudut pandang keilmuan yang juga berbeda-beda, meliputi sudut pandang psikologi, biologi, sosial dan sebagainya. Penulis akan mengupas naluri dasar dari sudut pandang psikologi menggunakan teori Sigmund Freud yang telah dimodifikasi dalam buku "Mortido". Freud memperkenalkan libido sebagai dorongan untuk hidup dalam naluri dasar. Freud juga memperkenalkan dorongan untuk mati di dalam naluri dasar. Menurut Freud naluri dasar bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan yakni selalu berusaha ingin dipuaskan atau ingin mencapai kenikmatan (Sarlito, 2002, h. 156). Secara umum teori naluri dasar sangat diterima oleh masyarakat terutama libido atau dorongan untuk hidup dikaitkan dengan naluri seksual yang selalu ingin dipuaskan. Namun ada dorongan lain dalam teori naluri dasar Sigmund Freud yang belum terlalu diterima secara luas, yakni dorongan untuk mati yang muncul dalam bentuk sikap agresif baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Penulis telah melakukan kajian untuk memodifikasi dorongan untuk mati tersebut dan memberinya sebutan Mortido sebagai pasangan dari Libido.

Mortido merupakan dorongan untuk tetap hidup dan bekerja dengan prinsip keawasan (Jatmiko, 2018, h. 39). Prinsip keawasan berasal dari usaha tubuh untuk selalu menjaga keseimbangan homeostasis yakni menjaga kondisi internal tubuh dalam keadaan stabil dan seimbang untuk menjaga kelangsungan hidup setiap sel yang mempengaruhi kehidupan dalam organisme kompleks tersebut dengan tujuan akhir menjaga kelangsungan hidup organisme itu sendiri (Chalik, 2016, h. 2). Bagian di otak yang bertugas menjaga keseimbangan homeostasis adalah hipotalamus. Tugasnya adalah memastikan dan mempertahankan bahwa semua sistem tubuh berjalan secara stabil (Noya, 2018). Fungsi pengawasan ini

berjalan secara otomatis berdasarkan prinsip stimulus dan respons. Misal, ketika suhu panas maka tubuh akan berkeringat sedangkan ketika suhu dingin maka tubuh akan menggigil.

Fungsi pengawasan ini juga bisa muncul ke kesadaran dalam bentuk kewaspadaan manakala informasi yang diterima tubuh mulai mendekati batas toleransi organ dalam upaya menjaga keseimbangan homeostasis sistem. Sebagai contoh, pada sistem pengaturan suhu tubuh suhu udara yang terlalu panas akan membuat manusia lebih waspada dan melakukan tindakan untuk menjaga suhu tubuhnya misal dengan menyalakan AC atau kipas angin atau berpindah tempat ke lokasi yang lebih sejuk. Tindakan manusia tersebut menunjukkan adanya peningkatan kerja otomatis tubuh menjadi tindakan yang disadari dalam bentuk kewaspadaan. Contoh lain, pada kondisi lapar atau haus manusia akan secara aktif mencari makan atau minum. Kondisi ini berasal dari pengawasan terhadap kondisi sistem pencernaan yang meningkat menjadi bentuk kewaspadaan dalam kesadaran. Individu akan menjadi semakin waspada manakala ia semakin kelaparan atau kehausan. Apabila individu tersebut tidak berhasil memperoleh makanan atau minuman maka bisa membahayakan keselamatannya.

Dalam melakukan tugasnya menjalankan fungsi naluri dasar hipotalamus dibantu oleh indera-indera tubuh. Misal pada kebutuhan makanan, dorongan naluri dasar untuk makan akan tergugah apabila individu mencium aroma masakan atau melihat makanan yang menggiurkan. Kondisi ini akan memancing naluri dasar manusia yakni libido dengan prinsip kenikmatannya. Begitu juga dalam menangkap informasi tentang suhu ruangan hipotalamus dibantu oleh kulit untuk merasakan suhu lingkungan. Namun ada informasi-informasi tertentu yang datang secara tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan kerusakan pada indera-indera yang selanjutnya bisa mengganggu keseimbangan homeostasis sehingga secara keseluruhan bisa membahayakan individu yang bersangkutan. Informasi ini biasa kita sebut dengan ancaman. Ancaman adalah informasi atau stimulus yang sudah mendekati atau bahkan melewati ambang batas kemampuan indera-indera untuk menerima stimulus, misal berupa suara keras, luka pada kulit, posisi pada ketinggian, ancaman visual saat berada di dalam mobil yang melaju dengan cepat dan berbagai kondisi ancaman lainnya. Pada kondisi terancam, hipotalamus akan mengaktifkan sistem neuroendokrin bekerja sama dengan syaraf otonom untuk mengeluarkan hormon-hormon yang diperlukan serta mengatur kerja organ yang membuat individu tersebut menjadi waspada. Dalam menjalankan fungsinya hipotalamus juga bekerja sama dengan sistem saraf tulang belakang yang mengatur gerak refleks terutama untuk menjaga tubuh dari ancaman maupun dari kerusakan lebih lanjut yang berkaitan dengan indera tubuh. Misal ketika seseorang mendengar suara keras petir yang

memekakkan telinga maka ia akan melakukan gerak refleks untuk melindungi organ pendengarannya dengan cara menutup telinga. Selain itu ia juga akan berada pada kondisi siaga atau waspada dengan denyut jantung yang meningkat akibat hormon adrenalin. Semakin keras suara yang ia dengar maka ia pun akan semakin tegang atau waspada.

Kewaspadaan yang tinggi ini dipengaruhi oleh hormon adrenalin yang diaktifkan oleh hipotalamus untuk mengaktifkan situasi siaga pada tubuh. Fungsi pengawasan yang semula bersifat otomatis berdasarkan stimulus dan reaksi tubuh beserta gerak refleks akan meningkat menuju kesadaran berupa sikap siaga atau waspada. Kewaspadaan akan membuat tubuh mempersiapkan energi yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman. Selain itu kewaspadaan juga membuat otak mampu berpikir lebih jernih dan lebih cepat untuk mencari solusi dalam menghadapi ancaman. Pada tahap selanjutnya ketika fungsi pengawasan sudah berada di alam sadar atau alam kendali maka individu memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap situasi yang dihadapinya, yakni apakah ancaman itu sudah berlalu atau belum. Apabila ancaman dinilai sudah berlalu maka individu akan kembali menjadi tenang. Namun apabila ancaman yang membahayakan dirasakan masih ada, maka individu akan mengambil keputusan untuk melindungi diri berdasarkan persepsinya, yakni lari, melawan atau bertahan. Artinya, **keputusan untuk lari atau melawan didahului oleh sikap kewaspadaan, sedangkan sikap kewaspadaan didahului oleh prinsip kerja keawasan yang merupakan naluri dasar manusia** dan yang bekerja secara otomatis.

Sebagai contoh, ketika seseorang mendengar suara keras panggilan berupa teriakan "woooiiii", maka ia menjadi kaget. Artinya, karena suara keras itu sudah mendekati ambang batas toleransi pendengaran, adrenalin pun akan membuat jantung berdetak lebih kencang serta membuat orang itu mampu berpikir lebih jernih dalam menilai situasi. Ketika melihat bahwa yang memanggilnya ternyata anak kecil, orang itu mungkin mempersepsikannya bukan sebagai ancaman sehingga menurunkan tingkat kewaspadaannya dan detak jantungnya pun perlahan-lahan kembali normal sambil berkata kepada anak itu, "Ada apaan tong?" Ceritanya menjadi berbeda apabila yang memanggil ternyata orang dewasa tak dikenal sambil mengacungkan golok. Orang itu akan menjadi kaget dan waspada serta akan melakukan penilaian berdasarkan persepsinya mengenai situasi yang dihadapinya. Efek adrenalin akan membuatnya mampu berpikir dengan cepat untuk mengambil langkah yang menurutnya paling tepat, yakni lebih dulu menilai situasi, langsung memutuskan lari, atau justru mengambil sikap agresif untuk melawannya.

Bentuk keawasan ini sangat penting dan merupakan prinsip dasar bagi

makhluk hidup terutama untuk bertahan hidup. **Prinsip keawasan merupakan prinsip kedua di dalam *id*** selain prinsip kenikmatan dalam dorongan untuk berkembang biak. Artinya, dalam diri manusia terdapat dua prinsip yang menjadi motif untuk bertindak, yakni **Prinsip Kenikmatan dan Prinsip Keawasan**. Prinsip kenikmatan bekerja berdasarkan dorongan untuk berkembang, sedangkan prisnsip keawasan bekerja berdasarkan dorongan untuk tetap hidup. Maka, naluri dasar dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut (Jatmiko, 2018, h. 145): **(1) dorongan untuk hidup abadi yang bekerja berdasarkan prinsip keawasan yang disebut dengan mortido;** dan **(2) dorongan untuk berkembang (biak) yang bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan yang disebut dengan libido.**

Prinsip keawasan bekerja lebih dulu dibandingkan prinsip kenikmatan agar makhluk hidup bisa terlebih dahulu tetap hidup melalui pengawasan terhadap sistem homeostasis tubuh. Setelah keseimbangan homeostasis minimal dapat terjaga untuk tetap hidup maka prinsip kenikmatan mendorong untuk pemenuhan kebutuhan diri agar makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal melalui pemenuhan kebutuhan fisiologis. Prinsip kenikmatan mendorong makhluk hidup memilih pemenuhan kebutuhan fisiologis yang lebih nyaman dan nikmat seperti makanan yang lebih enak, tempat tinggal yang lebih nyaman, kasur yang lebih empuk dan sebagainya. Pilihan-pilihan tersebut akan memotivasi makhluk hidup untuk makan lebih banyak, tidur lebih pulas dan nyaman agar dapat berkembang dan beraktivitas lebih maksimal. Kenikmatan dalam hubungan seksual juga mendorong atau memotivasi makhluk hidup untuk tetap mau berkembang biak demi keberlangsungan spesiesnya.

Contoh prinsip keawasan bekerja mendahului prinsip kenikmatan bisa ditemukan pada kebutuhan manusia untuk memperoleh makanan dan tempat beristirahat. Ketika manusia lapar prinsip keawasan akan bekerja dan mendorong manusia untuk mencari makanan. Pada saat mencari makanan prinsip kenikmatan akan mendorong manusia untuk memilih makanan yang bisa memberi kenikmatan yakni makanan yang enak. Begitu juga ketika sedang lelah manusia akan mencari ranjang yang empuk. Namun ketika pilihan makanan tidak ada maka manusia akan memakan apa saja yang bisa dimakan meskipun rasanya tidak enak. Artinya, prinsip kenikmatan tidak bekerja atau bekerja secara minimal demi pemuasan rasa lapar tanpa mempedulikan cita rasanya. Begitu juga ketika sangat kelelahan, manusia tidak perlu memilih istirahat di tempat yang nyaman. Manusia bisa beristirahat di mana pun. Dalam kondisi ekstrem ia bisa jatuh pingsan kehilangan kesadaran di tempat ia berdiri karena kelelahan. Pada kondisi tersebut tentu saja yang bekerja hanya prinsip keawasan terhadap kondisi internal tubuhnya yang membutuhkan istirahat tanpa mempedulikan prinsip kenikmatan untuk mencari tempat yang nyaman dalam beristirahat.

Kerja prinsip keawasan dan prinsip kenikmatan saling terkait dan berbanding terbalik. Ketika prinsip keawasan meningkat maka prinsip kenikmatan akan menurun dan begitu juga sebaliknya. Misal, pada situasi perut mulai merasa lapar, prinsip keawasan mulai bekerja dan menginformasikan pikiran untuk mencari makan. Ketika tahap rasa lapar masih wajar, prinsip keawasan belum terlalu tinggi sehingga manusia bisa memilih-milih makanan yang menurut persespsinya bisa memberikan kenikmatan. Maka, dipilihlah makanan yang menurut persepsinya enak. Namun ketika tubuh merasa sangat lapar, prinsip keawasan akan sangat tinggi sehingga prinsip kenikmatan menjadi sangat rendah. Yang selanjutnya terjadi adalah bahwa manusia akan memakan apa saja yang ia temui dan menurutnya layak dimakan. Begitu juga dengan rasa haus, manusia yang kehausan tidak akan peduli apakah air yang ia minum higienis atau tidak, yang terpenting ia dapat minum untuk menghilangkan rasa hausnya terlebih dahulu.

Ketika kemudian manusia itu sedang makan dengan nikmatnya maka prinsip kenikmatan meningkat sedangkan prinsip keawasan menurun. Ketika ia mulai kenyang maka makan tidak lagi nikmat sehingga prinsip kenikmatan menurun dan prinsip keawasan meningkat berupa munculnya dorongan pada kesadarannya untuk berhenti makan. **Namun ada situasi atau kondisi ketika prinsip keawasan tidak berhasil menghentikan prinsip kenikmatan.** Akibatnya, manusia itu makan dengan sangat rakusnya sampai kekenyangan, suatu kondisi dimana sesungguhnya jumlah makanan yang ia konsumsi sudah cukup namun ia tetap melanjutkan makan sampai kekenyangan. Kegagalan prinsip keawasan menyeimbangkan prinsip kenikmatan sehingga terjadi keserakahan akan makanan seperti itu menunjukan bahwa prinsip kenikmatan telah mengalami gangguan dalam bentuk keserakahan akan makanan yang bisa membuat manusia tersebut mengalami obesitas. Selain keserakahan akan makanan tentu juga ada bentuk keserakahan lain sebagai gangguan terhadap prinsip kenikmatan, seperti keserakahan akan harta, berbagai bentuk kecanduan seperti rokok dan narkoba termasuk kecanduan untuk selalu marah atau menjadi pemarah.

Prinsip keawasan pun juga bisa mengalami gangguan sehingga prinsip kenikmatan tidak mampu menurunkan prinsip keawasan yang sudah terlampau tinggi. Misal pada orang yang mengalami kondisi depresi, prinsip keawasannya terlampau tinggi sehingga berbagai kegiatan menyenangkan yang bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan tidak dapat memulihkan kondisi depresinya. Gangguan kecemasan dan paranoia juga termasuk bentuk gangguan terhadap prinsip keawasan dan bisa berubah menjadi gangguan prinsip kenikmatan apabila individu yang mengalaminya memiliki ketergantungan atau kecanduan

tertentu untuk menghilangkan rasa cemasnya. **Terganggunya prinsip keawasan dan prinsip kenikmatan bermula dari gangguan dari prinsip keawasan yang seharusnya muncul menjadi sikap waspada pada kesadaran namun terganggu menjadi sikap rasa takut yang kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk gangguan lainnya**.

Kewaspadaan dan rasa takut memiliki reaksi fisiologis yang sama yakni denyut jantung yang meningkat dan sikap tubuh yang siaga atau tegang. Perbedaannya terletak pada kemampuan berpikir. **Pada kewaspadaan kemampuan berpikir akan meningkat** karena faktor hormon adrenalin sedangkan **pada rasa takut kemampuan berpikir justru menurun** bahkan sampai mengalami kesulitan berpikir. Lantas mengapa ada orang yang menjadi waspada dan ada yang menjadi takut saat dihadapkan pada situasi ancaman yang sama? Berdasarkan pendekatan prinsip keawasan, **kewaspadaan merupakan sikap natural dan sehat** dalam menghadapi ancaman. Sebaliknya, **rasa takut merupakan sikap yang tidak sehat** dan merupakan bentuk gangguan dari sikap kewaspadaan.

Rasa Takut

Selanjutnya kita akan melihat bagaimana prinsip keawasan menjadi emosi rasa takut. Misal, bayi atau anak kecil akan menjadi waspada ketika mendengar suara yang keras. Selama suara keras itu masih dalam batas wajar atau sesekali menyentuh ambang batas kemampuan pendengaran, maka bayi hanya terkejut dan menjadi waspada serta akan kembali tenang apabila orang tua langsung sigap menenangkannya. Namun apabila suara keras itu berlangsung terus-menerus dan tidak ada tindakan atau bantuan untuk menenangkan si bayi maka suara keras tersebut akan menganggu ambang batas pendengaran bayi. Kondisi ini merupakan bentuk ancaman bagi bayi sehingga hipotalamus akan mengaktifkan hormon adrenalin dalam rangka mempersiapkan kondisi bagi bayi untuk menghadapi ancaman dan yang membuatnya akan menangis lebih keras. Pengalaman tersebut selanjutnya akan direkam di hipokampus berkoordinasi dengan amigdala (McGaugh dkk, 1996) **namun sayangnya belum disertai kemampuan berpikir. Kondisi inilah yang kita sebut dengan berubahnya kewaspadaan menjadi rasa takut**.

Hal yang berbeda terjadi pada orang dewasa. Reaksi fisik terhadap ancaman akan disimpan di amigdala disertai kemampuan berpikir secepat dan seefektif mungkin untuk mengatasi ancaman tersebut. Misal, seorang petinju berlatih menghadapi ancaman serangan lawan dengan cara menghindari pukulan lawan. Kemudian petinju itu dilatih melakukan gerakan pukulan

balasan secepatnya. Kondisi ini menunjukkan respons cepat dari reaksi fisik dan kemampuan berpikir yang disimpan di amigdala serta bagian otak dan organ lainnya yang menunjang. Namun orang dewasa juga bisa mengalami perubahan dari kewaspadaan menjadi rasa takut apabila mengalami tekanan atau ancaman terus-menerus dalam waktu berdekatan. Prosesnya adalah sebagai berikut. Setiap ancaman akan menghasilkan kortisol yang berfungsi memberi perintah kepada sel-sel otak yang lelah untuk melakukan bunuh diri agar selanjutnya digantikan oleh sel-sel baru (Crochemore dkk, 2005). Pada ancaman yang terus-menerus jumlah kortisol di otak akan menumpuk dan akan lebih banyak sel-sel yang sudah lelah serta mendapatkan perintah untuk bunuh diri dibandingkan sel-sel yang masih segar yang bisa digunakan untuk berpikir. Kondisi ini membuat otak tidak lagi mampu digunakan untuk berpikir meski didorong oleh hormon adrenalin sekalipun. Akibatnya, apabila individu terus-menerus mendapatkan tekanan akan muncul reaksi fisik terhadap ancaman itu disertai ketidakmampuan berpikir. Inilah memori yang kita sebut dengan rasa takut.

Misal pada bidang pekerjaan penjualan, penjual yang terus-menerus ditolak akhirnya merasa lelah dan takut untuk kembali berjualan. Kemudian tanpa ancaman yang bertubi-tubi pun, cukup hanya dengan satu ancaman sejenis, rasa takut itu akan muncul sebab respons terhadap ancaman itu sudah tersimpan di amigdala yang menyebabkan penjual itu tidak mau lagi berjualan. Penjual yang memiliki latar belakang memori rasa takut yang besar pada waktu bayi akan lebih mudah mengalami rasa takut apabila mengalami tekanan karena ditolak dalam berjualan. Semua orang yang terus-menerus mengalami tekanan cepat atau lambat akan mengalami ketidakmampuan berpikir atau rasa takut yang bisa mengarah pada gangguan psikologis lainnya seperti kecemasan, depresi, dan ketergantungan.

Pola asuh yang salah bisa merubah prinsip keawasan yang semestinya menjadi kewaspadaan menjadi rasa takut ketika muncul ke alam sadar. Pola hidup yang penuh tekanan atau ancaman hidup yang bertubi-tubi juga bisa merubah kewaspadaan menjadi rasa takut di alam sadar. Trauma psikologis berupa kejadian tunggal juga bisa merubah prinsip keawasan menjadi rasa takut. Pada kejadian trauma berupa ancaman yang bahkan bisa menghilangkan nyawa, individu tidak memiliki ide atau jalan keluar melalui pemikirannya sehingga memori ketidakmampuan berpikir itu tersimpan di memori amigdala. Rasa takut yang ditimbulkan pada trauma psikologis tentu lebih kuat dibandingkan rasa takut pada masa bayi atau rasa takut akibat mengalami tekanan bertubi-tubi. Pada trauma psikologis individu sudah mampu berpikir bahwa nyawanya terancam, bayi belum memiliki konsep seperti itu, sedangkan pada tekanan yang berulang-ulang misal pada tim penjualan ancaman itu tidak akan sampai

membahayakan nyawa. Namun tiga bentuk ancaman itu – pada masa bayi, tekanan yang berulang-ulang dan trauma psikologis – sama-sama berdampak merubah prinsip keawasan yang semestinya menjadi kewaspadaan pada alam sadar namun justru menjadi rasa takut sebab ketiga bentuk ancaman itu menghasilkan **ketidakmampuan berpikir** untuk menghadapi ancaman yang disimpan di hipokampus-amigdala.

Rasa Marah

Rasa takut bisa berkembang menjadi berbagai gangguan psikologis lain, salah satu di antaranya yang terdekat adalah gangguan rasa marah. Rasa marah adalah perkembangan gangguan rasa takut terhadap libido dimana **rasa takut tersebut dilampiaskan secara agresif untuk memuaskan libido yang kita sebut rasa marah**. Ada kepuasan dalam rasa marah sebab ada penyaluran energi yang terpendam dari rasa takut serta pemuasan kenikmatan yang merupakan gangguan dari libido. Pada rasa marah terdapat sikap agresif tanpa disertai kemampuan berpikir jernih sebab rasa marah berasal dari rasa takut, khususnya dari memori ketidakmampuan berpikir. Tindakan agresif ini akan sangat merugikan orang lain. Jika dikaitkan dengan kondisi politik di Indonesia tindakan agresif seperti ini cukup marak dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi. Rasa marah seperti ini banyak dimanfaatkan untuk menakut-nakuti pihak lawan di dalam kehidupan politik, agresivitas yang tidak disertai kemampuan berpikir jernih. Rasa marah ini sangat mudah terpancing di dalam sebuah kelompok sosial. Akibatnya, risiko terjadinya benturan antar kelompok sosial di masyarakat pun meningkat. Dalam kejadian bentrok atau pengeroyokan biasanya ada segelintir orang baik dari kelompok itu sendiri maupun dari luar kelompok itu yang akan berusaha menenangkan suasana. Orang-orang seperti ini masih mampu berpikir jernih dan tidak dikuasai oleh rasa marah. Sayangnya jumlah orang yang mudah terbakar rasa marahnya di dalam kelompok biasanya lebih besar dibandingkan jumlah mereka yang mampu berpikir jernih dan berusaha menenangkan suasana.

Rasa marah di dalam kelompok sangat mudah diprovokasi terutama karena adanya dukungan kelompok. Akibatnya, orang merasa memiliki kekuatan di dalam kebersamaan sehingga lebih berani untuk bertindak agresif. Kondisi ini rentan terjadi dalam tahun politik karena terjadi pengelompokan dalam masyarakat sehingga bisa memunculkan potensi terjadinya benturan antar kelompok masyarakat. Kondisi ini juga mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana dengan membangkitkan rasa marah tersebut atau melalui ungkapan-ungkapan provokasi yang bisa menggerakkan kelompok

masyarakat tertentu. Politik dengan rasa marah pada dasarnya tidak berbeda dengan melakukan penyebaran rasa takut. Menakut-nakuti dan membakar rasa marah merupakan cara-cara psikologis dalam meningkatkan fanatisme guna menekan lawan politik. Cara seperti inilah yang berisiko sangat tinggi menumbuhkan potensi ancaman terhadap integrasi bangsa. **Politik dengan rasa takut dan rasa marah jelas akan menghilangkan kemampuan untuk berpikir jernih, menghilangkan kemampuan untuk berpikir menggunakan akal sehat**.

Tindakan agresif pada dasarnya merupakan bentuk pertahanan diri dan semua manusia mampu bertindak agresif baik untuk pertahanan diri maupun untuk mendapatkan keinginannya. Pada dorongan mortido yang tidak terganggu oleh rasa takut, tindakan agresif untuk bertahan atau untuk mendapatkan keuntungan akan disertai kemampuan berpikir yang jernih bahkan akan lebih jernih atau lebih baik dibandingkan biasanya. Anda mungkin pernah mendengar istilah "jurus kepepet". Jika Anda tipe pembelajar kebut semalam menjelang ujian saat sekolah dulu maka Anda menggunakan kemampuan "jurus kepepet" ini. Jurus ini bisa muncul karena hormon adrenalin membuat kinerja otak meningkat, namun kondisi ini hanya berlaku bagi orang yang tidak takut terhadap tekanan atau ancaman sehingga ia mampu berpikir jernih. Bagi orang yang sudah dikuasai rasa takut ia tidak akan mampu berpikir jernih karena otak tidak bisa mengakses bagian otak untuk berpikir dan justru mengakses bagian amigdala yang berisi memori ketidakmampuan berpikir. Akibatnya, orang tersebut malah menjadi panik menghadapi ancaman.

Tindakan agresif untuk menyerang atau mengambil keuntungan jika tidak diiringi rasa marah akan membuat pelaku mampu berpikir jernih. Sebaliknya jika disertai rasa marah maka kemampuan berpikirnya akan menjadi rendah sehingga justru bisa mengakibatkan kerugian lebih besar bagi dirinya maupun orang lain. Tindakan agresif berdasarkan rasa marah banyak terjadi pada kasus-kasus kriminal disertai tindakan kekerasan baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok orang. Fenomena semacam ini ternyata juga terjadi pada kehidupan politik di negara tercinta ini. Ketika tertangkap pelaku biasanya akan mengatakan khilaf. Hal itu mungkin memang benar sebab ia tidak mampu berpikir jernih ketika melakukannya. Hanya sesudah rasa marah berupa libido yang terganggu itu terpuaskan, kemampuan untuk berpikir jernih akan kembali. Alhasil yang kemudian muncul adalah **penyesalan**.

Gangguan Tingkat Lanjut

Pada tingkat selanjutnya rasa takut juga bisa berubah menjadi

kecemasan, yakni rasa takut pada hal yang tidak memiliki sumber yang jelas secara nyata. Kecemasan bisa disalurkan dengan rasa marah. Orang yang menyalurkan kecemasan dengan rasa marah cenderung menjadi pemarah atau suka marah-marah. Kecemasan juga bisa disalurkan dengan berbagai cara lain, yang paling umum adalah dalam bentuk ketergantungan mulai ketergantungan pada makanan, rokok, sampai narkoba. Jika tidak disalurkan dalam bentuk ketergantungan, kecemasan bisa semakin berkembang menjadi paranoia, yakni ketakutan atau kecemasan yang berlebih. Orang-orang dengan tingkat paranoia tinggi akan memiliki tingkat toleransi yang sangat rendah akibat tingginya rasa curiga. Apabila sudah sampai tahap ini maka orang akan sangat mudah terserang delusi atau keyakinan yang salah.

Gabungan antara delusi dan intoleransi merupakan kondisi yang sangat berbahaya di masyarakat. Pada tingkatan ekstrim akan menghasilkan terorisme. Paranoia yang sangat menghantui akan membuat seseorang berusaha menyalurkan ketakutannya dengan tindakan agresif berupa kekerasan dalam wujud intoleransi. Apabila disertai delusi kondisi ini akan membuat orang itu tidak mampu mentoleransi pandangan atau pendapat yang berbeda dengan dirinya sehingga pihak yang berbeda dianggap sebagai ancaman. Kondisi ini tentu akan sangat membahayakan Bangsa dan Negara Indonesia serta bisa mengancam integrasi bangsa yang mimiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi mulai terbentuk kelompok-kelompok yang memiliki toleransi rendah terhadap kelompok lain dan mengganggap kelompoknya lebih pantas untuk mengatur, mengendalikan dan menguasai negara. Dasar negara Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak membedakan Suku Agama Ras dan Antar golongan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa pun menjadi terancam.

Ada bentuk ketergantungan lain yang lebih berbahaya namun belum terlalu disadari serta cenderung dibiarkan, yakni ketergantungan ekonomi baik berupa uang, harta maupun penghasilan. Bentuk ketergantungan inilah yang menghasilkan **keserakahan**. Pada gangguan keserakahan, rasa cemas coba diatasi dengan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyakanya. Ciri khas ketergantungan ekonomi adalah bahwa seberapa banyak pun harta tidak akan mampu menghilangkan rasa cemas. Akibatnya, orang berani mengambil risiko lebih besar dalam mengumpulkan kekayaan melalui tindakan-tindakan yang melanggar etika dan peraturan mulai dari tindak kekerasan sampai tindak pidana korupsi.

Keserakahan masih menjadi salah satu motivasi yang menonjol di kalangan para politikus, terbukti dari banyaknya elit politik yang terlibat kasus korupsi. Keserakahan dan politik menjadi satu ikatan karena politik

menawarkan kekuasaan dan keserakahan membutuhkan kekuasaan untuk bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Kekuasaan juga memberikan kontrol atau kendali untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi sehingga memberikan rasa aman. Kontrol atau kendali terhadap orang lain juga bisa memberikan kepastian terhadap pemegang kekuasaan untuk memberikan rasa aman bagi dirinya. Ketergantungan terhadap kekuasaan baik untuk kepentingan ekonomi maupun untuk memuaskan kebutuhan akan kepastian membentuk kepribadian-kepribadian yang haus akan kekuasaan. Motivasi keserakahan dan haus kekuasaan masih luput dari perhatian peradaban manusia. Akibatnya, bukan hanya di kalangan elit namun bahkan dalam kehidupan keluarga maupun tempat kerja sering muncul sikap agresif disertai arogansi dan kemarahan dalam berebut kekuasaan khususnya oleh pemegang kuasa atau otoritas.

Elit politik yang serakah atau haus kekuasaan cenderung berusaha mendapatkan kekuasaan dengan menyebarkan rasa takut atau rasa marah yang diperkuat dengan pembentukan opini atau keyakinan yang berbahaya bagi integrasi bangsa. Keserakahan dan haus kekuasaan merupakan hasil pengembangan rasa takut dan rasa marah. Akibatnya, dalam memperoleh kekuasaan pun orang juga melakukannya dengan menyebarkan rasa takut dan rasa marah. Sasarannya tentu saja adalah masyarakat yang mudah ditakut-takuti dan mudah diprovokasi dengan rasa marah, masyarakat yang sulit untuk berpikir jernih. Elit politik semacam ini juga meyakini bahwa kekuasaan bisa didapatkan dengan rasa takut dan rasa marah. Penyebaran *hoaks* atau berita palsu untuk membentuk opini tertentu sehingga masyarakat bisa diprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis berdasarkan rasa marah merupakan cara yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa karena berpotensi mengakibatkan perpecahan dan saling curiga di antara warga masyarakat. Persaingan politik yang sehat adalah persaingan berdasarkan fakta dan persaingan menawarkan ide-ide dan solusi untuk memajukan bangsa. Elit politik yang dalam berkampanye atau menyebarkan ide didasarkan rasa takut atau marah serta menyebarkan keyakinan yang menakut-nakuti sehingga menumbuhkan rasa saling curiga dalam masyarakat yang bisa mengurangi makna Bhinneka Tunggal Ika, jelas dikuasai rasa takut dan amarah yang membuatnya serakah dan haus kekuasaan. **Kekerasan tidak pernah bisa menjadi solusi untuk masalah apa pun**.

Takut dan Marah

Bahaya rasa takut dan marah saat ini belum terlalu disadari oleh peradaban manusia. Gangguan-gangguan psikologis turunan dari takut dan marah seperti kecemasan atau kebiasaan marah-marah yang bisa berakibat buruk

memang sudah disadari oleh para pemerhati kesehatan psikologis namun belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat. Akibat buruk penggunaan rasa takut dan marah di masyarakat mulai terasa di era media sosial melalui penyebaran *hoaks* atau berita palsu dan bentuk-bentuk provokasi yang bisa mengarah kepada perpecahan bangsa. Fenomena itu marak terutama di tahun politik ketika persaingan untuk memperebutkan kekuasaan dilakukan dengan cara-cara yang menakut-nakuti atau memprovokasi. **Kekuasaan yang didapatkan dengan cara demikian hanya akan menghasilkan ketakutan-ketakutan dan rasa marah yang semakin meluas serta akan sulit dikendalikan kecuali dengan cara yang represif dan apabila ini yang terjadi maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan kembali mengalami kemunduran**. Manusia yang ketakutan akan kehilangan kemampuan berpikir kritis meskipun orang tersebut pintar. Ia akan kesulitan untuk bisa memecahkan masalah karena pemikirannya sudah dipenuhi dengan rasa takut yang penuh dengan rasa pesimistis. Masyarakat yang berisi orang-orang yang ketakutan dan pesimistis akan sangat mudah dikendalikan oleh penguasa untuk keuntungan penguasa. Maka yang terjadi selanjutnya adalah penurunan kualitas SDM (sumber daya manusia) karena kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Penurunan kualitas SDM secara otomatis akan mengurangi kemampuan daya saing bangsa, kemajuan bangsa pun akan terhambat. **Rasa takut dan rasa marah tidak akan memberikan solusi apa pun untuk kemajuan bangsa**.

Pandangan atau persepi kita terhadap rasa takut dan rasa marah perlu diubah, yakni bukan sebagai sesuatu yang normal dan wajar dimiliki oleh setiap manusia, melainkan **rasa takut dan rasa marah merupakan gangguan awal dari psikologis manusia sehingga perlu dihindari, diwaspadai, diperhatikan dan sedini mungkin dipulihkan sebelum semakin berkembang menjadi bentuk gangguan psikologis lainnnya yang sulit untuk dipulihkan**. Cara mengurangi pengaruh buruk dari rasa takut dan rasa marah adalah: **jangan dengan sengaja membuat orang lain merasa takut, jangan dengan sengaja menyebarkan rasa takut, jangan mengumbar kemarahan apalagi bergantung kepada rasa marah serta bentuk arogansi lainnya untuk menyelesaikan masalah, jangan juga membuat orang lain menjadi marah**. Perubahan persepsi ini perlu dilakukan pada semua lapisan masyarakat, di rumah tangga melalui pola asuh, di dunia pendidikan melalui hubungan antara murid dengan guru maupun hubungan antar murid, di dunia kerja melalui hubungan antara atasan dengan bawahan maupun dengan sesama rekan kerja, dan di dunia sosial melalui hubungan pertemanan termasuk di dalamnya media sosial.

Apabila rasa takut dan rasa marah bisa diperlakukan sebagai gangguan psikologis paling awal seperti penyakit flu atau pusing sebagai gangguan fisik

paling awal, maka mortido dan libido tidak akan mengalami gangguan yang berarti dan bisa berkembang maksimal sesuai dengan fungsinya. Mortido yang berkembang dengan baik akan membuat seseorang bisa berpikir dengan jernih ketika sedang berada di dalam tekanan karena hormon adrenalin mampu membuat otak bekerja lebih keras untuk membantu berpikir menyelesaikan masalah dan tekanan. Tidak adanya rasa takut di amigdala membuat kemampuan berpikir di otak tidak diserobot oleh rasa takut yang ada di amigdala. Kemampuan berpikir kritis pun akan semakin terasah sehingga amigdala akan berisi memori yang berisi pengalaman-pengalaman dalam berpikir kritis ketika ada tekanan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya libido akan membuat individu mempunyai dorongan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik melalui rasa ingin tahu yang membuat penasaran serta tidak ada rasa takut, rasa khawatir maupun rasa cemas untuk menjawab rasa penasarannya. Perubahan persepsi ini bukan hal yang mudah. Perlu keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan peradaban masyarakat menjadi lebih baik, dimulai dari pola asuh di dalam keluarga kemudian pola pendidikan dan selanjutnya pola kehidupan baik di dunia kerja maupun dalam interaksi sosial sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pola Asuh, Pola Pendidikan dan Pola Kehidupan

Pola Asuh. Semuanya berawal dari pola asuh. Kekeliruan dan kesalahan dalam pola asuh akan terus terbawa sampai dewasa terutama pola asuh yang membuat bayi dikuasai oleh rasa takut yang timbul akibat tekanan. Orang tua yang pemarah, suka bertengkar, sering memarahi, memukul atau menyakiti anak bahkan ketika anak masih bayi hanya akan menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas rendah. Kendati anak tersebut pintar dan memperoleh gizi yang baik, namun kondisi psikologisnya sudah memiliki bibit-bibit gangguan psikologis berupa rasa takut yang akan terbawa sampai dewasa dan bisa berkembang menjadi berbagai gangguan psikologis lainnya. **Pola asuh yang menimbulkan banyak rasa takut pada anak akan mematikan kemampuan berpikir kritis dan kreatif ketika dewasa nanti**.

Peran orang tua adalah menjaga agar sikap waspada bayi tidak berubah menjadi rasa takut. Orang tua perlu menjaga agar bayi tidak jatuh ke dalam rasa takut apalagi dengan sengaja memberikan rasa takut. Bayi perlu terus dijaga tingkat keawasannya dan seiring bertambahnya usia kemampuannya untuk waspada terhadap situasi sekitar akan meningkat. Kemampuan waspada inilah yang perlu diasuh sebagai pengganti rasa takut, **karena sikap waspada merupakan perkembangan dari dorongan alami prinsip keawasan mortido**

dan rasa takut merupakan gangguannya.

Dorongan mortido membuat anak usia dua atau tiga tahun bisa bersikap waspada terhadap situasi yang berbahaya tanpa harus ditakut-takuti dan bahkan sudah bisa melakukan pengaturan sederhana sebagai bentuk dorongan keteraturan dari mortido untuk menjaga keharmonisan guna meningkatkan peluang hidup. Dorongan ini bersifat alami namun tetap perlu didorong oleh peran orangtua dengan memberikan contoh keharmonisan serta menjaga agar anak tidak tertekan dan tidak dikuasai oleh rasa takut serta dengan pemberian kasih sayang dan pengasuhan yang baik kepada anak. Rasa kasih sayang saja tidak cukup untuk membuat anak merasa aman. Juga diperlukan perlindungan psikologis agar anak tidak terjebak ke dalam rasa takut, apalagi takut terhadap orang tuanya sendiri. Takut kepada orang tua merupakan awal gangguan psikologis baik itu takut terhadap ibu maupun terhadap ayah. Anak yang memiliki rasa takut kepada orang tua secara otomatis akan memiliki rasa aman yang rendah meskipun secara fisik anak tersebut berada di tempat yang aman. Anak juga akan merasa takut terhadap orang dewasa secara umum, kemudian akan berkembang menjadi rasa takut bersosialisasi maupun menghadapi lingkungan baru. Rasa takut tersebut bisa terus berkembang menjadi bentuk gangguan psikologis lainnya sehingga akan menghasilkan kualitas SDM yang rendah. **Sangat penting menjaga anak agar tidak jatuh ke dalam rasa takut dalam pola asuh dan perkembangannya.**

Apabila mortido dapat berkembang dengan baik sehingga naluri anak untuk tetap hidup dapat tumbuh dan berkembang sebagai jagaan diri sendiri maka rasa aman anak akan terpenuhi. Apabila rasa aman sudah terpenuhi maka dorongan libido bisa berkembang dengan baik. Pemberian kasih sayang yang membuat anak merasa nyaman dan senang akan merangsang libido anak dengan prinsip kenikmatannya. Dorongan dari libido akan mendorong anak untuk mengembangkan diri. Rasa penasaran dan ingin tahu anak akan tumbuh sehingga anak memiliki kemampuan eksplorasi yang baik sebagai dasar bagi proses pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Pengembangan mortido dan libido yang seimbang dan sehat akan membuat anak memiliki dasar yang kuat untuk berpikir kritis dan kreatif dalam proses pembelajaran berikutnya di dunia pendidikan, yakni mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah serta mampu berpikir kreatif dalam mengembangkan ide-ide untuk pengembangan diri dan lingkungan.

Pola Pendidikan. Tema perubahan pola pendidikan di Indonesia sudah sering diangkat namun belum juga ditemukan pola pendidikan yang sesuai. Pola pendidikan yang mengandalkan kemampuan menghafal sudah disepakati untuk ditinggalkan. Anak mulai didorong untuk mampu memahami

dan memaknai ilmu pengetahuan serta manfaat praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang didasari kemampuan berpikir kritis dan kreatif terus dikedepankan. Namun untuk merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif, anak harus dibebaskan dari rasa takut dan digantikan dengan rasa penasaran dan minat yang tinggi untuk belajar. Kondisi ini mensyaratkan pola pendidikan yang tepat dalam mengembangkan mortido dan libido yang terbebas dari gangguan rasa takut. Pendidik juga harus mulai meninggalkan pola didik yang keras dan hukuman sebagai solusi untuk membuat murid disiplin, khususnya hukuman yang menghasilkan rasa takut. Pendidik perlu memahami alasan psikologis anak melakukan kesalahan sehingga bisa memberikan bantuan dan solusi bagi anak agar bisa memahami kesalahannya serta menemukan solusi agar pengembangan diri anak menjadi lebih baik. Hal ini tentu saja tidak mudah namun bisa dikondisikan terutama apabila para pendidik memahami bahwa rasa takut yang muncul dari hukuman justru akan membahayakan diri anak itu sendiri. Secara tidak sadar pendidik bisa menjadi pelaku perundungan bagi si anak dengan alasan mendidik melalui hukuman-hukuman.

Perubahan pola pendidikan ke arah yang lebih baik sudah terjadi, bahkan justru mulai muncul beberapa kasus dimana siswa melakukan kekerasan kepada pendidik karena pendidik mulai mengurangi ketegasan dan hukumannya kepada siswa. Tentu saja kondisi ini memprihatinkan. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa perubahan pola pendidikan tidak diringi dengan perubahan pola asuh dan pola kehidupan sosial di masyarakat. Pola asuh yang membiarkan dan bahkan menumbuhkan rasa takut dan rasa marah akan menciptakan anak-anak yang mudah takut dan mudah marah. Ketika pola pendidikan di sekolah sudah mulai tidak lagi memberikan tekanan untuk membuat siswa menjadi takut maka siswa yang memiliki gangguan rasa marah bisa melakukan tekanan balik kepada pendidik apabila ia merasa tertekan oleh situasi pendidikan. Perubahan pola pendidikan harus disertai dengan perubahan pola asuh terutama dalam mengurangi penyebaran rasa takut dan rasa marah baik secara individual maupun kelompok. Begitu juga dalam pertemanan antar siswa, pemahaman untuk saling menjaga dan tidak menyebarkan rasa takut atau rasa marah baik disengaja maupun tidak perlu untuk terus disosialisasikan.

Perubahan pola asuh dan pola pendidikan saat ini berfokus pada perlindungan anak dari tindak kekerasan. Kondisi ini sudah cukup baik namun perlu diperkuat dan perlu perubahan yang lebih mendasar untuk membentuk generasi masa depan yang mampu berpikir jernih dan kritis. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu perubahan mendasar tentang persepsi akan rasa takut dan rasa marah sebagai gangguan paling dasar. Secara sadar pendidik harus mendidik anak dengan tidak membuat anak merasa takut dan tidak

mengandalkan rasa marah untuk menyelesaikan masalah, sebaliknya anak perlu dididik menggunakan pikiran yang jernih meskipun hal tersebut cukup sulit. Dengan konsistensi pola asuh dan pola pendidikan yang tidak menimbulkan rasa takut dan dengan tidak membudayakan rasa marah dalam mendidik maka diharapkan akan tercipta generasi penerus di masa depan yang mampu berpikir jernih dalam berusaha menyelesaikan berbagai masalah.

Pola Kehidupan. Jika pola kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan rasa marah dengan memperlakukan rasa takut dan rasa marah sebagai gangguan psikologis paling awal dapat terlaksana maka akan tercipta masyarakat yang mampu berpikir jernih dan mampu menyaring informasi secara kritis, tidak mudah dipengaruhi oleh berita palsu yang menakut-nakuti atau memprovokasi untuk memunculkan rasa marah, serta mampu berpikir jernih meskipun mendapatkan berita-berita yang secara faktual memang memberikan tekanan atau ancaman sehingga tetap bisa mencari solusi yang tepat. Kondisi ideal ini dapat terbentuk dengan adanya perubahan pola asuh dan pola pendidikan sebagai dasarnya yang kemudian akan mengarah pada perubahan pola kehidupan di berbagai bidang. Masyarakat yang memiliki rasa takut dalam usahanya memenuhi kebutuhan ekonomi tentu juga akan sangat mudah ditakut-takuti atau diprovokasi dalam bidang politik.

Selain pola asuh dan pola pendidikan, perubahan sikap kerja terutama dalam berkompetisi juga perlu dilakukan. Tingkat kompetisi di dunia kerja yang sangat tinggi dan sudah sangat tidak sehat akan menyulitkan masyarakat untuk berpikir jernih. Perubahan budaya kerja yang sesedikit mungkin menyebarkan rasa takut dan mengurangi rasa marah akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengurangi penyebaran rasa takut dan rasa marah di masyarakat. Meskipun akan sulit merubah tingkat kompetisi yang nyaris menghalalkan segala cara termasuk melanggar undang-undang, kita perlu terus mencoba secara sadar bukan hanya berusaha berkompetisi secara halal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melainkan juga tidak menyebarkan rasa takut dengan cara tidak menekan bawahan agar takut terhadap atasan maupun tidak menjadikan rasa marah sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Saat ini tanpa sadar peradaban masih mudah menyebarkan rasa takut terutama dalam berkompetisi di dunia kerja serta memanfaatkan rasa marah untuk mendapatkan keuntungan atau kendali di dunia kerja. Hal ini terjadi sebab pola asuh dan pola pendidikan masih mempersepsikan rasa takut dan rasa marah sebagai hal yang wajar serta memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik ekonomi maupun kekuasaan atau kontrol.

Pola kehidupan masyarakat dalam berpolitik juga masih kental dengan nuansa menakut-nakuti, melakukan tekanan atau melakukan provokasi yang

bisa membangkitkan rasa marah pada masyarakat untuk bertindak agresif atau anarkis. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan keluhan bahwa energi bangsa terkuras untuk hal-hal yang tidak produktif karena perbedaan. Memanfaatkan rasa takut dan rasa marah dalam berpolitik membuat rasa takut dan rasa marah tersebut mengendap di alam bawah sadar masyarakat. Akibatnya, rasa saling curiga sulit dihilangkan dan masyarakat pun sangat rentan dipecah belah sehingga berisiko terjadi disintegrasi bangsa. Sudah cukup bangsa ini memanfaatkan rasa takut dan rasa marah dalam perebutan kekuasaan seperti yang terjadi pada peristiwa G30S/PKI 1965 dan kerusuhan Mei 1998. Akan sangat sulit membuat masyarakat fokus terhadap pembangunan apabila alam bawah sadar masyarakat masih berisi rasa takut dan rasa marah yang terus dipolitisasi untuk perebutan kekuasaan.

Apabila elit politik tidak lagi memanfaatkan rasa takut dan rasa marah untuk menggalang dukungan melainkan berkompetisi melalui visi-misi program dan peranan ke masyarakat luas maka masyarakat tidak lagi dibebani oleh rasa takut dan rasa marah yang bisa mengendap di alam bawah sadar. Masyarakat juga akan belajar untuk berpikir kritis mencari solusi dengan memahami visi-misi serta program yang ditawarkan para elit politik. Yang tidak kalah penting adalah agar masyarakat tidak lagi menggunakan rasa takut maupun rasa marah dalam memilih calon pemimpin, sehingga setelah selesai berkompetisi dalam politik tidak ada lagi beban rasa curiga yang timbul dari rasa takut dan rasa marah yang terpendam melainkan ikut berpikir kritis mencari solusi bersama bagi permasalahan bangsa serta berpikir kreatif menyumbangkan ide untuk kemajuan bangsa dan negara. **Elit politik memiliki peran krusial untuk merubah persepsi masyarakat terhadap rasa takut dan rasa marah**.

Revolusi Mental membentuk SDM Unggul Indonesia Maju

Presiden Joko Widodo memiliki program Revolusi Mental bertema "Membangun Jiwa Merdeka Menuju Bangsa Besar" (Kominfo, 2015) serta "SDM Unggul Indonesia Maju" (Hari Kemerdekaan ke-74 tanggal 17 Agustus 2019). Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Indonesia betul-betul ingin memajukan kualitas SDM Bangsa Indonesia. Namun rencana Pemerintah ini mendapatkan tantangan luar biasa terutama dalam tahun politik. Gaung revolusi mental langsung tenggelam oleh ancaman disintegrasi bangsa. Artinya, program revolusi mental saat ini belum mampu menghasilkan perubahan yang cukup mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan persepsi dan pola pikir akan rasa takut dan rasa marah kiranya bisa memberikan solusi untuk menghasilkan perubahan yang mendasar yang perlu diterapkan dalam pola asuh, pola

pendidikan, dan pada pola hidup di semua bidang kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan minimnya rasa takut dan rasa marah di masyarakat maka secara otomatis mortido dengan prinsip keawasannya akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis sedangkan libido dengan prinsip kenikmatannya secara otomatis akan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. **Di dalam kehidupan berpolitik, kemampuan berpikir kritis akan berkembang tanpa mengalami gangguan berarti dari rasa takut dimana masyarakat tidak mudah ditakut-takuti serta diprovokasi untuk membangkitkan rasa marah namun mampu berpikir jernih, kritis dan kreatif untuk mencari solusi permasalahan bangsa serta mengembangkan ide untuk membangun bangsa dan negara.**

Perubahan persepsi terhadap rasa takut dan rasa marah akan menghasilkan Revolusi Mental dengan kualitas SDM yang kuat sehingga akan menciptakan integrasi bangsa yang kuat dan sulit untuk dipecah-belah karena masyarakat tidak mudah ditakut-takuti dan diprovokasi. Pada bidang ekonomi perlu diciptakan iklim kerja yang sehat dengan mengedepankan budaya gotong royong daripada kompetisi yang saling menghancurkan. Tingkat kompetisi yang terlalu tinggi akan cenderung menghalalkan segala cara termasuk menggunakan rasa takut dan rasa marah yang akan membuat peradaban manusia terus terperangkap di dalam rasa takut dan rasa marah. Lingkungan bumi termasuk hewan dan tumbuhan juga menjadi korban persaingan ekonomi antar manusia terutama sejak memasuki era persaingan industri yang sangat menguras sumber daya alam. Perubahan persepsi terhadap rasa takut dan rasa marah di bidang ekonomi akan membuat manusia mampu berpikir kritis dan jernih sehingga tidak akan lagi ada keinginan untuk berkompetisi secara tidak sehat yang bisa merusak psikologis manusia lainnya dan merusak lingkungan bumi. Peradaban manusia dengan pemikiran kritis dan kreatif akan berusaha memulihkan planet bumi yang telah mengalami kerusakan serta segera meninggalkan bentuk-bentuk perilaku ekonomi yang bersifat merusak bumi. Selanjutnya revolusi mental terhadap rasa takut dan rasa marah ini akan memajukan peradaban manusia dengan berbagai pengembangan pemikiran kritis dan kreatif sebagai satu kesatuan dengan mahluk hidup lainnya di muka bumi baik hewan dan tumbuhan dalam satu ekosistem bumi menuju **evolusi peradaban** berikutnya....

Daftar Acuan

Andri. (2018). *Pasien cemas, harap hindari medsos selama #Pilpres2019!* https://www.kompasiana.com/psikosomatik_andri/5c965fea3ba7f742874b4862/pasien-cemas-harap-hindari-medsos-selama-pilpres2019?page=all (diakses 18 Agustus 2019)

Chalik. R. (2016). *Anatomi fisiologi manusia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (diakses 18 Agustus 2019)

Crochemore. C., Lu. J., Wu. ,Y., Liposits. Z., Sousa, N., Holsboer, F., & Almeida, O.F.X. (2005) Direct targeting of hippocampal neurons for apoptosis by glucocorticoids is reversible by mineralocorticoid receptor activation. *Molecular Psychiatry*, *10*, 790–798. Published online 17 May 2005. https://www.nature.com/articles/4001679 (diakses 18 Agustus 2019)

Jatmiko. B. (2018). *Mortido ketakutan, keserakahan dan keawasan. Sebuah evolusi peradaban*. Yogyakarta: Deepublish.

Kominfo. (2015), *Revolusi mental: Membangun jiwa merdeka menuju bangsa besar*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/5932/revolusi-mental-membangun-jiwa-merdeka-menuju-bangsa-besar/0/artikel_gpr (diakses 18 Agustus 2019)

Kompas. (2014). *Presiden SBY ganti istilah "China" Menjadi "Tionghoa"*, https://nasional.kompas.com/read/2014/03/19/1458446/Presiden.SBY.Ganti.Istilah.China.Menjadi.Tionghoa. (diakses 18 Agustus 2019)

McGaugh, J., Cahil, L., & Roozendal, B. (1996, November). Involvement of the amygdala in memory storage: Interaction with other brain systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *93*, 13508–13514.

Noya, B., & Allert, I. (2018). Pentingnya fungsi hipotalamus dan hormon yang dihasilkan. https://www.alodokter.com/pentingnya-fungsi-hipotalamus-dan-hormon-yang-dihasilkan. (diakses 18 Agustus 2019)

Sarwono, W. Sarlito. (2002). *Berkenalan dengan aliran dan tokoh-tokoh psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang.

Jatmiko, Bayu. "Fear is not inborn": A mental revolution. *This paper aims to find solutions for the national disintegration problems that begin to emerge in the country of Indonesia, especially when entering a political year. Competition between candidates causes polarization within the society which causes the risk of national disintegration. This paper tries to find the root of the problem that starts from the basic human instincts related to politics and power. This paper uses a reference from a book written by the author himself entitled "Mortido, Ketakutan, Keserakahan dan Keawasan, Sebuah Evolusi Peradaban" which shows that actually, the root of all problems caused by human behavior originates from fear, which is actually the earliest psychological disorder that is disturbing the basic human instinct, namely the drive to stay alive. This disruption, in the form of fear, will develop into a more complex disorder in social life, including in political life. This condition makes people easily scared and also easily provoked, giving rise to the potential for national disintegration. Hence, suggestion and solution are offered to change people's perception of fear, that fear is not part of basic human emotions but rather the most basic and earliest psychological disorder. Changes in perception start from parents in parenting to their children, then to educational pattern and finally to pattern in all aspects of life.*

----

bagian 4

Identitas Kebangsaan

Menjadi “Kita” sebagai Bangsa: Peran Kerendahan Hati Intelektual dalam Kognisi Sosial

Shahnaz Safitri

Indonesia sebagai Negara-Bangsa (*Nation-state*)

Indonesia dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang bermakna “biarpun berbeda tetapi tetap satu” merupakan negara-bangsa (*nation-state*) dengan warga yang multietnis dan multikultur. Semboyan tersebut disematkan menjadi bagian dari simbol negara sebagai pengejawantahan dari visi terciptanya kesatuan bangsa Indonesia sebagai entitas tunggal. Secara historis, upaya manusia menciptakan negara-bangsa yang tunggal merupakan artefak budaya modern dari sejarah riwayat peradaban manusia. Konsep negara-bangsa baru muncul pada akhir abad ke-18 dengan dipicu oleh tekanan sosial pada masa tersebut, menggantikan sistem budaya sebelumnya yakni komunitas keagamaan dan negara dinasti-aristokrasi (Anderson, 1983; Yogeeswaran & Dasgupta, 2015).

Beragam peneliti di bidang ilmu sosial seperti sejarawan, pakar dan pengamat politik, sosiolog, serta antropolog sepakat bahwa negara-bangsa dan kebangsaan pada dasarnya merupakan konstruksi sejarah dengan sifat dinamis; tidak memiliki akar alamiah yang terberi (Anderson, 1983). Dalam bukunya yang berjudul *Imagined Community* (1983), Benedict Anderson mendefinisikan bangsa sebagai komunitas politik yang diimajinasikan bersama dengan sifat terbatas namun berdaulat. Ciri imajinasi merujuk pada kondisi bahwa setiap individu yang mengidentifikasikan dirinya pada bangsa dapat merasakan keterikatan antar satu sama lain meski tidak saling mengenal. Ciri terbatas merujuk pada hadirnya kriteria dalam membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya, di mana definisi "kita" dan "mereka" ditegakkan. Sementara ciri berdaulat merujuk pada visi tentang bangsa sebagai persaudaraan yang setara.

Mengacu pada definisi bangsa oleh Anderson (1983), tampak bahwa eksistensi bangsa dapat terjaga sepanjang setiap individu anggotanya saling merasa terikat secara psikologis dengan satu sama lain sebagai kelompok dengan nasib yang sama (Yogeeswaran & Dasgupta, 2015). Dengan demikian, dinamika psikologis yang dialami setiap anggota, yang secara paralel berlangsung kolektif di dalam kelompok, menjadi kunci dari keguyuban dalam memandang dirinya sebagai satu bangsa. Untuk itu, penekanan pada dinamika psikologis dari kebangsaan menunjukkan bahwa derajat kebangsaan, atau dengan kata lain persepsi ke-kita-an, perlu dirawat dan senantiasa dipupuk dari waktu ke waktu.

Dalam konteks negara-bangsa, di mana bangsa diformalkan secara hukum menjadi satu negara, perihal keanggotaan individu di dalamnya dapat ditinjau di dalam hukum kewarganegaraan yang mengatur definisi dan hak warga negara. Meski demikian, dalam keseharian kerap ditemukan bahwa keyakinan subjektif mengenai kebangsaan mewarnai penilaian individu ketika membuat kategorisasi soal siapa yang sebangsa dengannya dan yang tidak. Dengan demikian, keanggotaan pada bangsa, berikut status warga negara beserta hak yang meliputinya, tidak dapat secara buta didasari oleh definisi harfiah sebagaimana tercantum pada hukum (Yogeeswaran & Dasgupta, 2015). Adapun terjadinya kesenjangan antara status warga negara berdasarkan hukum dan penghayatan ke-kita-an individu akan semakin menonjol pada negara-bangsa yang multietnis dan multikultur seperti Indonesia.

Semenjak kemerdekaannya sebagai negara-bangsa, keutuhan Indonesia sebagai entitas tunggal beberapa kali diinterupsi oleh gerakan separatisme di sejumlah wilayah kedaulatannya. Separatisme secara umum bermakna kegiatan advokasi untuk pemisahan wilayah kultural, etnis, suku, agama, ras, pemerintahan, atau gender dari kelompok lain yang lebih besar. Adapun gerakan separatisme yang berlangsung paling lama dalam sejarah Indonesia ialah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM gencar melakukan advokasi selama 30 tahun agar terjadi pemisahan wilayah Aceh dari Indonesia, terhitung mulai tahun 1976 saat berdirinya GAM hingga tercapai kesepakatan damai dengan Indonesia melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki pada tahun 2005.

Munculnya GAM lahir dari kekecewaan terkait eksploitasi sumber daya alam Aceh oleh pemerintah pusat yang tidak memberikan manfaat bagi warga setempat. Keyakinan akan eksploitasi sepihak ini bertahan hingga pada generasi Aceh berikutnya, sebagaimana dikutip dalam Aspinall (2007) *"..triliyunan rupiah hasil kekayaan alam Aceh dihasilkan setiap tahunnya, sementara Aceh hanya menerima kurang dari satu persen hasil alam tersebut"*. Gas alam Aceh saat itu merupakan salah satu yang paling produktif di dunia. Kontras dengan kekecewaan tersebut, persepsi historis masyarakat Aceh yang dihayati bersama ialah Aceh sebagai daerah yang berdaulat atas teritorialnya, dengan kuasa untuk mengontrol wilayah kedaulatannya secara mandiri bahkan di masa penjajahan Belanda (Harris, 2010). Fakta sejarah yang mendukung persepsi tersebut ialah peran kerajaan Aceh sebagai motor penggerak dan pemberi modal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di dunia internasional. Kesenjangan dalam penghayatan historis dibandingkan dengan persepsi ketidakadilan kontemporer menjadi motivasi utama GAM dalam advokasi kemerdekaan guna meraih otonomi pengelolaan sumber daya alam (Sims, 2000 dalam Harris, 2010).

Terjadinya bencana tsunami Aceh tahun 2004 memunculkan tendensi baik dari GAM dan Indonesia untuk bernegosiasi menuju damai, dengan pertemuan kedua pihak yang diawali oleh ulasan mengenai kerugian bencana tersebut dan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak untuk dipenuhi (Harris, 2010). Kesepakatan damai kemudian dicapai dengan pengakuan atas status Aceh sebagai daerah istimewa yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 (UUPA). Penerbitan UUPA dinilai sebagai kemenangan politis bagi GAM (Sianturi, 2011), dengan diberikannya hak berupa: (1) membentuk partai lokal; (2) menggunakan bendera dan hymne daerah; (3) menetapkan lembaga ketua adat; (4) membentuk struktur legislatif baru berupa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang mengesahkan peraturan daerah dan menentukan keberlakuan hukum nasional bagi wilayah Aceh; (5) mengadakan hubungan bilateral dengan negara lain secara langsung dan menggunakan tingkat suku bunga yang berbeda dengan Bank Sentral RI; (6) mengelola sumber daya alam secara mandiri; (7) memperoleh amnesti dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat (termasuk bekerja sebagai polisi khusus Aceh). Sebaliknya, pihak GAM diwajibkan untuk melakukan dua hal, yakni (1) demobilisasi pasukan militernya dan (2) tidak diperkenankan mengenakan atribut militer GAM.

Pada praktiknya, transisi dari para mantan anggota GAM dalam mematuhi UUPA berjalan dengan proses yang panjang. Sebagai contoh terkait hak pembentukan partai lokal, para mantan anggota GAM mengawalinya dengan membentuk Partai GAM pada tahun 2007. Penolakan muncul dari Indonesia yang menyoroti agar penggunaan akronim GAM serta lambang partai diganti dari atribut yang mencirikannya sebagai kelompok separatisme. Perubahan dilakukan dengan transisi, di mana baru pada akhir tahun 2008 seluruh atribut partai bebas dari konsep GAM dengan nama Partai Aceh. Meski demikian, secara tertulis di dalam situs resmi Partai Aceh disebutkan bahwa partai tersebut merupakan reinkarnasi dari GAM dan hal ini menjadi konten pada rubrik "13 alasan untuk memilih Partai Aceh dalam pemilu legislatif" pada situs resmi Partai Aceh.

Persepsi Kebangsaan sebagai Identitas Sosial

Contoh kasus terkait riwayat gerakan separatisme GAM yang berlangsung di atas menunjukkan bahwa gerakan separatisme dapat muncul dengan diawali oleh perbedaan dalam menghayati diri kepada kelompok sosial lain selain bangsa. Dalam psikologi, dinamika psikologis yang ditengarai oleh Anderson (1983) tentang pembentukan bangsa merujuk pada konsep identitas sosial. Identitas sosial didefinisikan sebagai "*..the individual's knowledge that he*

belongs to a certain social groups together with some emotional and value significance to him of this group membership" (Tajfel, 1972 dalam Hogg & Terry, 2001). Dari definisi tersebut, tampak bahwa identitas sosial tidak merujuk pada perbedaan antar individu, melainkan menyoroti persamaan individu sebagai satu kelompok (Vaughan & Hogg, 2005). Kelompok lalu berperan dalam memberikan definisi dan harga diri bagi individu, serta dapat mengarahkan tingkah laku individu melalui pemberian ekspektasi dan peran tertentu sebagai anggota kelompok. Lebih lanjut, identitas sosial juga memotivasi individu untuk menampilkan perilaku yang khas dari kelompoknya guna membedakannya dari kelompok lain (Hogg & Terry, 2001).

Ada banyak kelompok yang dapat menjadi sumber pelekatan identitas sosial selain bangsa. Pemilihan kelompok tersebut dipengaruhi oleh beragam faktor fisik dan sosial yang berlangsung dan memancing dominasi identitas sosial yang berbeda pula. Faktor pertama ialah kehadiran simbol/tanda/atribut kelompok di sekitar, yang menjadi pengingat bagi individu bahwa dirinya adalah anggota kelompok tersebut (Baron, Branscombe, & Byrne, 2009). Faktor lainnya ialah status kelompok di mana derajat identifikasi individu akan lebih tinggi ketika kelompok memiliki posisi hierarkis yang lebih baik dibandingkan kelompok lainnya. Dengan demikian, keanggotaan pada kelompok tersebut dapat menunjang harga diri individu menjadi lebih positif (Hogg & Terry, 2001).

Lebih lanjut, menjadi satu-satunya orang dari kelompok minoritas di kumpulan mayoritas cenderung meningkatkan identifikasi diri pada status minoritas (Baron, Branscombe, & Byrne, 2009). Pada dasarnya, skala kelompok memang memberikan peran dalam pembentukan identitas. Kelompok minoritas akan lebih menonjol bagi individu dibandingkan kelompok mayoritas. Hal ini disebabkan oleh minoritas yang cenderung berisi individu dengan karakteristik yang lebih homogen dibandingkan mayoritas sehingga individu lebih merasakan kebersamaan di dalamnya. Sebaliknya, keterbukaan mayoritas dalam berelasi dengan anggota kelompok minoritas cenderung mengarahkan penghayatan identitas sosial individu sebagai bagian dari mayoritas pula (Verkuyten, 2005).

Faktor berikutnya ialah presentasi diri, yakni pada dasarnya individu juga memilah identitas sosial mana yang akan ia angkat ketika membawakan dirinya di lingkungan. Pemilihan tersebut berlangsung dengan dorongan antisipasi atas terjadinya penolakan dari orang lain. Pada tataran makro, sejarah juga berperan dalam proses evaluasi bagaimana suatu kelompok sosial bisa hadir, berikut kriteria historis dari keanggotaan dari kelompok tersebut (Baron, Branscombe, & Byrne, 2009). Misalnya, apabila kelompok yang berkekurangan (*lower disadvantage group*) dimaknai sebagai nasib temurun para anggota, maka hal ini akan meningkatkan kelekatan individu ke dalam kelompok tersebut

(Kelly & Breinlinger, 1996).

Adanya ragam faktor pembentuk identitas sosial menunjukkan bahwa identitas sosial bersifat cair dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu, bergantung pada situasi lingkungan dan dengan siapa individu berada. Meski demikian, kombinasi faktor-faktor di atas secara akumulatif memupuk terciptanya satu identitas sosial yang dominan untuk dihayati dan lalu berperan sentral dalam mengarahkan tingkah laku individu pada berbagai situasi. Adapun kelompok yang lebih mungkin untuk menjadi sumber identifikasi dominan ialah kelompok yang memiliki (1) skema kategorisasi anggota yang terlihat oleh publik; (2) adanya peran khusus dari kelompok yang disematkan pada individu; dan (3) validasi ontologis terkait kriteria keanggotaan kelompok sebagai sesuatu yang alamiah (Verkuyten, 2005).

Identitas Nasional sebagai Bentuk Identitas Sosial

Identifikasi diri sebagai bagian dari bangsa, sebagai komunitas yang "diimajinasikan", melahirkan identitas sosial yang disebut identitas nasional. Dibandingkan dengan identitas sosial lainnya, identitas nasional merupakan identitas yang paling mendasar dan inklusif (Rodriguez, Schwartz & Whitbourne, 2010). Adapun identitas nasional menurut Schnabel & Hjerm (2014) ialah *“one genre of answers to the question of what constitutes an autonomous political community capable of self-determination”.* Dengan demikian, identitas nasional merujuk pada identifikasi diri terhadap komunitas politik yang otonom dan mandiri dalam menentukan nasibnya. Definisi ini menurut hemat penulis juga selaras dengan makna kebangsaan yang digagas oleh Anderson (1983).

Disebutkan bahwa penelitian psikologi mengenai identitas nasional masih tergolong terbatas apabila dibandingkan dengan kajian terhadap konsep identitas lainnya (Rodriguez, Schwartz & Whitbourne, 2010). Secara umum, riset dalam ilmu sosial yang mengkaji identitas nasional memetakannya pada dua hal: pembentukan identitas yang berdasarkan etnis dan identitas berdasarkan kependudukan (Yogeeswaran & Dasgupta, 2015). Pemetaan ini berkaitan dengan sejarah konsepsi identitas nasional yang kerap diawali dengan penekanan atas kesamaan etnis atau leluhur; atau sebaliknya dengan menekankan kesamaan dari nilai dan tanggungjawab yang diadopsi oleh sesama anggota.

Konsep identitas berdasar etnis (identitas etnis) berkisar pada keyakinan bahwa hanya individu dengan keterikatan leluhur melalui garis keturunan, agama, bahasa, dan budaya yang sama yang dapat digolongkan sebagai sebangsa. Dalam konsep ini, bangsa dipandang sebagai entitas alami dengan mencerminkan sekelompok orang yang homogen (Yogeeswaran & Dasgupta, 2015). Referensi

terhadap kesamaan leluhur (*origin*) dan kesejarahan antar anggota menjadi ciri yang khas dari identitas etnis dibandingkan identitas sosial lainnya, meskipun tidak diperlukan klarifikasi aktual mengenai kesamaan tersebut. Dengan demikian, kunci pembentukan kelompok etnis ialah justifikasi bersama tentang kriteria penyatu yang mendefinisikan kelompok (Verkuyten, 2005). Sebaliknya, identitas berdasarkan kependudukan (identitas sipil) merujuk pada kebangsaan yang bersatu melalui keterlibatan dalam berbagi hak, tanggung jawab, dan cita-cita bersama. Dengan demikian, warga yang sepaham dalam nilai-nilai dan bersedia ikut serta dalam kehidupan publik dapat digolongkan sebagai bagian dari bangsa sebagai warga negara (Yogeeswaran & Dasgupta, 2015).

Dalam konteks negara-bangsa yang multietnis dan multikultur seperti Indonesia, upaya menekankan penghayatan sebagai satu bangsa dengan bersumber pada identitas etnis cenderung mengekslusikan kelompok minoritas. Lebih lanjut, ekspresi diri dari minoritas akan membahayakan kelompok tersebut, mengingat ketidaksesuaiannya dengan profil etnis mayoritas bangsa. Demikian pula halnya apabila negara berusaha mengangkat kehadiran etnis minoritas di dalam naungannya, yang akan memicu kesenjangan dan stereotip antar etnis di dalam negara tersebut. Sebaliknya, isu yang sama tidak ditemukan pada negara-bangsa yang mengedepankan konsep identitas sipil sebagai falsafah bernegara, mengingat perbedaan etnis tidak menjadi fokus perhatian dari awal pembentukan negara-bangsa itu sendiri (Yogeeswaran & Dasgupta, 2015).

Kembali pada contoh kasus dalam konteks sejarah Indonesia, GAM sebagai gerakan separatisme merupakan contoh dari pembangkangan etno-nasionalis (*ethnic nationalist rebellion*). Hal ini tampak dari pergerakan separatisme GAM yang berlangsung dengan tema etnis sebagai legitimasi. Tema tersebut hadir dalam narasi berupa Aceh sebagai kampung halaman bagi orang Aceh, yakni mereka yang memiliki nenek moyang bersama dengan bahasa dan agama-budaya tersendiri (Brown, 2004). Hadirnya perbedaan budaya dan bahasa dengan Indonesia secara umum, diikuti oleh kondisi kesenjangan ekonomi dan kekuasaan antara warga Aceh dan pemerintah pusat, menjadi pemicu terbentuknya pemahaman bahwa kesenjangan tersebut adalah buah perbedaan entitas yang berbasis etnis (Hechter, 1986 dalam Brown, 2004). Lebih lanjut, intensi GAM untuk memisahkan diri dari mayoritas, dalam hal ini Indonesia, berakar dari persepsi bahwa nilai kelompok mayoritas tidak sesuai dengan identitas kelompok separatisme (Sani & Todman, 2002 dalam van Leeuwen & Mashuri, 2013).

Kaitan Identitas Etnis pada Identitas Nasional

Penekanan atas kesamaan etnis dalam upaya mengkonseptualisasikan bangsa sebagai imajinasi kolektif menghasilkan dua buah hipotesis terkait relasi antara identitas etnis dan identitas nasional. Hipotesis pertama ialah *Ethnic Pluralism Model* (EPM) yang menyatakan bahwa individu tetap dapat mengelola identitas diri yang positif, yakni dengan mengidentifikasikan diri pada identitas nasional sembari juga mempertahankan identitas etnisnya (Rodriguez, Schwartz & Whitbourne, 2010). Model ini terkait dengan konsep *bicultural efficacy* yang menerangkan bahwa individu dapat memunculkan keyakinan diri untuk hidup dalam budaya etnisnya, sepanjang sejalan dengan konteks nasional yang lebih luas (Dubois, 1961 dalam Rodriguez, Schwartz & Whitbourne, 2010). Adaptasi individu akan berjalan lebih baik apabila ia mampu mengintegrasikan identitas etnis dan identitas nasional yang dimilikinya ke dalam identitas bikultural yang menyatukan kedua identitas sosial tersebut (Rodriguez, Schwartz & Whitbourne, 2010).

Berbeda dengan EPM, *Social Dominance Theory* (SDT) menyatakan bahwa identitas nasional dan identitas etnis merupakan dua hal yang cenderung berkonflik satu sama lain. Hal ini terjadi khususnya apabila kelompok etnis individu ialah kelompok minoritas, sehingga pada skala yang lebih luas terdapat dominasi kelompok etnis lain sebagai mayoritas. Dalam situasi tersebut, baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas sama-sama cenderung mempersepsikan status minoritas sebagai subordinat (Sidanius, Pratto, van Laar, & Levin, 2004, dalam Rodriguez, Schwartz & Whitbourne, 2010). Tampak bahwa hipotesis yang diusung oleh EPM dan SDT saling bertolak belakang. Hanya saja, uraian dari kedua hipotesis tersebut menyiratkan bahwa cakupan/skala dari kelompok sosial, yakni sebagai kelompok minoritas atau mayoritas, memiliki peran dalam memoderasi tercapai/tidaknya keselarasan antara identitas etnis atau identitas nasional dalam diri individu.

Konsep Minoritas dan Mayoritas Kelompok Sosial

Sejauh mana identitas etnis menunjang atau malah menginterupsi pemaknaan identitas nasional sebagai bangsa, apabila ditinjau baik melalui EPM dan SDT, secara sederhana bergantung pada skala kelompok etnis. Status kelompok etnis sebagai minoritas dapat berujung pada ketidakharmonisan antar kedua identitas sosial tersebut, sementara status sebagai mayoritas cenderung menunjang tercapainya keselarasan antar identitas etnis dan nasional. Sekilas pandang, kesimpulan ini terkesan cukup gamblang menggambarkan bagaimana

individu membentuk identifikasi diri di dalam kelompok, hanya saja kelompok yang dimaksud ialah antara kelompok etnis yang eksklusif (Yogeeswaran & Dasgupta, 2015) atau kelompok bangsa yang inklusif (Rodriguez, Schwartz & Whitbourne, 2010). Meski demikian, pemahaman yang gamblang tersebut akan memiliki corak yang lebih berwarna dan kompleks ketika memperhitungkan proses berjalannya identifikasi diri individu dari kasus per kasus. Kompleksitas penghayatan identitas individu ini-lah yang justru menjadi premis dasar bahwa dinamika psikologis menjadi kunci terbentuknya konsep bangsa sebagai imajinasi kolektif (Anderson, 1983). Salah satu isu dalam kompleksitas penghayatan identitas nasional terkait kebangsaan muncul dari hakikat status mayoritas dan minoritas itu sendiri.

Diketahui bahwa perbedaan antara status kelompok sebagai mayoritas atau minoritas tidak selalu merujuk pada jumlah aktual dari anggota kelompok. Persepsi mengenai kelompok "yang besar" dan "yang kecil" secara kognitif dibentuk pula oleh pengaruh dari kelompok tersebut dalam lanskap sosial yang lebih luas. Apabila kelompok "kecil" memiliki kekuasaan yang cukup besar di lingkungan sosial, maka persepsi menjadi minoritas cenderung berkurang. Contoh aktual dari mekanisme ini dapat diilustrasikan dari hadirnya gerakan separatisme GAM hingga tercapai kesepakatan damai sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Disamping kriteria jumlah aktual anggota kelompok ataupun derajat kekuasaan kelompok di lingkungan, pada dasarnya tidak ada indikator spesifik lainnya yang dapat diacu ketika menyematkan status mayoritas atau minoritas terhadap kelompok. Dengan kata lain, status mayoritas/minoritas kelompok lagi-lagi berjalan dalam persepsi subjektif individu yang menjadi anggotanya dan individu lain di luar dari kelompok.

Fakta atas *nature* subjektifitas atas status mayoritas/minoritas kelompok menjadi titik kritis dari berlangsungnya keharmonisan antar kelompok, mengingat keseluruhannya ternyata kembali bergantung pada persepsi subjektif atas keanggotaan individu pada kelompok. Lebih lanjut, persepsi subjektif tersebut ternyata juga tidak berjalan statis. Ketika situasi berubah, maka berubah pula pandangan seberapa "mayoritas" kelompok etnis individu untuk merepresentasikan suatu bangsa, dan seberapa besar kelompok tersebut koheren dengan diri individu. Hamid (2014) dalam bukunya yang berjudul *Discontent and Its Civilization* melukiskan fenomena ini ke dalam sebuah kalimat yakni "*each individual human being is, after all, a minority of one*". Dalam satu waktu, penghayatan sebagai bagian dari mayoritas pun dapat terkikis ketika individu menyadari bahwa kelompok mayoritas ternyata tidak benar-benar mencerminkan dirinya. Dalam kaitan dengan identitas etnis dan identitas nasional, sekalipun kelompok etnis kita "dianggap" sebagai kelompok mayoritas dari bangsa,

nyatanya ada saat-saat ketika kita tidak merasa homogen dengan kelompok tersebut. Hal ini dapat memunculkan kesan diri individu yang tidak berbangsa (*not belonging*), khususnya dalam konteks ketika kebangsaan dihadirkan dengan basis etnis. Dalam tataran yang lebih luas, dapat pula terjadi bahwa kelompok etnis mayoritas merasa "kurang" menjadi mayoritas di lingkungannya (oleh sebab interupsi terhadap kekuasaan dan lain sebagainya), dan hal tersebut oleh anggota kelompok terkesan mencederai kesatuan dari bangsa yang direpresentasikannya.

Uraian di atas memaparkan bahwa penyematan dan identifikasi sosial yang menjadi sumber definisi diri individu berlangsung secara kompleks dan dinamis, khususnya ketika kita mengulas relasi antara identitas etnis dan identitas nasional. Penghayatan kebangsaan, yang diwakili oleh konsep identitas nasional, ternyata berjalan dengan skema tarik-menarik secara konstan dengan identitas sosial lain yang menonjol seperti identitas etnis. Ulasan yang mendalam atas identitas etnis berkaitan dengan kondisi historis berbagai bangsa yang menyatukan dirinya atas dasar kesamaan etnis, sekalipun sebenarnya ada kelompok-kelompok etnis lainnya yang berada di bawah naungannya. Sebagai catatan, identitas etnis hanyalah satu dari beragam bentuk identitas sosial lain yang berelasi dengan identitas nasional. Dewasa ini, ragam identitas sosial lain yang juga tarik-menarik dengan identitas nasional tidak terhitung jumlahnya. Salah satu yang cukup menonjol diantaranya ialah identitas religius yang menjadi bahan kajian kontemporer dalam penelitian psikologi, khususnya berkaitan dengan aktivitas radikalisme-separatisme berbasis agama. Hadirnya beragam identitas sosial lainnya ini semakin menegaskan bahwa kesatuan bangsa dalam hal penghayatan atas kebangsaan harus senantiasa dipupuk dari waktu ke waktu.

Peran Karakteristik Kognitif dalam Penghayatan Identitas Sosial

Seluruh paparan di atas mengenai penghayatan identitas dengan mengacu kepada kelompok semakin menegaskan bahwa identitas diri merupakan sesuatu yang bersifat subjektif pada individu. Subjektifitas ini mengakar pada bagaimana individu mempersepsikan dirinya dalam kaitan dengan lingkungan tempatnya bergaul dan berinteraksi di keseharian. Adapun persepsi sosial yang sedemikian rupa merupakan hasil dari mekanisme kerja kognisi sosial yang menjadi salah satu tema kajian di dalam bidang ilmu psikologi sosial (Baron, Branscombe, & Byrne, 2009). Kognisi sosial merupakan tendensi alamiah individu untuk senantiasa memaknai (*making sense*) atas diri dan lingkungan sekitarnya, berikut eksistensi dirinya di dalam lingkungan tersebut.

Pada individu, berlangsungnya proses kognisi sosial yakni pemilahan dan pemaknaan atas informasi dari lingkungan yang berjalan secara konstan

didorong oleh upaya untuk memproteksi identitas sosial individu. Dengan kata lain, salah satu faktor pendorong atau motivasi dibalik proses kognisi sosial ialah menjaga eksistensi atau identitas diri. Dalam prakteknya, penelitian di bidang kognisi sosial memetakan bahwa terdapat dua kutub yang terjadi pada individu ketika memproses lingkungan sosialnya: keterbukaan atas informasi dan kemungkinan baru, atau sebaliknya yakni ketertutupan dan penghindaran dari kebaruan tersebut (*closemindedness*). Adapun tendensi individu untuk cenderung kepada salah satu polarisasi tersebut bergantung pada banyak faktor, yang secara umum didorong oleh kebutuhan untuk menjaga identitas sosial dan harga diri yang menyertainya (Bouckenooghe, Vanderheyden, Mestdagh, & Van Laethem, 2007).

Tendensi pada ketertutupan atas informasi baru berkaitan dengan sejumlah karakteristik kognitif tertentu, seperti keterbatasan dalam kapasitas pemrosesan kognitif, kesalahan atribusi fundamental (*fundamental attribution error*), serta kebutuhan atas kepastian kognitif (*need for cognitive closure*) (Kruglansi & Fishman, 2006; dalam Hudiyana, Muluk, Milla, & Shadiqi, 2018). Melalui sejumlah penelitian, diketahui bahwa tendensi pada kutub ketertutupan ini berkaitan dengan kecenderungan, sikap positif, hingga keikutsertaan pada tindakan terorisme berbasis ideologi, berikut kecenderungan untuk meyakini teori konspirasi yang berkaitan dengan keterancaman atas status identitas kelompok (Umam, Muluk, & Milla, 2018).

Dalam kaitannya dengan sikap dan tindak terorisme, ketertutupan kognitif berkaitan dengan sikap fundamentalisme pada ideologi berbasis kelompok di mana identitas individu dilekatkan kepadanya dan menjadi sumber definisi dan harga diri utama individu. Untuk itu, individu lain diluar kelompok mudah dipandang sebagai pihak "yang lain" (liyan) yang memicu konflik antar kelompok. Sementara pada kasus kepercayaan atas teori konspirasi diawali oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan atas kelompok sosial lain diluar kelompok individu, yang dikhawatirkan mengancam eksistensi kelompok dan diri individu sebagai yang berbeda dari mereka (Brandt & Reyna, 2010 in Umam dkk, 2018). Secara umum, ketertutupan pada informasi baru dalam menelaah lingkungan sosial, sebagai suatu proses kognisi sosial, cenderung lebih mudah mengantarkan pada tindak mengkotak-kotakkan kelompok sosial sebagai sesuatu yang kaku. Maka tidak mengherankan bahwa kategorisasi sosial yang kaku lebih cenderung berakibat pada konflik antar kelompok, sebab masing-masing individu akan berjuang dalam memproteksi eksistensi kelompoknya. Perbedaan kelompok sosial yang dipandang kaku beserta ideologi yang menyertainya mendapatkan api yang dibutuhkan sehingga terjadi konflik, mengingat pada dasarnya terdapat naluri individu untuk menunjukkan diri sebagai pihak yang benar (Porter &

Schumann, 2018).

Pada kutub lainnya, yakni keterbukaan atas informasi dan kemungkinan baru dari lingkungan sosial cenderung berkaitan dengan aspek yang berbeda. Dalam spektrum ini, terdapat satu buah konsep baru dalam bidang psikologi berupa kerendahan hati intelektual (*intelectual humility*) yang berperan krusial dalam menentukan perilaku individu ketika individu berhadapan pada situasi perbedaan ideologi (Davis dkk, 2016). Secara umum, kerendahan hati intelektual mengulas bagaimana individu mempersepsikan validitas dari cara dirinya meraih pengetahuan serta membentuk keyakinan, opini, dan ide (Krumrei-Mancuso & Rouse, 2016). Dibandingkan dengan sikap rendah hati secara umum yang sarat dengan dimensi moral, kerendahan hati intelektual lebih menjurus pada dimensi epistemologi yang mempromosikan terbentuknya individu sebagai pemikir yang bijaksana (Krumrei-Mancuso & Rouse, 2016). Meski demikian, kerendahan hati intelektual juga terkait dengan aspek sosial dalam hal interaksi positif dengan orang lain, yang sejalan dengan sikap rendah hati secara umum sebagai konsep yang memayunginya (Samuelson dkk, 2015).

Kerendahan Hati Intelektual dalam Interaksi antar Kelompok

Kerendahan hati intelektual sangat relevan apabila kita hendak mempertanyakan sejauh mana intensi individu untuk mengeksplorasi validitas dari fakta maupun opini yang dimilikinya. Eksplorasi fakta berkaitan dengan pengenalan atas akurasi memori individu, berikut pemahaman bahwa informasi yang saat ini ia yakini kebenarannya masih memiliki kemungkinan untuk difalsifikasi sehingga bisa jadi keliru. Lebih lanjut, eksplorasi atas validitas opini berkaitan dengan pengenalan akan basis dari sikap politik yang individu miliki, berikut keyakinan keagamaan yang dianut, dan internalisasi nilai-nilai budaya individu (Leary dkk, 2017).

Individu dengan kerendahan hati intelektual tidak pernah secara buta mengadopsi pandangan atau keyakinan orang lain ataupun menjadi tidak percaya diri dengan pandangan dan keyakinan yang dimilikinya. Adanya sikap kerendahan hati intelektual justru memupuk kebiasaan untuk tidak berkonflik di dalam perbedaan pandangan antara diri dan orang lain. Mengingat individu secara sadar memahami dari mana dan bagaimana justifikasi dari tiap-tiap pandangan tersebut dan sejauh mana rasionalitas setiap pandangan dapat diaplikasikan pada konteksnya (Krumrei-Mancuso & Rouse, 2016). Dengan demikian, individu dengan sikap kerendahan hati intelektual cenderung lebih baik dari orang-orang pada umumnya untuk mengenali hal yang memang mereka ketahui dan hal apa yang tidak mereka ketahui ketika menyusun lanskap pengetahuannya (Deffler,

Leary, & Hoyle, 2016). Kepekaan dalam memandang aspek pengetahuan yang masih perlu dilengkapi dari keseluruhan bangunan pengetahuan yang dimiliki membuat individu dengan kerendahan hati intelektual tertarik untuk menelusuri perbedaan pendapat yang ada secara mendalam, tanpa kemudian berubah menjadi perseteruan antar pribadi.

Dampak dari adanya sikap kerendahan hati intelektual khususnya hadir ketika individu berhadapan dengan situasi pertentangan pendapat atau ketidaksepahaman. Umumnya, manusia secara naluriah terdorong untuk menunjukkan diri sebagai sosok yang berpengetahuan dan merupakan pihak yang benar. Adapun lawan dipandang sebagai sosok yang bodoh dan salah, yang lebih lanjut mengurangi kesempatan untuk terjadinya dialektika dalam mencapai kesepakatan bersama. Hadirnya sikap kerendahan hati intelektual menunjang individu untuk memandang lawan bicaranya sebagai pihak yang setara dan informatif, dan dengan berbekal kemampuan diri yang kritis dalam menyusun lanskap pengetahuan, individu cenderung dapat menghasilkan dialog yang membuka wawasan bersama dengan mereka yang berbeda pendapat (Porter & Schumann, 2018). Untuk itu, keberadaaan kerendahan hati intelektual menjadi esensial dalam konteks terbentuknya interaksi interpersonal yang berlangsung damai, khususnya pada masyarakat yang pluralistik dengan keragaman etnis dan kultur seperti Indonesia (Deffler dkk, 2016).

Pentingnya karakteristik kerendahan hati intelektual untuk diasah dalam diri individu menjadi semakin genting dalam konteks peradaban dunia kontemporer. Diketahui bahwa dewasa ini dunia berjalan secara global dengan menampung segala aneka ragam ide dan nilai, baik dalam segi moral, agama, politik, sosial, dan budaya. Untuk itu, kemampuan mendengarkan dan memahami sudut pandang yang berbeda, menghargai keberagaman yang ada, tanpa kehilangan jejak atas sudut pandang pribadi menjadi karakteristik diri yang dibutuhkan dalam menyongsong peradaban mendatang. Adapun karakteristik ini secara komprehensif dapat dikaji dan diukur ke dalam konstruk kerendahan hati intelektual (Jarvinen & Paulus, 2017). Karakteristik ini memfasilitasi terciptanya mufakat yang berfaedah (*fruitful*) antara individu yang berbeda pandangan tanpa berujung pada pemaknaan atas perbedaan tersebut sebagai perbedaan kelompok/asali (Porter & Schumann, 2018).

Kerendahan hati intelektual juga secara umum sejalan dengan berbagai konsepsi kognitif lain yang bersifat positif, seperti adanya *mindset* untuk berkembang (*growth mindset*), kebutuhan pada kognisi (*need for cognition*), keterbukaan pada pengalaman baru, dan rasa ingin tahu yang tinggi (Porter & Schumann, 2018). Lebih lanjut, kerendahan hati intelektual memupuk terbentuknya karakter diri yang bersifat prososial seperti tolong-menolong,

kebersamaan (*universalism*), tidak mencari keuntungan pribadi (Krumrei-Mancuso & Rouse, 2016), serta menunjang sikap empati dan rasa syukur kepada sesama (Krumrei-Mancuso, 2017). Kombinasi dari keduanya, yakni karakteristik seputar aspek kognitif dan aspek prososial, menjadikan individu dengan kerendahan hati intelektual secara tulus memiliki rasa ingin tahu tentang perbedaan antar individu sembari menerima perbedaan tersebut tanpa kehilangan dirinya. Mengacu pada Krumrei-Mancuso (2017), individu tidak hanya sekedar bertoleransi atas perbedaan tetapi juga memang menghargai dan mensyukuri hadirnya perbedaan tersebut sebagai kekayaan peradaban yang universal.

Pemaknaan Identitas Sosial Kontemporer: Penutup

Ulasan mengenai proses terbentuknya identitas diri yang muncul dari kelompok sosial individu pada dasarnya merupakan bentuk luaran dari bagaimana skema kognitif individu bekerja. Sebagai suatu prosesor atau penelaah informasi, kapasitas kognitif manusia berjalan tidak hanya untuk menelaah fakta-fakta faktual empiris di lingkungannya, melainkan juga menelaah dan memberi makna pada pengalaman-pengalaman subjektif intrapribadi dan interpribadi di dalam interaksi. Akumulasi dari pengalaman-pengalaman subjektif tersebut yang semakin memupuk atau dapat pula merekonstruksi konsep dan definisi diri individu, dengan pemaknaan identitas menjadi salah satu atribut yang disematkan pada kedirian itu.

Menyikapi situasi kontemporer saat ini, di mana informasi berlimpah ruah dapat diakses sedemikian mudah dan cepat melalui kemudahan teknologi, berikut interaksi dengan orang lain dari seluruh dunia dapat berlangsung tanpa adanya perpindahan fisik, seluruhnya memfasilitasi individu untuk memiliki lebih banyak dan beragam informasi untuk ditelaah oleh kognisinya. Dalam situasi keragaman tersebut maka penting bagi individu untuk melakukan telaah pribadi mengenai siapa dirinya dan pada kelompok sosial mana dirinya merasa memiliki kesamaan dan keterikatan sebagai kelompok. Dengan demikian, terdapat lebih banyak pilihan dan potensi bagi individu dalam mendefinisikan diri, khususnya ketika membentuk identitas sosial. Namun demikian, ketika individu memiliki terlalu banyak pilihan dalam mendefinisikan dirinya, maka keterasingan diri menjadi gejala yang dapat muncul dalam proses individu menemukan "kelompoknya". Politik identitas pun kemudian bermain dengan menggiring individu-individu ke dalam pemaknaan yang reduksionis dan dipaksakan bahwa dirinya ialah hanya semata-mata kelompoknya, dengan dampak ketidakharmonisan dalam relasi dengan orang lain diluar kelompok.

Untuk itu, dibutuhkan suatu karakter kognitif yang bersifat adaptif

bagi individu dalam berinteraksi dengan lingkungan yang terdiferensiasi, tanpa menimbulkan potensi konflik tambahan antar kelompok multikultur yang ada. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa salah satu karakter yang menunjang kemampuan adaptif individu untuk berkembang dalam konteks masyarakat multikultur ialah sikap rendah hati intelektual. Dalam tataran yang lebih luas, sikap rendah hati intelektual juga selaras dalam menunjang pemaknaan kebangsaan individu yang bersifat dinamis sebagaimana orkestrasi yang tiada henti di sepanjang hayat individu.

Daftar Acuan

Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on The Origins and Spread of Nationalism*. London: Verso.

Aspinall, E. (2007). The construction of grievance: Natural resources and identity in a separatist conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 51: 950-972. DOI: 10.1177/0022002707307120

Baron, R. A., Branscombe, N. R., & Byrne, D. (2009). *Social Psychology* (12th ed.). USA: Pearson Education, Inc.

Brown, D. (2004). Why independence? The instrumental and ideological dimensions of nationalism. *International Journal of Comparative Sociology,* 45, 277-296. DOI: 10.1177/0020715204049597

Bouckenooghe, D., Vanderheyden, K., Mestdagh, S., & Van Laethem, S. (2007). Cognitive motivation correlates of coping style in decisional conflict. *Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied*, *141*(6), 605–625. https://doi.org/10.3200/JRLP.141.6.605-626

Davis, D. E., Rice, K., McElroy, S., DeBlaere, C., Choe, E., Van Tongeren, D. R., & Hook, J. N. (2016). Distinguishing intellectual humility and general humility. *Journal of Positive Psychology*, *11*(3), 215–224. https://doi.org/10.1080/17439760.2015.1048818

Deffler, S. A., Leary, M. R., & Hoyle, R. H. (2016). Knowing what you know: Intellectual humility and judgments of recognition memory. *Personality and Individual Differences*, *96*, 255–259. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.03.016

Hamid, M. (2016). *Discontent and Its Civilization: Dispatches from Lahore, New York, and London.* New York: Riverhead Books.

Harris, A. (2010). Separatist insurgency, objective referents and autonomy. *Cooperation and Conflict*. 45, 387-405. DOI: 10.1177/0010836710387023

Hogg, M.A. & Terry, D.J. (2001). *Social Identity Processes in Organizational Contexts.* Philadelphia: Taylor & Francis.

Hudiyana, J., Muluk, H., Milla, M. N., & Shadiqi, M. A. (2018). The end justifies the terrorist means: Consequentialist moral processing, involvement in religious organisations, and support for terrorism. In A. A. Ariyanto, H. Muluk, P. Newcombe, F.. Piercy, E. K. Poerwandari, & S. H. R. Suradijono (Eds.), *Diversity in Unity: Perspectives from Psychology and Behavioral Sciences* (pp. 621–628). New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Jarvinen, M. J., & Paulus, T. B. (2017). Attachment and cognitive openness: Emotional underpinnings of intellectual humility. *Journal of Positive*

Psychology, *12*(1), 74–86. https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1167944

Kelly, C., & Breinlinger, S. (1996). *The Social Psychology of Collective Action: Identity, Injustice, and Gender.* London: Taylor & Francis Ltd.

Krumrei-Mancuso, E. J. (2017). Intellectual humility and prosocial values: Direct and mediated effects. *Journal of Positive Psychology*, *12*(1), 13–28. https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1167938

Krumrei-Mancuso, E. J., & Rouse, S. V. (2016). The development and validation of the comprehensive intellectual humility scale. *Journal of Personality Assessment*, *98*(2), 209–221. https://doi.org/10.1080/00223891.2015.1068174

Leary, M. R., Diebels, K. J., Davisson, E. K., Jongman-Sereno, K. P., Isherwood, J. C., Raimi, K. T., … Hoyle, R. H. (2017). Cognitive and interpersonal features of intellectual humility. *Personality and Social Psychology Bulletin*, *43*(6), 793–813. https://doi.org/10.1177/0146167217697695

Porter, T., & Schumann, K. (2018). Intellectual humility and openness to the opposing view. *Self and Identity*, *17*(2), 139–162. https://doi.org/10.1080/15298868.2017.1361861

Rodriguez, L., Schwartz, S.J., Whitbourne, S.K. (2010). American identity revisited: The relation between national, ethnic, and personal identity in a multiethnic sample of emerging adults. *Journal of Adolescent Research*. 25, 324-349. DOI: 10.1177/0743558409359055

Samuelson, P. L., Jarvinen, M. J., Paulus, T. B., Church, I. M., Hardy, S. A., & Barrett, J. L. (2015). Implicit theories of intellectual virtues and vices: A focus on intellectual humility. *Journal of Positive Psychology*, *10*(5), 389–406. https://doi.org/10.1080/17439760.2014.967802

Schnabel, A., & Hjerm, M. (2014). How the religious cleavages of civil society shape national identity. *SAGE Open,* 1-14. DOI: 10.1177/2158244014525417

Sianturi, E.M.T. (2011). *Implikasi Kesepakatan Damai (MOU) Helsinki Terhadap Integrasi Nasional.* Diunduh dari http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/implikasi-kesepakatan-damai-mou-helsinki-terhadap-integrasi-nasional

Umam, A. N., Muluk, H., & Milla, M. N. (2018). The need for cognitive closure and belief in conspiracy theories: An exploration of the role of religious fundamentalism in cognition. In A. . Ariyanto, H. Muluk, P. Newcombe, F. P. Piercy, E. K. Poerwandari, & S. H. R. Suradijono (Eds.), *Diversity in Unity: Perspectives from Psychology and Behavioral Sciences* (pp. 629–637). New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Van Leeuwen, E., & Mashuri, A. (2013). Intergroup helping in response to

separatism. *Personality and Social Psychology Bulletin*, *39*(12), 1647-1655. DOI: 10.1177/0146167213499613

Vaughan, G.M. & Hogg, M.A. (2005). *Introduction to Social Psychology* (4th Ed.). Australia: Pearson Education, Inc.

Verkuyten, M. (2005). *The Social Psychology of Ethnic Identity.* East Sussex: Psychology Press.

Yogeeswaran, K., & Dasgupta, N. (2015). Conceptions of national identity in a globalised world: Antecedents and consequences. European Review of Social Psychology, *25*(1), 189–227. DOI: 10.1080/10463283.2014.972081

Safitri, Shahnaz. *Becoming 'we' as a nation: The role of intellectual humility in social cognition.* *Indonesia, renowned for its Unity in Diversity, is a nation-state of multiethnic and multicultural citizens. Social researchers from various field of study are all agree that the concept of nation, as a single and autonomous political entity, is basically an imaginative output of human reasoning in uniting different groups of people as a union. Thus, psychological dynamic of individual becomes the key to the continuation of nation, through the attachment in seeing themselves as homogeneous with other people coming from the same nation. However, nationalism is seemed to be a constant contestation that needs to be fostered from time to time. This is due to the presence of various other social groups besides nation with their own social identities, capable of attracting people to regard them as their main identity in determining self-views and behavior. Furthermore, efforts to conceptualize and strengthen national identity by carrying out the theme of ethnic-based nation, as often occurs in various countries, tend to trigger the stratification of ethnic groups as majority and minority with arbitrary boundaries. In contemporary civilizations where variation among individuals is the main theme, appreciation of social identity including nationality is a long-life evaluation happening on person's social cognition. In this process, the role of cognitive characteristics namely intellectual humility can support individuals to adapt optimally in differences without losing their own view and further losing their identity. In addition, intellectual humility is promising to harmonize various kinds of social identities that individuals possess and maintaining peaceful interaction among citizens.*

Saya Tionghoa dan Saya Indonesia: Identitas Sosial dan Kepuasan Hidup

Clara Moningka

Pendahuluan

Tahukah anda berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, warga negara yang mengaku keturunan Tionghoa adalah sebesar 2.832.510 orang atau berjumlah 1,20% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 236.728.379 orang. Hal ini menjadi menarik, karena berdasarkan sumber Perpustakaan Universitas Ohio tahun 2000, jumlah penduduk etnis Tionghoa di Indonesia mencapai 7.310.000 jiwa dan menempati peringkat ke 3 setelah suku Jawa dan Sunda. Jumlah ini merupakan komunitas etnis Tionghoa yang terbesar yang berada di luar Tiongkok. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 diidentifikasi pula bahwa mayoritas etnis Tionghoa saat ini tinggal di daerah Perkotaan, yaitu sebanyak 2.643.134 orang (93,31%), sedangkan sisanya yang berjumlah 189.376 orang (6,69%) tinggal di daerah Pedesaan (Koten, 2017).

Etnis Tionghoa sudah berada di Indonesia sejak abad ke-9 untuk berdagang. Pada akhirnya banyak dari mereka menetap bahkan menikah dengan warga lokal. Datangnya kebudayaan baru memberikan warna baru bagi kebudayaan Indonesia karena adanya proses akulturasi. Kedua kebudayaan ini hidup berdampingan dengan damai sampai kedatangan VOC (*Veregnigde Oost Indische Compagnie*). Kedatangan VOC dengan politik memecah belah berusaha memisahkan warga Tionghoa dan warga setempat. Politik ini dilakukan karena VOC ingin mengambil alih perdagangan yang sebelumnya banyak dilakukan oleh orang Tionghoa. Politik ini kemudian menimbulkan adanya prasangka pada etnis ini (Wijayakusuma dalam Moningka & Wijaya, 2015).

Pada kenyataannya, etnis Tionghoa juga mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan sampai puncaknya yaitu pada tahun 1740 yang dikenal dengan tragedi Angke yang merupakan pembantaian sekitar 10.000 etnis Tionghoa karena dianggap ingin mengambil alih Batavia. Kejadian tersebut membekas pada warga pribumi yang tanpa disadari mempertahankan adanya prasangka tersebut. Moningka dan Wijaya (2015) dalam penelitiannya mengenai orientasi akulturasi WNI Tionghoa mengemukakan bahwa prasangka yang masih muncul saat ini merupakan bentuk ketidaksadaran kolektif (*collective unconsciousness*). Prasangka ini memunculkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang terus berlanjut, mulai dari larangan menggunakan nama Tionghoa, larangan merayakan

imlek (tahun baru menurut penanggalan Cina), sampai kerusuhan anti Cina pada Mei 1998 (Moningka & Wijaya, 2015). Padahal tidak sedikit individu keturunan Tionghoa yang merasa sangat Indonesia dan bersedia berjuang untuk membesarkan nama Indonesia.

Perlakuan diskriminatif ini menyebabkan banyak WNI keturunan Tionghoa merasa tidak aman, merasa mendapat perlakuan tidak adil sehingga timbul *Meta prejudice.* Konsep ini merujuk pada keadaan dimana kelompok tertentu, dalam hal ini etnis Tionghoa merasakan dirinya mendapatkan prasangka walaupun belum tentu hal itu terjadi. Banyak teman-teman dari keturunan Tionghoa yang merasa dipersulit saat mengurus surat-surat ataupun mendaftarkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun banyak etnis lain yang mungkin mendapatkan kesulitan yang sama. Untuk mendapatkan rasa aman, banyak pula keturunan Tionghoa yang kemudian mengganti nama dengan nama yang dianggap lebih Indonesia, bahkan ada yang mulai menghilangkan identitas ke-Cinaan mereka, misalnya tidak berupaya mempraktikkan dan memelihara budaya mereka (Moningka, 2018).

Berbagai kejadian ini dapat mempengaruhi WNI keturunan Tionghoa dalam memaknai identitas sosial mereka, yaitu bagaimana mereka merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman identitas sosial mereka, penulis melakukan wawancara pada 4 orang WNI keturunan Tionghoa yang masuk dalam kategori generasi *Boomers* (lahir pada tahun1946 -1965) dan generasi X (lahir pada tahun 1966 – 1979). Pengelompokan generasi ini dilakukan dengan asumsi bahwa suatu generasi yang lahir dalam periode sejarah tertentu cenderung dipengaruhi oleh pengalaman yang serupa sehingga akan menunjukkan karakteristik perilaku yang serupa pula. Pada penelitian sosial seperti penelitian identitas sosial, variabel etnis dan *co-hort* (generasi) memang menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Hal ini selaras juga dengan definisi generasi dari Kupperschmidt (2000), yaitu suatu kelompok individu dengan rentang usia tertentu yang mengalami peristiwa kehidupan sama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa kejadian Mei tahun 1998 merupakan peristiwa yang cukup membekas bagi etnis Tionghoa dan hal ini membuat mereka mempertanyakan kembali identitas mereka sebagai WNI keturunan Tionghoa. Oleh karena itu pengalaman peristiwa Mei 1998 dijadikan salah satu kriteria penting dalam pemilihan responden penelitian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa responden yang masuk kategori genereasi X, cenderung enggan meneruskan tradisi yang sudah ada karena tradisi tersebut cenderung menonjolkan budaya Tionghoa atau Cina. Hal ini dirasakan

semakin menunjukkan bahwa mereka adalah warga minoritas sehingga semakin dirasakan tidak aman dan membuat mereka mengalami disonansi identitas sosial. Meskipun demikian, responden yang masih tinggal di kawasan pecinaan, merasa lebih bebas menonjolkan budaya mereka. Hasil wawancara ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Moningka dan Wijaya (2015) yang menunjukkan bahwa orientasi akulturasi yang diadopsi oleh WNI keturunan Tionghoa adalah integrasi, dimana mereka merasa sebagai bagian dari Indonesia namun juga diliputi perasaan tidak aman atau cemas. Pada beberapa aspek kehidupan, seperti pernikahan mereka memilih orientasi separatis, yaitu memilih untuk menikah dengan sesama etnis Tionghoa dengan tujuan mempertahankan garis keturunan dan budaya mereka.

Tulisan ini, pada dasarnya merupakan hasil penelitian lanjutan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana identitas sosial WNI keturunan Tionghoa dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan hidup mereka. Pada uraian selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai identitas sosial dan kepuasan hidup. Secara lebih khusus, penulis akan menguraikan tentang kepuasan hidup dan bagaimana identitas sosial dapat memberikan kontribusi pada variabel ini, khususnya pada WNI keturunan Tionghoa.

Kepuasan Hidup sebagai Bagian dari Kesejahteraan Subjektif

Berdasarkan tulisan Moningka dan Wijaya (2015) dapat diidentifikasi bahwa WNI keturunan Tionghoa kerap mendapatkan prasangka. Prasangka yang ada menimbulkan diskriminasi dan perilaku lain yang tidak menyenangkan (Pitaloka, dkk, 2018). Pengalaman terhadap perlakuan yang memang tidak menyenangkan dan persepsi mereka sendiri terhadap perlakuan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kelompok ini merasakan kebahagiaan.

Kesejahteraan hidup seringkali dikaitkan dengan perasaan bahagia. Snyder, Lopez, dan Pedrotti (2011) mengemukakan bahwa kesejahteraan subjektif sering diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), bentuk dari aktualisasi diri, dan bagaimana individu merasa puas dalam hidupnya.

Hefferon dan Boniwell (2011) mendefinisikan *subjective well-being* sebagai sejauhmana individu merasakan kepuasan hidup, dan biasanya afek positif yang dirasakan cenderung tinggi, sementara itu afek negatif yang dirasakan cenderung rendah. Kepuasan hidup sendiri merupakan komponen kognitif dari kesejahteraan subjektif yaitu bagaimana seseorang menilai kehidupannya selama ini.

Diener (1984, 2000) juga menjelaskan bahwa kesejahteraan subjektif meliputi bagaimana seseorang berpikir (aspek kognitif) dan merasakan (aspek

afektif) mengenai kehidupannya, yang meliputi rentang waktu yang luas (masa lampau dan saat ini) dan berbagai aspek kehidupan. Menurut Diener (2009) aspek kognitif dari kesejahteraan subjektif merupakan hal yang penting karena cenderung stabil dan melibatkan evaluasi individu terhadap seluruh aspek kehidupannya. Proses merasa puas pada dasarnya bersifat independen, dan tidak bersifat situasional. Hal ini juga ditekankan oleh Gilbert (2007) bahwa kepuasan hidup cenderung bertahan dibandingkan kondisi bahagia secara umum.

Individu akan puas terhadap hidupnya ketika ia memahami apa yang terjadi pada hidupnya, memiliki informasi yang objektif, dan memiliki informasi atau pemikiran yang rasional mengenai keadaannya. Dalam proses ini fungsi kognitif menjadi sangat penting. Kepuasan hidup menjadi menarik untuk diteliti karena kepuasan hidup merupakan penilaian yang cenderung rasional dan tidak hanya berfokus pada perasaan, namun memfokuskan pada manusia sebagai mahluk yang rasional (Haybron, 2001; Slote, 1982).

Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subjektif khususnya Kepuasan Hidup

Campbel (1976) mengemukakan bahwa harga diri positif merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi kepuasan hidup seseorang. Harga diri yang positif mengindikasikan bahwa individu cenderung mampu beradaptasi dan memiliki hubungan interpersonal yang baik pula. Harga diri seseorang bisa dipengaruhi oleh bagaimana individu memandang dirinya, namun juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana individu memandang kelompoknya. Konsep ini didefinisikan oleh Crocker dan Luhtanen (1990) sebagai harga diri kolektif.

Hal lain yang dapat mempengaruhi bagaimana individu merasa puas terhadap hidupnya adalah bagaimana individu mampu mengontrol situasi dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya (Compton, 2005). Jika dikaitkan dengan tema tulisan ini, kelompok minoritas yaitu WNI keturunan Tionghoa cenderung merasa sulit untuk mengontrol situasi yang kerap dihubungkan dengan keberadaan mereka, seperti kerusuhan Mei 1998 yang pada awalnya merupakan demonstrasi menggulingkan Orde Lama. Peristiwa lain seperti kasus Ahok, juga menorehkan luka pada mereka.

Selain harga diri dan *sense of control*, ada faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kepuasan hidup, seperti kepribadian yang terbuka, optimisme, hubungan yang berarti dengan orang lain, dan tujuan hidup. Diener, dkk (2017) mengemukakan bahwa aspek kepuasan hidup lebih banyak dipengaruhi evaluasi sistematis yang dilakukan individu terhadap hidupnya. Pengukuran aspek ini berhubungan dengan hal yang bersifat jangka panjang, seperti kepuasan kerja, pendapatan, perubahan, kejadian atau kebijakan di suatu negara.

Mendukung pendapat dari Diener, Ackerman (2018) mengemukakan empat faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan hidup yang bersifat jangka panjang seperti perubahan yang terjadi dalam kehidupan, pengalaman yang memberikan inspirasi dan evaluasi menyeluruh terhadap kehidupannya.

Penelitian mengenai kepuasan hidup di berbagai negara menunjukkan bahwa kepuasan hidup dipengaruhi oleh kondisi di negara tersebut. Individu yang hidup di negara yang liberal dan bebas akan merasa lebih puas dan bahagia (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017). Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kepuasan hidup adalah tingkat pendidikan (Ackerman, 2018; Salinas-Jiménez, Artés, & Salinas- Jiménez, 2011). Kesehatan mental, kepribadian, dan kemampuan berempati juga ditengarai dapat mempengaruhi kepuasan hidup. Di lain pihak, individu yang merasa puas terhadap kehidupannya juga cenderung lebih sehat dan bahagia (Strine, Chapman, Balluz, Moriarty, & Mokdad, 2008). Luhman, Lucas, Eid, dan Diener (2013) serta Diener dan Chan (2011) mengemukakan bahwa individu yang puas terhadap hidupnya akan lebih sukses dan lebih sehat.

Identitas Sosial sebagai Prediktor Kepuasan Hidup pada Waga Negara

Di Indonesia, kepuasan hidup individu diperhitungkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) sejak tahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 2017). Meskipun demikian BPS belum menjelaskan bagaimana kepuasan hidup etnis tertentu. Data yang diperoleh juga tidak dikaitkan dengan pemahaman individu terhadap identitas sosial khususnya pada Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa.

Identitas menunjukkan keunikan individu dan merupakan suatu ruang antara individu dengan orang lain (Taylor & Spencer, 2004). Oleh karena itu, identitas diri tidak pernah bisa dilepaskan dari kelompok sosialnya. Selaras dengan hal tersebu, Verkuyten (2006) menjelaskan bahwa identitas sosial mengacu pada kelompok tempat individu digolongkan, yang akan mempengaruhi bagaimana posisi individu dalam lingkungan sosialnya (Gecas & Burke, 1995). Identitas sosial dapat digolongkan berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, agama, dan lain sebagainya (Abrams & Hogg, 1990).

Kelompok adalah tempat individu menciptakan ikatan emosional dan dapat membuat individu merasa berharga. Oleh karena itu seseorang bisa mempunyai harga diri kolektif, yaitu harga diri yang dilekatkan pada status kelompok tempat ia bergabung menjadi anggotanya. Konsep harga diri kolektif dikemukakan oleh Crocker dan Luhtanen (1990) yang membagi harga diri kolektif menjadi beberapa aspek, yaitu: (1) keanggotaan (*membership*), (2) harga diri kolektif secara personal (*private collective self-esteem*) yaitu evaluasi individu sebagai bagian dari kelompoknya, (3) harga diri kolektif publik (*public collective*

self-esteem), yang merupakan persepsi individu pada penilaian orang lain terhadap kelompoknya, dan (4) Identitas (*Identity*), yaitu makna keanggotaan pada suatu kelompok bagi dirinya.

Penelitian yang telah dilakukan penulis bertujuan menjelaskan bagaimana identitas sosial dapat menjadi prediktor kepuasaan hidup pada WNI keturunan Tionghoa. Penelitian ini cukup koheren dengan fenomena yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian terhadap 126 WNI keturunan Tionghoa di Jakarta, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara identitas sosial sebagai Warga Negara Indonesia dengan kepuasan hidup (r=0,540, p<0,05). Kontribusi variabel identitas sosial terhadap kepuasan hidup WNI keturunan Tionghoa sebesar 29,2%.

Karena keberagaman kultural merupakan hal yang penting dalam penelitian kepuasan hidup dan kebahagiaan (Hovert & Sibley, 2013; Longhi, 2014), maka peneliti tertarik untuk membandingkan identitas sosial dan kepuasan hidup antara etnis Tionghoa (n=126) dengan etnis non Tionghoa (n=174). Hasil analisis uji t menunjukkan ada perbedaan yang signifikan pada variabel identitas sosial antara responden keturunan Tionghoa ($\bar{X}$=5.05) dan non keturunan ($\bar{X}$=5.77), *t*= -6.74, *p*=.00. Perbedaan signifikan juga muncul pada variabel kepuasan hidup antara responden keturunan Tionghoa ($\bar{X}$=5.12) dan non keturunan ($\bar{X}$=5.47), *t*= -3.129, *p*=.002. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa WNI keturunan Tionghoa cenderung memiliki identitas sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan non keturunan. Hasil penelitian ini cukup bisa menjelaskan hasil wawancara awal yang telah dilakukan peneliti.

Mengapa bisa demikian? Meskipun peran mereka cukup besar dalam memajukan Indonesia, etnis ini kerap mendapatkan perlakukan diskriminatif (Moningka & Wijaya, 2015). Sebagai kelompok minoritas yang kerap mendapatkan prasangka, sebenarnya banyak dari WNI keturunan Tionghoa yang memberikan kontribusi nyata untuk bangsa Indonesia, seperti ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, memajukan bidang pendidikan, olahraga, industri, dan lain sebagainya. Namun keterlibatan mereka kurang diperhitungkan dan dihargai oleh masyarakat, hal ini kemungkinan besar berpengaruh pada rendahnya identitas sosial WNI keturunan Tionghoa sebagai warga negara Indonesia.

Pemisahan antara pribumi dan non-pribumi, dalam hal ini etnis Tionghoa melebar, setelah terbitnya Keputusan Presidium No.127/U/Kep/12/1967 tentang anjuran pemerintah untuk mengganti nama Tionghoa dengan nama bernuansa Indonesia. Diikuti dengan Inpres No.14/1967 yang salah satu poinnya adalah melarang keturunan Tionghoa menampilkan adat istiadat dan kebudayaan mereka di muka umum (Lutfi dalam Putra, Satriyanto,

& Meinarno, 2011). Keputusan dan inpres ini membuat etnis Tionghoa merasa menjadi *out-group* walaupun mereka adalah bagian dari Indonesia yang mengakibatkan renggangnya ikatan emosional mereka dengan Indonesia (Putra, Satriyanto, & Meinarno, 2011).

Rizal (dalam Prihandoko, 2012) mengungkapkan bahwa orang-orang Tionghoa sempat dianggap sebagai roh jahat setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Mereka dianggap memiliki andil dalam organisasi-organisasi yang berideologi kiri atau komunis.

Pada masa G30S/PKI, orang Tionghoa kerap dianggap memiliki peran dalam memasukkan paham komunis di Indonesia (Rizal dalam Prihandoko, 2012) dan hal ini menimbulkan trauma bagi banyak warga keturunan Tionghoa. Luka yang ada semakin dalam dengan terjadinya tragedi Mei 1998 yang banyak menelan korban dari kelompok etnis ini.

Prasangka terhadap etnis Tionghoa kembali muncul saat Jakarta dipimpin oleh Plt.Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada periode pemerintahannya, ia kerap mendapatkan penolakan karena alasan ras dan agama (*double minority*). Juditha (2018) mengemukakan bahwa selama periode kampanye, Ahok kerap mendapatkan pernyataan kebencian (*hate-speech*) yang dihubungkan dengan etnisnya.

Problem identitas menjadi hal yang utama pada WNI keturunan Tionghoa, sehingga mereka enggan berbaur, khususnya dalam sektor pendidikan. Mereka kerap mencari sekolah yang komunitasnya berasal dari etnis yang sama karena enggan menjadi sasaran diskriminasi. Rizal (dalam Prihandoko, 2012) menjelaskan bahwa hal ini dapat memperlambat proses pembauran.

Moningka dan Wijaya (dalam Moningka, 2018) dalam penelitiannya mengenai orientasi akulturasi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa menjelaskan bahwa bahwa 115 dari 176 responden memilih orientasi akulturasi integrasi, dimana kelompok minorias berusaha beradaptasi, mengikuti budaya kelompok mayoritas. Dalam hal ini mereka juga mempertahankan budaya asal dan berpandangan positif terhadap kedua budaya yang ada. Namun sebagian responden juga beranggapan bahwa sekeras apapun usaha mereka, mereka tetap mendapatkan prasangka dan perlakuan diskriminasi.

Individu yang mengalami diskriminasi pada dasarnya cenderung sulit berbaur dan memiliki prasangka pada out-group (Berry, Phinney, Sam, & Vedder, 2006). Prasangka yang merupakan *meta-prejudice*, yaitu persepsi kelompok atau etnis tertentu bahwa kelompok atau etnis lain memiliki persepsi atau evaluasi tertentu terhadap kelompok mereka (Putra, 2016).

Dengan berbagai peristiwa dan pengalaman yang sarat dengan prasangka dan diskriminasi, maka tidak heran jika banyak WNI keturunan

Tionghoa berusaha untuk menghindari sebutan Cina atau Tionghoa (Holmes, 2016). Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebenarnya perlu ada usaha dari pemerintah untuk memulihkan hubungan antar kelompok etnis, khususnya antara warga peranakan dan warga lokal sebagai upaya pemulihan trauma. Pemerintah juga perlu mencanangkan pendidikan yang berbasis multikultural dan merekognisi peran etnis Tionghoa dalam sejarah perjuangan bangsa. Misalnya, seperti penetapan John Lee yang beretnis Tionghoa sebagai pahlawan nasional.

Kesimpulan dan Saran

Dari berbagai pendapat dan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pengalaman individu, khususnya WNI keturunan Tionghoa dapat mempengaruhi bagaimana individu membentuk identitas sosial. Identitas sosial, yaitu bagaimana individu merasa dirinya menjadi bagian dari bangsa Indonesia dapat mempengaruhi kepuasan hidup. Dengan berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia, termasuk konflik antar etnis dan adanya pihak-pihak yang berusaha memecah belah persatuan bangsa, tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana suatu kelompok/ etnis ketika mendapatkan perlakuan yang dianggap tidak menyenangkan dan bagaimana hal tersebut dapat mengancam persatuan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya usaha meningkatkan toleransi dan tidak mempertajam perbedaan yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya pembauran kelompok minoritas dan mayoritas. Seperti melakukan kampanye toleransi, pagelaran budaya bersama, dan pendidikan berbasis multikultural. Saat ini, di Universitas, seperti Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) di Tangerang Selatan sudah mengupayakan hal tersebut. Pada mata kuliah agama, mahasiswa tidak diajarkan muatan agama, namun bagaimana mereka dapat membentuk sikap toleransi pada keberagaman.
2. Kelompok minoritas juga perlu menyadari *meta-prejudice* dan perlu mengubah cara berpikir mereka.
3. Meningkatkan usaha memperkuat identitas sosial sebagai Warga Negara Indonesia dengan menyediakan ruang untuk dialog inklusif. Dialog ini dapat melibatkan masyarakat umum, pemuka agama dan berbagai kelompok etnis.
4. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat meningkatkan persatuan, seperti meningkatkan peran olahraga, pendidikan, dan lain sebagainya.

Daftar Acuan

Abrams, D., & Hogg, M. A. (Eds.). (1990*). Social identity theory: Constructive and critical advances*. New York, NY, US: Springer-Verlag Publishing.

Ackerman, C. (2018). *Life satisfaction theory and 4 contributing factors*. Diunduh dari https://positivepsychologyprogram.com/life-satisfaction/#difference-between.

Badan Pusat Statistik. (2017). Indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2017*. Berita Resmi Statistik*, No. 79/08/Th XX.

Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L., & Vedder, P. (2006). Immigrant youth: acculturation, identity, and adaptation. *Applied Psychology: An International Review, 55*(3), 303-332. http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-0597.2006.00256.x

Campbell, A. (1976). Subjective Measures of Well-Being. *The American psychologist*. 31. 117-24. 10.1037/0003-066X.31.2.117.

Compton, W. C. (2005). *An introduction to positive psychology*. Virginia: Thompson/Wadsworth.

Crocker, J., & Luhtanen, R. (1990). Collective self-esteem and in group bias. *Journal of Personality and social Psychology 58*, 60-67.

Diener, E. (1984). Subjective well-being. *Psychological Bulletin 95*, 542-575.

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for National Index. *American Psychologist*, 55(1), 34 -43. http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34.

Diener, E. (2009). Assessing well-being: The collected work of Ed Diener. *Social Indicators Research Series 39*. New York, NY: Springer.

Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. *Applied Psychology: Health and Well-Being,* 3, 1–43. doi:10.1111/j.1758- 0854.2010.01045.x

Diener, E., Heintzelman, S. J., Kushlev, K., Tay, L., Wirtz, D., Lutes, L. D., Oishi, S. (2017). Findings all psychologists should know from the new science on subjective well-being. *Canadian Psychology/Psychologie Canadienne*, 58, 87-104.

Gecas, V., & Burke, P. J. (1995). Self and identity. In K. Cook, G. A. Fine, & J. S. House (Eds.). *Sociological perspectives on social psychology (pp. 41-67)*. Boston: Allyn and Bacon.

Gilbert, D. (2007). *Stumbling happiness*. New York: Vintage books.

Holmes, O. (2016, November 25). Jakarta's violent identity crisis: behind the vilification of Chinese-Indonesians. Diunduh dari https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/25/jakarta-chinese-indonesians-

governor-ahok

Haybron, D.M. (2001). Happiness and the importance of life satisfaction. *Draft*. Presented on New Jersey Regional Philosophical Association's.

Hefferon, K., & Boniwell, I. (2011). *Positive psychology: Theory, research and applications.* London: McGraw-Hill.

Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2017). *World Happiness Report 2017*. New York: Sustainable Development Solutions Network.

Hoverd, W. J., & Sibley, C. G. (2013). Religion, deprivation and subjective wellbeing: Testing a religious buffering hypothesis. *International Journal of Wellbeing, 3*(2), 182-196. doi:10.5502/ijw.v3i2.5

Juditha, C. (2018, Maret 6). Ujaran kebencian menyebar via media sosial saat pilkada DKI Jakarta, apakah portal berita terlibat? Diunduh dari http://theconversation.com/ujaran-kebencian-menyebar-via-media-sosial-saat-pilkada-dki-jakarta-apakah-portal-berita-terlibat-92413

Koten, T. (2017, Agustus 22). *Ingin tahu jumlah populasi etnis Tionghoa di Indonesia? Baca dulu ini!* Diunduh dari https://www.netralnews.com/news/rsn/read/96632/ingin-tahu-jumlah-populasi-etnis-tionghoa-di-indonesia-baca-dulu-ini

Kupperschmidt, B. R. (2000). Multigenerational employees: Strategies for effective management. *The Health Care Manager, 19,* 65–76.

Longhi, S. (2014). Cultural diversity and subjective well-being. *IZA Journal of Migration 3*, 13. doi**:** 10.1186/2193-9039-3-13.

Luhmann, M., Lucas, R., Eid, M., & Diener, E. (2013). The Prospective Effect of Life Satisfaction on Life Events. *Social Psychological and Personality Science.* 4. 39-45. 10.1177/1948550612440105.

Moningka, C. & Wijaya, S. (2015). Merentang diskriminasi, merentang persaudaraan. Dalam Pangabean H., Supratiknya, A., Utama, J. S. A. (Eds). *Revolusi mental: Makna dan Realisasi.* Jakarta, Indonesia: Himpunan Psikologi Indonesia.

Moningka, C. (2018). Psikologi sosial dan permasalahan sosial: Hidup dalam dunia multikultural. Dalam Pitaloka, A., Abidin, Z, & Milla, M.N. (Eds). Psikologi sosial: Pengantar dalam teori dan penelitian.

Prasetyo, D. (2014). Persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap figur dan komunikasi politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). *Politika*, 5 (2).

Prihandoko. (2012). Kenapa Etnis Cina di Indonesia Masih Trauma? Diunduh 8 Maret 2018 dari https://nasional.tempo.co/read/378818/kenapa-etnis-cina-di-indonesia-masih-trauma.

Putra, I. (2016). Taking seriously ingroup self-evaluation, meta-prejudice, and prejudice in analyzing interreligious relations. *The Spanish Journal of*

Psychology. 19. 10.1017/sjp.2016.48.

Putra, I. E., Satriyanto, T., & Meinarno, E. A. (2011). Ingatan sejarah dan figur pemimpin pada pribumi 'Jawa' dan non-pribumi 'Tionghoa'. *Jurnal Ilmiah Psikologi 5*, 1, 1-14.

Salinas Jiménez, M., Artés, J,, & Salinas-Jimenez, J. (2011). Education as a sositional good: A life satisfaction approach. *Social Indicators Research*. 103. 409-426. 10.1007/s11205-010-9709-1.

Snyder, C. R., Lopez, S. J., & Pedrotti, J. T. (2011). *Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths 2nd Ed*. California, Ca: SAGE Publication.

Slote, M. (1982). Goods and lives. *Pacific Philosophical Quarterly.* 63: 311-26.

Strine, T., Chapman, D., Balluz, L., Moriarty, D., & Mokdad, A. (2008). The Associations between life satisfaction and health-related quality of life, chronic illness, and health behaviors among U.S. *Community-dwelling Adults. Journal of community health*. 33. 40-50. 10.1007/s10900-007-9066-4.

Taylor, G., & Spencer, S. (Ed) (2004). *Social identities: A multi-disciplinary approach*. Oxon, England: Routledge.

Verkuyten,M. (2006). Multicultural recognition and ethnic minority rights: A social identity perspective. *European Review of Social Psychology*, 17, 1, (148).

Moningka, Clara. *I am Chinese and I am Indonesian. Social identity and satisfaction in life.* *Chinese ethnicity has existed in the archipelago since the 9th century with the aim of trading and many of them settled down. Their culture gives a new color to Indonesian culture. In its development, this ethnic group has become a significant ethnic group in Indonesia and is considered to control the economy. Prejudice against Chinese also developed and often led to conflict. With this phenomenon, the author is interested to see the social identity of Chinese-Indonesians. This research is a quantitative study. Participants in this study were Chinese-Indonesians who stayed in Jakarta (n=126). The instruments used in this study were Social Identity Scale and Life Satisfaction Scale. The data were analized using regression technique. Based on this research, it can be identified that social identity as an Indonesian contributed to individual life satisfaction (R^2= .292, $F(1,124)$=51,095), $p<0.05$). Comparison analysis showed that Chinese-Indonesians' social identity were lower than non Chinese. Implications of these results were discussed in this article.*

Dari Identitas Nasional Menjadi Identitas Diri

Rifqi Muhammad

Pendahuluan

Pemilu atau pemilihan umum menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Budiman (2015), Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Dalam undang-undang pemilu dan penyelenggaraan pemilu yang menjadi turunannya kemudian ditambahkan beberapa kriteria lagi, yakni transparan, akuntabel, tertib, dan profesional.

Pelaksanaan Pemilu sesuai enam parameter Pemilu demokratis menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya, Pemilu tahun 2019 ini baik sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan parameter pemilu demokratis. Beberapa persoalan yang penulis inventarisir meliputi konflik antar teman dan anggota keluarga karena berbeda pilihan, ditemukannya surat suara yang tercoblos, munculnya kasus ujaran kebencian, munculnya kasus hoaks, di beberapa tempat mahasiswa tidak dapat memberikan hak suara, keterlamabatan logistik, media mempublikasikan hasil perhitungan cepat yang memihak salah satu paslon, per tanggal 7 Mei 2019 data dari KPU RI bahwa 4.310 petugas KPPS sakit, 456 meninggal, serta munculnya istilah makar dan teroris di akhir pemilu. Persoalan-persoalan tersebut sesungguhnya dapat memantik konflik dan bermuara pada disintegrasi nasional. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan pemilu sebagai salah satu instumen untuk menciptakan integrasi bangsa.

Presiden Soekarno berwasiat bahwa tugas berat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah mengutamakan pelaksanaan *nation and caracter building*. Identitas atau kepribadian bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang berbudi halus, sopan dalam sikap, santun dalam tindakan, sangat toleran, memiliki solidaritas yang tinggi, dan nasionalisme yang kuat serta mengakar (Erwin, 2012). Namun sekarang manusia Indonesia cenderung kurang

tulus dan suka menggunakan topeng, berbeda antara perkataan dan perbuatan, tidak bisa memegang janji, menghindari tanggung jawab, berperilaku munafik, berorientasi pada keduniaan serta materialisme semata (Erwin, 2012).

Tantangan besar bagi setiap manusia Indonesia adalah membangun karakter yang berangkat dari dalam. Proses menjadi dan menemukan kedirian bangsa tersebut dituntut untuk dapat mengakar 'menjadi identitas diri' Indonesia. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini. Berdasarkan paparan tersebut, tulisan ini bermaksud mendeskripsikan *breakdown* identitas nasional menjadi identitas diri dalam perspektif psikologi. Dengan kata lain, identitas nasional di-*breakdown* menjadi identitas diri dan diberi makna dari sudut pandang ilmu jiwa.

Identitas Nasional

Identitas nasional menurut Erwin (2012) adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian atau karakter suatu bangsa. Menurut Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (2011), identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain.

Identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas dapat diartikan sebagai karakter, ciri, tanda, jati diri ataupun sifat khas, sementara nasional artinya bangsa. Maka identitas nasional merupakan karakter, ciri, tanda, jati diri atau sifat khas kepribadian suatu bangsa (Erwin, 2012). Hakikat identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain (Monteiro, 2015). Dengan demikian, identitas nasional berlandaskan pada jati diri yang bersumber dari nilai-nilai budaya suatu bangsa sehingga identitas nasional memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan nasional.



Gambar 1. Identitas nasional.

Lahir dan disepakatinya identitas nasional telah diawali dengan adanya kesadaran politik bangsa Indonesia sebelum bernegara. Kesadaran politik itu ditandai dengan tumbuhnya semangat kebangsaan sebagai gerakan menentang penjajahan dan mewujudkan Indonesia sebagai negara. Dengan kata lain, semangat kebangsaan yang tumbuh kuat dalam diri personal bangsa Indonesia turut menjadi faktor pendukung terbentuknya identitas nasional Indonesia.

Selanjutnya, identitas nasional dapat diukur melalui parameter identitas nasional. Menurut Srijanti, dkk. (2011), parameter identitas nasional berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas suatu bangsa. Identitas Nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam UUD 1945 dalam pasal 35-36 C. Berdasarkan pasal 35-36 tersebut ada sepuluh parameter identitas nasional, sebagai berikut:

Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.

Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila berisi lima nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia.

Lagu Kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pada tanggal 28 Oktober 1928 dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara.

Lambang Negara, yaitu Garuda Pancasila. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara.

Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu, menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

Bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Konstitusi (hukum dasar) negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam

tata urutan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah Republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disepakati untuk tidak ada perubahan.

Konsepsi Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk mencapai tujuan nasional.

Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa Indonesia yang dimiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas merupakan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional pada dasarnya adalah puncak dari kebudayaan daerah.

Secara umum unsur yang terkandung dalam identitas nasional menurut Triwahyuni (2011), meliputi pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan fungsi identitas nasional menurut Noormansyah (2014) ada tiga. *Pertama,* identitas nasional merupakan jawaban terhadap pertanyaan mengenai identitas individu dalam ruang global melalui identifikasi pada kebangsaan. *Kedua,* identitas nasional menawarkan penghargaan dengan menjadi bagian dari komunitas politik yang bersifat *super family*. *Ketiga,* identitas nasional merealisasikan perasaan yang *fratern* khususnya melalui penggunaan simbol-simbol identitas ataupun seremonial.

Jika merujuk pada fungsi pertama identitas nasional sebagai jawaban atas pertanyaan terkait identitas individu, berarti identitas nasional dapat mewakili identitas diri. Sebagai contoh jika ditanya "dari negara manakah Anda berasal?" maka jawabannya "saya berasal dari negara Indonesia". Pertanyaan selanjutnya, "bahasa apa yang Anda gunakan?" Maka jawabannya "bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia". Hal ini sejalan dengan pendapat Rosliwa Somantri (2010) bahwa jati diri merupakan moralitas publik yang menjadi pegangan kehidupan orang per orang dalam sebuah bangsa. Dengan kata lain, jati diri bangsa dapat menjadi jati diri atau identitas diri yang berdasarkan pada parameter identitas bangsa.

Identitas Diri dalam Perspektif Psikologi

Erikson (1989), psikolog asal Jerman yang dikenal sebagai pakar psikologi perkembangan dan psikoanalisis, mendefinisikan identitas diri dengan lima pengertian. *Pertama*, identitas diri merupakan intisari seluruh kepribadian yang tetap tinggal sama dalam diri seseorang walaupun situasi lingkungan berubah dan diri menjadi tua. *Kedua*, identitas diri merupakan keserasian peran sosial yang pada prinsipnya dapat berubah dan selalu mengalami proses pertumbuhan. *Ketiga*, identitas diri merupakan gaya hidup seseorang yang berkembang melalui tahap-tahap sebelumnya dan yang menentukan cara-cara seseorang mewujudkan peran sosialnya. *Keempat*, identitas diri merupakan pengalaman subjektif akan kesamaan serta kesinambungan batiniah seseorang dalam ruang dan waktu. *Kelima*, identitas diri merupakan kesinambungan dengan diri sendiri dalam pergaulan dengan orang lain.

Erikson juga memberikan pengertian bahwa identitas diri merupakan konsepsi tentang diri, penentuan tujuan, nilai, dan keyakinan yang dipegang teguh oleh seseorang (Papalia, Wendkos, Duskin, 2008). Pencarian identitas diri mencakup proses menentukan keputusan apa yang penting dan patut dikerjakan serta merumuskan standar tindakan dalam mengevaluasi perilaku diri sendiri dan perilaku orang lain, termasuk di dalamnya perasaan harga diri dan kompetensi diri (Atkison, Atkinson dan Hilgard, 1996). Menurut definisi ini identitas diri merupakan suatu mekanisme internal yang mampu menyediakan kerangka pikir untuk mengarahkan seseorang dalam menilai dirinya sendiri dan orang lain serta menunjukkan perilaku yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan.

Istilah pencarian identitas diri merupakan usaha untuk memperkuat suatu konsep *self* yang bermakna, dengan merangkum semua pengalaman berharga di masa lalu, realitas kekinian yang terjadi termasuk aktivitas yang dilakukan sekarang serta harapan di masa akan datang menjadi sebuah *kesatuan gambaran tentang self yang utuh*, *berkesinambungan dan unik* (Erikson, 1989). Lebih lengkap Santrock (2011) menegaskan bahwa identitas diri merupakan gambaran diri yang disusun dari macam-macam tipe identitas, meliputi identitas karier, identitas politik, identitas agama, identitas hubungan dengan orang lain, identitas intelektual, identitas seksual, identitas etnik, identitas minat, identitas kepribadian, dan identitas fisik.

Selain itu menurut Rifqi Muhammad (2018), ada mekanisme pencarian identitas diri menurut perspektif al-Ghazali yang diungkap dengan lima pertanyaan ajaib. *Pertama*, siapakah saya dan darimana saya datang? Jawabannya adalah saya hamba Allah dan datang dari Allah. *Kedua*, ke mana saya akan pergi ?

Jawabannya adalah saya akan pergi ke akhirat untuk diadili oleh Allah. *Keempat*, apa tujuan persinggahan saya di dunia ini? Jawabannya adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk di bawa ke akhirat dan beribadah kepada Allah. *Kelima*, di manakah kebahagiaan sejati dapat ditemui? Jawabannya adalah ketika berjumpa dengan Allah. Identitas diri menurut al-Ghazali ini merupakan identitas Muslim, atau dengan kata lain identitas diri yang berdasarkan pada agama Islam.

Menurut Embong (2009), faktor-faktor yang dapat digunakan dalam membentuk identitas ada yang melekat pada kondisi sosial, geografis, etnik, gender dan kebangsaan. Sebagai contoh, identitas yang berdasarkan agama memunculkan identitas Muslim, identitas Nasrani, identitas Konghucu, dan sebagainya sesuai agama masing-masing. Identitas yang melekat pada kebangsaan atau negara memunculkan identitas nasional Indonesia, identitas nasional Singapura, identitas nasional Brunei Darussalam dan sebagainya.

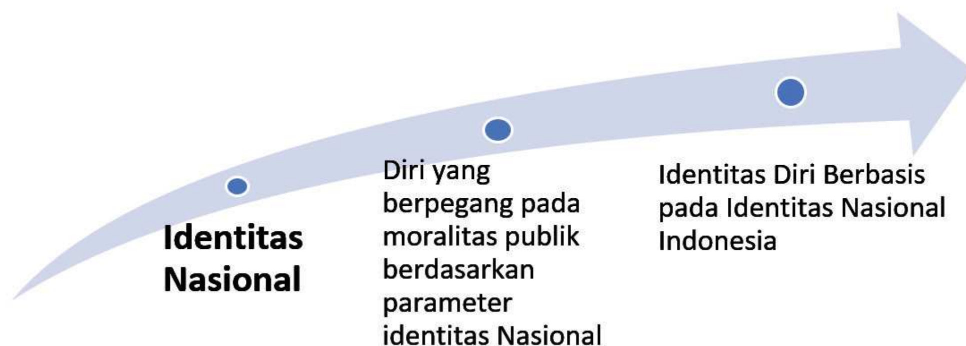
Sebuah kajian menggunakan desain eksplorasi dengan memikirkan, mensinergikan, dan memaknai secara lebih dalam identitas nasional kemudian hasil eksplorasi itu dianalisis konten meliputi *coding, axial coding,* dan *selective coding* (Strauss & Corbin, 2003) sehingga identitas nasional tersebut dapat diturunkan menjadi identitas diri menurut perspektif psikologi. Hasilnya adalah *breakdown* identitas nasional menjadi identitas diri perspektif psikologi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Breakdown Identitas Nasional Menjadi Identitas Diri Perspektif Psikologi

No.	Identitas Nasional		Identitas Diri
1	Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.	➡	Diri yang bisa berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
2	Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila.	➡	Diri yang mengamalkan Dasar Falsafah Negara yaitu Pancasila.
3	Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya.	➡	Diri yang bisa menyanyikan Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya.
4	Lambang Negara, yaitu Garuda Pancasila.	➡	Diri yang mengenal dan memahami Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila.
5	Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika	➡	Diri yang memahami dan mengamalkan Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
6	Bendera negara, yaitu Sang Merah Putih	➡	Diri yang memiliki bendera negara yaitu Sang Merah Putih.
7	Konstitusi (hukum dasar) negara, yaitu UUD 1945.	➡	Diri yang melaksanakan dan mematuhi Konstitusi Negara yaitu UUD 1945.

No.	Identitas Nasional		Identitas Diri
8	Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.	➡	Diri yang mengakui Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
9	Konsepsi Wawasan Nusantara.	➡	Diri yang memahami Konsepsi Wawasan Nusantara.
10	Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.	➡	Diri yang memiliki Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional.

Hasil analisis yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa identitas diri dapat dibentuk berdasarkan identitas nasional. Proses pembentukannya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses identitas nasional menjadi identitas diri perspektif psikologi

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa identitas diri yang diturunkan dari identitas nasional sesungguhnya "menjadi diri" yang memiliki ciri khas Indonesia. Sudut pandang psikologinya terletak pada kenyataan bahwa diri tersebut memiliki ciri khas yang melekat pada dirinya sehingga menjadi kepribadian atau karakternya yang diamalkan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jati diri bangsa menurut Rosliwa Somantri (2010) adalah sesuatu yang membuat kita lekas mengenali kebangsaan seseorang dari tutur kata, perilaku dan pandangannya. Singkatnya jati diri itu sejenis moralitas publik yang menjadi pegangan kehidupan orang per orang dalam sebuah bangsa. Hal ini dapat dideskripsikan melalui tanya-jawab sebagaimana dijelaskan oleh Noormansyah (2014). Menurutnya, identitas nasional merupakan jawaban terhadap pertanyaan mengenai identitas individu dalam ruang global melalui identifikasi kebangsaan.

Di bawah ini adalah tanya jawab terkait *breakdown* identitas nasional menjadi identitas diri perspektif psikologi:

Pertama, "Apakah Anda bisa berbahasa Indonesia?" Jawabannya adalah "Saya bisa berbahasa Indonesia." Jadi, identitas nasional pertama "*Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia*" diturunkan menjadi identitas diri "*Diri yang bisa berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan*"

Kedua, "Apakah Anda mengamalkan Pancasila?" Jawabannya adalah "Saya mengamalkan Pancasila". Jadi, identitas nasional kedua "*Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila*" diturunkan menjadi identitas diri "*Diri yang mengamalkan Dasar Falsafah Negara yaitu Pancasila.*"

Ketiga, "Apakah Anda bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya?" Jawabannya adalah "Saya bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya." Jadi, identitas nasional ketiga "*Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya*" diturunkan menjadi identitas diri "*Diri yang bisa menyanyikan Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya.*"

Keempat, "Apakah Anda mengenal dan memahami Lambang Negara Indonesia?" Jawabannya adalah "Saya mengenal dan memahami Lambang Negara Indonesia." Jadi, identitas nasional keempat "*Lambang Negara, yaitu Garuda Pancasila*" diturunkan menjadi identitas diri "*Diri yang mengenal dan memahami Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila*".

Kelima, "Apakah Anda memahami dan mengamalkan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika?" Jawabannya adalah "Saya memahami dan mengamalkan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika." Jadi, identitas nasional kelima "*Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika*" diturunkan menjadi identitas diri "*Diri yang memahami dan mengamalkan Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika.*"

Keenam "Apakah Anda memiliki Bendera Merah Putih?" Jawabannya adalah "Saya mengetahui dan memiliki Bendera Merah Putih." Jadi, identitas nasional keenam "*Bendera negara, yaitu Sang Merah Putih*" diturunkan menjadi identitas diri "*Diri yang memiliki bendera negara yaitu Sang Merah Putih.*"

Ketujuh, "Apakah Anda melaksanakan dan mematuhi Konstitusi?" Jawabannya adalah "Saya melaksanakan dan mematuhi Konstitusi." Jadi, identitas nasional ketujuh "*Konstitusi (hukum dasar) negara, yaitu UUD 1945*" diturunkan menjadi identitas diri "*Diri yang melaksanakan dan mematuhi Konstitusi Negara yaitu UUD 1945.*"

Kedelapan, "Apakah Anda mengakui Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia?" Jawabannya adalah "Saya mengakui Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia". Jadi, identitas nasional kedelapan "*Bentuk Negara*

Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat" diturunkan menjadi identitas diri "*Diri yang mengakui Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat."*

Kesembilan, "Apakah Anda memahami konsepsi wawasan nusantara?" Jawabannya adalah "Saya memahami konsepsi wawasan nusantara." Jadi, identitas nasional kesembilan "*Konsepsi Wawasan Nusantara"* diturunkan menjadi identitas diri "*Diri yang memahami Konsepsi Wawasan Nusantara."*

Kesepuluh, "Apakah Anda memiliki kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional?" Jawabannya adalah "Saya memiliki kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional." Jadi, identitas nasional kesepuluh "*Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional"* diturunkan menjadi identitas diri "*Diri yang memiliki Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional"*

Dapat disimpulkan bahwa *breakdown* identitas nasional menjadi identitas diri perspektif psikologis adalah diri yang berpegang pada moralitas publik berdasarkan parameter identitas nasional Indonesia.

Penutup

Berdasarkan hasil *breakdown* identitas nasional menjadi identitas diri perspektif psikologi dapat disimpulkan bahwa identitas diri memiliki sepuluh aspek sesuai sepuluh aspek identitas nasional. Sepuluh aspek identitas diri hasil *breakdown* identitas nasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Diri yang bisa berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
2. Diri yang mengamalkan Dasar Falsafah Negara yaitu Pancasila.
3. Diri yang bisa menyanyikan Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya.
4. Diri yang mengenal dan memahami Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila.
5. Diri yang memahami dan mengamalkan Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
6. Diri yang memiliki bendera negara yaitu Sang Merah Putih.
7. Diri yang melaksanakan dan mematuhi Konstitusi Negara yaitu UUD 1945.
8. Diri yang mengakui Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
9. Diri yang memahami Konsepsi Wawasan Nusantara.
10. Diri yang memiliki Kebudayaan daerah yang telah diterima Kebudayaan Nasional.

Akhir kata dan sebagai saran praktis, identitas diri perspektif psikologi yang di-*breakdown* dari identitas nasional sebagaimana diuraikan di atas kiranya perlu ditelaah secara lebih dalam oleh para ahli psikologi, sehingga dapat dirumuskan sebagai konsep dan konstruk identitas yang bisa di-*share* secara luas dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Acuan

Atkison, R.L. Atkinson, R.C. & Hilgard, E.R. (1996). Pengantar psikologi. Jakarta: Erlangga.

Budiman, Arief. (2015). Strategi mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas. Program Pascasarjana Unej. Naskah Kuliah Umum. Diakses dari http://pasca.unej.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/jember-revisi-Strategi-Mewujudkan-Pemilu-Berkualitas-dan-Berintegritas.pdf

Embong, Abdul Rahman. (1999). Identiti dan pembentukan identiti (Identity and identity formation). Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities, 55 (1). 3-5. Diakses dari http://ejournal.ukm.my/akademika/article/view/3010/1919

Erikson, Erick, H. (1989). Identitas dan siklus hidup manusia. Bunga Rampai 1 (Penerjemah: Agus Cremers). Jakarta: Gramedia.

Erwin, M. (2013). Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Santrock, J.W. (2011). Life span development. Perkembangan masa-hidup. (Ed. ke-13; Penerjemah: Benedictine Widyasinta). Jakarta: Erlangga.

Monteiro, Josef M. (2015). Pendidikan kewarganegaraan: perjuangan membentuk karakter bangsa (Ed. ke-1). Yogyakarta: Deepublish.

Muhammad, Rifqi. (2018). Identitas diri menurut Al-Ghazali. Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 8(2). 159-169. DOI: http://dx.doi.org/10.29080%2Fjbki.v8i2.83

Noormansyah, Reza. Signifikansi identitas nasional dalam globalisasi: Studi kasus olahraga otomotif global, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 3(2). 777-794. Diakses dari http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi7ffd87ec642full.pdf

Papalia, D.E., Wendkos, S., & Duskin, R. (2008). Human development (Psikologi perkembangan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Atkison, R.L., Atkinson, R.C., & Hilgard, E.R. (1996). Pengantar psikologi. Jakarta: Erlangga

Rusliwa Somantri, Gumilar. (2010). Jati diri bangsa. Disampaikan pada Seminar Etnopedagogik dan Pengembangan Budaya Sunda yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda Sekolah Pascasarjana UPI. Diakses dari http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/SEMINAR_ETHNOPEDAGOGY/Jati_Diri_Bangsa.pdf

Srijanti, dkk,. (2011). Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi: Mengembangkan etika berwarga negara. Jakarta: Salemba Empat.

Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Dasar-dasar penelitian kualitatif: Tatalangkah dan teknik-teknik teoritisasi data (Penerjemah: Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Triwahyuni, Dewi. (2011). Identitas nasional dan tantangan era globalisasi, PKWN, UNIKO. Di akses dari: https://repository.unikom.ac.id/48327/1/PKWN%20II.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Muhammad, **Rifqi.** ***From national identity into self-identity.*** *Issues that arise before, during and after the 2019 Election are a disruption to Indonesia's national integration. This paper aims to describe the self-identity of the psychological perspective which is a breakdown from Indonesia's national identity. An exploration research showed that self identity consists of ten aspects broken down from the national identity, namely (1) a self that can speak Indonesian as the language of unity; (2) a self who practices the State Philosophy of Pancasila; (3) a self that can sing the National Anthem, namely Indonesia Raya; (4) a self who knows and understands the National Symbol, namely Garuda Pancasila; (5) a self who understands and practices the Country Motto, namely Unity in Diversity;(6) a self that knows the country's national flag, namely the Red and White; (7) a self who implemenst and complies with the State Constitution, namely the 1945 Constitution; (8) a self that recognizes the Form of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely people's sovereignty;(9) a self that understands the Conception of Nusantara Archipelago; and (10) a self that has a regional culture that has been accepted by the National Culture.*

Menumbuhkan Nasionalisme melalui Identitas Moral dan Tujuan Hidup pada Generasi Muda

Livia Yuliawati

Sebagai kelompok dengan jumlah 34-50% dari total jumlah pemilih, suara generasi milenial–individu yang berusia 40 tahun ke bawah–memiliki kontribusi yang signifikan dalam penentuan hasil Pemilu 2019 (Helmy, 2018; Jurnaliston, 2018; Rahmat & Yonata, 2018). Meskipun suara generasi muda ini bernilai signifikan, namun kurangnya minat serta partisipasi mereka terhadap isu politik dan kebangsaan menjadi salah satu masalah yang ditemukan pada beberapa kajian studi. Hanya terdapat 23,4% milenial saja yang mengikuti perkembangan situasi politik melalui pemberitaan media (Utomo dkk, 2019). Lebih lanjut, partisipasi generasi muda melalui beberapa aktivitas seperti turut mengkritisi kebijakan pemerintah, berpartisipasi untuk menyatakan aspirasi melalui unjuk rasa, serta menjadi anggota partai politik juga masih tergolong rendah (Juditha & Darmawan, 2018). Catatan dari Pemilu 2014, selain menggunakan hak pilih, bentuk partisipasi politik yang dilakukan pemilih pemula masih sebatas pada mendiskusikan isu politik dan belum banyak yang turut memperkenalkan maupun mengkampanyekan partai politik atau kandidat tertentu (Morissan, 2016). Sacipto (2019) juga menemukan bahwa citra yang buruk mengenai politik sebagai alat mengejar kekuasaan semata serta beberapa kasus korupsi yang menjerat pejabat publik ditengarai sebagai penyebab ketidakpedulian generasi milenial terhadap isu-isu politik.

Di tengah keadaan tersebut, ternyata generasi milenial masih memiliki pandangan optimis pada keberagaman, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demokrasi, kondisi politik, keamanan Indonesia (Utomo dkk, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa di tengah rendahnya minat dan partisipasi generasi muda sebagai warga negara, mereka masih memiliki harapan mengenai keadaan Indonesia di masa depan.

Penulis menggagas bagaimana menumbuhkan kepedulian generasi muda pada isu politik dan kebangsaan sehingga hal tersebut tidak hanya muncul pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, kepala negara, atau anggota legislatif yang dilakukan tiap lima tahun sekali. Kepedulian tersebut seyogyanya ditumbuhkan melalui pendekatan yang bersifat jangka panjang dan lebih terintegrasi dengan pengembangan diri individu. Dengan kata lain, kepedulian generasi muda pada isu politik dan kebangsaan dapat berawal dari motivasi intrinsik sebagai warga negara Indonesia. Harapannya, partisipasi aktif di dalam

peran sebagai warga negara dapat menjadi bagian dari siapa diri individu dan apa yang mereka ingin capai di masa depan.

Identitas Moral

Pendekatan pertama yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian pada isu kebangsaan adalah melalui identitas moral. Identitas moral didefinisikan sebagai aspek moral dari identitas seseorang yang memberikan arahan tentang apa yang benar dan salah. Individu yang memiliki identitas moral akan melibatkan pertimbangan dan tindakan moral dalam tujuan yang ingin dicapai (Hardy & Carlo, 2011). Individu yang menganggap identitas moralnya sebagai hal yang penting justru akan termotivasi untuk bertindak selaras dengan identitas moralnya (Aquino & Reed II, 2002). Lebih lanjut, individu yang menganggap bahwa nilai moral adalah bagian dari identitas dirinya cenderung akan mengembangkan siapa dirinya di masa depan berdasarkan nilai moral yang dimilikinya. Dengan demikian, individu yang memiliki identitas moral dalam mengejar tujuan bukan hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan orang lain.

Studi lainnya juga menemukan bahwa partisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan (*civic engagement*) akan dapat dilakukan oleh individu secara berkelanjutan jika didasarkan pada keyakinan dan nilai moral seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, serta keluhuran (Malin, Tirri, & Liauw, 2015). Dengan demikian, apabila keyakinan dan nilai-nilai moral telah menjadi bagian dari identitas diri individu maka hal ini akan berdampak pada motivasi yang bertahan lebih lama daripada hanya sekedar motivasi untuk menolong orang lain melalui jalur politik.

Selain itu, identitas moral ditemukan memiliki hubungan positif dengan kesediaan untuk memberikan bantuan finansial pada kelompok yang berbeda dengan individu (Reed II & Aquino, 2003). Individu yang menganggap nilai moralnya sebagai bagian dari identitasnya cenderung memiliki cakupan pertimbangan moral yang lebih luas. Dalam pertimbangan moral dan tindakannya, mereka tidak hanya melihat tindakan moralnya dilakukan sebatas pada keluarga atau orang terdekat saja, namun juga mencakup pada kelompok yang lebih besar atau seluruh umat manusia. Oleh karena itu, individu dengan identitas moral cenderung merasakan hidupnya lebih berarti (Han, Liauw, & Kuntz, 2018). Mereka dapat melihat keberadaan diri mereka dan apa yang mereka lakukan sebagai kontribusi pada kehidupan orang lain.

Hal yang penting bagi remaja berikut dengan periode transisinya memasuki masa dewasa awal *(emerging adults),* di mana mereka mengidentifikasi,

mengeksplorasi, dan berkomitmen pada identitas diri dan kelompok sosialnya, untuk memiliki keterlibatan sebagai warga negara (*civic engagement)* (Lannegrand-Willems, Chevrier, Perchec, & Carrizales, 2018). Dengan menanamkan identitas moral pada generasi muda sejak dini, mereka akan menempatkan pertimbangan moral dan kepedulian dalam melihat isu-isu politik dan kebangsaan. Alih-alih bersikap acuh dikarenakan hal-hal buruk dari praktek politik seperti korupsi, kampanye hitam, dan sebagainya; individu dengan identitas moral justru akan gelisah untuk menyuarakan hal yang benar, bahkan berpartisipasi aktif untuk kepentingan bangsa.

Tujuan Hidup

Sebagai tindak lanjut dari identitas moral, kepedulian pada isu kebangsaan dapat diinternalisasikan melalui tujuan hidup (*purpose in life*). Individu dengan identitas moral akan mendefinisikan akan menjadi siapa diri mereka di masa depan berdasarkan nilai-nilai moral yang mereka anggap penting (Aquino & Reed II, 2002). Tujuan hidup adalah suatu tujuan utama yang memunculkan tujuan-tujuan lain yang sifatnya jangka pendek, di mana hal tersebut akan menjadi arah bagi perilaku, serta membuat hidup terasa berarti (McKnight & Kashdan, 2009). Tujuan hidup juga didefinisikan sebagai suatu intensi yang stabil dan luas untuk mencapai sesuatu yang bermakna bagi diri sendiri serta memberikan kontribusi pada hal-hal di luar diri individu (Damon, Menon, & Bronk, 2003). Secara sederhana, tujuan hidup adalah alasan seseorang untuk hidup yang mengarahkan akan menjadi seperti apa atau siapa di kemudian hari.

Beberapa penelitian mengemukakan manfaat positif dari keberadaan tujuan hidup bagi remaja dan *emerging adults.* Individu yang memiliki tujuan hidup akan memiliki kepuasan hidup (Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006), resiliensi (Masten & Reed, 2002), kemampuan yang lebih baik untuk pulih dari pengalaman negatif (Schaefer dkk, 2013), dan memiliki risiko sakit yang lebih rendah (Hill & Turiano, 2014).

Selain manfaat tujuan hidup yang berorientasi pada diri sendiri, seperti memiliki karir yang bagus, memperoleh penghargaan dari orang lain, tujuan hidup juga dapat diorientasikan pada hal-hal di luar diri individu, seperti menolong orang lain dan menjadikan dunia lebih baik (Bronk & Finch, 2010). Lebih lanjut, Bronk dan Finch (2010) menemukan bahwa remaja yang mampu menggabungkan tujuan yang berorientasi pribadi dan kebutuhan orang lain akan memiliki kepuasan hidup dan makna hidup yang lebih tinggi jika dibandingkan pada mereka yang belum memiliki tujuan hidup yang jelas dan hanya berorientasi pada diri sendiri. Dengan kata lain, hidup terasa bermakna

ketika individu dapat menemukan bahwa apa yang ingin dicapai ternyata juga berdampak bagi orang lain. Oleh karena itu, meskipun tujuan hidup adalah hal yang bersifat personal, namun manfaat terbesar dari tujuan hidup adalah ketika individu menemukan kombinasi antara keunikan diri dengan kebutuhan orang lain. Dengan demikian, tujuan hidup tidak hanya memberikan manfaat bagi diri individu, namun juga memberikan dampak bagi orang lain.

Proses seseorang menemukan tujuan hidup tidak terjadi di ruang kosong. Dukungan dari pihak di luar individu, seperti keluarga, mentor, dan teman serta sekolah, maupun komunitas rohani, berperan penting pada bagaimana tujuan hidup individu dapat dikembangkan (Moran, Bundick, Malin, & Reilly, 2013). Hal. Tersebut dikarenakan tujuan hidup tidak dapat dilepaskan dari lingkungan di mana individu bereksplorasi. Individu dapat memperoleh inspirasi mengenai tujuan hidup dari komunitas keagamaan, keluarga, panggilan karir. Aktivitas politik dan kewarganegaraan juga dapat menjadi sumber inspirasi individu berkaitan dengan tujuan hidupnya (Bronk, 2013)

Mengajarkan keterlibatan sebagai warga negara dapat mendorong tujuan hidup (Koshy & Mariano, 2011). Meskipun tidak semua individu memiliki tujuan hidup yang berkaitan langsung dengan kewarganegaraan, namun peran dan kesadaran sebagai warga negara tidak dapat benar-benar dipisahkan dari tujuan hidup seseorang.

Berbagai bentuk tujuan hidup individu, disadari atau tidak, memuat kontribusinya sebagai warga negara. Beberapa individu memiliki tujuan hidup yang bersifat religius, misalnya ingin melayani Tuhan atau menjadi seorang ustaz. Dalam melayani atau berdakwah, mereka juga turut berkontribusi membina kehidupan iman dari bangsa Indonesia. Begitu juga dengan mereka yang ingin mengembangkan tujuan hidup yang terkait dengan seni atau olahraga. Mereka yang meraih prestasi tertinggi dalam suatu kejuaraan, disadari atau tidak, sangat berkontribusi sebagai warga negara. Prestasi atlet Indonesia adalah prestasi bagi bangsa Indonesia di mana rakyat Indonesia lainnya juga turut berbangga dengan capaian tersebut. Musisi dan pekerja seni lain yang menghasilkan karya seni juga turut memajukan dan memperkenalkan budaya dan kualitas karya seni bangsa Indonesia. Apa yang ingin dicapai oleh para dokter, perawat, tenaga kesehatan melalui tujuan hidupnya berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan mengingatkan dan mengomunikasikan kontribusi sebagai warga negara, maka isu-isu kebangsaan diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai tujuan hidup yang digagas oleh generasi milenial. Bagaimanapun, tujuan hidup yang ingin dicapai individu memiliki dampak yang lebih luas dalam konteks kebangsaan. Dengan memperluasnya, individu akan memperoleh motivasi dan rasa bermakna yang lebih kuat dalam mengejar tujuan hidupnya.

Tidak menutup kemungkinan, individu dapat memiliki tujuan hidup untuk menjadi wakil rakyat, pejabat publik, pengurus partai politik, maupun peran lain yang terkait dengan politik. Tujuan hidup semacam ini disebut sebagai *civic purpose. Civic purpose* adalah suatu niat berkelanjutan untuk berkontribusi pada hal-hal di luar diri individu melalui kegiatan politik atau kegiatan kewarganegaraan (Malin, Ballard, & Damon, 2015). Ketika generasi muda mengerti bahwa menjadi wakil rakyat adalah tujuan hidup yang dipilih untuk berkontribusi pada masyarakat luas yang dilandaskan pada nilai moral, maka hal ini dapat meminimalkan kemungkinan partisipasi politik individu yang didasari motivasi memperkaya diri dan mengejar kekuasaan semata karena tidak ada pilihan profesi yang lebih menguntungkan.

Saran praktis

Berikut ini adalah beberapa saran praktis agar identitas moral dan tujuan hidup dapat ditumbuhkan melalui pendidikan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pertama, konsep-konsep kewarganegaraan dapat diangkat sebagai topik diskusi pembelajaran di kelas (Hok-ka, Wing-fung, & Cheung-ming, 2016). Selain sebagai bentuk aplikasi dari apa yang dipelajari, hal tersebut menolong peserta didik untuk memiliki kesadaran tentang apa masalah konkrit yang dialami masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Youniss (2011) juga merekomendasikan adanya diskusi dan debat mengenai isu kewarganegaraan yang difasilitasi dalam kegiatan kelas. Dengan mengangkat tema-tema yang relevan dengan situasi politik dan kebangsaan terkini, generasi muda diharapkan dapat mengeksplorasi identitas secara luas. Hal ini juga membuka kekritisan dan wawasan mereka terhadap adanya pemikiran yang beragam, serta bagaimana menyikapinya dengan bermartabat.

Kedua, mendorong generasi muda untuk terlibat dalam komunitas yang ada di sekitarnya. Studi yang dilakukan secara longitudinal pada remaja oleh Pratt, Hunsberger, Pancer, & Alisat, (2003) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam komunitas adalah prediktor identitas moral. Remaja yang melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan komunitas cenderung menginternalisasi nilai moral dan prososial dalam identitas dirinya. Program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dapat menjadi sarana memfasilitasi partisipasi pada isu kebangsaan yang dijumpai secara konkrit pada komunitas di sekitar individu (Hok-ka dkk, 2016).

Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan remaja dalam bentuk kegiatan kepemimpinan dan kegiatan sukarela berkontribusi positif pada pengembangan tujuan hidup (Bundick, 2011). Pada studi lain mengenai identitas dan partisipasi politik, remaja yang telah mengeksplorasi dan berkomitmen

pada identitas dirinya mendapati bahwa partisipasi dalam kegiatan sukarela dapat menjadi wadah untuk berkontribusi pada masyarakat (Crocetti, Jahromi, & Meeus, 2012). Memberikan informasi mengenai kesempatan menjadi sukarelawan dalam kegiatan yang bernuansa kebangsaan atau magang di institusi yang memiliki perhatian pada isu kebangsaan dapat dirancang sebagai bagian dari desain pembelajaran atau kurikulum. Selain itu, kepedulian dapat dimanifestasikan dalam beberapa kegiatan, semisal ikut menyuarakan aspirasi melalui pengajuan petisi, ikut serta dalam gerakan kampanye sosial (*fundraising*), mengajak rekan lainnya untuk tidak golput, dan sebagainya.

Keempat, dalam program pengembangan karir, eksplorasi pilihan karir dalam bidang politik dapat diperkenalkan sehingga generasi muda menjadi familiar dengan contoh-contoh *civic purpose*. Mengundang tokoh publik sebagai *role model* yang memiliki *civic purpose* dan identitas moral dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda yang tengah mengeksplorasi siapa diri mereka dan apa yang ingin dilakukan di masa depan. Apabila individu berminat untuk mengejar tujuan hidup yang tidak terkait langsung dengan bidang politik, relevansi tujuan hidup mereka dan dampaknya dalam konteks sebagai warga negara juga dapat didiskusikan dan dipersiapkan. Hal tersebut dapat dimanifestasikan pada beberapa hal, semisal pada wirausaha adalah bagaimana ia menyadari dan memahami perannya sebagai warga negara dengan menaati pajak, memberikan upah yang layak pada pekerjanya, dan turut menjaga kelestarian alam negeri ini dalam menjalankan usahanya.

Penutup

Signifikansi jumlah suara dari generasi muda serta optimisme yang masih mereka miliki pada kondisi politik dan kesatuan bangsa Indonesia ke depan memberikan harapan bagi kita bahwa kepedulian generasi muda ini adalah hal yang dapat kita bina. Beberapa upaya dalam mendorong partisipasi politik generasi milenial pada periode menjelang pemilihan umum dapat dilakukan dengan memakai bahasa keseharian yang lebih familiar, menggunakan kandidat atau juru bicara politik yang lebih muda, serta memanfaatkan komunikasi melalui media sosial. Namun demikian, hal tersebut merupakan upaya jangka pendek, yang lebih penting dan bersifat jangka panjang adalah bagaimana menghadirkan dan menumbuhkan kepedulian generasi muda pada isu kebangsaan melalui identitas moral dan tujuan hidup. Pendekatan yang bersifat jangka panjang dengan penanaman nilai yang lebih integral yang tertanam dalam diri individu dapat menumbuhkan kepedulian generasi muda pada isu kebangsaan secara berkelanjutan.

Daftar Acuan

Aquino, K., & Reed II, A. (2002). The self-importance of moral identity. *Journal of Personality and Social Psychology, 83*(6), 1423-1440.

Bronk, K. C. (2013). *Purpose in life: A critical component of optimal youth development*. Dordrecht: Springer.

Bronk, K. C., & Finch, W. H. (2010). Adolescent characteristics by type of long-term aim inl life. *Applied Developmental Science, 14*(1), 35-44. doi:10.1080/10888690903510331

Bundick, M. J. (2011). Extracurricular activities, positive youth development, and the role of meaningfulness of engagement. *Journal of Positive Psychology, 6*(1), 57-74. doi:10.1080/17439760.2010.536775

Crocetti, E., Jahromi, P., & Meeus, W. (2012). Identity and civic engagement in adolescence. *Journal of Adolescence, 35*(3), 521-532. doi:10.1016/j.adolescence.2011.08.003

Damon, W., Menon, J., & Bronk, K. C. (2003). The development of purpose during adolescence. *Applied Developmental Science, 7*(3), 119-128. doi:10.1207/S1532480XADS0703_2

Han, H., Liauw, I., & Kuntz, A. F. (2018). Moral identity predicts the development of presence of meaning during emerging adulthood. *Society for the Study of Emerging Adulthood*. doi:https://doi.org/10.1177/2167696818758735

Hardy, S. A., & Carlo, G. (2011). Moral identity: What is it, how does it develop, and is it linked to moral action? *Child Development Perspectives, 5*(3), 212-218.

Helmy, B. (2018). Generasi milenial dalam integritas politik bangsa. *Antaranews*. Diambil dari https://pemilu.antaranews.com/berita/769638/generasi-milenial-dalam-integritas-politik-bangsa

Hill, P. L., & Turiano, N. A. (2014). Purpose in life as a predictor of mortality across adulthood. *Psychological Science, 25*(7), 1482-1486. doi:10.1177/0956797614531799

Hok-ka, C. M., Wing-fung, C. C., & Cheung-ming, A. C. (2016). The long-term impact of service-learning on graduates' civic engagement and career exploration in Hong Kong. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 20*(4), 37-56.

Juditha, C., & Darmawan, J. (2018). Penggunaan media digital dan partisipasi politik generasi milenial. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 22*, 94-109.

Jurnaliston, R. (2018). Suara generasi milenial sangat potensial dalam pemilu. *Kompas*. Diambil dari https://nasional.kompas.com/

read/2018/05/07/15570811/suara-generasi-milineal-sangat-potensial-dalam-pemilu

Koshy, S. I., & Mariano, J. M. (2011). Promoting youth purpose: A review of the literature. *New Directions for Youth Development, 132*, 13-29. doi:10.1002/yd.425

Lannegrand-Willems, L., Chevrier, B., Perchec, C., & Carrizales, A. (2018). How is civic engagement related to personal identity and social identity in late adolsecents and emerging adults? A person-oriented approach. *Journal of Youth and Adolescence, 47*(4), 731-748. doi:10.1007/s10964-018-0821-x

Malin, H., Ballard, P. J., & Damon, W. (2015). Civic purpose: An integrated construct for understanding civic development in adolescence. *Human Development, 58*, 103-130. doi:10.1159/000381655

Malin, H., Tirri, K., & Liauw, I. (2015). Adolescent moral motivations for civic engagement: Clues to the political gender gap? *Journal of Moral Education, 44*(1), 34-50. doi:10.1080/03057240.2015.1014324

Masten, A. S., & Reed, M. G. J. (2002). Resilience in development. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), *Handbook of Positive Psychology* (pp. 74-88). New York: Oxford University Press.

McKnight, P. E., & Kashdan, T. B. (2009). Purpose in life as a system that creates and sustains health and well-being: An integrative, testable theory. *Review of General Psychology, 13*(3), 242-251.

Moran, S., Bundick, M. J., Malin, H., & Reilly, T. S. (2013). How Supportive of Their Specific Purposes Do Youth Believe Their Family and Friends Are? *Journal of Adolescent Research, 28*(3), 348-377. doi:10.1177/0743558412457816

Morissan. (2016). Tingkat partisipasi politik dan sosial generasi muda pengguna media sosial. *Jurnal Visi Komunikasi, 15*(01), 96-113.

Pratt, M. W., Hunsberger, B., Pancer, M. S., & Alisat, S. (2003). A longitudinal analysis of personal value socialization: Correlates of a moral self-ideal in late adolescence. *Social Development, 12*, 563-585.

Rahmat, A., & Yonata, Y. (2018). Video: Kekuatan pemilih muda di Pilpres 2019. *CNN Indonesia*. Diambil dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181127120709-36-349537/video-kekuatan-pemilih-muda-di-pilpres-2019

Reed II, A., & Aquino, K. F. (2003). Moral identity and the expanding circle of moral regard toward out-groups. *Journal of Personality and Social Psychology, 84*(6), 1270-1286.

Sacipto, R. (2019). Tinjauan wawasan kaum milineal menghadapi pelaksanaan

pesta demokrasi. *Adil Indonesia Jurnal, 1*(1), 61-70.

Schaefer, S. M., Morozink Boylan, J., van Reekum, C. M., Lapate, R. C., Norris, C. J., Ryff, C. D., & Davidson, R. J. (2013). Purpose in life predicts better. emotional recovery from negative stimuli. *PLoS ONE, 8*(11), e80329. doi:10.1371/journal.pone.0080329

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. *Journal of Counseling Psychology, 53*(1), 80-93. doi:10.1037/0022-0167.53.1.80

Utomo, W. P., Lubis, U. Z., Sudradjat, S. A., Utomo, W. P., Nashrillah, F., Aquina, D., . . . Pakusadewo, K. (2019). *Indonesia Millennial Report 2019* Diambil dari https://cdn.idntimes.com/content-documents/indonesia-millennial-report-2019-by-idn-times.pdf

Youniss, J. (2011). Civic education: What schools can do to encourage civic identity and action. *Applied Developmental Science, 15*, 98-103. doi:https://doi.org/10.1080/10888691.2011.560814.

Yuliawati, Livia. *Fostering nationalism through moral identity and purpose in life in the young generation.* *Despite significant number of young voters in determining Indonesian election results, several studies reported that these voters tended to show low interest and participation in political and civic issues. Fortunately, they still expressed an optimistic view toward unity, diversity, and democracy in Indonesia. To cultivate young generation's concern to political and civic issues, a long-term yet intrinsically motivated approach is proposed through moral identity and purpose development. Moral identity refers to identity aspect that guides what is right and wrong. Civic engagement can be sustained when individuals are motivated by moral beliefs and values which is deep-rooted in their identity. Having a purpose in life provides beneficial effect on young adults' positive psychological outcomes since individuals combine what they are going to be and what they can contribute to society. Through purpose development, individuals are encouraged to find the relevance of their purpose with their role as citizen. Furthermore, civic purpose can be introduced to adolescents and emerging adults as possible life aim that can be explored as contribution to the greater good.*

Hubungan antar Suku Bangsa dalam Kampus

Rini Nurahaju

This country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, nor to any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with customs and traditions, but the property of all of us from Sabang to Merauke
–Soekarno-

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas serta memiliki jumlah penduduk yang besar yang meliputi beragam suku bangsa. Perbedaan latar belakang dan ragam budaya bisa memperkaya bangsa Indonesia jika dikelola dengan baik, namun juga berpotensi memunculkan konflik jika suku bangsa tertentu merasa lebih baik dibandingkan yang lain.

Dalam relasi keseharian, identitas kesukuan (*cultural identity*), rasisme, dan prasangka (*prejudice*) beberapa kali telah menjadi problem dalam hubungan antar warga. Satriyo (2015) mengatakan bahwa rasisme dapat didefinisikan sebagai prasangka dan diskriminasi. Hal tersebut terwujud dalam berbagai tingkah laku aksi maupun sikap yang mensubordinasi seseorang atau kelompok karena ras, warna kulit, atau etnisitas. Rasisme ini merupakan kepercayaan individu yang melihat suku bangsa tertentu lebih rendah atau tinggi sehingga memunculkan perilaku diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Rasisme muncul sebagai konsep yang dibentuk dan dipelajari. Manifestasi rasisme ini muncul dalam perilaku seseorang sebagai prasangka. Prasangka ini adalah sikap, opini, dan perasaan suka atau tidak suka mengenai seseorang atau kelompok yang dibentuk tanpa pengetahuan, alasan dan pemikiran tertentu.

Di sisi lain, mahasiswa sebagai komponen dari rakyat Indonesia merupakan aset yang berharga dalam menjaga keragaman kekayaan dan kehidupan bangsa Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan perannya sebagai pemimpin di masa datang. Mereka hidup sebagai warga kampus yang tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga menjadi pilar dalam membangun dan menjaga integrasi bangsa. Sebagai bagian dari warga kampus, mereka memiliki tanggung jawab moral dalam mendesain peradaban serta menjadi *agent of change* dalam menunjukkan toleransi antar sesama.

Saat masih duduk di bangku SMA, individu biasanya hidup dengan kelompok yang relatif homogen. Mereka cenderung berasal dari daerah yang sama, begitupun juga agama, bahasa, makanan, ataupun adat istiadat. Setelah

mereka melanjutkan pendidikan tinggi di salah satu kota-kota besar maka mereka mulai berjumpa dengan keragaman baik itu suku, agama, bangsa, dan lapisan sosial. Mahasiswa dituntut untuk beradaptasi dengan keragaman dan situasi yang ada.

Menghadapi situasi tersebut, kampus berperan mengharmonisasi berbagai keragaman, sekaligus menumbuhkan semangat patriotik dan cinta tanah air pada mahasiswa. Oleh lembaga pendididikan tersebut, mahasiswa seyogyanya diberikan kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral untuk memajukan bangsanya.

Jika para mahasiswa memandang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia sebagai sesuatu yang positif maka potensi perpecahan yang muncul di masa depan dapat dihindari. Hal ini karena akan berdampak pada sikap mereka sebagai calon pemimpin bangsa yang dapat bekerjasama secara harmonis dengan semua pihak tanpa terkecuali.

Asumsi di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian deskriptif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal tentang pandangan mahasiswa terkait keragaman yang ada di Indonesia. Pertanyaan penelitian adalah tentang persetujuan, keraguan-raguan, hingga ketidaksetujuan responden mengenai anggapan, sikap, dan hubungan antar suku.

Suparlan dalam Rudito dan Famiola (2013) menuliskan bahwa suku bangsa merupakan sebuah kelompok sosial yang: 1) memiliki sebuah satuan kehidupan yang secara biologis mampu berkembang biak dan lestari dengan adanya perkawinan; 2) mempunyai kebudayaan yang dimiliki bersama dan menjadikannya sebagai pedoman bagi kehidupan yang secara umum berbeda coraknya dengan suku bangsa lain; 3) memiliki keanggotaan dalam suku bangsa yang bercorak askriptif. Pengakuan kesukubangsaan akan muncul dalam interaksi sosial dengan suku bangsa lainnya sehingga jati diri dari satu suku bangsa akan tampak.

Hasil Penelitian/Temuan di Lapangan

Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang melibatkan responden sebanyak 166 orang di suatu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Kriteria responden adalah semua mahasiswa Fakultas Psikologi berbagai angkatan. Jumlah populasi adalah 300 orang. Berdasarkan tabel Isaac dan Michael dengan taraf signifikansi 5 persen (Sugiyono, 2016), maka jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 161. Responden diambil berdasarkan teknik *accidental sampling*. Penelitian dilakukan tahun 2014 pada saat kegiatan seminar fakultas. Tiga responden berasal dari Sumatera (Batak, Aceh dan sekitarnya); 3 orang

dari Kalimantan (Dayak, Banjar dan sekitarnya); 6 orang dari Sulawesi (Bugis, Toraja dan sekitarnya); 100 orang berasal dari Jawa, Madura, dan Bali. Terdapat 30 responden yang tidak mengisi tentang sukunya serta 24 orang mengisi "Indonesia" ketika ditanya terkait suku bangsa. Terdapat 115 perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Dari komposisi agama, sebanyak 146 orang mengisi beragama Islam, Kristen 7 orang, Kristen Protestan 7 orang, Katolik 2 orang, Hindu 1 orang, dan tidak menjawab 3 orang.

Hasil penelitian ini (tabel 1) menunjukkan bahwa responden dengan berbagai latar belakang gender dan agama mengaku menghormati perbedaan agama (97%), adat istiadat (97%), tata susila (83,1%), bahasa daerah (94,6%), dan makanan (87,3%). Persepsi tentang maju tidaknya suku tertentu tidak menjadikan mereka berbeda sikap dengan suku-suku tersebut, baik itu pada suku yang dianggap belum maju (92,2%), maupun sudah maju (87,3%). Mayoritas responden bersikap toleran terhadap suku bangsa lain. Mereka tidak memandang rendah, membenci, ataupun iri terhadap suku bangsa lain yang sudah maju.

Tabel 1
Sikap Mahasiswa tentang Hubungan Antar Suku Bangsa

No	Item	Jawaban			
		Ya	Tidak	Ragu	Tidak Menjawab
1	Apakah saudara menghormati suku bangsa walaupun berbeda agamanya	161 (97%)	1 (0,6%)	2 (1,2%)	2 (1,2%)
2	Apakah saudara menghormati suku bangsa walaupun berbeda adat istiadatnya	161 (97%)	2 (1,2%)	1 (0,6%)	2 (1,2%)
3	Apakah saudara menghormati suku bangsa walaupun berbeda tata susilanya	138 (83,1%)	9 (5,4%)	17 (10,2%)	2 (1,2%)
4	Apakah saudara menghormati suku bangsa walaupun berbeda bahasa daerahnya	157 (94,6%)	1 (0,6%)	5 (3%)	3 (1,8%)
5	Apakah saudara menghormati suku bangsa walaupun berbeda makanannya	145 (87,3%)	8 (4,8%)	11 (6,6%)	2 (1,2%)
6	Apakah saudara menghormati suku bangsa walaupun belum maju	153 (92,2%)	3 (1,8%)	8 (4,8%)	2 (1,2%)
7	Apakah saudara menghormati suku bangsa karena sudah maju	145 (87,3%)	9 (5,4%)	8 (4,8%)	4 (2,4%)

Namun demikian, mayoritas responden menjawab lebih suka bekerjasama dengan mereka yang berasal dari pulau yang sama (82,5%) dibandingkan dengan mereka yang berasal dari pulau yang berbeda. Ini berarti rasa solidaritas sepulau masih kental dirasakan oleh mereka. Ini menguatkan asumsi bahwa suku bangsa yang berdekatan secara fisik bisa jadi tidak perlu banyak menyesuaikan diri. Namun demikian, dalam berinteraksi dengan mereka yang berbeda, mereka mengaku tidak banyak bertengkar (61,4%).

Tabel 2
Relasi Mahasiswa tentang Hubungan Antar Suku Bangsa

No	Item		Jawaban			
			Ya	Tidak	Ragu	Tidak menjawab
1	Dengan suku bangsa lain yang mana saudara lebih suka bekerja sama					
	a.	yang berasal dari lain pulau	97 (58,4%)	31 (18,7%)	34 (20,5%)	4 (2,4%)
	b.	yang berasal dari pulau yang sama	137 (82,5%)	8 (4,8%)	16 (9,6%)	5 (13,4%)
2	Dengan suku bangsa lain yang mana saudara lebih banyak bertengkar					
	a.	yang berasal dari lain pulau	32 (19,3%)	102 (61,4%)	26 (15,7%)	6 (3,6%)
	b.	yang berasal dari pulau yang sama	34 (20,5%)	104 (62,7%)	24 (14,5%)	4 (2,4%)
3	Bagaimanakah pergaulan saudara dengan suku bangsa yang berasal dari lain pulau					
	a.	akrab	120 (72,3%)	17 (10,2%)	23 (13,9%)	6 (3,6%)
	b.	tidak mau bergaul	12 (7,2%)	128 (77,1%)	15 (9%)	11 (6,6%)
	c.	tegang	17 (10,2%)	117 (70,5%)	21 (12,7%)	11 (6,6%)
4	Bagaimanakah pergaulan saudara dengan suku bangsa sendiri					
	a.	akrab	151 (91%)	2 (1,2%)	7 (4,2%)	6 (3,6%)
	b.	tidak mau bergaul	8 (4,8%)	137 (82,5%)	10 (6%)	11 (6,6%)

No	Item		Jawaban			
			Ya	Tidak	Ragu	Tidak menjawab
	c.	tegang	10 (6%)	136 (81,9%)	9 (5,4%)	11 (6,6%)

Mereka mengaku dapat akrab bergaul dengan mereka yang berasal dari suku lain (72,3%), namun persentase keakraban ini lebih besar jika mereka bergaul dengan sesama suku (91%). Sebanyak 77,1 persen mengatakan tidak berkeberatan bergaul dengan suku lain dan 82,5 persen tidak berkeberatan bergaul dengan suku bangsa sendiri. Dari data di atas dapat juga dilihat bahwa persepsi akan terjadinya ketegangan jika bergaul pada suku bangsa dari lain pulau lebih tinggi (10,2%) dibandingkan dengan ketegangan pada suku bangsa sendiri (6%).

Tabel 3
Anggapan Mahasiswa tentang Hubungan Antar Suku Bangsa

No	Item		Jawaban			
			Ya	Tidak	Ragu	Tidak menjawab
1	Bagaimanakah anggapan saudara tentang sifat-sifat positif dari suku bangsa saudara					
	a.	dapat dipercaya	102 (61,4%)	9 (5,4%)	51 (30,7%)	4 (2,4%)
	b.	rendah hati	104 (62,7%)	16 (9,6%)	39 (23,5%)	6 (3,6%)
	c.	teguh pendirian	87 (52,4%)	14 (8,4%)	59 (35,5%)	6 (3,6%)
	d.	sabar	103 (62%)	11 (6,6%)	46 (27,7%)	6 (3,6%)
	e.	pemberani	102 (61,4%)	10 (6%)	49 (29,5%)	5 (3%)
	f.	baik hati	123 (74,1%)	5 (3%)	32 (19,3%)	5 (3%)
	g.	rajin	102 (61,4%)	6 (3,6%)	50 (30,1%)	7 (4,2%)

No	Item		Jawaban			
			Ya	Tidak	Ragu	Tidak menjawab
	h.	sombong	10 (6%)	99 (59,6%)	50 (30,1%)	7 (4,2%)
	i.	lekas marah	42 (25,3%)	65 (39,2%)	53 (31,9%)	6 (3,6%)
	j.	pengecut	10 (6%)	101 (60,8%)	50 (30,1%)	5 (3%)
	k.	jahat	16 (9,6%)	90 (54,2%)	53 (31,9%)	7 (4,2%)
2	Bagaimanakah anggapan saudara tentang sifat-sifat positif dari suku bangsa lain					
	a.	dapat dipercaya	76 (45,8%)	14 (8,4%)	70 (42,2%)	6 (3,6%)
	b.	rendah hati	89 (53,6%)	18 (10,8%)	52 (31,3%)	7 (4,2%)
	c.	teguh pendirian	81 (48,8%)	18 (10,8%)	60 (36,1%)	7 (4,2%)
	d.	sabar	77 (46,4%)	14 (8,4%)	68 (41%)	7 (4,2%)
	e.	pemberani	98 (59%)	6 (3,6%)	54 (32,5%)	8 (4,8%)
	f.	baik hati	99 (59,6%)	7 (4,2%)	54 (32,5%)	6 (3,6%)
	g.	rajin	75 (45,2%)	18 (10,8%)	64 (38,6%)	9 (5,4%)
	h.	sombong	18 (10,8%)	68 (41%)	70 (42,2%)	10 (6%)
	i.	lekas marah	37 (22,3%)	48 (28,9%)	74 (44,6%)	7 (4,2%)
	j.	pengecut	17 (10,2%)	76 (45,8%)	65 (39,2%)	8 (4,8%)
	k.	jahat	19 (11,4%)	75 (45,2%)	63 (38%)	9 (5,4%)

Terkait dengan penilaian atas sifat pada suku bangsa sendiri (tabel 3), responden menganggap bahwa suku sendiri baik hati (74,1%), rendah hati (62,7%), sabar (62%), dapat dipercaya (61,4%), pemberani (61,4%), rajin (61,4%), teguh pendirian (52,4%). Prosentase sifat tersebut lebih rendah jika

responden menilai suku bangsa lain, di mana keseluruhan responden menilai suku lain baik hati (59,6%), pemberani (59%), rendah hati (53,6%), teguh pendirian (48,8%), sabar (46,4%), dapat dipercaya (45,8%), dan rajin (45,2%).

Terhadap sifat-sifat yang negatif, jika diurutkan berdasarkan persentase maka ditemukan bahwa jumlah responden yang menjawab dominan 'tidak' pada anggapan sukunya sendiri adalah pengecut 60,8 persen, jahat 54,2 persen, sombong sebesar 53,6 persen, lekas marah 39,2 persen. Responden dominan menunjukkan respon tidak bahwa suku bangsa lain bersifat pengecut (45,8%) dan jahat (45,2%). Artinya mayoritas responden mempersepsikan bahwa suku bangsa lain tidak pengecut dan tidak jahat.

Bahasan dan Kesimpulan

Hasil penelitian ini memang tidak bisa serta merta digeneralisasikan bahwa mahasiswa mempunyai pandangan yang baik terhadap suku bangsa lain. Penelitian ini masih tergolong sederhana karena masih merupakan studi deskripsi dan tidak menggunakan pendekatan statistik inferensial yang lebih kuat dalam mengambil kesimpulan. Selain itu suku bangsa yang terlibat dalam studi ini relatif kurang beragam.

Namun demikian, jika melihat hasil persentase jawaban responden secara umum, responden memang tidak terlalu mempermasalahkan orang-orang yang bukan berasal dari sukunya sendiri ketika mereka hendak bergaul dan bekerjasama. Walaupun secara persentase mereka memang lebih suka jika bekerja dengan mereka yang sesuku, namun hal ini bisa jadi wajar. Asumsinya, mereka tidak perlu beradaptasi lebih keras karena telah saling mengenal karakteristik sifat yang dimiliki.

Namun demikian beberapa hal tetap perlu diperhatikan oleh institusi pendidikan, terutama terkait dengan pelembagaan keragaman. Hasil penelitian terkait pentingnya pelembagaan keragaman pernah dilakukan oleh Mayhew dkk (2005) pada 544 mahasiswa Universitas Negeri Midwestern. Temuan penelitian ini memberikan panduan khusus bagaimana sebuah lembaga dapat berkomitmen untuk mewujudkan iklim positif terkait keberagaman. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pengalaman siswa yang berkaitan dengan keberagaman berpengaruh terhadap persepsi akan iklim kampus yang positif. Salah satu aspek yang sangat jelas adalah pengaruh kurikulum dan bagaimana prakteknya untuk memperkuat tujuan keragaman. Kemampuan lembaga untuk mencapai iklim positif tercermin dari komitmen fakultas memasukkan isu-isu terkait keragamaan ke dalam agenda akademik mereka.

Lebih lanjut, Umbach (2006) mengatakan bahwa berbagai penelitian

dalam psikologi sosial menunjukkan hubungan antara keragaman interaksi dengan cara berpikir seseorang. Semakin banyak interaksi seseorang dengan orang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda, atau semakin seseorang belajar tentang berbagai aspek keanekaragaman manusia, maka semakin besar kemungkinannya orang akan ditantang untuk berpikir dan berespon dengan cara-cara baru. Lingkungan belajar yang memiki beragam ras dan etnis merangsang pengembangan proses berpikir aktif. Siswa biasanya belajar tentang keragaman bukan dari kelas, tetapi melalui interaksi dengan orang lain yang memiliki pandangan dan budaya yang berbeda dari mereka (Umbach, 2006).

Studi Umbach (2006) di 346 perguruan tinggi menambah pemahaman tentang karakteristik kelembagaan yang terkait dengan pengalaman siswa akan keberagaman. Ia mengatakan bahwa sebagai perguruan tinggi maka universitas semestinya mempersiapkan mahasiswanya untuk hidup dan bekerja dalam iklim demokrasi yang bercirikan keberagaman. Peluang untuk berinteraksi lintas ras, agama, dan sosial-ekonomi menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengalaman dengan keragaman dan untuk menumbuhkan keterampilan yang dianggap penting dalam masyarakat multikultural.

Oleh karenanya, penting bagi institusi untuk dapat melembagakan sikap terkait keberagaman pada setiap warganya di kampus. Lembaga Pendidikan merupakan tempat di mana orang dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras berkumpul. Mereka harus mampu mengejawantahkan kurikulum yang melembagakan keberagaman sebagai keunikan yang mesti dikenal satu sama lain. Universitas perlu melembagakan bahwa perbedaan tidak perlu dipandang sebagai hal yang mengancam, tapi sebagai realita yang pasti dialami dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan negara yang memiliki beragam suku dan budaya.

Daftar Acuan

Mayhew, M., Grunwald, H., & Dey, E. (2005). Curriculum Matters: Creating a Positive Climate for Diversity from the Student Perspective. *Research in Higher Education, 46*(4), 389-412. Diambil dari http://www.jstor.org/stable/40197373

Rudito, B., & Famiola, M. (2013) *Social Mapping - Metode Pemetaan Sosial - Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti.* edisi revisi. Bandung : Rekayasa Sains, 70-74

Satriyo, A. (2015). Revolusi Mental dimulai dari Keluarga : Upaya Menyembuhkan Diri (Healing) dari Internalized Racism. *Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa 1 Revolusi Mental Makna dan Realisasi.* Jakarta : Himpunan Psikologi Indonesia, 203-212

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Umbach, P.D., & Kuh, G.D. (2006) Student Experiences with Diversity at Liberal Arts Colleges: Another Claim for Distinctiveness, *The Journal of Higher Education*, 77(1), 169-192, DOI: 10.1080/00221546.2006.11778923

Nurahaju, Rini. *Inter-ethnic relations in the campus.* *Indonesia has a lot of ethnic groups spread everywhere. Student as a member of certain ethnic group and belong to the campus resident has an important role for the nation's life. The purpose of this study is to describe the students' perception related to inter-ethnic relations. The respondents were 166 students from a private university in Surabaya. Data were collected using a questionnaire asking about the attitudes and perception related to the inter and intra-ethnic relations. The data were analyzed with descriptive statistics. The result show that students have positive attitude in regard to the inter and intra-ethnic relations. This study provides insight that educational institutions need to take active role in cultivating positive attitude related to the diversity.*

----

bagian 5

Generasi Milenial dan Integrasi Bangsa

Integrasi Bangsa lewat Pendidikan Literasi Digital pada Generasi Muda

Ermida Simanjuntak & Ilham Nur Alfian

Informasi yang berkembang di dunia maya memiliki dampak yang cukup signifikan bagi integrasi bangsa karena kekuatan penetrasinya yang begitu dominan dan masif terhadap masyarakat. Dunia maya mampu menciptakan realitas-realitas yang terkadang semu, namun kemudian diyakini sebagai kebenaran nyata oleh masyarakat.

Belum meratanya kemampuan masyarakat dalam menyaring dan menyikapi informasi secara bijak menjadi dasar pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah intervensi seperti melakukan penutupan terhadap 2184 akun media sosial dan situs yang terindikasi menyebarkan hoaks (Kominfo, 2019). Pembatasan akses media sosial pascapengumuman hasil pemilu pada tanggal 22 Mei 2019 dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya (Andarningtyas, 2019). Hal tersebut terpaksa dilakukan karena masyarakat yang kurang memiliki literasi digital akan mudah menjadi korban hoaks atau berita bohong sehingga mengalami kesalahan persepsi ketika menilai suatu fakta dan kejadian (Kominfo, 2017). Penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian di dunia maya yang dipercaya oleh khalayak dapat berdampak pada disintegrasi bangsa.

Urgensi literasi digital bagi proses integrasi bangsa juga terkait dengan meningkatnya akses internet pada masyarakat Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah masyarakat Indonesia yang dapat mengakses internet sebanyak 143 juta orang dari total 265 juta penduduk Indonesia (Nistanto, 2019). Selain itu, data survei UNESCO juga menyebutkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia tergolong tinggi dengan rasio 4 dari 10 orang di Indonesia yang memiliki akses pada media sosial (Kominfo, 2018).

Namun demikian, pengguna media sosial kadang kurang selektif dalam memilih informasi sebelum dibagikan di dunia maya. Kominfo (2018) menyebutkan bahwa hanya 10% masyarakat Indonesia yang menciptakan informasi dan selebihnya 90% adalah masyarakat yang menyebarkan informasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat mayoritas masyarakat yang menjadi penyebar informasi seringkali tidak menyaring dan meninjau secara kritis informasi yang didapatkannya.

Kurangnya kemampuan dalam menyaring dan mengkritisi informasi yang diterima menyebabkan informasi palsu dan hoaks menjadi mudah tersebar

di dunia maya. Survei yang dilakukan oleh *Daily Social* terhadap 2032 pengguna telepon pintar di Indonesia menunjukkan bahwa 44,19% responden mengaku tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi berita bohong (Daily Social Id, 2018). Padahal, kemampuan untuk mengkritisi dan menentukan apakah suatu berita tergolong bohong atau tidak adalah salah satu keahlian yang semestinya dimiliki oleh masyarakat yang terdidik secara digital.

Ancaman disintegrasi bangsa dapat ditangkal dengan menyiapkan generasi muda dengan pendidikan literasi digital (*digital literacy education*). Kemampuan literasi digital diharapkan dapat membuat generasi muda memiliki modal sosial yang berharga untuk menjaga integrasi bangsa Indonesia yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya.

Pemilihan generasi muda sebagai pihak yang perlu mendapatkan pendidikan literasi digital bukan tidak beralasan. Survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Layanan Internet) menyebutkan bahwa pengguna internet pada usia 19 – 34 tahun adalah pengakses internet tertinggi di Indonesia (APJII, 2017). Selain itu mahasiswa juga merupakan profesi dengan pengakses internet tertinggi di Indonesia dibandingkan karyawan dan pelajar (Kominfo, 2016). Fakta ini menunjukkan bahwa generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa, perlu mendapatkan perhatian yang lebih komprehensif terkait dengan pendidikan literasi digital.

Konsep literasi digital ini juga tidak dapat dilepaskan dari istilah *digital natives* yang disematkan pada generasi muda yang sangat akrab dengan penggunaan internet (Thompson, 2013). Generasi *digital natives*, yang lahir setelah tahun 1980 atau kaum milenial, menggunakan teknologi internet sebagai bagian terpenting dari kehidupan mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun saat terkoneksi dengan orang lain (Akcayir, Dundar, & Akcayir, 2016; Margaryan, Littlejohn, & Vojt, 2011). Survei yang dilakukan oleh McCoy (2016) menyebutkan bahwa generasi milenial menggunakan internet sejak dari bangun tidur sampai tidur kembali.

Keterlibatan yang aktif pada dunia maya ini seringkali menimbulkan permasalahan yang berakibat negatif, terutama ketika mereka tidak dibekali dengan literasi digital. Penelitian yang dilakukan oleh Thompson (2013) menyebutkan bahwa walau disebut sebagai *digital natives*, tidak semua kaum muda memiliki kemampuan dalam memahami penggunaan teknologi dengan baik.

Problematika literasi digital pada generasi muda paling terlihat dalam kasus-kasus permusuhan di dunia maya sebagaimana terlihat pada kasus-kasus *cyberbullying* remaja di tanah air. Kasus kontroversial terbaru adalah kasus Audrey yang berawal dari saling mengolok di media sosial sehingga terjadi pertengkaran

di dunia nyata dan berujung pada pengeroyokan dan menimbulkan kerugian fisik dan psikologis (Fadhi, 2019). Kasus tawuran di Ciracas juga berawal dari saling ejek di media sosial yang kemudian menjadi perkelahian yang menewaskan dua orang pelajar (Ravel, 2018). Kasus-kasus tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan literasi digital pada generasi muda yang seharusnya sudah dikembangkan sejak dini.

Kasus pengeroyokan pada Audrey dan tawuran pelajar di Ciracas menggambarkan adanya kohesivitas kelompok pada remaja yang berakibat fatal. Ikatan yang kuat dan intim terbentuk pada remaja apabila interaksi dilakukan lewat tatap muka dan menggunakan telepon selular *(keitai)* dibandingkan pada remaja yang hanya menggunakan interaksi tatap muka saja (Igarashi dkk, 2005 dalam Ling, 2008). Dengan kondisi ini maka tidak mustahil remaja yang banyak terlibat di dunia maya dapat melakukan hal-hal yang berisiko apabila tidak dibekali dengan pendidikan literasi digital yang memadai.

Tulisan ini mencoba menyajikan pemahaman tentang konsep literasi digital baik lewat kajian teori dan penelitian-penelitian di beberapa negara yang telah maju dalam teknologi, sekaligus menunjukkan peranan literasi digital dalam integrasi bangsa. Rekomendasi dan saran untuk menumbuhkan literasi digital pada generasi muda berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya juga akan dituliskan pada bagian akhir tulisan ini.

Literasi Digital, Berpikir Kritis dan *Community Values*

Literasi digital didefinisikan sebagai kompetensi untuk mengumpulkan informasi, membaca dan memahami teks multimedia serta menemukan dan melakukan evaluasi secara kritis pada informasi serta mengkomunikasikan informasi tersebut secara kolaboratif (List, 2019). Definisi ini menunjukkan bahwa berpikir kritis serta kemampuan melakukan evaluasi pada informasi yang diterima pada media digital merupakan komponen yang sangat penting dalam literasi digital. Weninger (2017) menyebutkan bahwa literasi digital yang merupakan bagian dari media literasi merupakan kemampuan individu untuk mengakses, mengevaluasi, dan menciptakan teks atau informasi sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang terdapat pada suatu komunitas. Pengertian ini menggarisbawahi perlunya penyesuaian dengan nilai-nilai komunitas sebagai bagian dari kemampuan literasi digital.

Duran, Yousman, Walsh, & Longshore (2008) mengemukakan bahwa literasi digital berhubungan dengan literasi media sehingga akan melibatkan beberapa pertanyaan (5W dan 1H) yang akan dijawab oleh individu ketika berhadapan dengan informasi digital:

What : informasi apa yang ditemukan pada media digital?
Why : mengapa informasi tersebut terlihat, bersuara dan terbaca seperti itu?
When : kapan kita terpengaruh pada informasi yang disajikan oleh media?
Who : siapa yang akan diuntungkan dengan informasi ini?
Where : dimana kita dapat menemukan alternatif informasi sejenis?
How : bagaimana dapat mengubah informasi dan sistem yang tidak sesuai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diajukan oleh individu yang memiliki literasi digital yang cukup baik dan hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu mengarah pada kemampuan untuk berpikir kritis. Komponen *what* akan berhubungan dengan informasi yang ditemukan pada media digital sehingga individu dapat memahami isi dan menangkap intisari dari informasi yang dibacanya. Misalnya, saat individu melihat tayangan info kesehatan di kanal *Youtube* maka individu dapat memahami penyajian yang diberikan oleh pemberi info. Ketika sampai pada pertanyaan *why* maka individu mulai melakukan telaah kritis tentang suatu informasi. Misalnya, pada kasus info kesehatan, individu akan mengkritisi mengapa info tersebut terlihat berpengaruh pada kesehatan. Apakah memang secara natural tampak demikian ataukah hal tersebut merupakan bagian dari rekayasa? Individu akan mencoba melihat lebih dalam makna di balik informasi serta mencari tahu mengapa suatu informasi dapat termaknai seperti yang dimaksudkan.

Komponen *when* akan berhubungan dengan proses meninjau secara kritis tentang kapan kemungkinan individu dapat terpengaruh pada informasi yang disajikan. Misalnya, berkaitan dengan info kesehatan yang ada pada *Youtube* tersebut maka individu akan bertanya secara kritis kapan ia akan percaya pada info tersebut? Apakah ia mudah terkena pengaruh info kesehatan tersebut ketika kondisi fisiknya terganggu? Dengan pertanyaan *when*, maka individu akan menganalisis kondisi dirinya saat melihat suatu info.

Komponen *who* akan berhubungan dengan pemikiran kritis terhadap pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari info tersebut. Pada kasus info kesehatan tersebut maka individu akan bertanya, siapa orang yang akan diuntungkan ketika ia menuruti info tersebut? Apakah seseorang yang menyebarkan info karena naiknya jumlah *viewer* atau akan menguntungkan individu yang mengakses info tersebut?

Komponen *where* akan berhubungan dengan di mana alternatif informasi sejenis dapat ditemukan. Sehubungan dengan contoh info kesehatan itu maka individu dapat mempertimbangkan apakah ada info sejenis dari institusi kesehatan resmi atau dokter?

Komponen *how* akan berhubungan dengan bagaimana melakukan

perubahan info dengan memproduksi info baru yang lebih sesuai. Pada kasus info kesehatan tersebut maka individu dapat memikirkan cara alternatif untuk menyampaikan info yang lebih relevan secara digital. Terkait dengan literasi digital memang tidak hanya sebatas pada memahami info belaka, tetapi juga mengandung unsur apakah dari telaah kritis yang dilakukan oleh individu pada suatu informasi dapat membuat individu memproduksi informasi baru yang lebih relevan. Hal ini sesuai dengan pengertian literasi digital seperti yang dikemukakan oleh Weninger (2017) bahwa individu merupakan agen aktif yang juga dapat merevisi informasi serta menciptakan suatu info baru yang lebih relevan dengan situasi sebenarnya.

Weninger (2017) menyebutkan bahwa literasi digital berawal dari literasi media, namun pada akhirnya kedua konsep ini berbeda mengingat adanya unsur keaktifan pada literasi digital dibandingkan dengan literasi media. Pada literasi media, informasi yang tersaji terkadang bersifat satu arah, misalnya pada informasi di televisi dan radio yang hanya bisa dikonsumsi tanpa bisa dibantah secara langsung. Di sisi lain, informasi digital memungkinkan individu untuk mengkritisi sekaligus melakukan bantahan-bantahan pada informasi yang dianggap tidak sesuai sehingga terdapat unsur keaktifan pada literasi digital ini.

Definisi tentang literasi digital juga mengarah pada *community values* atau nilai-nilai serta etik yang ada pada komunitas (Weninger, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital juga berhubungan dengan kepekaan seseorang untuk menyajikan informasi dan menanggapi informasi sesuai dengan nilai-nilai serta kultur yang ada pada suatu komunitas. Sebagai contoh, ketika individu membagikan suatu tayangan dengan bahasa-bahasa yang "menyinggung" suatu komunitas tertentu, walaupun pada dasarnya individu tidak bermaksud demikian, namun hal tersebut mengindikasikan kurangnya kemampuan literasi digital pada individu. Pada beberapa akun media sosial terkadang beberapa selebriti tanah air memberikan komentar secara impulsif yang berdampak tersinggungnya kelompok etnis tertentu sehingga selebriti tersebut harus menyatakan permintaan maaf kepada pihak yang merasa dirugikan (Kurniawan, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital juga berhubungan dengan bagaimana mengungkapkan suatu informasi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar (Weninger, 2017).

Literasi digital dalam hal ini tidak hanya sebatas pada membaca dan menulis seperti pada pengertian literasi secara tradisional, melainkan juga terkait dengan peran aktif dalam memaknai unsur-unsur bahasa yang melibatkan pengetahuan dan nilai-nilai yang ada pada suatu kultur sosial. Pemahaman tentang apa yang etis pada suatu kultur merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh individu yang memiliki literasi digital yang baik.

Isu-isu Penting Pada Pendidikan Literasi Digital

Potter (2010), Weninger (2017) dan Wang, Myers, dan Sundaram (2013) mengungkapkan tentang konsep literasi media yang kemudian berkembang menjadi literasi digital serta isu-isu penting seputar penyusunan pendidikan literasi digital. Isu-isu penting tersebut antara lain:

a. Pendidikan literasi digital akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta pengetahuan pada informasi digital yang diterima. Berpikir kritis yang dimaksud meliputi keahlian dalam analisis, evaluasi, *grouping,* induksi, deduksi, dan sintesis. Selain itu, pengetahuan yang dimaksud meliputi struktur dari efek media digital, konten media digital, industri media digital, dunia nyata *(real world),* dan diri sendiri *(the self).*
b. Pemahaman bahwa media digital khususnya internet memiliki sisi positif dan negatif. Oleh sebab itu, pendidikan literasi digital perlu memberikan pemahaman pada generasi muda tentang sisi positif dan negatif media digital. Hal ini dapat membantu generasi muda yang diberi pendidikan literasi digital untuk dapat mengenali kelebihan dan kelemahan diri yang dapat menghambat individu saat mengaplikasikan keahlian literasi digital yang dimilikinya.
c. Tujuan literasi digital yang fokus untuk melindungi seseorang dari efek negatif yang ditimbulkan oleh akses informasi digital. Untuk memberikan pendidikan literasi digital umumnya ada dua pendekatan yang biasanya dipakai. Yang pertama adalah pendekatan pelatihan *(training)* yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kesalahan informasi yang ada di informasi digital serta melibatkan pengukuran untuk melihat efektifitas metode ini. Pendekatan yang kedua adalah dengan memberikan kebebasan individu untuk mengeksplorasi makna-makna yang ada di informasi digital serta mengajak individu untuk melihat informasi tersebut dengan konteks budaya dan komunitas.
d. Literasi media adalah sesuatu yang dilatih dan dikembangkan sebab keahlian ini tidak didapatkan sejak lahir melainkan lewat proses belajar yang ada di lingkungan. Pengembangan literasi digital dapat dilakukan secara formal dan informal. Konteks formal melibatkan unsur sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan formal lainnya. Jalur informal adalah pendidikan literasi digital yang dikembangkan lewat keluarga maupun komunitas yang ada di sekitar individu.
e. Pendidikan literasi digital adalah multi-dimensi meliputi aspek kognitif, emosi, estetika dan moral. Penyusunan kurikulum dalam pendidikan literasi digital secara formal di lembaga pendidikan formal, seperti sekolah dan

Universitas, sebaiknya mempertimbangkan keseluruhan dimensi ini.

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital antara lain karakteristik demografi (usia, jenis kelamin), faktor psikologi (regulasi diri, keyakinan diri dalam akses internet), pengaruh lingkungan dan kesempatan untuk menggunakan teknologi.

Literasi Digital dan Keterlibatan pada Media Sosial

Indonesia merupakan negara dengan pengakses media sosial tertinggi keempat setelah USA, Brazil dan India (Kominfo, 2013). Selain itu seperti yang telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini bahwa data survei UNESCO menunjukkan bahwa 4 dari 10 orang di Indonesia memiliki akses pada media sosial (Kominfo, 2018). Generasi muda khususnya mahasiswa dan pelajar merupakan pihak yang paling banyak melakukan akses media sosial di negara-negara maju (Alloway & Alloway, 2012; Gupta & Irwin, 2016; Junco, 2015; McCoy, 2016). Survei yang dilakukan pada suatu Universitas di Surabaya menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa melakukan akses media sosial pada saat mengikuti perkuliahan di kelas (Simanjuntak, Nawangsari, & Ardi, 2018).

Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan akademik dan sosial generasi muda. Di sisi lain, beberapa dampak negatif muncul akibat tingginya akses penggunaan media sosial yang tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital dalam memaknai informasi-informasi yang tersebar di media sosial, seperti pada kasus Audrey dan kasus tawuran di Ciracas (Fadhi, 2019; Ravel, 2018).

Keterlibatan pada media sosial atau *social media engagement* didefinisikan sebagai motivasi untuk terlibat secara aktif serta berkontribusi di media sosial yang melibatkan komponen perilaku, kognitif dan emosi yang dimiliki oleh individu tersebut (Alt, 2015; Khan, 2017; Wang, Kim, Xiao, & Jung, 2017). Keterlibatan pada media sosial dapat melibatkan unsur-unsur seperti: *like, dislike, comment, share, upload, view, read comments* (Khan, 2017). Penjelasan mengenai keterlibatan media sosial tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Like*
   Pemberian apresiasi pada konten yang tersaji di media sosial.
b. *Dislike*
   Berhubungan dengan ketidaksetujuan *(disagree)* pada konten yang tersaji di media sosial.
c. *Comment*
   Menyatakan pendapat pada suatu teks dan konten pada media sosial.
d. *Share*

Membagikan informasi dan konten di media sosial.

e. *Upload*
   Menggunggah atau membagikan informasi dan konten khususnya dalam bentuk video di media.
f. *View*
   Melihat teks dan konten yang ada di media sosial.
g. *Read comments*
   Membaca komentar tentang suatu teks dan konten di media sosial.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan di media sosial tersebut menunjukkan unsur partisipasi dan konsumsi. Unsur konsumsi dapat dicontohkan pada aktivitas *view* dimana individu melihat konten yang disajikan di media sosial, sedangkan unsur partisipasi dapat dilihat pada aktivitas *upload* dimana individu membagikan informasi di media sosial (Khan, 2017).

Berkaitan dengan mekanisme konsumsi dan partisipasi, literasi digital dibutuhkan agar aktivitas-aktivitas tersebut tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri individu dan orang lain. Keahlian literasi digital ini akan membantu generasi muda untuk dapat menentukan reaksi dan respon yang tepat pada informasi-informasi yang ada di media sosial sehingga dapat menurunkan potensi konflik yang mungkin terjadi akibat berita bohong atau kesalahan persepsi dalam memahami konten media sosial.

Rekomendasi Bagi Pendidikan Literasi Digital pada Generasi Muda

Pendidikan literasi digital dibutuhkan bagi generasi muda di Indonesia karena keahlian literasi digital akan memberikan kemampuan berpikir kritis pada informasi digital yang dikonsumsinya. Lebih lanjut, dengan literasi digital, generasi muda diharapkan dapat berperilaku tepat sesuai dengan konteks nilai-nilai yang ada pada komunitas Indonesia ketika ia menggunakan teknologi digital. Beberapa saran yang dapat diberikan terkait pendidikan literasi digital, antara lain :

1. Pendidikan literasi digital bagi generasi muda dapat diberikan secara formal dan informal, yaitu lewat pendidikan di sekolah formal dari level SD sampai Universitas dengan menyesuaikan materi literasi digital sesuai dengan tahap perkembangan yang ada pada individu. Pendidikan formal literasi digital dapat disisipkan pada materi pelajaran, misalnya pelajaran komputer atau pendidikan karakter. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada pendidikan tinggi lewat mata kuliah yang sesuai dengan tema literasi digital. Pendidikan informal yang mengajarkan literasi digital dapat dimulai dari keluarga dan

lingkungan sekitar yang dibangun lewat komunikasi keluarga dan kegiatan bersama yang ada di lingkungan individu.

2. Pendidikan literasi digital bertujuan mengembangkan pemikiran yang kritis dalam menanggapi sebuah informasi digital sehingga pemberian hal tersebut tidak hanya dikembangkan lewat materi literasi digital tetapi pengembangan cara berpikir kritis lewat materi tentang *soft skills*. Cara berpikir kritis dan evaluatif terhadap diri sendiri akan mengasah kemampuan literasi digital.
3. Mengembangkan faktor-faktor internal yang dimiliki individu seperti kemampuan meregulasi diri, kemampuan berempati, kemampuan berkomunikasi, asertivitas dan hal-hal internal lainnya. Kemampuan internal tersebut dapat mendukung penguasaan literasi digital. Sebagai contoh, ketika kemampuan empati berkembang dengan baik maka individu akan mampu memahami sudut pandang setiap orang sebelum menyatakan pendapatnya. Hal ini yang kemudian akan mencegah generasi muda dalam memberikan tanggapan pada informasi digital secara lebih tepat.

Kesimpulan

Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengumpulkan informasi, membaca dan memahami teks multimedia, menciptakan teks, serta melakukan evaluasi secara kritis pada informasi digital yang sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang terdapat pada suatu komunitas. Hal penting yang perlu digarisbawahi untuk mengembangkan literasi digital adalah kemampuan berpikir kritis serta pemahaman akan nilai-nilai yang ada di komunitas sekitar. Literasi digital merupakan keahlian yang dibutuhkan oleh generasi muda untuk dapat bersikap kritis dan bijak pada setiap informasi di dunia maya. Hal ini menyebabkan ia menjadi salah satu faktor penting yang dianggap dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa di tengah banyaknya hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat.

Pendidikan literasi digital dapat dikembangkan melalui pendidikan formal dan infomal. Pendidikan formal dapat diberikan di sekolah dan di universitas melalui mata pelajaran ataupun mata kuliah yang sesuai dengan tema literasi digital. Pendidikan informal literasi digital dapat dilakukan melalui keluarga dan komunitas yang ada di sekitar generasi muda sehingga pendidikan literasi digital bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan formal. Pengembangan faktor-faktor psikologis yang dimiliki oleh generasi muda seperti regulasi diri, empati, asertivitas, dan kemampuan komunikasi juga dapat mempengaruhi kemampuan literasi digital yang dimiliki individu.

Daftar Acuan

Akcayir, M., Dundar, H., & Akcayir, G. (2016). What makes you a digital native? Is it enough to be born after 1980? *Computers in Human Behavior*, *60*, 435–440. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.02.089

Alloway, T. P., & Alloway, R. G. (2012). The impact of engagement with social networking sites (SNSs) on cognitive skills. *Computers in Human Behavior*. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.04.015

Alt, D. (2015). College students' academic motivation, media engagement and fear of missing out. *Computers in Human Behavior*. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.057

Andarningtyas, N. (2019). Medsos Dibatasi, SMS dan Telepon Tetap Jalan. Diambil 22 Mei 2019, dari https://pemilu.antaranews.com/berita/882121/medsos-dibatasi-sms-dan-telepon-tetap-jalan

APJII. (2017). Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017. Diambil 25 September 2018 dari https://apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017

Daily Social Id. (2018). Laporan Daily Social: Distribusi Hoax di Media Sosial 2018. Diambil 15 Mei 2019 dari https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018

Duran, R. L., Yousman, B., Walsh, K. M., & Longshore, M. A. (2008). Holistic Media Education: An Assessment of the Effectiveness of a College Course in Media Literacy. *Communication Quarterly*, *56*(1), 49–68. https://doi.org/10.1080/01463370701839198

Fadhi, H. (2019). Berawal dari Bully di Medsos, Begini Kronologi Kasus Audrey. Diambil 1 Mei 2019, dari https://news.detik.com/berita/d-4506079/berawal-dari-bully-di-medsos-begini-kronologi-kasus-audrey

Gupta, N., & Irwin, J. D. (2016). In-class distractions: The role of Facebook and the primary learning task. *Computers in Human Behavior*, *55*, 1165–1178. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.022

Junco, R. (2015). Student class standing, Facebook use, and academic performance. *Journal of Applied Developmental Psychology*. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2014.11.001

Khan, M. L. (2017). Social media engagement: What motivates user participation and consumption on YouTube? *Computers in Human Behavior*, *66*, 236–247. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.024

Kominfo. (2013). Kominfo: Pengguna internet di Indonesia 63 juta orang. Diambil 1 Agustus 2017, dari https://kominfo.go.id/index.

php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker

Kominfo. (2016). Pengguna internet di Indonesia tahun 2016. Diambil dari https://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=424&iddoc=1516&data-data_page=2

Kominfo. (2017). Masyarakat Diminta Waspadai Media Penyebar Hoax. Diambil 28 April 2019, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/8890/masyarakat-diminta-waspadai-media-penyebar-hoax/0/sorotan_media

Kominfo. (2018). Angka Penggunaan Media Sosial Orang Indonesia Tinggi, Potensi Konflik juga Amat Besar. Diambil 10 Oktober 2018, dari https://kominfo.go.id/content/detail/14136/angka-penggunaan-media-sosial-orang-indonesia-tinggi-potensi-konflik-juga-amat-besar/0/sorotan_media

Kominfo. (2019). Tiga Langkah Pemerintah Agar Dunia Maya Indonesia Tetap Damai. Diambil 29 Mei 2019, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/18967/siaran-pers-no-108hmkominfo052019-tentang-tiga-langkah-pemerintah-agar-dunia-maya-indonesia-tetap-damai/0/siaran_pers

Kurniawan, A. (2015). Minta Maaf Langsung Kepada Perwakilan Rakyat Papua, Cita Citata Lega. Diambil 15 April 2019, dari https://www.tabloidbintang.com/berita/gosip/read/18430/minta-maaf-langsung-kepada-perwakilan-rakyat-papua-cita-citata-lega

Ling, R. (2008). *New Tech, New Ties : How Mobile Communication Is Reshaping Social Cohesion*. London: MIT Press.

List, A. (2019). Defining digital literacy development: An examination of pre-service teachers' beliefs. *Computers & Education*, *138*, 146–158. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.03.009

Margaryan, A., Littlejohn, A., & Vojt, G. (2011). Are digital natives a myth or reality? University students' use of digital technologies. *Computers & Education*. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.09.004

McCoy, B. R. (2016). Digital Distractions in the Classroom Phase II : Student Classroom Use of Digital Devices For Non-Class Related Purposes. *Journal of Media Education*, *7*(1), 5–32.

Nistanto, R. K. (2019). Penetrasi Internet Indonesia Naik Jadi 56 Persen. Retrieved March 2, 2019, from https://tekno.kompas.com/read/2019/02/04/11420097/riset-penetrasi-internet-indonesia-naik-jadi-56-persen

Potter, W. J. (2010). The State of Media Literacy. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, *54*(4), 675–696. https://doi.org/10.1080/08838151

.2011.521462

Ravel, S. (2018). Saling Ejek di Media Sosial, 3 Remaja Tewaskan Pelajar SD dan SMP. Diambil 1 April 2019, dari https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/12/12560901/saling-ejek-di-media-sosial-3-remaja-tewaskan-pelajar-sd-dan-smp

Simanjuntak, E., Nawangsari, N. A. F., & Ardi, R. (2018). Cyberslacking Among University Students : The Role of Internet Habit Strength, Media Multitasking Efficacy and Self Regulated Learning. In *International Conference on Psychology in Health, Educational, Social and Organizational Settings*. Surabaya.

Thompson, P. (2013). The digital natives as learners: Technology use patterns and approaches to learning. *Computers & Education Education*. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.12.022

Wang, Q., Myers, M. D., & Sundaram, D. (2013). Digital Natives and Digital Immigrants. *Business & Information Systems Engineering*, *5*(6), 409–419. https://doi.org/10.1007/s12599-013-0296-y

Wang, R., Kim, J., Xiao, A., & Jung, Y. J. (2017). Networked narratives on Humans of New York: A content analysis of social media engagement on Facebook. *Computers in Human Behavior*, *66*, 149–153. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.042

Weninger, C. (2017). The “vernacularization” of global education policy: media and digital literacy as twenty-first century skills in Singapore. *Asia Pacific Journal of Education*, *37*(4), 500–516. https://doi.org/10.1080/02188791.2017.1336429

Simanjuntak, Ermida., & Alfian, Ilham Nur. *National integration through digital literacy education in the younger generation.* *Digital literacy is one of the important skill that must be possessed by the young generation in the era of information technology. It is defined as the ability to gather information, read and understand multimedia texts, create texts, evaluate and think critically towards digital information. The challenges in cyberspace including spreading of hoax and hate speech often create problems that affect national integration. Digital literacy skills will encourage young people to be more critical and respond appropriately in understanding digital information. Digital literacy can be taught through formal education such as in schools and universities through subjects and lectures. In addition, digital literacy can be developed through informal education (e.g. family communication and community activities). Holistic digital literacy education will protect young generation from the threat of national disintegration due to negative impact of cyberspace.*

Integrasi Bangsa: Tantangan bagi Generasi Milenial

Ike Herdiana

Pengantar

Indonesia terdiri atas masyarakat yang majemuk. Ada banyak suku bangsa, masing-masing dengan kebudayaan dan bahasanya sendiri. Indonesia juga terdiri atas masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda, meski sebagian besar memeluk agama Islam. Kemajemukan tersebut juga didukung oleh faktor geografi yang terdiri atas pulau-pulau, baik pulau besar dan kecil (Suryohadiprojo, 2001). Dapat dikatakan Indonesia merupakan gabungan suku, etnis, budaya, ras dan agama yang melebur menjadi sebuah entitas bernama bangsa Indonesia.

Tidak dipungkiri, kemajemukan Indonesia juga menjadi pintu gerbang terjadinya konflik. Belakangan banyak terjadi konflik antar-etnis maupun konflik agama. Dari sinilah, diskusi tentang integrasi bangsa dimulai di ruang-ruang publik. Bagi generasi lama, masalah integrasi bangsa lebih banyak diulas melalui sejarah Indonesia masa lampau. Bagaimana kemerdekaan Indonesia direbut melalui perjuangan merupakan dasar dari bagaimana sebuah bangsa besar terbangun. Rasa nasionalisme, isu SARA, konflik agama, keberagaman, kesatuan dan persatuan, NKRI, dan kebhinnekaan merupakan isu yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Masalah bisa jadi sama, namun zaman membawa orang-orang Indonesia bereaksi dengan format yang berbeda-beda. Intinya, masyarakat kita masih memiliki harapan yang sangat besar bahwa bangsa ini bisa kuat, apapun yang terjadi. Bangsa Indonesia mampu bersatu dalam perbedaan. Dalam konteks ini, kita mengenal istilah integrasi bangsa.

Integrasi bangsa yang identik dengan integrasi nasional mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa - yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan kesimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa (Agus, 2016). Wujud dari integraso bangsa adalah masyarakat yang terintegrasi dengan haknya sebagai warga negara. Integrasi yang terjadi di masyarakat merupakan kondisi yang penting bagi negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat hanya akan mendatangkan kerugian, baik fisik-material maupun mental-spiritual. Masyarakat hidup dalam perasaan khawatir, cemas dan ketakutan, juga tekanan mental yang berkepanjangan. Pada sisi lain,

banyak potensi sumber daya negara harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut (Agus, 2016).

Masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik dan pertentangam, selain membawa potensi integrasi. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik (Agus, 2016). Begitu pula dengan perbedaan generasi, yang mana setiap generasi memiliki *mindset* yang berbeda tentang upayanya mempertahankan integrasi bangsa. Hal inilah yang menarik untuk diperbincangkan.

Bagaimanapun, kelangsungan hidup republik ini, sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun kembali integrasi bangsa, setelah banyak terjadi perpecahan. Salah satu syaratnya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki semua elemen bangsa, seperti kepemimpinan yang dapat menjalankan manajemen nasional yang efektif, perbaikan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan nasional, menghilangkan berbagai kontroversi seperti kontroversi keagaamaan, dan penegakan kekuasaan hukum (Suryohadiprojo, 2001).

Seperti kita ketahui, generasi yang saat ini diharapkan memiliki potensi yang baik untuk menjalankan itu semua adalah generasi milenial atau disebut juga Gen Y. Data Bappenas mengungkap bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk muda yang relatif besar, yakni 90 juta milenial (berusia 20-34 tahun) (Sembiring, 2018). Ini bukan jumlah yang sedikit. Dengan beragam kondisi yang dialami bangsa ini, besar harapan kita bahwa generasi ini kelak akan membawa perubahan yang lebih baik, untuk mendukung integrasi bangsa. Namun mari kita lihat, bagaimana sesungguhnya profil generasi milenial kita saat ini. Gambaran yang diberikan seorang pengamat generasi milenial ini menyebutkan, "*Mereka merupakan kumpulan anak muda yang selalu ingin coba-coba, kerja enggak pernah awet di satu tempat, dan terlalu peduli soal teknologi terbaru. Gen Y memberi kesan sebagai generasi yang tak terlalu membanggakan. Soalnya, mereka memiliki beberapa ciri negatif, seperti tak merasa bersyukur, egosentris, individualisme yang sangat tinggi, dan gampang bosan. Secara politis, gen Y juga cenderung tak mau terlalu ambil pusing, meski mereka pada umumnya mempunyai toleransi yang tinggi. Sepintas, gen Y terlihat pintar, aktif, dan agresif. Mereka juga tergolong hebat dalam mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan. Penampilan kasual dan santai menjadi ciri khas, sehingga kesan serius pun jarang muncul. Akibatnya, generasi pendahulu sering beranggapan gen Y tidak pernah serius dan tidak disiplin*" (Mucharom, 2013).

Menelaah narasi yang dibangun oleh pengamat generasi milenial di atas tentang karakteristik generasi tersebut, tentu kita jadi ingin tahu apakah kondisi bangsa ini dapat diatasi oleh sekelompok anak muda yang memiliki karakter santai, 'cuek', tidak serius dan tidak disiplin? Bagaimana peran psikologi untuk dapat menanamkan nilai-nilai positif agar mereka bisa berjuang dengan cara yang konstruktif mewujudkan integrasi bangsa kita yang begitu majemuk dan penuh dengan tantangan?

Profil Generasi Milenial Indonesia

Pengelompokkan generasi, salah satunya adalah generasi milenial, menurut beberapa ahli adalah sebagaimana tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengelompokan Generasi

Sumber	Label				
Tapscott (1988)	-	Baby Boom Generation (1946-1964)	Generation X (1965-1975)	Digital Generation (1976-2000)	
Howe & Strauss (2000)	Silent Generation (1925-1943)	Boom Generation (1943-1960)	13th Generation (1961-1981)	Millenial Generation (1982-2000)	
Zemke et al (2000)	Veterans (1922-1943)	Baby Boomers (1943-1960)	Gen-Xers (1960-1980)	Nexters (1980-2000)	
Lancaster & Stillman (2000)	Traditionalist (1900-1945)	Baby Boomers (1946-1964)	Generation Xers G	Generation Y	
Martin & Tulgan (2002)	Silent Generation (1925-1942)	Baby Boomers (1946-1964)	Generation X (1965-1977)	Millenials (1981-1999)	
Oblinger & Oblinger (2005)	Maataures (<1946)	Baby Boomers (1947-1964)	Generation Xers (1965-1980)	Gen-Y/ NetGen (1981-1995)	Post Millenials (1955-present)

Sumber : Teori Perbedaan Generasi oleh Yanuar Surya Putra (2016, dalam (Budiati et al., 2018)

Selanjutnya, di Indonesia, Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi (2017) dalam bukunya "*Millennial Nusantara*" menyebutkan bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Para peneliti sosial dalam negeri lainnya menggunakan tahun lahir mulai 1980-an

sampai dengan tahun 2000-an untuk menentukan generasi milenial (dalam Budiati et al., 2018). Secara umum, generasi milenial ini memiliki karakter unik berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Salah satu ciri utama generasi milenial adalah peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Oleh sebab itu, generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai *passion* dan produktif. Hampir seluruh individu dalam generasi tersebut memilih menggunakan ponsel pintar. Dengan menggunakan perangkat tersebut para milenial dapat menjadi individu yang lebih produktif dan efisien. Dari perangkat tersebut mereka bebas mengakses beragam situs yang memungkinkan mereka belajar dengan cepat untuk menciptakan berbagai peluang baru seiring dengan perkembangan teknologi yang kian mutakhir. Mereka sangat komunikatif, terbuka dan merupakan pengguna media sosial yang fanatik, sehingga sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya (Budiati et al., 2018). Generasi milenial memiliki peluang dan kesempatan berinovasi yang sangat luas. Dari sisi pendidikan pun, generasi milenial juga memiliki kualitas yang lebih unggul. Minat mereka besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka menyadari bahwa pendidikan merupakan prioritas yang utama. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia patut optimistis terhadap berbagai potensi yang dimiliki oleh generasi milenial. Pola pikir yang terbuka, bebas, kritis, dan berani adalah suatu modal yang berharga. Ditambah penguasaan dalam bidang teknologi, tentu akan menumbuhkan peluang dan kesempatan berinovasi (Budiati et al., 2018).

Dari sisi pola pikir, generasi milenial memiliki perbedaan dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilahirkan dan dibesarkan pada saat gejolak ekonomi, politik, dan sosial melanda Indonesia. Deru reformasi mampu memberikan dampak yang mendalam bagi generasi milenial. Generasi tersebut tumbuh menjadi individu-individu yang *open minded*, menjunjung tinggi kebebasan, kritis dan berani. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi pemerintahan saat ini yang lebih terbuka dan kondusif (Budiati et al., 2018).

Hingga tahun 2017, dilihat dari domisili/tempat tinggal, persentase generasi milenial di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Ada sekitar 55 persen generasi milenial yang tinggal di daerah perkotaan. Jumlah ini mengikuti pola penduduk Indonesia pada umumnya yang mulai bergeser dari masyarakat perdesaan (*rural*) ke masyarakat perkotaan (*urban*). Perubahan ini berimplikasi pada perubahan budaya, nilai-nilai sosial, perilaku, dan pola pikir. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat terbuka dan multikultur. Konsekuensi dari bergesernya masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan adalah pelan tapi pasti nilai-nilai tradisional akan semakin terpinggirkan oleh budaya urban. Masyarakat yang dulunya bersifat komunal menjadi masyarakat

yang individualistis; masyarakat yang dulunya sederhana menjadi masyarakat konsumtif; masyarakat yang dulunya berpola pikir konservatif menjadi masyarakat yang lebih terbuka dan modern (Budiati et al., 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan generasi milenial ini memiliki potensi yang sangat besar untuk terlibat dalam membangun bangsa, namun mereka juga memiliki potensi untuk melakukan perubahan budaya, nilai sosial, perilaku dan pola pikirnya yang mungkin saja malah kurang mendukung pada penguatan upaya integrasi - apalagi jika sudah terlalu banyak terpapar budaya individualistis. Hal tersebut menimbulkan kerentanan tersendiri. Mereka bukan tidak mungkin akan menutup mata terhadap terjadinya konflik sosial di depan mata mereka.

Membangun Karakter Generasi Milenial agar Adaptif dengan Tuntutan Integrasi Nasional

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perbedaan yang menjadi ciri khas kaum milenial dengan generasi sebelumnya diantaranya bahwa perkembangan teknologi sekarang ini telah menjadikan para milenial masuk ke dalam dunia digital. Inilah salah satu letak perubahan tantangan generasi muda "*zaman now*", sebutan kaum milenial untuk menggambarkan masa kini. Setidaknya ada tiga peran pemuda di era milenial, yaitu sebagai *agent of change*, *innovator*, dan *promoter* bangsa (Aji, 2019). Hal ini sejalan dengan tuntutan dari integrasi bangsa. Generasi ini juga menjadi harapan untuk terwujudnya simpul-simpul yang mengeratkan bangsa.

Mereka yang tumbuh di era kecanggihan internet dan mahir dalam berteknologi cenderung merasa lebih hebat dan bangga masuk dalam gaya hidup modern dan bebas. Mereka bisa saja menjadi lupa dengan budayanya sendiri, yang dianggapnya ketinggalan jaman/kuno. Para milenial menanggapi dampak negatif globalisasi budaya kini akan sama negatifnya, dan ini yang menjadi permasalahan serius karena memicu degradasi budaya yang dapat membahayakan kelestarian budaya di Indonesia. *Gadget* seperti *handphone* dan sejenisnya memainkan peran penting dalam kehidupan mereka (Rais, Dien, & Dien, 2018). Bahkan banyak diantara mereka mengalami *nomophobia*, yaitu sebuah kondisi yang mengacu pada ketidaknyamanan, kegelisahan, kegugupan atau kesedihan yang disebabkan karena tidak berhubungan dengan telepon seluler. Bentuk ketidaknyamanan, kegelisahan, kecemasan, atau kesedihan pada penderita *nomophobia* sudah melebihi batas wajar dan mengarah para perilaku adiksi (Pavitra, Madhukumar, & Murthy, 2015). Tentunya jika sudah mengarah pada keadaan *nomophobia*, generasi milenial menjadi lebih sulit untuk dapat

mengarahkan sumber daya yang dimiliki secara positif.

Selain itu, ketergantungan pada penggunaan gadget juga membawa berbagai dampak negatif seperti pola hidup konsumtif. Milenial menjadi generasi yang materialistis; menurut mereka, materi adalah segala-galanya. Pola dan gaya kehidupan (*lifestyle*) para milenial khususnya yang hidup di kota besar lebih mengutamakan mencari kesenangan semata atau menganut paham hedonis, sebagai cara untuk mengekspresikan kesenangan. Mereka haus akan dunia hiburan, berhura-hura dan tidak terlepas dari teknologi internet.

Penelitian yang dilakukan oleh Rais dan kawan-kawan (2018) mengungkapkan kenyataan bahwa gaya hidup milenial selalu ingin mencari perhatian dan ingin eksistensinya diakui lewat benda yang dimilikinya. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka terlibat persaingan yang tidak sehat. Generasi milenial sebagian besar menganut pola hidup bebas yang sudah sangat mengkhawatirkan, padahal kehidupan bebas tidak mencirikan budaya kita. Paradigma akulturasi serta upaya menggeneralisasi unsur sosial budaya nasional dengan unsur sosial budaya asing memang belum seutuhnya terjadi. Namun demikian, di kalangan generasi milenial, nuansa degradasi nilai Pancasila sudah makin jelas terasa. Peneliti mencatat beragam unsur negatif bahkan telah terjadi dalam lingkungan masyarakat, seperti (1) terjadinya disintegrasi sosial, yaitu berupa perbedaan kepentingan hingga perbedaan tingkat sosial masyarakat yang mencolok sehingga dapat menimbulkan sebuah perpecahan; (2) adanya kondisi dan situasi ketegangan di daerah/kawasan (*chauvinisme*, ekstrimisme, dan radikalisme); (3) munculnya permasalahan berubahnya unsur-unsur budaya masyarakat yang baru, diakibatkan adanya perubahan nilai, norma, serta kondisi kebudayaan yang berbeda – yang dapat menjadi penyebab rusaknya lingkungan masyarakat; (4) makin tersisihnya adat kebiasaan disebabkan karena keberadaan budaya-budaya asli yang dianggap kuno dan ingin ditinggalkan; (5) munculnya kesenjangan sosial; (6) budaya konsumtif yang meningkat drastis akibat adanya anggapan keterkaitan antara tingkat konsumsi dengan status seseorang.

Dengan narasi tersebut, kiranya penting juga untuk membangun karakter generasi milenial agar adaptif dengan tuntutan integrasi nasional. Generasi milenial harus terlibat secara possitif dalam mengatasi tantangan perpecahan atau disintegrasi sosial yang kerap menimbulkan konflik berkepanjangan. Di satu sisi, generasi ini memang memiliki potensi yang sangat baik dalam banyak hal. Pada sisi lain, mereka hidup dalam sebuah bangsa yang sedang tertantang untuk pulih dari adanya perpecahan. Menurut Megawangi (2007), membangun karakter generasi milenial ini dapat diinisiasi dengan pendidikan karakter yang dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan dalam masyarakat. Pendidikan karakter akan mendorong individu membentuk perilaku positif dan meningkatkan

kualitas kognitifnya (dalam Wahono, 2018). Karakter generasi milenial yang sudah sangat kuat, akan dimatangkan oleh pengalaman yang seharusnya mereka dapatkan agar mereka lebih siap dengan tuntutan integrasi bangsa.

Menurut hemat penulis, dalam konteks keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah, pendidikan karakter bagi generasi milenial akan memperhatikan beberapa hal:

Pendidikan karakter dalam keluarga menyesuaikan dengan kondisi anak yang berada pada kategori generasi milenial. Dengan adanya aneka macam alternatif pola asuh yang disajikan di media-media massa konvensional dan digital saat ini, pakem-pakem dalam membesarkan anak pun bergeser. Keterlibatan penuh orangtua dalam hidup anak, khususnya mereka yang masih duduk di bangku pendidikan dasar atau masih remaja juga mengalami pergeseran. Gaya mendikte para orangtua yang jaman dulu dianggap efektif untuk mengembangkan karakter anak, kini dipandang kurang relevan jika dianut untuk mengasuh anak milenial. Saat ini, kolaborasi dengan anak dan membebaskan anak mengeksplorasi hal-hal yang disukai menjadi tren dalam pengasuhan anak generasi milenial (Kirnandita, 2017). Selain itu, referensi pengasuhan bagi orangtua juga semakin mudah diakses. Orangtua memiliki kesadaran literasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman. Kondisi keluarga yang harmonis memberikan dampak positif bagi perkembangan emosi anak milenial. Dari rumah mereka belajar tentang kasih sayang, cinta, dan penerimaan, yang akan mereka bawa ketika mereka berada di luar rumah.

Hampir sebagian besar sekolah saat ini sudah menerapkan gerakan penguatan pendidikan karakter yang menekankan pada lima nilai utama karakter prioritas, yakni (1) religius, mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya; (3) gotong royong, mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama; (4) mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita; dan (5) integritas, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan (Wahono, 2018).

Namun demikian ada baiknya, pembelajaran tentang nilai-nilai tersebut tidak dilakukan secara pragmatis dan teoretis. Generasi milenial merupakan generasi yang kritis. Ada baiknya mereka diajak langsung melihat realitas di dalam masyarakat dan belajar bagaimana interaksi yang terjadi antar-individu dilandasi oleh nilai-nilai tersebut. Begitu pula dengan dampak ketika nilai-nilai tersebut tidak dipergunakan dalam kehidupan individu sehari-hari.

Peran masyarakat terhadap pembinaan karakter generasi milenial

dapat mengacu pada isu-isu yang melekat pada generasi tersebut. Isu tentang pandangan keagamaan; ideologi dan partisipasi politik; nilai-nilai sosial; pendidikan, pekerjaan dan kewirausahaan; juga gaya hidup, teknologi dan internet, merupakan isu yang secara umum ada pada generasi milenial (Ali, 2016). Masyarakat dapat mengembangkan kontrol sosial atas pergeseran atau 'penyimpangan' terhadap isu-isu tersebut. Degradasi moral banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya dalam masyarakat sekitarnya. Lingkungan sosial yang buruk adalah bentuk dari kurangnya pranata sosial dalam mengendalikan perubahan sosial yang negatif. Kesadaran etika yang menurun akan mengubah karakter generasi milenial dalam membangun interaksi yang positif dengan lingkungan sosial mereka.

Pemerintah harus menjadi *role model* yang positif bagi generasi milenial terutama dalam menjalankan peran kepemimpinan nasional yang dapat diandalkan untuk membawa perubahan yang lebih baik. Anak milenial sangat kritis dan cepat mengakses beragam informasi. Informasi yang positif tentu akan membawa mereka pada penilaian yang positif pula tentang hal-hal yang dialami oleh bangsa ini.

Peran Psikologi dalam Membangun Karakter Positif pada Generasi Milenial

Beberapa penelitian mengatakan bahwa generasi milenial merupakan salah satu kelompok generasi yang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh radikalisme dan tindakan intoleran di tengah derasnya arus informasi yang beredar di media sosial dan internet (Oswin, 2017). Untuk mengurangi kerentanan tersebut, psikologi diperlukan terutama untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan karakter positif pada generasi milenial agar mereka dapat membangun interaksi yang positif dalam berelasi, dapat menerima dan menghargai perbedaan dan tidak mudah dipengaruhi oleh hal negative yang datang dari lingkungannya.

Generasi milenial bijaksana dan cermat dalam menggunakan media sosial. Generasi milenial dikenal sebagai kelompok orang-orang yang *insecure* dan lebih rapuh dibandingkan generasi sebelumnya. Pada sisi lain, mereka sangat dekat dengan media sosial. Keingintahuan mereka sangat tinggi untuk tahu apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Sementara mereka tidak mampu menghadapi respon negatif (Lassetter, 2016). Kerentanan ini yang dikhawatirkan dapat membuat mereka tidak bijaksana dan cermat dalam menggunakan media sosial, yang akhirnya mudah menerima pengaruh atau tekanan untuk melakukan tindakan di luar batas atau tindakan agresif yang diarahkan kepada pihak atau kelompok lainnya. Oleh sebab itu, anak milenial perlu mendapatkan

pendampingan jika mereka kesulitan mengelola informasi yang didapatkan dari media sosial.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Buzzfeed, Anne Helen Petersen memaparkan bagaimana generasi milenial menjadi *burnout generation* atau kelompok orang yang memiliki beban psikologis yang sangat berat. Faktor pemicu keletihan psikologis (*burnout*) itu berkaitan dengan tantangan ekonomi dan persoalan lapangan pekerjaan yang dihadapi para milenial. Mereka juga ditanamkan gagasan bahwa mereka harus mencurahkan seluruh kemampuan untuk bekerja dan tak berhenti mengejar optimisme diri. Kelesuan psikologis para milenial memiliki banyak persamaan dengan beban mental pada yang umumnya terjadi akibat tekanan pekerjaan. Kondisi ini disebakan stres berkepanjangan dan biasanya termasuk keletihan emosi, skeptisisme atau keterasingan dari orang banyak, serta keseharian yang tidak efektif. Pemicunya adalah lingkungan yang kompleks, penuh kontradiksi dan perseteruan, selain beban kerja yang tinggi (Samra, 2019). Kondisi ini membuat mereka secara mental menjadi terganggu dan mudah tersulut emosi ketika berinteraksi dengan orang lain. Toleransinya terhadap masalah sosial menjadi sangat rendah dan dikhawatirkan menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Oleh sebab itu, untuk kesehatan mentalnya, generasi milenial membutuhkan bantuan konseling jika mengalami *burnout* terkait dengan pekerjaannya.

Pengasuhan positif akan membangun karakter anak milenial yang tangguh dan siap menghadapi tantangan. Memberikan contoh yang baik pada anak-anak sejak dini untuk menerima perbedaan, membangun toleransi pada sesama dan menghindari konflik atau permusuhan. Pengasuhan positif merujuk pada fakta bahwa perilaku orangtua diarahkan pada pengembangan anak-anak tanpa kekerasan, perawatan yang baik, pengakuan, bimbingan dan penetapan batasan yang jelas (Ciurana, Vazquez, & Navajas, 2015).

Daftar Pustaka

Agus, A. A. (2016). Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi, 3(3), 19–27.

Ali, H. (2016). Generasi Millenial Indonesia: Tantangan dan Peluang Pemuda Indonesia. Diakses dari https://alvara-strategic.com/generasi-millennial-indonesia-tantangan-dan-peluang-pemuda-indonesia/

Budiati, I., Susianto, Y., Adi, W. P., Ayuni, S., Reagan, H. A., Larasaty, P., … Saputri, V. G. (2018). Statistik Gender Tematik : Profil Generasi Milenial Indonesia. Jakarta.

Ciurana, A., Vazquez, N., & Navajas, A. (2015). Positive Parenting : Lessons from Research. Revista de Cercetare Si Interventie Sociala, 51(December), 227–239.

Kirnandita, P. (2017). Mengasuh Anak Ala Milenial. Diakses dari https://tirto.id/mengasuh-anak-ala-milenial-cvLg

Lassetter, L. (2016). Self Confidence, Social Media and Millennials. Diakses dari https://www.theodysseyonline.com/self-confidence-social-media-and-millennials

Mucharom, L. (2013). Ciri Khas Gen Y. Diakses dari https://www.femina.co.id/article/ciri-khas-gen-y-

Oswin, Y. (2017). Generasi Millenial: Pancasila, Semangat Toleransi dan Kebhinekaan. Diakses dari https://geotimes.co.id/opini/generasi-millennial-pancasila-semangat-tolerasi-kebhinekaan/

Pavitra, Madhukumar, S., & Murthy, M. (2015). Study on nomophobia - mobile phone dependence, among students of a medical college in Bangalore. National Journal of Community Medicine, 6(2), 340–344.

Rais, N. S. R., Dien, M. J., & Dien, A. Y. (2018). Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial. Jurnal Mozaik, 10(2), 61–71.

Samra, R. (2019). Is There an Answer to Millennial Burnout? Diakses dari http://www.bbc.com/capital/story/20190122-is-there-an-answer-to-millennial-burnout

Sembiring, L. J. (2018). Bappenas: Jumlah Milenial di Indonesia Capai 90 Juta Orang. Diakses dari https://www.inews.id/finance/read/56521/bappenas-jumlah-milenial-di-indonesia-capai-90-juta-orang

Suryohadiprojo, S. (2001). Integrasi Bangsa. Jurnal Ketahanan Nasional, 6(2), 49-68.

Wahono, M. (2018). Pendidikan Karakter : Suatu Kebutuhan Bagi Mahasiswa di Era Milenial. Integralistik, 28(2), 1–8.

Herdiana, Ike. National integration: A challenge for the millennial generation. *Millennials are expected to be able to bring positive change to this nation. Their open-minded, communicative and open characteristics make them supposed to be able to contribute to the realization of national integration. Amid the nation's condition which is full of conflict, issues of intolerance and disintegration are challenges for the millennial generation. On the other hand, this generation has their own vulnerabilities so that they need stronger character building to face the challenges ahead. Family, school, community and government factors have important contributions to the development of these characters. The role of psychology is also important to personally cultivate millennial generations to manage problems that may be experienced by them.*

Dalam Naungan Tuhan, Bersama Merajut Jalinan Persatuan: Membaca Tafsir Remaja Milenial akan Pancasila

Nicolas Indra Nurpatria, Christiany Suwartono,
Laurensia Harini Tunjungsari, & Penny Handayani

Hakikat Pancasila

Setiap bangsa yang ada di dunia idealnya memiliki konsep dasar atau cita-cita luhur yang akan menjadi arah dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Presiden Soekarno, dalam pidatonya di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 30 September 1960 menyatakan dengan tegas bahwa *"…..arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita…..jika mereka tidak memilikinya, atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu dalam bahaya….."* (Latif, 2018).

Dalam pidatonya tersebut, Presiden Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konseptualisasi dari beragam nilai yang dihayati oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Alih-alih menyatakan bahwa dirinya adalah pencipta Pancasila, Presiden Soekarno kerap kali menegaskan bahwa dirinya sekedar penggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia Sendiri (Latif 2018). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan artikulasi dari sejumlah nilai yang sejak lama telah terkandung dalam pandangan hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bisa jadi, seperangkat nilai tersebut berasal dari luar Indonesia, tetapi setelah melewati kurun waktu tertentu, nilai-nilai tersebut telah mengalami proses adaptasi. Ada penyerapan dan persilangan antara nilai-nilai dari luar Indonesia dengan elemen-elemen konteks Indonesia sehingga menghasilkan kearifan atau khazanah kehidupan lokal.

Dari sejumlah nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, ada lima nilai fundamental yang pada akhirnya menjadi sila-sila dalam Pancasila. Kelima nilai dasar itu adalah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai ini memiliki tiga fungsi utama bagi bangsa Indonesia (Latif, 2008). Pertama, menjadi *titik temu* yang mempersatukan keragaman suku bangsa menjadi satu bangsa Indonesia. Kedua, sebagai *titik tumpu*, yang mendasari ideologi, norma dan kebijakan negara. Ketiga, adalah *titik tuju* yang memberikan orientasi berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proses perumusan Pancasila sebagai ideologi bangsa melewati perjalanan yang cukup panjang. Paling tidak, ada tiga fase penting dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara, yaitu fase perintisan, fase perumusan dan fase pengesahan (Latif, 2018). Fase perintisan diawali dengan sejumlah pemikiran awal yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia, yaitu Tan Malaka, Tjokroaminoto dan Soekarno sendiri (Latif, 2018). Ide atau gagasan terdahulu yang nantinya berujung pada Pancasila memusatkan perhatian pada upaya meraih kemerdekaan dan perwujudan demokrasi untuk Indonesia. Isu tentang persatuan, solidaritas, kemandirian dan kedaulatan rakyat menjadi tema-tema pokok dalam berbagai wacana yang ada. Puncaknya adalah ketika Soekarno diasingkan ke Ende, Flores. Soekarno menyatakan bahwa "….. *di pulau Flores yang sepi, di mana aku tidak memiliki kawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya, di bawah sebatang pohon di halaman rumahku, merenungkan ilham yang diturunkan oleh Tuhan, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila*…" (Adams, dalam Latif, 2018).

Fase kedua yaitu fase perumusan diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan diikuti dengan berdirinya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Latif, 2018). Paling tidak ada tiga tokoh yang disebut-sebut menawarkan sejumlah prinsip yang akan dijadikan rujukan untuk penyusunan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno (Latif, 2018; Suwartono & Meinarno, 2011). Prinsip-prinsip yang mengemuka dalam sejumlah sidang BPUPK adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan atau kesejahteraan. Pada akhirnya, Soekarno berupaya merumuskan berbagai usulan prinsip yang ada menjadi sebuah titik temu dari berbagai elemen bangsa yang terlibat dalam BPUPK. Lima prinsip yang ditawarkan oleh Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan.

Fase ketiga atau fase pengesahan adalah masa transisi dari pembubaran BPUPK dan pembentuk PPK. Sampai akhir masa sidangnya, BPUPK menghasilkan Piagam Jakarta yang merupakan revisi terhadap rumusan awal Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Prinsip ketuhanan dipindahkan dari sila terakhir menjadi sila pertama dengan tambahan anak kalimat yang berbunyi "dengan kewajiban menjalan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" atau dikenal juga sebagai tujuh kata (Latif, 2018). Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, PPKI juga menyetujui Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945 dengan mengganti tujuh kata dengan kata "Yang Maha Esa".

Identitas Nasional dan Identitas Sosial

Posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa sekaligus juga menegaskan bahwa Pancasila adalah identitas nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Identitas secara harfiah mengandung arti sebagai tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada individu atau kelompok (kumpulan individu) dan membedakannya dari yang lain (Parji, 2011). Kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan, artinya berbagai kelompok yang tidak sekedar pengelompokkan berdasarkan ras, agama, budaya atau bahasa. Dengan kata lain, identitas nasional merujuk pada identitas sebuah bangsa dalam pengertian politik.

Lebih lanjut, identitas nasional merupakan salah satu jenis dari identitas sosial yang pada dasarnya berawal dari diri individu (Mavric, dalam Suwartono, Meinarno & Bawono, 2017). Individu memiliki perasaan bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Dengan kata lain, individu akan melakukan proses identifikasi dirinya sebagai pribadi sebagai bagian dari suatu bangsa. Identitas sosial sendiri secara umum menjelaskan tentang bagaimana seseorang memiliki pemahaman bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok tertentu (Tougas & Beaton, dalam Suwartono dkk, 2017). Dalam kenyataannya, bisa jadi individu akan terikat pada sejumlah kelompok, bukan hanya satu kelompok saja. Tetapi perlu dipahami juga, bahwa ada kecenderungan bahwa individu akan merasa lebih terikat pada satu kelompok dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Di sisi lain, perubahan yang sangat cepat dalam era saat ini yang dimulai sejak globalisasi, mempengaruhi identitas individu, termasuk remaja. Mereka terus-menerus akan memikirkan kembali dan membangun ulang tentang identitas diri mereka, termasuk juga identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat. Alih-alih menjadi pribadi yang pasif, remaja berupaya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang ada. Bahkan jika diperlukan, mereka akan mengembangkan identitas sosial sesuai dengan kondisi geografis dan budaya yang mereka hadapi. Internet dan perkembangan teknologi informasi komunikasi telah menjadi faktor utama yang memungkinkan remaja untuk merekonstruksi ulang identitas mereka sendiri (France, 2007).

Ketika seseorang melakukan proses identifikasi, atau merasa bahwa dirinya adalah bagian dari suatu kelompok, maka yang sebenarnya terjadi adalah proses evaluasi dan pembangunan harga diri dari individu yang bersangkutan (Tajfel & Turner, dalam Suwartono dkk., 2017). Identitas sosial, dengan demikian, adalah bagian dari konsep diri yang dimiliki oleh seseorang. Konsep diri ini dibangun berdasarkan hal-hal yang selama ini diperolehnya dalam kelompok, dalam setiap perjumpaan serta interaksi dengan anggota-anggota

kelompok lainnya. Jika individu merasa dirinya memiliki makna serta punya ikatan emosional yang kuat dengan kelompok tertentu, maka kelompok itu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap individu tersebut. Individu akan membangun perasaan positif yang bukan sebatas pada dirinya, tetapi juga pada kelompoknya.

Identitas sosial yang dimiliki oleh individu didasari juga oleh rasa nasionalisme (Crano, dalam Kusumawardani & Faturochman, 2004). Nasionalisme di sini tidak mengandung arti bahwa ada pemaksaan atau penyeragaman yang tidak memberikan ruang untuk menunjukkan adanya perbedaan. Tiap individu tentu saja tetap memiliki peran yang berbeda sejauh hal tersebut tidak mengancam kekokohan kelompok atau tidak bertentangan dengan hal-hal yang diyakini oleh kelompok. Selain itu, tiap individu menjadi memiliki tanggung jawab kolektif, yaitu untuk menjaga keutuhan kelompok dan mencegah berbagai ancaman serta tantangan yang dapat membahayakan kelompok.

Dengan demikian, Pancasila sebagai identitas nasional diharapkan juga menjadi bagian dari konsep diri yang dimiliki oleh tiap warga negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar bagi individu untuk memperoleh, mempraktikkan, bahkan mengembangkan nilai-nilai fundamental yang ada sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Interaksi antar berbagai individu yang memiliki keragaman dalam berbagai aspek justru diharapkan memperkuat pemahaman dan kecakapan untuk menghidupi Pancasila dalam tataran praktis. Selain itu, tentunya diharapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki dorongan yang sama untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan dengan alasan yang sama, yaitu identitas nasional dalam wujud pengamalan Pancasila.

Degradasi Makna Pancasila

Indeks pengembangan manusia menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia cukup memperhatikan (UNESCO, dalam Putri, 2018). Hal ini dibuktikan dari komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala di Indonesia yang cenderung menurun. Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99(1997), ke-105(1998), dan ke-109(1999) dari 174 negara di dunia. Kualitas pendidikan di Indonesia yang menurun juga dibuktikan berdasarkan data yang dilaporkan *The World Economic Forum* Swedia (2000, dalam Putri, 2018) yang menyatakan bahwa daya saing Indonesia rendah. Hal itu didasarkan pada data survei Indonesia berada pada urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh masalah efektivitas, efisiensi, dan standardisasi

pengajaran (Putri, 2018). Kurikulum yang diciptakan hanya berdasarkan pada pengetahuan pemerintahan tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pendidikannya. Sehingga masalah yang muncul adalah ketidakseimbangan antara belajar yang berpikir (kognitif) dengan perilaku belajar yang merasa (afektif), dan kurikulum di Indonesia lebih menitikberatkan pada segi kognitif.

Kerangka sistem pendidikan Indonesia dibangun atas dasar paradigma bahwa pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab (Budimansyah, 2012). Secara teoretis, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berinteraksi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Secara programatik, kewarganegaraan dan Pancasila dirancang menjadi sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusungkan nilai dan pengalaman belajar dalam bentuk perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumardjoko (2013) tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran kewarganegaraan dan Pancasila menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Pada praktiknya, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila serta kesadaran diri terhadap bangsa telah mengalami degradasi yang cukup mengkhawatirkan. Salah satu penyebabnya adalah arus-arus pendidikan global yang menitikberatkan pada pembelajaran kognitif saja. Kondisi seperti ini yang mengakibatkan menipisnya tata krama, etika, dan kreativitas remaja; menurunnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila, dan merosotnya nilai-nilai moralitas terhadap tata kehidupannya.

Remaja Milenial: Siapa Mereka?

Pada tahun 1974, World Health Organization atau WHO (dalam Sarwono, 2012) mendefinisikan remaja secara konseptual yang meliputi konsep biologis, psikologis, dan sosial-ekonomi. Pada konsep biologis, individu dikatakan remaja apabila individu tersebut berkembang dari saat ia pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Pada konsep psikologis, individu dikatakan sebagai remaja apabila ia mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Sedangkan pada konsep sosial-ekonomi, individu

dikatakan sebagai remaja apabila ia mengalami masa terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan relatif yang mandiri.

Perkembangan remaja terdiri tiga tahapan perkembangan yang dilalui oleh remaja dalam proses kedewasaan (Sarwono, 2012). Tiga tahapan tersebut yaitu masa remaja awal (11 tahun sampai 14 tahun), masa remaja madya (15 tahun sampai 18 tahun), dan remaja akhir (19 tahun sampai 21 tahun). Pada masa remaja madya, individu sudah mulai mencari identitas diri dan mengembangkan kemampuan berpikir abstraknya (Monk, 2009 dalam Sarwono, 2012). Pada masa remaja akhir, individu sudah bisa mengungkap identitas dirinya, lebih selektif dengan pertemanannya, mempunyai citra jasmani dirinya, dan sudah mampu berpikir secara abstrak. Pada masa remaja madya dan masa remaja akhir ini pendidikan pancasila diperlukan agar seorang remaja dapat memenuhi salah satu tugas perkembangan milik Hurlock(1990), yaitu membentuk sistem nilai-nilai moral dan falsafah hidup sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi.

Pada masa perkembangan remaja madya dan akhir, seorang remaja akan mengalami masa transisi biologis, kognitif, dan sosial (Santrock, 2012). Pada masa transisi biologis, banyak perubahan-perubahan fisik yang akan muncul pada saat masa pubertas, seperti meningkatnya tinggi dan berat badan, berfungsinya alat-alat reproduksi (Menstruasi pada wanita, dan mimpi basah pada pria) dan muncul tanda-tanda seksual sekunder.

Piaget (dalam Santrock 2012) menyatakan bahwa masa remaja madya dan akhir adalah masa transisi kognitif yang ditandai dengan pembentukan pemikiran operasional formal. Pemikiran operasional formal bersifat lebih abstrak, idealistik, dan logis. Piaget menekankan bahwa remaja terdorong untuk memahami dunianya karena tindakan yang dilakukannya penyesuaian diri biologis. Secara lebih nyata, mereka mengaitkan suatu gagasan dengan gagasan lain. Mereka bukan hanya mengorganisasikan pengamatan dan pengalaman akan tetapi juga menyesuaikan cara berpikir mereka untuk menyertakan gagasan baru karena informasi tambahan membuat pemahaman lebih mendalam.

Pada masa transisi sosial, seorang remaja akan mengalami perubahan dalam hubungan individu dengan manusia lain yaitu dalam emosi, dalam kepribadian, dan dalam peran dari konteks sosial dalam perkembangan. Membantah orang tua, serangan agresif terhadap teman sebaya, perkembangan sikap asertif, kebahagiaan remaja dalam peristiwa tertentu serta peran gender dalam masyarakat merefleksikan peran proses sosial-emosional dalam perkembangan remaja. Lantas, seperti apakah gambaran tentang padangan atau perspektif remaja tentang Pancasila?

Menyerap Makna Pancasila

Penelitian yang melibatkan 1.987 responden remaja usia 16-21 yang beragama Katolik (44,6%), Kristen Protestan (34%), Islam (11,6%), Budha (8,6%), Hindu (0,7%), Khonghuchu (0,6%) dan Aliran Kepercyaan (0,1%) dan yang tinggal di Jakarta (54,1%), Tangerang (26,1%), Bekasi (9,1%), Bogor (7,6%), dan Depok (3,2%) menghasilkan gambaran sebagai berikut.

Mayoritas responden memilih sila pertama sebagai sila yang terpenting dari Pancasila (45%), diikuti dengan sila ketiga (25,3%), sila kelima (14,5%), sila kedua (13,4%) dan terakhir adalah sila keempat (1,8%). Urutan ini juga tidak mengalami perbedaan jika membandingkan jawaban antara responden laki-laki dan responden perempuan. Temuan ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh *Pew Research Center* (2018) di seluruh dunia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang menganggap agama dan spiritualitas adalah hal yang penting dalam kehidupan. Survei ini juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menunjukkan tidak adanya perbedaan antara remaja dan orang muda dengan orang-orang yang lebih tua dalam pandangan tentang agama.

Secara umum, alasan para responden memilih sila pertama sebagai sila yang terpenting dikaitkan dengan pandangan bahwa Tuhan dan agama adalah hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. Tuhan dan agama dianggap sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Pedoman untuk melakukan hal-hal baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Donahue dan Benson (1995) yang menegaskan bahwa kehidupan beragama memiliki hubungan yang positif dengan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya adalah relasi dengan orang lain. Individu yang menganggap agama sebagai hal yang penting, cenderung memiliki dan memunculkan perilaku menolong yang konsisten dalam berbagai situasi.

Sejalan dengan hal tersebut, ada sebuah penelitian yang dilakukan pada remaja dan kaum muda di Kanada (Michaelson, Robinson, & Pickett, 2013). Hasilnya menunjukkan bahwa remaja dan kaum muda yang menganggap agama adalah hal penting serta berpartisipasi dalam berbagai praktik atau ritual keagamaan, cenderung menunjukkan perilaku menolong yang menonjol. Remaja dan kaum muda ini juga menunjukkan kesejahteraan psikologis yang baik, memiliki perasaan positif dan kepercayaan diri sebagai seorang individu.

Dalam kaitannya dengan sila pertama ini, Ali dan Purwandi (2017) menyebutkan bahwa mayoritas kaum remaja milenial masih menjalankan sejumlah ritual dalam kehidupan beragama. Alasan yang mendasarinya adalah hal-hal tersebut merupakan kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan di dalam

keluarga atau diajarkan oleh guru-guru agama mereka. Dalam survei ini, para responden juga menegaskan hal tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa ajaran atau nilai-nilai agama sudah mereka dapatkan sejak kecil lewat pengasuhan orang tua maupun guru di sekolah. Mereka meyakini bahwa ajaran agama menjadi kode etik atau ukuran moralitas dalam berperilaku. Hal ini lagi-lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Michaelson dkk. (2013). Remaja dan kaum mudah yang menganggap agama adalah hal penting menunjukkan kecenderungan untuk tidak terlibat dalam sejumlah perilaku berisiko tinggi, misalnya penyalahgunaan napza dan perilaku seksual berisiko.

Alasan lain yang dapat dikemukakan berkaitan dengan pentingnya agama bagi remaja adalah kaitannya dengan *religious coping*. Penelitian menunjukkan bahwa pentingnya agama berkaitan dengan *religious coping* yang dilakukan oleh remaja. *Religious coping* dalam berbagai bentuk (berdoa secara pribadi, melaksanakan ibadah, dan sejenisnya) yang ternyata membantu remaja untuk merasa lebih tenang, mampu mengendalikan emosi, dan menghadapi masalah; membuat remaja merasa yakin dengan pentingnya agama. Hal ini terjadi karena mereka telah memiliki pengalaman bahwa *religious coping* membantu mereka dalam mengatasi masalah sehari-hari (Utami, 2012). Selain itu, peran ibu sebagai panutan yang juga konsisten menggunakan *religious coping* juga memiliki peran untuk remaja mengembangkan hal yang sama serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya agama dan arti ke-Tuhan-an (Goeke-Morey, Merrilees, Taylor, & Shirlow, 2014).

Sejumlah responden juga menyadari bahwa ada keragaman agama maupun aliran kepercayaan di Indonesia. Mereka percaya bahwa sila pertama akan menjadi dasar untuk mempersatukan sejumlah agama dan aliran kepercayaan tersebut. Toleransi dan saling menghargai antar umat beragama juga dianggap penting sebagai bagian dari perwujudan dari penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh *IDN Research Institute* (2019) dan *Pew Research Center* (2010) yang menyimpulkan bahwa remaja milenial lebih toleran, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan politik dan agama.

Jika dikaitkan dengan sila lainnya, sila pertama dianggap menjadi dasar bagi sila lainnya. Penghormatan akan ajaran agama dan keyakinan akan nilai ke-Tuhan-an akan menjadikan hal-hal lain yang diungkapkan sila kedua sampai dengan sila kelima menjadi mungkin untuk dilakukan. Beberapa responden juga mengungkapkan bahwa isu agama masih merupakan hal yang sensitif di Indonesia. Maka menjadi penting untuk sama-sama sepakat akan nilai Ketuhanan agar tidak terjadi perbedaan pendapat atau pertikaian karena hal ini.

Dalam hal persatuan, sejumlah responden tanpa ragu menyebutkan dirinya

adalah bagian dari bangsa Indonesia. Hal ini tampak dari penggunaan kata "kita" ketika menjawab sejumlah pertanyaan yang ada. Hal-hal yang dianggap sebagai hal yang mendasari persatuan adalah suku, agama, ras dan budaya. Kenyataan ini juga terungkap dalam survei yang dilakukan oleh *IDN Research Institute* (2019) yang menunjukkan bahwa optimisme tertinggi kaum muda milenial adalah tentang keragaman dan keutuhan Indonesia.

Optimisme tentang menjadi bagian dari sebuah bangsa berkaitan dengan kesejahteraan psikologis pada diri individu. Penelitian yang dilakukan oleh Dimitrova, Buzea, Ljujic, dan Jordanov (2013) menunjukkan bahwa warga negara yang yakin dan percaya bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah bangsa, cenderung memunculkan kualitas kesejahteraan psikologis yang baik. Individu memiliki kepuasan hidup, pola pikir dan perasaan yang positif serta cenderung tidak memunculkan perilaku atau emosi yang negatif. Jika dikaitkan dengan temuan di sila pertama dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Michaelson dkk. (2013), maka kesejahteraan psikologis pada diri individu selain bersumber pada keyakinan dan praktik beragama, tetapi juga pada rasa menjadi bagian dari sebuah bangsa.

Di sisi lain, sejumlah responden mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan persatuan. Secara konkret, kekhawatiran tersebut dikaitkan dengan kondisi krisis, perpecahan, perbedaan, teror dan ketidakstabilan. Masih ada juga responden yang mengungkapkan tentang toleransi dan pembauran walaupun dalam jumlah yang terbatas.

Sila ketiga juga dikaitkan dengan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Beberapa responden meyakini bahwa kondisi persatuan akan terwujud jika ada keselarasan antara pemerintah dan rakyatnya. Visi dan misi pemerintah yang dipahami dengan tepat dan diterima oleh rakyat menjadi jaminan bahwa persatuan akan dapat terwujud. Kesatuan pemahaman ini dianggap sebagai salah satu syarat untuk mempertahankan ikatan yang sudah lama dibangun dan dijaga oleh bangsa Indonesia. Hal yang sama juga terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Dimitrova dkk. (2013). Individu akan memiliki ikatan yang kuat dan rasa nasionalisme yang tinggi jika yang bersangkutan merasa sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Sejumlah responden memaknai kata adil, beradab dan kemanusiaan yang ada di sila kedua dan kelima sebagai hal-hal yang penting. Walaupun tidak menjelaskan dengan lebih lanjut, ketiga kata itu adalah kata-kata yang banyak dimunculkan oleh para responden untuk menjelaskan tentang sila kedua dan kelima. Isu tentang persamaan antar individu atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga banyak dimunculkan oleh responden. Hal ini terutama dikaitkan dengan sila kedua dari Pancasila.

Paradigma yang Berubah: Dari Wacana menjadi Laku

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah bukanlah sebuah hal yang patut dipertanyakan. Para remaja juga sudah menunjukkan bahwa sila pertama dan ketiga adalah sila yang mereka anggap penting dalam membangun identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Sementara, sila lainnya belum dipahami atau dihayati dalam porsi yang sama. Dalam kaitannya dengan hasil penelitian ini, ada beberapa hal praktis yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Pancasila sebagai identitas nasional yang menjaga integrasi bangsa.

Pertama, adanya kesadaran bahwa Pancasila bukanlah hanya sekedar ilmu pengetahuan atau pada tataran pemahaman saja. Mengajarkan Pancasila bukan berarti menghafalkan sila-sila dan maknanya, tetapi juga belajar mempraktikkan hal itu secara nyata di dalam masyarakat. Menjadi penting dalam kurikulum pendidikan tinggi untuk menyertakan praktik sebagai bagian dari metode pengajaran. Perjumpaan dengan realitas sosial di masyarakat akan dapat dijadikan sarana untuk menemukan nilai-nilai bersama yang telah dirumuskan secara baku dalam sila-sila Pancasila dalam berbagai bentuk yang berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh Kolb dan Kolb (2005), pencetus konsep *learning space*, pembelajaran tentang Pancasila idealnya melibatkan aksi dan refleksi. Remaja dan kaum muda diberikan kesempatan untuk "membenturkan" Pancasila dengan realita yang ada sebagai tumpuan untuk melakukan refleksi bersama yang menghasilkan pembelajaran penting atau praktik yang baik.

Lebih lanjut, Kolb dan Kolb (2005) mengingatkan kembali bahwa belajar adalah sebuah proses. Artinya, para peserta didik perlu terlibat secara aktif dalam berbagai upaya yang tujuannya meningkatkan kemampuan mereka dalam menyerap informasi dan kelekatan pada sejumlah materi tentang Pancasila. Dalam menjalani proses ini, umpan balik menjadi hal yang penting untuk diberikan secara berkala. Umpan balik menjadi dasar bagi para peserta didik untuk mengevaluasi pemahaman dan penghayatan yang tepat serta memperbaiki hal-hal yang belum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mereka pelajari. Atau bahkan dapat juga memperluas wawasan dan perilaku yang mendukung implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Yang saat ini terjadi di banyak institusi pendidikan justru menekankan pembelajaran Pancasila dengan menggunakan proses berpikir semata. Pasca pertemuan tatap muka di kelas, tidak ada lagi kesempatan untuk mendiskusikan ulang atau melakukan dialog mengenai Pancasila. Dalam perspektif Kolb dan Kolb (2005), proses tersebut menunjukkan adanya pembelajaran tanpa refleksi, minimnya umpan balik mengenai penghayatan dan aspek emosional.

Kedua, menjadi penting untuk berani mendiskusikan tantangan, ancaman maupun bahaya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Diskusi yang terbuka mengenai isu disintegrasi, krisis, perbedaan, perpecahan, dan sejenisnya, akan menempatkan kaum muda dalam posisi yang tidak berjarak dengan kenyataan. Mereka juga akan belajar untuk memahami ancaman ini dalam perspektif yang utuh.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Kolb dan Kolb (2005) menegaskan bahwa memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengungkapkan pemahaman dan keyakinannya adalah hal yang penting. Agar Pancasila menjadi pembelajaran yang makin bermakna, pembelajaran Pancasila perlu berangkat dari pemahaman dan keyakinan remaja di satu saat, lalu dipelajari lagi dengan dukungan agar pembelajaran ulang tersebut menjadi lebih mendalam dan lebih terperinci. Dengan demikian, pembelajaran tentang Pancasila tidak lagi dirasakan sebagai pengulangan yang membosankan.

Pembahasan tentang tantangan, hambatan, dan ancaman terhadap Pancasila perlu diikuti dengan usulan atau rumusan konkret tentang alternatif solusi yang dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Agar lebih konkret, tentunya pemecahan masalah ini diharapkan menyentuh tingkat individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat. Hal-hal yang sederhana, praktis dan mudah dilakukan dapat menjadi pedoman atau panduan agar rumusan tersebut tidak hanya menjadi wacana belaka.

Ketiga, pemahaman dan penghayatan sila kedua, keempat, dan kelima dari Pancasila patut menjadi perhatian. Perlu dipikirkan cara untuk membuat implementasi sila-sila ini menjadi lebih konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jika isu tentang agama dan persatuan adalah hal nyata yang dengan cepat dipahami oleh kaum muda, maka kini saatnya juga untuk menyodorkan isu-isu berkaitan dengan keadilan, kemanusiaan maupun demokrasi. Contoh-contoh konkret atau kasus-kasus nyata yang ditemukan dalam kehidupan keseharian dapat menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman kaum muda tentang hal ini.

Dalam kaitannya dengan sila keempat yang dianggap kurang menonjol bisa jadi karena dalam praktiknya makin sulit ditemukan pelaksanaan musyawarah untuk mufakat. Pemungutan suara atau *voting* menjadi kecenderungan umum di masyarakat. Kolb dan Kolb (2005) menegaskan bahwa dengan demikian, pemungutan suara menjadi *social knowledge* yang tertanam pada diri peserta didik. Remaja akan mengkonstruksi ulang pengetahuan pribadi mereka tentang sila keempat bahwa yang memiliki suara terbanyak akan menjadi pemenang serta tidak perlu bertenggang rasa pada pendapat minoritas.

Sejak usia SD, pemilihan ketua kelas dilakukan melalui voting dan tidak melalui musyawarah. Dalam hal ini, memang tidak ada sesi khusus

diskusi untuk mendapatkan makna bahwa yang banyak pasti menang, namun hasil akhirnya sangat jelas menggambarkan demikian. Sebaliknya pembelajaran tentang musyawarah yang pernah tersebut dalam pembelajaran di sekolah justru tidak menjadi *personal knowledge* karena selain tidak mendapat waktu khusus untuk mendiskusikan, mendapatkan umpan balik, atau melakukan refleksi tentang hal ini; penerapannya sehari-hari sulit ditemukan.

Yang juga penting diingat dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai identitas nasional adalah pembentukannya ditentukan oleh masyarakat. Dengan demikian, pendidikan baik dari segi keterampilan, akademik, dan pribadi sangat penting bagi negara dalam membentuk kepribadian remaja saat ini. Pendidikan yang diterima oleh remaja adalah hal-hal yang membentuk identitas negara di mana pendidikan memiliki dampak besar pada kesempatan hidup untuk memperoleh kualitas dan identitas yang baik (Idris, Hassan, Ya'acob, Gill & Awal, 2012).

Daftar Acuan

Ali, H. & Purwandi, L. (2017). *Millennial Nusantara. Pahami Karakternya, Rebut Simpatinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Budimansyah, D. (2012). *Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter*. Bandung: Widya Aksara Press.

Dimitrova, R., Buzea, C., Ljujic, V. & J. V. (2013). The influence of nationalism and national identity on well-being of Bulgarian and Romanian youth. *Studia Sociologia, 8*, 69-86.

Donahue, M.J. & Benson, P.L. (1995). Religion and the well-being of adolescents. *Journal of Social Issues, 51*(2), 145-160.

France, A (2007) *Understanding Youth in Late Modernity*, Maidenhead: McGraw Hill/OUP.

Goeke-Morey, M.C., Merrilees, C.E., Taylor, L.K. & Shirlow, P. (2014). Adolescents' relationship with god and internalizing adjustment over time: the moderating role of maternal religious coping. *Journal of Family Psychology*, *28*(6), 749-758.

Hurlock, Elizabeth B. (1990). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.

Idris, F., Hassan, Z., Ya'acob, A., Gill, A., K., & Awal, N., A., M. (2012). The role of education in shaping youth's national identity. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *59*, 443–450.

Kusumawardani, A., Faturochman. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, Tahun XII, No.2., 61-72.

Kolb, A.Y. & Kolb, D.A. (2005). Learning styles and learning spaces: enhancing experiential learning in higher education. *Academy of Management Learning & Education*, *4*(2), 193-212.

Latif, Y. (2018). *Wawasan Pancasila. Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Jakarta: Mizan

Michaelson, V., Robinson, P., & Pickett. W. (2013). Participation in church or religious groups and its association with health: a national study of young Canadians. *Journal of Religion and Health*, *53*(5), 1353-1373.

Parji. (2011). Pengembangan nilai-nilai integritas dan identitas nasional dari perspektif pendidikan. *Agastya, 1*(2), 152-161.

Pew Research Center. (2010). *Millennials: a portrait of generation next*. Diakses melalui https://www.pewforum.org

Pew Research Center. (2018). *The Age Gap in Religion Around The World*. Diakses melalui https://www.pewforum.org

Putri, Tesha. (2018). "Ada Apa dengan Pendidikan di Indonesia?". Diakses melalui https://student.cnnindonesia.com/

edukasi/20180103112420-445-266335/ada-apa-dengan-pendidikan-di-indonesia

Santrock, W.J. (2012). *Life-span Development* (13th ed.). University of Texas Dallas: McGraw-Hill

Sarwono, Sarlito W. (2012). *Psikologi Remaja*. Edisi Revisi ke-15. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sumardjoko, Bambang. (2013). Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila melalui Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa. *Varia pendidikan, 25* (2), Desember 2013.

Suwartono, C., Meinarno, E.A., & Bawono, G. (2017). Development of the National Identity Measurement Using Implicit Association Test Method. *Anima Indonesian Psychological Journal, 32*(2), 76–89.

Suwartono, C., & Meinarno, E.A. (2011). Construct Validation of Pancasila Scale: An Empirical Report. Presented at International Conference "Exploration of Asian Indigenous Perspective: Communalities and Differences", Yogyakarta, Indonesia, July 21 – 24, 2011.

Utami, M.S. (2012) Religiusitas, koping religius dan kesejahteraan subjektif. *Jurnal Psikologi*, *39*(1), 46-66.

Nurpatria, N.I., Suwartono, C., Tunjungsari, H., & Handayani, P. *In God's protection, together knitting a weave of unity: Reading the millennial adolescents' interpretation of Pancasila.* *The process of searching for Indonesian ideology has passed a long journey before finally being formulated in the concept of Pancasila. Not just a symbol, but Pancasila is also a national identity for every Indonesian citizen. In reality, Pancasila as a national identity has experienced degradation in meaning because it focuses on the aspects of understanding the Pancasila. This has an impact on adolescent attitudes and behavior in their daily lives. The research carried out at 1,987 teenage respondents shows that divinity and unity are two things that are considered more valuable. The reason stated is that God and religion are things that form the basis of human life. Unity is also regarded as important as part of maintaining the integrity of the Indonesian people. On the other hand, adolescents also realize that there are currently many challenges they face in maintaining Pancasila as a national identity. Issues of divisions, differences, crises, and terror are some of the things raised by the respondents relating to threats to various efforts to safeguard the integrity of the Indonesian nation. To be able to strengthen teenagers' understanding of Pancasila, it is essential to complement the teenagers' comprehension of Pancasila with concrete actions they can take in their daily lives.*

Mistifikasi Generasi Y

Agus Suwignyo

Dalam beberapa tahun belakangan ini, keberadaan penduduk muda Indonesia, yang sering disebut sebagai "Generasi Y", mendapatkan perhatian besar dari sejumlah kalangan. Di tahun 2016, misalnya, *Harian Kompas* (edisi 14 hingga 17 Maret) secara berturut-turut menurunkan ulasan tentang Generasi Y dan pengaruhnya pada performa korporasi di Indonesia. *Kompas* menunjukkan adanya potensi besar Generasi Y dan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kebijakan dan pembangunan. Kiprah Generasi Y saat ini menunjukkan proses transisi dalam kepemimpinan korporasi yang akan menentukan wajah perekonomian Indonesia ke depan. Fokus utamanya efisiensi kerja korporasi bisnis dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Meskipun cukup komprehensif, ulasan-ulasan tentang Generasi Y tampaknya meneropong kekuatan tersebut sebagai sesuatu yang terberi (*given*). Karena itu nuansanya agak mistis dalam arti kekuatan itu dianggap berkembang sebagai bawaan dan keberuntungan usia. Selain itu, fokus ulasan atas Generasi Y sering hanya menyangkut potensinya dalam menggerakkan roda ekonomi. Laporan-laporan *Kompas* itu, misalnya, menyajikan hanya satu artikel pendek (*Kompas* 17/3/2016, hlm. 2) yang mengaitkan keberadaan Generasi Y dengan kepemimpinan di luar urusan korporasi bisnis.

Menyambung diskusi tentang posisi "Generasi Y" dalam proyeksi kepemimpinan dan transformasi Indonesia ke depan di luar urusan ekonomi, tulisan ini dilandasi argumen bahwa kekuatan kolektif sebuah generasi dibentuk oleh peristiwa-peristiwa sejarah yang menyertai pertumbuhan generasi tersebut. Peristiwa-peristiwa sejarah menciptakan konteks makro dalam kehidupan kolektif masyarakat/bangsa, yang mempengaruhi (atau bahkan memaksa) pilihan sikap dan perilaku individu. Akibat pilihan-pilihan sikap dan perilaku yang didesakkan oleh konteks makro itu, kecenderungan sifat individu pun berubah. Dengan kata lain, sifat-sifat individu atau *personal traits* selain memiliki unsur bawaan-lahir, juga dibentuk oleh peristiwa-peristiwa sejarah yang menciptakan konteks makro kebangsaan/kemasyarakatan. Sementara kajian atas sifat, sikap, dan perilaku individu merupakan lingkup kajian psikologi, tulisan ini menggali babagan atau periodisasi peristiwa-peristiwa sejarah yang menjadi wadah pembentukan-kolektif dimensi-dimensi psikologis individu.

"Penduduk muda" yang dimaksud sebagai "Generasi Y" adalah kelompok penduduk (*cohort*) yang usianya memasuki fase 20-tahun kedua (21–40 tahun). Yaitu mereka yang telah meninggalkan masa anak-anak dan remaja, memasuki usia remaja akhir dan dewasa awal dalam pengertian psikologi perkembangan. Kelompok penduduk rentang usia ini sering disebut sebagai "Generasi Y", yaitu generasi "*kakang ragil*" (kakak dari si bungsu, Generasi Z kelompok anak-anak dan remaja). Dalam konteks Indonesia, Generasi Y sekarang adalah mereka yang lahir antara 1980 dan 2000.

Data Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 65% penduduk Indonesia saat ini adalah Generasi Y. Mereka akan memasuki puncak usia produktif (kira-kira usia 40-55 tahun) antara tahun 2020–2040. Profil ekonomi Generasi Y menunjukkan mereka merupakan kelompok terbesar kelas menengah Indonesia saat ini. Jumlah kelas menengah mencapai 56,5% dari seluruh 237 juta penduduk, atau nominalnya 134 juta orang (tahun 2012). Data Bank Dunia ini terpaut tidak terlalu jauh dari hasil survei Biro Penelitian dan Pengembangan *Kompas* di tahun yang sama. Menurut data Litbang *Kompas*, jumlah kelas menengah 50,2% dan kelas menengah bawah (*lower middle class*) 29.6%. Batasan "kelas menengah" merujuk pada kategori penduduk berpenghasilan US$ 4–10 sedangkan "kelas menengah bawah" antara US$ 2–4 per hari.

Gambaran demografis tentang Generasi Y Indonesia, yang sebagian besar telah masuk kategori kelas menengah sebelum mereka memasuki puncak usia produktif, menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang memadai dan mendalam tentang generasi ini dalam proyeksi pengambilan kebijakan dan arah kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Sayangnya, belum ada riset serius yang mengintegrasikan pendekatan psikologi dan pendekatan sejarah tentang Generasi Y dan generasi-generasi lain Indonesia. Tulisan ini disajikan sebagai gagasan awal untuk membuka peluang riset kolaborasi tentang generasi tersebut.

Dibentuk oleh Sejarah

Fase-fase kehidupan manusia yang dipahami dalam hampir semua kelompok kebudayaan umumnya meliputi empat siklus standar, yaitu fase kelahiran dan masa kanak-kanak, masa remaja dan dewasa awal, masa dewasa, dan masa tua. Fase-fase tersebut merupakan penanda kolektif, biasanya "diresmikan" oleh suatu perayaan yang menandai peran sosial seorang individu di dalam masyarakatnya. Perayaan "lompat batu" dalam kebudayaan Nias, misalnya, adalah ritual yang menandai masa peralihan seseorang dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan dewasa awal. Fase-fase ini merupakan siklus

standar perkembangan diri seorang individu, yang secara keseluruhan bersifat linear alias lurus secara kronologis, yaitu dari kelahiran, tumbuh-besar, menjadi tua, dan akhirnya meninggal dunia.



Sumber foto: www.skyscrapercity.com

Gambar 1. Upacara lompat batu dalam sistem budaya Nias

Siklus linear tersebut berlaku bagi semua manusia, tetapi ada faktor-faktor yang menempatkan satu kategori kelompok sebagai *co-hort* yang terbedakan dengan kategori kelompok lainnya. Faktor-faktor umum yang berlaku di berbagai kebudayaan meliputi faktor kelahiran dan pertumbuhan, faktor pernikahan, dan faktor status sosial. Faktor pembeda kategori kelompok ini menentukan fungsi asimetris seorang individu di dalam masyarakat. Seseorang yang telah berkeluarga memiliki (tambahan) fungsi/peran yang berbeda dengan mereka yang tidak menikah, dan seterusnya. Dalam masyarakat Indonesia, faktor pembeda kelompok itu dapat ditemukan pada penamaan yang bersifat dikotomis, misalnya kategorisasi "kaum muda vs kaum tua". Meskipun istilahnya membawa makna jelas, kriteria yang menetapkan terbaginya "kaum muda" dari "kaum tua" cenderung cair. Kriteria itu bisa merujuk pada karakteristik usia individual, bisa juga merujuk pada faktor pembeda kelompok. Artinya, sementara faktor usia menentukan kurang-lebih karakteristik individu seseorang berdasarkan kelompok usianya, faktor pembeda kelompok menciptakan kategori fungsi sosial asimetris seorang individu di dalam masyarakat.

Namun, menurut William Strauss dan Neil Howe (1991), karakteristik kelompok usia maupun faktor pencipta fungsi-asimetris kelompok hanyalah sebagian unsur yang menentukan watak dan kecenderungan perilaku sebuah *co-*

hort individu, atau generasi. Ada unsur lain, yaitu sejarah bangsa atau masyarakat tempat generasi tersebut lahir dan dibesarkan. Logika dari pemikiran ini adalah bahwa sifat, orientasi dan perilaku individu dalam masyarakat dibentuk tidak hanya oleh sifat-sifat bawaan tetapi juga lingkungannya. Jadi, gabungan unsur alami (*nature*) dan bentukan (*nurture*). Sejarah bangsa merupakan unsur bentukan dalam struktur kolektif yang besar dan massal.

Strauss dan Howe mengakui bahwa siklus kehidupan sebuah generasi ditandai oleh fase tertentu kehidupan, yang menentukan sifat dari peran sosial yang harus diemban seorang individu. "Generasi" dalam batasan Strauss dan Howe merujuk pada satu *co-hort* atau kelompok manusia yang rentang usia dalam fase kehidupannya kurang-lebih sama dan memiliki sifat-sifat kolektif kelompok atau *peer personality*. Dengan pengertian ini, Strauss dan Howe membagi kelompok generasi ke dalam empat kategori yaitu masa muda (*youth*, kurang-lebih usia 0–21 tahun), masa tumbuh dewasa (*rising adulthood,* usia 22–43 tahun), masa tengah baya (*midlife*, usia 44–65 tahun), dan masa tua (*elderhood*, usia 66–87 tahun) (Strauss & Howe, 1991: 60–64).

Meskipun demikian, teori generasi yang diajukan oleh Strauss dan Howe menegaskan bahwa peristiwa besar tertentu dalam sejarah sebuah bangsa mempengaruhi secara radikal cara pandang atau mentalitas kolektif bangsa itu. Ada peristiwa-peristiwa dalam perjalanan suatu bangsa yang menciptakan suatu kondisi makro. Konteks makro sebuah bangsa bersifat menentukan (*decisive*) dalam membentuk pilihan-pilihan sikap dan perilaku individu warga bangsa itu. Rentang waktu dirasakannya dampak suatu perisitiwa yang *decisive* disebut "momen sosial" peristiwa sejarah. Dalam ilmu sejarah, "momen sosial" ini disebut "periode". Jadi "periode" dalam pendekatan sejarah bukan semata-mata kronologis sifatnya, melainkan paradigmatik. Periode sejarah menentukan makna (dan pemaknaan) suatu peristiwa sejarah di dalam masyarakat.

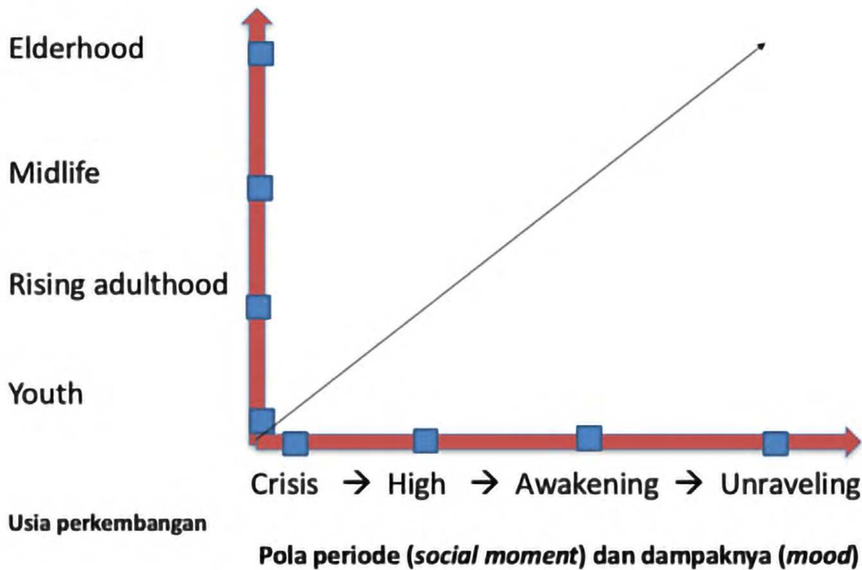
Sementara itu, dampak suatu momen sosial atau periode sejarah bagi masyarakat, dalam teori generasi Strauss dan Howe, dinamai *turning* atau titik-balik. "*Turning*" adalah dampak peristiwa sejarah yang membentuk *mood* atau pola pikir, cara pandang, suasana batin suatu masyarakat secara kolektif menciptakan karakteristik yang sama bagi masyarakat tersebut. Sebuah turning atau titik balik mempengaruhi filosofi, cara dan gaya orangtua-orangtua membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. "Sentuhan" orangtua pada gilirannya membentuk cara pandang, pilihan sikap dan orientasi hidup anak-anak tersebut ketika mereka beranjak/telah menjadi dewasa. Di sisi lain, perilaku seorang individu dewasa juga ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangannya sendiri. Ini berarti intensitas pengaruh sebuah peristiwa sejarah terhadap suatu generasi berbeda-beda dan bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, tergantung fase usia

mereka saat peristiwa besar itu terjadi.

Menurut Strauss dan Howe, terdapat dua pola periode dalam sejarah, yaitu *periode krisis* dan *periode kebangkitan* (*awakening*). Periode krisis adalah periode goyahnya institusi-institusi, yang kemudian tumbang, berubah atau bertransformasi. Periode krisis membawa *turning* yang sifatnya *high*. Goyahnya institusi suatu masyarakat membawa suasana batin dan pikir warga masyarakat itu untuk bertahan hidup dan segera keluar dari situasi krisis, Itulah suasanan batin dan pikir (*mood*) yang "*high*". Periode kebangkitan adalah momen ketika suatu masyarakat atau bangsa mencari dan membangun suatu tatanan baru bagi kehidupan bersama warganya, tatanan tersebut bisa mencakup tatanan politik, tatanan ekonomi, maupun tatanan norma dan nilai. Periode kebangkitan membawa dampak *unraveling*, yaitu suasana batin dan suasana pikir yang lega atas penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

Jadi jika diurutkan, periode krisis (*crisis*) menciptakan *mood* "*high*" yang mendorong transisi kepada periode kebangkitan (*awakening*), yang lalu melahirkan *mood* "*unraveling". Sifat dari peristiwa sejarah adalah siklus (*cyclic*). Sebuah peristiwa sejarah tidak mungkin terulang kembali secara persis sama karena baik setting waktu, tempat, agensi maupun aspek-aspek lainya berbeda. Meski demikian, pola terjadinya suatu peristiwa sejarah bisa terulang (karena itulah ada ungkapan *history repeats itself*). Menurut teori generasi Strauss dan Howe, siklus periode dan mood berulang. Dengan demikian, *mood* "*unraveling*" pada titik tertentu akan diikuti oleh periode krisis, yang menciptakan *mood* "*high*", yang membawa pada periode kebangkitan, yang mendatangkan *mood* "*unraveling*" lagi. Demikian seterusnya kembali ke siklus krisis lagi.

Straus dan Howe menegaskan bahwa setiap periode dan dampak peristiwa sejarah membentuk karakteristik *co-hort* generasi secara berbeda-beda sesuai dengan fase perkembangan individu saat periode dan dampak peristiwa sejarah tersebut terjadi. Seorang anak yang menghabiskan masa kecilnya (fase muda) pada periode krisis, misalnya, dibesarkan oleh orangtua yang cenderung bekerja keras, disiplin, dan hati-hati. Cara orangtua mendidik anak dalam masa krisis membentuk sifat dan cara pandang anak tersebut. Maka asumsinya, ketika anak ini beranjak ke fase dewasa, ia akan menunjukkan pilihan-pilihan sikap dengan *mindset* yang "*high*", yaitu kuat bertahan, selalu mencari jalan keluar dari masalahnya. Dalam Gambar 2 di bawah ini digambarkan interrelasi antara periodisasi peristiwa sejarah menurut teori generasi, dengan usia perkembangan individu.



Gambar 2. Inter-relasi periode sejarah dan fase perkembangan individu

Strauss dan Howe mendasarkan teorinya pada sejarah bangsa Amerika selama sekitar 500 tahun terakhir, sejak tahun 1500-an. Ketika itu negara Amerika Serikat belum terbentuk. Bangsa Amerika masih berupa komunitas-komunitas suku asli, imigran kulit putih dan budak berkulit hitam. Memanfaatkan arsip sejarah, Strauss dan Howe mengelompokkan figur-figur sejarah Amerika dan mengidentifikasi unsur-unsur individual (tahun lahir, sifat-sifat personal, kegemaran dan lain-lain). Identifikasi dan kategorisasi sifat-sifat kolektif figur-figur itu dilakukan setelah mempertimbangkan konteks dan akibat dari suatu peristiwa sejarah dan pengaruhnya terhadap mereka.

Di antara peristiwa-peristiwa yang mengubah secara radikal mentalitas kolektif bangsa Amerika Serikat adalah kolonisasi awal tanah Amerika dan perdagangan budak di abad ke-16 dan 17, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat abad ke-18, Perang Saudara, hingga pembunuhan Martin Luther King dan Presiden John F. Kennedy serta Revolusi Rock and Roll tahun 1960an. Jika Strauss dan Howe melanjutkan penelitian mereka hingga periode sekarang, peristiwa 11 September 2001 dapat dipastikan termasuk salah satu titik balik sejarah Amerika Serikat.

Dengan kata lain, validitas Teori Generasi, khususnya menyangkut

identifikasi karakteristik kolektif generasi, tidak berlaku universal. Istilah "Generasi Silent" dan "Generasi Baby Boom" untuk menunjuk mereka yang lahir masing-masing dalam rentang tahun 1925—1946 dan 1947—1964, merupakan simpulan Strauss dan Howe berdasarkan konteks sejarah Amerika Serikat. Selain itu, Generasi X dan Y Amerika memiliki ciri-ciri kolektif yang sifatnya khas akibat konteks kesejarahan yang juga khas.

Karena itu, identifikasi karakteristik kolektif generasi dalam teori Strauss dan Howe belum tentu sesuai dengan konteks bangsa lain, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, pola pengelompokan generasi yang mereka pakai dapat diadopsi melalui identifikasi peristiwa-peristiwa besar bangsa masing-masing. Dalam kasus bangsa Indonesia, peristiwa sejarah yang mengubah mentalitas kolektif bangsa ini perlu diindetifikasi untuk menentukan karakteristik kolektif suatu *co-hort* generasi.

Tujuh Titik Balik Sejarah Indonesia dalam Perspektif Teori Generasi

Sejauh ini belum ada kajian untuk mengidentifikasi ciri-ciri kolektif generasi Indonesia seperti model teori Strauss dan Howe. Historiografi Indonesia menguraikan adanya kesatuan kolektif kebangsaan sejak jaman Sriwijaya dan Majapahit, namun klaim semacam ini melulu politis sifatnya demi mendukung berdirinya negara kesatuan Indonesia. Karakteristik kolektif komunitas-komunitas kesukuan yang mendiami wilayah nusantara dan menjadi cikal-bakal bangsa yang kini disebut "Indonesia" ini belum pernah diidentifikasi dan dikategorikan. Siklus pergantian dan lahirnya kembali generasi yang memiliki ciri-ciri kolektif tertentu belum pernah terpetakan. Klaim-klaim tentang ciri-ciri kolektif, misalnya terkait kesadaran kesatuan, sering muncul sebagai bentuk pembayangan tentang kejayaan masa lalu.

Bagian kedua tulisan ini menyajikan identifikasi periode peristiwa yang menciptakan titik-balik besar (*turning*) dalam membentuk ciri-ciri kolektif. Secara umum, sebuah peristiwa dapat dikategorikan sebagai sejarah jika dampaknya bersifat institusional (yaitu kolektif dan sistemik) terhadap masyarakat. Dengan demikian, meskipun sebuah peristiwa sejarah selalu berdimensi masa lalu, namun tidak semua peristiwa di masa lalu adalah peristiwa sejarah. Selain itu, seberapa lalu sebuah "masa lalu" dan seberapa kini sebuah "masa kini" juga merupakan kerangka penting dalam menempatkan apakah sebuah peristiwa termasuk dalam kategori peristiwa sejarah.

Dalam sejarah Indonesia, peristiwa-peristiwa penting yang memiliki makna historis sering terjadi secara berurutan atau bahkan bersamaan, tetapi makna satu peristiwa dengan peristiwa lainnya berbeda. Akibatnya, identifikasi

atas peristiwa tidak dapat didasarkan hanya pada satu titik *event* tertentu. Jika sejumlah *event* yang berurutan diidentifikasi sebagai *turning* maka akan ada banyak sekali *turning* dalam rentang waktu yang cukup pendek. Dalam kondisi demikian maka efek *turning* terhadap pembentukan karakteristik kolektif sebuah generasi (yang berjarak waktu kronologis sekitar 20 tahun) akan sulit diidentifikasi. Karena itu, artikel ini mengidentifikasi rentang peristiwa alih-alih titik-peristiwa. Yaitu, sebuah titik saat sebuah *event* terjadi dan dampak langsung setelahnya (*aftermath*).

Berdasarkan pemahaman tentang peristiwa sejarah dan pola peristiwa dalam historiografi sejarah Indonesia, artikel ini mengidentifikasi tujuh titik-balik (*turning*) yang memiliki pengaruh penting dalam membentuk karakteristik kolektif generasi Indonesia lintas jaman. Ketujuh *turning* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perang Jawa (Perang Diponegoro), 1825–1830
2. Tanam Paksa, 1830–1870
3. Modernisasi, 1900 – 1942
4. Perang Dunia II dan Kemerdekaan, 1942–1950
5. Kesepakatan Ideologi dan Kegagalannya, 1950–1969
6. *Benevolent dictatorship*, 1970–1998
7. Demokrasi Baru, 1999–2014

Perang Jawa (Perang Diponegoro), 1825–1830

Perang Jawa, atau kita kenal sebagai Perang Diponegoro, adalah perang antara Pangeran Diponegoro dan pasukannya, melawan Sultan Yogyakarta dan pasukan Belanda yang mendukungnya. Menurut sejarawan Inggirs Peter Carey, Perang Jawa berakar pada konflik antara Pangeran Diponegoro dengan Sultan Yogyakarta. Pecahnya perang pada 1825 dipicu oleh sengketa tanah. Sebuah areal di wilayah Tegalrejo milik Pangeran Diponegoro, terkena jalur pembangunan rel kereta api oleh Belanda yang telah memperoleh restu Sultan. Perang tak terelakkan, mula-mula di bagian barat Yogyakarta. Diponegoro memperoleh dukungan rakyat berupa penambahan pasukan di wilayah Bagelen, Purworejo dan sebagian Kedu. Pasukan Diponegoro bertambah banyak dan entah melalui cara apa, berita tentang perlawanannya terhadap Belanda tersebar luas di Jawa maupun ke wilayah-wilayah lain.

Hingga akhirnya, melalui siasat undangan untuk berunding di rumah residen Magelang, Pangeran Yogyakarta itu ditangkap oleh pasukan Belanda pada tahun 1830. Pangeran dan sejumlah pengikutnya dibawa ke Semarang, lalu ke Batavia. Selanjutnya mereka diasingkan, mula-mula ke Manado. Namun, pejabat pemerintah Hindia Belanda di Manado mengkhawatirkan

keberadaan Diponegoro di pengasingan di sana akan memicu tumbuhnya perlawanan masyarakat di wilayah Sulawesi Utara. Maka pemerintah Hindia Belanda memindahkan Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya ke Makassar, menempatkannya di dalam kompleks Benteng Rotterdam Makassar.

Perang ini menjadi peristiwa penting bagi pembentukan karakteristik kolektif, yang nantinya mewarnai dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Pertama, perang ini menunjukkan kesadaran tentang perlawanan militer yang sistematis dan massif terhadap kekuasaan kolonialisme Barat maupun penindasan pribumi. Belum pernah ada sebelumnya suatu gerakan massa yang terorganisir dan berlangsung dalam waktu cukup lama dapat menarik dukungan rakyat dan menimbulkan semangat perlawanan yang luas. Historiografi Indonesia menyebut perang ini sebagai Perang Diponegoro karena mau menonjolkan sosok sang Pangeran. Namun para sejarawan non-Indonesia menyebut perang ini sebagai "Perang Jawa" karena sebaran berita dan pengaruh perlawanan Diponegoro mencakup antero Jawa, bahkan luar Jawa, misalnya Sulawesi. Pengaruh Perang Jawa terhadap ide dan semangat "kesatuan" yang menjadi karakteristik utama keindonesiaan di abad keduapuluh, sangat jelas. Perang Diponegoro juga memicu tumbuhnya inspirasi perlawanan dan nasionalisme yang besar bagi masyarakat Jawa dan Indonesia.

Kedua, meskipun membawa ide dan semangat "kesatuan" dan "nasionalisme", Perang Jawa juga menjadi momen pertama dipakainya agama (Islam) sebagai bendera pernyatuan masyarakat secara sistemastis dan terorganisasi. Dalam perlawanannya, menurut Carey, Diponegoro menyebut dirinya sebagai "Imam Besar Jawa" yang akan menaklukkan kekuasaan kolonial dan feodal yang lalim. Ia menggerakkan dan memperoleh dukungan ratusan santri dan puluhan kyai dari seluruh wilayah di Jawa; sebagian santri itu berasal dari etnis Tionghoa. Bahkan menurut salah satu versi sejarah, dipindahkannya Diponegoro dari Manado ke Makassar dilandasi kekhawatiran pemerintah kolonial bahwa keberadaan Pangeran Diponegoro di Sulawesi Utara akan memicu perlawanan masyarakat Islam di Gorontalo hingga ke wilayah Filipina Selatan. Versi ini masih harus didukung dengan bukti-bukti sejarah yang kuat. Namun intinya, Perang Jawa telah menghadirkan sebuah simbol identitas kolektif berbasis keagamaan yang terkelola secara massif. Mungkin dari Perang Jawa inilah konsep dan praktik politik identitas dalam sejarah Indonesia, berasal.

Tanam Paksa, 1830–1870an

Periode Tanam Paksa (*cultuur stelsel*) dalam sejarah Indonesia merujuk pada masa ketika pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Willem van den Bosch mewajibkan penduduk, khususnya di Jawa, menanam

tanaman komoditas tertentu yang telah ditetapkan. Misalnya tebu, kopi dan padi. Penanaman dilakukan pada porsi tertentu (antara sepertiga hingga duapertiga) luas tanah yang dimiliki maupun digarap penduduk. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah sebagai pajak kepada pemerintah kolonial. Sejarawan telah terbagi pendapatnya tentang kebijakan tanam paksa ini. Sebagian menganggap tanam paksa sebagai kebijakan eksploitasi rakyat. Sebagian lain melihat kebijakan tanam paksa sebagai intensifikasi lahan pertanian untuk peningkatan produksi. Memang dampak kebijakan tanam paksa sangat tergantung pada wilayah. Penduduk di beberapa wilayah, misalnya Brebes, mengalami masa berat akibat keharusan menanam tanaman komoditas. Tetapi penduduk di wilayah lain di Jawa, misalnya Besuki, mengalami masa meningkatnya hasil padi akibat kebijakan tanam paksa. Jadi, periode tanam paksa adalah periode yang menhadirkan pemaksaan pajak tanah di satu sisi dan peningkatan produksi pertanian di sisi lain. Periode lahirnya rejim pengumpul kekayaan akibat peningkatan hasil produksi pertanian, dan kelompok masyarakat miskin penggarap tanah yang semakin miskin akibat pajak produksi pertanian.

Kebijakan tanam paksa mewariskan karakter-kolektif berupa "perlawanan diam" ala Surantika Samin. "Perlawanan diam" menunjuk pada sikap mental "*nggih-nggih mboten kepanggih*" (menyatakan bersedia menjalankan suatu perintah tetapi secara diam-diam tidak menjalankannya). Menurut sejarawan M.C. Ricklefs, tokoh Surantika Samin melawan perintah menanam tanaman komoditas dengan cara menanam tanaman lain secara diam-diam. Sikapnya ditiru banyak orang, yang kemudian mendapatkan sebutan "kaum samin".

Modernisasi, 1900 – 1942

Periode modernisasi merujuk pada perkembangan luas bidang pendidikan, berupa ketersediaan sekolah dan akses terhadap pendidikan formal bagi rakyat kebanyakan di awal abad keduapuluh. Melalui kebijakan Politik Etis, pemerintah kolonial menyediakan pendidikan formal bagi masyarakat jelata di Hindia Belanda. Meskipun misi dari kebijakan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan ini adalah agar pemerintah kolonial memperoleh tenaga kerja terampil yang murah, dampak kebijakan pada struktur sosial masyarakat Indonesia sangat besar. Pertama, struktur sosial masyarakat berubah karena pendidikan formal membawa konsekuensi langsung pada akses pekerjaan. Seorang anak dengan pendidikan formal di masa kolonial memiliki akses ke dalam sektor pekerjaan formal yang tersedia secara langsung maupun tidak langsung akibat interaksinya dengan masyarakat Barat di Hindia Belanda.

Selanjutnya pekerjaan menentukan pendapatan, dan pendapatan menentukan daya beli. Daya beli menentukan gaya hidup, dan seterusnya.

Kedua, perkembangan askes pendidikan formal di awal abad keduapuluh telah mengubah kategori elit di kalangan masyarakat pribumi. Mulanya yang disebut kaum elit adalah para bangsawan. Artinya, kategori elit ini bersifat turunan secara darah. Seorang bangsawan melahirkan anak yang juga bangsawan. Pendidikan mengubah kategori itu. Seseorang disebut elit karena pendidikan formalnya. Ia menjadi terbedakan dari rakyat non-elit karena pengetahuan dan cara berpikirnya dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dengan kriteria ini, siapapun yang mengenyam pendidikan akan masuk dalam kategori "kaum elit", yaitu elit/kaum terdidik.

Ketiga, adanya akses pendidikan melahirkan tipe atau jenis kaum elit-terdidik yang berbeda, tergantung pada jaringan sosial yang dimiliki setelah mengalami pendidikan. Sejarawan Robert van Niel menyebut ada tipe elit-terdidik yang kiprahnya ada pada ranah aktivisme politik, disebut elit politik. Tapi ada juga tipe elit-terdidik yang sikap maupun orientasinya tertuju pada kerja-kerja rutin di kantor, yaitu mereka yang disebut elit fungsional. Modernisasi akibat perkembangan pendidikan di awal abad keduapuluh telah menghadirkan sejumlah kategori sosial di masyarakat, yang masing-masing memiliki karakteristik-kolektif yang berbeda.

Perang Dunia II dan Kemerdekaan, 1942–1950

Perang Dunia II yang di Indonesia ditandai oleh kalahnya Belanda dan pendudukan Jepang, telah memporakporandakan seluruh struktur negara dan masyarakat kolonial di Indonesia. Sementara itu proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 menciptakan monumen simbolis tentang arah kolektif bangsa ini. Rangkaian peristiwa antara 1942–1950 merupakan momen sosial, yang mengubah maupun menumbuhkan persepsi diri masyarakat. Bukan lagi sebagai kumpulan suku-suku tetapi sebagai bangsa. Kemerdekaan juga menumbuhkan rasa percaya diri kolektif akibat hilangnya kebijakan segregasi sosial dari masa kolonial. Rasa-percaya diri kolektif ditunjukkan antara lain melalui partisipasi massa dalam proses transisi rejim. Meskipun demikian, situasi *chaotic* akibat transisi rejim itu, yang antara lain memunculkan perang demi perang, juga menciptakan momen ketidakpastian akan masa depan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Indonesia antara 1942 hingga 1950 jelas telah membentuk karakteristik-kolektif tertentu bangsa Indonesia, yang mempengaruhi generasi Indonesia selanjutnya.

Partisipasi massa dan kegagalannya, 1950–1969

Masa yang disebut periode demokrasi liberal dalam historiografi Indonesia, merupakan momen sosial karena luasnya ruang kebebasan bagi warga untuk menganut ideologi apapun. Ruang kebebasan itu bernuansa euforia. Namun, semangat berpartisipasi dalam kehidupan publik jelas terlihat dalam semua proses bermasyarakat di tahun 1950an itu. Partisipasi massa terjadi dalam hal pilihan politik-ideologi maupun kehidupan sehari-hari. Intinya, setiap komponen bangsa ingin terlihat dan diakui keberadaannya di depan publik. Kuatnya partisipasi massa memunculkan persaingan di antara komponen-komponen masyarakat. Periode 1950an ditandai oleh politik identitas yang sangat kuat, berupa kecenderungan *self-grouping* warga masyarakat berdasarkan kesamaan ideologi maupun agama.

Meskipun dapat menjadi modal penting dalam terbentuknya demokrasi, persaingan antar komponen bangsa sepanjang dekade 1950 telah meruncing di awal dekade 1960, dan menghasilkan situasi serba *chaotic* yang menambah panjang rasa ketidakpastian dari tahun 1940an. Periode 1950an jelas telah turut membentuk karakteristik-kolektif generasi dalam hal sikap optimis dan pesimis, sikap terhadap kebebasan dan mentalitas persaingan. Meskipun demikian, puncak dari periode ini sangatlah drastis dampaknya bagi pembentukan karakteristik-kolektif bangsa ini. Puncak itu adalah peristiwa G30S dan peristiwa-peristiwa ikutannya. Peristiwa tragis tersebut tidak hanya menghilangkan satu generasi Indonesia yang memiliki wawasan luas dan kedewasaan dalam persaingan terbuka. Peristiwa tragis 1965 dan peristiwa-peristiwa ikutannya juga mewariskan sikap mental jalan pintas yang mengedepankan pendekatan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Benevolent dictatorship, 1970–1998

Momen sosial antara 1970–1998 adalah sebuah periode multidimensi dalam sejarah Indonesia. Itulah periode Orde Baru. Sering digambarkan sebagai periode kediktaktoran, penyeragaman, dan periode pendekatan militeristik. Namun periode Orde Baru juga dipandang, khususnya oleh rakyat kecil di pedesaan, sebagai masa “rejim yang baik hati” karena murahnya harga-harga kebutuhan pokok. Rejim Orde Baru mungkin dianggap sebagai rejim penyelamat bangsa Indonesia dari situasi *chaotic*, krisis ekonomi parah, dan persaingan yang mengarah pada pertikaian antar kelompok di awal 1960an. Namun kelahiran rejim ini dilandaskan pada peristiwa kekerasan yang brutal.

Rejim dan periode Orde Baru telah membentuk karakteristik-kolektif bangsa Indonesia bukan hanya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang

30 tahun keberadaan rejim ini. Rejim dan periode ini telah membentuk karakteristik-kolektif bangsa bahkan hanya dalam cara pandang yang berbeda antar generasi terhadap/tentang rejim ini.

Demokrasi Baru, 1999–2014

Periode ini adalah masa euforia akan kebebasan. Situasinya mirip (tetapi jelas berbeda) dengan periode 1950an. Lepas dari belenggu hegemoni, yaitu kolonialisme dan Orde Baru masing-masing untuk konteks 1950an dan 2000an, masuk ke ruang kebebasan. Ada keinginan-kuat bersama untuk merombak dan membuang semua yang telah dimiliki dari masa Orde Baru. Ada kebutuhan dan semangat untuk mereformasi semua tatanan kehidupan bersama. Ada kemerdekaan bersuara dan berorganisasi, yang dulu sangat dibatasi. Namun, periode ini juga memunculkan kembali politik identitas. Kali ini politik identitas itu menjadi semakin jelas wujud dan praktiknya. Sebagian karena situasi di dalam negeri Indonesia, sebagian lagi karena perubahan konteks global, khususnya terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi digital. Jadi periode 1999 – 2014 telah menghadirkan harapan dan semangat untuk menuju demokrasi baru, tetapi prosesnya tertelikung oleh praktik-praktik politik identitas yang semakin *blatant*, tampak jelas nyata tanpa *tedeng aling-aling*. Periode ini membentuk karakteristik-kolektif yang khas dalam pertumbuhan generasi Indonesia.

Penutup

Paparan dalam artikel ini telah mencoba menghubungkan antara tahapan perkembangan kronologis dan sosial masyarakat dan konteks makro peristiwa sejarah Indonesia. Artikel secara khusus mencoba mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yang menentukan momen sosial dan menentukan secara signifikan karakteristik-kolektif bangsa ini. Dengan identifikasi ini, karakteristik Generasi Y dapat dimengerti dan perannya dalam arah perkembangan bangsa ini ke depan dapat diantisipasi secara lebih tepat.

Meskipun demikian, artikel ini baru dalam tahap menyajikan pemikiran untuk diolah lebih lanjut. Artikel belum menyajikan data empiris tentang karakteristik-kolektif setiap generasi Indonesia sesuai kerangka teoretik dan babagan peristiwa sejarah. Untuk memperoleh data empiris tersebut, dibutuhkan riset kolaboratif antara bidang psikologi dan bidang sejarah. Riset dalam skema ini ditujukan untuk menyediakan landasan argumentatif dan ilmiah dalam pengambilan kebijakan terkait optimalisasi potensi Generasi Y.

Daftar Acuan

Carey, P. (2011). *Kuasa ramalan: Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di Jawa, 1785-1855.* Jakarta: Gramedia.

Ricklefs, M.C. (2007). *Polarizing Javanese society: Islamic and other versions (c. 1830-1930)*. Singapore: NUS Press.

Strauss, W., & Howe, N. (1991). *Generations: The History of America's future, 1584 – 2069.* New York: Morrow.

www.skyscrapercity.com

Setiawan, B. (2012, 8 Juni). *Kelas menengah: konsumtif dan intoleran.* KOMPAS.com. Diunduh dari http://nasional.kompas.com/read/2012/06/08/11204529/Kelas.Menengah.Konsumtif.dan.Intoleran

----

Suwignyo, Agus. ***Mystification of the Y generation.*** "Generation Y" of Indonesia has received a wide scale of attention due to its potential contribution to the nation's economic growth. This cohort of generation includes those who were born between the years 1980 and 2000 and who will comprise the country's demographic bonus in the coming two decades. Existing literatures have generally put generational strengths as something given. Such a depiction holds only partly true, however. This paper argues that a nation's history has shaped a common set of characteristics of a generation cohorts. This paper identifies seven turnings of the Indonesian social history that arguably have played a central role in drafting a common set of generational characteristics of the country.

Tentang Penulis & Tim Editor

Abraham, Juneman. Adalah *Lecturer Specialist-S3* pada Jurusan Psikologi, Universitas Bina Nusantara. Ia merupakan Anggota Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), *Certified Ethics Teacher of UNESCO*, dan memperoleh sertifikat *Scientometrics* dari Universiteit Leiden. Ia merupakan Anggota Dewan Editor pada *Anima*, *Journal of Social and Political Psychology* (JSPP), serta mitra bestari Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS (KPK). Sebagai seorang pegiat Sains Terbuka Indonesia, ia diundang sebagai *visiting scholar* di Katholieke Universiteit Leuven pada Desember 2019, untuk berbicara dalam forum Global Minds 2019-*Open Access in a Global Perspective: Comparing Policies and Practices*. Ia memperoleh penghargaan dari *Publons* (kelompok *Web of Science*) sebagai *One of the Top Reviewers for Cross-Field* (2018) & *for Multidisciplinary* (2017). Publikasi terkait tema Buku HIMPSI kali ini: (1) Abraham, J., Suleeman, J., & Takwin, B. (2018). Psychological mechanism of corruption: A comprehensive review. *Asian Journal of Scientific Research*, *11*(4), 587-604; (2) Anindya, S., Leolita, V., & Abraham, J. (2014). The role of psychology in enhancing public policy: Studies on political apathy and attachment to the city. *International Journal of Research Studies in Psychology, 3*(5), 99-114; (3) Abraham, J. (2015). *Psikologi Kebangsaan Sebagai Payung Studi Baru di Indonesia*. Dalam Ratrioso, I., "Rakyat Nggak Jelas: Potret Manusia Indonesia Pasca Reformasi" (ISBN 9786021201220), pp. 323-339. Jakarta: ReneBook; (4) Abraham, J., & Rufaedah, A. (2014). "Theologization" of psychology and "psychologization" of religion: How do psychology and religion supposedly contribute to prevent and overcome social conflicts? *Procedia Environmental Sciences 20*, 516-525; (5) Abraham, J., & Sharron. (2015). Perceived risk of anti-corruption e-learning, email phishing literacy, and anomia. *Lecture Notes in Electrical Engineering*, *331*, 577-584. Di Universitas BINUS, pada 2019, ia menginisiasikan berdirinya mata kuliah Psikoetika (*Psychoethics*). Riset-risetnya tentang Psikologi Korupsi & kontaknya dapat diakses melalui bit.ly/psikorupsi

Ajisuksmo, Clara R. P., adalah peneliti dan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat dan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; menyelesaikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta; Master of Science (MSc) di School of

Education, State University of New York (SUNY) at Albany, New York, USA; dan Doktor (PhD) di University of Tilburg, Negeri Belanda. Sejak tahun 2009 sampai saat ini, menjadi narasumber untuk Pengembangan Pendidikan Akhlak Mulia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain; *The advantage of being less protected: Children's spatial orientation in the city of Jakarta; The Influence of Attitudes towards Mathematics, and Metacognitive Awareness on Mathematics Achievements.* Bisa dihubungi melalui email: clara.as@atmajaya.ac.id

A'la, Abd, Prof. Dr., M.Ag., lahir di suatu desa kecil di Kabupaten Sumenep, 5 September 1957. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Madrasah An-Nuqayah, GulukGuluk, Sumenep. Melanjutkan Jenjang Sarjana di Fakutas Adab IAIN—kini Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Gelar magister dan doktor diraih dari IAIN (kni UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain melakukan berbagai penelitian dan menjadi nara sumber pada kegiatan akademik, seminar atau konferensi nasional dan internasional, juga konsen dan terlibat aktif dalam penyelesaian problem konflik sosial-keagamaan di Tanah Air, seperti sebagai Konsultan kemudian Penasihat pada Konsorsium Keadilan dan Kedamaian (KKK) Malang (2002-sekarang), Anggota Paripurna Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (2007-2009), Ketua Tim Rekonsiliasi Konflik Sunni-Syiah Sampang pada masa pemerintahan SBY, dan menjadi delegasi Perdamaian Palestina-Israel (September, 2007). Tulisan-tulisan populernya kerap dipublikasikan oleh *Kompas*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia*, *Seputar Indonesia*, *Jawa Pos*, *Republika*, dan lain-lain. Bukunya yang sudah terbit di antaranya *Melampaui Dialog Agama* (Penerbit Kompas, 2002), *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal* (Paramadina, 2003), *Pembaruan Pesantren* (Pustaka Pesantren-LKiS, 2006), dan *Agama Tanpa Penganut* (Impulse-Kanisius, 2009), *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan*, (Yogyakarta, LK*i*S, 2014), serta *Ijtihad Islam Nusantara, Refleksi Pemikiran dan Kontekstualisasi Ajaran Islam di Era Globalisasi an Liberalisasi Informasi*, (Surabaya: Muara Progresif 2018). Pernah menjadi Rektor IAIN dan UIN Sunan Ampel dari tahun 2012-2018. Kini, selain menjadi Guru Besar Bidang Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, juga mengabdikan diri sebagai *khadim* di Pondok Pesantren Annuqayah, Latee, Sumenep serta sebagai salah satu wakil ketua PWNU Jatim (2018-2023). Bisa dihubungi melalui email: abdalabs@yahoo.com; abdalabs@uinsby.ac.id; abdalabs@gmail.com

Alfian, Ilham Nur, lahir di Surabaya pada tahun 1976. Dosen di Departemen

Psikologi Kepribadian dan Sosial Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Alumnus Program Magister Psikologi Profesi Peminatan Psikologi Klinis di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Saat ini menjadi Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Jawa Timur (2019-2023). Pernah menjadi Ketua Unit Penelitian dan Publikasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (2007-2010) dan Ketua Redaksi Jurnal Ilmiah INSAN Media Psikologi (2005-2010). Menerjemahkan buku *Psikologi Humanistik* (Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. ISBN 979-3721-66-9) dan *Psikologi Kritis* (Penerbit Mizan, Bandung, 2005. ISBN 979-99646-1-X). Salah satu anggota tim penulis buku *Psikologi Keluarga* (Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2008. ISBN 979-99555-1-3) dan *Pengantar Psikologi Sosial* (Airlangga University Press, 2012. ISBN 978-602-8967-63-1). Publikasi ilmiah yang tercatat adalah "The Effect of Social Support and Level of Hope on Well-Being: A Case Study of Urban Poor Society in Surabaya" (*Proceedings of the International Convention "Exploring The Role of Psychology in Creating Healthy Society"*, ISBN: 978-979-17880-0-7). Artikel publikasi yang terbit, The Tale of Seeking Treatment: A Qualitative Study of Pulmonary Tuberculosis Patients (*Psychology, Community & Health*, 2016). Menjadi bagian dari tim penyusunan Panduan Teknis Penanggulangan Dampak Psikologis Bencana di Indonesia (2009) dan penyusunan naskah akademik Raperda Perlindungan Anak Kota Surabaya (2009). Dapat dihubungi melalui e-mail: ilham.nuralfian@psikologi.unair.ac.id.

Anganthi, Nisa Rachmah Nur, dosen yang menekuni bidang psikologi klinis dan forensik, terutama yang berkaitan dengan dimensi psiko-spiritual. Sebelum mendapatkan gelar Magister (1998) dan Doktor (2010) di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, meraih gelar Sarjana Psikologi, di Universitas Airlangga (1991). Mulai mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 1994 hingga sekarang, menjadi staf ahli dan dosen tamu di Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Samarinda sejak 2017. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada masalah intervensi psiko-spiritual, keragaman spiritual-agama, dan berbagai tema psikologi kesehatan, psikologi positif, dan perilaku menyimpang atau abnormal. Selain itu, juga berpraktik sebagai psikolog dan konsultan profesional di Rumah Sakit Swasta Nirmalasuri, Sukoharjo (2000- 2008), di "Sekolah Inklusi" Homeschooling Kak Seto, Surakarta (2010-sekarang), dan di Biro Konsultasi dan Pemeriksaan Psikologis (BKPP) Fakultas Psikologi UMS (1994-sekarang). Kontak e-mail di nisa.r.n.anganthi@ums.ac.id atau anganthi@gmail.com.

Annisa, Fitria Eka, lahir di Padang tanggal 26 Maret 1993. Master Psikologi Perkembangan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Menjadi asisten dosen di Apikes Iris Padang (2018). Pernah mengikuti beberapa seminar nasional tentang psikologi popular maupun praktis. e-mail: eka.annisa2693@gmail.com.

Ardi, Rahkman, lahir di Malang, 19 Maret 1982. Menamatkan Sarjana Psikologi di Universitas Airlangga. Pendidikan S2 di Ural Federal University dan S3 di University of Warsaw. Dari tahun 2006-saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, serta memberi kuliah tamu di beberapa perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, seperti Ural Federal University dan University of Warsaw. Menjadi mitra bebestari dan penyunting di beberapa jurnal nasional maupun internasional, pembicara utama di berbagai forum ilmiah nasional, serta dipercaya sebagai anggota *scientific committee* dalam beberapa konferensi ilmiah nasional dan internasional seperti XVI European Congress of Psychology (ECP) 2019 di Moscow. Tema riset dan publikasi berfokus pada psikologi siber, psikologi media, lintas budaya, kognisi sosial, dan hubungan antar kelompok. Mendapatkan penghargaan dan hibah dalam komunitas ilmiah di dalam negeri dan luar negeri, seperti presenter terbaik dalam simposium bias antar kelompok di Temilnas IPS 2019, *mini symposium best paper award* yang diadakan Makara Hubs Asia, Januari 2019, *outstanding paper award in Internet Technologies and Society Conference* (2013) dari International Association for Development of Internet Society, dan *Research Grant for Young Scientist/Działalność Statutową Młodych Naukowców (DSM)* dari University of Warsaw. Saat ini adalah Kepala Bagian Psikologi Sosial dan Kepribadian, Universitas Airlangga. Alamat email: rahkman.ardi@psikologi.unair.ac.id

Hairina, Yulia, lahir di Banjarmasin, 18 Maret 1984. Menempuh pendidikan S1 Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang (lulus 2006) dan Magister Profesi Psikologi di Universitas Islam Indonesia (lulus tahun 2010). Mengikuti berbagai pelatihan profesional antara lain “Pelatihan Terapi Transpersonal” (2008) dan *Cognitive Behavioral Therapy* (2017). Menjadi Dosen Tetap Prodi Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Melakukan sejumlah penelitian terkait Psikologi Pendidikan dan *parenting*. Mengikuti berbagai pertemuan lmiah nasional maupun international. Dapat dihubungi melalui alamat rumah: Jl. Banjar Indah Permai, Perumahan Hayati Residence No F12, Banjarmasin. E-mail: yhairina@uin-antasari.ac.id

Handayani, Penny, adalah lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (2005 Sarjana dan 2008 Magister Profesi Psikologi Pendidikan). Tahun 2009 menjadi staf pengajar di bagian Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi UNIKA Atma Jaya. Ketertarikannya pada Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus mendorongnya banyak melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada area tersebut. Menjadi relawan *trainer* di Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI, dan narasumber untuk media massa (TV, radio dan majalah). Menuliskan tentang pengasuhan bagi remaja milenial menuju jenjang karier berikutnya dalam buku "Mempersiapkan Generasi Milenial ala Psikolog" (Kompas Gramedia, 2018), serta menghasilkan banyak modul bagi remaja untuk mengenali potensi dirinya pada biro pelatihan *Luminosity Training*, sebagai *head of creative division*. Bisa dihubungi melalui alamat surel: penny.handayani@atmajaya.ac.id

Herdiana, Ike, lahir di Bandung, 22 Mei 1975. Menyelesaikan pendidikan sarjana, profesi psikolog dan magister profesi psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini menjadi staf pengajar di Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga Surabaya. Selain mengajar, kegiatan profesional lain yang dijalaninya adalah menjadi peneliti, penulis, asesor, konselor, penyuluh dan berbagai kegiatan pengabdian pada masyarakat lainnya. Sejak tahun 2015 aktif memberikan penyuluhan tentang bijaksana menggunakan internet dan media sosial untuk remaja di Surabaya dan permasalahan remaja lainnya seperti *nomophobia* dan *Quarter Life Crisis*. Dalam lima tahun terakhir mengembangkan payung penelitian tentang *human trafficking* di Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut sudah dipresentasikan pada beberapa pertemuan ilmiah, yaitu International Conference ICPHESOS 2013 dan 2018 di Surabaya, Temu Ilmiah Nasional Psychofest UNAIR Surabaya (2016-2017), Temu Ilmiah dan Konferensi Ikatan Psikologi Sosial HIMPSI (2015-2016), 2nd ICPHESOS International Conference di Zhejiang University, Hangzhou, China (2015), Seminar Nasional Resiliensi di UMG Gresik (2018) dan Seminar Nasional Psikologi Sosial UM Malang (2019). Beberapa hasil penelitian dan esai telah pula dipublikasikan di Jurnal INSAN, Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Ubaya, dan Jurnal *North American Journal of Psychology*. Saat ini masih aktif sebagai pengurus Bidang 3 HIMPSI Wilayah Jatim dan anggota IPS (Ikatan Psikologi Sosial). Memiliki kontribusi dalam penulisan buku Pengantar Psikologi Sosial (2013), Bunga Rampai Psikologi Sosial: Catatan-Catatan dari Lapangan (2014), Kelas Psikologi Untuk Bunda PAUD (2014), Buku seri 1 Sumbangan Pemikiran Psikologi Untuk Bangsa, Revolusi Mental: Makna dan Realisasi (2015), dan Buku Seri 2 Psikologi dan Teknologi Informasi. Pernah mengikuti pelatihan Logoterapi,

CHAD, CBT dan Reflections-Dialogues Workshop di QUT Brisbane Australia. Dapat dihubungi melalui e-mail: ike.herdiana@psikologi.unair.ac.id atau ikeherdiana@yahoo.com

Heryadi, Adi, adalah staf pengajar di Prodi Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjani Yogyakarta, lahir di Singkawang (Kalimantan Barat) 16 Desember 1976. Lulusan SMA 1 Pontianak ini menamatkan pendidikan S1 dan S2-nya di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Dua penelitian terkininya adalah *Developing anti-corruption perceptions of elementary school students through anti-corruption training* (2019) dan *Training the leadership of Kebonharjo village in Kulonprogo: Building an anti-corruption attitude* (2018). Bisa dihubungi melalui e-mail: adiheryadi16@gmail.com

Hutagalung, Inge. Meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Komunikasi dari FISIP Universitas Indonesia (2012). Gelar S-2 Manajemen Komunikasi diperoleh dari FISIP Universitas Indonesia (2002), dan gelar S-1 Ilmu Komunikasi Massa dari FISIP Universitas Indonesia (1982). Mulai mengajar sejak tahun 1987 pada Fakultas Tehnik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Trisakti untuk mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Ibu satu putri ini adalah praktisi di bidang *Public Relations.* Karier di bidang *Public Relations* dirintis sejak tahun 1984. Beberapa posisi strategis yang pernah ditekuninya antara lain: *Senior Manager/Head of External Relations* pada sebuah perusahaan minyak asing di Balikpapan, *Public Relations Manager* Napan Group *(Holding Company), Head of Public Relations* PT Sony Amcol Graha, Konsultan dan *Account Manager* PT Purel Mondial *(PR Consultant).* Buku yang dihasilkan adalah *Pengembangan Kepribadian, Tinjauan Praktis Menuju Pribadi Positif* (2007), *Teori-Teori Komunikasi Dalam Pengaruh Psikologi* (cetak pertama 2015; cetak kedua 2017). Banyak melakukan penelitian berkaitan dengan *selective exposure* dan pornografi pada remaja. Penggemar olah raga Bowling yang memiliki hobi membaca ini tercatat sebagai Dosen Tetap Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, dan merupakan narasumber di berbagai instansi pemerintahan serta perbankan berkaitan dengan materi Komunikasi, Demokrasi Pancasila, *Customer Satisfaction*, serta Pengembangan Kepribadian *(Character Building).* Bisa dihubungi melalui e-mail: inge_hutagalung@yahoo.com atau *inge_hutagalung@mercubuana.ac.id* atau HP: 0818323159.

Imadduddin, lahir di Banjarmasin, 25 September 1982. Menempuh pendidikan S1 Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (lulus 2006), dan melanjutkan S2 Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah

Mada, Yogyakarta (lulus 2008). Sekarang menjadi dosen tetap di Prodi Psikologi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Aktif melakukan penelitian terkait Psikologi Sosial, Psikologi Lintas Budaya, HIV dan AIDS. Dapat dihubungi melalui alamat rumah: Jl. Sultan Adam, Kompleks Madani No 27B, RT 31, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan; e-mail: imadduddin@uin-antasari.ac.id; atau *handpone*: 087720976464.

Jatmiko, Bayu. Lahir di Denpasar, 13 Oktober 1983. Menempuh pendidikan di SD Swastiastu, Denpasar, SD-SMP Notre Dame, Jakarta, SMUN 57, Jakarta, Fakultas Teknik Mesin Universitas Brawijaya, Malang namun tidak tamat, akhirnya melanjutkan studi sampai tamat di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Aktif di organisasi kampus sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana periode 2006-2007 dan sebagai Bendahara Yayasan Gerakan Anak Bangsa Anti Narkoba (GABAN) periode 2014-2016. Aktif sebagai Asisten Psikolog Dr. Inneke Limuria, M.Si. sejak 2008 hingga sekarang. Menghasilkan karya tulis pertama berupa buku berjudul "Mortido Ketakutan, Keserakahan dan Keawasan: Sebuah Evolusi Peradaban" (Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018). Bisa dihubungi melalui *e-mail:* bayujatmiko@yahoo.com

Kurniawati, Meike, lahir di Probolinggo, 9 Mei 1981. Menamatkan Sarjana Psikologi di Universitas Surabaya (UBAYA), dan Magister Manajemen (Pemasaran) di Universitas Trisakti, Jakarta. Dari tahun 2010-saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Jakarta. Aktif menjadi penyaji maupun peserta dalam seminar nasional dan internasional di berbagai kota seperti Jakarta, Lombok, Purwokerto, Belitong, Probolinggo, dan Bali serta Stellenbosch, South Africa dan Tokyo, dengan fokus penelitian dalam bidang ekonomi, psikologi konsumen, pemasaran, dan budaya. Memiliki publikasi di beberapa majalah popular dan beberapa jurnal. Bisa dihubungi melalui *e-mail*: kurniawati2006@yahoo.co.id atau di meikek@fpsi.untar.ac.id.

Lakoro, Rahmatsyam, staf Pengajar di Departemen Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, lahir di Poso 7 September 1976. Menempuh pendidikan Desain Komunikasi Visual di Institut Teknologi Bandung pada 1994-1999, kemudian melanjutkan pendidikan S-2 Game Technology di Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada 2007-2009. Beberapa penelitiannya terkait komunikasi kebencanaan, diantaranya Estetika Visual dalam Edukasi Kebencanaan Pada Berbagai Strategi Penuturan Transmedia (2017), Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Pada Desain Media Edukasi Untuk

Mitigasi Bencana (2018), EduMitigasi Pemuliaan Kawasan Sungai di Jawa Barat (2019), telah dipublikasikan pada beberapa jurnal, seminar, dan konferensi baik nasional maupun internasional. Penyaji pada Seminar Nasional Pascasarjana oleh Program Doktor Psikologi UGM Yogyakarta (2016); *Design of Education Media For Disaster As Awareness of Living Space In Disaster Area* dipublikasikan pada *International Conference on Creative Industry* (2017); Optimalisasi Budaya Tutur Tentang Kesadaran Ruang Hidup untuk Edukasi Mitigasi Bencana di Citarum disajikan pada *Asia International Friendship Exhibition and Symposium* di Shinjuku Tokyo, Jepang (2018); *The Using of Vernacular Design to Develop Educational Media for Disaster Mitigation: The direction strategies of disaster mitigation education* dipublikasikan pada International Conference of Art Language and Culture, yang diselenggarakan oleh Program Magister Pendidikan Seni Universitas Sebelas Maret Surakarta (2018); *Exploring Spoken Culture for Campaign Media of Disaster Risk Reduction Awareness* dipublikasikan pada 7th International Seminar on Nusantara Heritage, diselenggarakan oleh Universiti Malaysia Kelantan, dipubikasikan oleh UMK Press (2018); *Development Of Vernacular Elements of Educational Media Design for Disaster Risk Reduction* dipublikasikan pada 1th International Conference on Cultural Commnunication and Space, yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar Bali (2018); Eksplorasi Media Sebagai Edukasi Kesadaran Ruang Hidup di Daerah Bencana dipublikasikan pada Jurnal Desain Idea (Vol 18, No. 1) Departemen Desain Produk Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (2019). Alamat e-mail: ramok@prodes.its.ac.id

Mardhatillah, Amy, adalah doktor dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi. Lahir pada 8 Agustus 1984, Amy menyelesaikan program S1, S2 dan S3 di Fakultas Psikologi International Islamic University Malaysia di Kuala Lumpur. Saat ini menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Sebelum menggeluti dunia akademisi, Amy berkarier sebagai *senior researcher* dan *manager* pada salah satu perusahaan multinational di Kuala Lumpur dan bertanggung jawab melakukan penelitian terkait *Human Resource Audit* dan *Employee survey* dengan mitra dari perusahaan multinasional yang berbasis di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Ketertarikannya yang besar untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan mengaplikasikan teori psikologi pada dunia industri membuat ia terlibat secara aktif pada konferensi internasional dan menulis artikel ilmiah khususnya dengan topik *readiness to change*, *spirituality at work*, dan *work life balance*. Bisa dihubungi melalui e-mail: amardhatillah@yahoo.com

Moningka, Clara, adalah lulusan Program Doktor Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta, berkarier sebagai dosen sejak tahun 2002 dan telah mengajar di berbagai universitas di Jakarta. Sejak tahun 2017 menjadi dosen tetap di Universitas Pembangunan Jaya. Pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Psikologi di Ukrida serta Kaprodi Psikologi dan Manager *Students Advisory Center* Universitas Bunda Mulia. Menjadi narasumber beberapa media dan seminar, serta pernah menjabat sebagai PIC acara Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Pernah mengikuti program summer school *Asian Association of Social Psychology* 2012 (Yogyakarta) dan 2015 (Filipina). Aktif terlibat sebagai *organizing committee* Temu Ilmiah Psikologi Sosial 2015 dan *Asian Psychological Association* 2017. Selain mengajar, aktif dalam kegiatan organisasi maupun terlibat dalam seminar ilmiah tingkat nasional maupun internasional. Aktif melakukan penelitian dan menulis publikasi ilmiah dengan tema seputar psikologi, antara lain, "Psikologi Sosial: Pengantar dalam Teori dan Penelitian", buku internasional antara lain "Self-Comparison: The Self in Digital World" dalam buku "Identity, Sexuality, and Relationships among Emerging Adults in the Digital Age" (2016) dan "Self-Comparison in the Digital World: The Impact to Self-Esteem" dalam "Recent Advances in Digital Media Impacts on Identity, Sexuality, and Relationships" (2019/20) dengan penerbit IGI Global USA. Bisa dihubungi melalui alamat surat: Universitas Pembangunan Jaya, Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 1541 atau melalui e-mail: clara.moningka@upj.ac.id

Muhammad, Rifqi. Lahir di Ledo, 14 Oktober 1990. Tamat dari SDN 14 Sejangkung (2002), MTs Yasti Sekuduk (2005), MAS PPMBI (2008), S1 STAI Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas (2012), dan S2 BKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016). Menjadi dosen di IAI Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas (2016-sekarang). Pernah menjadi Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAI Sambas (2016-2017). Menjadi Kepala Pusat Pengawasan dan Audit Mutu/SPMI IAI Sambas (2018-sekarang). Publikasinya meliputi antara lain, "Identitas Diri Menurut Al-Ghazali" (*Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, *08*[02], 2018), "Konseling Islami menggunakan konsep kebahagiaan Al-Ghazali untuk mereduksi kesepian pada konseli di MTsN Bantul Kota Yogyakarta" (*Jurnal Pendidikan Madrasah*, *1*[1], Mei 2016), dan "*Attachment to Allah* sebagai basis *spirituality wellness* dan *happiness* (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)" (*Jurnal Al-Muttaqin*, *II*, Desember 2015). Bisa dihubungi melalui alamat surat: Lembaga Penjaminan Mutu, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung, No. 126, Kawasan Pendidikan, Desa Sebayan, Sambas, Kal Bar, Telepon (0562) 6303087, Kode Pos 79462, atau melalui *e-mail:* ananda.rhifqie@gmail.com

Nurahaju, Rini, lahir di Jember, 1968. Menamatkan studi S1 Psikologi Universitas Airlangga (1994), S2 bidang PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) di Pascasarjana Universitas Airlangga (2005), dan memperoleh gelar doktor peminatan Psikologi Industri Organisasi di Universitas Airlangga (2017). Mengikuti konferensi dan membawakan makalah antara lain: Gambaran Religiusitas Remaja Pesisir Kedung Cowek Surabaya-Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu (Seminar Nasional Kelautan UHT (2010) ; *Relationship Between Core Self Evaluation (CSE) and Psychological Empowerment for Seafarers (International Conference on Psychology in Health, Educational, Social and Organizational Settings* (ICP-HESOS), Zhejiang University Hangzhou, China (2015). Publikasi ilmiah antara lain: *Coping Stres Among The Seafarers: How Does Emotional Intelligence Give Effects?* (Jurnal Ilmiah Psikologi Industri dan Organisasi, Vol 1, No 2, 2014); *The Influence of Leadership and Psychological Empowerment on Performance: An Empirical Study on the Indonesian Seafarers (Journal of Research on Humanities and Social Sciences,* Vol 9, No 12, 2019). Saat ini bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya. Dapat dihubungi melalui email: rini.nurahaju@hangtuah.ac.id

Nurpatria, Nicolas Indra, adalah angkatan pertama di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta. Menyelesaikan studi jenjang S1 pada tahun 2000, Indra – demikian panggilan akrabnya – melanjutkan pendidikan sebagai psikolog pada universitas yang sama. Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selain sebagai dosen paruh waktu di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta, bekerja sebagai yang terlibat dalam pendampingan kaum muda, tenaga pendidik dan orang tua sejak mahasiswa sampai saat ini. Sejumlah kementerian, lembaga dan organisasi non pemerintah baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional pernah dibantunya, khususnya dalam isu pengembangan atau penguatan kapasitas. Bisa dihubungi melalui alamat surel: indra.nurpatria@atmajaya.ac.id

Octavia, Indah Andika, dilahirkan di Jakarta, 16 Oktober 1993. Lulusan Program Master Psikologi Perkembangan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Menjadi asisten dosen di Apikes Iris Padang (2018). Pernah berpartisipasi dalam seminar nasional dengan topik psikologi. e-mail: indahandikaoctavia993@ gmail.com.

Puspitawati, Ira. Ketua Program Studi S1 Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma. Pendidikan: S1 Psikologi, Universitas Gadjah Mada (1995); S2

Psikologi, Universitas Indonesia (2004); S3 Psikologi, Université de Bourgogne, Perancis (2011). Matakuliah yang diampu: Psikologi Kognitif, Psikologi dan Internet, Sistem Informasi Psikologi, *Cyberpsychology*. Penelitian dan publikasinya antara lain, artikel ilmiah: Remaja "*Runaway*". Dari Sudut Pandang Teori Ekologi Brofenbrener (Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi No. 1 Jilid 4, Juni 1999, diterbitkan oleh Fak. Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta. ISSN 1410-9085); Vinter, A., Mulyadi, S., & Puspitawati, I., Spatial Analysis in Hierarchical Meaningful Stimuli in Children with Mental Retardation: A Drawing Task. Proceedings in APsyA 2010 Conference, Darwin, Australia (2010); Puspitawati, I., Jebrane, A., & Vinter, A., Local and global processing in blind and sighted children in a naming and drawing task. (Journal of Child Development, vol 3, pages 1077-1090, 2014); buku: Puspitawati, I., Hapsari, I.I. & Suryaratri, R.D., Psikologi Faal: "Tinjauan Psikologi dan Fisiologi dalam Memahami Perilaku Manusia" (PT. Rosda. ISBN: 978-979-692-070-9, 2012); bab dalam buku: Puspitawati, I., Widyarini, M.M.N, Putri, D.E., Di mana Superego dalam Dunia Maya? (Psikologi dan Teknologi Informasi: Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi Untuk Bangsa II, Himpunan Psikologi Indonesia. ISBN: 978-602-96634-4-0, 2016). Anggota International Association of Applied Psychology (IAAP), 2013-sekarang. Penghargaan: Singgih Dirgagunarsa Award 2004 for Research in Developmental Psychology. HAKI: Puspitawati, I., Taganing, N.M., Zulkaida, A. & Cynthia, T. (2013). Karya Cetak Tes Kemampuan Kognitif. Bisa dihubungi melalui alamat surel: iraps@staff.gunadarma.ac.id; iratribowo@yahoo.co.id

Rahardjo, Wahyu. Ketua Pusat Studi *Cyberpsychology*, Universitas Gunadarma. Pendidikan: S1 Psikologi, Universitas Gunadarma (2002); S2 Psikologi, Universitas Gunadarma (2006); S3 Psikologi, Universitas Gadjah Mada (2013). Matakuliah yang diampu: Metodologi Penelitian Kuantitatif, Penyusunan Skala Psikologi, Konstruksi Alat Ukur, Psikologi Kognitif. Penelitian dan publikasinya, antara lain artikel ilmiah: Salim, F., Rahardjo, W., Tanaya, T., & Qurani, R. (2017), Are self-presentation of Instagram users influenced by friendship-contingent self-esteem and fear of missing out? (*Makara Hubs-Asia, 21*(2), 70-82. DOI: 10.7454/mssh.v21i2.3502); Rahardjo, W., Citra, A.F., Saputra, M., Damariyanti, M., Ayuningsih, A.M., & Siahay, M.M. (2017), Perilaku seks pranikah pada mahasiswa: Menilik peran harga diri, komitmen hubungan, dan sikap terhadap perilaku seks pranikah (*Jurnal Psikologi, 44*, 139-152. DOI: 10.22146/jpsi.23659); Rahardjo, W., & Hutagalung, I. (2016), Harga diri seksual, kompulsivitas seksual, dan perilaku seks berisiko pada orang dengan HIV/AIDS (*Jurnal Psikologi, 43*, 52-65. DOI: 10.22146/jpsi.11501); Mulyadi, S., Rahardjo,

W., & Basuki, A.M.H. (2016), The role of parent child relationship, self-esteem, academic self-efficacy to academic stress (*Procedia Social and Behavioral Sciences, 217*, 603-608. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.02.063); Mulyadi, S., Basuki, A.M.H, & Rahardjo, W. (2016), Student's tutorial system perception, academic self-efficacy, and creativity effects on self-regulated learning (*Procedia Social and Behavioral Sciences, 217*, 598-602. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.02.059); Rahardjo, W., Saputra, M., & Hapsari, I. (2015), Harga diri, sexting, dan jumlah pasangan seks yang dimiliki oleh pria lajang pelaku perilaku seks berisiko (*Jurnal Psikologi, 42*, 101-114. DOI: 10.22146/jpsi.7172); Abraham, J., & Rahardjo, W. (2015), Psychopathy, sexual values dimensions, and premarital sexual behavior among urban unmarried adolescents (*Procedia Social and Behavioral Sciences, 165*, 2-11. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.12.598); Rahardjo, W., Hapsari, I., & Saputra, M. (2014), Kecenderungan mencari sensasi seksual, sexting, dan perilaku seks berisiko pada pelaku sexting tipe two-way sexters (*Jurnal Psikologi Indonesia, 9*, 66-75); bab dalam buku: Rahardjo, W. (2018), Individu berharga dalam relasi seksual, dalam N. Effendi, W. L. Mangundjaya, & A.R. Shaleh (Eds.), *Psikologi positif: Teori dan terapan untuk perubahan* (Kuningan: Goresan Pena. ISBN: 978-602-364-516-9); Rahardjo, W. (2018), Sexting dan perilaku seks berisiko: Tanggung jawab pribadi, komunitas, atau teknologi? Dalam A. R. Shaleh, Moordiningsih, & W. Rahardjo (Eds.), *Dari cinta menuju bahagia: Bunga rampai teori dan aplikasi teknologi* (Kuningan: Goresan Pena. ISBN: 978-602-364-517-6); Rahardjo, W. (2013), Sekilas mengenai (problema) seksualitas di Indonesia: Tak kenal maka tak saying, dalam J.L.S Jaafar, Y. Mahamood, & Z. Ishak (Eds.), *Menongkah arus globalisasi: Isu-isu psikologi di Malaysia dan Indonesia* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya. ISBN: 978-983-42835-7-5); buku: Mulyadi, S., Basuki, A. M. H., & Rahardjo, W. (2016), *Psikologi pendidikan dengan pendekatan teori-teori baru dalam psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo, ISBN: 978-602-425-035-5). Anggota International Association of Applied Psychology (IAAP), 2017-sekarang. Penghargaan: Presenter terbaik dan paper terbaik pada Temilnas IPS ke IX, 6-7 April 2019 di Surakarta. Alamat surel: wahyu_r@staff.gunadarma.ac.id; wahyu_rahardjo@yahoo.com

Royanto, Lucia R.M., saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia; menyelesaikan S1 Psikolog di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia; S2 Magister Psikologi Pendidikan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia; Master of Special Education, Faculty of Education, University of Newcastle, Australia dan Doktor di Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Selama ini minatnya mengarah pada penelitian-penelitian di bidang literasi dan metakognisi. Sejak tahun 2009 bergabung dalam

tim Pengembangan Pendidikan Akhlak Mulia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa dihubungi melalui e-mail: hereslucy02@yahoo.com.

Safitri, Shahnaz. Staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, lahir di Medan pada tahun 1994. Menamatkan studi sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (2014), magister profesi psikolog di Universitas Indonesia pada bidang Psikologi Pendidikan (lulus 2017). Penelitian dan tulisannya yang berhubungan dengan psikologi antara lain berupa buku "Jejak 1000 Hari Pertamaku" (2018), kontribusi bab dalam buku "Diversity in Unity: Perspectives from Psychology and Behavioural Sciences" (2017), dan sejumlah tulisan ilmiah lainnya yang menyasar topik di bidang psikologi pendidikan dan psikologi sosial. Disamping meneliti, juga menjalani praktek profesional sebagai psikolog, menjadi konsultan dalam pengembangan alat ukur psikologis bagi organisasi, dan memberikan pelatihan pengembangan kompetensi diri khususnya kepada guru dan siswa di sekolah. Minat penelitiannya ialah menelusuri faktor afektif yang menunjang proses berpikir dan kreativitas serta konstruksi alat ukur. Bisa dihubungi melalui e-mail: shahnazsafitri@ui.ac.id dan shahnaz.safitri@gmail.com.

Simanjuntak, Ermida, lahir di Surabaya 1977. Menamatkan studi S1 di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (2000), pendidikan S2 di University of Groningen, Belanda (2005) pada bidang *Educational Effectivesness and School Improvement* dan S2 Magister Psikologi Profesi di bidang Psikologi Pendidikan di Universitas Airlangga (2015). Penelitian dan tulisan yang berhubungan dengan tema pendidikan dan psikologi dunia maya antara lain: *Cyberslacking Among University Students: The Role of Internet Habit Strength, Media Multitasking Efficacy and Self Regulated Learning* (2018), *Social Media Engagement and Self Regulated Learning of University Students* (2017), *First Year Challenge: The Role of Self Regulated Learning to Prevent Internet Addiction Among First Year Students* (2017), Intervensi Latihan Membaca untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca pada Siswa *Slow Learner* (2016), dan *Guiding Questions Methods and Extrinsic Learning Motivation of First Year University Students* (2015). Saat ini bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Alamat e-mail: mida@ukwms.ac.id

Soerjoatmodjo, Gita Widya Laksmini, lahir di Jakarta, 11 September 1976. Menempuh pendidikan S1 Psikologi di Universitas Indonesia (1994-1999), S2 dalam bidang *Understanding and Securing Human Rights* di School of Advanced Studies, Institute of Commonwealth Studies, University of London, Inggris,

dengan beasiswa Chevening Award, serta S2 Program Profesi Psikolog bidang keahlian Psikologi Pendidikan di Universitas Indonesia (2008-2010). Menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pembangunan Jaya (2011-sekarang), Kepala Unit Liberal Arts, Sustainable Eco Development and Entrepreunership, kemudian Kepala Program Studi Psikologi lalu Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. Sebelumnya mengelola kerjasama masyarakat sipil lokal, nasional, dan regional untuk isu transparansi seraya menjadi dosen di Diploma of Arts, Monash College, Jakarta, setelah sebelumnya berpengalaman menjadi jurnalis serta koresponden London untuk majalah *Tempo*. Bisa dihubungi melalui *email*: gita.soerjoatmodjo@upj.ac.id. Publikasi ilmiahnya dapat diakses melalui https://www.researchgate.net/profile/Gita_Soerjoatmodjo.

Sumantri, M. Arief, lahir di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, lulus sebagai Sarjana Hukum konsentrasi Ilmu Pidana di Universitas Halu Oleo (2015), Pendidikan Khusus Profesi Advokat PERADI di Universitas Wijaya Kusuma (2018), dan Magister Psikologi di Universitas Airlangga (2019). Penelitian yang setidaknya terkait dengan tema tulisan yaitu budaya *Vote Buying* (Pembelian Suara) pada mahasiswa, dan trend literasi kesehatan mental. Sejak 2018 menjadi bagian dari keluarga "*Halo Jiwa Indonesia*" yang aktif mempromosikan kesehatan mental di masyarakat dan terdaftar sebagai anggota Ikatan Psikologi Sosial (2019). Saat ini cukup rutin membaca buku di pagi hari ditemani secangkir teh dan beberapa batang *cigarette*; sedikit mirip dengan kegiatan pagi Immanuel Kant (*Kuehn, 2001*). Bedanya, Kant lebih sering melanjutkan aktivitas paginya dengan menulis sebelum memberikan kuliah di kampus, sebaliknya penulis lebih sering melanjutkan dengan berpikir atau kembali tidur. Selain itu, masih tetap aktif berdiskusi dan bercanda dengan sahabat-sahabat *plural* yang berada di sekitar, serta tetap kokoh bergelut dengan realitas. Bisa dihubungi melalui alamat surel: aripsumantri142@gmail.com.

Sumaryono, atau **Marcen** – panggilan akrab yang diberikan oleh mahasiswa Psikologi sekitar 15 tahun lalu, lebih senang dikenal sebagai insan pembelajar. Baginya, segala hal yang ditemui dalam kehidupan adalah sumber belajar dan anugerah terindah dari Allah SWT untuk mematangkan diri dalam berkarier sebagai pembelajar. Marcen alias Sumaryono Cendix, saat ini berkarier sebagai pengajar yang fokus pada Psikologi Industri dan Organisasi di Fakultas Psikologi UGM. Baginya mengajar merupakan hobi dan bagian dari proses penaklukan tantangan selama berkarier sebagai pembelajar. Pematangan proses pembelajaran juga dilakukan melalui aktivitas sebagai *trainer*, konsultan sistem ke-SDM-an dan Pengembangan Organisasi. Baginya, peran yang dijalani adalah bagian dari proses pembelajaran. Setelah merumuskan konsep "Kinerja Karir" dalam

aktivitas kerja generasi milenial, sering diajak berdiskusi tentang perkembangan generasi Y dan Z dalam berbagai perspektif dan konsekuensinya. Meski sudah menjalani proses pembelajaran sampai usia kepala lima, jiwa mudanya tetap terasa melekat. Tetap lekat dengan generasi kekinian dan diwujudkan dengan pengembangan hobi *touring*, bermain bersama dalam komunitas ruang berbagi ilmu, serta tetap *kelayapan* (sejenis *blusukan,* Ed.) membersamai pengembangan desa via pendampingan Mahasiswa KKN UGM di seluruh pelosok Indonesia. Sejak Desember 2018 sampai 2022, diberi mandat untuk mengelola Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi (APIO) Induk sebagai Ketua. Apapun amanah dan aktivitas belajarnya selalu didasari dengan prinsip hidup yang sederhana, yaitu Berbagi, Bermakna dan Bahagia. Bisa dihubungi melalui alamat surat: Fakultas Psikologi UGM, Ruang A110, Jl. Socio Humaniora No 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281.

Supratiknya, A. Profesor pada Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Tamat dari Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada (B.A., 1977; Drs., 1980) dan dari *Department of Psychology, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines,* Diliman (Ph.D., 1992). Pernah mengikuti *Fulbright Visiting Scholar Program* di *Center for Cross-Cultural Research, Department of Psychology, Western Washington University,* Bellingham, Washington, dan *School of Psychology, Florida Institute of Technology,* Melbourne, Florida, Amerika Serikat (2003-2004). Menjadi anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), *International Association for Cross-Cultural Psychology,* dan *American Psychological Association.* Menerjemahkan, menulis, dan menyunting sejumlah buku, menulis artikel, dan melakukan penelitian tentang psikologi, dengan perhatian khusus pada psikologi sosial-budaya dan pendidikan. Bisa dihubungi melalui *e-mail:* aswignyawardaya@yahoo.co.id

Susana, Tjipto. Dilahirkan pada tanggal 31 Januari 1969. Mengajar di Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, sejak tahun 1996 sampai sekarang. Pendidikan S1 sampai S3 di bidang Psikologi Klinis, ditempuh di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain mengajar Tjipto Susana berminat meneliti kepribadian, kesehatan mental, dan gangguan psikologis yang berkaitan dengan budaya. Tjipto Susana juga aktif membantu konseling pribadi dan konsultasi pendidikan di Pusat Pengembangan Tes dan Konsultasi Psikologi (P2TKP), Universitas Sanata Dharma; pelatihan pengembangan kepribadian di beberapa perusahaan dan lembaga pendidikan. Sejak tahun 2004 sampai sekarang merupakan Dewan Redaksi Jurnal Psikologi Indonesia yang diterbitkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Beberapa publikasi berupa artikel dalam

buku dan majalah antara lain **Manfaat Bermain Bagi Anak (2006),** artikel dimuat dalam Buku *Menepis Hambatan Tumbuh –Kembang Anak*, Yogyakarta: Kanisius; **Ivan Illich: Dunia yang Ramah bagi Kemanusiaan (2016)**, dimuat dalam Majalah Basis, 03 dan 04, tahun ke-65. Publikasi. Publikasi dalam jurnal Ilmiah antara lain **Program Bantu Diri Terapi Kognitif Perilaku: Harapan Bagi Penderita Depresi (2015),** diterbitkan dalam Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi UGM; **Contrasting Lay Theories of Polyculturalism and Multiculturalism: Association with Essentialist Beliefs of Race Six Asian Cultural Groups (2016),** diterbitkan dalam Cross-Cultural Research. Menulis buku yang berjudul **Orang Sulit: Fakta dan Persepsi (2014),** diterbitkan oleh PT Kanisius, Yogyakarta.

Suwartono, Christiany, menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Psikologi (2001) di Universitas Indonesia (FP UI). Sementara menjalani pendidikan master di jurusan Psikometrik (2005) di FP UI sekaligus asisten pengajar, juga bekerja di bagian *technical documentation* di perusahaan IT. Setelah lulus, bergabung sebagai dosen tetap di Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia (UAJ). Mendapatkan gelar doktornya (2018) dari Universitas Radboud, Nijmegen, Belanda. Mengasah dan mengekspresikan keterampilannya dengan aktif berkolaborasi bersama para akademisi dan profesional, baik dalam bidang penelitian maupun pengukuran psikologis. Beberapa publikasi yang pernah diterbitkannya antara lain: *The Measurement of Pancasila: An effort to make psychological measurement from Pancasila values*, *Value Orientation Scale: The Validation of the Pancasila Scale*, *Development of the National Identity Measurement Using Implicit Association Test Method*, dan Pengujian validitas dan reliabilitas skala identitas sosial. Bisa dihubungi melalui alamat surel: christiany.suwartono@atmajaya.ac.id

Suwignyo, Agus, pengajar pada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Memperoleh Sarjana bidang Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma tahun 1997; *Master of Arts* bidang *Educational Sciences* di Universitas Amsterdam tahun 2001; dan Doktor bidang Sejarah di Universitas Leiden tahun 2012. Meneliti dan menulis topik-topik pendidikan, sejarah pendidikan, sejarah sosial, dan persoalan kontemporer sosial-budaya; e-mail: suwignyo_agus@ugm.ac.id

Thenarianto, Jessie Janny, adalah alumna Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya. Memiliki ketertarikan riset pada bidang psikologi forensik, remaja, dan aktivisme digital. Penelitian terakhirnya membahas tentang peranan faktor

individual dan faktor relasional dalam memprediksi kesejahteraan psikologis pengguna Instagram. Dalam perjalanan profesionalnya, pernah menjadi *research intern* di Home Team Behavioural Sciences Centre, sebuah lembaga riset berbasis *behavioural sciences* di bawah Kementerian Dalam Negeri Singapura dan melakukan penelitian mengenai kriminalitas dan terorisme di Indonesia. Pernah mempublikasikan sebuah bab mengenai respon di media sosial terhadap fenomena Bom Jakarta 2016 dan 2017 dalam sebuah buku yang dipublikasikan oleh World Scientific Publishing, Singapura. Dapat dihubungi melalui alamat surel: jessiethenarianto@gmail.com.

Tjahjono, Harijanto, dosen di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Menamatkan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Pendidikan S2 dan S3 diselesaikan di Human Resource Education Program, Boston University. Menjadi penulis *book chapter* berjudul "Psikologi dan Keberagaman" dan "Ada Aku antara Tionghoa dan Indonesia". Bisa dihubungi melalui alamat email harijanto@staff.ubaya.ac.id

Tunjungsari, Harini meraih gelar Sarjana Psikologi (2000) dan gelar Magister Profesi Psikologi Pendidikan (2004) dari Universitas Indonesia. Staf pengajar di Bagian Psikologi Pendidikan Unika Atma Jaya (Jakarta) ini sekarang sedang menempuh pendidikan lanjut di Prodi Doktoral Psikologi Universitas Indonesia. Terlibat dalam aktivitas mengusung toleransi dan mempertemukan remaja dari berbagai wilayah Indonesia dengan keluarga Jakarta yang memiliki budaya dan agama beragam, bersama SabangMerauke (SM) sejak 2017 dan bersama Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu (SBKK) di tahun 2018. Penelitiannya terkait remaja di SMA/SMK inklusif di tiga kota dilakukan tahun 2015-2016. Bisa dihubungi melalui alamat surel: harini.tunjungsari@atmajaya.ac.id

Umam, Ahmad Naufalul, menyelesaikan studi S1 di Universitas Indonesia dan University of Queensland, serta menyelesaikan studi S2 di Magister Sains Psikologi Sosial Universitas Indonesia dengan tesis mengenai kepercayaan terhadap teori konspirasi. Saat ini aktif sebagai dosen pengajar dan Pembina Kemahasiswaan di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Juga tergabung dalam Laboratorium Psikologi Politik UI sejak tahun 2015 hingga saat ini. Penelitiannya tentang terorisme telah dipublikasikan dalam Journal of Peace and Conflict dan *book chapter* terbitan World Scientific. Riset tentang konspirasi yang dilakukannya telah dipresentasikan di berbagai konferensi internasional. Saat ini fokus penelitiannya adalah ideologi, *pop-culture*, dan humor. Bisa dihubungi melalui e-mail: naufalul.umam@gmail.com

Watofa, Yosefina Marijke. Dosen FK,Universitas Cenderawasih Jayapura Papua dan Ketua HIMPSI Wilayah Papua periode 2008-2020. Memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Fakultas Psikologi UNTAG Surabaya (1995), Magister Psikologi Klinis dari Universitas Airlangga Surabaya (2005), dan kandidat Doktor Psikologi pada Universitas Airlangga. Menjadi Asisten Dosen dan Tim Psikotes UNTAG Surabaya (1998- 2000); staf khusus pada kantor BAPPEDA Manokwari (2001); Pendamping Anak Jalanan (2004); konsultan pada LSM perempuan LP3A (2006); nara sumber/penyiar masalah KDRT, kekerasan pada anak dan *sexual abuse* pada radio The Rock FM, RRI Jayapura dan Koran lokal (2008-2010); dosen luar biasa pada Politeknik Kesehatan Jayapura dengan mengajar mata kuliah Psikologi Umum (2012-sekarang); staf pengajar tetap pada Program Pendidikan Dokter Uncen dengan mengajar mata kuliah Perilaku Kesehatan (2002-sekarang); Psikolog Klinis pertama dan satu-satunya di Uncen Jayapura; Wakil Dekan II Bagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan (2008-2015); dosen luar biasa pada Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uncen mengajar mata kuliah Psikologi Kepribadian, Psikologi Perkembangan Anak, Psikologi Konseling, Pengajaran Psikologi dan Bimbingan, Perkembangan Tingkah laku Anak (2001-2005), Psikolog kasus Anak pada RS. Jiwa Abepura (2010), Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor Kesehatan Ibu dan Anak kerjasama Pemerintah Daerah propinsi Papua, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bappenas dan Unicef (2011-sekarang), anggota Tim Pengawas Eksternal Rekrutmen anggota Polri di Polda Papua (2010-sekarang), bekerja lepas dengan WVI sebagai fasilitator untuk pendampingan pada anak yang mengalami korban kekerasan seksual (2010-sekarang), asesor pada Pemda Propinsi Papua dan Papua Barat serta kabupaten/kota di Propinsi Papua dalam rangka lelang jabatan pada level Eselon II (2015-sekarang), asesor pada rekrutment ODP dan Job fit pada Bank Papua (2016 dan 2017), serta penanggungjawab Komunitas Matahari Papua Jayapura. Bisa dihubungi melalui alamat e-mail: marike_watofa@yahoo,com

Yulianto, Jony Eko, adalah pengajar mata kuliah Psikologi Sosial dan Metode Penelitian Kualitatif di Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya. Saat ini sedang berada di Auckland untuk menempuh pendidikan doktoral di bidang psikologi sosial di Massey University. Saat ini sedang mengembangkan minat penelitian mengenai perilaku antar kelompok dengan mengaitkan situasi politik di tingkat nasional dan kehidupan relasi perkawinan sehari-hari. Menjadi pengajar *(teaching fellow)* mata kuliah Psikologi Sosial untuk jenjang sarjana di Massey University. Menamatkan jenjang magister bidang psikologi sosial dari

Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan sarjana psikologi dari Universitas Airlangga di Surabaya. Selain menjadi dosen dan peneliti, juga menjadi kolumnis lepas di beberapa surat kabar nasional. Dosen yang tergabung dalam Himpunan Psikologi Indonesia dan Ikatan Psikologi Sosial ini telah menulis lebih dari 40 artikel opini tentang berbagai isu sosial dan politik di tanah air. Dapat dihubungi melalui alamat surel: jony.eko@ciputra.ac.id.

Yuliawati, Livia adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Ciputra sejak tahun 2008. Menamatkan studi doktoral di *The University of Hong Kon*g dalam bidang *Psychology of Religion,* dimana pengembangan tujuan hidup, karakter, dan karier menjadi area dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakatnya. Mengajar mata kuliah yang terkait dengan pengembangan diri, pengembangan karier, serta metode penelitian. Penelitian dan tulisan terkininya antara lain "The Role of Life Planning in Finding Purpose and Living Out Career Calling" (2019), "Psychological Changes During Faith Exit: A Three-Year Prospective Study (2018), dan "In Search of the Psychological Antecedents and Consequences of Christian Conversion: A Three-Year Prospective Study" (2017). Beberapa publikasi lainnya dalam bentuk buku adalah Pertolongan Pertama Pada Waktu Kuantitatif (P3K): Panduan Menggunakan *Software* JASP (2019), *Korean Wave*: Panduan Bijak Mengenal Budaya Korea (2014) yang merupakan karya dari perolehan Hibah Bersaing Dikti 2012-2013, serta 9 buku seri Membangun Karakter (2013). Korespondensi lebih lanjut dapat dilakukan melalui alamat *email*: livia@ciputra.ac.id.

Yuniarni, Desni, lahir di Pontianak, Desember 1979. Magister psikolog lulusan Universitas Padjajaran, Bandung. Saat ini mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Pontianak. Mata kuliah yang diampu seputar tema perkembangan pada anak usia dini dan *neuroscience.* Sangat aktif melakukan penelitian dan publikasi nasional maupun internasional dengan topik yang berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Banyak memberikan edukasi pada masyarakat baik melalui seminar, pelatihan, maupun tulisan dalam media populer tentang pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Juga aktif berorganisasi melalui berbagai asosasi profesi seperti Himpunan Psikologi Kalimantan Barat dan Asosiasi Guru Pendidikan Usia Dini. Bisa dihubungi melalui e-mail: desni.yuniarni@fkip.untan.ac.id; yuniarnidesni@ yahoo.com

Indeks

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y


HIMPSI



Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sebagai organisasi induk bagi mahasiswa, psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia terus berupaya hadir memberikan kontribusi pemikiran serta solusi bagi persoalan bangsa. Kompartemen 5 - Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa dan Kompartemen 6 - Riset dan Publikasi, adalah salah satu bagian di dalamnya yang berperan mengejawantahkan semangat tersebut melalui tulisan-tulisan di media ilmiah (Psikologi Indonesia) dan media populer (buku).

Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa merupakan terbitan berkala tematik yang berisi tulisan para psikolog, ilmuwan psikologi dan sahabat komunitas psikologi di Indonesia. Ditulis dari beragam khazanah pengetahuan dan pengalaman di dunia psikologi maupun disiplin lain yang digelutinya, disertai gagasan konkret untuk melaksanakannya. Edisi kali ini mengambil topik Psikologi dan Integrasi Bangsa

Tim Editor:

- A Supratiknya
- Tjipto Susana
- Juneman Abraham
- Rahkman Ardi

ISBN 978-602-96634-9-5

